INDONESIA EMAS 2045

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

SIPD

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

EKONOMI BERKELANJUTAN
KETAHANAN PANGAN
SDM UNGGUL

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 2026

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebebrapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5

(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPERIDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan barang dan jasa.
12. Sub Kegiatan adalah elemen terkecil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tertentu dalam urusan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiyaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon disingkat PPAS adalah program prioritas danpatokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2026 ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun
(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
   b. prioritas pembangunan daerah;
   c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
   d. program strategis nasional; dan
   e. kesepakatan Rakortegbang Nasional Tahun 2025;

(3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 4

(1) Pememrintah Daerah bersama DPRD menggunakan RKPD tahun 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2026 dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026.
(2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 dalam perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 5 Agustus 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

SYAHARUDDIN ALRIF

KEPALA BAPPERIDA	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 5 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ANDI RAHMAT SALEH

PARAF KOORDINASI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
KEPALA BAGIAN HUKUM		
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 yang diwarnai dengan perencanaan jangka panjang yang tertuang pada RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045. Penahapan RPJMD pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yaitu **"Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan melalui Penguatan Agrobisnis untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"**. Tahapan pembangunan tersebut memiliki makna bahwa untuk membangun sistem pangan yang tahan krisis dan berkelanjutan (cukup, aman, dan lestari untuk generasi sekarang dan mendatang) dilakukan dengan cara memperkuat sektor agrobisnis agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat Sidenreng Rappang.

Pengembangan ekonomi diarahkan pada sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan dan jasa; UMKM; dan pertanian, peternakan, dan perikanan. Sektor-sektor unggulan tersebut diharapkan dapat membuka dan menyerap lapangan kerja khususnya tenaga kerja lokal, serta memberikan dampak bagi perkembangan sektor-sektor lainnya. Berkembangnya perekonomian daerah yang diiringi dengan meningkatnya produktivitas daerah, terutama diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem dan pengangguran. Kualitas dan jangkauan infrastruktur yang handal terus menjadi perhatian pemerintah pada tahun ini, dan diharapkan mendorong daya saing daerah serta berdampak positif bagi investasi daerah.

Rumusan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 mengacu dan memperhatikan: (1) Target Indikator Makro Tahun 2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029; (3) RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-

2032; (4) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2025 Triwulan I; (5) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026; (6) Rancangan Kerangka Ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2026; serta (7) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Metode pelaksanaan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026, yaitu:

1. Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui implementasi pendekatan *pentahelix*, meliputi unsur perguruan tinggi dan peneliti yang berperan sebagai konseptor dengan melakukan identifikasi potensi daerah dan keterampilan sumber daya manusia yang mendukung peningkatan potensi pembangunan daerah. *Akademisi*, dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, serta teori-teori terbaru dan relevan dalam perencanaan pembangunan daerah. *Business*, meliputi unsur pengusaha/swasta yang berperan sebagai *enabler*. Sektor swasta merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sektor swasta dapat berperan sebagai *enabler* yang menghadirkan infrastruktur teknologi dan modal. Dengan adanya perubahan ke era digital maka dapat membantu pengembangan pembangunan daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. *Community*, meliputi unsur masyarakat yang berperan sebagai akselerator dan penerima manfaat. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, seluruh lapisan masyarakat dilibatkan, tidak terkecuali kaum wanita, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Dalam hal ini, komunitas juga berperan sebagai akselerator seiring dengan modal sosial yang dimiliki untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Komunitas juga bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat dalam keseluruhan proses dan memperlancar adopsi proses ekonomi. Selain itu, komunitas juga memiliki peran untuk mempromosikan produk atau layanan yang dimiliki suatu wilayah. *Government* atau pemerintah berperan sebagai regulator yang memiliki peran dalam menetapkan kebijakan dan peraturan serta melakukan pengawasan. Dalam hal ini, melibatkan semua jenis kegiatan, seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, undang-undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi, dan kemitraan publik-swasta. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengoordinasikan para pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pengembangan potensi suatu wilayah. *Media* bertindak sebagai *expander* yang berperan untuk mendukung publikasi dan promosi serta membuat *brand image*. Dalam menjalankan perannya media juga berfungsi sebagai perantara diseminasi informasi diantara pemangku kepentingan dan konsep pentahelix;

2. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten (APBD kabupaten), APBD Provinsi, APBN, obligasi daerah, dana masyarakat/umat, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah;
3. Penerapan *Dynamic Governance* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Pendekatan spasial dan a-spasial dalam wilayah pengembangan;
5. Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Satu Data Pembangunan Sidenreng Rappang;
6. Digitalisasi sistem perencanaan meliputi sistem Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (3), bahwa penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis *e-planning*.

Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan menerapkan konsep holistik yang komprehensif dari hulu sampai hilir pada setiap proses penyusunannya, sebagaimana Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

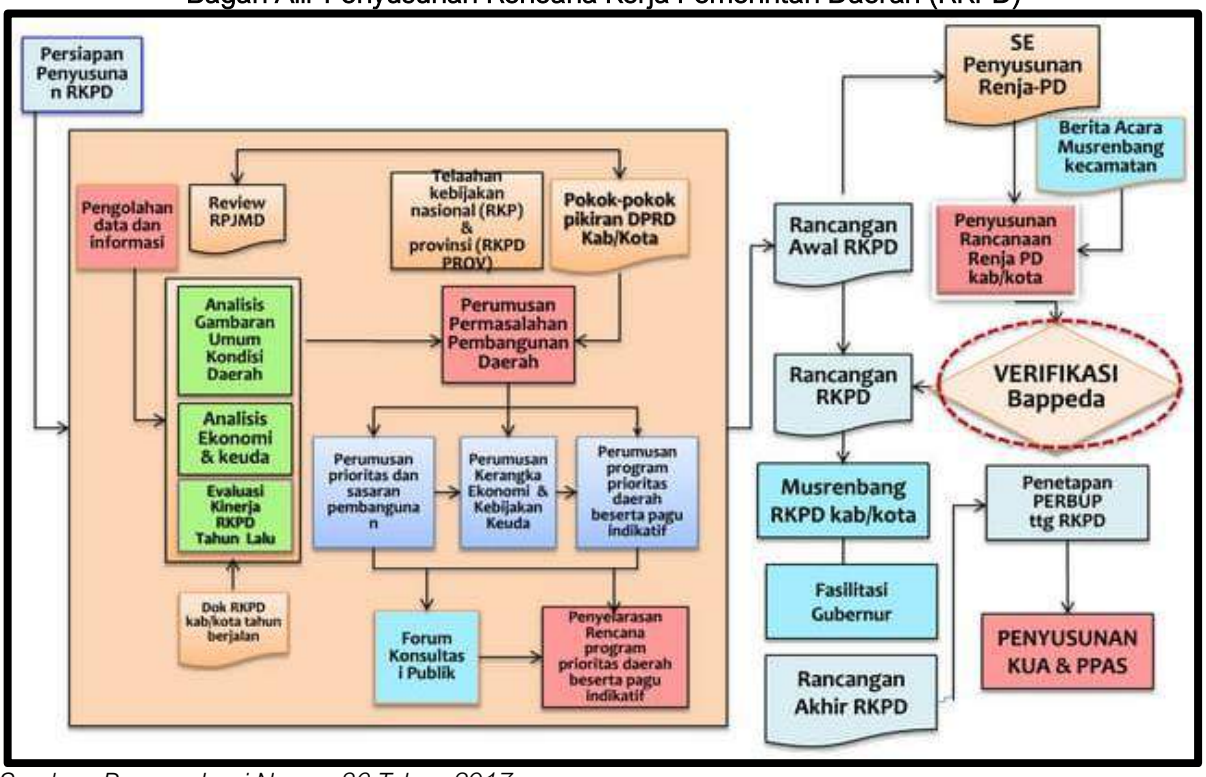

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas, tahapan penyusunan RKPD Tahun 2026 diawali dengan *Kick Off Meeting* perencanaan tahun 2026 yang dilaksanakan pada Bulan Desember tahun 2024, dilanjutkan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026 yang bertujuan untuk menjaring masukan dan saran penyempurnaan yang berasal dari berbagai *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta rencana anggarannya dengan tetap dapat menjaring masukan dan saran penyempurnaan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2026. Rangkaian ini kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten sebagai forum pertemuan antar pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dalam rangka membahas dokumen rancangan RKPD Tahun 2026. Pasca pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, Provinsi dan nasional maka dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2026 untuk penajaman dan penetapan daftar rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Sidenreng Rappang. Rancangan akhir RKPD Tahun 2026 yang telah disusun dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD Tahun 2026 melalui Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 berpedoman pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 yaitu **"Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera"**. Visi tersebut diuraikan menjadi:

Maju merujuk pada upaya untuk memajukan pembangunan daerah melalui berbagai aspek kehidupan di Kabupaten Sidenreng Rappang baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

Sejahtera menggambarkan cita-cita untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang secara menyeluruh melalui terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta terciptanya rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak. Pencapaian kesejahteraan masyarakat diimplementasikan dengan prinsip keberlanjutan yang memastikan bahwa pembangunan saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan, serta mempertahankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.

Untuk mencapai Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2029, maka ditetapkan 7 (tujuh) Misi pembangunan jangka menengah, sebagai berikut:

1. Membangun struktur perekonomian daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis menuju agroindustri pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang adaptif;
3. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua;
4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradat, dan religius;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital; dan
7. Mengembangkan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dokumen RKPD Tahun 2026 disusun dengan lebih implementatif melalui proses teknokratik, proses *bottom-up*, proses politik dan proses *top-down* yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Adapun capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 yaitu Pertumbuhan Ekonomi 4,05 persen; PDRB Perkapita 59,31 Juta Rupiah; Tingkat Kemiskinan 5,02 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 3,02 persen; Gini Rasio 0,319 poin; Indeks Pembangunan Manusia 74,81; dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 3,04 persen.

Secara umum, dokumen RKPD tahun 2026 mempunyai nilai penting, antara lain: merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029; acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026; dan menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 merujuk pada Peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lebih lanjut berdasarkan jangka waktu, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yakni 20 (dua puluh) tahun, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Adapun berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2026.

Sejalan dengan perencanaan di tingkat pusat tersebut, maka dokumen perencanaan daerah meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026; dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan hubungan dokumen perencanaan pusat dan dokumen perencanaan daerah sebagaimana Gambar 1.2

Gambar 1.2
Hubungan Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah

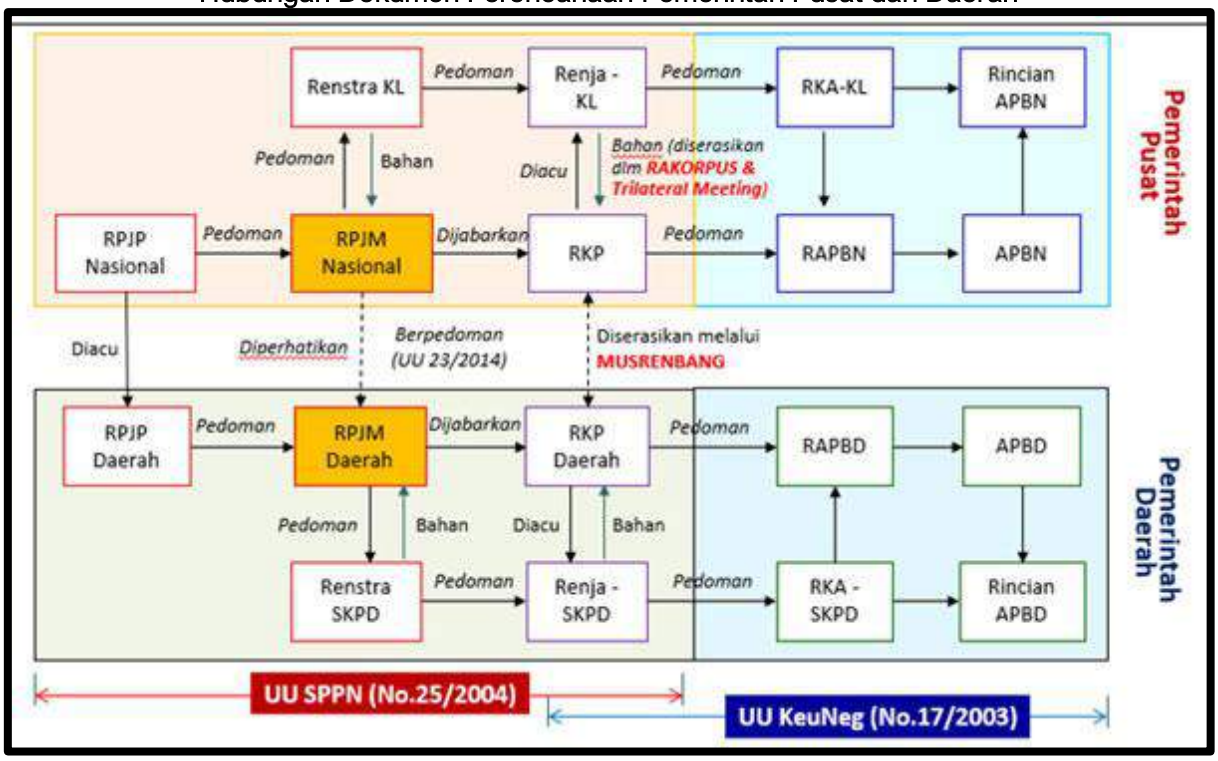

Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri 86 Tahun 2017.

Berdasarkan gambar di atas, RPJMN dan RPJMD merupakan 2 (dua) dokumen perencanaan jangka menengah yang saling berhubungan dan bersinergi. RPJMD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RKPD kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan program pembangunan daerah yang berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032. RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap perangkat daerah untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2026 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Selain itu, RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 memiliki kaitan yang erat dengan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). KLHS digunakan sebagai dasar untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah, termasuk RKPD, mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. KLHS membantu mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari rencana pembangunan dan merekomendasikan langkah-langkah mitigasi, sehingga RKPD dapat dirancang dengan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Adapun hubungan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.3
Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

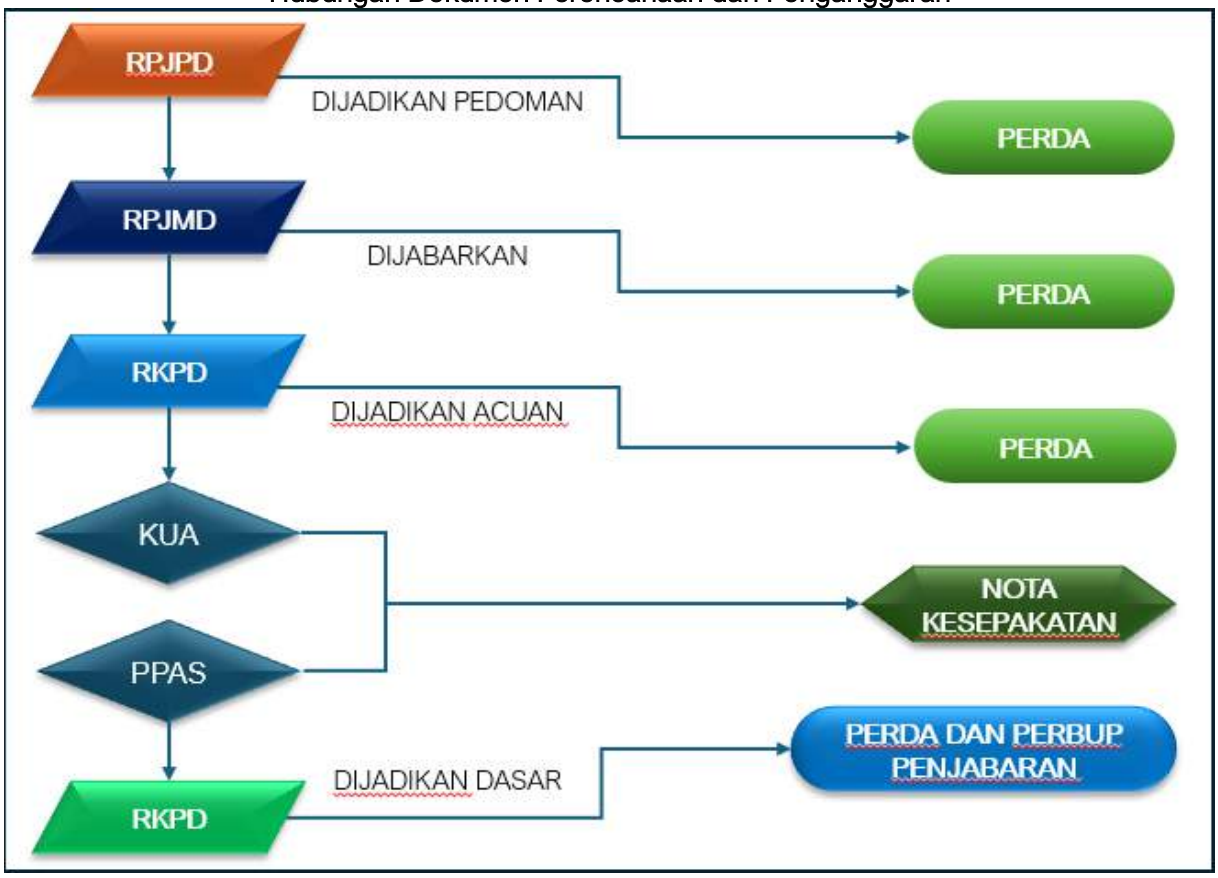

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Diolah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, dengan tujuan:

1. Pedoman perumusan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Perangkat Daerah;
2. Evaluasi pelaksanaan capaian di tahun 2024 dan sebagai acuan rencana di tahun 2026;
3. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2026;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian;
5. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun sebelumnya dan perkiraan tahun berjalan, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Pangkajene yang berjarak sekitar 183 Km dari Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, ke arah utara. Kabupaten Sidenreng Rappang terletak di antara $3^0$43' – $4^0$09' Lintang Selatan dan $119^0$41' – $120^0$10' Bujur Timur. Secara geografis, letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang

1. Wilayah Administrasi

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki luas 1.935,326 Km^2 atau 4,27 persen dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas 11 kecamatan dan 106 desa/kelurahan (38 kelurahan dan 68 desa). Selama 15 tahun terakhir, hanya terjadi penambahan satu desa di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu di Kecamatan Dua Pitue. Wilayah terluas adalah Kecamatan Pitu Riase yang mencapai 844,77 Km^2 atau hampir 45 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Wilayah tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang yang hanya memiliki luas 34,02 Km^2 atau kurang dari dua persen dari total luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Proporsi (%)	Jumlah Desa/Kelurahan	
				Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	8,17	3	7
2	Tellu Limpoe	10.320	5,48	6	3
3	Watang Pulu	15.131	8,03	5	5
4	Baranti	5.389	2,86	5	4
5	Panca Rijang	3.402	1,81	4	4
6	Kulo	7.500	3,98	-	6
7	Maritengngae	6.590	3,50	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	6,41	3	5

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Proporsi (%)	Jumlah Desa/Kelurahan	
				Kelurahan	Desa
9	Pitu Riawa	21.043	11,17	2	10
10	Dua Pitue	6.999	3,72	2	8
11	Pitu Riase	84.477	44,86	1	11
Jumlah		188.325	100,00	38	68

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Tabel 2.2
Ibukota Kecamatan dan Jarak Ke Ibukota Kabupaten Tahun 2024

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	Panca Lautang	Bilokka	15
2	Tellu Limpoe	Amparita	8
3	Watang Pulu	Uluale	7
4	Baranti	Baranti	15
5	Panca Rijang	Rappang	10
6	Kulo	Kulo	18
7	Maritengngae	Pangkajene	0
8	Watang Sidenreng	Empagae	5,4
9	Pitu Riawa	Otting	20
10	Dua Pitue	Tanru Tedong	25
11	Pitu Riase	Barukku	50

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

2. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi yakni wilayah daratan tertinggi adalah Kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), dan dataran terendah adalah Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0-25 mdpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, berbukit, dan terakhir adalah rawa danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritengngae, dan Dua Pitue, kondisi topografi 100 persen tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, dan Pitu Riase didominasi tanah bergunung.

Secara umum, kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh dataran rendah, selebihnya adalah perbukitan dan pegunungan (dataran tinggi). Secara rinci, kondisi kelerengan dapat dibagi ke dalam empat kategori, yaitu:

- Kondisi kelerengan 0-2% meliputi 42,80 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha. Kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan. Kecamatan yang mempunyai lereng 0–2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 persen dari total luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%).

- Kondisi kelerengan 2-15% meliputi 4,6 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 8.790 Ha. Kelerengan ini hanya tersebar pada lima kecamatan, yang dimanfaatkan untuk persawahan, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan. Kecamatan yang mempunyai lereng 2–15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha (26,23%), Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80%), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%), dan Tellu Limpoe seluas 715 Ha (8,13%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, Maritengngae, Watang Sidenreng, dan Dua pitue tidak terdapat jenis kelerengan ini.
- Kondisi kelerengan 15-40% meliputi 16,68 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31.414 Ha. Kelerengan ini hanya tersebar pada lima kecamatan, yang dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan. Kecamatan yang mempunyai lereng 15-40% paling luas adalah Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha (11,37%), Pitu Riawa seluas 3.456 Ha (11,00%), Tellu Limpoe seluas 2.244 Ha (7,14%), dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.658 Ha (5,28%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, Maritengngae, Watang Sidenreng, dan Dua Pitue tidak terdapat jenis kelerengan ini.
- Kondisi kelerengan >40% meliputi 34,31 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Kelerengan ini merupakan wilayah yang harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup. Kelerengan ini hanya tersebar pada lima kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, serta sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis). Kecamatan yang mempunyai lereng di atas 40 persen paling luas adalah Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu Limpoe seluas 2.524 Ha (3,91 %), Panca Lautang seluas 2.138 Ha (3,31%), dan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04 %).

a. Kondisi Tanah dan Batuan

Berdasarkan Peta Tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Bogor Tahun 1966, maka jenis tanah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas alluvial, regosol, grumusol, mediteran dan pedsolit. Jenis tanah alluvial meliputi 21,08% dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana yang paling luas terdapat pada Kecamatan Pitu Riawa yaitu 12.110 Ha dan yang paling sempit pada Kecamatan Panca Rijang yaitu 228 Ha. Bahkan ada 2 (dua) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu: Kecamatan Kulo dan Watang Pulu. Bentuk fisik tanah ini berupa dataran dan merupakan endapan tanah liat bercampur pasir halus hitam kelabu dengan daya penahan air cukup baik dan tersedia cukup mineral yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan. Jenis tanah alluvial terdiri dari alluvial hidromorf daerah kering, alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua, alluvial coklat kekelabuan.

Jenis tanah regosol seluas 19,74% atau 37.174 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Watang Pulu yaitu 14.322 Ha atau sekitar 38,52 % dari luas areal yang berjenis tanah regusol dan yang paling sempit terdapat di Kecamatan Panca Rijang seluas 1.033 Ha. Bahkan terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Pitu Riawa, Dua Pitue dan Pitu Riase. Jenis tanah Regusol kadang–kadang terdiri dari lapisan cadas terutama yang berpasir berwarna kelabu hitam sampai kelabu coklat, porositas sedang dan agak mudah kena erosi. Tanah regusol vulkanik baik untuk tanaman padi, tebu, tembakau, palawija, sayuran dan beberapa jenis tanaman perkebunan lainnya. Jenis tanah grumosol seluas 1,20% atau 2.251 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana yang terluas di Kecamatan Maritengngae yaitu 1.334 Ha atau sekitar 50,37% dari luas areal yang berjenis tanah grumusol, kemudian berturut-turut Kecamatan Watang Pulu seluas 809 Ha (35,94%) dan Kecamatan Tellu Limpoe seluas 308 Ha atau sekitar 13,69%, sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Jenis tanah mediteran seluas 11.416 Ha atau 6,06% dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana yang terluas di Kecamatan Panca Lautang seluas 5.121 Ha (44,85%) dari luas areal yang berjenis tanah mediteran, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riase yaitu 3.116 Ha atau sekitar 27,30%, Kecamatan Tellu Limpoe seluas 1.677 Ha (14,69%) dan kecamatan Pitu Riawa seluas 1.502 Ha (13,69%), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. Jenis tanah mediteran tersebut terdiri dari komplek mediteran coklat kekelabuan dan regosol komplek mediteran coklat regosol dan latosol. Jenis tanah podsolit seluas 94.891 Ha atau 50,39% dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana yang terluas di Kecamatan Pitu Riase seluas 76.934 Ha (81,07%) dari luas areal yang berjenis tanah podsolit, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riawa yaitu 7.431 Ha atau sekitar 7,83%, Kecamatan Kulo seluas 5.408 Ha (5,70%), Kecamatan Watang Sidenreng seluas 2.977 Ha (3,14%) dan Kecamatan Panca Rijang seluas 2.141 Ha (2,26%), sedangkan kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Tabel 2.3
Jenis Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Tanah
1	Panca Lautang	▪ Kompleks Mediteran Coklat regosal dan Retosol ▪ Regosol Coklat ▪ Alluvial Kekelabuan ▪ Alluvial Hidromorf

No	Kecamatan	Jenis Tanah
2	Tellu Limpoe	▪ Alluvial Kelabu Tua ▪ Alluvial Hidromorf ▪ Alluvial Colkat Kelabu ▪ Regosol Coklat
3	Watang Pulu	▪ Regosol Coklat Kelabu ▪ Grumesol Kelabu tua ▪ Regosol Coklat
4	Baranti	▪ Alluvial Kelabu Tua ▪ Regosol Kekelabuan ▪ Alluvial Hidromorf
5	Panca Rijang	▪ Alluvial Kelabu ▪ Padsolit Coklat ▪ Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & Regosol
6	Kulo	▪ Regosol coklat kekelabuan ▪ Podsolik merah kekuningan
7	Maritengngae	▪ Alluvial Kelabu Tua ▪ Alluvial Coklat Kelabu ▪ Grumesol Kelabu Tua ▪ Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & regosol ▪ Regosol Coklat Kelabuan
8	Watang Sidenreng	▪ Regosol Coklat Kelabuan ▪ Podsolik merah kekuningan ▪ Alluvial Coklat Kelabu
9	Pitu Riawa	▪ Alluvial Coklat Kelabu ▪ Alluvial Hidromorf
10	Dua Pitue	▪ Alluvial coklat kelabu ▪ Alluvial Hirdomorf ▪ Padsolit Merah kekuningan ▪ Kompleks padsolit coklat Kekuningan & regosol
11	Pitu Riase	▪ Kompleks Mediteran Coklat kekelabuan & regusol ▪ Podsolik coklat ▪ Padsolit Merah kekuningan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses geologi yang terjadi. Berdasarkan pengamatan peta geologi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Pertambangan tahun 1977, maka di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa peristiwa geologi. Peristiwa geologi yang ada dan mempunyai luasan yang paling luas adalah Alluvium dan Endapan Pantai (Qac) yang mencapai 29,86 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa geologi Batuan Gn Api besifat Basah (TPv) seluas 38.788 Ha (20,60%), Mulosa Sulawesi Sorasin (Tcm) seluas 30.638 Ha.

b. Kondisi Sungai

Di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 sungai yang melintasi berbagai kecamatan. Sungai terpanjang tercatat ada tiga sungai, yaitu Sungai Bilokka dengan panjang sekitar 20.000 meter, disusul Sungai Bila dengan panjang sekitar 15.100 meter dan Sungai Rappang dengan panjang sekitar 15.000 meter. Kecamatan Watang Pulu dan Dua Pitue memiliki jumlah aliran sungai terbanyak, yaitu delapan aliran sungai. Terdapat enam aliran sungai di Kecamatan Panca Lautang dengan panjang total 33.750 meter, Kecamatan Tellu Limpoe dengan panjang total 18.000 meter, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang total 39.000 meter, Kecamatan Baranti dengan panjang total 15.000 meter, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang total 19.550 meter, Kecamatan Kulo dengan panjang total 25.700 meter, Kecamatan Maritengngae dengan panjang total 5.000 meter, Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang total 7.500 meter, dan Kecamatan Dua Pitue dengan panjang total 68.460 meter, yang merupakan kecamatan dengan aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.4
Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai Menurut Kecamatan
di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (M)	Lebar (M)	Kedalaman (M)
1.	Panca Lautang	- Bilokka	20.000	22	9
		- Lokabatu	2.000	6	3
		- Pape	2.000	2	3
		- Cakkarella	1.500	2	2
		- Bengkulu	5.000	6	2.5
		- Sessanriu	3.250	13	2.5
2.	Tellu Limpoe	- La Toling	5.000	5	2
		- Pemantingan	7.000	7	2.5
		- Watang Lowa	6.000	3	1.5
3.	Watang Pulu	- BangkaE	5.000	10	8
		- CakkaloloE	5.000	10	5
		- AlekarajaE	11.000	8	3
		- Lompengan	5.000	8	2.5
		- DataE	3.000	6	2.5
		- Pabbaresseng	4.000	5	2.5
		- Polojiwa	3.000	4	2.5
		- Batu Pute	3.000	3	3
4.	Baranti	- Rappang	15.000	30	5
5.	Panca Rijang	- Rappang	10.000	25	8
		- Poka	2.500	5	7
		- Tellang	2.550	5	7
		- Taccipi	4.500	6	5
6.	Kulo	- Pangkiri	4.200	10	8
		- Kulo	7.500	7	5
		- AnrelliE	2.000	7	6
		- Anyuara	4.200	8	5

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (M)	Lebar (M)	Kedalaman (M)
		- Cinra Angin	7.500	8	5
7.	Maritengngae	- Takkalasi	5.000	8	3
8.	Dua Pitue	- Bila	15.100	70	4
		- Baramasih	11.750	50	5
		- Betao	10.085	50	3
		- Tanru Tedong	4.250	100	5
		- Kalempang	6.375	80	4
		- Lancirang	8.150	10	3
		- Samallangi	2.500	8	2
		- Loka	10.250	25	3
9.	Pitu Riawa	- AnabannaE	5.000	7	3
		- Banjara	2.500	6	2.5

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

3. Iklim

Berdasarkan klasifikasi Shcmidt dan Fergusson, terdapat tiga macam iklim di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tipe Pertama adalah iklim tipe C, yaitu iklim yang bersifat agak basah dimana jumlah bulan kering rata-rata kurang dari tiga bulan dan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Bulan basah adalah jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm. Bulan kering pada umumnya terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus, sedangkan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Wilayah yang termasuk iklim ini terletak sebelah utara bagian timur mendekati Pegunungan Lantimojong di Kecamatan Pitu Riase.

Tipe Kedua adalah iklim tipe D, artinya bersifat sedang dimana jumlah bulan kering rata-rata 3-4 bulan dan berlangsung pada Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus. Daerah yang termasuk iklim ini terletak di sebelah timur dan bagian tengah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, Maritengngae, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian barat) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian barat sebelah utara).

Tipe Ketiga adalah iklim tipe E, artinya yang bersifat agak kering, dimana jumlah bulan kering rata-rata 4-6 bulan. Bulan-bulan kering terjadi pada Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah barat dan sebagian sebelah selatan Kabupaten Sidenreng Rappang. Kecamatan yang termasuk di dalam iklim ini adalah Kecamatan Baranti, Tellu Limpoe, Panca Lautang, sebagian Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, Maritengngae, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian timur) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian barat sebelah timur).

Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat tujuh (7) Station Penakar Hujan (SPH) untuk menakar curah hujan antara lain di Tanru Tedong, Rappang, Amparita, Bilokka, Baranti, Lawawoi, Pangkajene BPP Sereang. Penyebaran curah hujan yang berbeda menyebabkan pola penyebaran tipe iklim yang berbeda pula. Pada daerah yang mempunyai iklim C, rata-rata curah hujan setiap tahun lebih dari 2.500 mm dan hari hujan bulanan lebih dari 10 hari. Curah hujan

tertinggi dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama dijumpai pada Bulan Desember, Januari, Februari dan kemudian menurun mencapai nilai minimun sekitar bulan Agustus dan September.

Pada daerah yang mempunyai iklim D, jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2.000 mm dengan jumlah curah hujan bulanan berkisar 8-16 hari. Pada daerah yang mempunyai iklim tipe E, jumlah curah hujan dapat bervariasi. Curah hujan tersebut mencapai kurang dari 1.600 mm dan jumlah curah hujan berkisar antara 5-8 hari setiap bulan.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah, dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas Sawah, Pemukiman, Kebun Campur, Ladang, Kolam/Tambak/Rawa, Danau/Sungai, Perkebunan Rakyat, Hutan, Lapangan Olahraga, Semak/Belukar.

Penggunaan lahan didominasi oleh Kawasan Hutan dengan luas 82.669,05 Ha atau mencapai 43,89% dari total luas wilayah Kabupaten sebesar 188.325 Ha, dan Persawahan dengan luas 38.989,58 Ha atau sebesar 20,70% dari luas kabupaten. Khusus untuk kawasan permukiman dengan luas 5.989,95 (3,18%) dengan luas permukiman yang paling besar berada di Kecamatan Maritengngae dengan luas 1.154,57 Ha dan yang paling kecil Kecamatan Baranti dengan luas 282,58 Ha. Secara lengkap struktur penggunaan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Peruntukan Kawasan Budidaya	Luas lahan (Ha)
1	Sawah	38.989,58
2	Permukiman	5.989,95
3	Kebun Campur	22.403,32
4	Ladang/Tegalan	2.487,02
5	Kolam/Tambak/Rawa	265,10
6	Danau/Sungai	5.867,86
7	Perkebunan Rakyat	9.323,65
8	Hutan	82.669,05
9	Lapangan Olahraga	5,83
10	Semak/Belukar	20.323,64
Total		188.325,00

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2024

Kebijakan penataan ruang dikembangkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah yang mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, melalui upaya pengaturan keseimbangan kawasan lindung (daerah aliran sungai, daerah

resapan air, ruang terbuka hijau, hutan lindung dll), sistem pusat-pusat permukiman (termasuk didalamnya permukiman skala besar), serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah (sistem transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, sistem pembuangan limbah) dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor yang berkepentingan dan dampak merugikan pada masyarakat luas. Selain itu perlu dipertimbangkan kondisi pasar atau trend yang lagi berkembang di masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri penataan ruang banyak dibentuk oleh kondisi pasar.

Secara fungsional pola pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan yang dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan jenis kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan ke depan pada kawasan pusat-pusat kegiatan.

Penetapan sistem perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti 1) Kebijakan pengembangan sistem perkotaan nasional dan regional, 2) kondisi eksisting sistem perkotaan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ada saat ini, 3) sistem jaringan prasarana wilayah yang ada yang melayani pergerakan antar intra dan inter wilayah, dan 4) interaksi fungsional antar pusat-pusat kegiatan dengan daerah pelayanannya.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

   Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Sidenreng Rappang di arahkan di Kecamatan Maritengngae.

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

   Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Sidenreng Rappang Meliputi:

   1 PPK Baranti di Kecamatan Baranti
   2 PPK Tanru Tedong di Kecamatan Duapitue
   3 PPK Kulo di Kecamatan Kulo
   4 PPK Bilokka di Kecamatan Panca Lautang

5 PPK Rappang di Kecamatan Panca Rijang

6 PPK Barukku di Kecamatan Pitu Riase

7 PPK Otting di Kecamatan Pitu Riawa

8 PPK Amparita di Kecamatan Tellu Limpoe

9 PPK Lawawoi di Kecamatan Watang Pulu

10 PPK Empagae di Kecamatan Watang Sidenreng.

Gambar 2.1
Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang

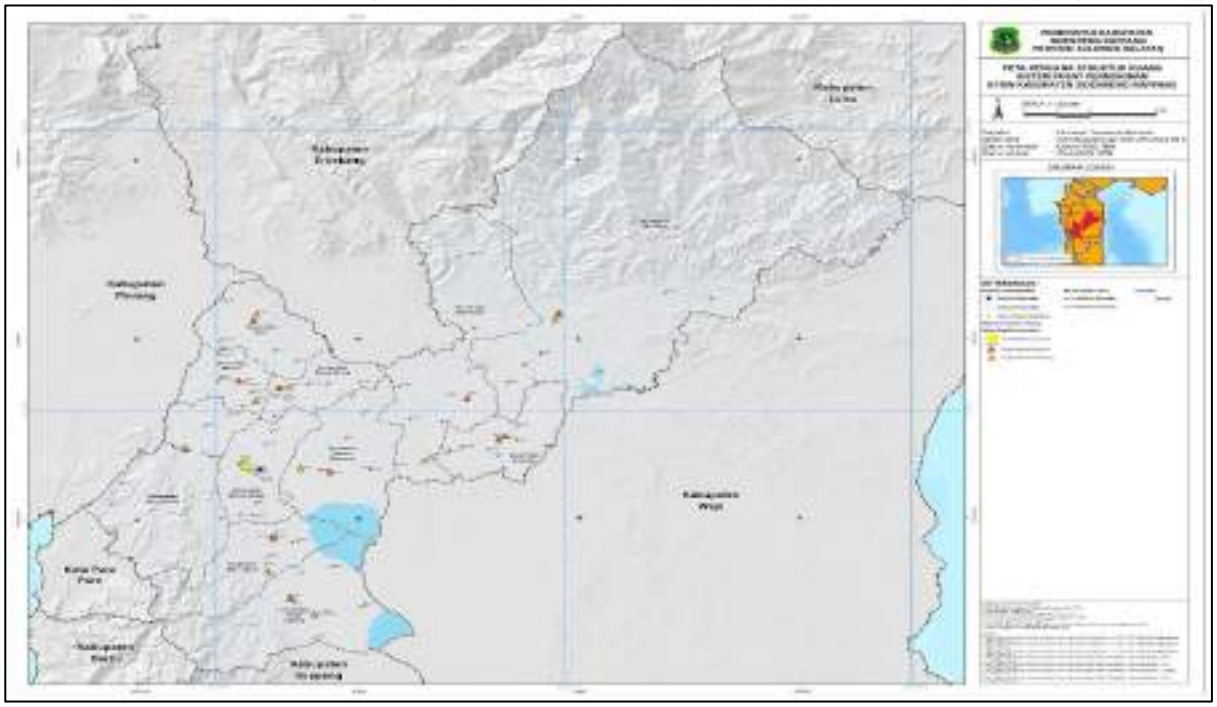

Sumber: Data diolah Tim, 2025

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

   Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Sidenreng Rappang di arahkan di :

   1. Kecamatan Baranti
   2. Kecamatan Duapitue
   3. Kecamatan Kulo
   4. Kecamatan Panca Lautang
   5. Kecamatan Panca Rijang
   6. Kecamatan Pitu Riase
   7. Kecamatan Pitu Riawa
   8. Kecamatan Tellu Limpoe
   9. Kecamatan Watang Pulu
   10. Kecamatan Watang Sidenreng

4. Kawasan Peruntukan Pertanian

a. Kawasan Tanaman Pangan (P-1)

Kawasan tanaman pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. Untuk lebih jelasnya terkait kawasan tanaman pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Baranti	3.189,46
2	Kecamatan Duapitue	6.286,57
3	Kecamatan Kulo	5.617,76
4	Kecamatan Maritengngae	5.915,87
5	Kecamatan Panca Lautang	7.404,56
6	Kecamatan Panca Rijang	3.531,09
7	Kecamatan Pitu Riase	6.529,55
8	Kecamatan Pitu Riawa	10.548,76
9	Kecamatan Tellu Limpoe	4.385,95
10	Kecamatan Watang Pulu	8.027,12
11	Kecamatan Watang Sidenreng	10.058,20
Total		71.494,87

Sumber : Dokumen RTRW, Tahun 2022

b. Kawasan Holtikultura (P-2)

Kawasan Holtukultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Untuk lebih jelasnya terkait kawasan holtikultura di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Kawasan Holtikultura di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Duapitue	274,07
2	Kecamatan Kulo	49,06
3	Kecamatan Maritengngae	47,58
4	Kecamatan Panca Lautang	2.505,72
5	Kecamatan Panca Rijang	118,90
6	Kecamatan Pitu Riase	1.192,50
7	Kecamatan Pitu Riawa	1.083,53
8	Kecamatan Tellu Limpoe	962,88
9	Kecamatan Watang Pulu	2.562,41
10	Kecamatan Watang Sidenreng	316,86
Total		9.113,51

Sumber : Dokumen RTRW, Tahun 2022

c. Kawasan Perkebunan (P-3)

Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan tidak lagi sekedar memberikan bantuan untuk perbaikan tanaman melalui kegiatan perluasan, peremajaan dan intensifikasi. Namun untuk sebuah tujuan yang jelas yakni pengembangan kawasan perkebunan terpadu yang bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya terkait kawasan perkebunan di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Kawasan Perkebunan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Duapitue	100,49
2	Kecamatan Kulo	212,53
3	Kecamatan Pitu Riase	12.815,21
4	Kecamatan Pitu Riawa	3.885,07
5	Kecamatan Watang Pulu	1.021,22
Total		18.034,51

Sumber : Dokumen RTRW, Tahun 2022

d. Kawasan Peternakan (P-4)

Kawasan peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir. Kawasan peternakan pada saat ini relatif semakin sulit dijumpai di tingkat kabupaten, karena kompetisi penggunaan lahan semakin tinggi dan dukungan pemerintah daerah yang terbatas. Di lain pihak, kebutuhan dan konsumsi daging semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan usia serta kesejahteraan penduduk yang semakin baik. Pada saat ini diperkirakan masih terdapat sekitar 2 juta ha luas lahan padang penggembalaan dan hijauan makan ternak sebagai sumber kawasan budidaya peternakan yang dapat dijadikan dan ditingkatkan menjadi kawasan peruntukan peternakan.

Klasifikasi Kawasan Peruntukan Perternakan dapat dibedakan berdasarkan: (1) Komoditas yang terdiri atas kawasan sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam buras, itik, babi dan ayam ras petelur dan pedaging. (2) Sistem Usaha Peternakan yang meliputi sistem ekstensifikasi (kawasan pastura/padang penggembalaan) dan Sistem Intensifikasi (kawasan usaha peternakan).

Kawasan pastura terdiri atas kawasan pengembalaan umum dan kawasan rand. Kawasan ranci sebagai kawasan peternakan yang sama dengan kawasan umum hanya pada umumnya dimiliki oleh sebuah badan usaha, sudah memanfaatkan teknologi sistem pembenian pakan yang balk dan pemagaran kawasan. Sistem intensifikasi (kawasan usaha peternakan). Sistem intensifikasi adalah kawasari peternakan dalam suatu hamparan lahan dan umumnya meliputi satu jenis ternak yang dimiliki oleh perorangan, kelompok atau badan usaha peternakan (KUNAK) dan yang sudah mengarah kepada indüstrialisasi disebut kawasan industni peternakan (KINAK). Untuk lebih jelasnya terkait kawasan peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Kawasan Peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Baranti	54,01
2	Kecamatan Duapitue	1,58
3	Kecamatan Kulo	195,18
4	Kecamatan Maritengngae	158,53
5	Kecamatan Panca Lautang	28,48
6	Kecamatan Panca Rijang	74,30
7	Kecamatan Pitu Riase	6.594,33
8	Kecamatan Pitu Riawa	45,43
9	Kecamatan Tellu Limpoe	18,68
10	Kecamatan Watang Pulu	75,10
11	Kecamatan Watang Sidenreng	23,98
Total		7.269,61

Sumber : Dokumen RTRW, Tahun 2022

5. Kawasan Perikanan
   a. Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2)

      Kawasan perikanan budi daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada. Kawasan Perikanan budi daya di Kabupaten Sidenreng Rappang di rencanakan di Kecamatan Maritengngae seluas 7,39 ha.
6. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)
   a. Kawasan Pertambangan Mineral (MN)
      1) Kawasan Pertambangan mineral bukan logam (MNL)

      Kawasan pertambangan mineral bukan logam adalah Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam. Untuk lebih jelasnya terkait

kawasan pertambangan mineral bukan logam di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Kawasan Pertambangan Mineral bukan logam di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Duapitue	15,97
2	Kecamatan Panca Lautang	9,55
3	Kecamatan Pitu Riase	0,23
4	Kecamatan Pitu Riawa	6,43
Total		32,18

Sumber : Dokumen RTRW, Tahun 2022

2) Kawasan Pembangkitan tenaga listrik (PTL)

Kawasan Pembangkitan tenaga listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik. Kawasan pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Sidenreng Rappang di rencanakan di Kecamatan Watang Pulu seluas 265,45 Ha.

7. Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Untuk lebih jelasnya terkait kawasan peruntukan industri di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Baranti	9,56
2	Kecamatan Duapitue	4,27
3	Kecamatan Kulo	0,46
4	Kecamatan Maritengngae	11,06
5	Kecamatan Panca Lautang	18,65
6	Kecamatan Panca Rijang	5,69
7	Kecamatan Pitu Riase	3,54
8	Kecamatan Pitu Riawa	29,00
9	Kecamatan Tellu Limpoe	3,67
10	Kecamatan Watang Pulu	3,71
11	Kecamatan Watang Sidenreng	20,31
Total		109,92

Sumber : Dokumen RTRW, Tahun 2022

8. Kawasan Pariwisata (W)

Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Pentingnya sektor pariwisata dalam perekonomian suatu daerah harus disertai dengan upaya agar sektor ini tetap tumbuh dan berkembang, dimana dalam hal ini tidak terlepas dari peran penting sektor transportasi. Transportasi memiliki peran yang penting dalam pariwisata, karena

membawa wisatawan dari tempat asal menuju tempat wisata, dan membawa kembali wisatawan ke tempat asal mereka. Untuk lebih jelasnya terkait kawasan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Kawasan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Kulo	2,04
2	Kecamatan Pitu Riase	51,37
3	Kecamatan Watang Pulu	16,03
Total		69,44

Sumber : Dokumen RTRW, Tahun 2022

Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki beberapa kawasan strategis yang tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut. Untuk lebih jelasnya terkait penetapan kawasan strategis di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada pembahasan berikut:

1. Penetapan Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Penetapan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi Penetapan kawasan strategis ini dimaksudkan untuk mengakomodir segala potensi sumber daya alam dan buatan di masing-masing kawasan yang dapat dijadikan sebagai sektor unggulan dan mampu mendukung serta mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan secara keseluruhan sehingga tidak ada kawasan yang mengalami pertumbuhan ekonomi lambat atau stagnan (tertinggal). Kawasan strategis ini bertujuan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis kabupaten dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kabupaten. Dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, penetapan kawasan strategis dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi direncanakan:

a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan pengembangan peternakan Sidenreng Rappang-Pinrang-Enrekang;
b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Agribisnis Terpadu Duapitue, Pitu Riawa dan Pitu Riase.
c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Agribisnis Terpadu Maritengngae, Watang Sidenreng, Panca Rijang, Baranti, Kulo dan Watang Pulu.
d. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Cepat Tumbuh Baranti
e. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Pariwisata Buatan Watang Pulu.

2. Penetapan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial-Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya Penetapan kawasan strategis ini dimaksudkan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman budaya sebagai hasil karya cipta budaya sosial masyarakat lokal yang menunjukkan jati diri/penanda budaya kabupaten sekaligus untuk menghargai peninggalan budaya yang diwariskan oleh peradaban masa lalu. Kawasan ini meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis kabupaten dengan sudut kepentingan

sosial budaya daerah. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Pariwisata Budaya Maritengngae, Panca Rijang dan Watang Pulu.

3. Penetapan Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, Penetapan kawasan strategis ini dimaksudkan untuk melindungi dan melestarikan ekosistem flora/fauna sebagai potensi keanekaragaman hayati, perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro dan tata guna air yang mampu mencegah bencana alam akibat kerusakan lingkungan. Kawasan tersebut meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian dan aksi masyarakat akan kualitas lingkungan hidup.

Penetapan kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Danau Sidenreng di Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Tellu Limpoe dan Kecamatan Watang Sidenreng.
b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Panca Lautang.
c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Tellu Limpoe dan Kecamatan Watang Pulu.
d. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Tertinggal Pitu Riase di Kecamatan Pitu Riase.

4. Penetapan Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang berupa Kawasan Eksploitasi Panas Bumi Tellu Limpoe di Kecamatan Tellu Limpoe.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuan nya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Dalam menentukan daya dukung kawasan perlu melibatkan banyak aspek, karena sangat bersifat kompleks yang melibatkan banyak faktor dalam menggambarkan interaksi antara kegiatan dengan ekosistem. Misalnya intensitas penyebaran dalam ruang dan waktu serta tujuan. Dengan

kata lain dalam penentuan daya dukung suatu kawasan harus mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

Pengertian daya dukung dan daya tampung lingkungan menurut UU 23/1997. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Pada laporan ini, kajian daya dukung Kabupaten Sidenreng Rappang akan disajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem. Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan pada kemampuan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sementara untuk jasa ekosistem ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air di wilayah Kabupaten dengan pendekatan jasa ekosistem. Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat per akaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa Unit.

Tabel 2.13
Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2024

No	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang diperkenankan
1	I	Semua jenis penggunaan lahan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi(hanya Psd)
4	IV	Pt, semua jenis pengembalaan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis pengembalaan (Pgi, Pgsd, Pgt), semuajenis hutan
6	VI	Pgsd, Pgt, semua jenis hutan
7	VII	Pgt, hutan.
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Sumber: Klingbiel dan Montgomery (1961, diringkas) dan FenTon (2014)
Keterangan: Psi: Pertanian sangat intensif; Pi: Pertanian intensif; Psd: Pertanian intensif sedang; Pt: Pertanian terbatas; Pgi: Pengembalaan intensif; Pgsd: Pengembalaan sedang; Pgt: Pengembalaan terbatas.

Penjelasan kelas kemampuan lahan sebagai berikut: Kelas I, tanah pada kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki resiko kerusakan yang kecil. Jenis tanah pada kelas ini

sangat baik dan dapat diusahakan untuk segala jenis pertanian. Tanah ini umumnya relatif datar, bahaya erosi kecil, solum tanah dalam, drainase baik, mudah diolah, penahan air yang baik dan responsive terhadap pemupukan.

Kelas II, tanah pada kelas ini mempunyai sedikit faktor pembatas yang dapat mengurangi pilihan penggunaan nya atau membutuhkan tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi Tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran – saluran air.

Kelas III, tanah pada kelas ini mempunyai lebih banyak faktor pembatas daripada tanah pada kelas II, dan apabila digunakan untuk usaha pertanian akan memerlukan tindakan konservasi yang serius, yang umumnya lebih sulit baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharaan nya. Faktor – faktor pembatas pada lahan kelas ini dapat berupa lereng yang agak miring, cukup peka terhadap erosi, drainase jelek, permeabilitas tanah sangat lambat, solum dangkal, kapasitas menahan air rendah, kesuburan dan produk aktifitas tanah rendah dan sulit untuk diperbaiki.

Kelas IV, tanah pada kelas ini merupakan faktor pembatas yang lebih besar dari pada kelas III, sehingga jenis penggunaan / jenis tanaman yang diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curam (15% - 30%), sehingga sangat peka terhadap erosi, drainase nya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah.

Kelas V, tanah pada kelas ini terletak pada tempat yang datar/ agak cekung, selalu basah / tergenang air, atau terlalu banyak batu di atas permukaan tanah. Karena itu tanah pada kelas ini tidak sesuai untuk usaha pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk ditanami dengan vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak/ dihutankan.

Kelas VI, tanah pada kelas ini terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/ telah mengalami erosi yang sangat berat/ mempunyai solum yang sangat dangkal. Tanah pada kelas ini tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen.

Kelas VII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curang, telah tererosi berat, solum sangat dangkal dan berbatu. Karena itu tanah ini hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi permanen.

Kelas VIII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang sangat curam, permukaan sangat kasar, tertutup batuan lepas/ batuan singkapan/ tanah nda pasir pantai. Karena itu tanah pada

kelas ini dibiarkan pada keadaan alami dibawah vegetasi alami (cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi).

Tabel 2.14
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2024

Kelas	Luas (Ha)	Presentase (%)
II	15.464,31	7,96
IV	29.700,45	15,29
V	60.625,94	31,21
VI	88.451,08	45,54

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023

Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasilnya sebesar 45,54% luas lahan kelas VI, 31,21% luas lahan kelas V, 15,29% luas lahan kelas IV, dan 7,96 % luas lahan kelas II. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih sesuai untuk vegetasi permanen, terletak pada lereng yang cukup curam, sehingga sangat peka terhadap erosi, drainase nya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah, penggembalaan terbatas dan semua jenis hutan, selain itu juga didominasi untuk kegiatan pertanian terbatas, serta sangat sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan faktor pembatas, lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya terlalu banyak batu di atas permukaan tanah dan cenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air. Terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat. Hanya cocok untuk padang rumput, hutan produksi terbatas tanpa adanya perlindungan. Sebaiknya dibiarkan secara alami. Oleh sebab itu, tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran–saluran air.

Tabel 2.15
Kelas Kemampuan Lahan di Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

Kecamatan	Kelas			
	II	IV	V	VI
Baranti			4.645, 95	
Duapitue		1.187,39	6.918,59	
Kulo	2.307,71	1.415,38	4.407,63	
Maritengngae	7,99		6.635,06	
Panca Lautang	739,52	1.310,63	7.085,73	5.928,66
Panca Rijang	2.334,44		2.168,60	
Pitu Risae	972,60	16.078,40	4.990,94	67.571,25
Pitu Riawa	2.207,91	5.962,28	6.766,69	6.256,82
Tellulimpoe	1.765,08	175,90	3.297,25	4.112,82

Kecamatan	Kelas			
	II	IV	V	VI
Watang Pulu	1.242,62	3.570,47	7.331,23	4.581,53
Watang Sidenreng	3.886,44		6.378,27	
Total	15.464,31	29.700,45	60.625,94	88.451,08

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023

Daerah pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Watang Sidenreng (3.886,44 ha), Kecamatan Pancarijang (2.334,44 ha), Kecamatan Kulo (2.307,71 ha) dan Kecamatan Pituriawa (2.207,91 Ha). Sedangkan untuk sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak sesuai dijadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen. Beberapa wilayah kecamatan juga diarahkan untuk peruntukan cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi seperti Kecamatan Pituriase dan sebagian di Kecamatan Pituriawa.

Pada tahap perhitungan ketersediaan air, data yang digunakan adalah Nilai Indeks Jasa Lingkungan dalam sistem grid dan data potensi ketersediaan air untuk satu kesatuan Wilayah. Satuan Wilayah untuk identifikasi potensi air pada penghitungan daya dukung nasional dan pulau adalah Wilayah Sungai. Untuk dapat menghitung potensi ketersediaan air Kabupaten perlu diidentifikasi terlebih dahulu Wilayah Sungai yang tercakup didalam wilayah administrasinya. Ketersediaan air pada suatu kawasan perkotaan dapat dihitung menggunakan rumus:

Ketersediaan Air = Debit Andalan Sungai + Debit Air Pasokan dari Luar Wilayah + Potensi Air Tanah + Debit Sumber Air Lainnya

Keterangan:
- Satuan dalam m3 /detik;
- Potensi air tanah adalah laju resapan air hujan pada area tersebut (m3 /detik);
- Potensi air tanah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\textbf{Potensi Air Tanah} = \Sigma A_i \times C_i \times I$$

Keterangan:
- Satuan dalam m3 /detik

Ai = Luas lahan untuk jenis penggunaan lahan i (m²)
Ci = Koefisien resapan air untuk jenis penggunaan lahan i
I = Intensitas hujan (m/detik)

Tabel 2.16
Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan Tahun 2023, 2033 dan 2043 (M3)

Kecamatan	Status Air Tahun 2024 (Juta M3/tahun)		
	Ketesediaan 2023	Kebutuhan 2033	Kebutuhan 2043
Baranti	37.990.316	921.110	1.095.422
Dua Pitue	72.528.919	1.279.109	1.537.315
Kulo	71.278.380	999.259	1.173.874
Maritengngae	63.435.353	1.642.594	1.976.098
Panca Lautan	109.376.899	1.610.107	1.904.688
Panca Rijang	41.637.139	765.504	915.754

Kecamatan	Status Air Tahun 2024 (Juta M3/tahun)		
	Ketesediaan 2023	Kebutuhan 2033	Kebutuhan 2043
Pitu Raise	603.731.745	2.613.946	2.627.770
Pitu Riawa	199.048.658	2.037.485	2.375.611
Tellu Limpoe	61.631.280	1.132.229	1.340.798
Watang Pulu	132.421.804	2.159.093	2.373.365
Watang Sidenreng	101.724.964	2.050.013	2.381.314
Total	1.494.805.455	17.210.448	19.702.008

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappan Tahun 2023

Berdasarkan hasil kajian tim KLHS menunjukan bahwa ketersediaan air Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2023 masih sangat tinggi, dan hasil proyeksi kebutuhan air Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2043 mencapai 19.702.008 m^3.

Grafik 2.1
Grafik Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan Tahun 2023, 2033 dan 2043

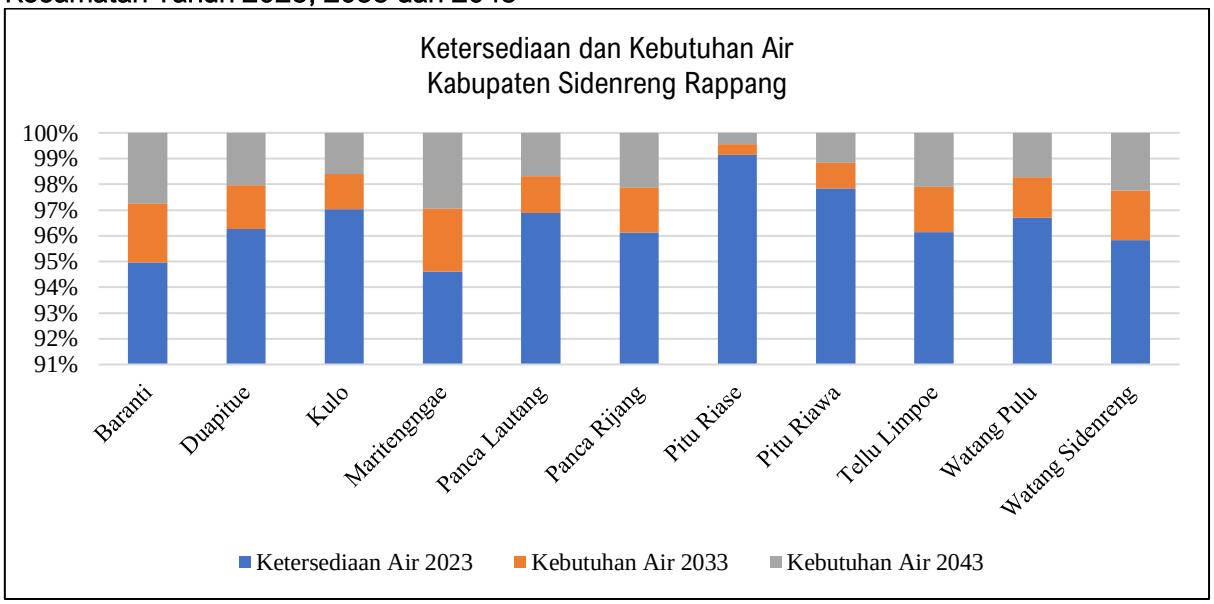

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan ketersediaan air tersebut diperoleh ketersediaan air tiap Kecamatan pada tahun 2023 menunjukan data ketersediaan yang sangat tinggi mencapai 1.494.805.455 M^3. Sedangkan kebutuhan air pada masing-masing kecamatan pada tahun 2033 dan tahun 2043 mencapai 17.210.448 m^3 dan 19.702.008 M^3. Selanjutnya nilai potensi air tersebut terdistribusikan dalam system grid berdasarkan indeks jasa lingkungan penyedia air Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan asumsi bahwa semakin tinggi nilai indeks di wilayah tersebut, maka semakin besar sebaran potensi ketersediaan air di wilayah tersebut.

Nilai ambang batas ketersediaan air Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2043 mencapai 1.494.349.390 M^3. Maka dapat di pastikan bahwa ketersediaan air Kabupaten Sidenreng Rpang sampai 20 tahun kedepan akn bernilai surplus. Lebih detailnya dapat diuraikan secara jelas pada tabel berikut ini:

Tabel 2.17
Ketersediaan Air Tahun 2023, Nilai Ambang Batas Tahun 2043 dan Kebutuhan Air Tahun 2043 Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan

Kecamatan	Ketersediaan Air 2023	Nilai Ambang Batas Air 2043	Kebutuhan Air 2043
Baranti	37.990.316	37.964.959	1.095.422
Duapitue	72.528.919	72.493.333	1.537.315
Kulo	71.278.380	71.251.207	1.173.874
Maritengngae	63.435.353	63.389.610	1.976.098
Panca Lautang	109.376.899	109.332.809	1.904.688
Panca Rijang	41.637.139	41.615.941	915.754
Pitu Riase	603.731.745	603.670.917	2.627.770
Pitu Riawa	199.048.658	198.993.667	2.375.611
Tellu Limpoe	61.631.280	61.600.243	1.340.798
Watang Pulu	132.421.804	132.366.865	2.373.365
Watang Sidenreng	101.724.964	101.669.841	2.381.314
Total	1.494.805.455	1.494.349.390	19.702.008

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023

Hasil proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) Kecamatan yang diperkirakan kebutuhan airnya sudah melebihi ketersediaan airnya, dan Kecamatan Pitu Riase yang diperkirakan belum terlampaui ketersediaan airnya.

Grafik 2.2
Ketersediaan Air Tahun 2023, Nilai Ambang Batas Tahun 2043 dan Kebutuhan Air Tahun 2043 Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan

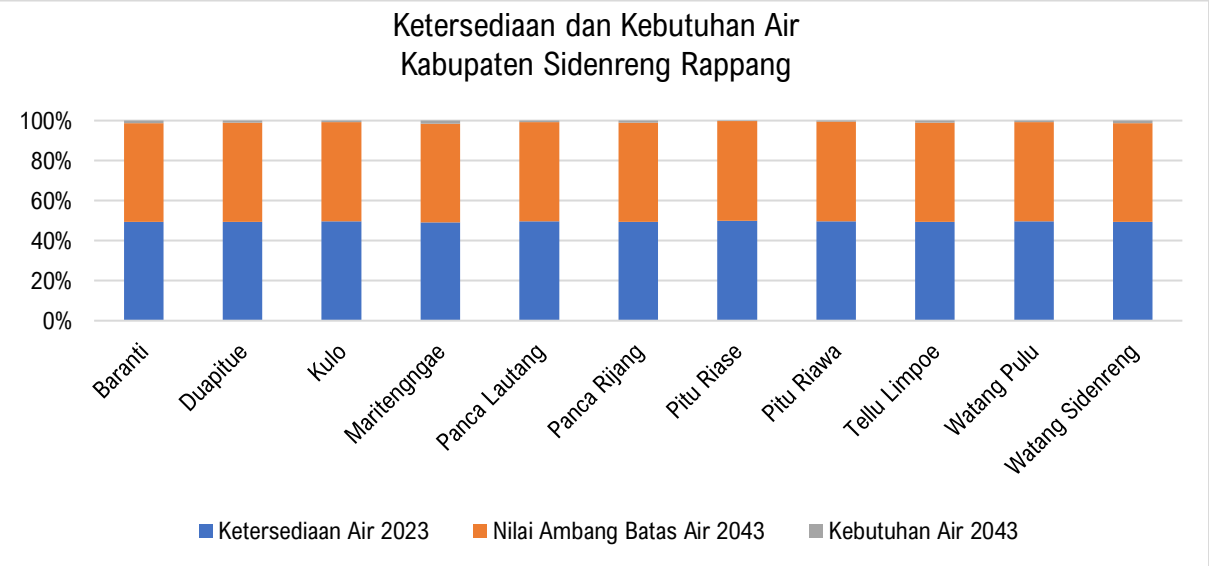

Sumber: Data diolah Tim, 2025

Daya dukung sumber daya air dapat dievaluasi dengan membandingkan ketersediaan air (S) dengan kebutuhan air (D).

Jika S ≥ D, maka daya dukung air belum terlampaui. Sebaliknya,

jika S < D, maka daya dukung air sudah terlampaui.

Hasil analisis proyeksi daya dukung air dari tahun 2023 hingga 2043 menunjukkan nilai ambang batas ketersediaan air di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2043 sekitar 1.494.349.390 meter kubik, sementara kebutuhan air pada tahun 2043 sekitar 19.702.008 meter kubik. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat selisih sekitar 1.474.647.382 meter kubik per tahun, yang berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Artinya, ketersediaan air akan mencukupi hingga tahun 2043.

Dengan belum terlampauiannya daya dukung air, Kabupaten Sidenreng Rappang perlu memastikan agar ketersediaan air tetap terjaga. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mempertahankan daya dukung air termasuk:

1. Menjaga dan meningkatkan areal hutan yang berkontribusi terhadap pengaturan air dan penyediaan air.
2. Memperbaiki kualitas air sungai agar dapat digunakan sebagai sumber air baku dengan mengurangi polutan dari industri, rumah tangga, dan pertanian, serta memulihkan daerah aliran sungai (DAS) yang membutuhkan pemulihan.
3. Mengurangi alih fungsi lahan di daerah tangkapan air.
4. Membangun embung dan waduk untuk meningkatkan penangkapan air.
5. Melindungi mata air melalui upaya konservasi dan pengelolaan oleh pemerintah, termasuk pembebasan lahan di sekitar mata air.
6. Mendorong industri untuk menerapkan sistem produksi bersih guna menghemat penggunaan air.
7. Memberikan insentif bagi kegiatan produksi, baik di sektor pertanian maupun industri, yang dapat mengurangi penggunaan air.
8. Meningkatkan instalasi air dari sumber air ke lokasi-lokasi yang mengalami kelebihan daya dukung.
9. Melindungi sumber-sumber air dan cadangan air di kawasan karst untuk memastikan aliran sungai bawah tanah dan mata air tetap terjaga.
10. Menerapkan sistem pengumpulan air hujan di berbagai wilayah seperti perkantoran dan pemukiman.

Tabel 2.18
Daya Dukung Air Kabupaten Sidenreng Rappang

Kecamatan	Nilai_Ambang Batas Air 2043	Kebutuhan Air 2043	Selisih	Status DDDTTL Air
Baranti	37.964.959	1.095.422	36.869.537	Surplus
Duapitue	72.493.333	1.537.315	70.956.018	Surplus
Kulo	71.251.207	1.173.874	70.077.333	Surplus
Maritengngae	63.389.610	1.976.098	61.413.512	Surplus
Panca Lautang	109.332.809	1.904.688	107.428.121	Surplus
Panca Rijang	41.615.941	915.754	40.700.187	Surplus
Pitu Riase	603.670.917	2.627.770	601.043.147	Surplus

Kecamatan	Nilai_Ambang Batas Air 2043	Kebutuhan Air 2043	Selisih	Status DDDTTL Air
Pitu Riawa	198.993.667	2.375.611	196.618.055	Surplus
Tellu Limpoe	61.600.243	1.340.798	60.259.445	Surplus
Watang Pulu	132.366.865	2.373.365	129.993.500	Surplus
Watang Sidenreng	101.669.841	2.381.314	99.288.527	Surplus
Total	1.494.349.390	19.702.008	1.474.647.382	Surplus

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

Grafik 2.3

Grafik Daya Dukung Air

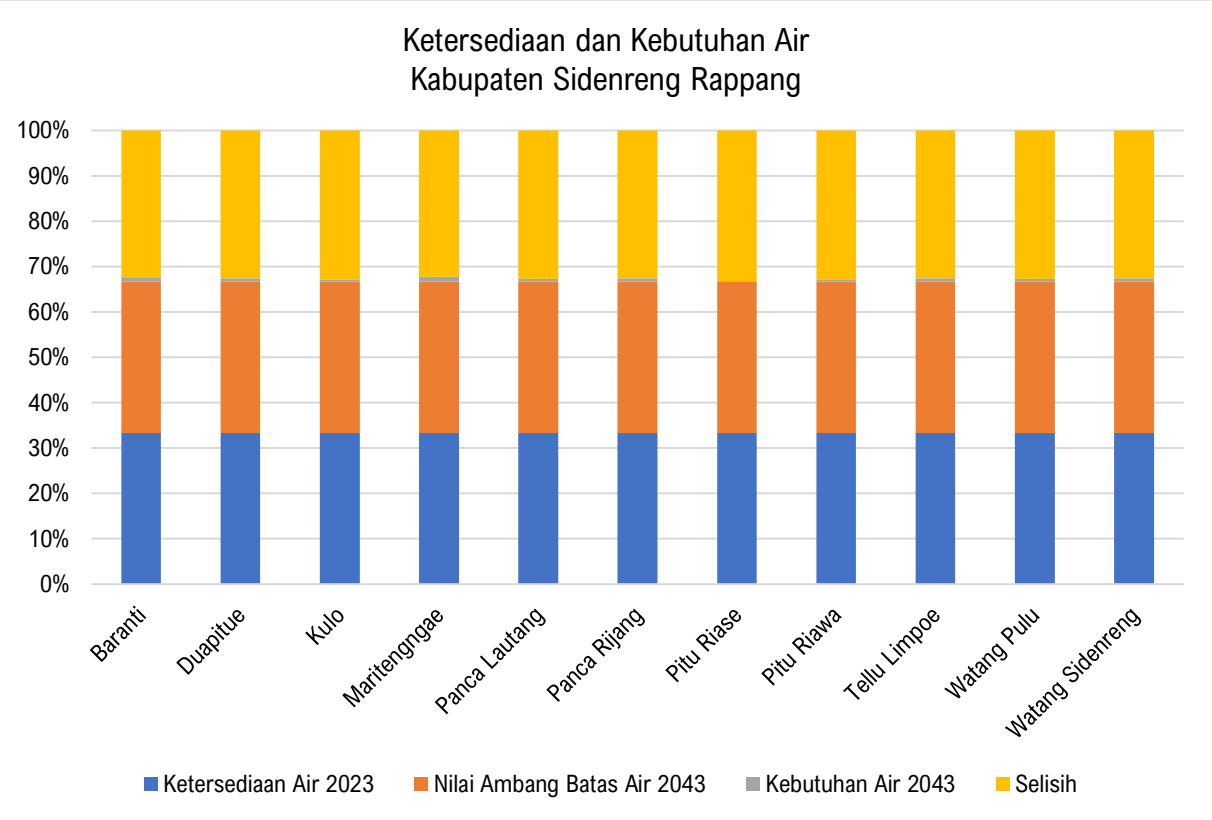

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

Status daya dukung air Kabupaten Sidenreng Rappang sampai tahun 2043 menunjukan tingkat ketersediaan yang masih sangat tinggi, sehingga dapat di simpulkan bahwa daya dukung air Kabupaten Sidenreng Rappang **Belum Melampaui Ambang Batas** pada tahun 2043. Lebih rincinya akan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.19

Daya Dukung Air Kabupaten Sidenreng Rappang

Kecamatan	Status Daya Dukung Air 2043	Nilai_Ambang Batas Air 2043
Kecamatan Baranti	Belum Melampaui Ambang Batas	37.965.022
Kecamatan Duapitue	Belum Melampaui Ambang Batas	72.493.375
Kecamatan Kulo	Belum Melampaui Ambang Batas	71.251.312
Kecamatan Maritengngae	Belum Melampaui Ambang Batas	63.389.610
Kecamatan Panca Lautang	Belum Melampaui Ambang Batas	109.332.907

Kecamatan	Status Daya Dukung Air 2043	Nilai_Ambang Batas Air 2043
Kecamatan Panca Rijang	Belum Melampaui Ambang Batas	41.616.004
Kecamatan Pitu Riase	Belum Melampaui Ambang Batas	603.673.430
Kecamatan Pitu Riawa	Belum Melampaui Ambang Batas	198.993.828
Kecamatan Tellu Limpoe	Belum Melampaui Ambang Batas	61.600.551
Kecamatan Watang Pulu	Belum Melampaui Ambang Batas	132.367.635
Kecamatan Watang Sidenreng	Belum Melampaui Ambang Batas	101.669.974

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

Gambar 2.2
Ketersediaan Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

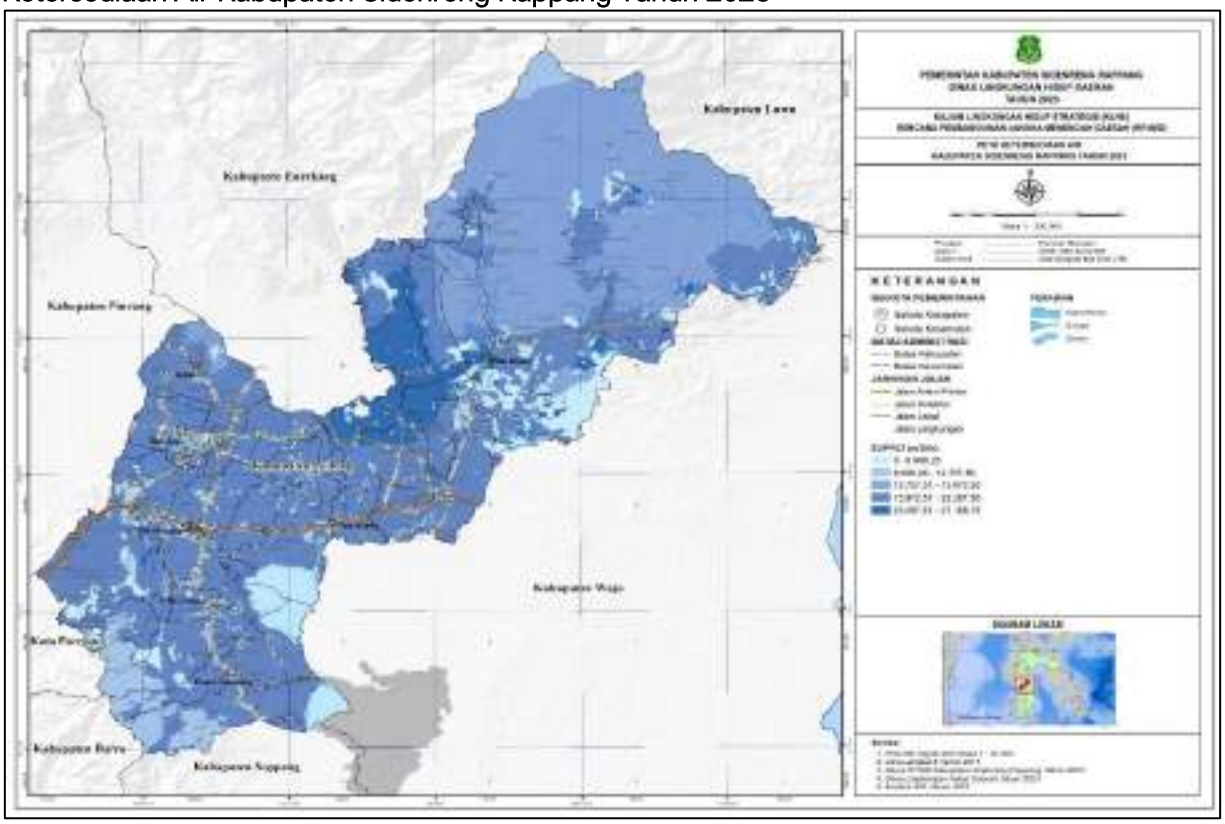

Sumber: Data diolah Tim, 2025

Gambar 2.3
Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang

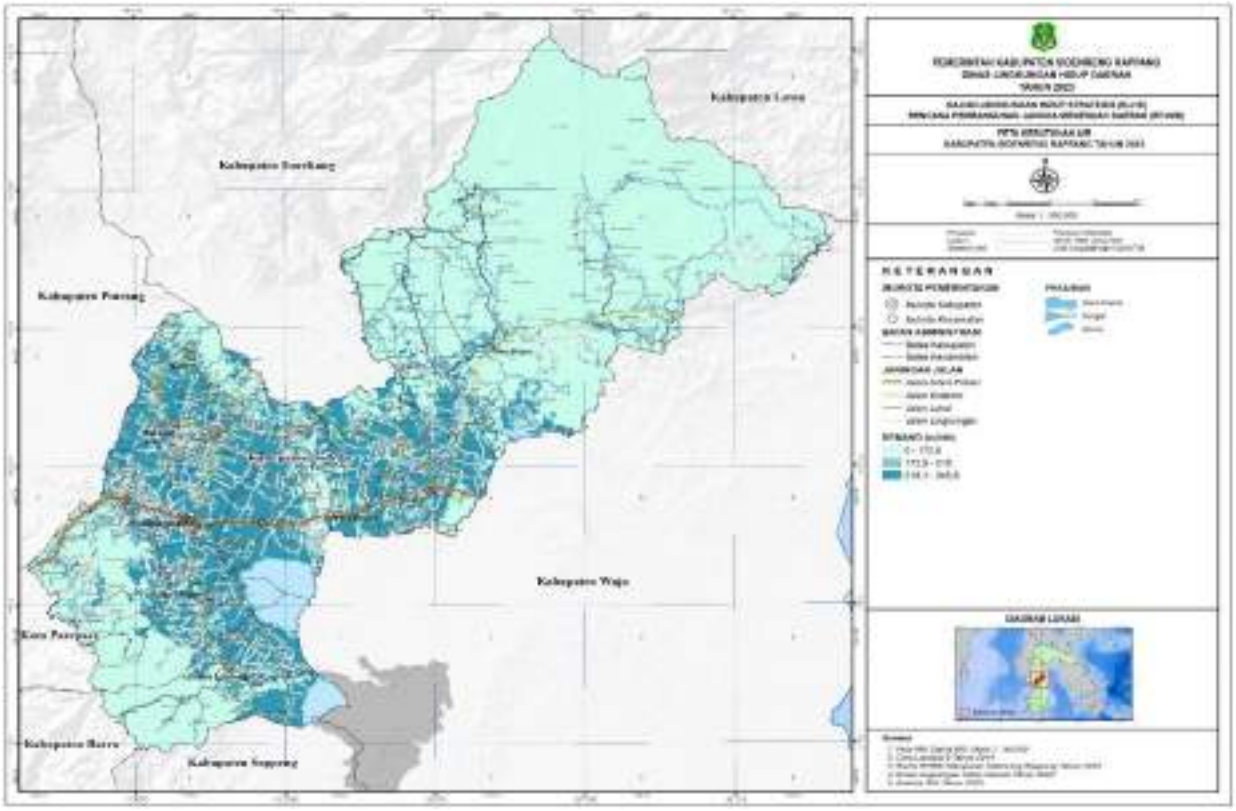

Sumber: Data diolah Tim, 2025

Gambar 2.4
Peta Proyeksi Kebutuhan di Kabupaten Sidenreng Rappang

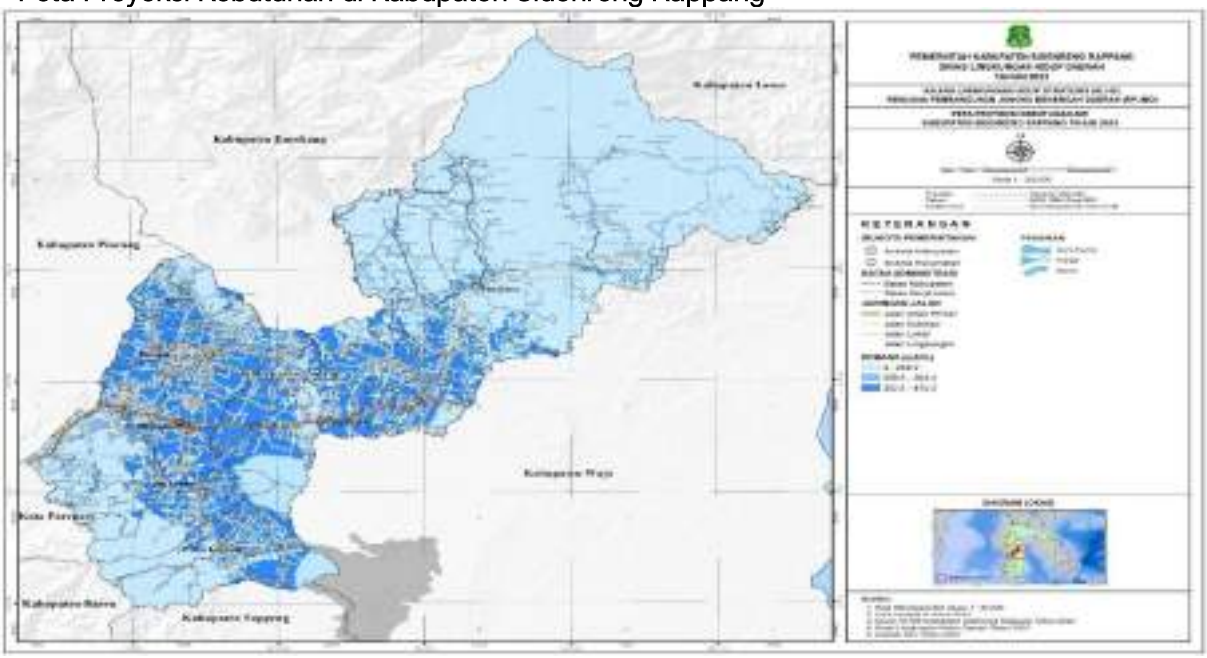

Sumber: Data diolah Tim, 2025

Gambar 2.5
Status Daya Dukung Air Kabupaten Sidenreng Rappang

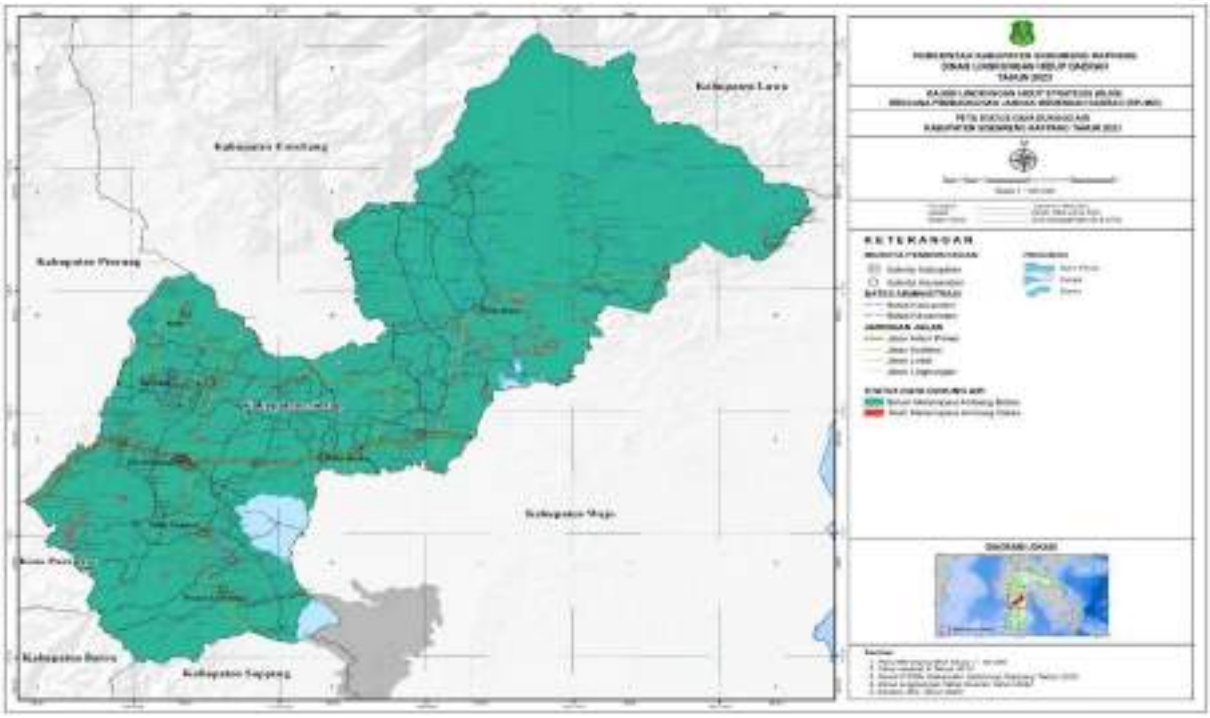

Sumber: Data diolah Tim, 2025

Dalam konteks proyeksi penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2023 hingga 2043, terlihat adanya tren peningkatan kebutuhan akan beras sebagai sumber pangan utama. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang daya dukung pangan di wilayah ini. Dalam mempertimbangkan solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat, pertimbangan terhadap ketersediaan air dan potensi ekspansi lahan sawah menjadi faktor krusial.

Asumsi bahwa peningkatan ketersediaan air akan mendukung pertumbuhan produksi beras, dan langkah konkret untuk mencapai hal ini adalah dengan meningkatkan pencetakan lahan sawah. Namun, sebelum mengambil tindakan dalam hal ini, penting untuk menilai status daya dukung pangan secara komprehensif.

Rumus sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur daya dukung pangan adalah dengan mengurangi total produksi beras dari total permintaan beras. Hasil dari perhitungan ini akan memberikan gambaran jelas tentang sejauh mana kapasitas wilayah ini dalam memenuhi kebutuhan pangan, diukur dalam ton per tahun.

Analisis seperti ini akan memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan pertanian dan keamanan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan memahami tren proyeksi penduduk dan mempertimbangkan strategi seperti peningkatan ketersediaan air dan ekspansi lahan pertanian, wilayah ini dapat lebih siap menghadapi tantangan peningkatan kebutuhan pangan di masa mendatang.

Tabel 2.20
Distribusi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dan Ketersediaan Pangan Pada Tahun 2023 (KKal)

No	Kecamatan	Distribusi Penduduk 2023	Ketersediaan Pangan (KKal)	Kebutuhan Pangan 2023
1	Baranti	18.006	17.558.489.551	14.130.208.500
2	Duapitue	25.197	27.316.268.673	19.773.345.750
3	Kulo	19.635	21.031.597.374	15.408.566.250
4	Maritengngae	32.304	35.006.721.710	25.350.564.000
5	Panca Lautang	31.682	36.178.206.491	24.862.449.500
6	Panca Rijang	14.974	14.154.292.597	11.750.846.500
7	Pitu Riase	50.214	21.527.755.634	39.405.436.500
8	Pitu Riawa	40.147	41.001.967.357	31.505.358.250
9	Tellu Limpoe	22.107	23.098.923.459	17.348.468.250
10	Watang Pulu	41.885	31.630.089.104	32.869.253.750
11	Watang Sidenreng	40.444	45.756.817.353	31.738.429.000
Sidenreng Rappang		336.595	314.261.129.302	264.142.926.250

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

Data tahun 2023, Kecamatan Pitu Riase dan Panca Rijang memiliki ketersediaan pangan lebih rendag dibandingkan kebutuhan pangannya. Di Pitu Riase, hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar sementara lahan pertanian produktif terbatas karena Sebagian wilayahnya erupakan Kawasan hutan dan perbukitan. Sedangkan di Panca Rijang, keterbatasan lahan pertanian serta kondisi tanah regosol yang kurang subur menyebabkan produksi pangan rendah sehingga tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian tim KLHS, potensi ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rapang menunjukan ketersediaan pangan yang sangat cukup sehingga dapat dipastikan ketersediaan pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat tercukupi pada tahun 2023.

Tabel 2.21

Perkembangan Ketersediaan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023-2043 (KKal)

Kecamatan	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan 2023	Kebutuhan Pangan 2028	Kebutuhan Pangan 2033	Kebutuhan Pangan 2038	Kebutuhan Pangan 2043
Baranti	17.558.489.551	14.130.208.500	15.603.184.250	16.732.439.500	18.205.415.250	19.898.905.750
Duapitue	27.316.268.673	19.773.345.750	21.963.583.000	23.235.662.750	25.454.935.750	27.926.113.500
Kulo	21.031.597.374	15.408.566.250	17.180.531.750	18.152.052.250	19.924.017.750	21.324.011.750
Maritengngae	35.006.721.710	25.350.564.000	27.961.427.250	29.838.549.250	32.449.412.500	35.896.819.250
Panca Lautang	36.178.206.491	24.862.449.500	27.587.886.250	29.248.417.250	31.973.854.000	34.599.627.500
Panca Rijang	14.154.292.597	11.750.846.500	13.066.872.250	13.905.770.000	15.221.795.750	16.635.130.500
Pitu Riase	21.527.755.634	39.405.436.500	43.337.818.750	47.483.653.000	51.416.035.250	47.734.773.000
Pitu Riawa	41.001.967.357	31.505.358.250	35.239.983.500	37.011.949.000	40.748.143.750	43.154.187.250
Tellu Limpoe	23.098.923.459	17.348.468.250	19.023.124.750	20.567.512.750	22.242.169.250	24.356.285.750
Watang Pulu	31.630.089.104	32.869.253.750	36.136.952.750	39.221.020.250	42.569.548.500	43.113.380.250
Watang Sidenreng	45.756.817.353	31.738.429.000	35.036.733.250	37.239.526.500	40.541.754.500	43.257.774.250
Total	314.261.129.302	264.142.926.250	292.138.097.750	312.636.552.500	340.747.082.250	357.897.008.750

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

Berdasarkan hasil kajian kebutuhan pangan Kabupaten Sidenreng rappang pada tahun 2023 menunjukan bahwa, setiap 5 (lima) tahun perkembangan pertumbuhan kebutuhan pangan tiap kecamatan semakin meningkat. Seperti yang terjadi pada Kecamatan Watang Sidenreng pada tahun 2023 membutuhkan pangan sebesar 31.738.429.000 KKal, sedangkan pada tahun 2043 meningkat menjadi 43.257.774.250 KKal.

Begitu juga dengan Kecamatan Pitu Riase pada tahun 2023 membutuhkan pangan sebesar 39.405.436.500 KKal. Sampai pada tahun 2043 mebutuhkan pangan sebanyak 47.734.773.000 KKal.

Tabel 2.22
Daya Dukung Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang (KKal)

Kecamatan	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan 2043	Selisih
Baranti	17.558.489.551	19.898.905.750	- 2.340.416.199
Duapitue	27.316.268.673	27.926.113.500	- 609.844.827
Kulo	21.031.597.374	21.324.011.750	- 292.414.376
Maritengngae	35.006.721.710	35.896.819.250	-890.097.540
Panca Lautang	36.178.206.491	34.599.627.500	1.578.578.991
Panca Rijang	14.154.292.597	16.635.130.500	-2.480.837.903
Pitu Riase	21.527.755.634	47.734.773.000	-26.207.017.366
Pitu Riawa	41.001.967.357	43.154.187.250	- 2.152.219.893
Tellu Limpoe	23.098.923.459	24.356.285.750	- 1.257.362.291
Watang Pulu	31.630.089.104	43.113.380.250	- 11.483.291.146
Watang Sidenreng	45.756.817.353	43.257.774.250	2.499.043.103
Total	314.261.129.302	357.897.008.750	- 43.635.879.448

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

Berdasarkan hasil kajian tim KLHS, kebutuhan pangan Kabupaten Sidenreng Rapang pada tahun 2023 menunjukan tren yang meningkat sehingga apabila di bandingkan dengan ketersediaan pangan pada saat ini, akan terdapat selisih yang cukup tinggi dan mengarah pada defisit pangan 20 tahun kedepan. Hanya di Kecamatan Panca Lautang yang menunjukan nilai positif atau surplus sebesar 1.578.578.991 KKal dan Kecamatan Watang Sidenreng sebesar 2.499.043.103 KKal.

Grafik 2.4
Daya Dukung Pangan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2043

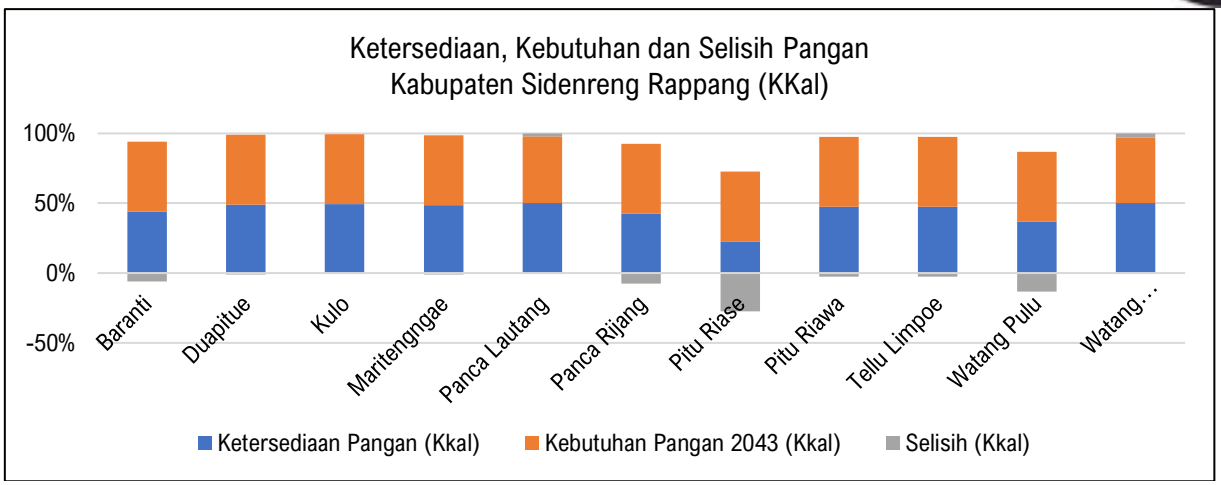

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

Berdasarkan hasil kajian tim KLHS, kebutuhan pangan Kabupaten Sidenreng Rapang pada tahun 2023 menunjukan tren yang meningkat sehingga apabila di bandingkan dengan ketersediaan pangan pada saat ini, akan terdapat selisih yang cukup tinggi dan mengarah pada defisit pangan 20 tahun kedepan. Hanya di Kecamatan Panca Lautang yang menunjukan nilai positif atau surplus sebesar 1.578.578.991 KKal dan Kecamatan Watang Sidenreng sebesar 2.499.043.103 KKal.

Gambar 2.6
Peta Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang

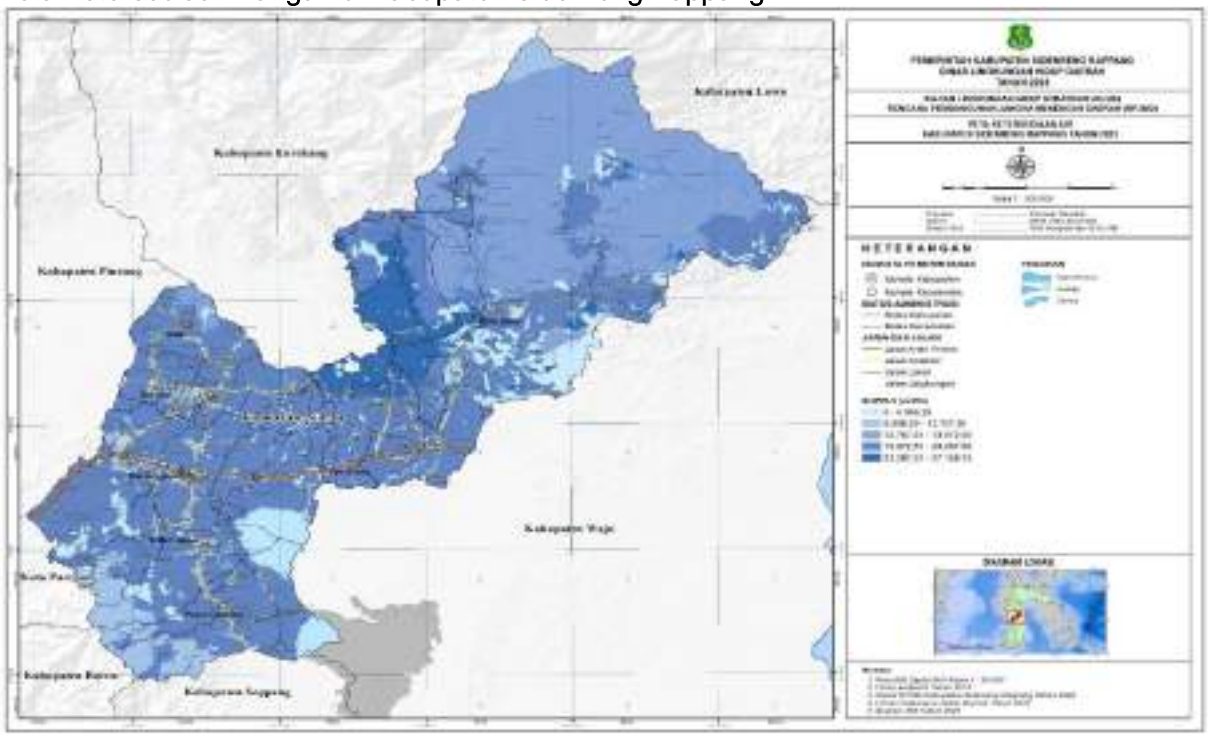

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

Gambar 2.7
Peta Kebutuhan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang

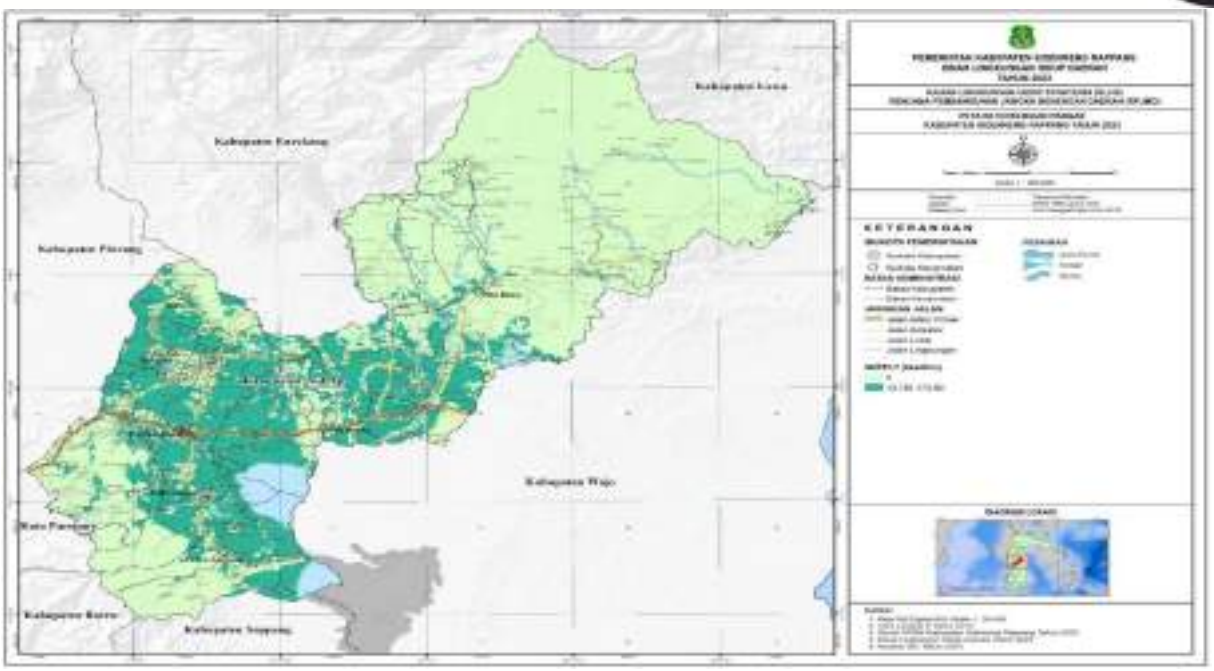

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

Gambar 2.8
Peta Proyeksi Ketersediaan di Kabupaten Sidenreng Rappang

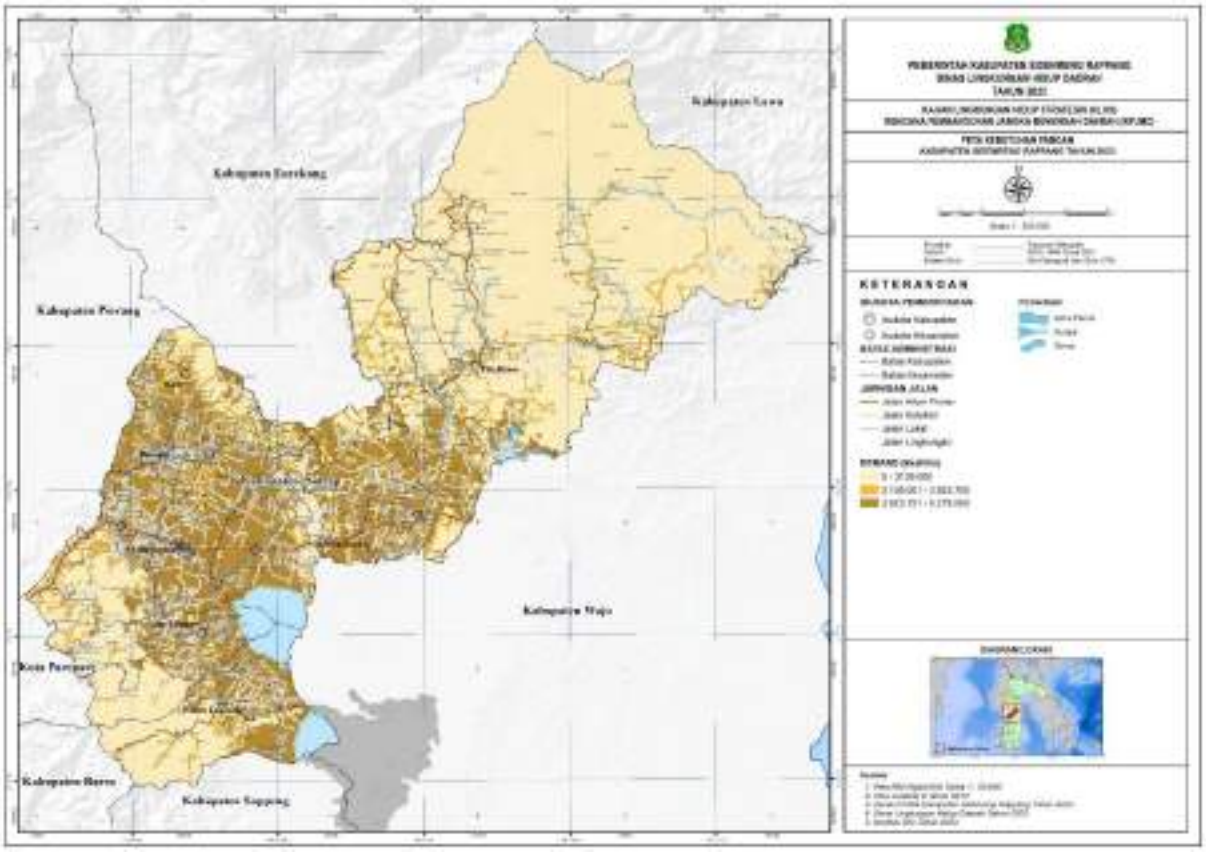

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

Gambar 2.9
Status D3TLH Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2043

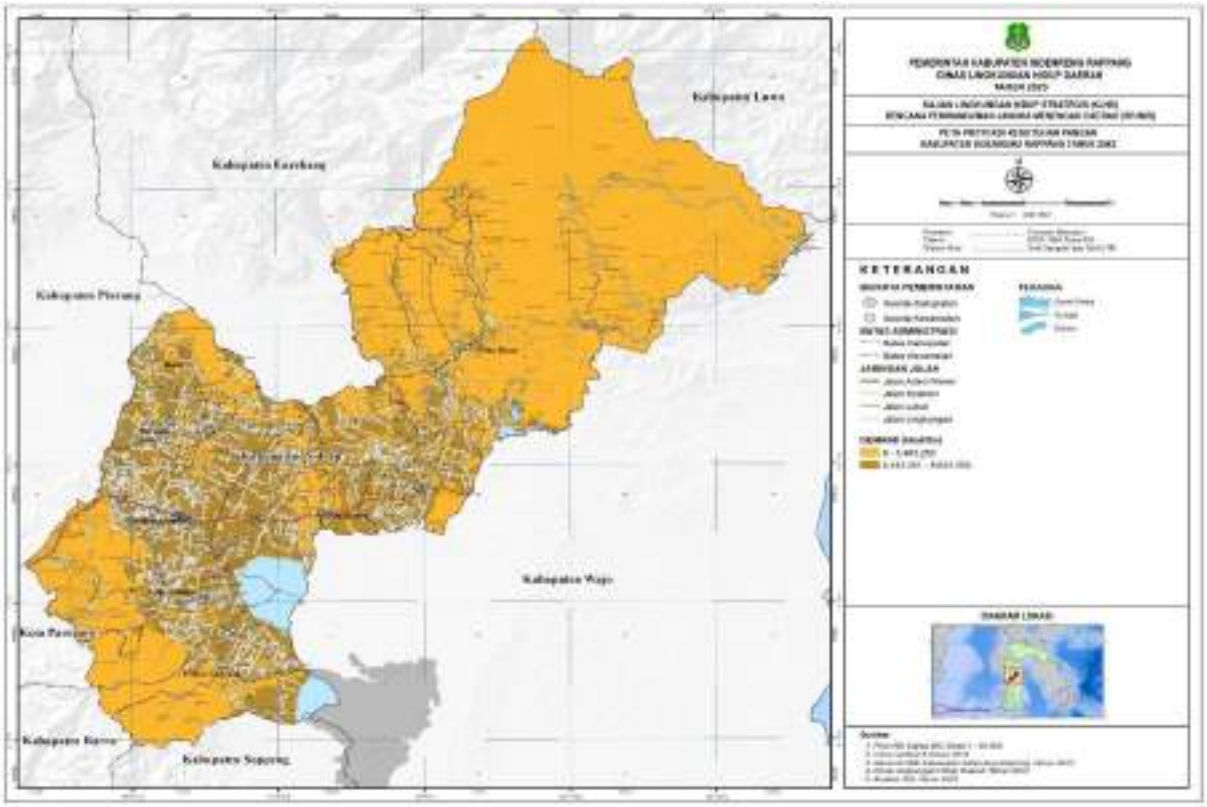

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air, Dan Kemandirian Pangan

1. Ketahanan Energi

Energi merupakan salah satu penyokong kehidupan manusia sekaligus menjadi salah satu lokomotif pembangunan. Salah satu energi yang penting dan terkait dengan hajat hidup seluruh penduduk adalah listrik. Semakin besar konsumsi listrik juga mengindikasikan semakin maju-nya suatu masyarakat. Hal ini karena listrik, bukan hanya dipakai untuk kegiatan konsumsi, tapi juga untuk produksi dan layanan publik. Pada tahun 2024, sebanyak 100 persen rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang telah terhubung dengan listrik. Sementara itu, konsumsi listrik per kapita yang merupakan hasil bagi antara jumlah listrik terjual dengan jumlah penduduk. Jika dilihat dari kondisi konsumsi listrik di kabupaten Sidenreng rappang mengalami penurunan drastis di tahun 2024, penurunan ini bisa saja dipengaruhi oleh harga listrik yang naik sehingga masyarakat membatasi pengeluarannya. Angka konsumsi listrik tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif 215 kwh per kapita di tahun 2020 dan mengalami penurunan hingga ke angka 174,61 Kwh per kapita pada tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk yang besar tidak diikuti dengan peningkatan konsumsi listrik oleh masyarakat, masyarakat cenderung mempertahankan besaran konsumsi listrik meskipun jumlah anggota keluarga bertambah sehingga data tahun 2024 menunjukkan penurunan konsumsi listrik per kapira di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.5
Konsumsi Listrik Per Kapita di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024

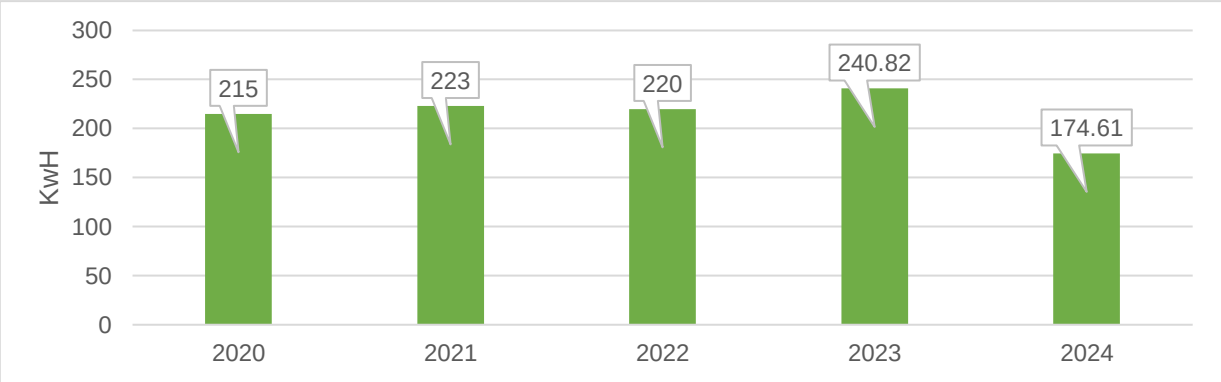

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Grafik 2.6
Daya Terpasang Listrik di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024

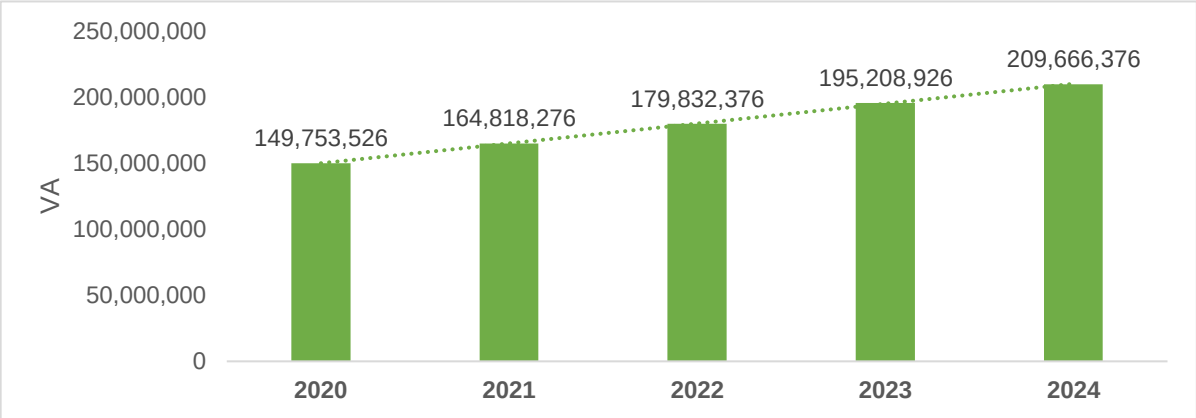

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Lebih lanjut, kondisi ketersediaan daya listrik di Kabupaten Sidenreng Rappang terus mengalami peningkatan pada daya terpasang. Pada tahun 2020, daya terpasang listrik sebesar 149.753.526 VA, lalu meningkat menjadi 209.666.376 VA di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan listrik di Kabupaten Sidenreng Rappang relatif terjamin.

2. Ketahanan Air

a. Kapasitas Air Baku (L/detik)

Kapasitas air baku mengacu pada total volume air yang tersedia dalam suatu wilayah atau sistem yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti konsumsi manusia, pertanian, industri, dan keperluan lingkungan lainnya. Sumber-sumber air baku bisa berupa sungai, danau, reservoir, air tanah, dan air hujan yang dapat diambil dan dimanfaatkan. Ketersediaan air baku perlu dimonitor untuk memastikan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Sumber air baku utama di Kabupaten Sidenreng Rappang terutama berasal dari air danau dan air sungai. Terdapat Danau Sidenreng yang berada di tiga kecamatan, yaitu Watang Sidenreng, Tellu Limpoe, dan Panca Lautang. Air dari danau digunakan oleh masyarakat untuk irigasi persawahan, air bersih untuk keperluan rumah tangga, dan dijadikan sebagai tempat penangkapan serta budidaya ikan air tawar. Adapun air baku dari sungai tersebar di 167 sungai yang terdapat di Kabupaten

Sidenreng Rappang.

Tabel 2.23
Sumber Air Baku di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

No	Nama	Air Baku Induk	Jenis	Kapasitas (L/Det)	Kapasitas Terpakai (L/Det)
1	Sungai Camming	-	Sungai	200	200
2	Sungai Cenrana	-	Sungai	200	50
3	Sungai Alebbong	-	Sungai	200	50

Sumber: SIMSPAM Kementrian Pekerjaan Umum; diolah tahun 2025

Sementara itu, air bersih adalah air yang telah melalui proses pengolahan untuk menghilangkan kontaminan, zat terlarut, partikel, dan mikroorganisme yang dapat membuatnya tidak aman untuk dikonsumsi atau digunakan untuk aplikasi tertentu. Proses pengolahan air biasanya melibatkan langkah-langkah seperti penyaringan, pengendapan, pemurnian kimia, dan desinfeksi untuk memastikan air memenuhi standar kualitas air yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan dan lingkungan. Air bersih ini kemudian dapat digunakan untuk minum, memasak, mandi, dan keperluan lainnya tanpa risiko kesehatan.

Tabel 2.24
Kapasitas Air Baku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit SPAM	Alokasi Air Baku (Liter/Detik)	Kapasitas Terpasang (Liter/Detik)	Kapasitas Produksi (Liter/Detik)	Kapasitas Distribusi (Liter/Detik)	Kapasitas Air Terjual (Liter/Detik)	Idle CAP Terpasang (Liter/Detik)	Idle CAP Produksi (Liter/Detik)
1	Kep. Selayar	83	244.04	203.84	148.14	137.48	119.36	40.2	55.7
2	Bulukumba	129	492.68	350.68	226.73	162.74	126.65	142	123.95
3	Bantaeng	54	473.81	472.13	351.8	277.2	149.62	1.68	120.33
4	Jeneponto	82	263.76	263.76	245.76	221.87	204.68	0	18
5	Takalar	57	244.47	241.97	193.04	182.64	145.23	2.5	48.93
6	Gowa	101	807.55	787.05	695.98	530.32	364.34	20.5	91.07
7	Sinjai	70	340.82	320.82	278.82	272.68	271.72	20	42
8	Kab. Maros	61	498.93	378.03	348.82	341.09	238.02	120.9	29.21
9	Pangkep	53	277.57	227.57	161.2	145.94	108.61	50	66.37
10	Barru	40	312.29	310.71	188.51	147.79	106.03	1.58	122.2
11	Bone	124	1015.53	392.53	285.03	235.03	187.16	623	107.5
12	Soppeng	39	655.61	445.06	393.02	373.05	220.37	210.55	52.04
13	Wajo	124	448.35	445.22	399.31	347.7	273.68	3.13	45.92
14	Sidenreng Rappang	87	780.65	260.65	217.65	184.46	145.94	520	43
15	Pinrang	84	263.4	281.9	149.4	124.68	120.1	18.5	132.5
16	Enrekang	87	427.66	402.66	334.66	311.21	288.79	25	68
17	Luwu	95	448.01	358.01	311.01	287.27	249.44	90	47
18	Tana Toraja	145	536	534	489.7	338.45	246.07	2	44.3
19	Luwu Utara	103	363.59	375.13	337.82	317.12	231.83	11.54	37.31
20	Luwu Timur	46	588.77	268.77	222	179.64	129.14	320	46.77
21	Toraja Utara	93	251.55	251.05	229.52	186.61	133.93	0.5	21.53
22	Kota Makassar	71	3482.6	3466.8	3397.8	2967.61	1633.7	15.8	69
23	Kota Parepare	1	342	342	232	230	147.21	0	110
24	Kota Palopo	21	1477.4	579.34	522.34	511.84	332.5	898.06	57
Sulawesi Selatan		1,850	15,037.04	11,959.68	10,360.06	9,014.42	6,174.12	3,077.35	1,599.63

Sumber: SIMPSPAM Kementerian Pekerjaan Umum; diolah Tahun 2025

Dengan alokasi air baku sebesar 780,65 liter/detik, Kabupaten Sidenreng Rappang berada di atas rata-rata beberapa daerah seperti Kabupaten Kepulauan Selayar (244,04 liter/detik) dan Kabupaten Jeneponto (263,76 liter/detik). Namun, alokasi ini masih jauh di bawah kabupaten besar seperti Kabupaten Luwu Timur dengan 2.565,50 liter/detik. Kapasitas terpasang di Sidrap mencapai 240,65 liter/detik, namun angka ini masih relatif kecil dibandingkan dengan daerah seperti Kabupaten Bone (445,26 liter/detik) atau Kabupaten Gowa (271,97 liter/detik). Dari kapasitas terpasang tersebut, kapasitas produksi Sidrap sebesar 217,65 liter/detik dan kapasitas distribusinya mencapai 207,45 liter/detik. Hal ini menunjukkan efisiensi yang cukup baik dalam distribusi air minum jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang sering menunjukkan idle capacity lebih besar. Namun, kapasitas air terjual di Sidrap, sebesar 181,21 liter/detik, juga perlu menjadi perhatian. Meskipun cukup optimal, jika dibandingkan dengan kabupaten seperti Kabupaten Bulukumba (226,73 liter/detik) atau Kabupaten Wajo (373,05 liter/detik), masih terdapat ruang untuk perbaikan. Selain itu, Sidrap memiliki *idle capacity* produksi sebesar 43,00 liter/detik, menunjukkan adanya potensi yang belum termanfaatkan, meskipun lebih rendah dibandingkan kabupaten seperti Bone yang memiliki *idle capacity* terpasang sebesar 122,50 liter/detik.

Tabel 2.25
Kapasitas Air Baku di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 (m3/tahun)

Kecamatan	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Baranti	99,54	186,31	- 86,77
Dua Pitue	133,43	344,71	- 211,28
Kulo	161,48	281,95	- 120,47
Maritengngae	134,67	360,06	- 225,39
Panca Lautang	268,63	416,26	- 147,63
Panca Rijang	96,33	175,10	- 78,77
Pitu Riase	1.029,66	428,14	601,52
Pitu Riawa	316,12	421,94	- 105,82
Tellu Limpoe	189,78	279,68	- 89,90
Watang Pulu	350,12	496,82	- 146,70
Watang Sidenreng	199,40	378,67	- 179,27
Total	2.979,16	3.769,64	- 790,48

Sumber: Dokumen KHLS RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2045

Data menunjukkan jumlah ketersediaan air di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 2.979,16 m3/tahun pada tahun 2024. Adapun kebutuhan terhadap air sebesar 3.769,64 m3/tahun, sehingga terdapat kekurangan sebesar -790,48 m3/tahun, hal ini berarti ambang batas terhadap daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Pitu Riase (601,52 m3/tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan

Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang tutupan lahannya masih bagus (bervegetasi) dan berada dalam kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Sebaliknya, pada kecamatan-kecamatan lainnya, ketersediaan air tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan yang ada, ini disebabkan oleh rendahnya tutupan lahan dan berkurangnya vegetasi penahan air yang mengakibatkan kemampuan daerah dalam menyerap dan menyimpan air menjadi terbatas. Selain itu, meningkatnya kebutuhan air seiring pertumbuhan penduduk, perluasan lahan pertanian, dan penggunaan sektor non-pertanian menyebabkan ketidakseimbangan ketersediaan dengan kebutuhan air. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kondisi tersebut, antara lain meningkatkan tutupan lahan dan konservasi sumber daya air, membangun serta mengoptimalkan infrastruktur penampungan dan jaringan irigasi, mendorong efisiensi penggunaan air di berbagai sektor, memanfaatkan sumber air alternatif seperti hujan, serta mengendalikan alih fungsi lahan.

b. Akses Rumah tangga terhadap Air Minum Perpipaan

Akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan mengacu pada kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan air minum yang aman dan bersih melalui sistem perpipaan. Rumah tangga yang dicakup dalam kategor ini adalah rumah tangga yang terhubung ke jaringan distribusi air bersih yang memenuhi standar kualitas air minum yang ditetapkan. Ukuran ini penting untuk memastikan agar rumah tangga dapat mengakses air minum yang aman dan terpercaya, yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesehatan dan kebersihan. Rumah tangga dengan akses terhadap air siap minum perpipaan cenderung memiliki risiko terhadap penyakit yang ditularkan melalui air yang relatif rendah.

Pada tahun 2024, dari 80.614 rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat sebanyak 16.897 rumah tangga atau 20,96 persen rumah tangga yang sumber air minumnya menggunakan jaringan perpipaan, terdiri dari 6.856 rumah tangga yang menggunakan jaringan perpipaan PDAM/BPSPAM dan 10.243 rumah tangga dengan jaringan perpipaan non-PDAM. Kondisi ini menunjukkan masih relatif rendanya persentase rumah tangga yang menggunakan jaringan perpipaan sebagai sumber air minum di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.26
Air Minum Perpipaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga dengan Perpipaan PDAM/BPSPAM	Jumlah Rumah Tangga dengan Perpipaan Non-PDAM
Panca Lautang	5.259	425	367
Tellu Limpoe	6.120	1.268	68
Watang Pulu	7.480	1.085	1.610
Maritengngae	12.289	1.788	730

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga dengan Perpipaan PDAM/BPSPAM	Jumlah Rumah Tangga dengan Perpipaan Non-PDAM
Watang Sidenreng	5.573	0	471
Panca Rijang	8.403	1.514	512
Baranti	9.109	0	441
Kulo	3.505	0	432
Pitu Riawa	7.648	0	1.406
Dua Pitue	8.518	776	838
Pitu Riase	6.710	0	3.368
Jumlah	**80.614**	**6.856**	**10.243**

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2025

Tabel 2.27
Air Minum Perpipaan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah	% Akses Air Minum Perpipaan
Kep. Selayar	15.252	42,93
Bulukumba	19.691	16,7
Bantaeng	25.936	49,02
Jeneponto	24.968	23,77
Takalar	25.467	33,89
Gowa	51.271	25,64
Sinjai	25.061	45,81
Kab. Maros	27.076	33,94
Pangkep	15.719	17,57
Barru	15.459	31,79
Bone	22.800	11,11
Soppeng	15.182	25,2
Wajo	30.727	30,13
Sidenreng Rappang	16.527	20,26
Pinrang	10.734	10,36
Enrekang	25.508	44,11
Luwu	19.346	25,41
Tana Toraja	28.302	43,58
Luwu Utara	19.674	23,49
Luwu Timur	24.924	31,75
Toraja Utara	20.800	40,23
Kota Makassar	174.725	47,4
Kota Parepare	27.264	68,03
Kota Palopo	42.163	95,00
Prov. Sulsel	724.576	34,88

Sumber: SIMPSPAM Kementerian Pekerjaan Umum; diolah Tahun 2025

Pada tahun 2024, akses air minum perpipaan di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 20.26 persen, dengan jumlah sambungan rumah mencapai 16.527 sambungan. Jika dibandingkan dengan daerah Ajatappareng, Kabupaten Sidenreng Rappang berapa di posisi kedua setelah Kota Parepare yang akses air minum perpipaannya mencapai 68,03 persen

dengan jumlah sambungan sebanyak 27.264. Namun, untuk seluruh Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, capaian ini masih jauh di bawah Kota Makassar yang mencapai 47,40 persen dengan 174.725 sambungan rumah, dan Kota Palopo yang mencapai 95,00 persen dengan 42.163 sambungan rumah. Selain itu, jika dilihat secara persentase, Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang mencapai 34,88 persen.

c. Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman (%)

Akses rumah tangga terhadap air minum aman di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren positif dalam lima tahun terakhir. Tahun 2020, proporsi tercatat 9,60 persen, terus mengalami peningkatan yang menjadi 12,83 pada tahun 2024. Realisasi tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menyediakan akses air minum yang aman melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, dan program penyediaan air bersih.

Grafik 2.7
Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

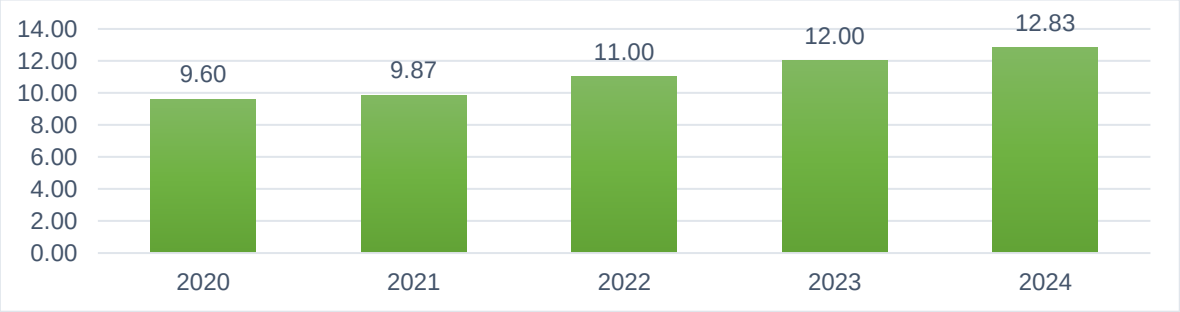

Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

Grafik 2.8
Akses Air Minum Aman Rumah Tangga Hasil SKAMRT Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

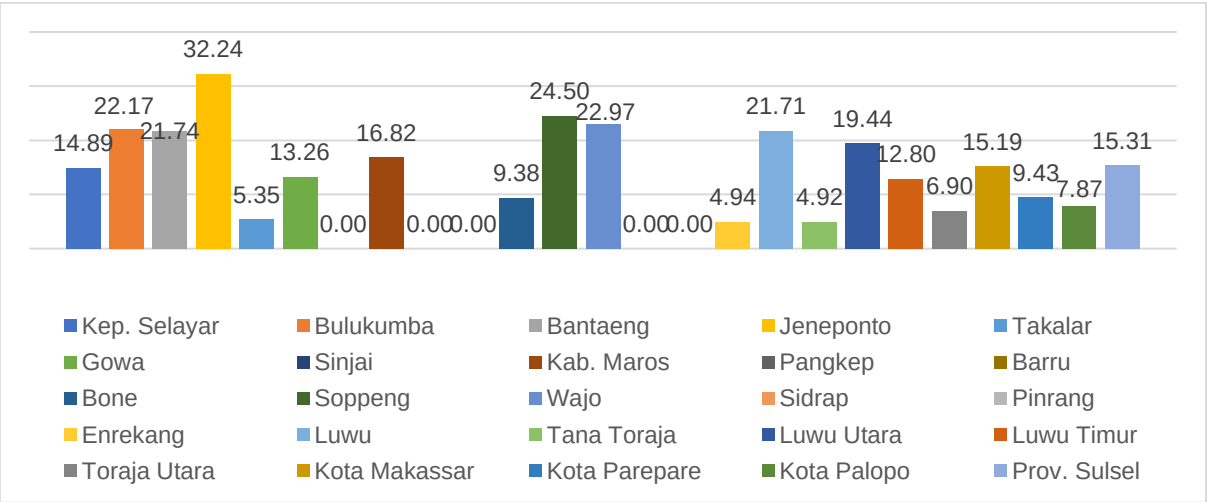

Sumber: Hasil Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT)

Kabupaten Sidenreng Rappang tidak menjadi lokus survei kualitas air minum rumah

tangga (SKAMRT). Hasil survei pada 19 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa rumah tangga dengan akses air minum aman dengan kandungan E-Coli, Total Dissolved, pH, Nitrit, dan Nitrat yang memenuhi syarat mencapai 15,31 persen mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan capain 8,3 persen. Kabupaten dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum aman tertinggi adalah Kabupaten Jeneponto mencapai 32,24 persen, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Tana Toraja dengan capaian 4,92 persen.

3. Ketahanan Pangan

a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengacu pada persentase penduduk yang mengalami kekurangan pangan atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan bergizi dan cukup. Data menunjukkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi makanan mengalami penurunan dari 9,62 persen di tahun 2020 menjadi 4,58 persen di tahun 2024.. Tren menurunnya angka prevalensi ini menunjukkan semakin menurunnya proporsi penduduk yang mengalami masalah ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang, angka ini tentunya disbebabkan peningkatan produksi pertanian maupun perkebunan dan tanaman lainnya.

Grafik 2.9
Prevalensi of Undernourishment (PoU) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024

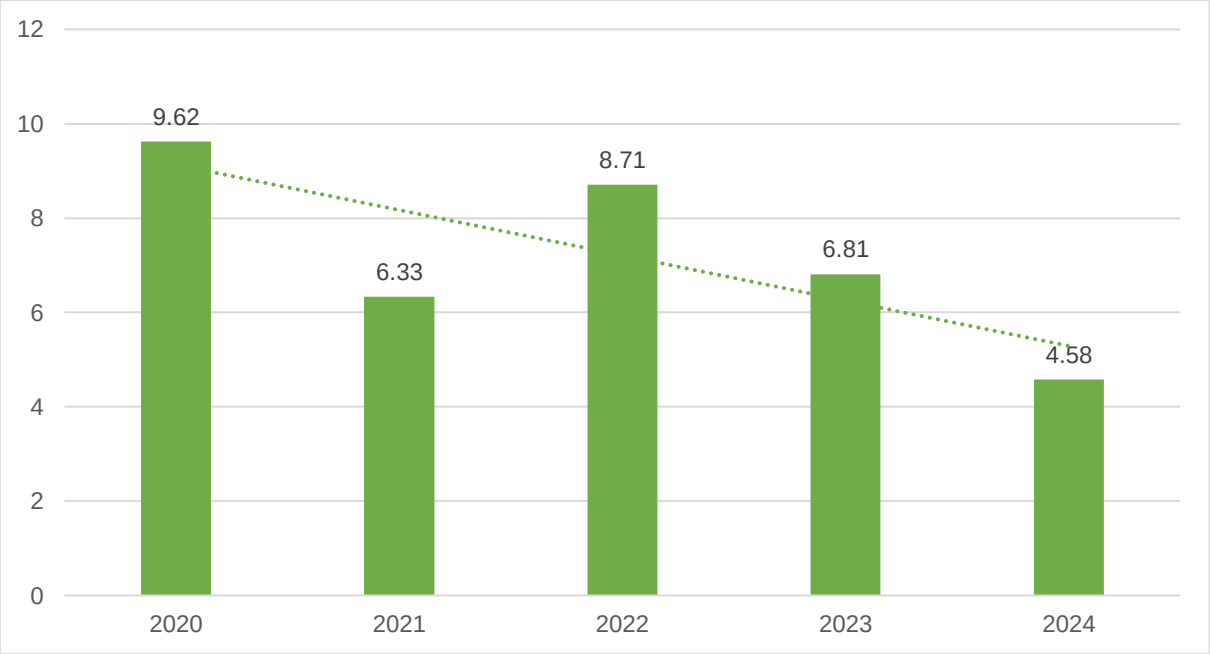

Sumber: Dinas TPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

b. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif sercara berkalnjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan, yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem untuk membentuk sistem ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketahanan pangan penduduk di suatu wilayah, yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Tiga aspek tersebut lalu diturunkan menjadi 9 indikator yang membentuk nilai IKP. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, nilai IKP Kabupaten Sidenreng Rappang menurun dari 87,17 di tahun 2020 menjadi 84,79 tahun 2021. Kemudian kembali meningkat dari 84,79 di tahun 2021 menjadi sebesar 87,92 di tahun 2024. Nilai ini menempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang berada dalam urutan ke-55 tertinggi secara Nasional. Tentu angka indeks ketahanan pangan meningkat diikut dengan peningkatan sektor produksi pertanian dan juga peningkatan indeks pemanfaatan dan indeks keterjangkauan.

Grafik 2.10
Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024

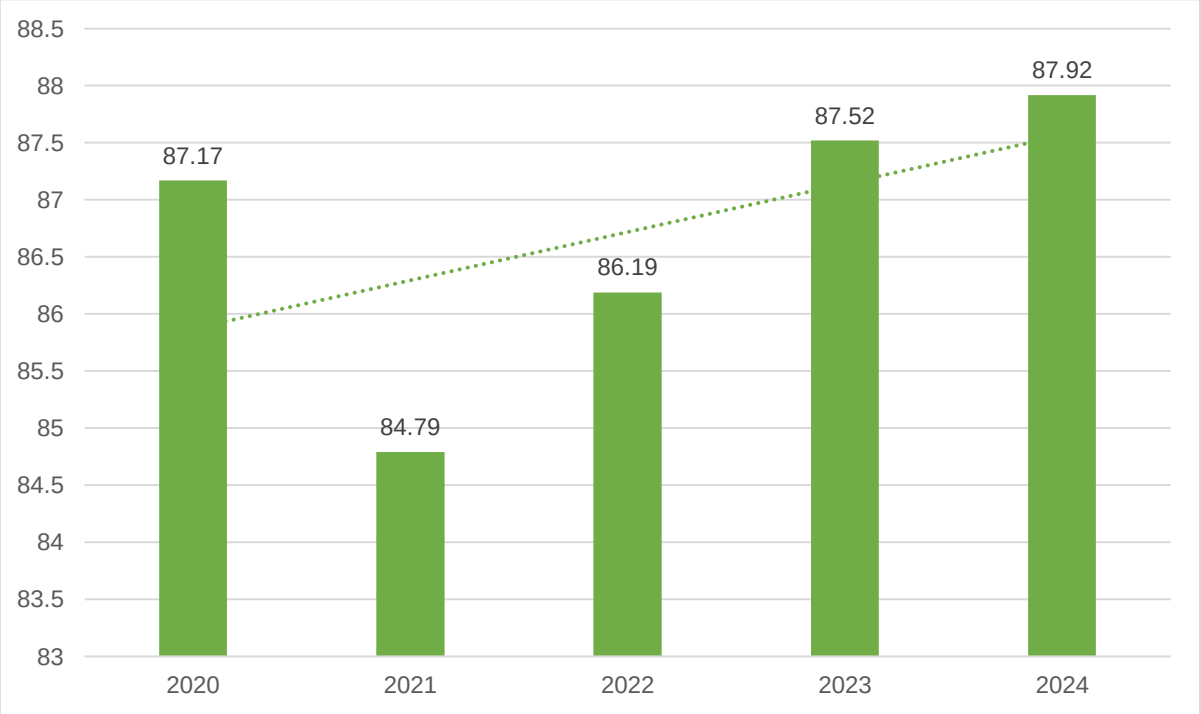

Sumber: Dinas TPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

c. Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pola makan suatu penduduk. Skor ini menggambarkan sejauh mana pola makan individu atau kelompok individu memenuhi standar gizi yang disarankan atau diharapkan untuk menjaga kesehatan. Skor PPH yang tinggi menunjukkan bahwa pola makan penduduk di suatu wilayah cenderung memenuhi kebutuhan gizi yang direkomendasikan. Proses perhitungan skor PPH

melibatkan evaluasi asupan makanan dari berbagai kelompok pangan, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein hewani, protein nabati, dan lemak. Setiap kelompok pangan diberi nilai berdasarkan seberapa sering atau seberapa banyak dikonsumsi, serta seberapa sehat masing-masing kelompok pangan tersebut dalam konteks gizi dan kesehatan. Angka skor PPH Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 85 poin, terus menurun pada tahun 2021 hingga 2023 menjadi 83,30 dan 80,10 poin. Angka tersebut mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 88.41 poin.peningkatan poin disebabkan adanya keragaman pola konsumsi masyarakat sidenreng rappang yang lebih beragam di tahun 2024 karena adanya sosialisasi yang gencar dilakukan oleh Dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perumahan rakyat.

Grafik 2.11
Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024

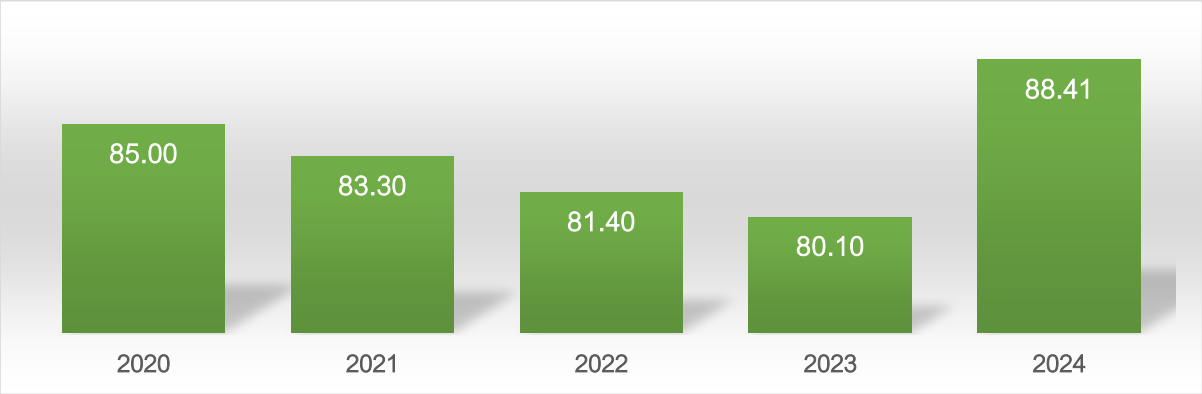

Sumber: Dinas TPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kondisi geografis seperti iklim dan topografi dapat berdampak signifikan terhadap kualitas lingkungan. Pemahaman yang baik tentang kondisi geografis suatu wilayah dapat membantu pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan relevan. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya ditunjukkan dengan indicator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IPKD), Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Pengelolaan Sampah, Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dan Sampah yang Terdaur Ulang, dan Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah.

1. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia

Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia merupakan indikator penting dalam menggambarkan keberlanjutan praktik pertanian. Penggunaan pupuk organik yang lebih tinggi dibandingkan pupuk kimia mencerminkan perhatian terhadap kesehatan tanah, kualitas hasil pertanian, serta upaya mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan bahan kimia.

Grafik 2.12
Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

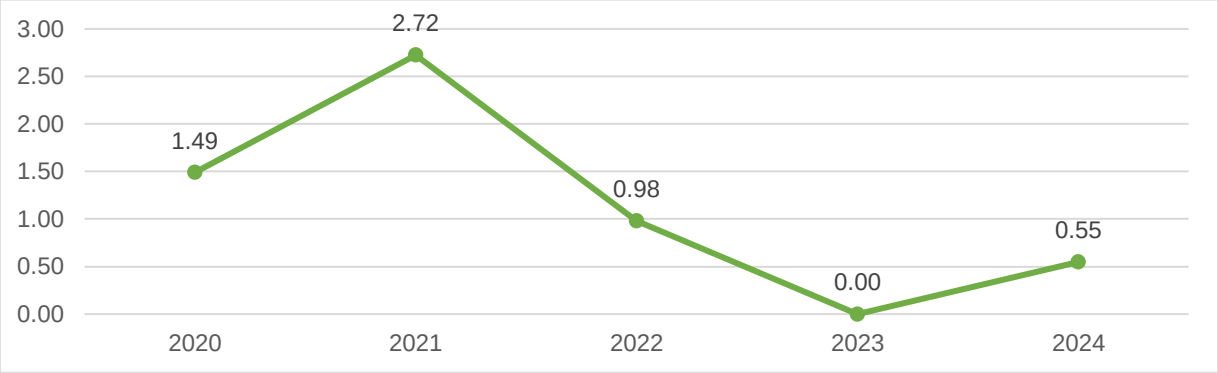

Sumber: Dinas TPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

Di Kabupaten Sidenreng Rappang, proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, proporsi ini mencapai 1,49 persen, meningkat menjadi 2,72 persen di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, proporsi ini menurun tajam menjadi hanya 0,98 persen, dan pada tahun 2023 tidak tercatat adanya penyaluran pupuk organik sama sekali (0,00 persen). Tidak adanya penyaluran subsidi untuk pupuk organik pada tahun 2023 disebabkan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2022 yang menetapkan bahwa subsidi pupuk pada tahun tersebut hanya diberikan untuk dua jenis pupuk, yaitu Urea dan NPK. Namun pada tahun 2024, pemerintah kembali menyalurkan pupuk organik sebesar 0,55.

2. Indeks Pertanaman (IP) Padi

Indeks pertanaman (IP) padi merupakan rata-rata masa tanam dan panen dalam 1 (satu) tahun pada lahan yang sama. Potensi peningkatan IP di setiap wilayah dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, iklim, tanah, dan unsur hara secara terpadu serta melalui perbaikan pola tanam baik pada padi maupun tanaman pangan lainnya. Optimalisasi lahan sawah tadah hujan di musim kemarau dapat memanfaatkan potensi sumber daya air yang ada baik berupa air permukaan (sungai dan mata air) maupun air tanah.

Grafik 2.13
Indeks Pertanaman (IP) Padi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

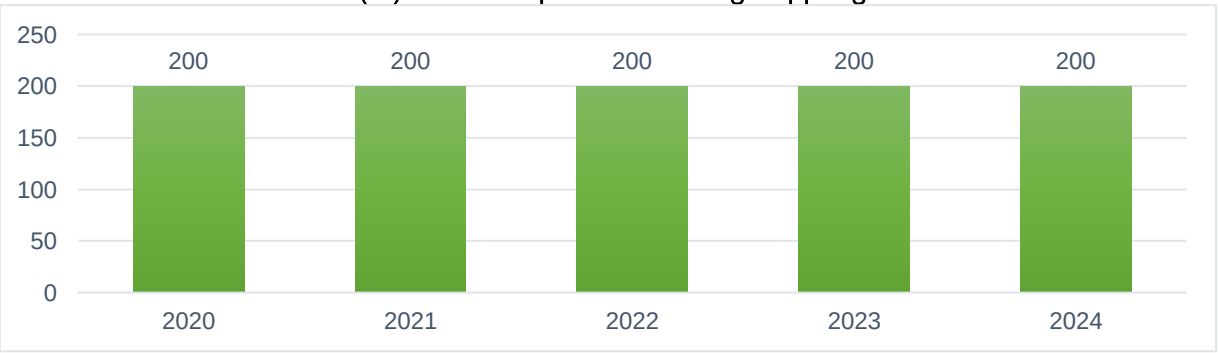

Sumber: Dinas TPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah tahun 2025

Indeks Pertanaman (IP) Padi di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020-2024 berada di angka 200, atau lahan pertanian di daerah secara konsisten dapat mendukung dua kali masa tanam dan panen padi dalam setahun.

3. Proporsi Sawah Irigasi

Sawah irigasi merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah, karena sistem irigasi yang baik mampu menjamin ketersediaan air untuk pertanian sepanjang tahun. Keberadaan sawah irigasi tidak hanya meningkatkan produktivitas hasil pertanian, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di wilayah agraris.

Proporsi sawah irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren penurunan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, luas sawah irigasi tercatat sebesar 39.075 hektar, namun secara bertahap mengalami penurunan menjadi 36.578,1 hektar pada tahun 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti alih fungsi lahan, degradasi sistem irigasi, atau perubahan pola tanam.

Grafik 2.14
Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

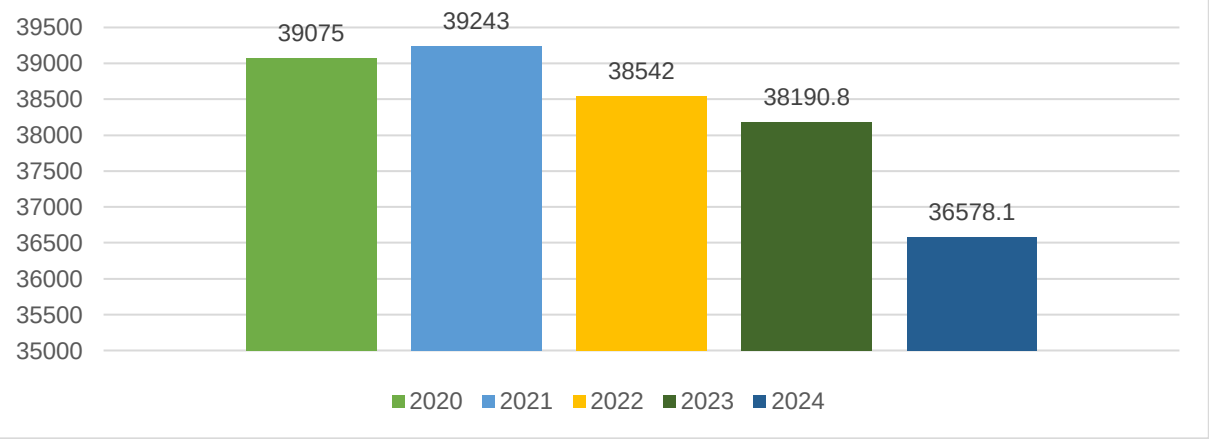

Sumber: Dinas TPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2025

4. Produksi Perikanan

Secara geografis, Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah di Sulawesi Selatan yang wilayahnya tidak memiliki laut. Secara umum kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh daerah yang datar, perbukitan dan yang lebih kecil adalah daerah pegunungan. Meski begitu, daerah ini mampu menghasilkan produksi komoditas perikanan relatif besar, namun tidak selalu mencapai target.

Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Sidenreng Rappang selam 5 tahun cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024. Dengan tren meningkat dari 2.804,30 di tahun 2020 menjadi 3,822.00 pada tahun 2024. Faktor alam seperti cuaca dan iklim yang mempengaruhi fluktuasi produksi ikan seperti kekeringan yang menghambat pembudidaya ikan, dan hujan yang terus menerus membuat nelayan tidak dapat melakukan penangkapan ikan.

Grafik 2.15
Produksi Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020-2024

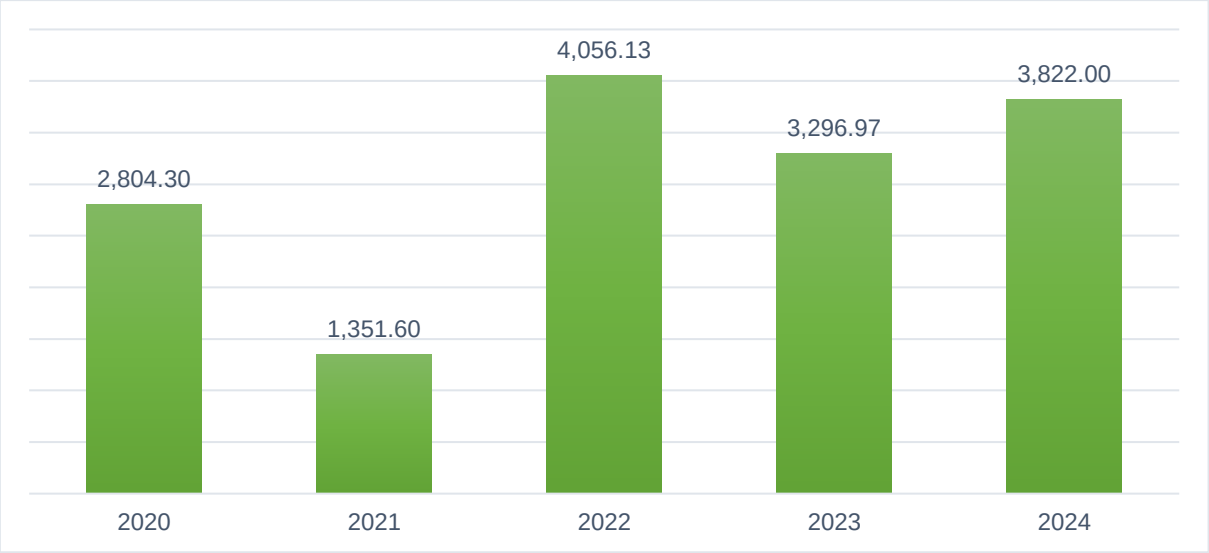

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

5. Angka Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan termasuk salah satu komponen pengeluaran bulanan rumah tangga paling besar di Kabupaten Sidenreng Rappang setelah makanan/minuman jadi dan rokok. Data BPS Sulawesi Selatan mencatat bahwa pengeluaran bulanan rumah tangga di Sidenreng Rappang dihabiskan untuk konsumsi ikan. Meskipun begitu, angka capaian konsumsi ikan masih belum pernah mencapai atau melampaui target yang ditentukan pemerintah daerah. Pada tahun 2020 konsumsi ikan sebanyak 38 kg/kapita. Tahun 2023, konsumsi ikan meningkat mencapai 54,79 kg/kapita. Sementara itu untuk data 2024 angka konsumsi ikan belum ada data. Konsumsi ikan cenderung berfluktuasi dikarenakan berbagai faktor seperti ketersediaan ikan yang disukai oleh masyarakat, harga ikan yang juga berfluktuasi, dan masih banyak masyarakat yang belum sadar akan manfaat ikan.

6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Ketahanan ekologi diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pelibatan individu, masyarakat serta industri dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dilakukan untuk memperkuat sinergi dan interaksi ketahanan sosial ekonomi dan ekologi. Pada akhirnya, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif serta kelestarian lingkungan.

Kabupaten Sidenreng Rappang masih perlu memberi perhatian serius terhadap kualitas lingkungan hidup. Selama periode 2020 hingga 2024, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, IKLH mencatatkan nilai 62,68 poin dan turun ke 62,15 poin pada tahun 2021, tetapi kembali meningkat menjadi 67,96 poin di tahun 2024.

Grafik 2.16
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

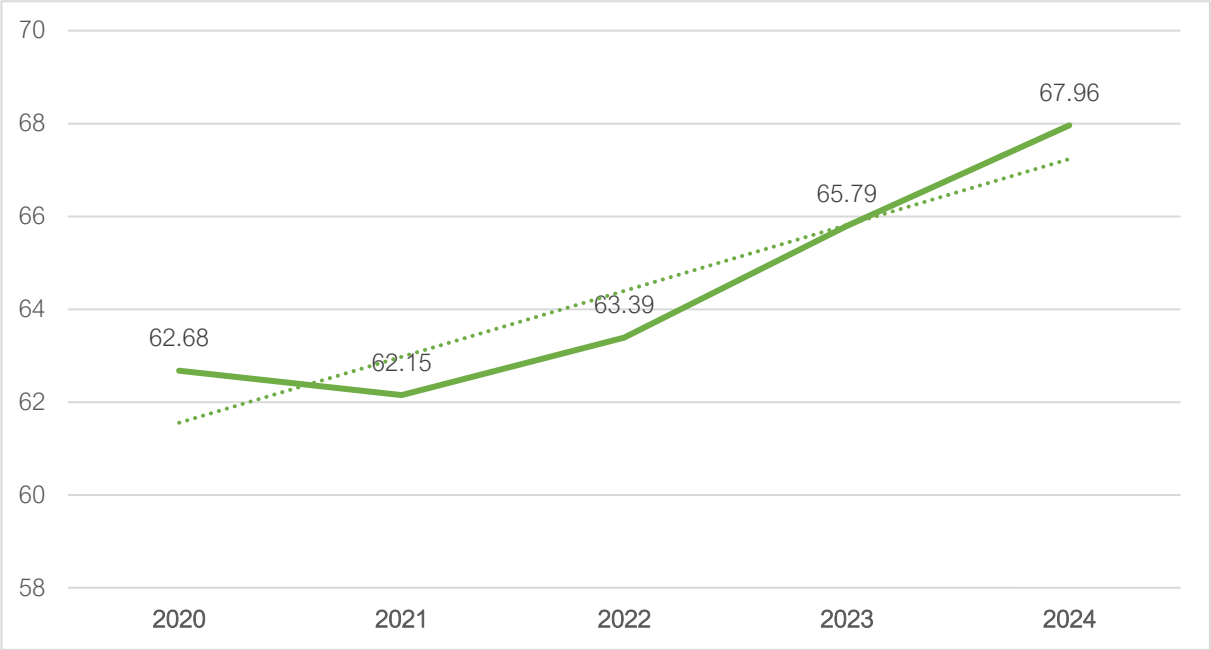

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

Tabel 2.28
Perkembangan Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

No	Indikator Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)2	58,40	50,00	53,64	54,00	50,00
2	Indeks Kualitas Udara(IKU)	87,55	87,81	87,90	85,59	94,22
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	49,19	48,63	48,63	49,44	50,23
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		62.68	65,01	66,55	66,79	67,96

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

Masih rendahnya nilai IKLH Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan belum tercapainya standar kualitas lingkungan pada berbagai komponen terutama lahan dan air. Rendahnya nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya jumlah yang tidak proporsional antara lahan bervegetasi dan lahan terbangun. Pada tahun 2020, IKL Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada angka 49,19 poin, lalu naik ke angka 52,23 poin pada tahun 2024. Tingginya kebutuhan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang mendorong alih fungsi hutan menjadi lahan terbangun maupun infrastruktur lainnya. Pada tahun 2020, nilai IKA Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 58,4 poin, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Nilai ini kemudian mengalami penurunan menjadi 50,00 poin pada tahun 2021, lalu naik ke angka 54,00 poin pada tahun 2023, sebelum kembali turun menjadi 50,00 poin di tahun 2024. Penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dari 54,00 pada tahun 2023 menjadi 50,00 pada tahun 2024 dipicu oleh beberapa faktor seperti tingginya pencemaran air yang berasal dari pertumbuhan penduduk, peningkatan penggunaan pupuk dan pestisida, serta kurang optimalnya

pengelolaan limbah; kondisi iklim ekstrim (El Nino) yang mengurangi debit air sungai sehingga konsentrasi pencemat lebih tinggi; serta fluktuasi data pemantauan, karena titik pantau dan parameter (pH, BOD, COD, TSS, DO, Nitrat, Fecal Coliform, dsb.) sangat dipengaruhi kondisi lapangan.

7. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Selama lima tahun terakhir, persentase akses sanitasi aman di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2020, sebesar 5,83 persen rumah tinggal sudah bersanitasi aman, meningkat menjadi 6,54 persen di tahun 2021. Angka ini kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 3,22 persen. Tahun 2023 dan 2024, perlahan naik kembali masing-masing di angka 3,38 persen dan 3,70 persen.

Grafik 2.17
Akses Sanitasi Aman Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

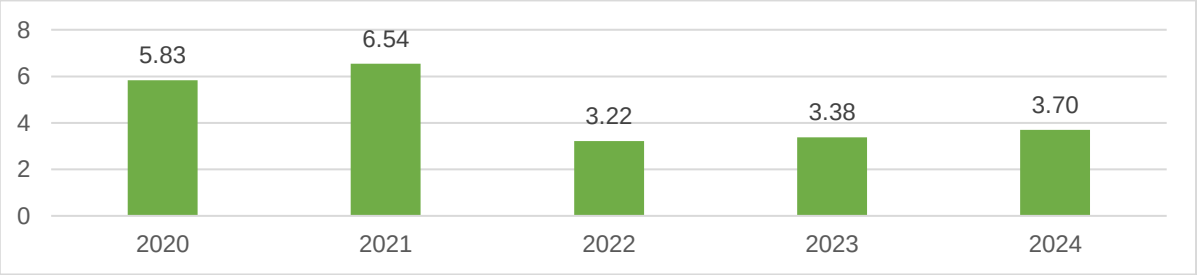

Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2025

Rendahnya sanitasi aman jika dibandingkan dengan akses sanitasi layak yang sudah mencapai 98,32 persen, disebabkan pasokan air bersih yang masih terbatas dibeberapa wilayah begitupun dengan kesadaran masyarakat tentang pentingya sanitasi aman masih rendah, sehingga tidak ada kepedalian untuk mewujudkan lingkungan bersih.

Tabel 2.29
Persentase Akses Sanitasi Layak dan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

No	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
1	Akses Sanitasi Layak (%)	95,83	98,52	94,13	94,77	98,32
2	Akses Sanitasi Aman (%)	5,83	6,54	3,22	3,38	3,70

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

Akses sanitasi yang aman juga dapat dilihat dari jumlah peneyedotan lumpur tinja yang dilakukan oleh Dinas Biciptapera Sidenreng Rappang pertahunnya yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Jumlah Rumah tangga yang terlayani peneyedotan Lumpur Tinja

No.	Tolak Ukur	Jumlah Penyedotan Per Tahun (Rumah Tangga)			
		2021	2022	2023	2024
1	Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	0	0	0	0
2	Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3)	1540	263	172	161

Sumber: Dinas Bina Marga, cipta karya, pertanahan dan perumahan rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

Jumlah penyedotan lumpur tinja untuk terjadwal tidak ada, namun untuk peneyedotan lumpur tinja yang tidak terjadwal mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga menjadi 161 Rumah tangga di tahun 2024. Target penyedotan dari 250 rumah tangga hanya tecapai 161 rumah tangga, hal ini karena beberapa faktor teknis di lapangan sehingga tidak dapat dilakukan peneydotan.

Selain itu untuk melihat capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman dapat dilihat dari kondisi rumah tangga yang terlayani SPALD-T baik itu skala komunal, kawasan dan perkotaan.

Tabel 2.31
Jumlah Rumah tangga yang Terlayani SPALD-T

No.	Jenis SPALD-T	Jumlah Sambungan Rumah					
		Jumlah Kapasitas Desain (SR)			Jumlah Kapasitas Terpakai (SR)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	IPAL Skala Permukiman	475	475	475	340	340	340
2	IPAL Skala Kawasan	150	150	150	150	150	150
3	IPAL Skala Kota	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah, 22025

Jumlah sambungan rumah untuk IPAL Skala permukiman mengalami angka statis tiap tahunnya yakni di angka 475 SR untuk kapasitas desain dan 340 SR untuk kapasitas terpakai hingga pada tahun 2024, begitupun untuk IPAL Skala Kawasan yang statis di angka 150 SR untuk kapasitas desain dan 150 SR untuk kapasitas terpakai hingga pada tahun 2024. Adapun untuk IPAL skala Kota tidak ada pemasangan.

8. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan hal krusial untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Indikator untuk mengukur sejauh mana pengelolaan sampah diantaranya adalah persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. Indikator ini diperoleh dari jumlah sampah terkelola (penanganan dan pengurangan) dikurangi jumlah sampah yang didaur ulang dibagi jumlah timbulan sampah. Pada tahun 2024, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 48.288,33 Ton per tahun, dimana sebanyak 26.400,92 Ton sampah telah dikelola. Dengan demikian, persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah sebesar 54,67 persen. Ini mengindikasikan perlunya peningkatan sarana dan prasarana, optimalisasi penerapan program 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), serta pengembangan teknologi dan keterampilan sumber daya manusia di bidang pengelolaan sampah.

Grafik 2.18
Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

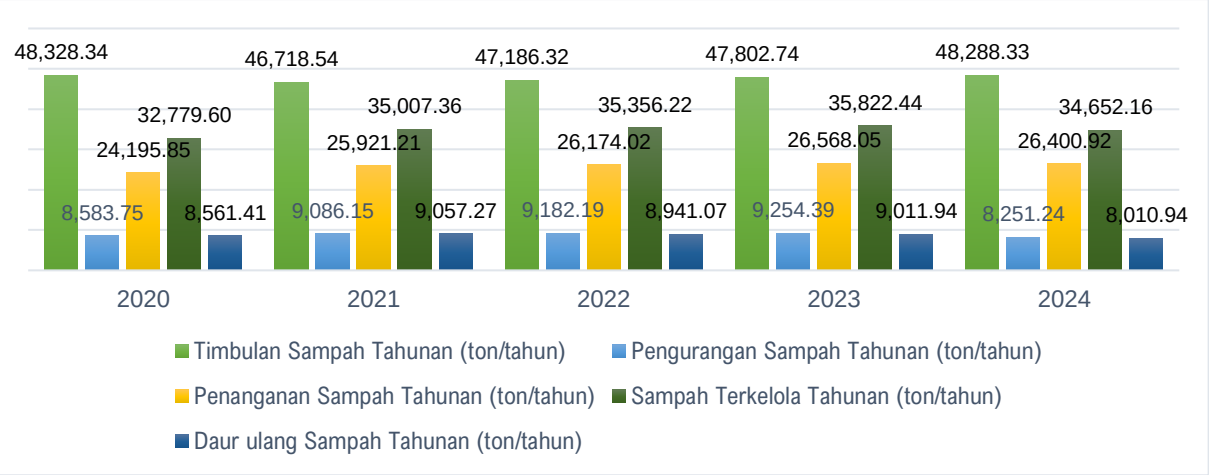

Sumber: SIPSN-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diolah Tahun 2025

9. Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dan Sampah yang Terdaur Ulang

Berdasarkan data yang tersedia di SIPSN, persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah menunjukkan peningkatan dari 17,76 persen pada tahun 2020 menjadi 19,45 persen di tahun 2021. Angka ini stabil hingga tahun 2022 mencapai 19,46 persen. Sedikit menurun menjadi 19,36 persen di tahun 2023 dan 17,09 persen tahun 2024.

Sementara itu, persentase sampah yang terdaur ulang juga mengalami tren yang sama. Pada tahun 2020, tercatat sebesar 18,31 persen, meningkat menjadi 20,34 persen di tahun 2021. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan, di angka 19,88 persen di tahun 2022, 19,78 persen di tahun 2023, dan 17,44 persen di tahun 2024.

Grafik 2.19
Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

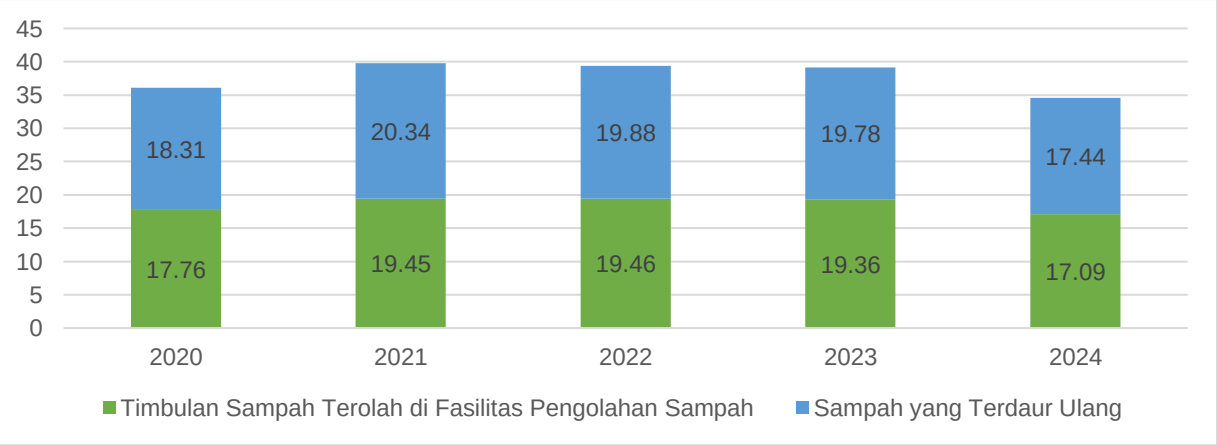

Sumber: SIPSN-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diolah Tahun 2025

Meskipun kontribusi upaya pengurangan sampah dari sumbernya masih sangat kecil yang disebabkan oleh penanganan sampah masih pada pendekatan angkut dan buang ke TPA sehingga belum terdapat upaya-upaya signifikan pada pengurangan sampah dari sumbernya.

10. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengelolaan sampah rumah tangga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan sampah suatu daerah. Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya menyediakan layanan penuh pengumpulan sampah untuk rumah tangga melalui metode pengumpulan dari pintu ke pintu secara rutin atau penyediaan tempat pembuangan sampah komunal yang berjarak maksimal 200 meter yang dikumpulkan untuk pemisahan sampah berdasarkan kategori, yaitu fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu, guna meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilah sampah. Tahun 2024 rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 10,40 persen atau 8.643 rumah tangga terlayani, tertinggi kedua untuk Kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 11,69 persen atau 10.575 rumah tangga terlayani. Sedangkan layanan pengumpulan sampah terendah di Kabupaten Tana Toraja hanya mencapai 0,08 persen atau 52 rumah tangga dan Kabupaten Toraja Utara hanya mencapai 0,09 persen atau hanya 50 rumah tangga terlayani. Pengukuran rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah tahun 2024 disajikan pada table berikut.

Tabel 2.32
Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Kep. Selayar	1.060	2,96
Bulukumba	2.707	2,25
Bantaeng	3.168	5,83
Jeneponto	4.539	4,29
Takalar	1.745	2,10
Gowa	1.059	0,51
Sinjai	3.411	3,98
Kab. Maros	5.350	6,46
Pangkep	10.575	11,69
Barru	1.042	2,13
Bone	10.100	4,88
Soppeng	1.243	2,10
Wajo	430	0,43
Sidrap	8.643	10,40
Pinrang	5.671	5,36
Enrekang	422	0,72
Luwu	151	0,20
Tana Toraja	52	0,08
Luwu Utara	2.770	3,42
Luwu Timur	2.405	2,97
Toraja Utara	50	0,09
Kota Makassar	11.664	3,15

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Kota Parepare	823	2,02
Kota Palopo	210	0,37
Prov. Sulsel	79.290	3,27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan; diolah tahun 2025

2.1.1.6. Resilensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim

Salah satu kajian risiko yang dihadirkan pada dokumen ini adalah kajian risiko bencana. Kajian ini didasarkan pada laporan kajian resiko bencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengkajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan di suatu daerah sehingga dapat dianalisis kemungkinan timbulnya potensi bencana di daerah tersebut. Setelah diketahui kemungkinan potensi bencana, dapat ditentukan langkah-langkah sistematis terhadap upaya penanggulangan bencana untuk pengurangan risiko masing-masing bencana yang berpotensi. Secara umum, pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas.

Pengkajian tersebut didasarkan pada indeks masing-masing bencana terhadap bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Metodologi yang digunakan untuk menerjemahkan indeks tersebut, menghasilkan tingkat risiko untuk setiap bencana di suatu daerah. Penyempurnaan terhadap metodologi yang digunakan akan berpengaruh terhadap proses pengkajian risiko dan hasil kajian. Pengaruh tersebut terkait dengan komponen-komponen yang digunakan dalam pengkajian, yaitu bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko.

Hasil kajian resiko bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) jenis bahaya (rendah-tinggi) yang berisiko terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, likuefaksi, dan tanah longsor. Dari kedelapan bencana tersebut, bencana banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi dan kekeringan, patut diwaspadai. Hal ini dikarenakan keempat bencana tersebut berisiko dapat terjadi di setengah wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain itu, risiko banjir dan kekeringan akan berdampak buruk terhadap produktifitas sumber mata pencaharian masyarakat yang dominan berupa lahan sawah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Banjir merupakan salah satu bencana alam di mana daratan tergenang oleh aliran air yang berlebihan. Bencana ini sering terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan, bahkan di beberapa tempat banjir sudah menjadi agenda tahunan. Banjir di lokasi berbeda juga tentunya akan menimbulkan dampak yang berbeda. Banjir di perkotaan sebagian besar akan menimbulkan kerusakan pada sarana dan prasarana pemukiman warga. Lain halnya jika bencana ini terjadi di pedesaan yang pada umumnya akan menyebabkan terendamnya lahan pertanian dan ladang milik masyarakat.

Tabel 2.33
Luas dan Sebaran Lokasi Resiko Banjir di Kabupaten Sidenreng Rappang

Kecamatan	Luas Bencana Banjir (Ha)			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Baranti	165,34	2.000,58	1.267,38	3.433,31
Dua Pitue	242,11	2.838,63	3.613,02	6.693,76
Kulo	73,04	1.975,77	863,43	2.912,24
Maritengngae	81,86	3.591,79	2.058,59	5.732,24
Panca Lautang	5,98	2.335,26	1.606,62	3.947,85
Panca Rijang	2,99	955,42	515,75	1.474,16
Pitu Riase	22,94	2.564,94	1.921,58	4.509,46
Pitu Riawa	151,75	4.505,59	3.625,19	8.282,53
Tellu Limpoe	67,67	1.552,26	771,12	2.391,06
Watang Pulu	39,82	2.127,02	1.284,26	3.451,09
Watang Sidenreng	110,67	3.951,28	2.195,52	6.257,46
Total	964,17	28.398,55	19.722,45	49.085,18
Total (%)	1,96	57,86	40,18	100,00

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025

Berdasarkan batas administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang potensi terjadinya resiko banjir terbesar terdapat pada Kecamatan Pitu Riawa, Dua Pitue, Maritengngae, Watang Sidenreng, dan Panca Lautang. Hal ini dikarenakan kelima kecamatan tersebut sebagian besar wilayahnya memiliki topografi yang datar dan sebagian landai. Selain itu, tingginya curah hujan dan kurang nya resapan air juga mempengaruhi risiko terjadi nya banjir. Adanya informasi mengenai kejadian banjir akan sangat membantu masyarakat dan pemerintah dalam menentukan berbagai keputusan sehingga mampu meminimalisir akibat atau dampak dari bencana alam ini.

1. Indeks Risiko Bencana

Pengkajian terhadap risiko bencana di suatu wilayah dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap beberapa komponen, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di wilayah tersebut. Komponen bahaya merupakan fenomena alam yang dapat menyebabkan gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan terdiri kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Terakhir, komponen kapasitas merupakan unsur ketahanan daerah, seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat, dan kapasitas pemulihan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang konsisten di angka 119.20 dengan kategori sedang terhadap bahaya, kerentanan dan kapasitas.

Grafik 2.20
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng RappangTahun 2024

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, kategori risiko bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berstatus sedang dengan skor sebesar 119.20 di tahun 2024, menempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai kabupaten di urutan ketiga terendah untuk skor Indeks Risiko Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, daerah dengan skor tertinggi ditempati oleh Kabupaten Luwu, yaitu sebesar 186.59 atau berstatus risiko tinggi di tahun 2024, sedangkan daerah dengan dengan skor terendah ditempati oleh Kabupaten Bantaeng, yaitu sebesar 105.96 atau berstatus risiko sedang di tahun 2024. Minimnya risiko bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan keunggulan yang bisa dioptimalkan untuk mendorong pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

Grafik 2.21
Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

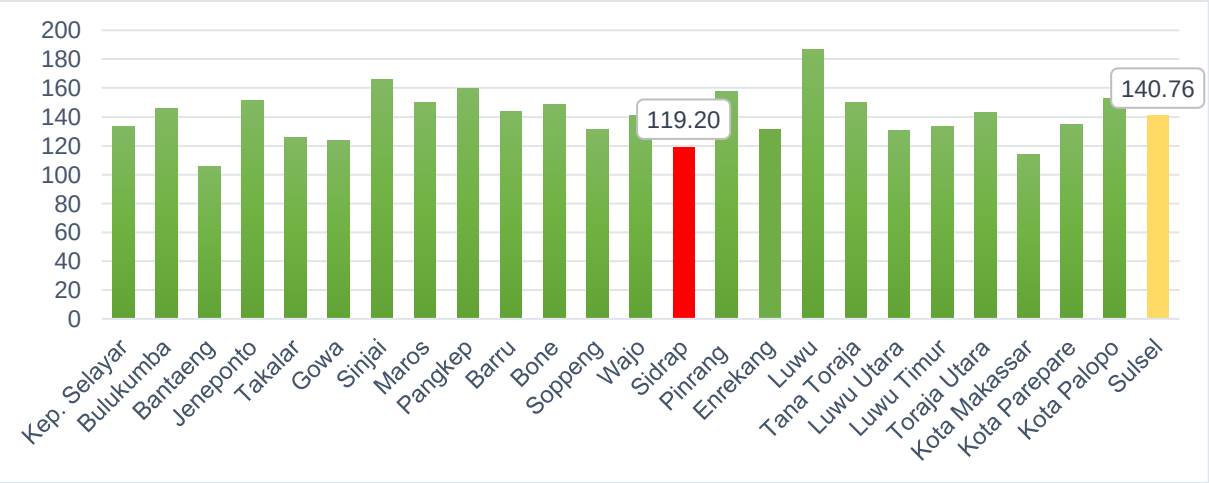

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, diolah Tahun 2025

2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Persentase penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan perubahan persentase dalam jumlah emisi gas rumah kaca dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Indikator ini bertujuan untuk mengukur seberapa cepat upaya penurunan GRK di suatu wilayah. GRK merupakan gas-gas seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), nitrogen oksida (N2O), dan berbagai jenis gas lainnya yang bisa menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim.

Informasi yang diperoleh dari Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa potensi penurunan emisi di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 3,04 persen pada tahun 2024. Potensi Penurunan intensitas emisi GRK diukur berdasarkan aksi pembangunan rendah karbon daerah. Berdasarkan hasil inventarisasi aksi mitigasi, untuk tahun 2024 menurunnya potensi penurunan intensitas emisi GRK karena pada sektor pertanian yang berkontribusi besar pada tahun sebelumnya sebagai aksi mitigasi emisi GRK melalui penggunaan bibit rendah emisi tidak lagi dilakukan begitupun pada sektor lainnya.

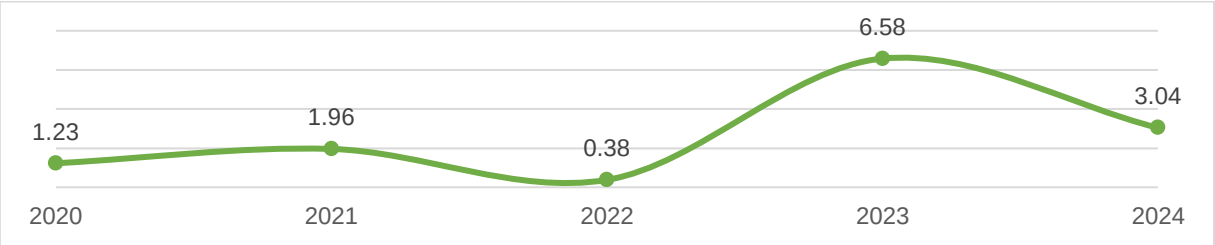

Sumber: AKSARA, Bappenas, diolah Tahun 2025

2.1.1.7. Demografi

1. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang menetap dan tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, baik sebagai warga negara maupun pendatang, dan diakui secara hukum sebagai bagian dari wilayah tersebut. Indonesia saat ini berada dalam fase bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 281,6 juta jiwa, dan sekitar 68–70% di antaranya berada dalam kelompok usia produktif. Kondisi penduduk indonesia juga tercerminkan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.22
Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

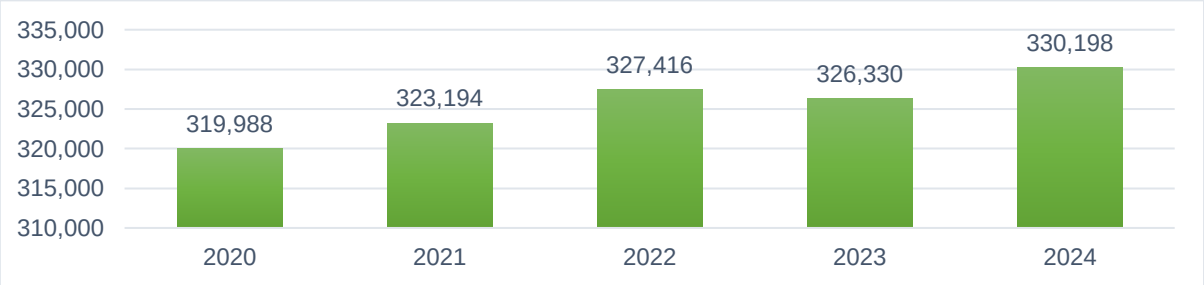

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Pada tahun 2020, tercatat ada sebesar 319.988 populasi, kemudian meningkat menjadi 326.330 jiwa pada tahun 2023, sebelum mencapai angka terbaru di tahun 2024 yang mencapai 330.198 jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 3,49 persen dari populasi penduduk Sulawesi Selatan. Meskipun terjadi penambahan per tahun, tapi nampaknya masih bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah.

Grafik 2.23
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

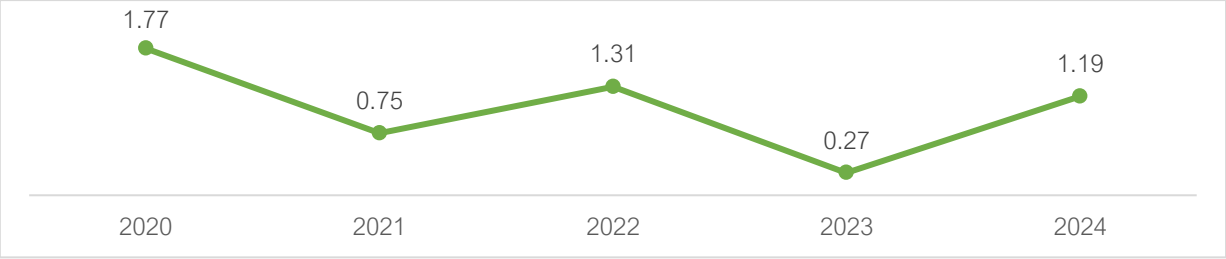

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola yang terkendali, mencerminkan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dan kebijakan pemerintah daerah. Pada tahun 2020, jumlah penduduk sebesar 319.988 jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,77 persen, yang merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Kenaikan terendah yaitu pada tahun 2023 yakni 0,27 persen dengan jumlah penduduk sebesar 326.330 jiwa. Pada tahun 2024, jumlah penduduk kembali meningkat menjadi 330.198 jiwa, dengan laju pertumbuhan mencapai 1.19 persen. Pengendalian pertumbuhan penduduk menjadi fondasi penting untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal, dengan memastikan peningkatan kualitas hidup penduduk usia produktif.

2. Komposisi penduduk

Komposisi penduduk adalah pembagian atau pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, dan lainnya. Komposisi ini penting untuk mengetahui struktur penduduk suatu wilayah serta digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Adapaun Komposisi berdasarkan usia penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.24
Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

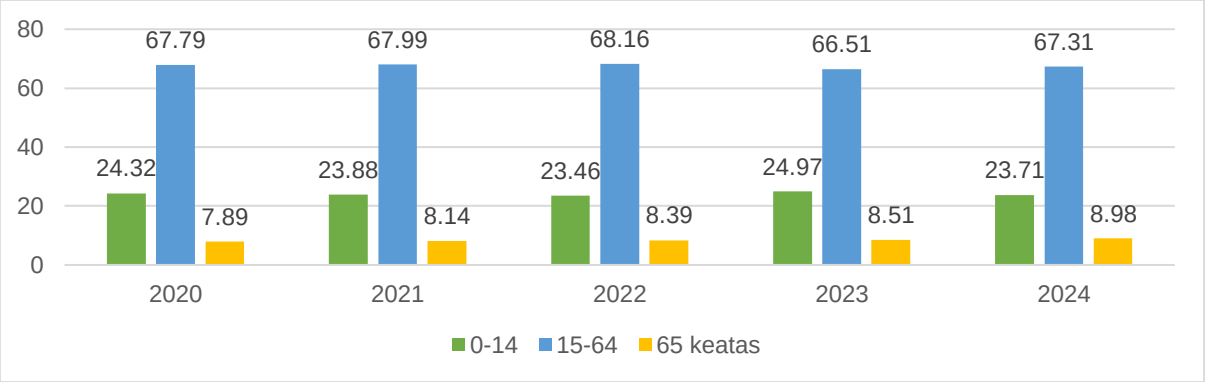

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Pada tahun 2024, komposisi penduduk menurut kelompok usia menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang berada pada kelompok usia produktif (usia 15-59 tahun) mencapai 67,31 persen

dari total penduduk. Keberedaan kelompok penduduk usia produktif sangat penting bagi perekonomian daerah, terutama untuk menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun proporsi penduduk yang berada pada kelompok usia anak (usia <15 tahun) dan kelompok usia tua (usia 65+) masing-masing sebesar 23,71 persen dan 8,98 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, proporsi penduduk usia produktif cenderung stabil. Perubahan terjadi pada kelompok usia tua yang mengalami peningkatan dari 7,89 persen menjadi 8,98 persen, serta kelompok usia anak yang mengalami penurunan dari 29,32 persen menjadi 23,71 persen.

3. Rasio Penduduk

Selain menunjukkan dominasi penduduk usia produktif, piramida penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang juga sekaligus menggambarkan proporsi penduduk perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki. Secara keseluruhan, tahun 2024 ada sebesar 50,65 persen penduduk perempuan dari total populasi dan 49,35 persen penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin 98 atau di bawah 100. Dari 11 kecamatan, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Pitu Riawa menjadi dua wilayah yang mencatat penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

Gambar 2.10
Proporsi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

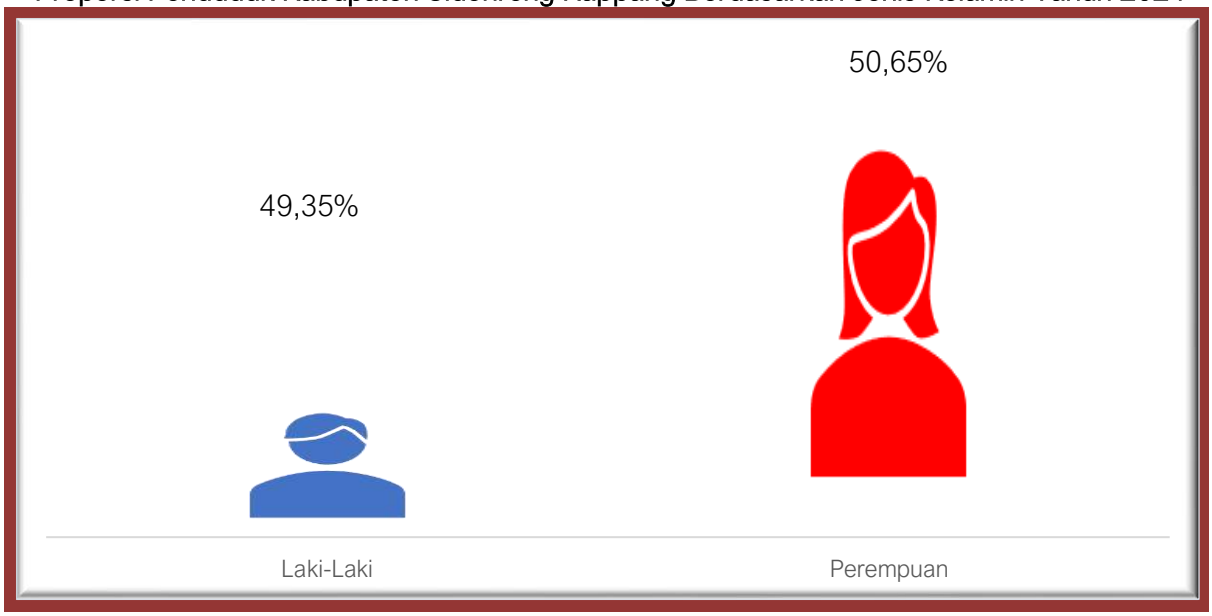

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah; 2025

Pada tahun 2024, rasio jenis kelamin Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 98,16 atau dengan kata lain terdapat sekitar 98 pria untuk setiap 100 perempuan. Angka rasio jenis kelamin penduduk mengalami peningkatan tiap tahunnya artinya peningkatan jumlah laki-laki tiap tahunnya mengalami peningkatan, walaupun tidak signifikan namun peningkatan ini mengindikasikan jumlah populasi laki-laki kedepan akan mengimbangi jumlah populasi perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.25
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

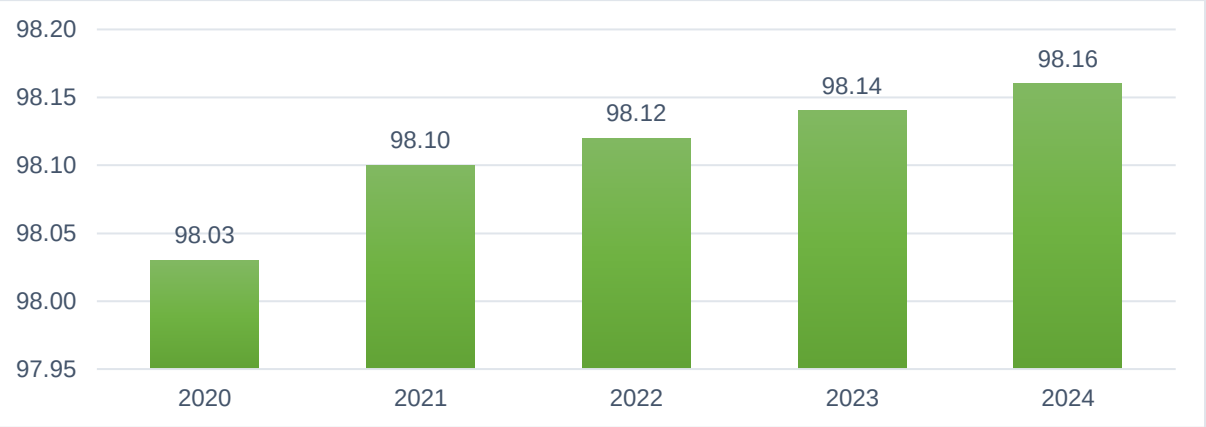

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

4. Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk menunjukkan banyaknya penduduk per satuan luas wilayah (km^2). Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk juga mengindikasikan adanya pertambahan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung meningkat dari 170 orang per km^2 di tahun 2020 menjadi 175 orang per km^2 di tahun 2024. Peningkatan kepadatan penduduk ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk yang positif.

Jika diamati penyebaran penduduk menurut wilayah kecamatan pada tahun 2023, penduduk terbanyak bermukim di Kecamatan Maritengngae, yaitu sebanyak 55.130 jiwa atau 16,70 persen dari total penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang. Kecamatan Watangpulu dan Baranti masing-masing menempati urutan kedua dan ketiga, yaitu 38.991 jiwa (11,81%) dan 33.621 jiwa (10,18%). Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Kulo, yaitu hanya 14.394 jiwa atau 4,36 persen dari total penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang. Jika dikomparasi dengan tahun 2020, pola penyebaran penduduk menurut kecamatan tidak banyak mengalami perubahan. Proporsi penduduk terbesar tetap berada di wilayah Kecamatan Maritenggange, Baranti, dan Watangpulu. Sedangkan proporsi penduduk terkecil tetap berada di wilayah Kecamatan Kulo, Panca Lautang, dan Watang Sidenreng.

Meskipun Kecamatan Maritengngae mencatat jumlah penduduk paling besar, namun tingkat kepadatan penduduk tertinggi justru tercatat di Kecamatan Panca Rijang, yaitu 964,40 jiwa per Km^2. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Maritengngae sedikit lebih rendah, yaitu 836,57 jiwa per Km^2 dan menempati posisi kedua tertinggi. Sedangkan Kecamatan Putu Riase mencatat tingkat kepadatan penduduk terendah, yaitu hanya 28,80 jiwa per Km^2. Kecamatan Pitu Riase merupakan wilayah terluas di Kabupaten Sidenreng Rappang (mencapai hampir 45% dari total luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang) sementara jumlah penduduk yang bermukim di wilayah ini relatif kecil (hanya 7,36% dari total penduduk Kabupaten Sidenreng

Rappang). Fakta ini menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat tidak merata dan terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

Grafik 2.26
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

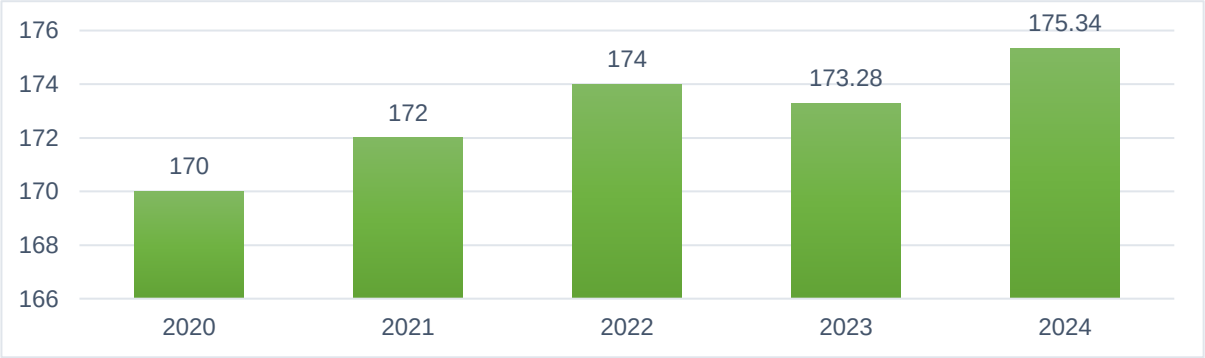

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Tabel 2.34
Penyebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dan 2024

No	Kecamatan	2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Panca Lautang	19.513	5,98	19.653	5,95
2	Tellu Limpoe	26.366	8,08	26.552	8,04
3	Watang Pulu	38.601	11,83	38.991	11,81
4	Baranti	33.341	10,22	33.621	10,18
5	Panca Rijang	32.433	9,94	32.809	9,94
6	Kulo	14.185	4,35	14.394	4,36
7	Maritengngae	54.475	16,69	55.130	16,70
8	Watang Sidenreng	20.657	6,33	21.051	6,38
9	Pitu Riawa	32.207	9,87	32.581	9,87
10	Dua Pitue	30.533	9,36	31.084	9,41
11	Pitu Riase	24.019	7,36	24.332	7,37

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah tahun 2025

5. Proyeksi Demografi Tahun 2025 – 2030

Proyeksi demografi memberikan ukuran dan struktur umur penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang di masa depan. Pemerintah telah melakukan proyeksi jumlah penduduk dengan menggunakan skenario tren dan skenario kebijakan. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan BPS, terdapat perhitungan parameter penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 – 2030

Parameter	2020	2025	2030
Penduduk			
Laki-Laki (000)	158,07	165,21	171,59
Perempuan (000)	161,18	168,32	174,91
Total (000)	319,25	333,52	346,51

Parameter	2020	2025	2030
Sex Ratio (%)	98,07	98,15	98,10
Komposisi Umur (%)			
0-14	24,34	22,95	22,52
15-64	67,82	68,40	67,53
65+	7,84	8,65	9,95
Depedency Ratio (%)	47,45	46,20	48,07
Fertilitas			
Total Fertility Rate (TFR)	2,12	2,07	2,03
Mortalitas			
Infant Mortality Rate (IMR)	15,03	14,61	13,14

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang, Bps Tahun 2025

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Nilai PDRB dapat dihitung dengan menggunakan harga berlaku dan harga tahun dasar (konstan). Perubahan PDRB harga konstan dari tahun ke tahun mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang mendapat nilai positif di tahun 2024 yakni sedikit mengalami percepatan sebesar 4,05 persen dimana sebelumnya di angka 3,28 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tidak lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, yang berada di angka 5,02 persen untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan 5,05 persen untuk Nasional di tahun 2023. Hal ini tentu menjadi dorongan serta tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perekonomian dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada.

Grafik 2.27
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020–2024

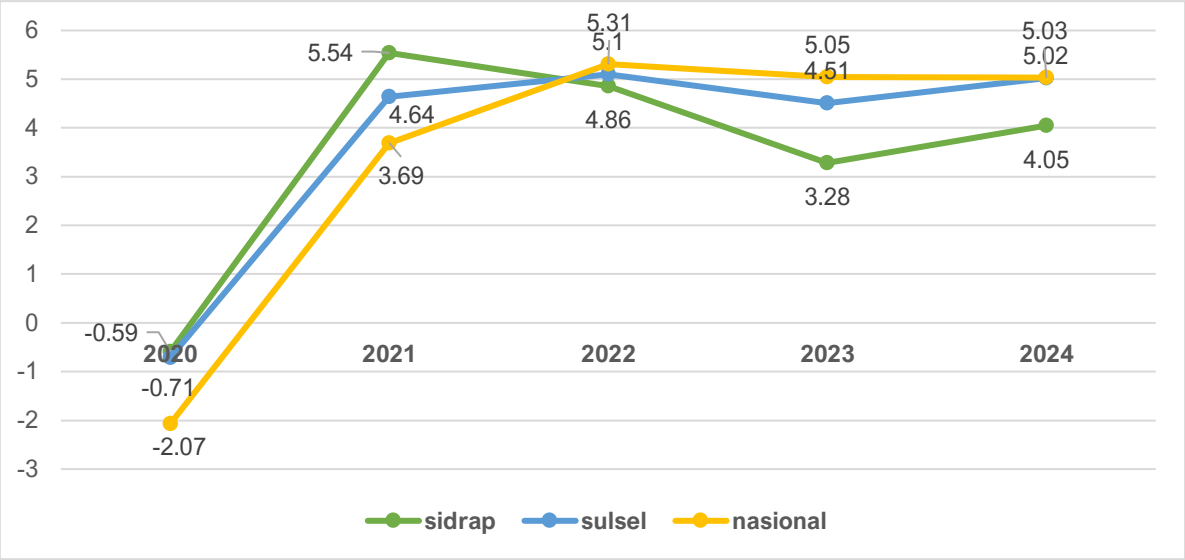

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kondisi perekonomian daerah pada masa waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi indikator pembangunan ekonomi yang mengukur kenaikan pendapatan suatu wilayah nasional. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah dari aktivitas ekonomi yang dilakukan pada suatu daerah pada suatu waktu tertentu.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2024 sedikit mengalami percepatan dibanding tahun sebelumnya. Walaupun sektor pertanian, Perkebunan dan perikanan mengalami kontraksi, namun laju pertumbuhan 4 sektor besar lainnya mengalami peningkatan signifikan. Pada sektor konstruksi mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu 5,31 persen, industri pengolahan 4,71 persen, dan perdagangan besar dan eceran sebesar 6,37 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tidak lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, yang berada di angka 4,51 persen untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan 5,05 persen untuk Nasional di tahun 2023. Hal ini tentu menjadi dorongan serta tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perekonomian dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada.

Bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tetangga di Ajatappareng yang senilai 4,885 persen, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang yang senilai 4,05 persen tidak lebih baik.

Tabel 2.36
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dan Daerah Ajatappareng Tahun 2023-2024

No	Kab/ Kota	PDRB ADHK 2023 (Milyar Rupiah)	PDRB ADHK 2024 (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi	Rata-Rata pertumbuhan Ekonomi Daerah Ajatappareng
1	Pangkep	18.363,59	19.236,71	5	4,885
2	Barru	5.329,31	5.516,25	4,92	
3	Pinrang	14.082,65	14.388,99	5,71	
4	Enrekang	5.065,36	5.183,42	4,54	
5	Parepare	5.468,43	5.680,82	5,09	
6	Sidrap	9.297,02	9.601,72	4,05	

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Tabel 2.37
Kontribusi Lapangan Usaha Utama terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-4,01	5,38	4,00	0,48	-0,78
Pertambangan dan Penggalian	2,77	9,84	5,98	7,15	6,08
Industri Pengolahan	-1,70	7,13	12,17	8,13	4,71
Pengadaan Listrik, Gas	5,31	10,85	9,09	7,77	4,66
Pengadaan Air	2,14	3,64	7,12	3,20	7,92
Konstruksi	3,16	6,31	0,32	0,47	5,31
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,67	6,77	7,27	6,10	6,37
Transportasi dan Pergudangan	-8,55	6,21	11,56	5,27	6,87
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,63	11,34	11,90	9,27	5,1
Informasi dan Komunikasi	10.4	6,26	5,11	5,45	7,66
Jasa Keuangan	5,75	6,82	-0,69	-3,71	1,95
Real Estate	0,88	3,09	5,49	7,74	5,98
Jasa Perusahaan	-2,82	4,23	6,78	7,26	12,19
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,01	-4,79	-0,01	-0,97	8,96
Jasa Pendidikan	3,28	2,97	2,04	4,23	6,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,03	5,9	2,23	2,88	9,53
Jasa lainnya	-3,21	6,77	5,92	9,14	13,34
Pertumbuhan PDRB	-0,59	5,44	4,86	3,28	4,05

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Struktur ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang masih memiliki pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana sektor pertanian masih mendominasi. Tingginya kontribusi pertanian sebagai sektor andalan menyebabkan ketergantungan besar terhadap sektor ini. Artinya, jika sektor pertanian tumbuh pesat, ekonomi daerah juga ikut berkembang, sebaliknya,

jika nilai tambah dari sektor pertanian melambat, maka akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Grafik 2.28
Pertumbuhan Ekonomi dan Lima Lapangan Usaha Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024

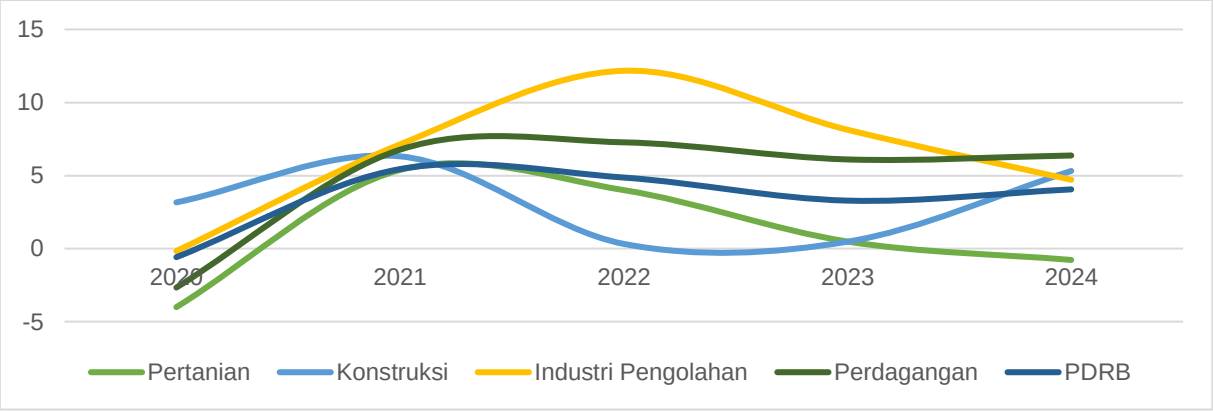

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Jika dibandingkan dua periode tersebut, maka tidak terdapat perubahan struktur ekonomi yang signifikan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 tahun terakhir. Memang terjadi penurunan kontribusi di sektor pertanian, tetapi dominasi sektor pertanian masih cukup tinggi, yaitu hampir sepertiga dari total PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini pula yang membuat Kabupaten Sidenreng Rappang tetap terkenal sebagai lumbung pangan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dalam produksi beras. Peningkatan produksi pertanian di tahun 2024 sendiri masih mengalami penurunan produksi, hal ini karena tingginya biaya produksi, cuaca ekstrem, serta gangguan distribusi akibat kondisi iklim yang tidak menentu.

Terlepas dari sejumlah permasalahan yang melanda sektor pertanian, Kabupaten Sidenreng Rappang masih menjadi pemasok beras, tidak hanya di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi daerah lain di luar Provinsi Sulawesi Selatan.

Faktor yang mendukung percepatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah peningkatan produksi 4 sektor besar, jika produksi pertanian meningkat ,akan berdampak pada sektor industri pengolahan khususnya pengolahan beras, dan selanjutnya berdampak pada perdagangan besar khususnya perdagangan beras. Disuatu sisi peningkatan sektor konstruksi khususnya konstruksi pemerintah yang menggunakan dana APBN atau APBD misalkan rehabilitasi jalan dan infrastruktur lainnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan di sektor ini, semakin banyak anggaran yang dikucurkan untuk infrastruktur maka laju pertumbuhan ekonomi pun semakin baik. Adapun faktor yang menghambat peningkatan laju pertumbuhan ekonomi adalah jika salah satu dari 4 sektor besar ini mengalami penurunan , maka akan berdampak pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng rappang secara akumulasi.

2. Tingkat Kemiskinan

Salah satu persoalan sosial ekonomi utama di dalam suatu wilayah adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Suatu rumah tangga dikategorikan miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Salah satu indikator kemiskinan adalah tingkat kemiskinan, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap total jumlah penduduk.

Grafik 2.29
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2020–2024

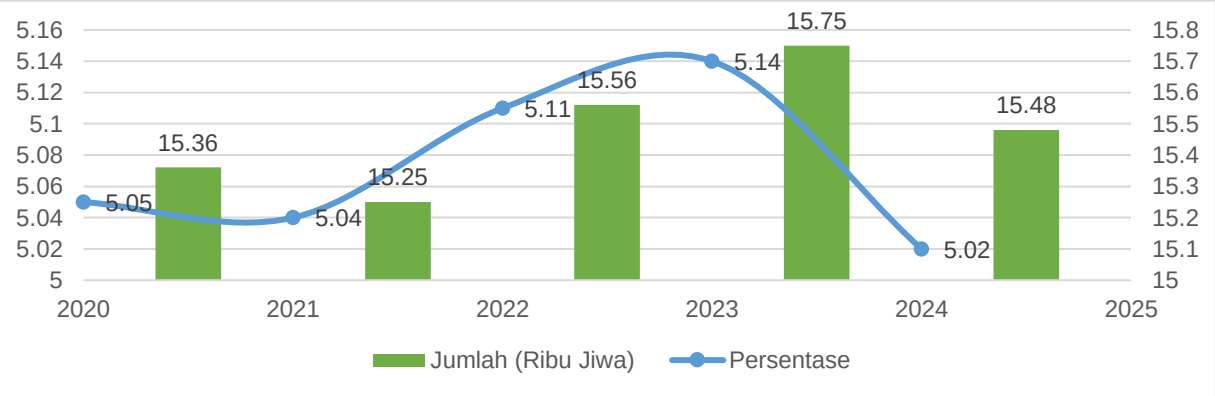

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Data BPS menunjukkan Kabupaten Sidenreng Rappang telah memprioritaskan pengentasan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan publik. Tahun 2020 angka kemiskinan mencapai 5,05 persen akibat kondisi covid 19, di tahun 2021 sempat mengalami penurunan namun tidak begitu signifikan yakni di angka 5,04 persen. Selanjutnya di tahun 2022 kembali mengalami kenaikan di angka 5,11 persen dan meningkat lagi di tahun 2023 di angka 5,14 persen, sampai pada tahun 2024 realisasi angka kemiskinan berhasil turun menjadi 5,02 persen. Pencapaian kemiskinan tahun 2024 terbaik di 5 tahun terakhir, namun capaiannya masih belum mencapai target RKPD tahun 2024 yang diproyeksikan sebesar 4,52 persen.

Sementara itu, tingkat kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang juga secara relatif lebih rendah dibanding dengan tingkat kemiskinan di level Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia selama periode 2020 – 2024. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia masing-masing sebesar 8,72 persen dan 9,78 persen, sedangkan di Kabupaten Sidenreng Rappang hanya sebesar 5,05 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2024, dimana tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia masing-masing sebesar 8,06 persen dan 9,03 persen, sedangkan di Kabupaten Sidenreng Rappang hanya sebesar 5,02 persen.

Indikator tingkat kemiskinan diperoleh dari hasil bagi antara jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Semakin banyak jumlah penduduk miskin relatif terhadap jumlah penduduk, maka tingkat kemiskinan juga akan semakin tinggi. Sementara itu, penduduk

dikatakan miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan pengeluaran minimum yang dibutukan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan yang sesuai dengan standar hidup layak. Besaran garis kemiskinan ini akan disesuaikan secara berkala dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, diantaranya karena faktor inflasi dan standar hidup layak yang semakin meningkat. Hal ini terlihat dari garis kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengalami peningkatan dari Rp349.452 per kapita per bulan di tahun 2020 menjadi Rp458.509 per kapita per bulan di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan angka kemiskinan dan/atau jumlah penduduk miskin bisa juga disebabkan oleh peningkatan garis kemiskinan.

Grafik 2.30
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia
Tahun 2020–2024

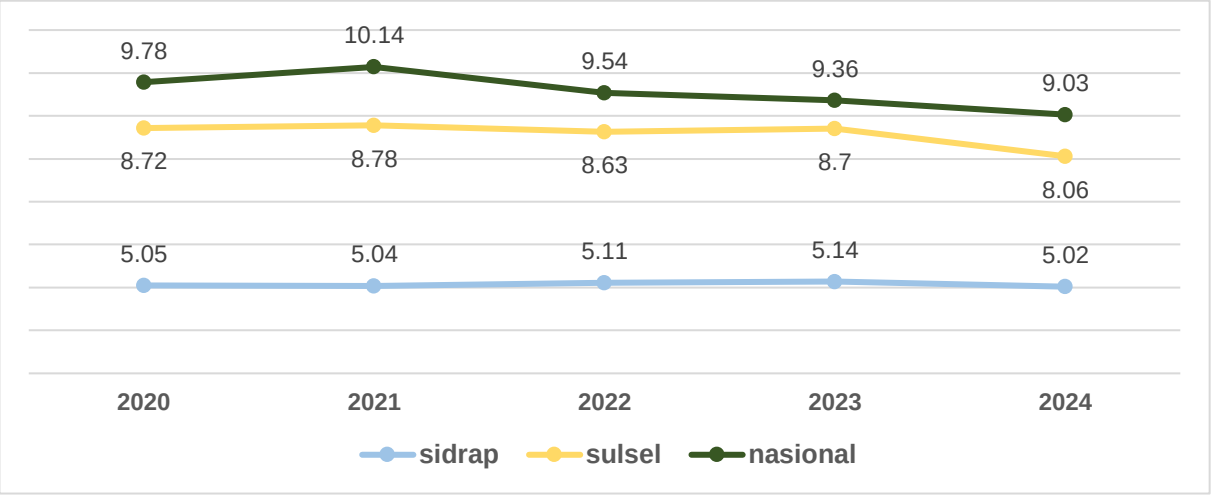

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Grafik 2.31
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

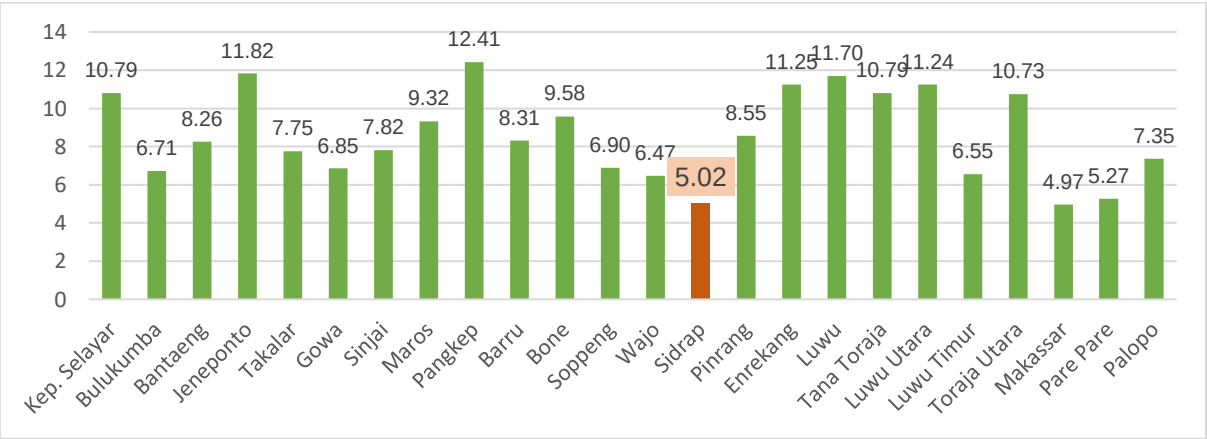

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, posisi tingkat kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang tergolong rendah, yakni berada di urutan kedua terendah setelah Kota Makassar (4,97%). Hal ini juga menunjukkan posisi Kabupaten Sidenreng

Rappang yang lebih rendah tingkat kemiskinannya dibanding daerah tetangga, seperti Kota Parepare (5,27%), Kabupaten Wajo (6,47%), Kabupaten Soppeng (6,90%), Kabupaten Barru (8,31%), dan Kabupaten Enrekang (11,25%).

Tabel 2.38
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Daerah Tetangga

Kab/Kota	2023	2024	Perubahan	Rata-rata Perubahan Daerah Ajatappareng
Sidrap	5.14	5.02	-0.12	-0.52
Barru	8.46	8.31	-0.15	
Enrekang	12.69	11.25	-1.44	
Pinrang	8.90	8.55	-0.35	
Parepare	5.34	5.27	-0.07	
Pangkep	13.40	12.41	-0.99	

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Bila dibandingkan dengan perubahan rata-rata daerah Ajatappareng, perubahan angka kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang menurun sebesar 0,12 persen, sudah cukup baik dibandingkan dengan perubahan rata-rata daerah Ajatappareng.

Grafik 2.32
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

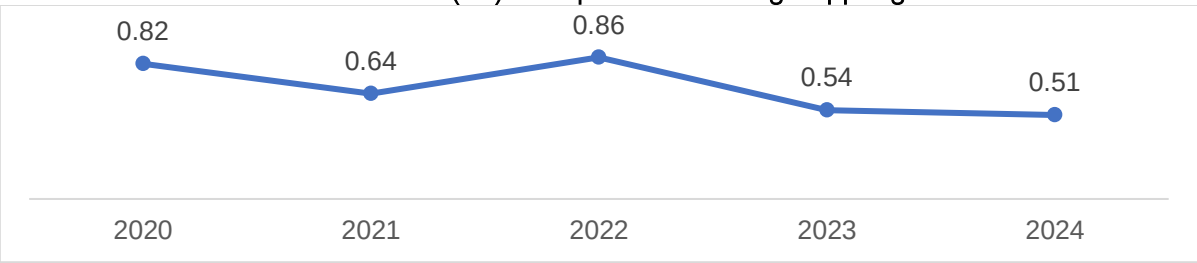

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Sidenreng Rappang telah menunjukkan kecenderungan positif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Tren indeks kedalaman kemiskinan cenderung turun dan cukup rendah. Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang selalu dibawah 1, menunjukkan bahwa jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan tidak begitu jauh. Angka ini mengalami penurunan dari 0,82 di tahun 2020 menjadi 0,64 di tahun 2021, dan kembali naik menjadi 0,86 di tahun 2022, dan setelah itu terus mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 0,54 dan di tahun 2024 sebesar 0,51. Inflasi yang tidak terkendali dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi indeks kedalam kemiskinan. Inflasi yang tidak bisa dikendalikan menyebabkan harga barang dan jasa naik, sehingga daya beli masyarakat menurun. Ketika harga-harga meningkat tetapi pendapatan tetap, maka kemampuan untuk membeli barang kebutuhan pokok menjadi sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Garis kemiskinan, yang merupakan batas pendapatan minimum untuk mencapai kebutuhan dasar menjadi sulit, ini

menyebabkan ketimpangan antara pendapatan penduduk miskin dan garis kemiskinan semakin besar, sehingga indeks kedalaman kemiskinan naik.

Grafik 2.33
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

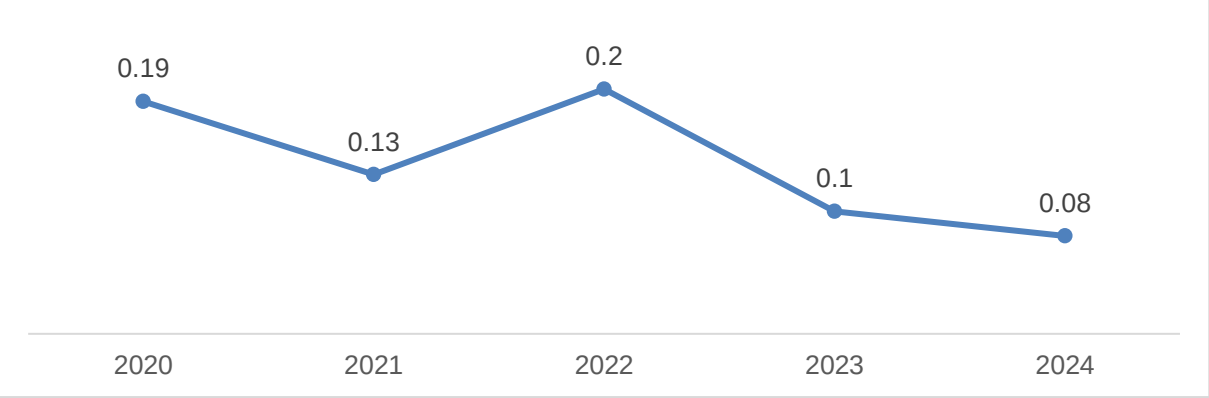

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2025

Indeks keparahan kemiskinan (P-2) menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, maka distribusi pendapatan di antara masyarakat miskin semakin merata. Untuk keparahan kemiskinan, capaian Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren fluktuatif dari tahun 2020 sampai di tahun 2022, namun terus mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu 0,2 menjadi 0,08 di tahun 2024.

Lebih lanjut, garis kemiskinan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya juga bisa berbeda karena adanya perbedaan harga barang/jasa, baik makanan maupun non-makanan, yang berdampak pada biaya hidup yang juga berbeda. Pada tahun 2024, garis kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp458.509 per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum memiliki biaya hidup yang lebih rendah dibanding sebagian besar kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi.

Grafik 2.34
Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024

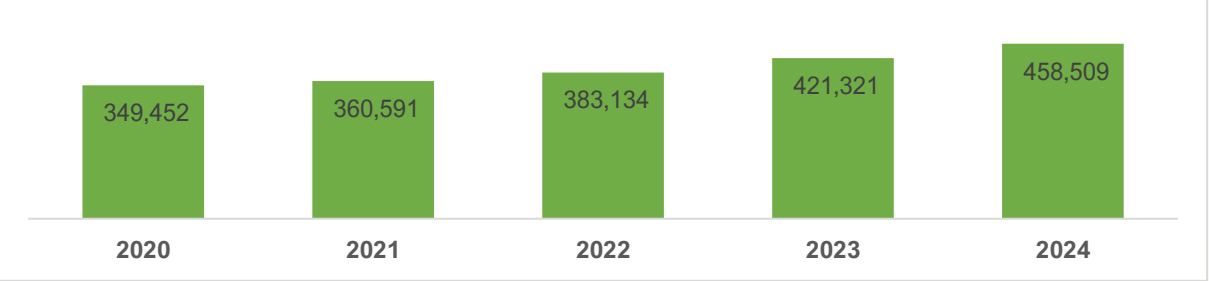

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Dengan pendekatan di atas, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup layak yang tercermin pada besarnya pengeluaran per kapita yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun, beberapa tahun terakhir berkembang pandangan yang menilai isu kemiskinan bukan semata persoalan ekonomi. Kemiskinan justru dipandang sebagai persoalan multi-dimensi, dimana terdapat sejumlah aspek yang dapat dijadikan sebagai ukuran

untuk menilai status miskin, yaitu pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan, dan ekonomi. Dalam literatur, juga dikembangkan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) yang dipelopori oleh *Oxford Poverty and Human Development Initiative* dan *United Nation Development Program*. IKM ini bisa menunjukkan deprivasi penduduk miskin terhadap pendidikan, akses layanan kesehatan, dan standar hidup. Indikator yang digunakan dalam IKM bisa berbeda-beda antara wilayah, tergantung pada ketersediaan data.

Faktor yang mendukung yang dapat penurunan jumlah masyarakat miskin Kabupaten Sidenreng Rappang banyaknya masyarakat yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan. Banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani, bekerja di sektor formal, dan juga dukungan pemerintah melalui bantuan bantuan dapat menjadi faktor yang dapat menurunkan jumlah kemiskinan di Kapuaten Sidenreng Rappang. Selain itu yang menjadi penghambat adalah produksi pertanian yang fluktuatif, bantuan pemerintah yang bergantung kepada APBD atau APBN, serta terbatasnya lapangan kerja formal menjadi hambatan yang dapat menambah jumlah kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut yang bertujuan menggambarkan kinerja perekonomian daerah selama periode tertentu. Capaian PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang terus menunjukkan peningkatan selama 17 tahun terakhir. Hal ini juga terjadi pada capaian PDRB per kapita, yang mengukur besarnya PDRB harga nominal per satuan penduduk. Suatu wilayah bisa tinggi PDRB-nya dibanding wilayah lainnya karena jumlah penduduknya lebih banyak. Hal ini karena jumlah penduduk dapat berkontribusi pada PDRB melalui sisi produksi dan konsumsi. Dari sisi produksi, penduduk bisa menjadi faktor produksi sehingga semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula produksi barang dan jasa. Sementara dari sisi pengeluaran, jumlah penduduk bisa mendorong peningkatan permintaan agregat melalui besarnya konsumsi yang dilakukan.

PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 masyarakat menikmati standar hidup yang relatif tinggi dengan rata-rata penduduk memperoleh kue ekonomi sebesar Rp 44,12 juta, kemudian meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp 47,34 juta. peningkatan masih berlanjut yakni di tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 51,37 Juta dan Rp 55,51 Juta, hingga akhirnya pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi Rp 59,31 juta atau jika dkonversi ke dalam satuan bulanan, pendapatan warga sidereng rappang berkisar Rp 4.9 juta/Bulan.

Grafik 2.35
PDRB Per Kapita/PDB Per Kapita Kabupaten Sidenreng Rappang,
Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2020–2024

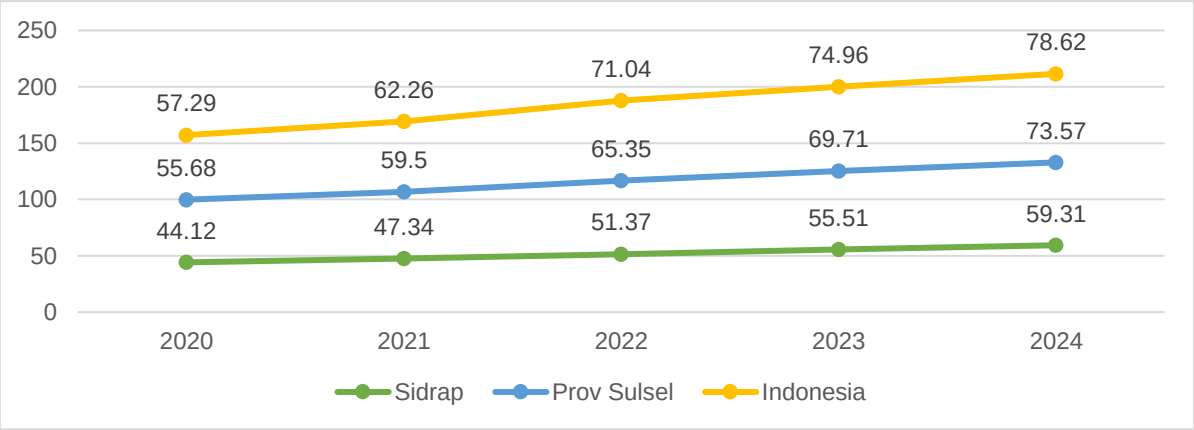

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang yang senilai 59,31 juta rupiah bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masih relatif lebih rendah, namun bila dibandingkan dengan target RKPD tahun 2024 yang senilai 53,97 juta rupiah, capaian PDRB per kapita Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mencapai target.

Grafik 2.36
PDRB Per Kapita/PDB Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

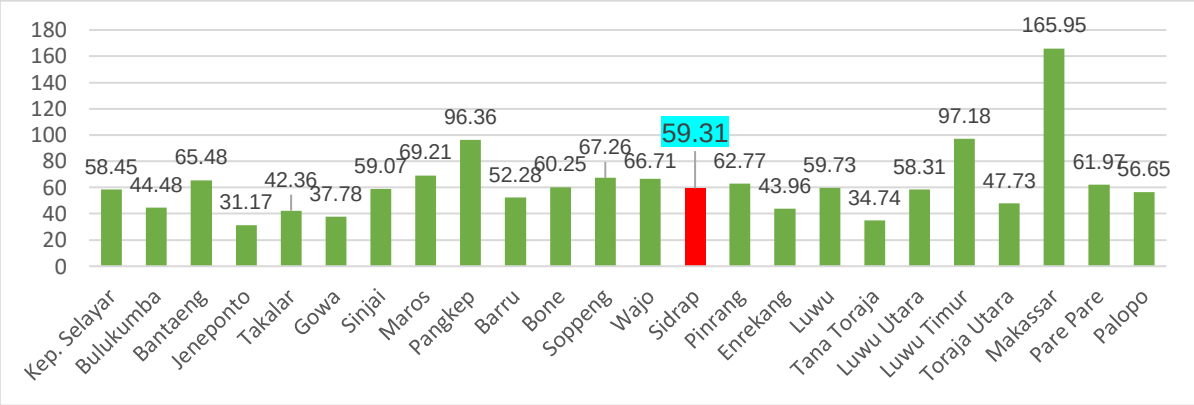

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Di Provinsi Sulawesi Selatan, daerah dengan PDRB p er kapita tertinggi pada tahun 2024 dicapai oleh Kota Makassar (Rp165,95 juta), Kabupaten Luwu Utara (Rp97,18 juta), dan Kabupaten Pangkep (Rp96,36 juta). Perekonomian di ketiga wilayah ini disumbang oleh sektor-sektor utama, yakni perdagangan di Kota Makassar, pertambangan di Kabupaten Luwu Timur, dan industri pengolahan di Kabupaten Pangkep. Sementara itu, PDRB per kapita terendah di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten Jeneponto (Rp31,17). Jika dibandingkan dengan Kota Makassar, posisi PDRB per kapita Kabupaten Sidenreng Rappang hampir tiga kali lipat lebih rendah, sedangkan jika dibandingkan dengan Kabupaten Jeneponto, posisi Kabupaten Sidenreng Rappang justru dua kali lipat lebih tinggi. Keadaan ini menempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang berada di kelompok menengah dalam hal capaian PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang yang senilai 59,31 juta rupiah bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masih relatif lebih rendah, namun capaian PDRB per kapita Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mencapai target.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Sidenreng Rappang lebih baik dibanding rata-rata pertumbuhan daerah tetangga di Ajatappareng yang senilai 5,48 persen.

Tabel 2.39
Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2019-2023 Kabupaten Sidenreng Rappang dan wilayah Ajatappareng (Juta Rupiah)

No.	Kabupaten/ Kota	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Per Kapita Daerah Setara
		2022	2023		
1	Pangkep	91,862	96,36	4,89	5,48
2	Barru	50,157	52,27	4,22	
3	Pinrang	59,967	62,77	4,67	
4	Enrekang	41,149	43,96	6,84	
5	Parepare	58,776	61,97	5,43	
6	Sidrap	55,514	59,31	6,83	

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, diolah; 2025

Faktor yang mendukung peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang adalah besar Nilai PDRB yang diukur dari produksi setiap sektor lapangan usaha, penduduk bisa menjadi faktor pendukung juga menjadi faktor penghambat. Jumlah penduduk dapat meningkatkan produksi, semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula produksi barang dan jasa. Namun semakin banyak jumlah penduduk sebagai pembagi maka semakin kecil pula nilai PDRB perkapita yang dihasilkan dan menghambat nilai PDRBN per Kapita.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu isu makroekonomi yang perlu mendapatkan penanganan secara cepat. Secara konseptual, pengangguran adalah bagian dari angkatan yang kerja yang ingin bekerja, tetapi tidak bisa bekerja. Semakin banyak jumlah penduduk yang tergolong sebagai pengangguran, maka semakin banyak pula bagian dari penduduk produktif yang tidak berkontribusi secara optimal dalam perekonomian. Indikator untuk mengukur seberapa besar pengangguran di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini diperoleh dari hasil bagi antara jumlah angkatan kerja yang menganggur dibagi dengan total angkatan kerja. Data menunjukkan TPT Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan dari 5,91 persen di tahun 2020 menjadi 3,02 persen di tahun 2024 atau berkurang sebesar 2,89 persen poin selama 5 tahun terakhir. Angka ini bermakna bahwa terdapat 3,02 persen dari penduduk kategori angkatan kerja yang berminat bekerja tapi tidak bisa bekerja.

TPT Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 tidak lebih tinggi dibanding TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia yang masing-masing sebesar 6,31 persen dan 7,07 persen. Sampai tahun 2024, capaian TPT Kabupaten Sidenreng Rappang tetap lebih rendah, dimana Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,19 persen dan Indonesia sebesar 4,91 persen. Penurunan TPT yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang ini sejalan dengan peningkatan PDRB, terutama pada sektor-sektor yang padat karya, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor industri pengolahan.

Salah satu penyebab terjadinya pengangguran adalah kurangnya kesempatan kerja dibanding pencari kerja. Besar kecilnya kesempatan kerja ini juga erat kaitannya kondisi makroekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan, maka kesempatan kerja akan semakin terbuka seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi. Namun intervensi terhadap masalah pengangguran tidak hanya berkutat pada perluasan tenaga kerja, tapi juga penyediaan sumber daya manusia yang memang kompeten dan diperlukan keterampilannya di dunia kerja. Untuk itu, dibutuhkan peranan dari dunia pendidikan dan pelatihan untuk membekali calon-calon pekerja agar bisa bersaing di pasar tenaga kerja.

Grafik 2.37
TPT Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2020–

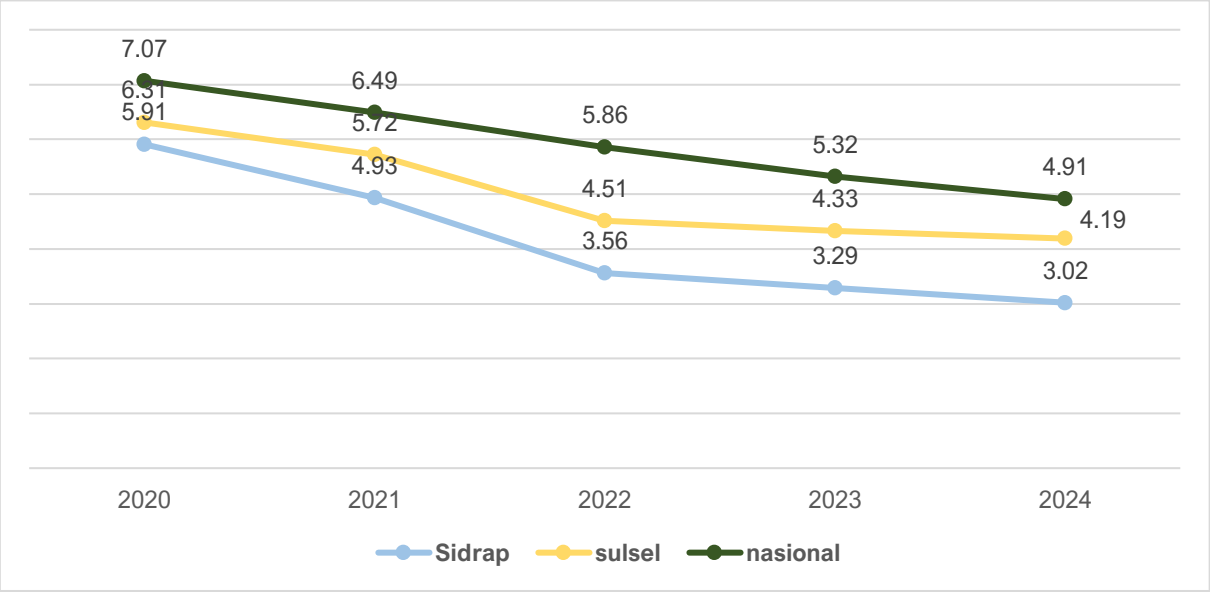

2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang 5 tahun terakhir selalu lebih baik bila dibandingkan capaian provinsi Sulawesi Selatan maupun nasional. Walaupun demikian angka penurunan TPT Sidenreng Rappang masih lebih rendah dibandingkan rata-rata penurunan capaian TPT daerah Ajatappareng sebesar 0,328.

Tabel 2.40
TPT Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota Wilayah Ajatappareng Tahun 2023-2024

No	Kab/Kota	2023	2024	Perubahan	Rata-Rata Perubahan TPT
1	Pangkep	5,05	3,99	-1,06	-0.328
2	Barru	5,89	6,42	0,53	
3	Sidrap	3,29	3,02	-0,27	
4	Pinrang	3,64	3,12	-0,52	
5	Enrekang	1,53	1,51	-0,02	
6	Parepare	5,86	5,23	-0,63	

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Jumlah pengangguran di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 sebesar 7.845 orang, mengalami penurunan signifikan di tahun 2024 menjadi 4.713 orang.

Tabel 2.41
Perbandingan Jumlah Pengangguran Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

Jumlah Pengangguran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	6.925,49	9.102,05	8.425,93	7.855,08	7.465.599
Povinsi Sul-Sel	269.817	252.349	205.725	203.50	204.760
Kabupaten Sidrap	7.845	6.813	4.877	4.596	4.713

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

5. Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan, terjadi kenaikan aktivitas produksi dan konsumsi yang diharapkan mencakup seluruh kalangan masyarakat. Namun efek positif dari pertumbuhan belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh kalangan masyarakat. Perbedaan kepemilikan aset, kualitas manusia, dan kondisi geografis merupakan sejumlah faktor yang bisa berpengaruh terhadap besar kecilnya manfaat yang dirasakan oleh setiap kalangan masyarakat dari suatu pertumbuhan. Sementara itu, Bank Dunia menyebutkan empat faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya ketimpangan di Indonesia, yaitu ketimpangan peluang, ketimpangan pasar tenaga kerja, konsentrasi kekayaan, dan ketimpangan dalam menghadapi guncangan. Jika terjadi ketimpangan tersebut, maka tentunya akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan. Ukuran ketimpangan pendapatan menggunakan Indeks Gini.

Tabel 2.42
Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sidenreng Rappang	Poin	0.349	0.358	0.354	0.345	0.319
Sulawesi Selatan	Poin	0.389	0.382	0.377	0.377	0.363
Nasional	Poin	0.389	0.381	0.381	0.388	0.379

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 yang menunjukkan kesetaraan sempurna hingga angka 1 yang menunjukkan ketimpangan sempurna. Jadi, nilai yang semakin kecil menunjukkan

ketimpangan yang semakin rendah, atau sebaliknya. Tingkat ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Indeks gini di tahun 2020 sebesar 0,349 sebelum meningkat di tahun 2021 menjadi 0,358 dan 0,354 di tahun 2022. Angka ini mengalami sedikit perbaikan menjadi 0,345 di tahun 2023, kemudian mengalami penurunan kembali menjadi 0,319 di tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan di masyarakat. Bila dibandingkan dengan angka ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 0,363 dan Nasional yang berada pada angka 0,379 poin, ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih baik.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, capaian Indeks Gini di Kabupaten Sidenreng Rappang tergolong rendah, yaitu berada di urutan ke-10 terbawah. Indeks Gini terendah dicapai oleh Bantaeng (0,249), Luwu Utara (0,272), Sinjai (0,287), Pinrang (0,299), dan Jeneponto (0,304). Hal ini menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Sidenreng Rappang relatif lebih rendah dibanding sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.38
Indeks Gini Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

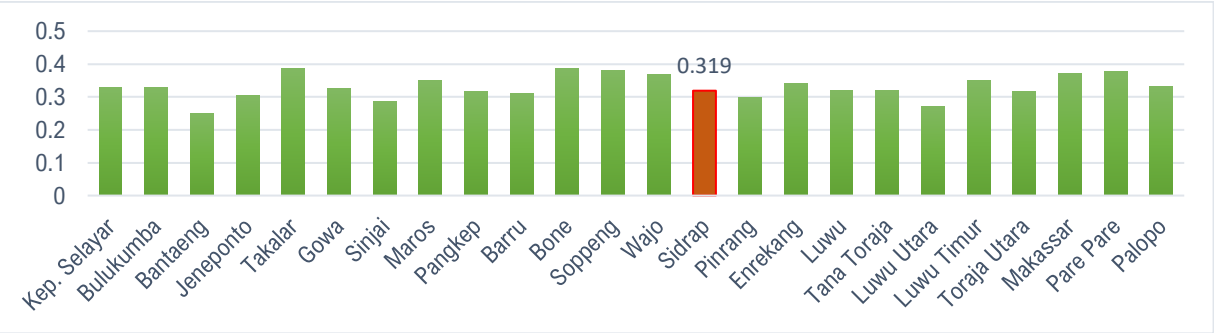

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Bila dibandingan dengan capaian daerah wilayah Ajatappareng, perubahan gini rasio di Kabupaten Sidenreng Rappang masih sedikit lebih tinggi. Ini berarti ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang bila dibandingkan dengan rata-rata ketimpangan di Kabupaten Enrekang dan Kota Parepare masih lebih baik.

Tabel 2.43
Perbandingan Perubahan Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang dengan
Daerah Ajatappareng Tahun 2024

Kab/Kota	2023	2024	Perubahan	Rata-rata Perubahan Gini Rasio
Sidrap	0.354	0.319	-0.035	-0.029833333
Barru	0.366	0.310	-0.056	
Enrekang	0.346	0.342	-0.004	
Pinrang	0.363	0.299	-0.064	
Parepare	0.379	0.376	-0.003	
Pangkep	0.334	0.317	-0.017	

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Faktor yang mendukung penurunan gini rasio Kabupaten Sidenreng Rappang adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi pemerataan pendapatan bagi masyarakat kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas. Begitupun sebaliknya jika pendapatan masyarakat menurun atau jumlah masyarkat miskin bertambah maka kemungkinan kesenjangan besar atau nilai gini rasio akan meningkat.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indonesia memiliki Visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Dalam pencapaian visi ini, salah satu pilar utama yakni pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini, Indonesia termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang tengah memasuki fenomena bonus demografi, dimana proporsi dari penduduk yang terkategorikan usia produktif (15-65 tahun) lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Bonus demografi menjadi peluang yang penting bagi Indonesia untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, syarat utama untuk memanfaatkan momen tersebut adalah melakukan investasi yang tepat sasaran, terkhususnya dalam pengembangan sumber daya manusia, mulai dari perencanaan keluarga, pembangunan sarana dan pra sarana pendidikan, kesehatan, dan memberikan peluang kerja yang memadai bagi generasi baru. Indikator yang selama ini digunakan untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia adalah indeks pembangunan manusia yang menitikberatkan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir cukup baik dilihat dari nilai angka IPM LF SP2020 yang konsisten meningkat. Memasuki tahun 2020, status IPM Kabupaten Sidenreng mencapai kategori tinggi yakni mencapai angka 73,07 dan kinerja tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 73,39. Selanjutnya pada tahun 2022 mencatatkan IPM 73,81 dan terus mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 74,38 dan di tahun 2024 menjadi 74.81. Capaian Sidenreng Rappang jika dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, Angka IPM Sidereng Rappang dimulai tahun 2023 dan 2024 sudah berada di bawah capaian Provinsi dan Nasional.

Grafik 2.39
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2020-2024

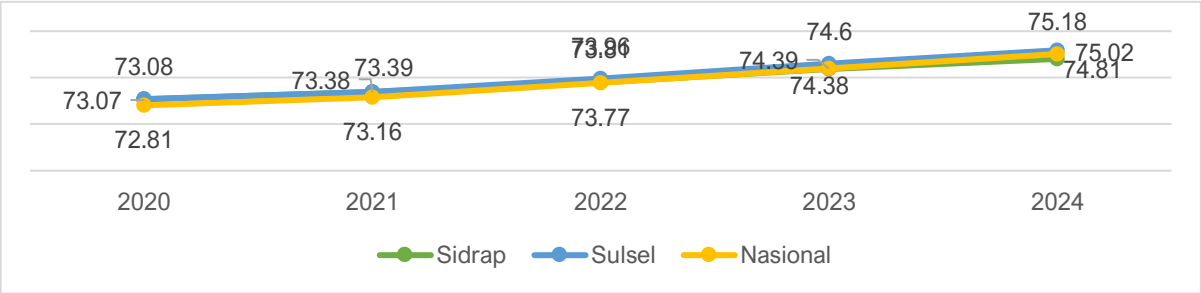

Sumber: Badan Pusat Statistk, diolah Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan wilayah Ajatappareng, IPM Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024, yaitu sebesar 74,81, sedikit lebih lambat dengan hanya mencatatkan angka pertumbuhan 0,43 persen. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperbaiki empat indikator utama yaitu angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan pengeluaran per kapita disesuaikan.

Tabel 2.44
Perbandingan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Kab/Kota	2023	2024	Pertumbuhan	Rata-Rata Pertumbuhan Daerah Setara
1	Barru	73,8	74,51	0,71	0,64
2	Pinrang	74,7	75,43	0,73	
3	Sindereng Rappang	74,38	74,81	0,43	
4	Enrekang	75,11	75,83	0,72	
5	Pangkep	73,23	73,87	0,64	
6	Parepare	80,36	80,97	0,61	

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Selain aspek kesejahteraan ekonomi, kesehatan masyarakat menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam periode 2020 hingga 2024, indikator kesehatan masyarakat menunjukkan berbagai dinamika yang mencerminkan keberhasilan dan tantangan dalam sektor ini.

Menurut data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidenreng Rappang mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 0,43 persen per tahun. Pada tahun 2024, seluruh dimensi IPM—umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak—mengalami peningkatan, menunjukkan upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, sejumlah tantangan tetap ada, khususnya terkait dengan akses sanitasi dasar dan layanan kesehatan di daerah terpencil. Meskipun upaya perbaikan terus dilakukan, peningkatan akses sanitasi layak masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk memastikan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Selain itu, permasalahan gizi pada balita, seperti stunting dan wasting, masih menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah melalui berbagai program intervensi, seperti peningkatan gizi dan kesehatan ibu dan anak, terus berupaya menekan angka prevalensi masalah gizi ini.

Selain tantangan gizi, perhatian juga tertuju pada cakupan layanan kesehatan, termasuk penanganan tuberkulosis. Tingkat keberhasilan pengobatan tuberkulosis menunjukkan progres

positif, namun cakupan penemuan kasus dan pengobatan tetap perlu ditingkatkan untuk memutus rantai penyebaran penyakit.

1. Usia Harapan Hidup

Salah satu komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah usia harapan hidup. Perkembangan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang yang menunjukkan tren positif sejalan dengan perkembangan usia harapan hidup (UHH). UHH menjadi salah satu indikator untuk menggambarkan pembangunan manusia pada bidang kesehatan. UHH merupakan statistik yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang diharapkan seseorang akan hidup dalam suatu wilayah tertentu. Besar kecilnya UHH ditentukan oleh sejumlah faktor seperti perawatan kesehatan, gizi, sanitasi, akses terhadap air bersih, pendidikan, dan faktor-faktor lingkungan lainnya.

Perkembangan capaian UHH di Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 tahun terakhir secara umum menunjukkan tren positif. Data menunjukkan angka usia harapan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan secara konsisten dalam kurun waktu lima tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, usia harapan hidup mencapai 73,02 tahun meningkat menjadi 73,11 tahun pada tahun 2021. Tren positif terus berlanjut dengan mencapai 73,4 tahun pada tahun 2022, 73,63 tahun di tahun 2023 hingga pada tahun 2024 menjadi 73,83 tahun.

Grafik 2.40
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

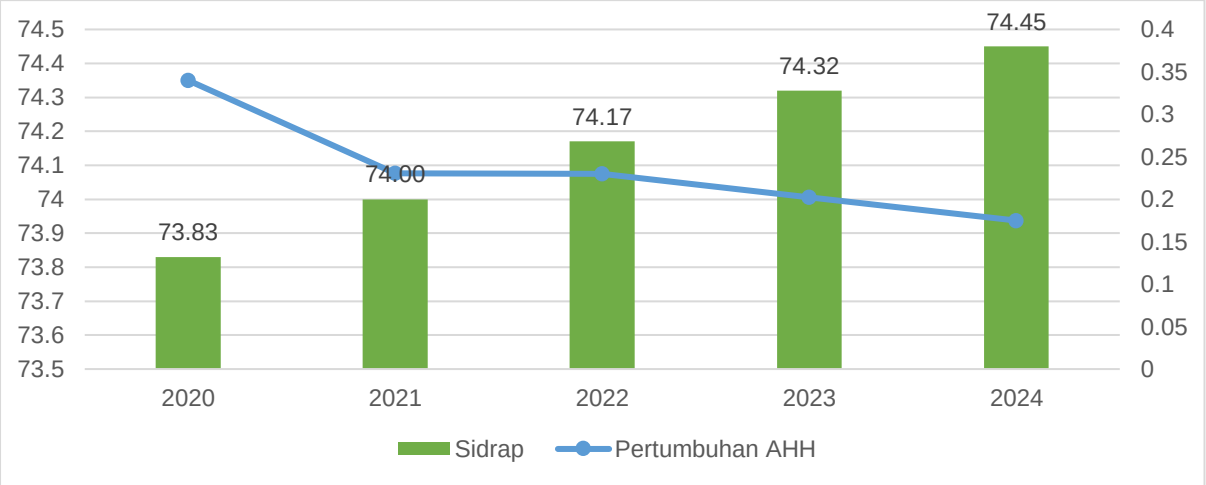

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

UHH penduduk perempuan tahun 2024 sebesar 77,08 lebih tinggi dibandingkan AHH penduduk laki-laki yang hanya sebesar 71,95.

Grafik 2.41
Angka Harapan Hidup Per Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Tahun 2020-2024

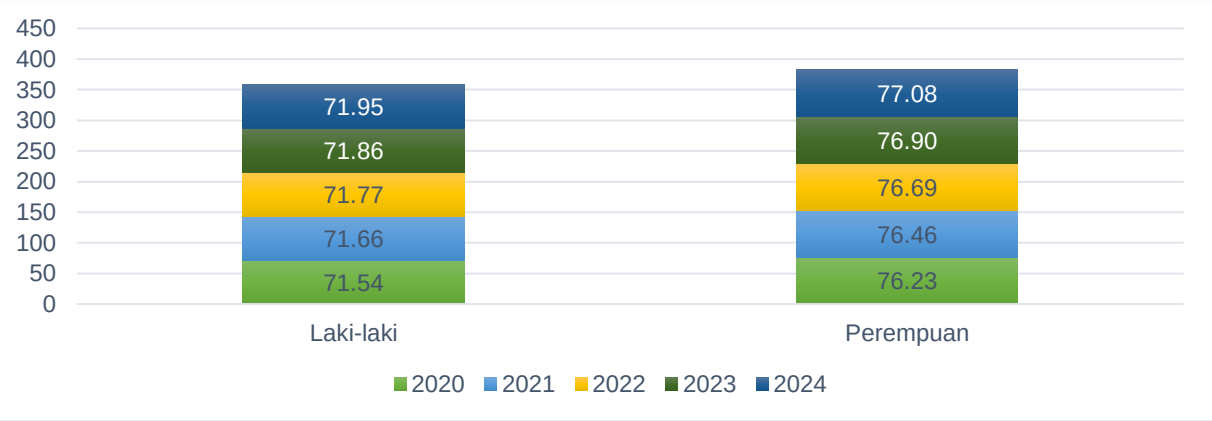

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Meskipun terjadi peningkatan, angka usia harapan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan usia harapan hidup kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah dengan UHH tertinggi dicapai oleh Kota Makassar (75,33 tahun), Kabupaten Toraja Utara (75,03 tahun), dan Kabupaten Tana Toraja (74,85 tahun). Adapun daerah dengan AHH terendah terjadi di Kabupaten Jeneponto (66,99 tahun), Kabupaten Barru (72,75 tahun), dan Kabupaten Bantaeng (72,85 tahun).

Tabel 2.45
Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Tahun 2024
Kep. Selayar	73.48
Wajo	73.47
Toraja Utara	75.03
Tana Toraja	74.85
Takalar	73.69
Soppeng	73.77
Sinjai	73.04
Sidenreng Rappang	74.45
Pinrang	74.63
Pare Pare	74.63
Pangkep	73.11
Palopo	74.19
Maros	73.77
Makassar	75.33
Luwu Utara	73.87
Luwu Timur	74.55
Luwu	73.52
Jeneponto	74.00
Gowa	74.19
Enrekang	74.07
Bulukumba	74.18
Bone	73.46

Barru	72.75
Bantaeng	72.85

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

2. Kesehatan Ibu dan Anak

a. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persentase persalinan di fasilitas kesehatan merupakan statistik yang menggambarkan proporsi dari total jumlah persalinan yang di lakukan di fasilitas kesehatan terhadap total jumlah persalinan dalam suatu wilayah. Diharapkan agar semua persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, sehingga dapat meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Beberapa hal yang menjadi keuntungan jika persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan, yaitu 1). Keamanan ibu dan bayi dari risiko komplikasi dan kematian, 2). Pencegahan penyakit menular dari ibu ke bayi, 3). Akses yang lebih baik dalam perawatan darurat yang mungkin terjadi selama proses persalinan, dan 4). Pemantauan kesehatan oleh tenaga medis selama proses dan pasca persalinan. Data menunjukkan bahwa persentase perempuan usia 15 – 49 tahun yang pernah melahirkan di fasilitas kesehatan (Rumah sakit, puskesmas, polindes, dan tempat praktik tenaga kesehatan) dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup baik. Pada tahun 2020, tercatat sebesar 94,62 persen. Tahun 2021 dan 2022 mencapai 100 persen. Namun pada tahun 2023, persentasenya sedikit menurun menjadi 99,49 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 98,04 persen. Ini berarti hampir semua kelahiran di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan di fasilitas kesehatan.

Grafik 2.42
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

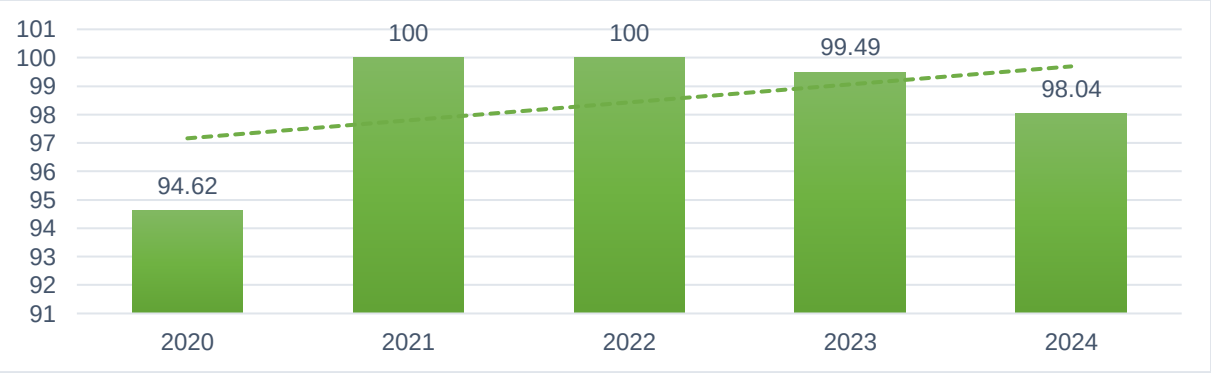

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

b. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Selain memastikan kesehatan bayi dan balita, menjaga kehidupan ibu pasca melahirkan juga merupakan parameter penting untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil suatu daerah. Angka kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan

tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain (misalnya terjatuh, kecelakaan, dll), per 100.000 kelahiran hidup. Selain itu, AKI juga merupakan salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengukur kesehatan ibu.

Sebelum pemerintah daerah menyusun program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, indikator penting yang mesti diperhatikan adalah angka kematian ibu. Kebutuhan untuk membuat program-program tersebut seperti diperlukan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebab kinerja capaian angka kematian ibu tidak begitu baik. Di tahun 2020 terdapat 6 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, angka ini mengalami peningkatan hingga mencapai 7 orang di tahun 2021. Di tahun 2022, angka ini mengalami penurunan menjadi 3 ibu yang mengalami kematian dalam 100.000 kelahiran hidup. Di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 5 orang, lalu turun menjadi 3 kasus di tahun 2024. Pemerintah daerah tetap perlu memberikan perhatian khusus untuk menangani hal tersebut agar tak ada lagi ibu yang meninggal ketika melahirkan.

Grafik 2.43
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2020-2024

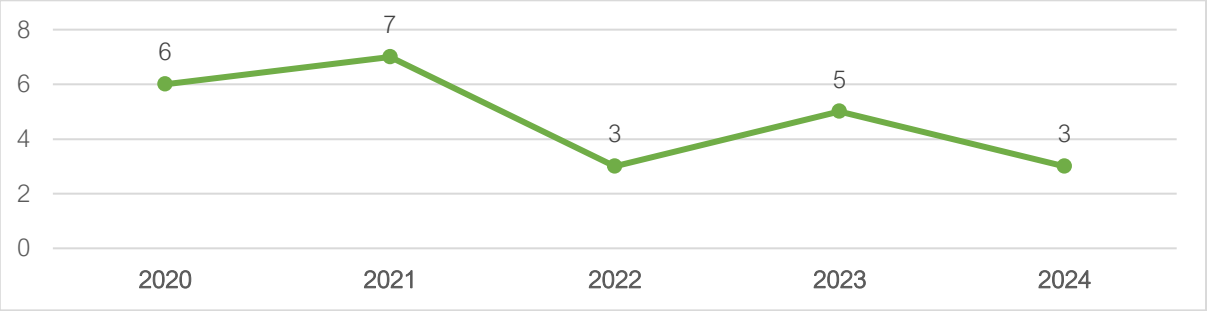

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

c. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak yang terganggu akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Kondisi ini dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kecerdasan anak dan kesehatan dewasa, serta sulit untuk diperbaiki. Di tingkat nasional, kebijakan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Pemerintah telah menetapkan *stunting* sebagai isu prioritas nasional dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 21,5 persen pada tahun 2023 menjadi 14 persen pada tahun 2024. Sejumlah kebijakan telah dilakukan untuk mencapai target tersebut. Di samping itu, juga telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang merupakan payung

hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) percepatan penurunan *stunting*, serta memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

Karena telah menjadi isu nasional, kebijakan penurunan *stunting* juga menjadi kebijakan strategis di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam rangka mempercepat penurunan *stunting*, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menciptakan inovasi dalam bentuk Program "Sahabat *Stunting*". Bentuk program ini berupa pendampingan kepada ibu hamil, ibu nifas, balita, dan remaja putri yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, dan tokoh masyarakat. Meskipun demikian, upaya penurunan *stunting* masih perlu ditingkatkan lagi. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan terjadi penurunan prevalensi *stunting*. Pada tahun 2020, tercatat sebesar 8,4 persen, dan terus menurun hingga menjadi 5,9 persen pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan upaya serius dari pemerintah kabupaten dan segenap *stakeholder* dalam menurunkan *prevalensi stunting*.

Grafik 2.44
Prevalensi Stunting Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

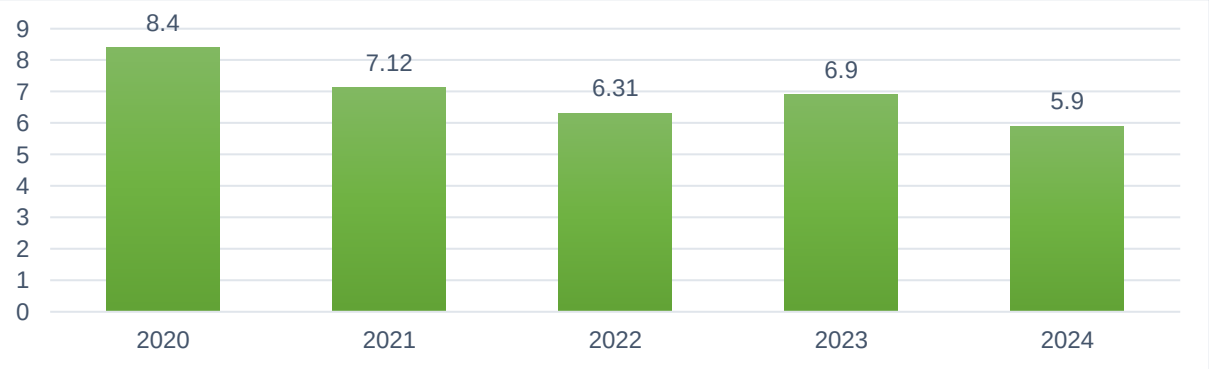

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

3. Penangangan Tuberculosis

a. Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (Treatment Coverage) adalah ukuran yang menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang berhasil dideteksi dan diobati dalam suatu wilayah. Ini merupakan indikator penting dalam upaya pengendalian tuberkulosis karena memastikan bahwa kasus-kasus TB terdiagnosis dan mendapatkan pengobatan yang tepat dapat membantu menghentikan penyebaran penyakit ini. Data menunjukkan cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis cenderung mengalami dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 berada di angka 36 persen, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 41 dan mencapai posisi tertinggi di tahun 2022 sebesar 64 persen. Namun pada tahun 2023 dan 2024 kembali mengalami penurunan berturut-turut yaitu menjadi 51 dan 44 persen.

Grafik 2.45
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)

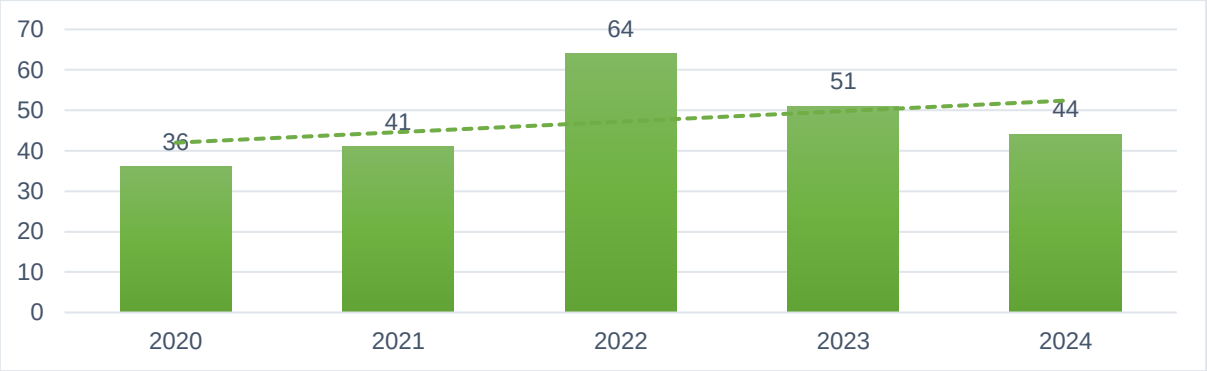

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

b. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Angka keberhasilan pengobatan 81uberculosis adalah ukuran yang menunjukkan persentase kasus 81uberculosis yang berhasil sembuh atau dinyatakan sembuh setelah menyelesaikan regimen pengobatan yang tepat. Ini merupakan 81uberculo penting dalam mengukur efektivitas program pengendalian 81uberculosis suatu negara atau wilayah.

Grafik 2.46
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

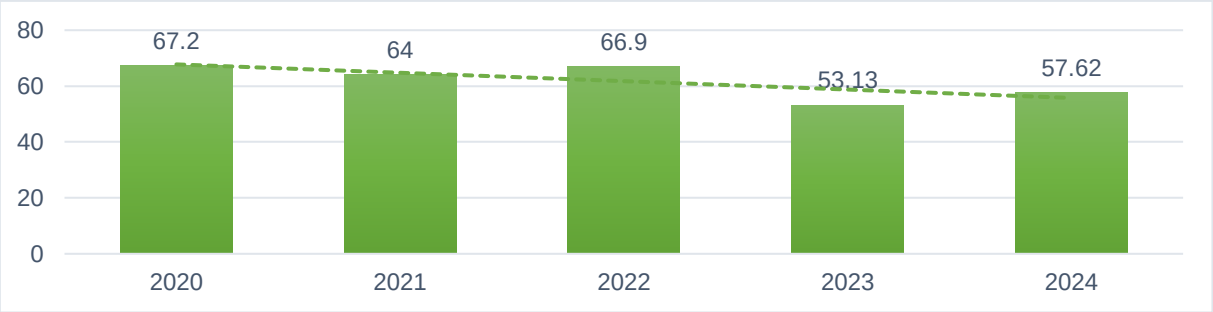

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

Untuk menghitung angka keberhasilan pengobatan 81uberculosis, jumlah kasus yang berhasil sembuh atau dinyatakan sembuh (disebut sebagai "kesembuhan") diberi perbandingan dengan jumlah total kasus 81uberculosis yang diobati, dan hasilnya dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Data menunjukkan angka keberhasilan pengobatan tuberkolusis di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 67,2 persen di tahun 2020, lalu menurun menjadi hanya sebesar 57,62 persen di tahun 2024. Penurunan ini mengindasikan semakin rendahnya keberhasilan penderita tuberkulosis untuk sembuh dari penyakitnya.

4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Program ini mencakup pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, klinik) dan rujukan tingkat lanjut

(rumah sakit), serta layanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, perawatan penyakit kronis, dan pengadaan obat-obatan. Dengan prinsip gotong royong, JKN memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk kelompok rentan, mendapatkan layanan kesehatan yang setara dan terjangkau.

JKN menjadi instrumen penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mendukung upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Grafik 2.47
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

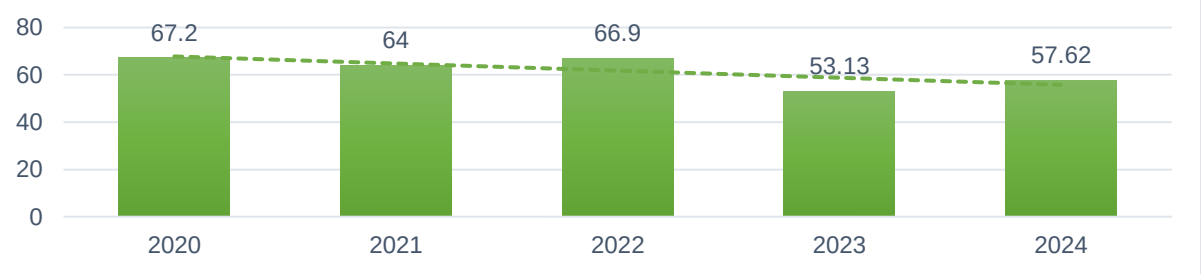

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

Data menunjukkan fluktuasi cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020 hingga 2024. Pada awalnya, cakupan JKN tercatat sebesar 67,2 persen pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan menjadi 64 persen di tahun 2021. Tahun 2022 sedikit meningkat dengan capaian 66,9 persen. Namun pada tahun 2023, terjadi penurunan yang cukupliterasi signifikan, di mana cakupan turun drastis menjadi 53,13 persen. Kemudian pada tahun 2024 tercatat adanya perbaikan dengan sedikit peningkatan menjadi 57,62 persen. Meski demikian, penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi masyarakat dalam program JKN. Berbagai faktor seperti aksesibilitas layanan kesehatan, perubahan kebijakan, atau beban administrasi bisa menjadi penyebab turunnya cakupan. Penurunan ini memerlukan perhatian serius untuk memastikan bahwa JKN tetap memberikan akses yang luas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan program di masa mendatang.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas Yang Merata

1. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional diperoleh dari jumlah satuan pendidikan di daerah yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah. Literasi membaca adalah kemampuan peserta didik dalam memahami,

menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi berbagai jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), sedangkan kemampuan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Grafik 2.48
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Sidenreng RappangTahun 2021-2024

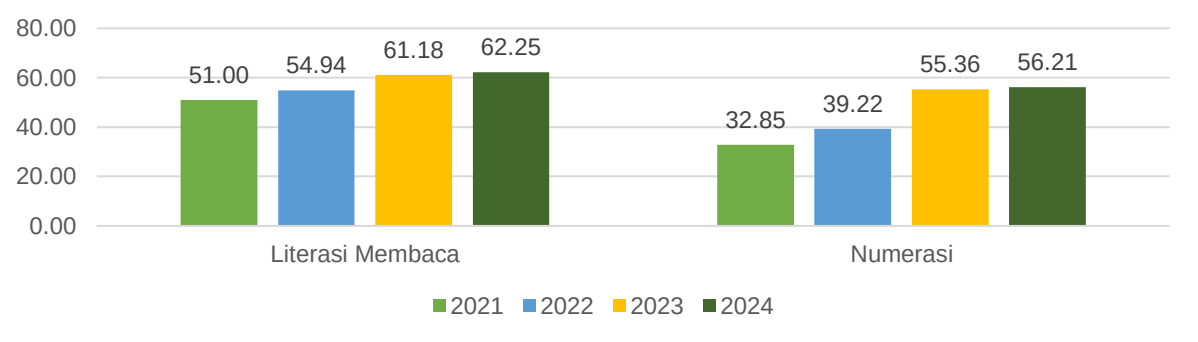

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk kemampuan literasi membaca tercatat 51,00 persen, meningkat menjadi 62,25 persen pada tahun 2024. Demikian halnya pada kemampuan numerasi, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum juga mengalami peningkatan, yaitu 32,85 persen pada tahun 2021, meningkat menjadi 56,21 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan kualitas pemerataan pendidikan terutama pada aspek hasil pembelajaran di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Salah satu indikator untuk melihat kemajuan sumberdaya manusia yang berdaya saing adalah kualitas pendidikan yang digambarkan dari hasil pembelajaran melalui capaian literasi membaca dan numerasi suatu daerah. Literasi membaca adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), sedangkan Kemampuan numerasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Pada tahun 2024 capaian literasi pada tingkat SD/Sederajat berdasarkan surat edaran Mendikbudristek sebesar 58,07 persen dan capaian numerasi 52,96 persen sementara untuk jenjang SMP/Sederajat capaian literasi sebesar 66,43 persen dan untuk capaian numerasi pada jenjang yang sama sebesar 59,46 persen.

2. Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun

Tren yang sama juga terjadi pada indikator rata-rata lama sekolah (RLS), yang menunjukkan kenaikan hingga tahun 2024 telah mencapai 8.21. Angka 8.21 ini bermakna rata-rata penduduk telah mengeyam pendidikan selama 8 tahun atau di bangku sekolah menegah pertama (SMP). Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, berhasil menaikkan secara persisten angka rata-rata lama sekolah selama kurun waktu beberapa tahun terakhir. Walaupun demikian, capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang masih dibawah capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2020 mencapai 7,84 tahun, pada tahun 2021 naik menjadi 7,94 tahun dan terus mengalami kenaikan yakni di tahun 2022 menjadi 8,04 tahun dan di tahun 2023 8,2 tahun sampai pada tahun 2024 menjadi 8,21 tahun. Dari angka tersebut, terlihat bahwa meski mengalami kenaikan konsisten, tapi rata-rata kenaikan masih belum siginifikan dan sangat lambat.

Grafik 2.49
Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

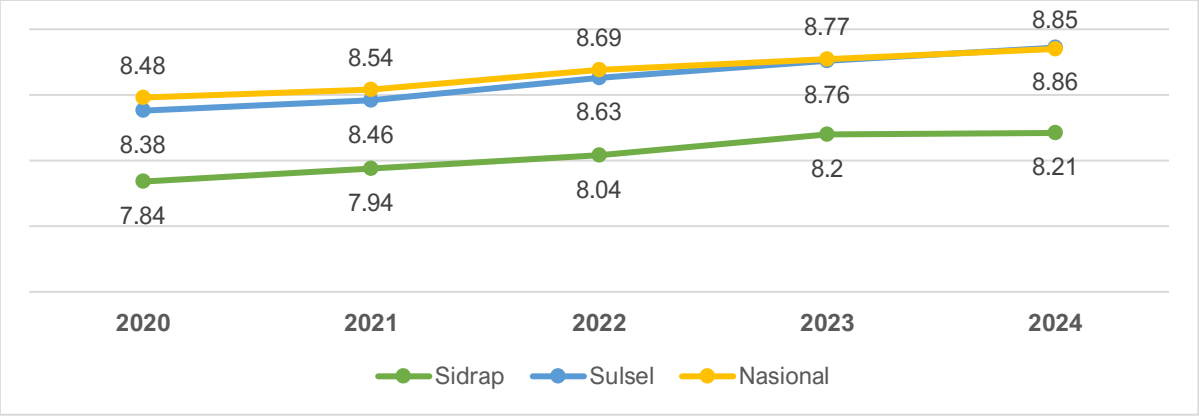

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025

Secara umum angka partisipasi kasar Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi, menggambarkan bahwa penduduk penduduk usia sekolah belum semuanya bersekolah. Untuk APK SD/MI, trennya mengalami penurunan dari 110,38 persen di tahun 2020 menjadi 102,03 persen di tahun 2024. Sejalan dengan SD/MI, APK SMP/MTs juga mengalami tren penurunan, di tahun 2020 angkanya mencapai 86,44 persen dan mengalami penurunan menjadi 84,17 persen di tahun 2024. APK SMA/SMK/MA mengalami tren positif, tahun 2020 tercatat 81,24 persen dan terus mengalami peningkatan menjadi 87,97 persen pada tahun 2024.

Grafik 2.50
Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

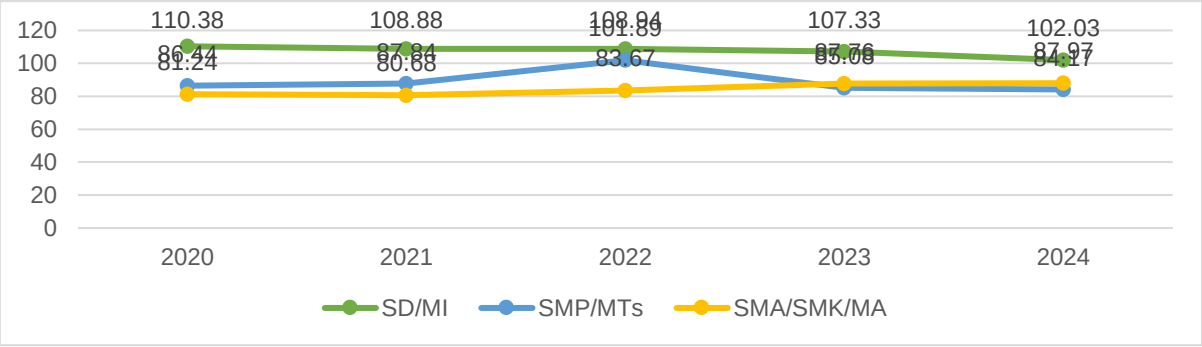

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025

Angka partisipasi murni adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen, begitupun sebaliknya, jika angkanya dibawah 100, berarti ada anak usia sekolah yang bersekolah tidak tepat waktu.

Grafik 2.51
Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

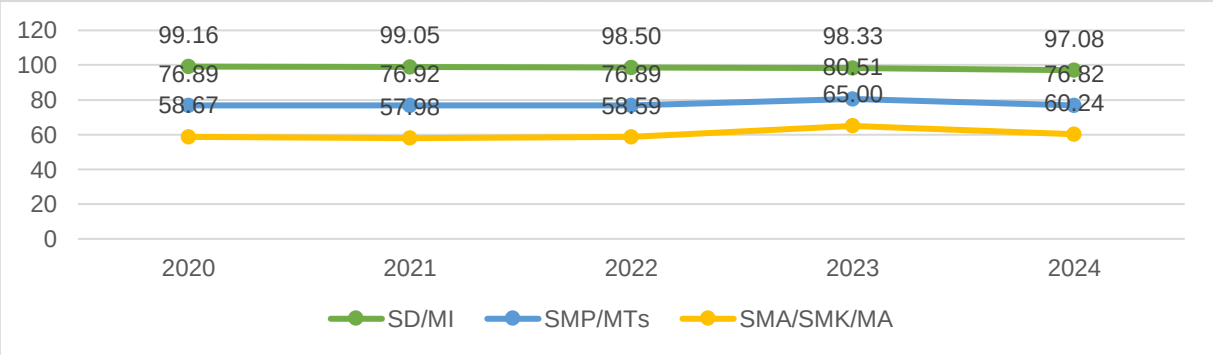

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan yaitu SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun), dan SMA (16-18 tahun). Indikator ini menggambarkan seberapa besar proporsi penduduk usia tertentu yang *bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.*

Grafik 2.52
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

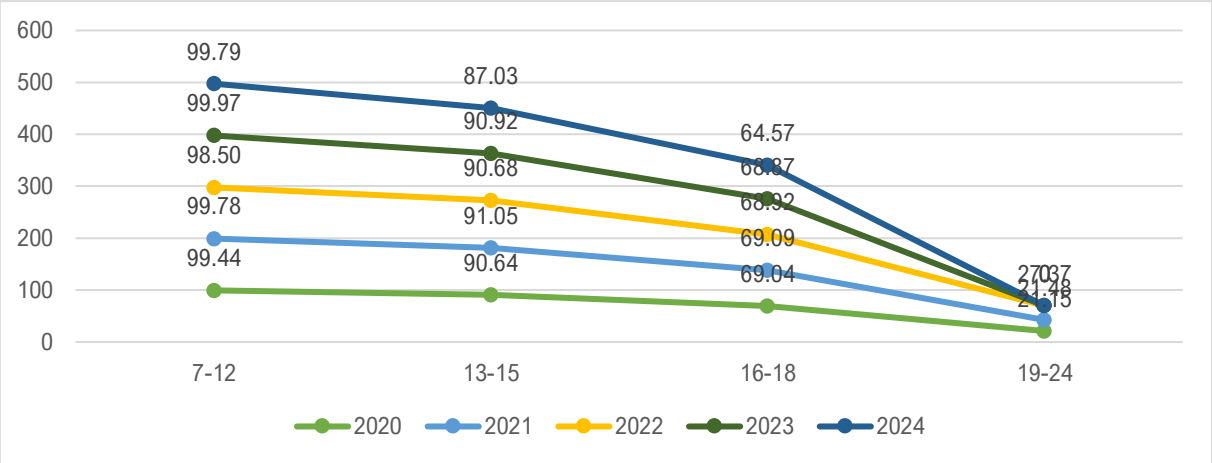

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025

Dalam lima tahun terakhir, tren Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan fluktuasi, baik untuk jenjang Pendidikan SD Sederajat maupun SMP Sederajat. Pada jenjang Pendidikan SD Sederajat, tahun 2020 proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD Sederajat mencapai 99.44 persen. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 99,78, konsisten hingga tahun 2024 di angka 99.79 persen

Tidak sejalan dengan APS SD Sederajat, APS SMP Sederajat Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren penurunan. Pada tahun 2020, APS untuk SMP Sederajat tercatat sebesar 90,64 persen. Namun angka ini mengalami penurunan drastis di tahun 2024 menjadi 87,03 persen. APS SMA Sederajat juga tercatat mengalami penurunan. Tahun 2020 berada di angka 69,04, terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 64,57.

3. Harapan Lama Sekolah

Capaian harapan lama sekolah (HLS) di Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 mencapai 12,94 tahun, dan terus mengalami kenaikan. Memasuki tahun 2021 naik menjadi 12,95 tahun, hingga akhirnya naik menjadi 13,03 tahun di tahun 2024. Capaian Harapan lama sekolah Sidenreng Rappang 5 tahun terakhir masih berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian nasional. Pada tahun 2020 HLS Sidenreng Rappang masih mendekati capaian nasional, namun sampai pada tahun 2024 angka HLS Sidenreng Rappang tidak dapat mengimbangi peningkatan nasional maunpun Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.53
Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

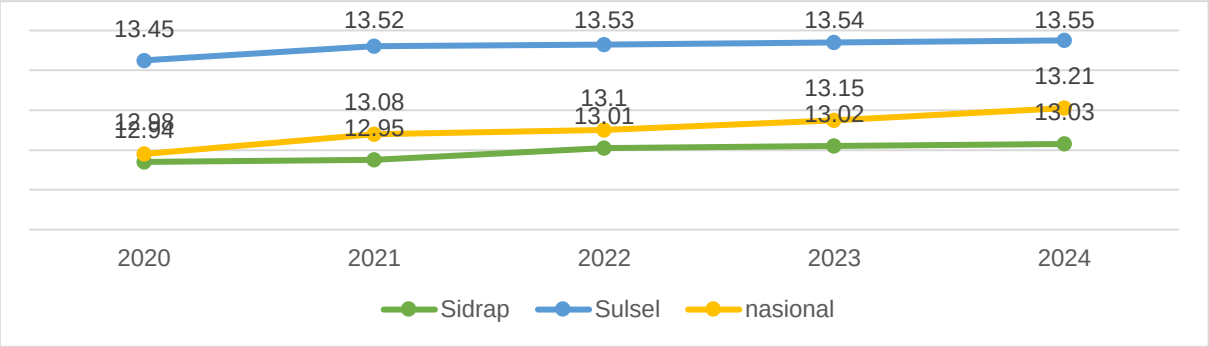

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025

4. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikasi kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Meskipun sebagian orang tetap percaya bahwa etos dan keseriusan dalam bekerja lebih menentukan ketimbang tingkat pendidikan belaka, tak dapat dipungkiri tingkat pendidikan masih menjadi akses penting menuju suatu pekerjaan. Tak hanya soal akses terhadap posisi dalam sebuah bidang pekerjaan, tingkat pendidikan juga akan berkorelasi positif dengan penghasilan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pekerja akan cenderung semakin tinggi pula penghasilannya.

Grafik 2.54
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja dengan Kualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

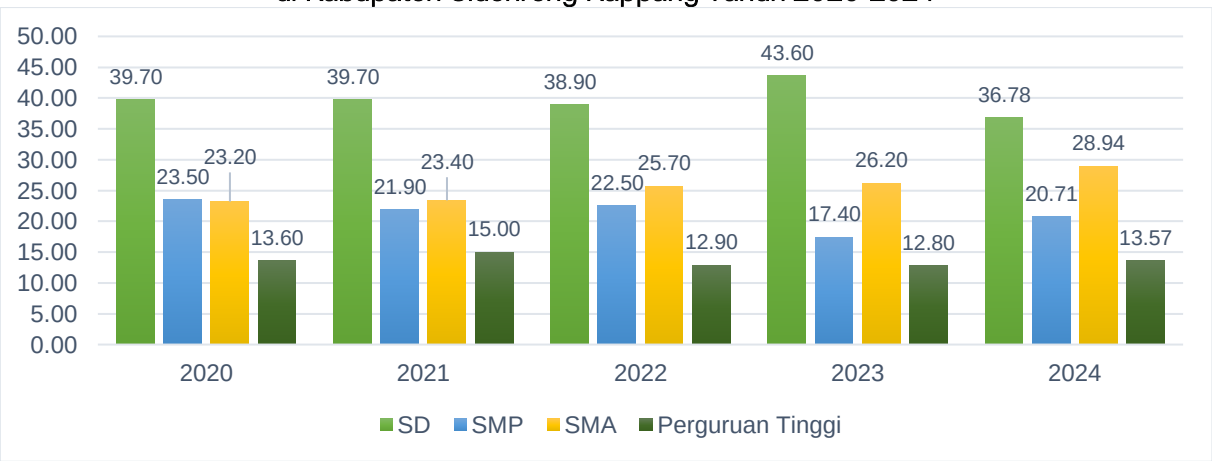

Sumber: BPS, diolah Tahun 2025

Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, penduduk bekerja dengan tamatan SD ke bawah masih menunjukkan proporsi terbesar di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebesar 36,78 persen penduduk bekerja merupakan lulusan SD ke bawah. Mereka yang tidak/belum bersekolah, belum tamat SD maupun tamatan SD, termasuk dalam kelompok ini. Lebih lagi, 20,71 persen penduduk bekerja merupakan mereka yang tamat sekolah menengah pertama. Dengan demikian, 57,49 persen penduduk pekerja berpendidikan dasar (SD/SMP). Sementara itu, penduduk bekerja dengan tamatan pendidikan tinggi hanya mencapai 13,57 persen. Meskipun proporsinya cenderung meningkat dalam beberapa tahun tahun terakhir, hal

ini tetap mengindikasikan masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang.

5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Pendidikan merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa, dapat menggambarkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduknya. Untuk mengukur tingkat pendidikan tersebut diperlukan suatu indikator yang dapat menggambarkan kualitas dan kuantitas penduduk di bidang pendidikan.

Grafik 2.55
Penduduk Usia 15 Tahun keAtas yang Bekerja menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

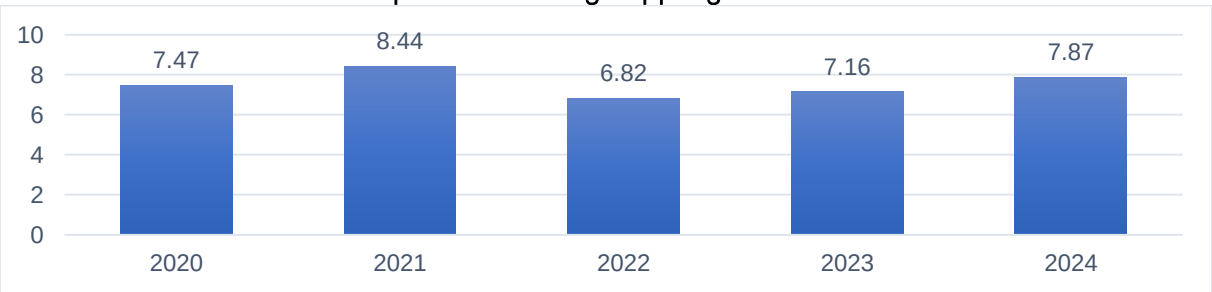

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025

6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2024, IPLM Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 93,86, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi yang mencapai 88,24. Capaian ini juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2023 yang mencapai 93,69. Kabupaten Sidenreng Rappang menempati posisi ketiga tertinggi di Kawasan Ajatappareng setelah Kota Parepare dan Enrekang yang masing-masing mencatatkan angka 94,46 dan 94,19. Indikator IPLM Kabupaten Sidenreng Rappang yang masih rendah yakni ketercukupan koleksi buku dan ketercukupan tenaga perpustakaan.

Grafik 2.56
IPLM Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota Kawasan Parepare Tahun 2024

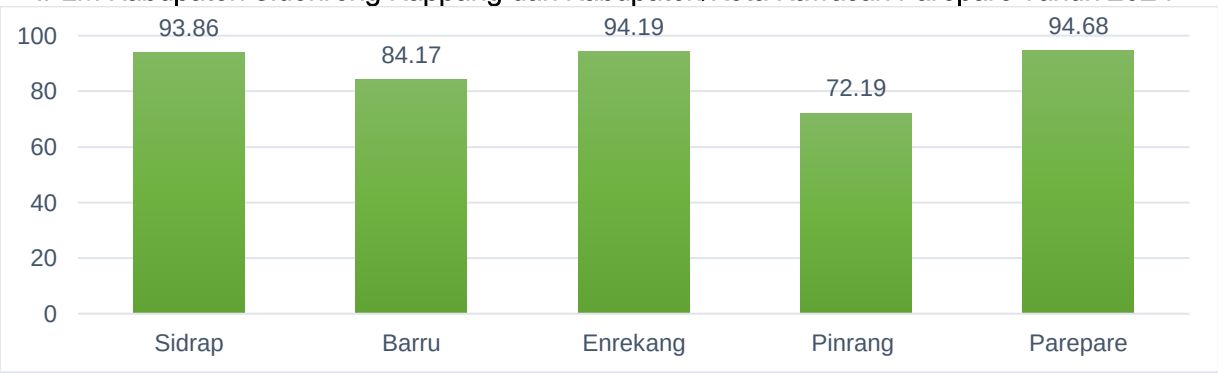

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025

7. Indeks Literasi Digital (ILD)

Indeks ini menunjukkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital secara umum. Indeks literasi digital diukur melalui empat pilar indikator besar, yakni *digital skills, digital ethics,* digital *safety*, dan *digital culture*. Indikator ini datanya belum tersedia di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

1. Persentase Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Di Sektor Formal

Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal merupakan ukuran penting untuk menilai inklusi dan keseteraan tempat kerja. Data ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memberikan kesempatan yang adil kepada penyandang disabilitas untuk berkontribusi secara produktif dalam perekonomian. Namun, data ini belum tersedia di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Ketenagakerjaan Nasional merupakan program jaminan sosial yang melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial ekonomi, seperti penyakit, kecekalan, cacat, dan kematian. Semakin tinggi cakupan jaminan sosial menunjukkan semakin tinggi pula perlindungan masyarakat dari berbagai risiko saat bekerja. Berbagai fenomena yang tidak terduga bisa berdampak pada kesejahteraan rumah tangga, seperti kecelakaan atau kematian. Keberadaan jaminan sosial dapat meringankan beban ekonomi jika hal tersebut terjadi.

Data menunjukkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kepesertaan jaminan sosial.

Grafik 2.57
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024

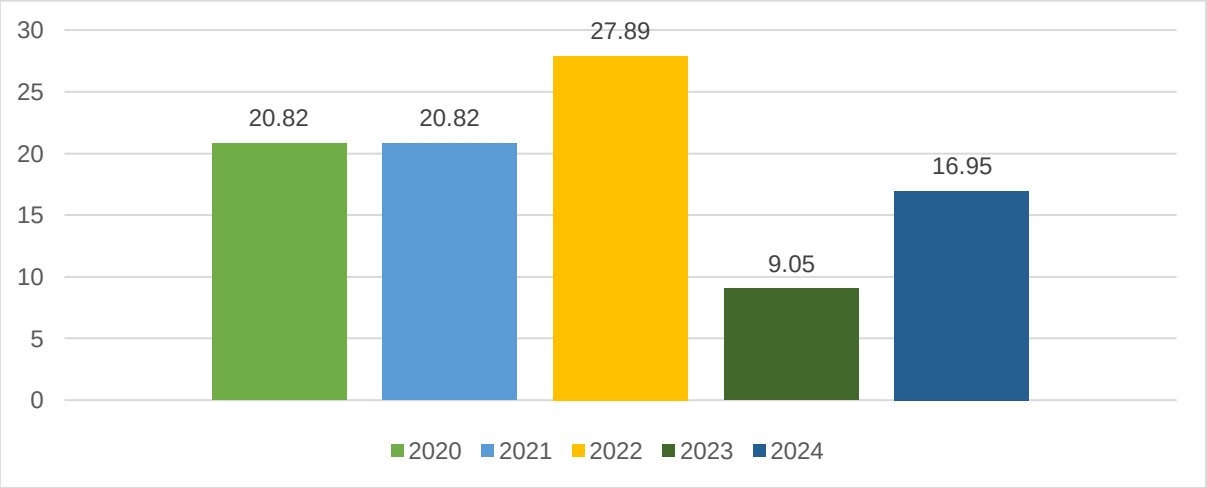

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

Sementara itu, jika dilihat dari perkembangannya, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, cakupan berada di angka yang sama yaitu 20,82. Pada tahun 2022, meningkat signifikan menjadi 27,89. Namun, setelah lonjakan tersebut, terjadi penurunan drastis pada tahun 2023 hingga 9,05, yang kemungkinan disebabkan oleh efek ekonomi yang dirasakan setelah pandemi Covid-19. Pada tahun 2024, terlihat adanya pemulihan, dengan meningkat mencapai angka 16,95. Peningkatan ini dapat menunjukkan adanya perbaikan dalam akses atau pemanfaatan layanan jaminan sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mungkin didorong oleh stabilisasi ekonomi atau peningkatan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial.

2.1.2.5. Beragama Maslahat Dan Berkebudayaan Maju

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Konsep kerukunan tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri (BM) antara Meneteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang kerukunan yang dimaksud adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan Kerjasama dalam kehidupan permasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) untuk Kabupaten Sidenreng Rappang secara spesifik belum tersedia dalam data publik. Namun Kabupaten Sidenreng Rappang telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah pembentukan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama (PDSKUB) di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe yang merupakan wilayah dengan populasi umat Hindu Tolotang terbesar yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Program ini bertujuan untuk memperkuat toleransi, harmoni, dan moderasi beragama di tingkat desa.

2. Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi

Indeks Pembangunan Kebudayaan dibentuk oleh 7 dimensi meliputi Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender. Dari ke tujuh dimensi tersebut, terdapat 4 dimensi yang capaiannya dibawah nasional yaitu dimensi Ekonomi Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya dan Budaya Literasi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas dan jaringan pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan, penggunaan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari, intensitas pertunjukkan seni, penggunaan produk tradisional, dan

peningkatan keterlibatan penduduk dalam pertunjukkan seni maupun upacara adat, serta peningkatan sinergitas antara instansi untuk pemajuan kebudayaan. Belum ada data Indeks Pembangunan Kebudayaan yang tersedia untuk Kabupaten Sidenreng Rappang namun dapat diproteksi dari persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi.

Grafik 2.58
Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Dan Situs Cagar Budaya Yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi

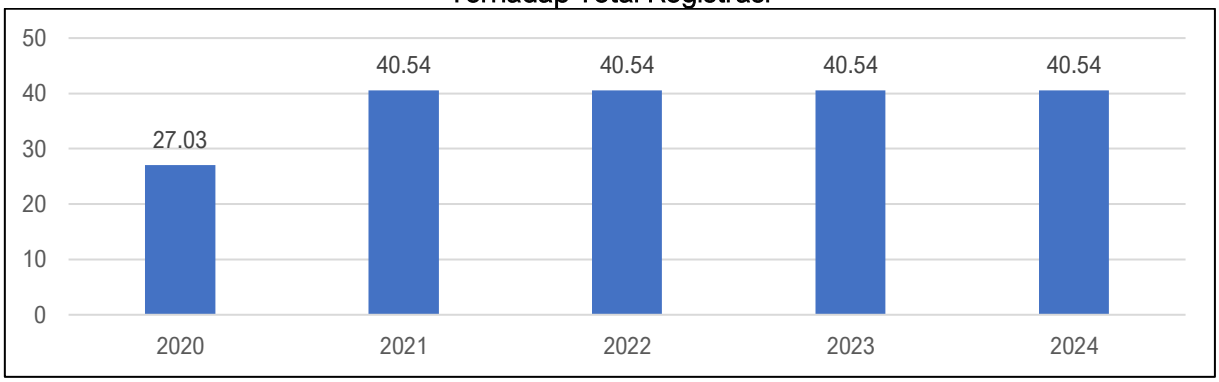

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Kualitas Keluarga

Keluarga sebagai Unit sosial ekonomi terkecil dalam masyarakat merupakan landasan dari semua intitusi, merupakan kelompok kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Keluarga adalah pencetak kualitas sumber daya manusia, lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang anak, pusat kegiatan penting berbagai aspek kehidupan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat.

Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi keluarga yang berkualitas. Menurut UU Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berkualitas merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mengukur sejauh mana capaian kualitas keluarga di suatu wilayah, maka disusun Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga. Perhitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) telah dilakukan beberapa kali dan terakhir dilakukan di tahun 2023 dengan menggunakan 25 indikator dan 5 dimensi. Namun, data Indeks Kualitas Keluarga hanya disajikan hingga level provinsi, sehingga belum tersedia di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak mengukur sejauh mana perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Penyusunan indeks ini terdiri dari 5 klaster, yang terdiri dari 4 klaster pembentuk Indeks Pemenuhan Anak dan 1 klaster pembentukan Indeks Perlindungan Anak. Secara detail,

klaster-klaster tersebut terdiri dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir cenderung stabil. Pada tahun 2020 indeks ini tercatat sebesar 58,1 dan terus meningkat menjadi 58,6 di tahun 2024. Ini mencerminkan masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti disparitas akses terhadap layanan kesehatan dan Pendidikan di daerah terpencil, serta kekurangan sumber daya untuk mendukung program-program perlindungan anak. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan indeks perlindungan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.59
Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

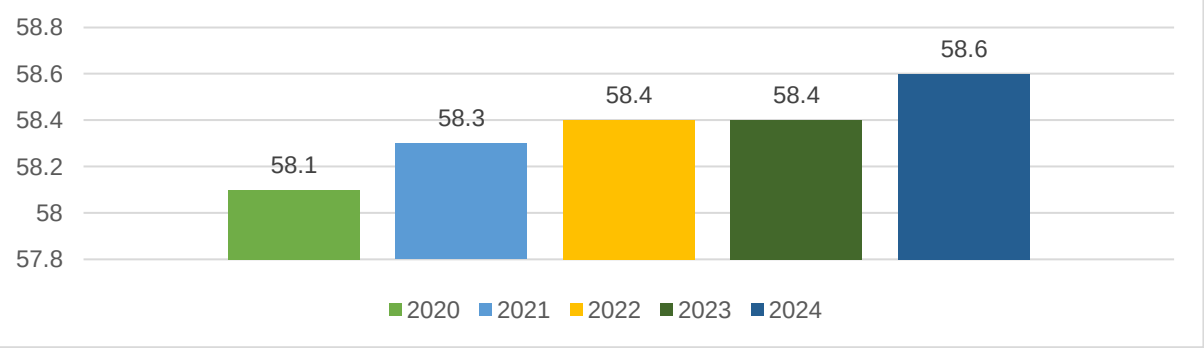

Sumber: Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender digunakan untuk mengukur kesejangan atau ketidakseteraan antara jenis kelamin dalam suatu wilayah. Masuknya keseteraan gender sebagai salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mencerminkan pengakuan secara global bahwa pembangunan berkelanjutan tanpa memperhatikan kesetaraan gender adalah hal yang tidak mungkin. Keseteraan gender dipandang bukan hanya sekedar sebagai pemenuhan hak dasar bagi setiap manusia, tapi menjadi pilar penting untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Terdapat tiga dimensi yang dijadikan sebagai aspek pengukuran, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Data menunjukan IKG Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung menurun dari 0,591 di tahun 2020 menjadi 0,397 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Sidenreng Rappang mulai membaik atau menuju kesamaan gender antara laki-laki dan perempuan.

Grafik 2.60
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

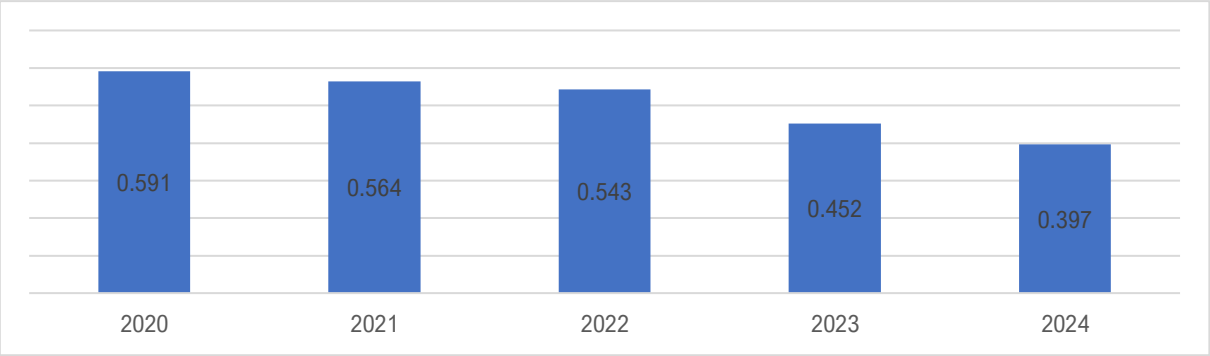

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2024

4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, IPG sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.61
Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

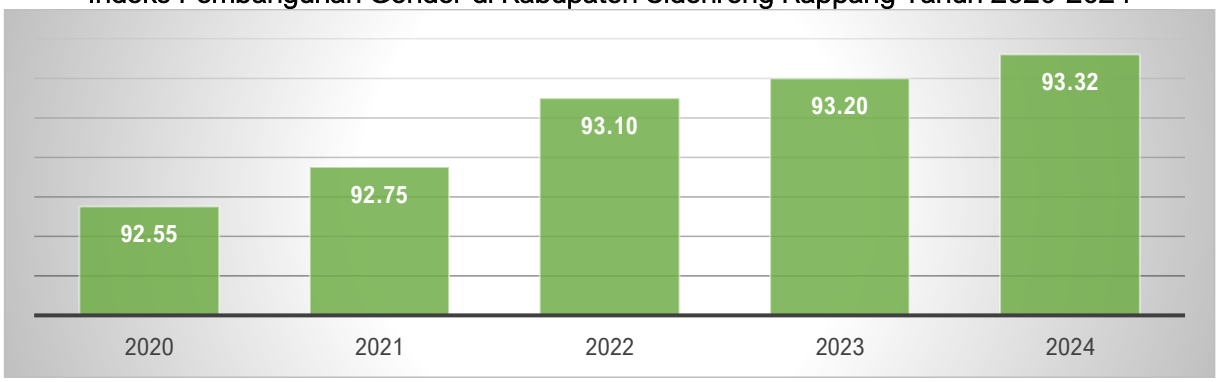

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Sulawesi Selatan; 2025

Indeks Pembangunan Gender secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 cenderung menunjukkan peningkatan yang stabil, meskipun nilai indeksnya tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IPG tercatat sebesar 95,55, meningkat secara bertahap hingga mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir sebesar 93,32 pada tahun 2024. Kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan bisa terlihat dalam berbagai bidang atau komponen pembentuk IPG, yaitu bidang penddidikan, kesehatan dan sumbangan pendapatan.

5. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur capaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indkator yang

sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur IDG melalui tiga dimensi, yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan di parlemen diukur dengan proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif. Kemudian dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai manajer, staf administrasi, pekerja professional dan teknisi. Sementara dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laik-laki dan perempuan di sektor non-pertanian.

Partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik terus menguat dalam lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dari skor Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang konsisten tumbuh sejak 2020 hingga mencapai rekor tertinggi baru pada 2023. Adapun sejak tahun 2020 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan fluktuatif. Tahun 2020 nilai Indeks Pemberdayaan Gender adalah sebesar 56,86, mengalami sedikit penurunan tahun 2021 menjadi 56,39, dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 56,371. Kenaikan signifikan terlihat pada tahun 2023, yang mencapai 60,37, namun angka ini kembali menurun menjadi 57,11.

Grafik 2.62
Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

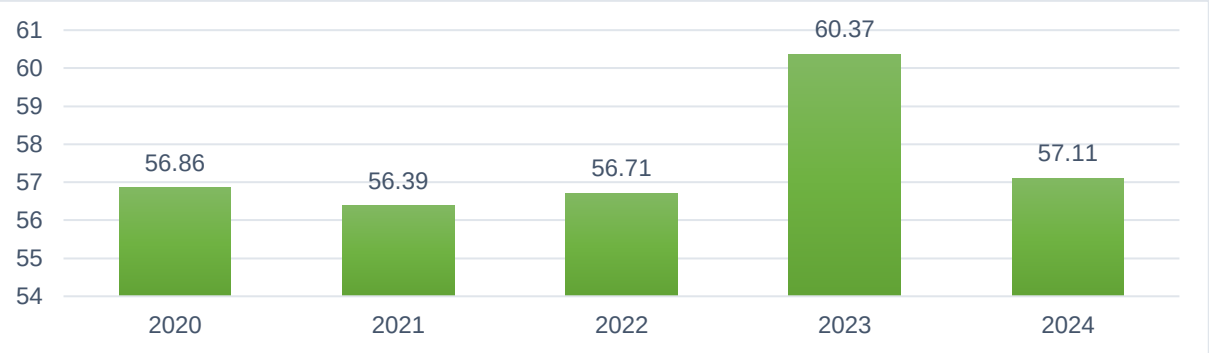

Sumber: Badan Pusat Statistik; 2025

6. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan sebuah instrumen untuk memberikan gambaran sejauh mana kemajuan pembangunan pemuda. Beberapa indikator yang membentuk indeks ini yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, dan gender dan diskriminasi. Hingga saat ini, data indeks pembangunan pemuda baru disajikan di level provinsi, sehingga belum tersedia di Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun demikian, pelibatan pemuda dalam pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang tetap menjadi perhatian pemerintah daerah melalui berbagai program dan kegiatan kepemudaan. Pelibatan ini diwujudkan melalui kemitraan dengan organisasi kepemudaan, seperti Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah

Sidenreng Rappang dalam pembangunan sumber daya manusia, penguatan ideologi kebangsaan, dan pemberdayaan ekonomi pemuda. Selain itu, komunitas pemuda seperti Dhemontz yang turut dilibatkan dalam mendukung program-program unggulan pemerintah daerah. Selain itu Indeks pembangunan pemuda dapat diproteksi menggunakan indikator Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif. Capaian Sidenreng Rappang mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebanyak 26% organisasi pemuda yang aktif, angka ini mengalami penurunan menjadi 10% di tahun 2024.

Grafik 2.63
Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif

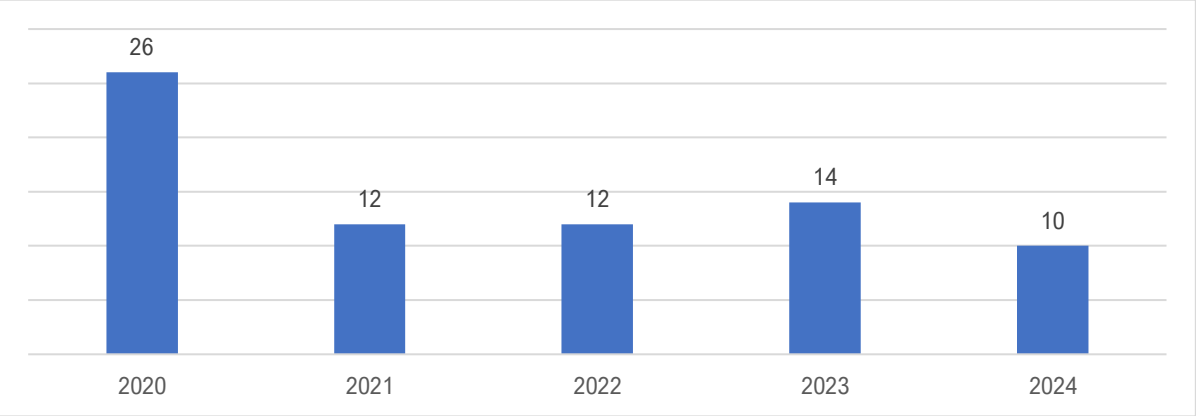

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan pariwisata; 2025

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumberdaya manusia merujuk pada kemampuan individu-individu dalam suatu populasi untuk bersaing secara efektif di pasar kerja atau dalam ekonomi secara keseluruhan. Daya saing sumberdaya manusia memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemakmuran masyarakat.

Indeks ini merupakan alat ukur yang baru digunakan di seluruh Provinsi Indonesia mulai tanggal 2025, sehinga ketersediaan datanya masih belum dapat disajikan, jadi tahun 2020-2024 menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator yang termuat dalam IPM terdiri dari 3 yaitu 1) Indikator ketahanan hidup, yaitu ukuran ketahanan hidup seorang anak yang baru lahir hingga umur 5 tahun; 2) Indikator Pendidikan, untuk mengukur jumlah tahun sekolah yang dapat dicapai oleh seorang anak hingga usia 18 tahun, serta nilai tes yang diselaraskan Bank Dunia untuk tiap negara; 3) Indikator Kesehatan, yang diukur dengan tingkat kelangsungan hidup orang dewasa usia 15-60 Tahun, dan angka stunting anak dibawah usia 5 tahun. Beberapa indikator berikut dapat memberikan gambaran kondisi aspek daya saing sumber daya manusia:

1. Angka Ketergantungan

Proporsi penduduk ini berimplikasi pada angka ketergantungan, yaitu suatu angka menunjukkan banyaknya penduduk non-produktif untuk setiap 100 penduduk produktif. Pada

tahun 2024, angka ketergantungan di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 46,19 (dibulatkan 46), yang artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 46 penduduk non-produktif. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding posisi tahun 2020 yang mencapai 47,50 (dibulatkan 48). Penurunan ini menandakan semakin rendahnya angka ketergantungan dalam beberapa tahun terakhir.

Grafik 2.64
Rasio Ketergantungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Jika mengamati komposisi penduduk dalam rentang waktu antara 2020 sampai dengan 2024, tampak bahwa kondisi piramida penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan beberapa perubahan komposisi. Proporsi penduduk usia produktif yaitu usia antara 20-64 tahun yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif atau usia dibawah 20 tahun dan di atas 64 tahun. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk usia produktif tercatat sebesar 196.560 jiwa. Angka ini setara dengan 59,54% dari total populasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang mencapai 330.198 jiwa. Sementara itu, penduduk usia tidak produktif sebesar 133.638 jiwa atau 49,46% dari total populasi. Dari populasi produktif tersebut, terdapat perbedaan proporsi berdasarkan jenis kelamin. Proporsi penduduk perempuan usia produktif mencapai 99.545 jiwa, lebih banyak dibandingkan laki-laki usia produktif yang berjumlah 97.015 jiwa. Namun, meskipun proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia tidak produktif, selisih jumlah antara kedua kelompok masih tergolong kecil. Hal ini menyebabkan angka beban tanggungan (*dependency ratio*) tetap cukup tinggi, bahwa setiap 100 penduduk produktif masih harus menanggung sejumlah besar penduduk tidak produktif.

Grafik 2.65
Piramida Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

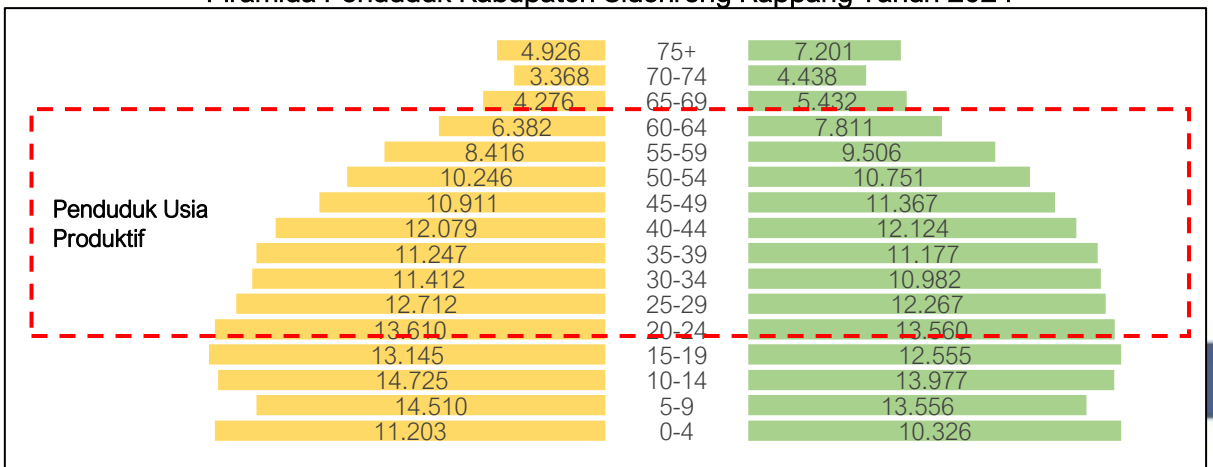

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

2. Keterampilan SDM tenaga kerja

Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diukur melalui beberapa **indikator atau instrumen**, tergantung pada jenis keterampilan yang ingin diukur. Secara umum, keterampilan SDM diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama dan diukur melalui:

a. Hard Skills (Keterampilan Teknis)
b. Soft Skills (Keterampilan Sosial dan Interpersonal)
c. Keterampilan Kognitif dan Adaptif

Selain itu keterampilan tenaga kerja dapat diukur melalui indikator keterampilan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pengukuran keterampilan menggunakan variabel tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan. Capaian Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri mengalami kenaikan setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 angka pilar keterampilan berada di angka 3,24 meningkat menjadi 4,18 di tahun 2024. Peningkatan terjadi di indikator kemudahan menemukan pekerja terampil yakni di angka sempurna yaitu 5, sehingga secara akumulatif meningkatkan nilai pilar keterampilan secara keseluruhan.

Grafik 2.66
Pilar keterampilan IDSD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022-2024

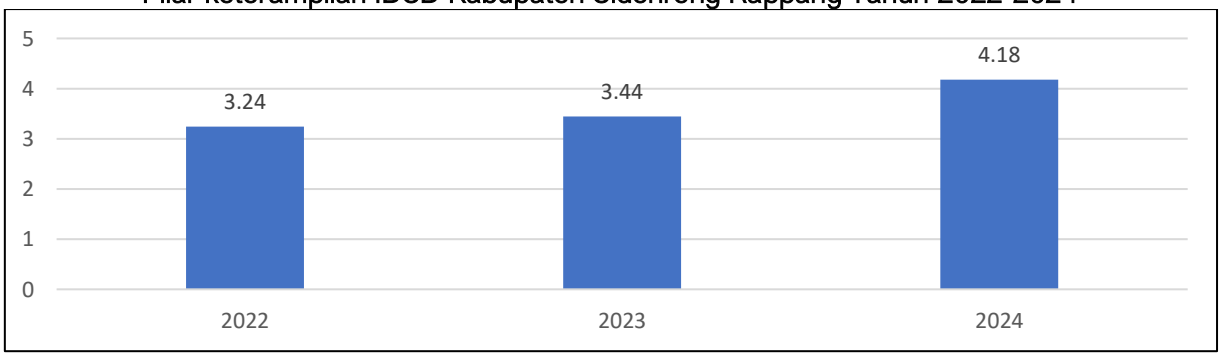

Sumber: Data diolah, 2025

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan atau industri manufaktur memegang peranan penting di dalam perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang. Industri ini mampu menggeser peran dari *commodity based* menjadi *manufacture based*. Industri pengolahan dinilai lebih produktif sehingga mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku, menjadi penyumbang pajak terbesar, hingga membuka lapangan kerja. Industri pengolahan tercatat mampu memberikan kontribusi terhadap

PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata sebesar 14,34 persen selama periode 2020-2024. Sektor ini menjadi penyumbang ekonomi terbesar ketiga bagi Kabupaten Sidenreng Rappang setelah pertanian dan konstruksi. Peran dari sektor ini bagi ekonomi cenderung menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, porsi industri pengolahan pada PDRB sebesar 13,47 persen, meningkat terus hingga tahun 2024 mencatatkan angka 15,09 persen.

Grafik 2.67
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

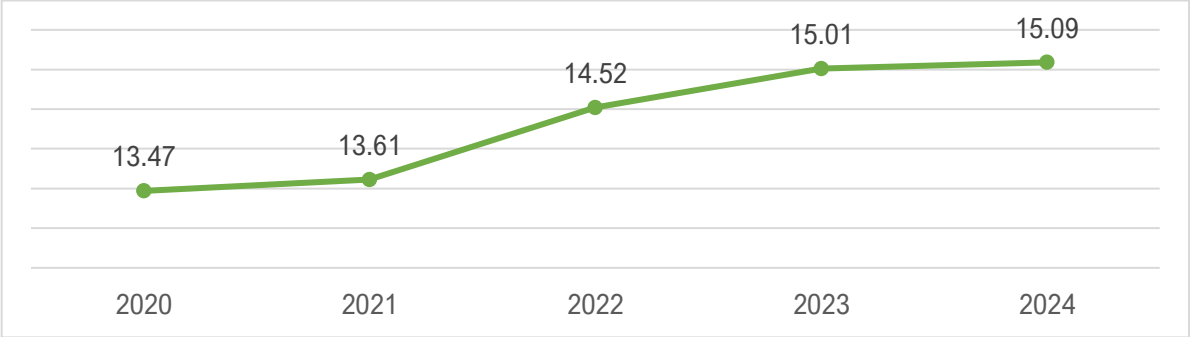

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

2. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Sektor penyediaan akomodasi makan dan minum merupakan sektor yang sangat potensial untuk mendatangkan pendapatan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang apabila dikelola dengan baik. Sektor ini memiliki keterkaitan kuat dengan pariwisata dengan salah satu objek wisata yang terkenal yaitu Taman Wisata Puncak Bila. Sektor ini menyumbang PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata 0,77 persen selama periode 2020-2024. Secara umum, sektor ini menunjukkan peningkatan kontribusi dari 0,70 persen pada tahun 2020, menjadi 0,81 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian, peranan dari sektor ini masih relatif rendah dibandingkan dengan sektor transportasi dan pergudangan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan.

Grafik 2.68
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

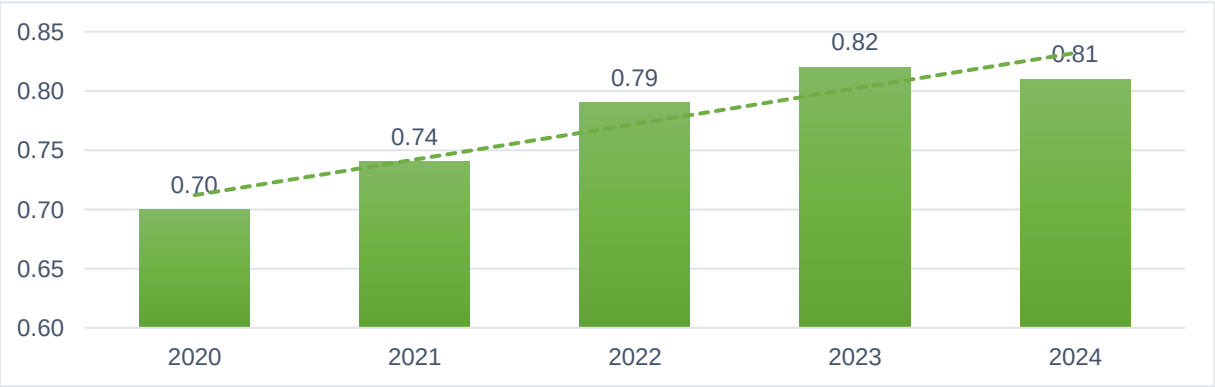

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

3. Jumlah Wisatawan Mancanegara

Salah satu tujuan akhir dari Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (*quality tourism experience*), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi daerah yang selama ini bertumpu pada sektor pertanian. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, kunjungan wisatawan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan tercatat sebesar 62.767 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara dan 199 wisatawan mancanegara. Angka ini meningkat menjadi 83.931 orang di tahun 2021 dan 2022, lalu menurun di tahun 2023 menjadi 60.010 orang, kemudian naik sedikit menjadi 65.155 orang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.69
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

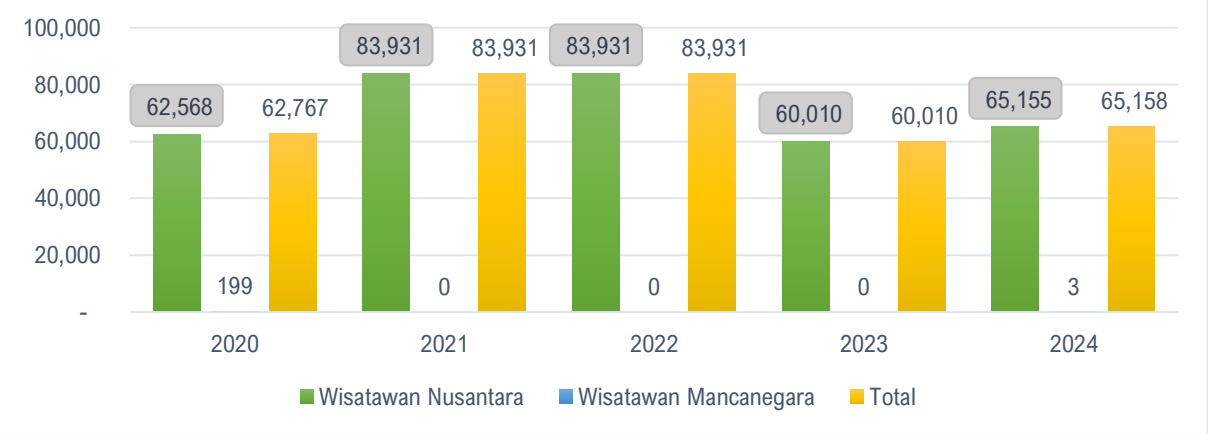

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

Jika dilihat berdasarkan destinasi wisata, wisata buatan memiliki daya tarik terbesar bagi wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi Puncak Bila tercatat sebesar 25.338 orang pada tahun 2024. Lalu destinasi selanjutnya yang menjadi daya tarik wisatawan yakni Risma Swimming Pool dan Taman Wisata Datae dengan masing-masing jumlah pengunjung sebesar 18.270 orang dan 7.025 orang.

Grafik 2.70
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tujuan Tahun 2024

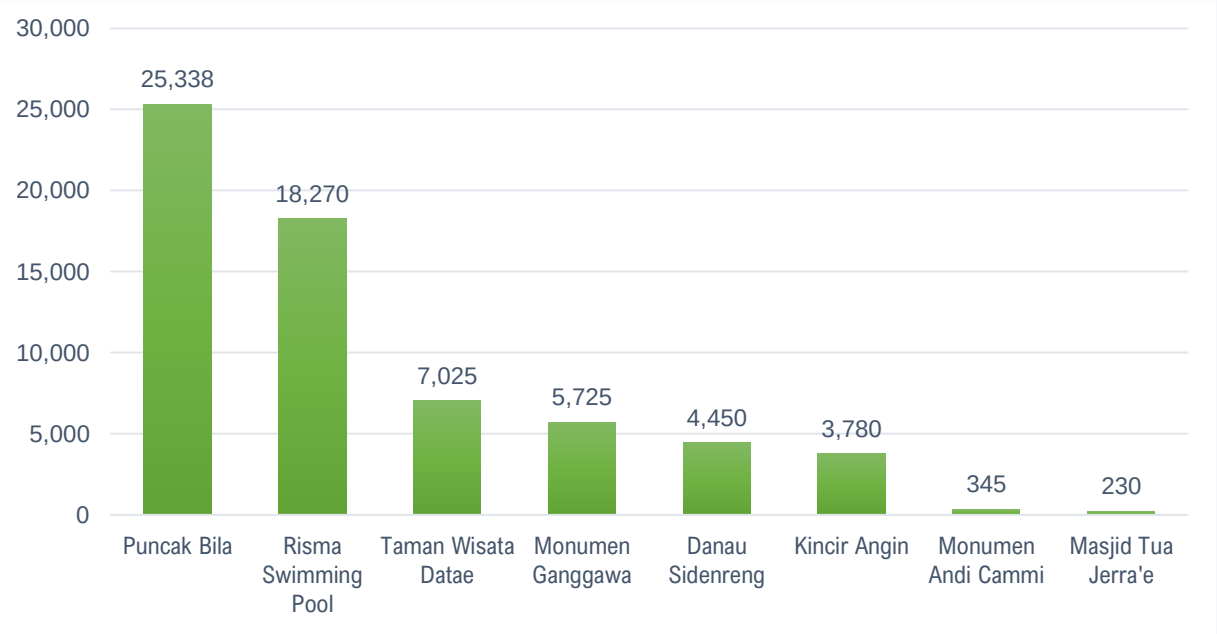

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

4. Ekonomi Kreatif

Dalam era digital saat ini, kata ekonomi kreatif atau yang biasa disingkat sebagai ekraf mungkin sudah tidak asing lagi di telinga. Berbagai bisnis dijalankan dengan mengutamakan konsep kreatif sehingga tidak saja memudahkan masyarakat, tapi juga mengintensifkan kreativitas. Seiring berjalannya waktu, perkembangan bidang ekonomi pada akhirnya sampai di taraf ekonomi kreatif. Di mana kreativitas menjadi hal yang utama dalam pengembangan ekonomi, tentunya kreativitas dan inovasi-inovasi baru harus terus bertambah mengingat kita semua harus menyesuaikan hidup dengan keadaan, selaian itu Industri ekonomi kreatif juga diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Tidak ada data terkait jumlah industri ekonomi kreatif di Kabupaten Sidenreng Rappang.

5. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian

Usaha kecil dan menengah (UKM) non pertanian merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. UKM non pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang proporsinya lebih dari 90 persen dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, terjadi penurunan dalam dua tahun terakhir ini di angka 93,60 persen, setelah mencapai angka tertinggi di tahun 2021 sebesar 94,20 persen. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan skala usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Grafik 2.71
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2020-2024

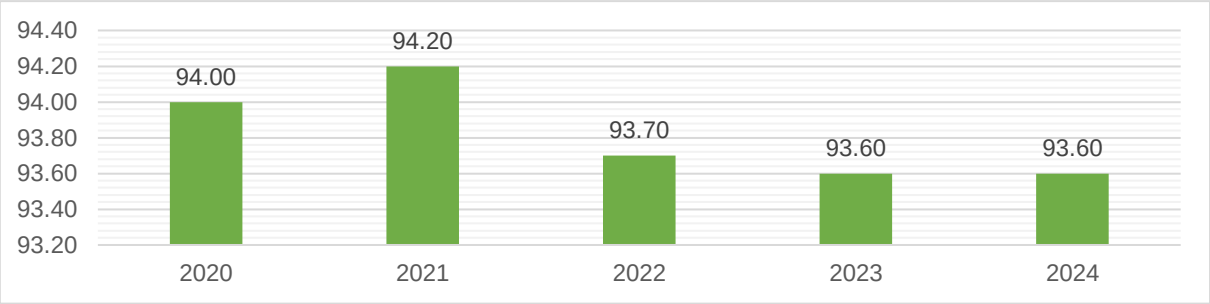

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

6. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota

Industri pengolahan memiliki peran strategis dalam perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menyumbang 15,09 persen terhadap total PDRB. Jumlah industri terutama skala kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Sidrap mengalami peningkatan berarti pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, jumlah IKM total industri sebanyak 4.931 unit, merupakan capaian terendah selama periode 2020-2024. Pada tahun 2021, mengalami kenaikan ke angka 4,958 dan terus meningkat menjadi 5,427 unit pada tahun 2024. Penambahan IKM bisa menjadi pertanda keberhasilan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membangun industri dan ekonomi formal untuk menciptakan lapangan kerja yang banyak dan layak.

Grafik 2.72
Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

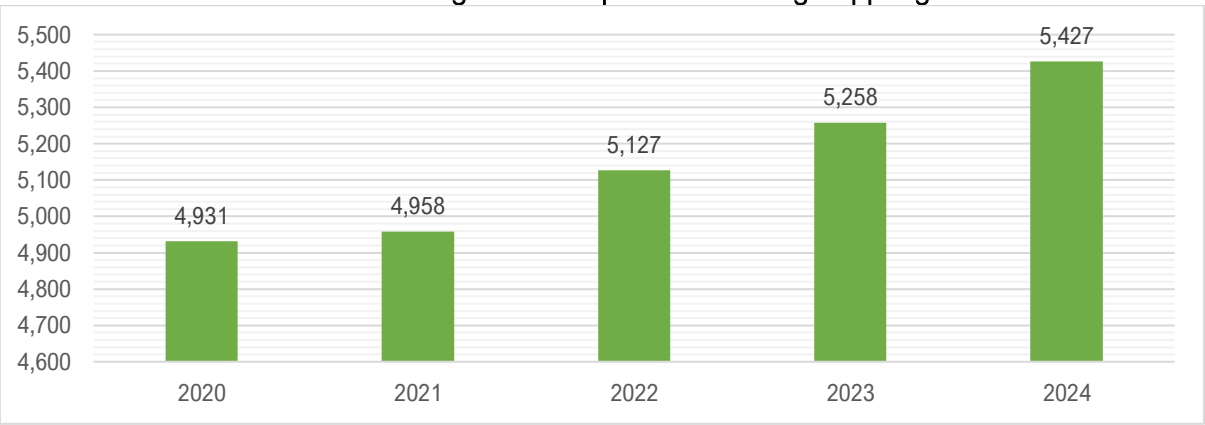

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

7. Rasio Kewirausahaan Daerah

Salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengatasi persoalan pengangguran pemuda saat ini adalah penumbuhan kewirausahaan. Sidenreng Rappang memiliki potensi penumbuhan kewirausahaan yang besar karena besarnya jumlah penduduk dan tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Dengan adanya potensi ini, kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang terutama kalangan pemuda perlu terus dirangsang dan dikembangkan agar mereka menjadi individu yang dapat menciptakan peluang ekonomi dan berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja. Pengembangan kewirausahaan pemuda menuju

wirausaha kerah putih harus terus didorong agar menghasilkan pengaruh yang lebih besar terhadap perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pada tahun 2023, rasio kewirausahaan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 4,83 persen, lebih tinggi dibanding Kabupaten/Kota di Kawasan Parepare serta rata-rata capaian Provinsi. Meskipun demikian, capaian pada tahun 2023 menurun dibandingkan periode sebelum pandemi Covid-19 yang berada pada kisaran 5,75 persen hingga 7,47 persen. Pasca pandemi Covid-19, sektor usaha memang mengalami perlambatan di Kabupaten Sidenreng Rappang utamanya dipengaruhi oleh belum pulihnya rantai pasok bahan baku. Selain itu, ada berbagai tantangan yang masih dihadapi terutama pengusaha muda, antara lain dari sisi kompetensi, pengalaman, sumber daya, jejaring, dan dukungan keluarga untuk memulai dan menjalankan usahanya.

Grafik 2.73
Perkembangan Rasio Kewirausahaan Daerah Ajatappareng Tahun 2017-2023

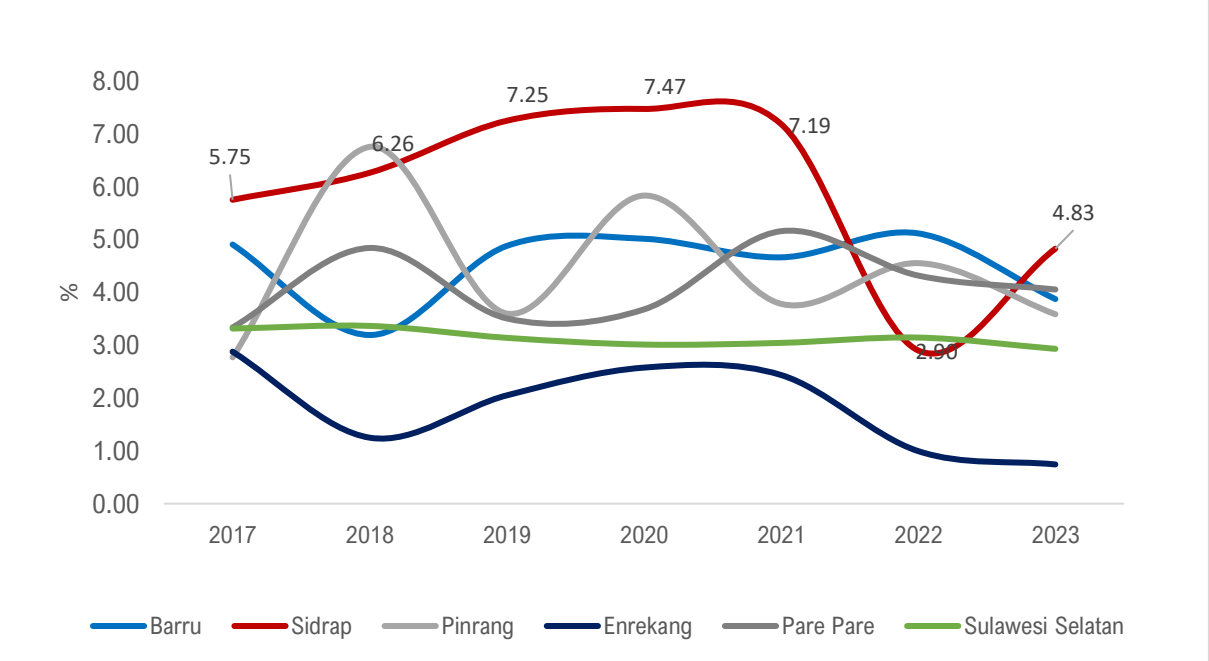

Sumber: BPS, diolah Tahun 2024

8. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Koperasi memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan dengan memanfaatkan potensi keunggulan daerah dan didorong menjadi pemain utama dalam mengelola potensi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Perjalanan 77 tahun koperasi sebagai organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama telah membuktikan bahwa keberadaannya dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sebagaimana fungsi utamanya. Pada tahun 2024, persentase koperasi sehat di Kabupaten Sidenreng Rappang mencatatkan angka tertinggi kedua selama periode 2020-2024 dengan mencapai 61.11 persen, setelah di tahun 2022 mencapai angka 64,29 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan koperasi di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah baik.

Grafik 2.74
Perkembangan Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024

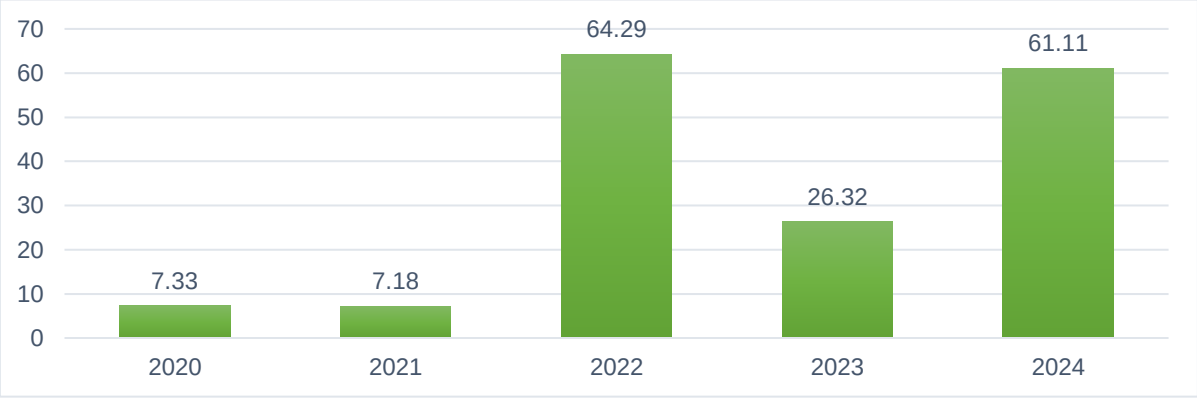

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

9. RoA (Return on Assets) BUMD

Return On Asset (RoA) BUMD Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata mencatatkan 0,08 persen per tahun selama 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, *RoA* BUMD tercatat sebesar 0,10 persen lalu naik menjadi 0,13 persen pada tahun 2021, capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2022 hingga tahun 2023 angka *RoA* BUMD tercatat sebesar 0,05 persen, dan pada tahun 2024 berada di angka 0,06, lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan penurunan produktivitas perusahaan BUMD melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Selain itu, angka *RoA* BUMD Kabupaten Sidenreng Rappang masih dapat dikatakan "kurang baik/sehat", karena masih lebih rendah dari 2 persen. Angka *RoA* dapat dikatakan baik/sehat apabila lebih besar dari 2 persen. Artinya nilai rasio antara keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan penggunaan aktiva yang lebih dari 2 persen dapat menggambarkan bahwa kemampuan untuk mendapatkan laba bersih semakin tinggi dibandingkan aktiva perusahaan yang digunakan.

Grafik 2.75
RoA BUMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2020-2024

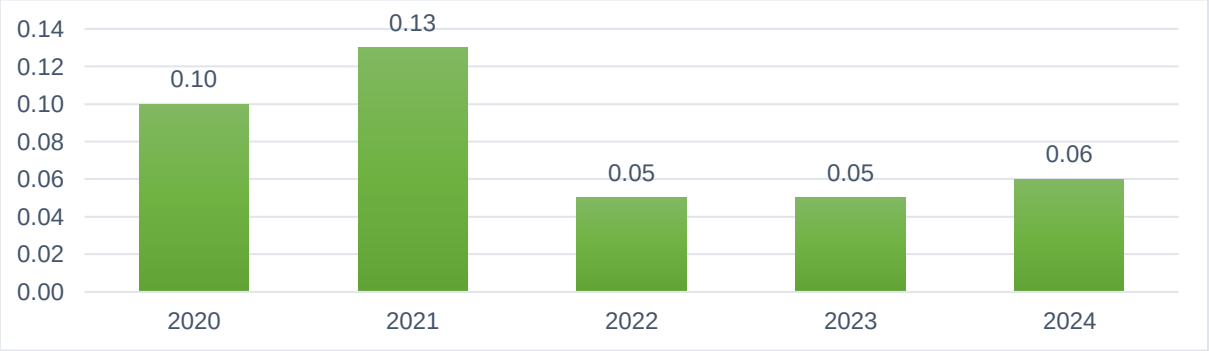

Sumber: Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

10. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Petani/Nelayan adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani/nelayan (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani/nelayan (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ekonomi ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani dan nelayan. Data NTP dan NTN dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data NTP dan NTN hanya tersedia pada level provinsi, sehingga tidak ada data yang tersedia untuk Kabupaten Sidenreng Rappang.

11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator penting dalam statistik ketenagakerjaan yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Indikator ini menunjukkan banyak sedikitnya penduduk usia kerja yang bersedia bekerja. Semakin tinggi TPAK semakin baik, sebab semakin tinggi pula bagian dari penduduk yang bersedia bekerja. Lebih lanjut, TPAK yang tinggi juga mengindikasikan pasar tenaga kerja yang kuat dan aktif. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya TPAK di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan, struktur demografi penduduk, faktor budaya dan sosial, faktor teknologi, dan faktor geografis.

Data menunjukkan TPAK Kabupaten Sidenreng Rappang naik dari 56,92 persen di tahun 2020 menjadi 61,19 persen di tahun 2024. Capaian TPAK di Kabupaten Sidenreng Rappang selalu lebih rendah dibanding capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional selama periode 2020 – 2024. Pada tahun 2024, TPAK di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 67,38 persen, sedangkan di tingkat nasional mencapai 70,63 persen. Capaian TPAK yang relatif rendah ini mengindikasikan tingginya persentase penduduk usia kerja yang tidak masuk dalam pasar tenaga kerja. Konsekuensinya, penduduk usia produktif tersebut tidak bisa berkontribusi dalam kegiatan ekonomi.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, posisi TPAK Kabupaten Sidenreng Rappang kedua terendah di tahun 2024. Daerah dengan TPAK tertinggi diraih oleh Bantaeng (78,39%), Tana Toraja (76,41%), dan Enrekang (75,35%). Rendahnya TPAK di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan masih besarnya potensi sumberdaya manusia yang belum termanfaatkan secara optimal.

Grafik 2.76
TPAK Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2020–

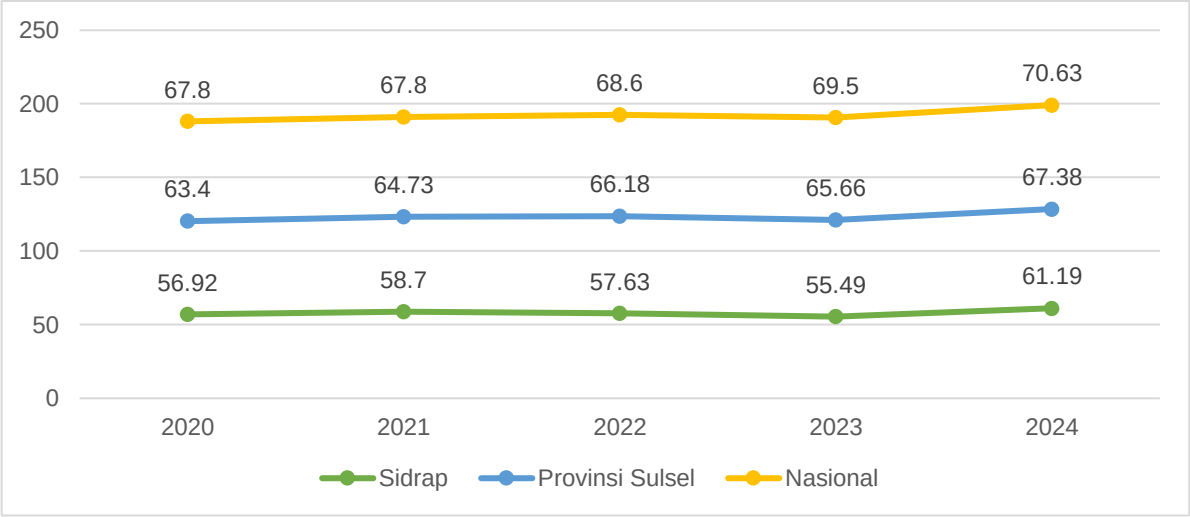

2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Grafik 2.77
TPAK Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

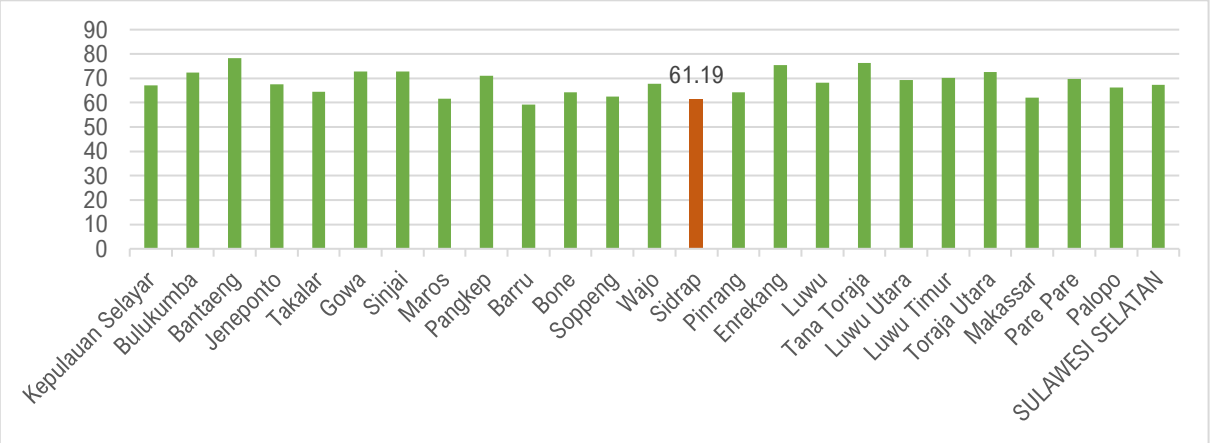

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam statistik ketenagakerjaan yang menggambarkan proporsi perempuan usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. TPAK Perempuan dihitung dengan membagi jumlah angkatan kerja perempuan dengan jumlah penduduk perempuan, lalu dikalikan 100. TPAK Perempuan menjadi penting karena menggambarkan sejauh mana perempuan terlibat dalam kegiatan ekonomi. Semakin tingginya TPAK perempuan dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan produktivitas, pengurangan ketimpangan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Data menunjukkan TPAK Perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPAK perempuan tercatat sebesar 34,01 persen, kemudian meningkat menjadi 38,15 persen di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 angka ini

menurun menjadi 36,08 persen. Tren penurunan berlanjut hingga tahun 2023, menjadi 31,75 persen. Di 2024, kembali naik sedikit menjadi 34,00 persen. TPAK perempuan memang biasanya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki karena perempuan umumnya berperan sebagai ibu rumah tangga. Adapun laki-laki memang biasanya berperan sebagai pencari nafkah di dalam rumah tangga, sehingga mesti bekerja atau masuk dalam kategori angkatan kerja.

Grafik 2.78
TPAK Perempuan dan Laki-Laki Kabupaten Sidenreng RappangTahun 2020–2024

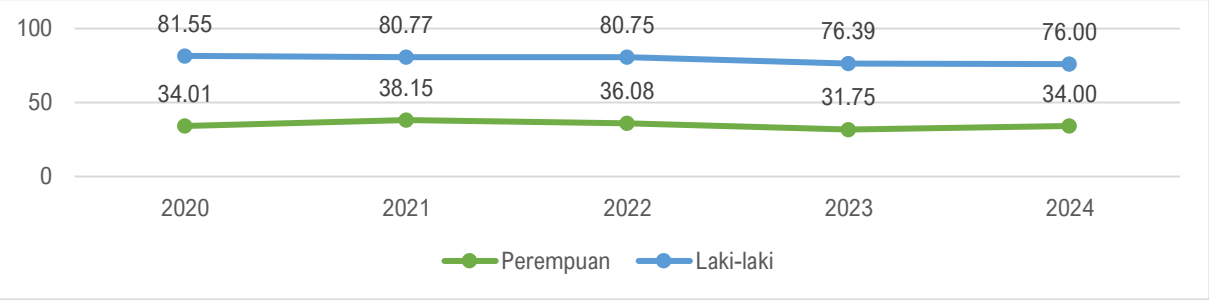

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

13. Indeks Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas inovasi mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah. Kapabilitas inovasi memberikan gambaran mengenaik kuantitas dan kualitas riset serta inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas visi, dan sudut padat yang berbeda. Selain itu, pilar ini menunjukkan sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Pada tahun 2020, Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat 2,00, kemudian naik pada tahun 2023 mencapai angka 2,49, namun kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 2,18.

Grafik 2.79
Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022–2024

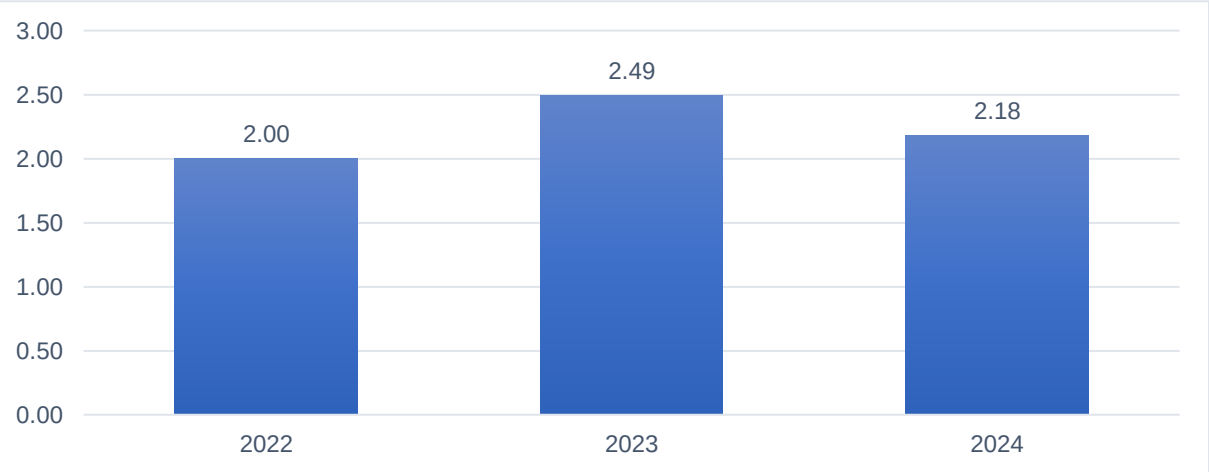

Sumber: BRIN, tahun 2025

14. Indeks Inovasi Daerah

Tingkat penguasaan IPTEK di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat dari dua indikator yakni indeks inovasi daerah dan proporsi belanja penelitian dan pengembangan pemerintah terhadap APBD. Inovasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyediaan pelayanan publik. Tuntutan masyarakat yang terus meningkat atas pelayanan publik menuntut pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan perbaikan berarti dalam dua tahun terakhir ini. Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) pada tahun 2022 sebesar 39,53 poin, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 14.26 poin, lalu kembali turun menjadi 34,33 poin di tahun 2023. Tahun 2024, meningkat menjadi 47,72 poin. Nilai ini mengategorikan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu daerah yang "inovatif" dari 397 Kabupaten yang dinilai. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, nilai IID Sidenreng Rappang menempati urutan ke-sepuluh tertinggi. Empat daerah dengan IID tertinggi yakni Makassar (76,56), Pangkajene dan Kepulauan (65,82), Palopo (65,3) dan Soppeng (64,54).

Grafik 2.80
Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2024

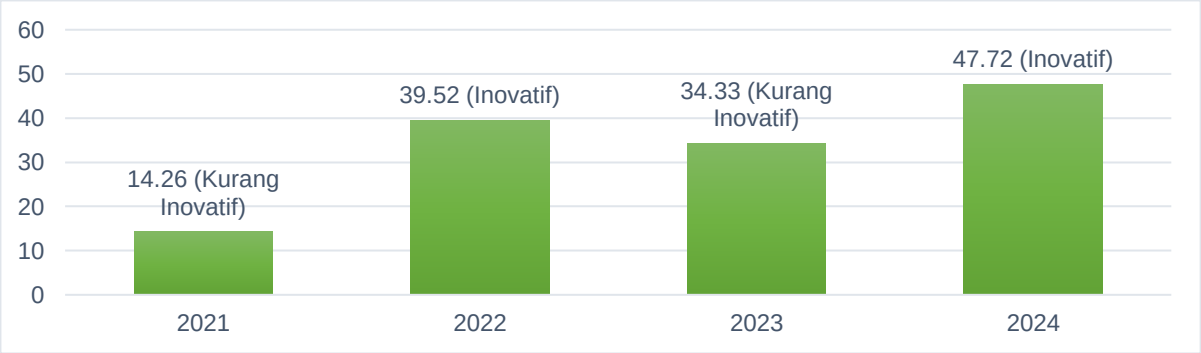

Sumber: Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah tahun Tahun 2025

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1. Indeks Ekonomi Hijau

Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia. Belum tersedianya data Indeks Ekonomi Hijau di level daerah, maka proksi ukuran pembangunan ekonomi hijau yang digunakan yakni indeks tutupan lahan dan Kualitas Udara (AQI) yang dihitung berdasarkan pengukuran partikular (PM2.5 dan PM 10), Ozon (O 3), Nitrogen Dioksida (NO2), Sulfur Dioksida (SO2) dan emisi Karbon Monoksida (CO). Secara umum, pembangunan ekonomi yang menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Sidenreng Rappang masih

terjaga. Indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari angka 49,44 pada tahun 2023, menjadi 50,23 pada tahun 2024. Sementara itu, menurut laporan IQ air, kualitas udara di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 tercatat sangat baik dengan angka indeks 94,22.

Tabel 2.46
Indeks Ekonomi Hijau dan Pilar Pembentuknya di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

Pilar	Skor
Skor Pilar Lingkungan	93,38
Skor Pilar Ekonomi	11,14
Skor Pilar Sosial	74,21
Skor Indeks Ekonomi Hijau Sidrap	64,87

Sumber: Perhitungan Tim Penyusun Provinsi Sulsel, Tahun 2023

Skor rata-rata Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 64,87 dengan skor pilar lingkungan mencatatkan skor sebesar 93,38 diikuti oleh pilar sosial sebesar 74,21, dan pilar ekonomi dengan skor 11,14.

2. Indeks Ekonomi Biru

Indeks Pembangunan Ekonomi Biru digunakan untuk mengelola pemanfaatan sumber daya yang menekankan prinsip keberlanjutan, namun sekaligus dapat mengevaluasi manfaat sosial yang diperoleh. IBEI dibangun dengan 3 pilar yang menjadi komponen utama pembangunan keberlanjutan, yaitu pilar lingkungan, ekonomi dan sosial. Kinerja pengembangan ekonomi biru perlu diukur dan dievaluasi secara periodik. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan indikator yang dikembangkan untuk memahami kondisi saat ini dari ekonomi biru dan perkembangannya di tingkat nasional dan regional. Skor rata-rata indeks ekonomi biru Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 55,3, dengan nilai pilar ekonomi adalah 45,8, pilar lingkungan sebesar 85,2, dan pilar sosial sebesar 45,5. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan skor yang cukup signifikan antara pilar ekonomi biru.

Tabel 2.47
Indeks Ekonomi Biru dan Pilar Pembentuknya di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

Pilar	Skor
Skor Pilar Lingkungan	85,2
Skor Pilar Ekonomi	45,8
Skor Pilar Sosial	42,5
Skor Indeks Ekonomi Biru Sidrap	55,3

Sumber: Perhitungan Tim Penyusun Provinsi Sulsel, Tahun 2023

2.1.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan salah satu langkah strategis dalam menghadapi tantangan global di era teknologi. Pengarusutamaan transformasi digital tidak hanya sebatas penerapan

teknologi baru tetapi juga melibatkan pengembangan sistem yang terintegrasi dan berorientasi pada efisiensi, aksesibilitas, serta inklusi.

1. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren positif dalam penyelenggaraan layanan publik secara online dan terintegrasi selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, terdapat 78 layanan yang sudah beralih ke platform digital, dan jumlah ini meningkat menjadi 82 layanan di tahun 2022. Tren peningkatan ini terus berlanjut dengan 88 layanan tercatat pada tahun 2023, dan mencapai 89 layanan pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas cakupan layanan digital guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efisien.

Grafik 2.81
Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2024

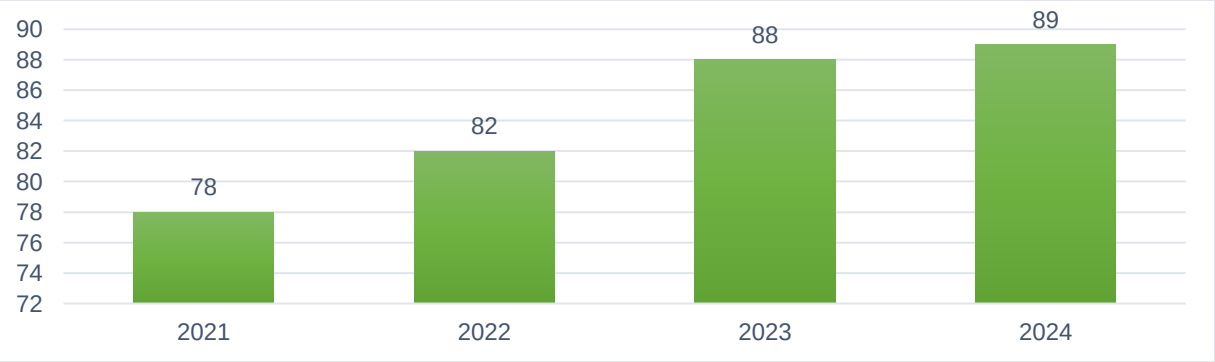

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025

2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Perkembangan Informasi harus dibarengi dengan sarana prasarana yang memadai terutama akses internet. Lebih jauh, internet menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat yang sekarang bergantung pada akses informasi melalui HP/Telepon. Adanya internet akan memperkuat cakupan informasi kepada setiap lapisan masyarakat.

Namun demikian, proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami tren peningkatan, 48,82 persen di tahun 2020 menjadi 70,42 di tahun 2024. Masih terdapat sekitar 29,58 persen rumah tangga yang belum menikmati akses internet sehingga perlu memotivasi lebih untuk memperluas akses internet ke setiap rumah tangga.

Grafik 2.82
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2020-2024 (%)

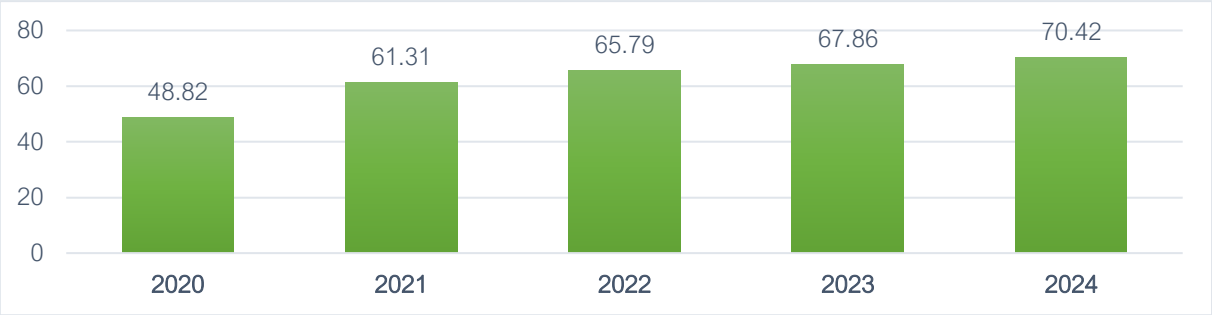

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

3. Jumlah dan Lokasi Blank Spot

Akses jaringan telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam mendukung pembangunan di era digital. Namun, tantangan blank spot, yaitu area yang tidak terjangkau oleh sinyal telekomunikasi, masih menjadi kendala di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil dan terisolasi. Keberadaan *blank spot* tidak hanya menghambat akses masyarakat terhadap informasi, tetapi juga berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi yang semakin mengandalkan teknologi digital.

Grafik 2.83

Jumlah Lokasi *Blank Spot* Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2019-2023 (%)

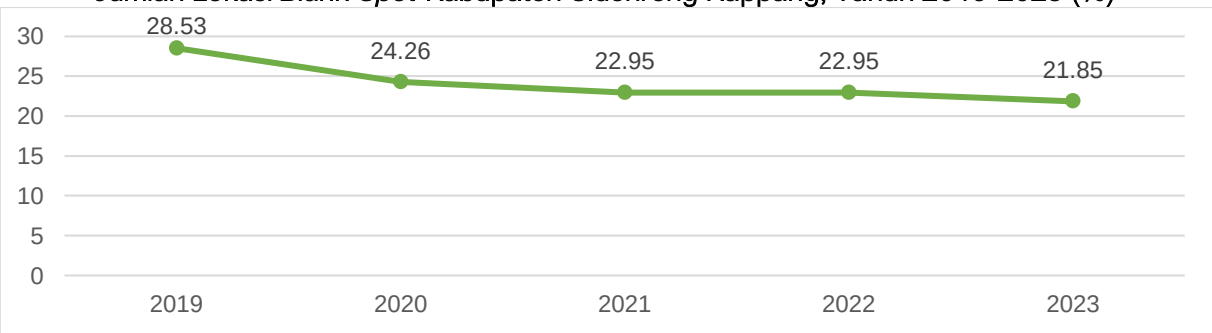

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Sidenreng Rappang, tahun 2025

Akses jaringan telekomunikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, sebagaimana tercermin dari berkurangnya persentase area blank spot. Pada tahun 2019, blank spot tercatat sebesar 28,53 persen, tetapi angkanya terus menurun menjadi 24,26 persen pada tahun 2020 dan 22,95 persen pada tahun 2021. Angka ini bertahan hingga tahun 2022, sebelum kembali mengalami penurunan menjadi 21,85 persen pada tahun 2023. Penurunan ini merupakan upaya pemerintah daerah bersama dengan operator telekomunikasi untuk meningkatkan infrastruktur jaringan, terutama di wilayah terpencil.

4. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy yang turut dihasilkan pemerintah Indonesia pada forum Digital Economic

Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu (1) Infrastruktur dan Ekosistem; (2) Keterampilan Digital; (3) Pemberdayaan; dan (4) Pekerjaan. Pengukuran pilar-pilar tersebut dapat memberikan gambaran kondisi masyarakat digital Indonesia secara lebih komprehensif, objektif, dan terstandardisasi. Tidak ada data Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang tersedia untuk Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global

1. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah

Koefisien Variasi Harga adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi. Perhitungan koefisien variasi harga dilakukan dengan langkah-langkah yaitu pertama menghitung rata-rata harga setahun per komoditas. Selanjutnya melakukan perhitungan standar deviasi untuk data komoditas. Setelah itu, menghitung koefisien variasi dengan cara membagi standar deviasi tiap komoditas terhadap rata-rata harga per komoditas. Kemudian untuk menghitung realisasi koefisien variasi per tahun didapatkan dengan cara menghitung rata-rata koefisien variasi seluruh komoditas. Data nilai persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2024 sebesar 11,62 persen.

2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB menjadi salah satu data strategis untuk menentukan kebijakan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang karena merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Kontribusi PMTB pada PDRB tahun 2020 mencapai 40,83 persen. Lalu, naik menjadi 41,09 persen pada tahun 2021, dan kemudian terus menurun hingga menjadi 38,28 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan lemahnya daya tarik investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.84
Kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

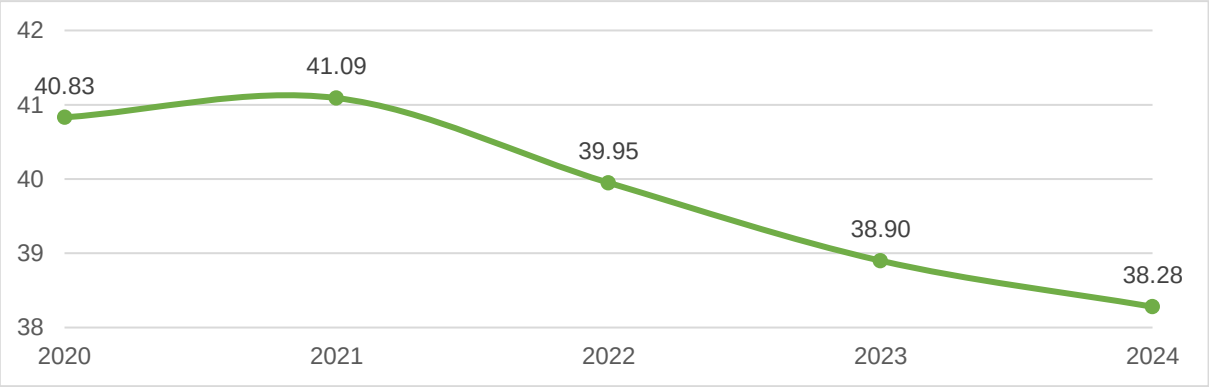

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

3. Net Ekspor Barang dan Jasa

Data dan volume ekspor di tingkat kabupaten/kota hingga saat ini belum tersedia. Namun proksi untuk melihat sejauh mana interaksi ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan wilayah lainnya bisa dilihat pada nilai net ekspor barang dan jasa, yang merupakan salah satu komponen Produk Domestik Regional Bruto sisi pengeluaran. Data menunjukkan net ekspor, atau selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor, yang bernilai negatif. Ini berarti nilai ekspor Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor. Selama 5 tahun terakhir, nilai net ekspor mengalami fluktuasi, dimana sejak pandemi COVID-19 mengalami penurunan, tetapi kembali meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi.

Grafik 2.85
Nilai dan Volume Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024

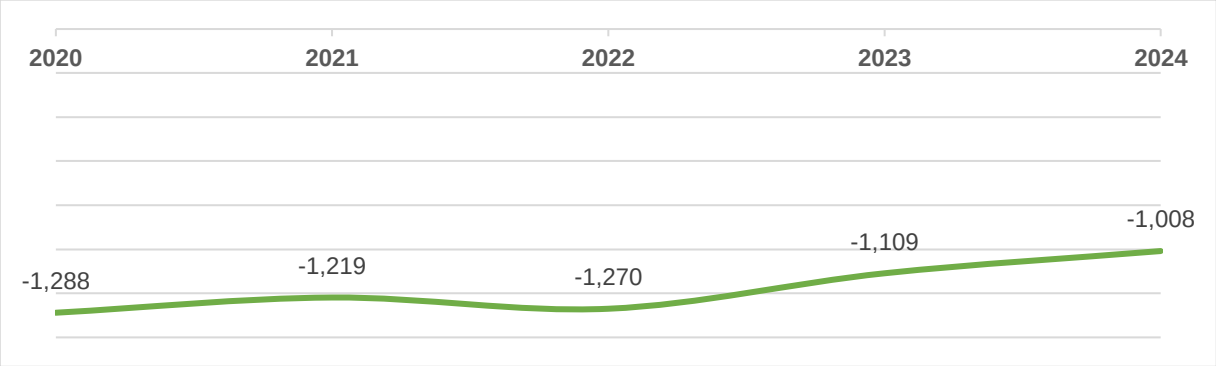

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

2.1.3.6. Perkotaan Dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi

Peranan atau kontribusi Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap perekonomian Sulawesi Selatan mencatatkan angka rata-rata 2,78 persen selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, peranan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap ekonomi Sulawesi Selatan mencatatkan angka 2,78 persen, lalu sedikit meningkat menjadi 2,79 persen di tahun 2021, dan kembali mengalami penurunanke angka 2,76 persen di tahun 2022. Di dua tahun berturut-turut berikutnya mengalami kenaikan menjadi 2,78 persen di tahun 2023, dan mencapai angka 2,81 persen tahun

2024. Dilihat secara tren, kontribusi ekonomi Sidenreng Rappang terhadap Sulawesi Selatan relatif stabil.

Grafik 2.86
Kontribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap PDRB Provinsi Tahun 2020-2024

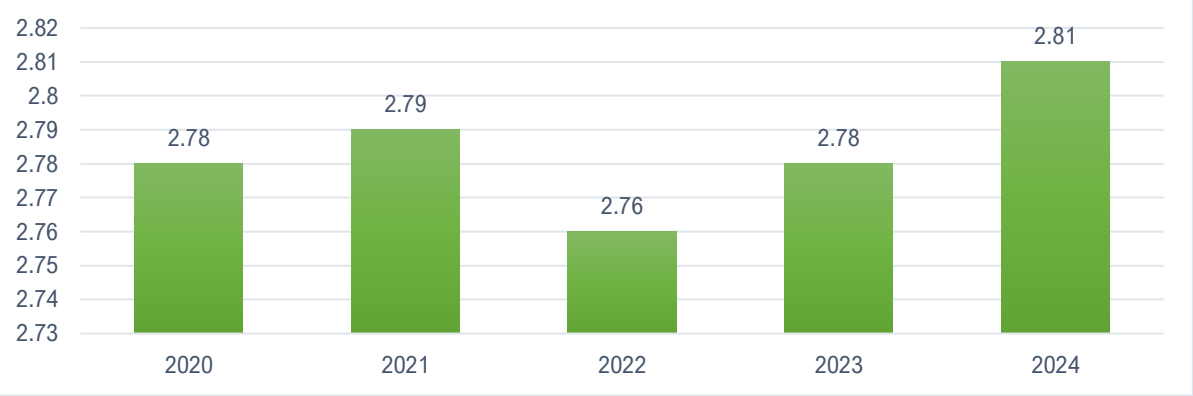

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025

2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Ketersediaan dan akses terhadap hunian layak merupakan salah satu bagian mendasar dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Indikator rumah layak huni menjadi salah satu tujuan dalam SDGs menunjukkan pentingnya hal tersebut sebab terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia yang fundamental dan dipandang dapat menurunkan kemiskinan dan peningkatan pemerataan kesejahteraan. Rumah layak huni dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Grafik 2.87
Persentase Rumah Tangga Terhadap Rumah Layak Huni dan Terjangkau
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

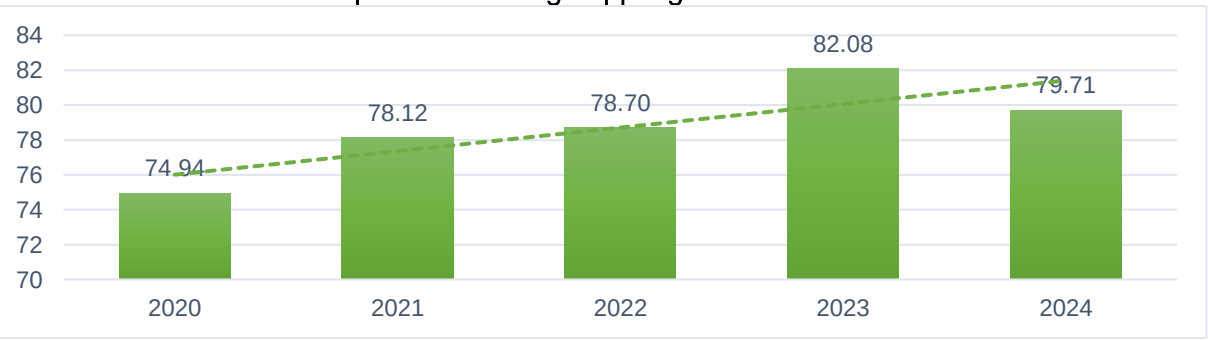

Sumber: SUSENAS dan BPS, diolah tahun 2025

Dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, persentase rumah tangga terhadap rumah layak huni (RLH) dan terjangkau menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2020, RLH Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 74,94 persen dan terus mengalami peningkatan mencapai 79,91 persen pada tahun 2024. Angka tersebut

menggambarkan terus membaiknya akses dan ketersediaan rumah layak huni bagi rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang dari waktu ke waktu.

Tabel 2.48
Capaian Akses Rumah Layak Huni Menurut Komponen Kelayakan Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Rumah Layak Huni (%)	Komponen Rumah Layak Huni (%)			
			Ketahanan Bangunan	Kecukupan Luas	Air Minum Layak	Sanitasi Layak
1	Kep. Selayar	68.76	83.28	94.45	95.23	89.39
2	Bulukumba	68.37	86.49	98.2	86.77	88.66
3	Bantaeng	65.85	87.74	98.67	97.02	77.94
4	Jeneponto	31.7	38.6	97.23	97.43	87.2
5	Takalar	72.38	74.45	97.95	98.34	96.25
6	Gowa	78.86	87.08	96.73	94.88	98.42
7	Sinjai	74.35	96.97	97.57	90.69	86.14
8	Kab. Maros	65.77	74.11	96.37	91.34	94.68
9	Pangkep	53.07	60.18	95.4	95.07	94.51
10	Barru	71.01	78.51	94.93	98.26	96.21
11	Bone	84.25	94.59	98.3	91.8	97.54
12	Soppeng	64.89	72.21	97.29	95.09	95.44
13	Wajo	80.31	93.37	93.35	91.39	95.93
14	Sidrap	79.71	83.66	96.99	96.78	98.32
15	Pinrang	67.31	84.9	94.16	90.47	92.74
16	Enrekang	74.6	96.18	93.73	83.34	96.63
17	Luwu	71.53	93.48	96.01	82.05	92.91
18	Tana Toraja	53.43	96.11	87.44	66.5	90.74
19	Luwu Utara	81.64	96.65	97.59	88.12	97.14
20	Luwu Timur	74.86	93.75	96.65	88.27	89.65
21	Toraja Utara	55.1	97.68	83.81	70.34	92.86
22	Kota Makassar	78.27	93.2	88.08	98.57	93.92
23	Kota Parepare	70.51	77.86	91.77	99.53	96.7
24	Kota Palopo	85.73	95.11	92.18	99.26	96.57
Sulawesi Selatan		71.86	86.09	94.51	92.23	93.83

Sumber: SUSENAS dan BPS, diolah tahun 2025

Adapun capaian akses rumah layak huni menurut komponen kelayakan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 menunjukkan tren positif. Persentase rumah layak huni tercatat sebesar 79,71 persen, dengan ketahanan bangunan mencapai 83,66 persen. Dari segi kecukupan luas, capaiannya cukup tinggi yaitu 96,99 persen. Selain itu, akses terhadap air minum layak tercatat sebesar 96,78 persen, dan akses sanitasi layak berada di angka tertinggi yaitu 98,82 persen. Capaian ini berada di atas rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengeluaran per kapita untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga mencerminkan alokasi anggaran rumah tangga terhadap kebutuhan hunian yang layak serta utilitas pendukungnya. Kabupaten Sidenreng Rappang mencatat fluktuasi dalam rata-rata pengeluaran per kapita per

bulan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran mencapai 23,75 persen dari total pengeluaran, kemudian sedikit menurun menjadi 23,68 persen di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 angka ini meningkat signifikan menjadi 25,02 persen dan terus bertambah hingga mencapai puncaknya sebesar 26,83 persen di tahun 2023. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 26,11 persen. Perubahan ini dapat mencerminkan dinamika dalam kebutuhan dan prioritas pengeluaran rumah tangga di daerah tersebut.

Grafik 2.88
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitasi Rumah Tangga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

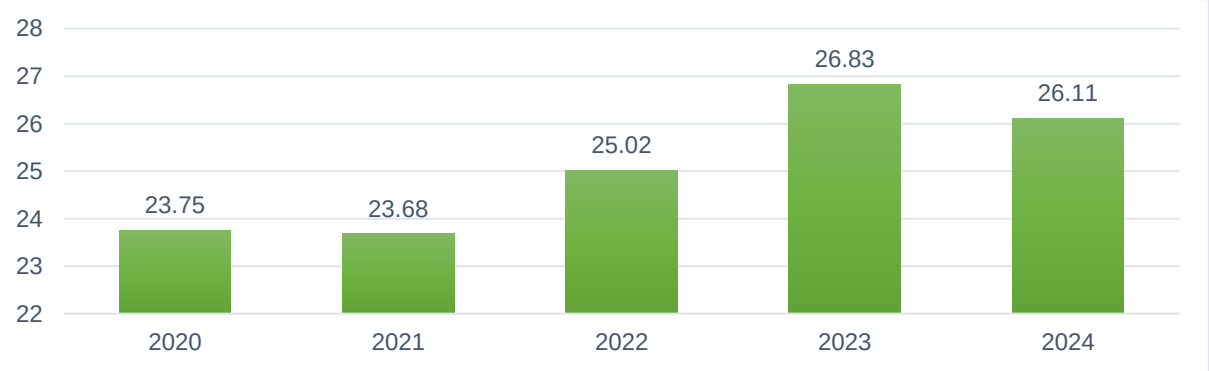

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2025

3. Indeks Layanan Infrastruktur

Kualitas infrastruktur juga menjadi salah satu aspek yang patut dipertimbangkan dalam meningkatkan daya saing wilayah. Salah satu indikator yang umum digunakan ialah indeks infrastrukur yang merupakan indikator untuk menilai kualitas infrastruktur berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik dan telekomunikasi.

Pada tahun 2020 Indeks Layanan Infrastruktur berada pada angka 78,82 persen, mengalami sedikit kenaikan di tahun 2021 menjadi 78,87 persen. Pada tahun 2022 mencatat angka sebesar 80,27, mengalami kenaikan tipis di angka 80,57 persen tahun 2023. Di tahun 2024, kembali naik mencapai angka 81,60 persen. Dari keempat indikator pembentuk indeks infrastruktur, indikator tingkat kemantapan jalan dan persentase rumah layak huni masih rendah sedangkan indikator persentase akses sanitasi layak dan persentase rumah yang mengakses air bersih sudah cukup tinggi realisasinya.

Data Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mencatat tahun 2020 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 58,83 persen, sementara 41,17 persen kondisinya rusak ringan dan rusak berat. Menunjukkan tren fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Selama tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan yaitu menjadi 57,91 persen pada tahun 2021, 57,50 persen pada tahun

2022, dan terendah berada di angka 56,84 persen di tahun 2023. Namun pada tahun 2024, mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai angka 60,91 persen. Hal ini disebabkan karena upaya dari pemerintah daerah melalui dinas teknis melaksanakan kegiatan peningkatan jalan yang bersumber dari APBD maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 2.49
Indeks Infrastruktur Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

No.	Data	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Kemantapan Jalan	%	58,83	57,91	57,50	56,84	60,91
2	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	85,04	85,74	90,40	90,52	90,88
3	Persentase Rumah yang mengakses air bersih	%	89,19	90,43	91,56	93,49	93,98
4	Persentase Rumah Layak Huni	%	82,22	81,41	81,60	81,44	80,63
Indeks Layanan Infrastruktur		Indeks	78,82	78,87	80,27	80,57	81,60

Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

4. Persentase Desa Mandiri

Undang-Undang desa memberikan dasar menuju pemberdayaan komunitas yaitu bahwa desa tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi komUnitas yang mandiri. Sehingga setiap warga desa dan masyarakat desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan mengatur wilayah desanya sendiri. Di Kabupaten Sidenreng Rappang terjadi tren peningkatan status pembangunan desa terutama mandiri. Pada tahun 2020, persentase desa mandiri di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 17,65 persen atau hanya 17 desa dari 68 desa, meningkat menjadi 48,53 persen di tahun 2024 atau 48 desa. Artinya ada 48 desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Grafik 2.89
Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

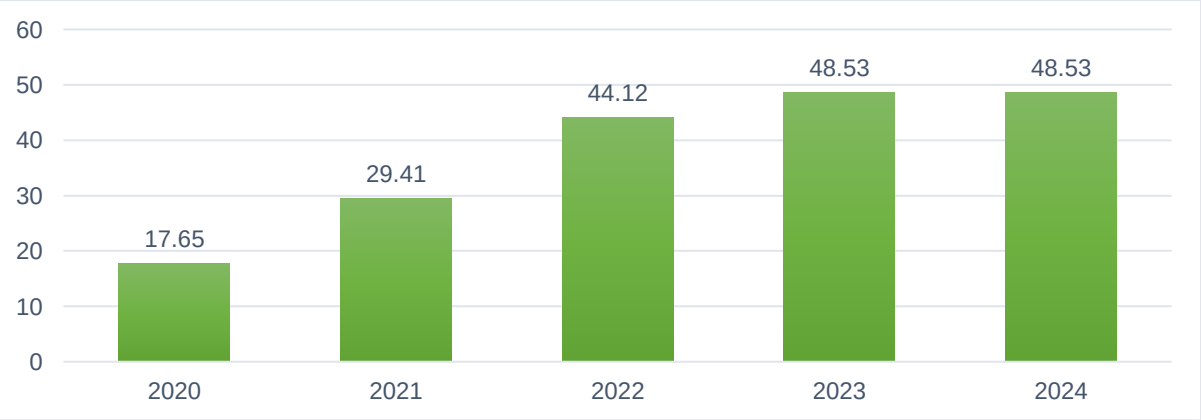

Sumber: Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

Sementara itu keberhasilan desa memperoleh predikat mandiri dapat dilihat dari seberapa aktif Bumdes yang dikelola oleh Desa dan memberdayakan masyarakat yang berada disekitarnya untuk membantu perekonomian desa tersebut. Berdasarkan capaian jumlah Desa yang memiliki BUMDES dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.90
Jumlah BumDes di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

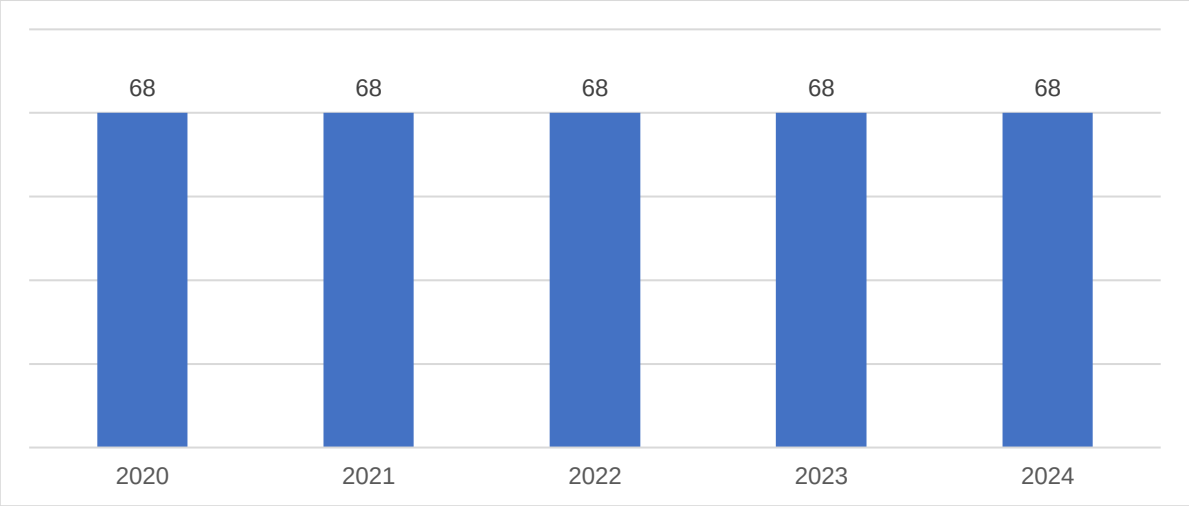

Sumber: Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

Jumlah BUMDES ada sebanyak 68 dari 68 desa keseluruhan di Kabupaten Sidenreng Rappang, ini menunjukkan bahwa setiap desa memiliki BUMDES, walaupun demikian, Pendirian BUMDES Desa belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya secara mandiri, serta memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang kuat.

2.1.3.7. Persentase Penanganan Terhadap Gangguan Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat

Dalam rangka menjaga stabilitas sosial serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terus berkomitmen melakukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan terhadap berbagai potensi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor antara perangkat daerah, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat.

Selama lima tahun terakhir, kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang relatif terkendali. Data menunjukkan jumlah kasus pelanggaran terhadap peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) yang dilaporkan mengalami fluktuasi, tercatat ada 10 kasus pada tahun 2020, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 21 kasus, lalu menurun drastis menjadi hanya 3 kasus di tahun 2024.

Sementara itu, jumlah konflik sosial yang terjadi tercatat hanya 1 kali dalam kurun waktu lima tahun, yaitu pada tahun 2020 dan telah berhasil diselesaikan. Tidak ada konflik sosial yang dilaporkan terjadi sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Jumlah gangguan ketertiban dan ketentraman yang dilaporkan dan yang tertangani menunjukkan pola yang sama dengan kasus pelanggaran perda dan perkada, yaitu meningkat tajam di tahun 2023 dengan 21 kasus dan

kemudian menurun drastis di tahun 2024 menjadi hanya 3 kasus. Secara keseluruhan, seluruh gangguan yang terjadi berhasil ditangani dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dinamika tahunan, pemerintah daerah tetap mampu menjaga suasana yang kondusif melalui penegakan hukum dan mediasi sosial yang efektif.

Tabel 2.50
Presentase Penanganan Terhadap Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	TAHUN					OPD
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda Dan Perkada/ Pelanggaran Keteriban Dan Ketentraman Yang Dilaporkan	10	4	6	21	3	Satpol PP
2	Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	0	0	0	0	Kesbangpol
3	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda Dan Perkada/ Pelanggaran Ketertiban Dan Ketentraman Yang Tertangani/ Diselesaikan	10	4	6	21	3	Satpol PP
4	Jumlah Konflik Sosial Yang Tertangani/Terselesaikan	1	0	0	0	0	Kesbangpol
5	Jumlah Gangguan Ketertiban Dan Ketentraman	11	4	6	21	3	Kesbangpol
6	Jumlah Gangguan Ketertiban Dan Ketentraman Yang Tertangani	11	4	6	21	3	Satpol PP
Persentase penanganan gangguan ketertiban dan ketentraman (%)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Sumber: Data diolah, 2025

2.1.3.8. Persentase Masyarakat Yang Terlibat Dalam Kegiatan Keagamaan

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren yang positif sebagai cerminan kehidupan sosial yang harmonis dan religius. Kegiatan keagamaan tidak hanya dilaksanakan di rumah ibadah masing-masing, tetapi juga dalam bentuk pengajian, peringatan hari besar keagamaan, majelis taklim, kegiatan sosial-keagamaan, dan pendidikan keagamaan nonformal.

Pemerintah daerah, bekerja sama dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan, terus mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat melalui fasilitasi kegiatan keagamaan di tingkat desa dan kelurahan, penyediaan sarana prasarana ibadah, serta dukungan terhadap kegiatan lintas agama yang bersifat inklusif.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, persentase masyarakat yang terlibat dalam kegiatan keagamaan tercatat sebesar 18,43 persen, kemudian meningkat menjadi 18,71 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas keagamaan.

Tabel 2.51
Presentase Masyarakat yang Terlibat Dalam Kegiatan Keagamaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 - 2024

Persentase masyarakat yang terlibat dalam kegiatan keagamaan	2023	2024
	18.43	18.71

2.1.3.9. Stabilitas Ekonomi Makro

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Salah satu pilar dalam UU HKPD (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah) adalah meningkatkan *local taxing ratio*, supaya daerah itu tidak benar tergantung dari dana transfer pusat. Perubahan kebijakan RUU HKPD diarahkan untuk mendukung peningkatan rasio pajak dan pendapatan daerah melalui *administrative* dan *compliance cost* yang lebih rendah. Target rasio pajak daerah terhadap PDRB yang diharapkan sekitar 3 persen dari PDRB. Selama lima tahun terakhir, rata-rata *local taxing ratio* Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 0,27 persen, masih jauh dari target yang diharapkan. Pencapaian tertinggi untuk rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang yakni pada tahun 2021 yaitu 0,30 dan terendah 0,26 di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak.

Grafik 2.91
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

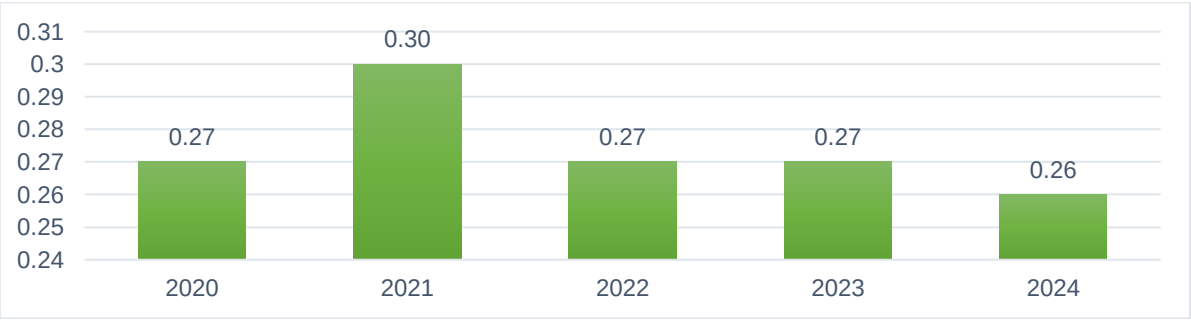

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

2. Tingkat Inflasi

Lambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tiga tahun terakhir perlu dianalisis lebih jauh untuk menemukan penyebab. Pada bagian sebelumnya telah dibahas, bahwa ada dua penyebab umum pertumbuhan konsumsi melambat, yaitu penurunan daya beli dan menurunnya pendapatan rumah tangga. Penurunan daya beli merupakan sebuah kondisi dimana pendapatan rumah tangga tidak menurun, tapi permintaan rendah akibat dari kenaikan harga barang dan jasa. Rumah tangga yang berpendapatan Rp. 5 juta per bulan terlihat tinggi secara nominal, namun setelah dikoreksi dengan inflasi, angka tersebut bisa jadi sangat rendah. Oleh karena itu, inflasi perlu dikendalikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Inflasi di Kabupaten Sidereng Rappang saat ini yakni di tahun 2024 sudah menggunakan hasil pengukuran inflasi sendiri dimana sebelumnya masih merujuk pada data inflasi Kota Parepare. Selama 1 tahun terakhir yakni di tahun 2024. Nilai Inflasi tahunan Year on Year Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami berbagai dinamika atau fluktuasi.

Pada tahun 2024, kenaikan harga barang dan jasa mencapai 1,03 persen. Pada Januari angka inflasi mencapai 2,18 persen dan terus mengalami kenaikan dimana puncaknya terjadi di bulan maret yang sudah memasuki bulan Ramadhan yakni berada di angka 4,69 persen. Angka inflasi terus mengalami penurunan hingga di akhir tahun Desember sudah mencapi 1,03 persen. Respon cepat pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah dan intervensi program pengendalian inflasi dari kemendagri melalui pertemuan *zoom meeting* inflasi setiap minggunya semakin efektif dalam mengendalikan kenaikan harga barang serta menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Hasil upaya tersebut berhasil terlihat pada tahun 2024, di mana inflasi turun menjadi 1,03 persen.

Grafik 2.92
Laju Inflasi Tahunan (Y-On-Y) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

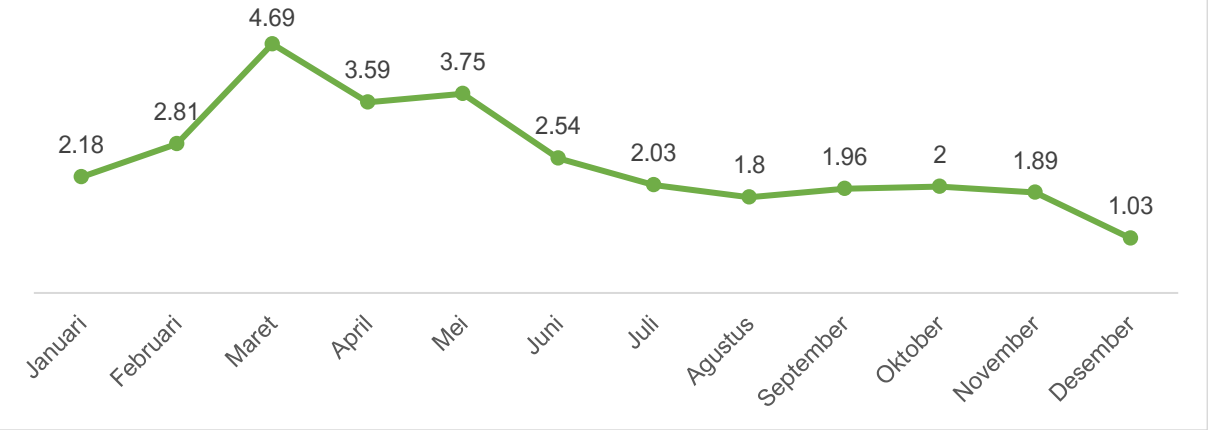

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025

3. Pertumbuhan Investasi Daerah

Investasi merupakan variabel penentu pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Semua literatur dan penelitian tentang investasi dan pertumbuhan menyimpulkan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Berbeda dengan konsumsi, investasi bekerja seperti bahan bakar, dimana kendaraan hanya bisa dijalankan jika bahan bakarnya cukup. Jika investasi sebuah negara/daerah rendah, maka pastinya melambat, begitupun sebaliknya. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami perlambatan yang signifikan, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan nilai dan pertumbuhan investasi (PMA/PMDN). Tahun 2020 sebesar Rp. 204,49 miliar, total investasi PMA dan PMDN terus meningkat hingga mencapai Rp. 4.0 triliun di tahun 2023. Namun di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 3,5 triliun, karena tidak ada lagi pengembangan investasi khususnya PT UPC

Sidrap Bayu Energi yang memiliki sumbangsi besar terhadap peningkatan investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.93
Pertumbuhan Investasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024

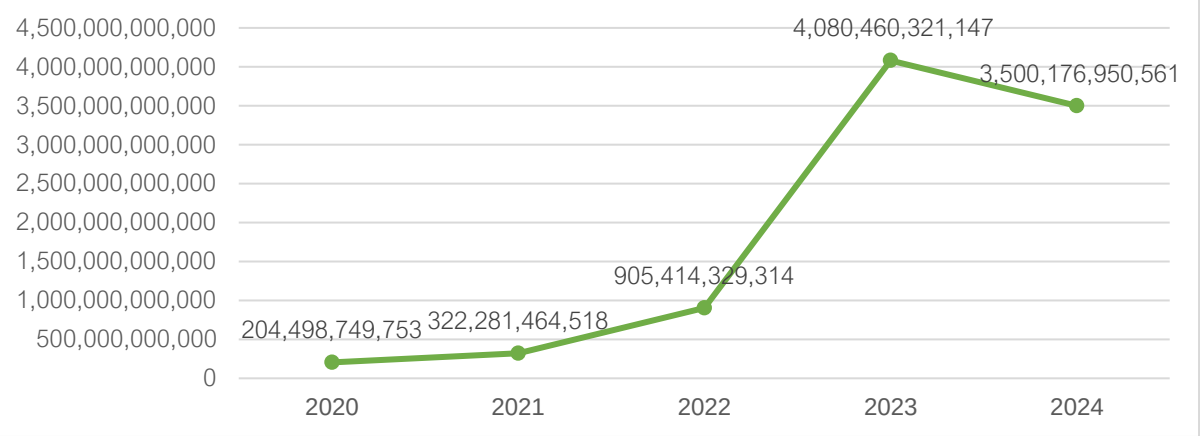

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LPKD satu tahun sebelum tahun berjalan. Di tahun 2020-2024 IPKD Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukan tren peningkatan yakni 26,94 persen di tahun 2020 dan naik menjadi 78,60 persen pada tahun di tahun 2024.

Grafik 2.94
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024

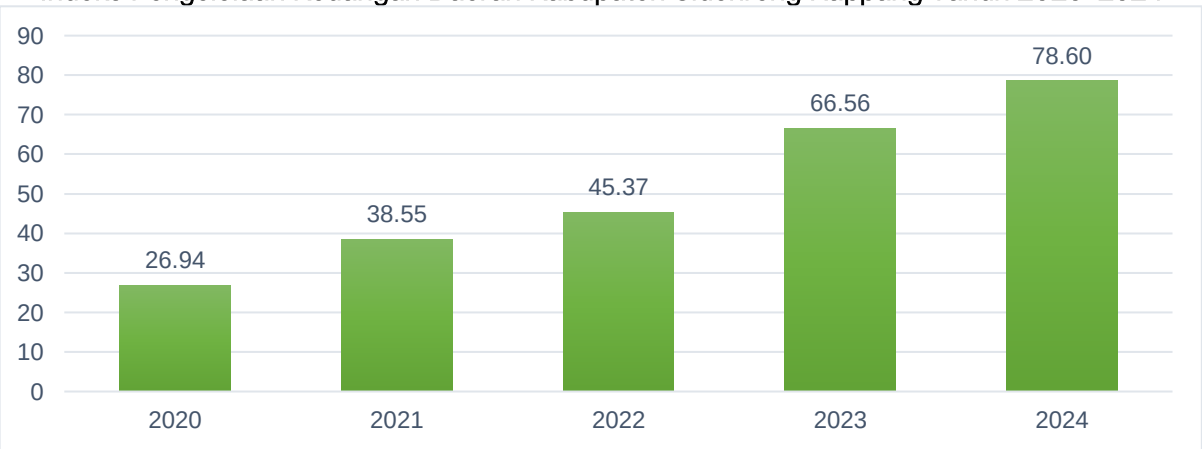

Sumber: Kemendagri, diolah Tahun 2025

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi Dan Tata Kelola Yang Berintegrasi Dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi hukum merupakan perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Data indeks reformasi hukum Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari 55,43 di tahun 2023 menjadi 77,06 di tahun 2024. Peningkatan yang signifikan terjadi di variabel Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu.

Tabel 2.52
Indeks Reformasi Hukum dan variabel pengukuran 2023-2024

No	Variabel pengukuran	2023		2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	12,7	25	25
2	Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang undangan (legal drafter) pusat yang berkualita	25	16	25	23,1
3	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu	35	4,7	30	20,3
4	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	15	3,75	20	0
	Nilai Awal	100	37,15	100	68,4
	Nilai Apresiasi		18,28		9,28
	indeks reformasi hukum		**55,43**		**77,68**

Sumber: Data diolah, 2025

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business prosess*) dan sumber daya manusia aparatur. Paradigma birokrasi yang dulunya berbasis aturan, saat ini harus mengarah pada masa depan, yaitu berbasis kinerja, berdampak, kolaboratif, dan melayani masyarakat. Secara umum, capaian IRB Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 capaian IRB meningkat 19,77 poin dari tahun sebelumnya menjadi 68,51. Peningkatan ini mengindikasikan upaya perangkat daerah melakukan optimalisasi dalam melaksanakan rencana aksi dan tindak lanjut, terutama dalam beberapa indikator seperti

Survei Penilaian Integritas (SPI), kualitas pelayanan publik, kualitas pengelolaan arsip, profesionalitas ASN, dan kepatuhan terhadap standar pelayan publik.

Grafik 2.95
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

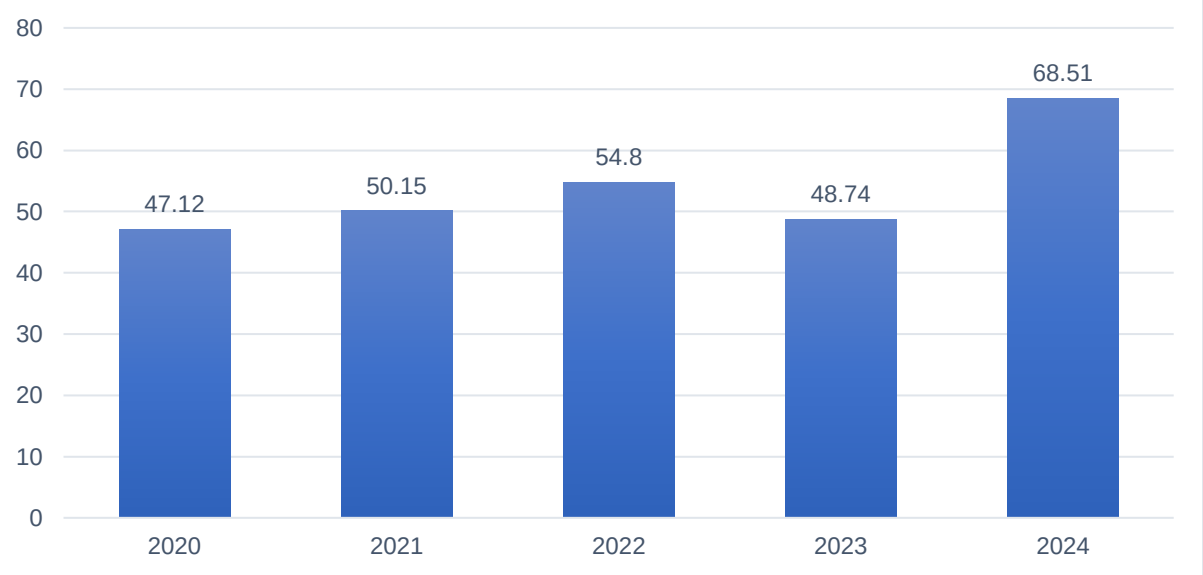

Sumber: Kemenpan-RB, diolah Tahun 2025

3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tabel 2.53
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2024

No.	Komponen	2023	2024
1.	Domain Kebijakan SPBE	5,00	5,00
	a. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	5,00	5,00
2.	Domain Tata Kelola	1,50	2,00
	a. Perencanaan Strategis SPBE b. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) c. Penyelenggaraan SPBE	1,00 1,75 2,00	2,25 2,00 1,50
3.	Domain Manajemen SPBE	1,00	1,27
	a. Penerapan Manajemen SPBE	1,00	1,38
	b. Audit TIK	1,00	1,00
4.	Domain Layanan SPBE	3,69	3,68
	a. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik b. Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,70 3,67	3,80 3,50
Nilai SPBE		2,87 (Baik)	3,04 (Baik)

Sumber: Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kemenpan RB, diolah Tahun 2025

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, nilai SPBE Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 tercatat senilai 3,04 dengan predikat SPBE baik. Capaian SPBE tahun 2024 lebih baik dari capaian SPBE tahun sebelumnya. Adapun yang masih menjadi perhatian utama adalah pada domain tata kelola penyelenggaraan SPBE, khususnya kolaborasi/kerja sama beberapa *stakeholder* diluar pemerintah daerah, begitupun untuk indikator layanan publik berbasis elektronik, terjadi penurunan kualitas aplikasi layanan internal yang digunakan oleh Pemda.

4. Indeks Pelayanan Publik

Selain tantangan inefisiensi regulasi dan birokrasi, Kabupaten Sidenreng Rappang juga masih diperhadapkan dengan masih rendahnya kualitas pelayanan publik. Ini tercermin dari Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2024 yang termasuk kategori D atau kurang baik, dan capaian ini lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan (A-, sangat baik) serta kabupaten lainnya. Kategori ini menunjukkan bahwa aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultansi dan pengaduan serta aspek inovasi masih perlu perbaikan berarti.

5. Indeks Survei Penilaian Integritas

Indeks survei penilaian integritas adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah. Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan nilai indeks survey penilaian integritas pada tahun 2024 sebesar 67,21, mengalami penurunan tajam dari tahun sebelumnya yang berada di angka 73,12.

Penurunan ini disebabkan karena Karena penilain dari hasil Survei yang didapatkan dari Kelompok Masyarakat yang mendapatakan pelayanan publik serta hasil survei dari kelompok ASN sendiri yang menilai, dengan hasil penilaian antara lain; Kalangan eksternal (masyarakat penerima layanan publik) meyakini bahwa risiko berupa pemberian gratifikasi/suap/pemerasan masih tinggi di instansi ini, setidaknya dalam satu aspek penilaian integritas pegawai; Kalangan ASN menilai Risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran berada pada tingkat sangat tinggi setidaknya untuk satu aspek. Risiko ini dapat terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/ perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.

Risiko korupsi dalam pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih berada pada level tinggi di instansi ini. Setidaknya terdapat satu aspek pengelolaan SDM yang memiliki risiko tinggi. Risiko ini dapat disebabkan konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.

Grafik 2.96
Indeks Survey Penilaian Integritas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2024

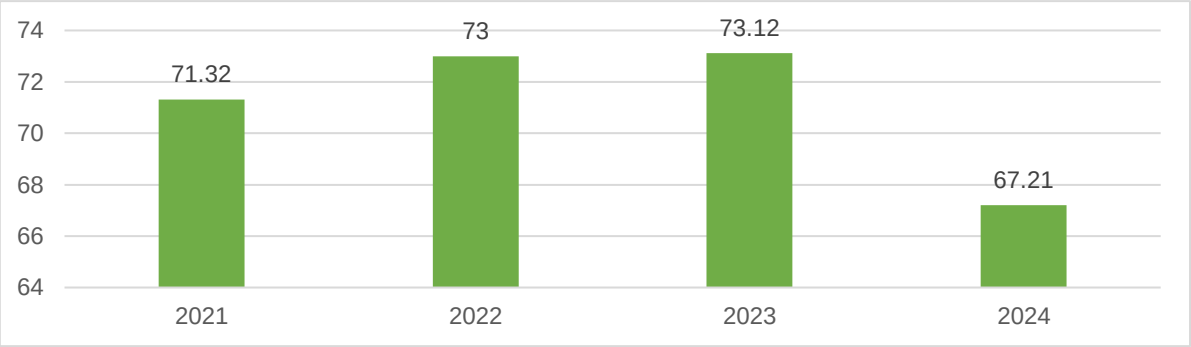

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

6. Indeks Persepsi Anti Korupsi (MCP KPK)

Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan/aset negara.

Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, beserta Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Nilai MCP KPK Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai MCP KPK mencapai mencapai 81,00 lalu turun menjadi 75,00 pada tahun 2021, kemudian naik kembali menjadi 91,00 di tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 77,00, sebelum akhirnya meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi 85,00.

Grafik 2.97
Nilai MCP KPK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

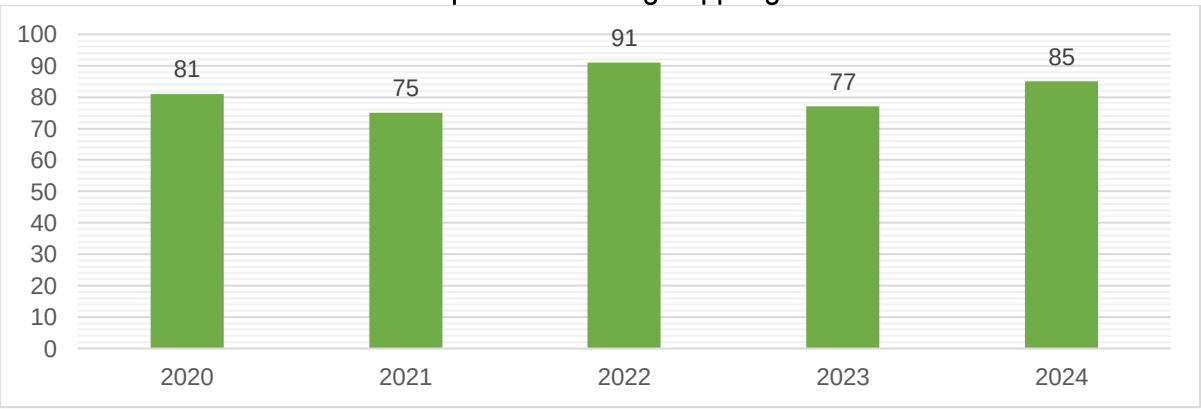

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025

7. Indeks Maturitas SPIP

Indeks maturitas Kabupaten Sidenreng Rappang menujukkan stabilitas yang cukup baik dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 sampai tahun 2024, berada di angka 3. Hal ini menunjukkan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berkomitmen dalam menerapkan Nilai

Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku (NKK) guna mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional, dan berkinerja tinggi. Harapannya akan semakin meningkatkan kualitas layanan publik, yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Grafik 2.98
Indeks Maturitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

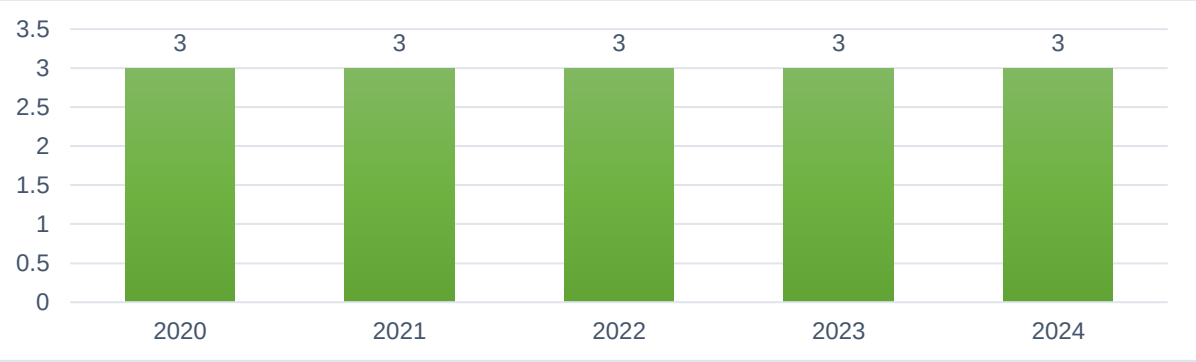

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025

8. Nilai SAKIP

SAKIP adalah sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengukur, memantau, dan melaporkan kinerja organisasi secara akuntabel dan transparan, berdasarkan perencanaan strategis dan anggaran yang telah ditetapkan. Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri masih belum optimal. Nilai SAKIP Kabupaten Sidenreng Rappang selama dua tahun terakhir termasuk kategori "B", Artinya akuntabilitas kinerja sudah baik pada 1/3 Unit kerja, khususnya pada Unit kerja utama. Namun, masih perlu adanya perbaikan pada Unit kerja lainnya, dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 2.54
Nilai SAKIP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2024

Kabupaten/Kota/Provinsi	Sakip	
	2023	2024
Sidenreng Rappang	64,25 (B)	65,08 (B)

Sumber: Kementerian PANRB, diolah Tahun 2025

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh, Dan Demokrasi Substansial

1. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan Perda dan Perkada yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan penguatan yang berarti selama lima tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan oleh persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan meningkat dari 70 persen pada tahun 2020 menjadi 89 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menjadi penguatan bagi

stabilitas ekonomi termasuk perbaikan daya saing iklim investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.99
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

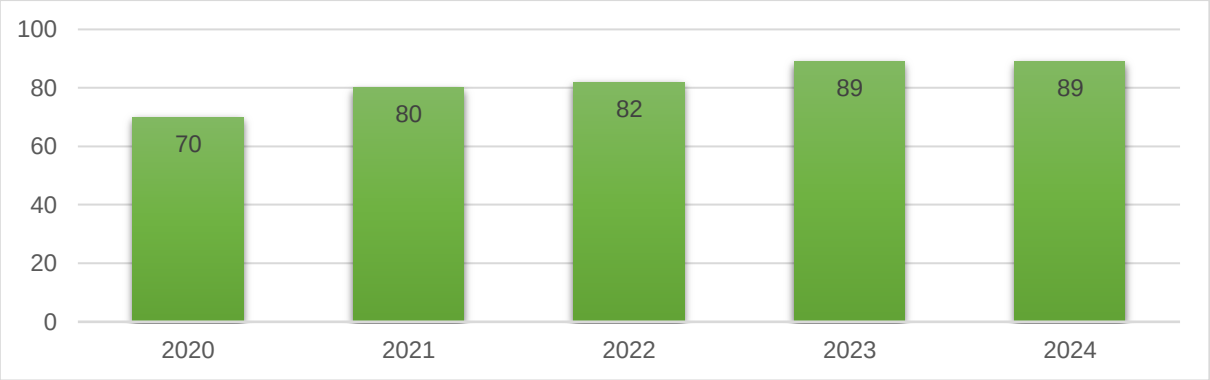

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

2. Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani

Keamanan menjadi faktor penentu investor saat memilih tempat untuk melakukan penanaman modal. Selama tidak ada gejolak dari kondisi keamanan yang berdampak signifikan terhadap persoalan suatu daerah, maka selama itu pula investasi akan stabil. Apalagi jika terdapat program pembangunan yang jelas dan efisien, maka investor akan tertarik. Selama keamanan dapat terkendali dan terjaga baik maka investasi dan perekonomian suatu daerah tak akan terpengaruh. Untuk itu, harapannya keamanan selalu terjaga dan tak terjadi kerusuhan sosial karena dapat berdampak luas bagi ekonomi. Pada tahun 2024, tindak pidana yang dapat diselesaikan di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 673 kasus, meningkat berarti dibanding empat tahun sebelumnya. Meskipun demikian, perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah karena jumlah tindak pidana yang dilaporkan di tahun 2023 mencapai 751 kasus, mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya.

Grafik 2.100
Persentase Tindak Pidana yang Diselesaikan dan Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2023

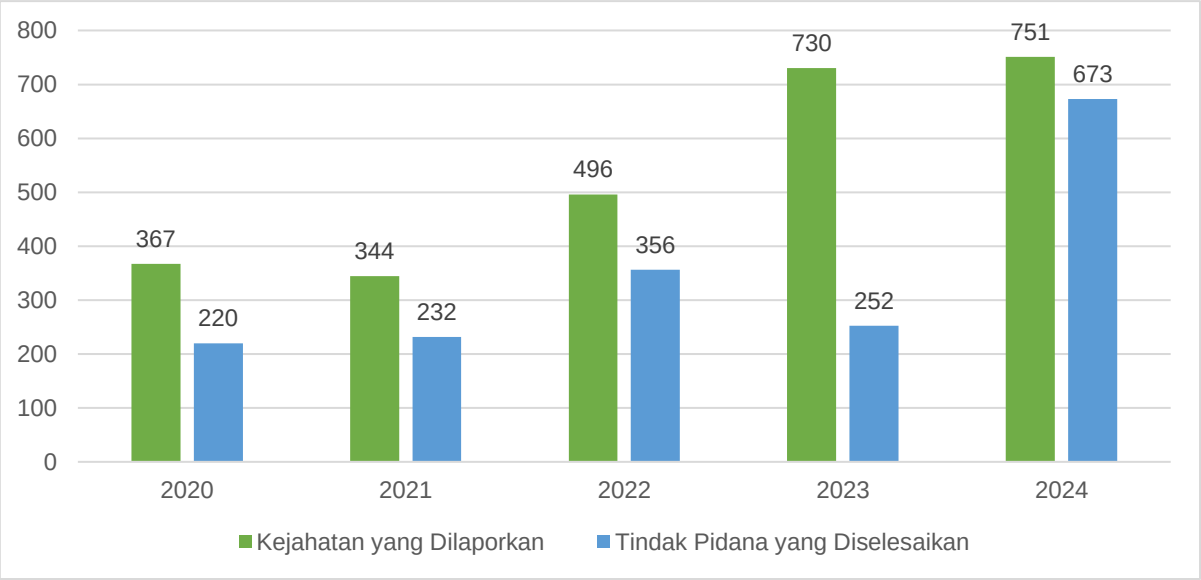

Sumber: Polres Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu serta segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan baik secara ekonomis maupun psikologis yang melanggar hukum, norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 terdapat 367 kasus, terus mengalami penurunan menjadi 344 kasus di tahun 2021. Namun mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan 2023 yaitu 496 kasus dan 730 kasus hingga akhirnya Kembali meningkat di tahun 2024 yaitu 751 kasus. Angka kriminalitas di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2024 didominasi oleh 3 kasus yaitu penganiayaan, narkoba hingga penggelapan. masih banyaknya kasus kriminalitas menunjukkan adanya masalah serius dalam hal keamanan dan penegakan hukum di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.101
Angka Kriminalitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

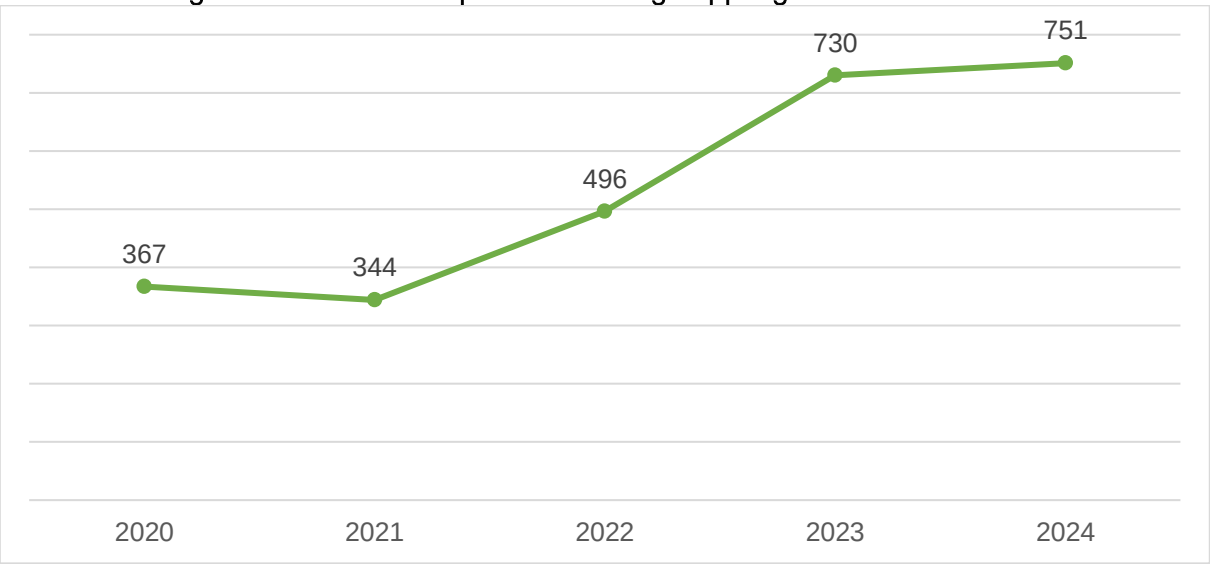

Sumber: POLRES Sidenreng Rappang; 2025

3. Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD

Grafik 2.102
Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

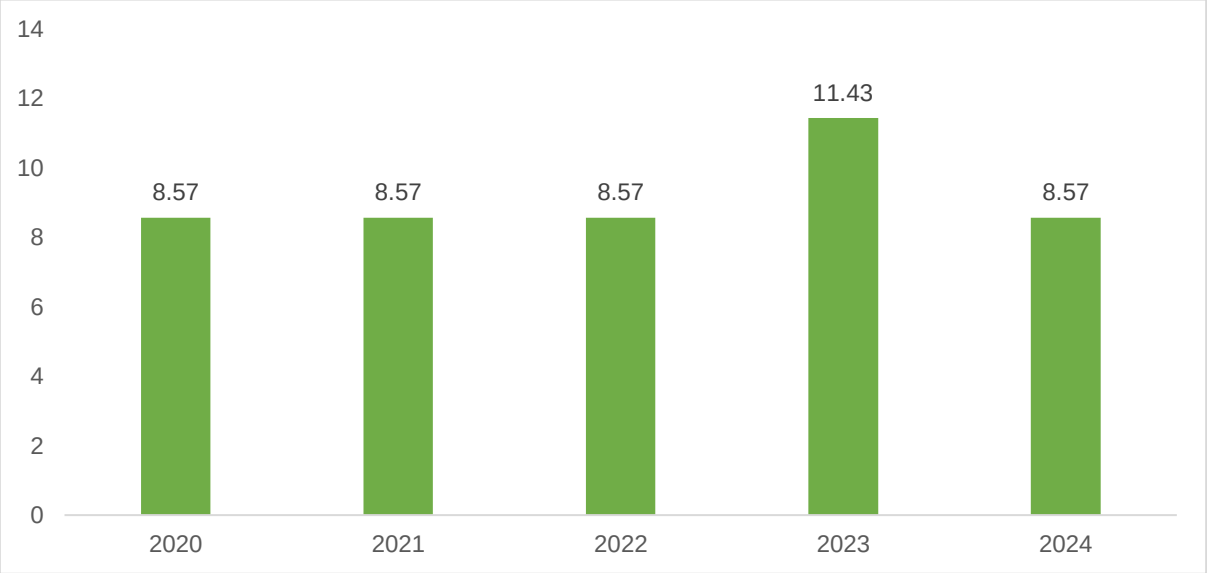

Sumber: BPS, diolah Tahun 2025

Di Indonesia, sejak Pemilu 1955, keterwakilan perempuan Indonesia di DPR belum mencapai kuota 30 persen. Pemilu pertama tahun 1955 menghasilkan 16 perempuan yang duduk di parlemen. Jumlah ini hanya setara 5,9 persen dari total 272 anggota parlemen. Sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2019, proporsi keterwakilan perempuan berada dalam rentang 8,8-20,5 persen. Jumlah terbanyak keterwakilan perempuan terdapat dari hasil Pemilu 2019. Terdapat 120 perempuan yang berhasil duduk di kursi DPR periode 2019-2024 atau setara dengan 20,5 persen dari total anggota DPR. Sama halnya dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, per tahun 2024, keterwakilan perempuan di DPRD hanya sekitar 8,57 persen dari 35 anggota periode 2024-2029. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang di parlemen masih cenderung minim. Padahal pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen adalah untuk mendorong terjaganya suara kepentingan kaum perempuan di parlemen sehingga gagasan terkait perundang-undangan yang pro perempuan lebih kuat gaungnya di ruang publik. Bagaimanapun, partisipasi politik menjadi cerminan adanya keadilan dalam demokrasi yang sedang berjalan.

4. Perda yang Merupakan Inisatif DPRD

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak lima Perda inisiatif DPRD yang berhasil disahkan. Turun di tahun 2022 hanya dua Perda. Lalu pada tahun 2024 naik menjadi tiga. Rendahnya Perda inisiatif dari DPRD menunjukkan lemahnya kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Padahal Perda yang dibentuk dari inisiatif DPRD mempunyai beberapa kelebihan terutama dilihat dari faktor kedekatan jarak hubungan dengan konstituen, anggota DPRD lebih memiliki kelebihan dalam hal menampung dan menyerap aspirasi konstituen untuk diakomodasi dalam alternatif kebijakan daerah.

Grafik 2.103
Perda Yang Merupakan Inisiatif DPRD di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

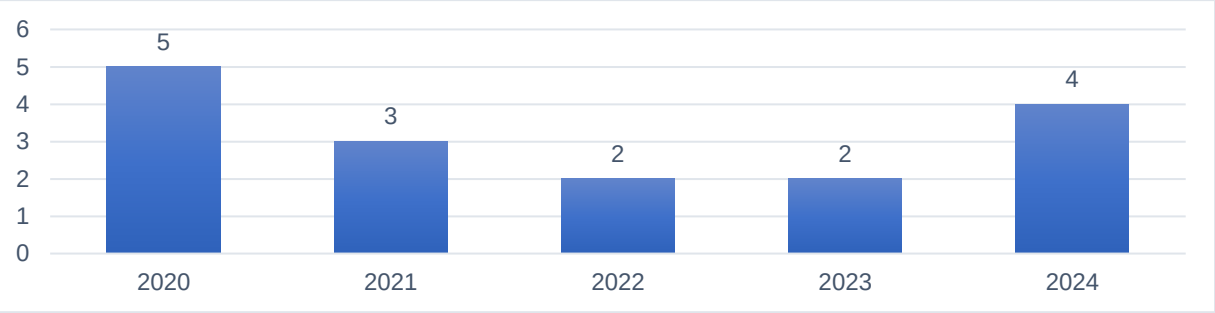

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025

5. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Pilihan sistem pemilu memang memberikan peluang secara institusional bagi keterwakilan perempuan. Namun, ini bukan penentu tunggal karena parpollah yang jadi gerbang utama terwujudnya keterwakilan perempuan di politik. Sama halnya dengan keterwakilan di DPRD, persentase perempuan pengurus partai politik mencapai 8,57 persen tahun 2024, angka ini menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 11,43 persen. Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia memang sudah menunjukkan peningkatan yang lebih baik dari beberapa tahun sebelumnya. Meskipun demikian, masih perlu mendapatkan perhatian serius karena kehadiran perempuan dalam politik masih *underrepresented*. Padahal, setidaknya perempuan perlu hadir dalam politik karena dapat menjadi simbol bahwa eksistensi perempuan diakui dalam suatu negara. Kehadiran perempuan dalam politik mencerminkan keadilan di suatu negara. Selain itu juga, perempuan perlu hadir dalam politik agar ada *sense of belonging* (rasa memiliki) atau terlibat dari warga negara perempuan itu sendiri terhadap politik. Artinya, perempuan yang hadir dalam jabatan politik dapat menjadi *role model* bagi perempuan lain bahwa keberadaannya itu penting dan diakui dalam politik.

Grafik 2.104
Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

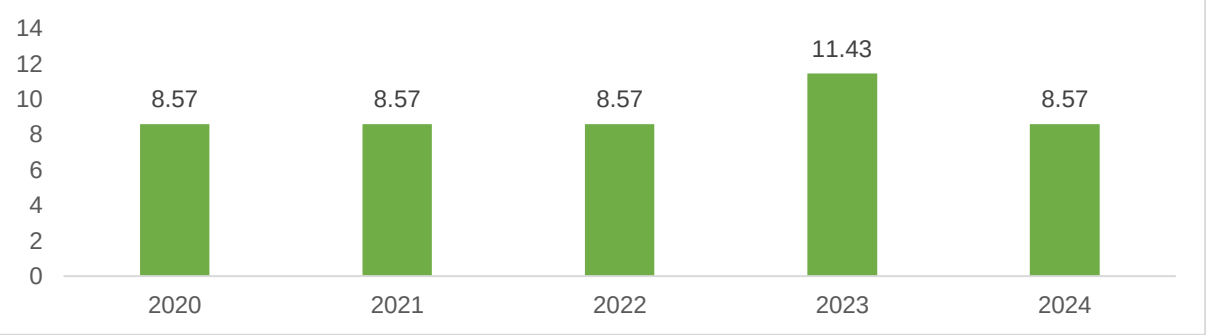

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Jumlah Kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara

Hubungan kerjasama yang terjalin antara Kabupaten Sidenreng Rappang dengan daerah lain dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi maupun pembangunan di bidang-bidang lainnya. Oleh karenanya, hubungan kerjasama harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, konstruksi biaya masing-masing pihak, maupun mengenai lamanya waktu yang diperlukan untuk program kegiatan yang dikerjasamakan. Pada tahun 2024, jumlah kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara lainnya tercatat sebanyak 8 (delapan) kerja sama.

2. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabuapten/kota untuk mendapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen daya saing ini dielaborasi menjadi 12 pilar daya saing, yaitu 1). institusi, 2). infrastruktur, 3). adopsi teknologi informasi, 4). stabilitas ekonomi makro, 5). kesehatan, 6). keterampilan, 7). pasar produk, 8). pasar tenaga kerja, 9). sistem keuangan, 10). ukuran pasar, 11). dinamisme bisnis, dan 12). kapabilitas inovasi. Pada tahun 2024, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 3,29 lebih tinggi daripada capaian sebelumnya 3,08 di tahun 2023. Namun capaian ini masih lebih rendah dibanding skor nasional sebesar 3,43 dan skor Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,61 seerta skor rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,45. Penurunan terjadi di beberapa pilar diantaranya pilar 1 yaitu pilar institusi, pilar 2 infrastruktur, pilar 3 adopsi TIK, pilar 7 pasar persaingan domestik, pilar 8 pasar tenaga kerja, pilar 9 sistem keuangan, pilar 10 ukuran pasar, dan pilar 11 dinamisme bisnis. Untuk pilar institusi terjadi penurunan di indikator pelaksanaan reformasi birokrasi dan juga masih terjadinya kejahatan atas kepemilikan. Untuk pilar Infrasturktur belum adanya beberapa layanan infrastruktur transportasi non-darat. Untuk pilar adopsi TIK masih rendahnya pengguna internet di beberapa lokasi di sebabkan karena *blind spot.* Untuk pilar pasar persaingan domestik masih rendahnya persaingan di sektor jasa. Untuk pilar pasar tenaga kerja, minimnya kebijakan terkait pasar tenaga kerja. Untuk pilar system keuangan, masih rendahnya KUR (kredit usaha rakyat). Untuk pilar ukuran pasar, masih rendahnya nilai PDRB. Dan untuk pilar dinamisme bisnis, melambatnya pendaftaran nomor induk berusaha.

Tabel 2.55
Nilai Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wilayah Lainnya Tahun 2024

Wilayah	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Sidenreng Rappang	4,14	3,28	4,21	3,72	3,82	4,18	2,62	2,85	1,51	4,09	2,87	2,18	**3,29**
Provinsi Sulawesi Selatan	4,07	3,52	3,56	4,33	3,86	4,13	2,41	2,66	2,80	4,71	3,56	3,68	**3,61**
Rata-rata Kabupaten Kota	4,32	3,32	4,32	3,65	3,77	4,03	3,15	2,95	1,98	4,11	3,63	2,14	**3,45**
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	**3,43**

Sumber: BRIN, Tahun 2025

Sementara itu capaian IDSD berdasarkan 24 kabupaten/kota Sulawesi Selatan, capaian IDSD Siderreng Rappang berada di peringkat 5 terendah. Peningkatan IDSD yang signifikan dari kabupaten kota lainnya menjadi salah satu faktor peringkat Sidenreng Rappang menurun, yang sebelumnya peringkat 9 terendah di tahun 2023 menjadi peringkat 5 terendah di tahun 2024.

Grafik 2.105
Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

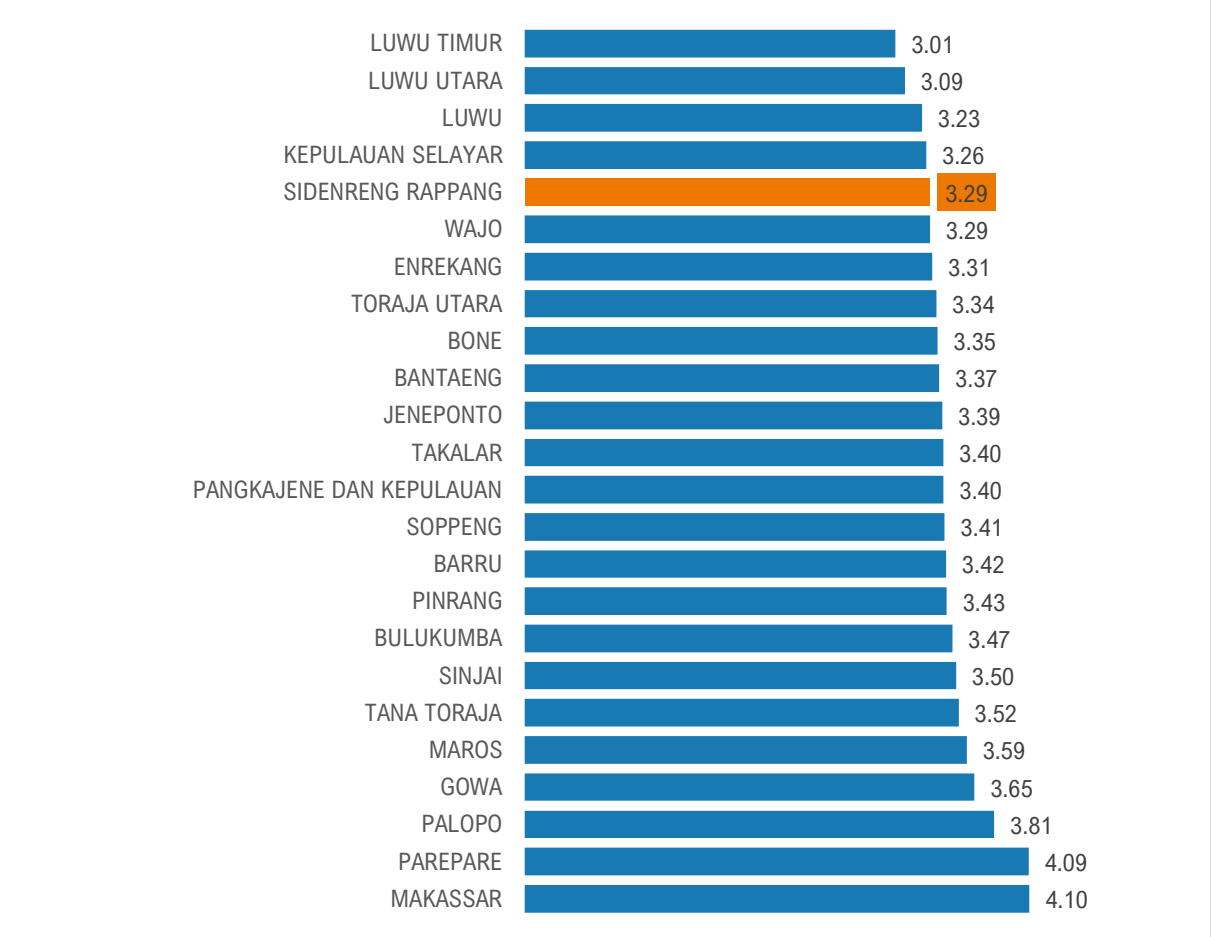

2.1.5. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.5.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

a. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5 – 6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak.

Grafik 2.106
Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

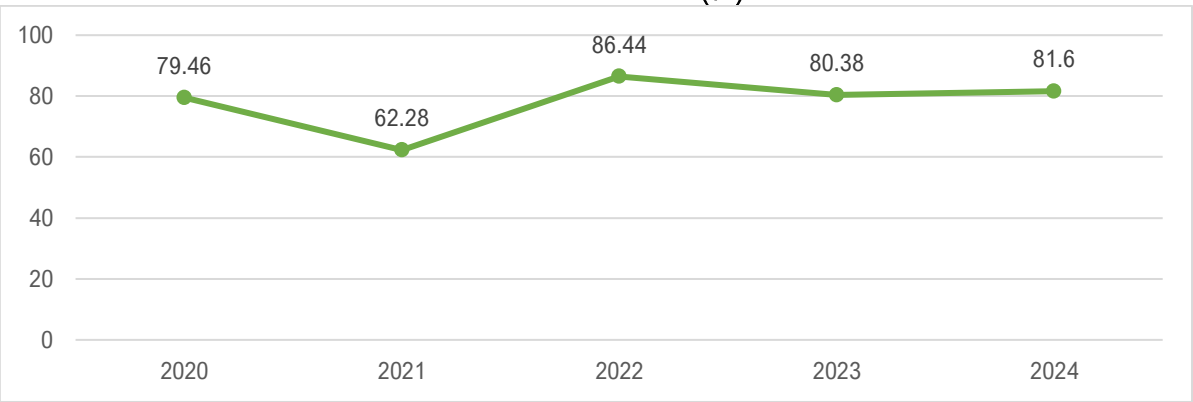

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Tingkat partisipasi anak usia 5 – 6 tahun pada PAUD di Kabupaten Sidenreng Rappang terus menunjukkan fluktuatif sepanjang lima tahun terakhir. Tahun 2020, tingkat partisipasi tercatat sebesar 79,46 persen, menurun signifikan menjadi 62,28 persen pada tahu 2021 dan terus meningkat hingga mencapai 86,44 persen pada tahun 2022. Tren ini mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 80,38 persen, yang mengalami sedikit di tahun 2024 dengan capaian 81,6 persen. Kenaikan ini menggambarkan adanya kemajuan dalam penyediaan layanan PAUD dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dini bagi perkembangan anak-anak usia tersebut. Meskipun terjadi kenaikan, angka partisipasi PAUD yang masih berada pada angka 81,6% menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai cakupan yang lebih luas. Beberapa permasalahan yang menghambat antara lain adalah keterbatasan akses di daerah terpencil, kurangnya

fasilitas PAUD yang memadai, dan kendala sosial-ekonomi yang mempengaruhi kemampuan orang tua dalam mengakses pendidikan bagi anak-anak mereka. Selain itu, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas juga menjadi kendala dalam memperluas partisipasi di sektor PAUD.

b. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7 – 12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar

Tingkat Partisipasi Sekolah Dasar (SD) adalah salah satu indikator penting yang mencerminkan sejauh mana anak-anak usia sekolah dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mengakses pendidikan dasar secara merata. Indikator ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkualitas.

Grafik 2.107
Angka Partisipasi Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2020-2024 (%)

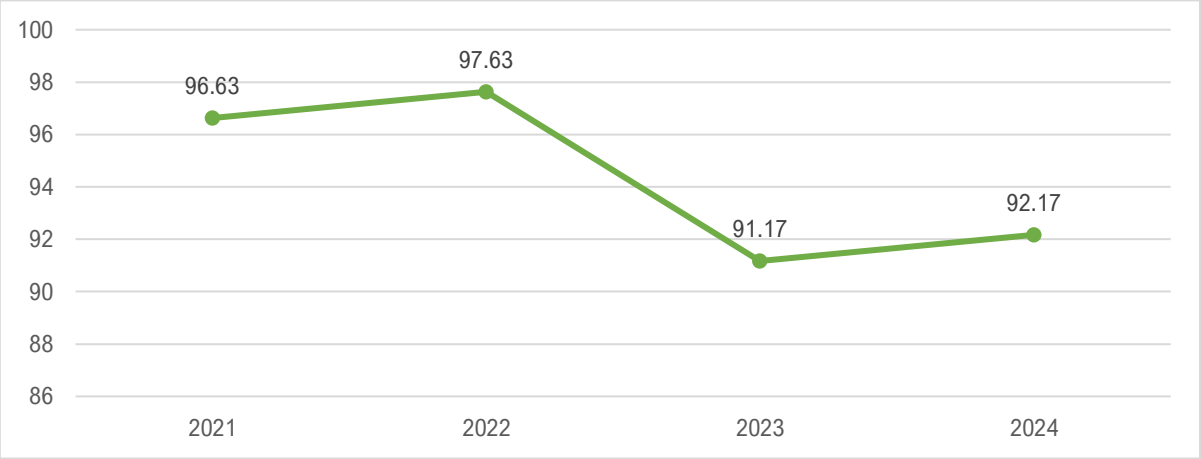

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Tingkat partisipasi SD tahun 2021 tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 96,63 persen. Angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 97,63 persen. Tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 91,17 persen, dan kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 92,17 persen.

c. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 13 – 15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Tingkat partisipasi SMP mencerminkan sejauh mana anak usia sekolah menengah pertama (13–15 tahun) di Kabupaten Sidenreng Rappang terlibat dalam sistem pendidikan formal pada jenjang ini. Dalam lima tahun terakhir, tingkat partisipasi SMP menunjukkan fluktuasi yang menggambarkan tantangan sekaligus pencapaian dalam mendorong anak-anak untuk melanjutkan pendidikan menengah pertama.

Grafik 2.108
Angka Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

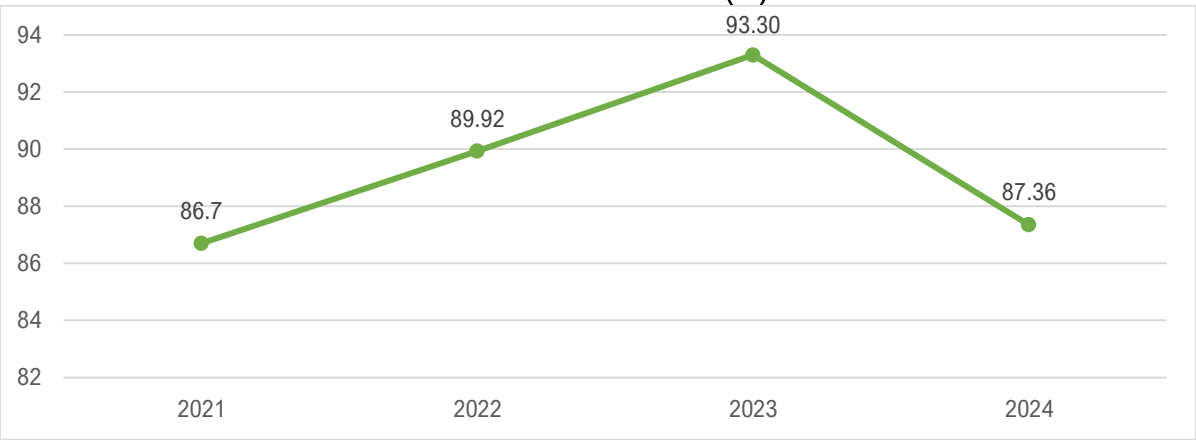

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Pada tahun 2021, tingkat partisipasi SMP tercatat sebesar 86,7 persen. Angka ini kemudian meningkat secara konsisten pada tahun 2022, mencapai 89,92 persen, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan capaian 93,30 persen. Namun pada tahun 2024, tingkat partisipasi SMP mengalami penurunan menjadi 87,36 persen. Penurunan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak anak usia SMP yang tidak terdaftar di jenjang pendidikan sesuai usianya. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi antara lain: kondisi sosial ekonomi keluarga, keterbatasan akses di wilayah terpencil, serta motivasi belajar yang menurun pasca pandemi. Kondisi ini menuntut upaya akselerasi dalam pemerataan akses dan retensi peserta didik.

2. Urusan Kesehatan

a. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk

Ketersediaan dan distribusi tempat tidur rumah sakit yang tidak merata, menjadi persoalan tersendiri dalam implementasi sistem jaminan kesehatan nasional. Hal ini mengakibatkan terjadi penumpukan pasien di sejumlah rumah sakit pemerintah di daerah. Menurut organisasi kesehatan dunia, rasio ideal daya tampung RS adalah 1.000 penduduk : 1 tempat tidur.

Grafik 2.109
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

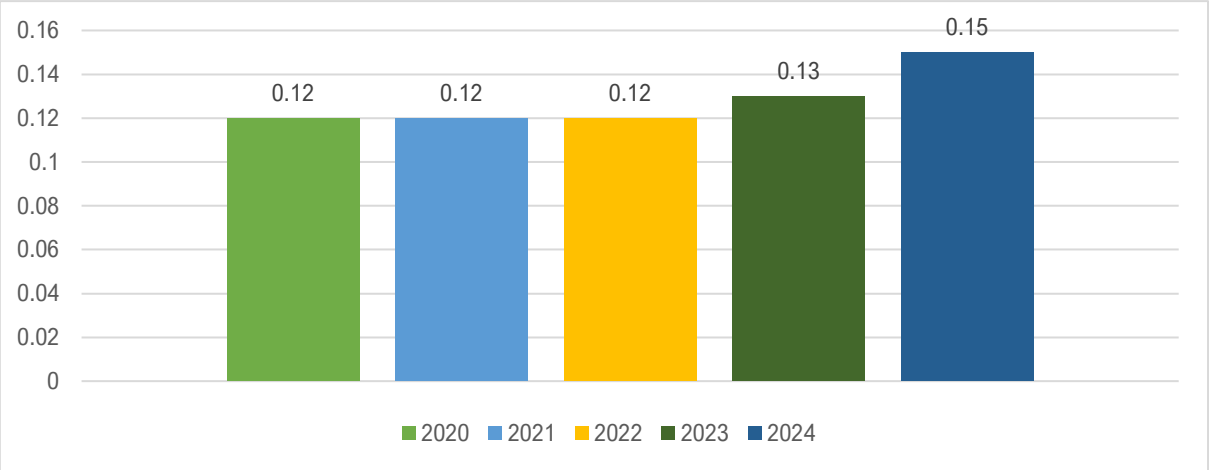

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk menunjukkan tren peningkatan, meskipun masih jauh dari standar ideal yang di tetapkan oleh WHO, tercatat sebesar 0,12 pada tahun 2020 hingga 2022, naik menjadi 0,13 pada tahun 2023, dan mencapai 0,15 pada tahun 2024.

b. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi

Rumah sakit rujukan adalah rumah sakit yang mengampu rujukan pasien dari rumah sakit lain. Akreditasi adalah pengkuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, seluruh rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota berhasil mencapai akreditasi 100 persen selama lima tahun terakhir.

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan merupakan keharusan jika pemerintah daerah ingin mendorong aktivitas ekonomi. Berbagai peneltian terkait infrastruktur dan pertumbuhan menunjukkan relasi positif antara keduanya, dimana infrastruktur menjadi variabel penentu cepat-lambatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini relevan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang mengingat laju pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir terus melambat.

Data Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mencatat tahun 2020 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 51,1 persen, sementara 48,9 persen kondisinya rusak ringan dan rusak berat. Meningkat secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 56,1 persen pada 2021, 59 persen pada tahun 2022, dan mencapai 61 persen pada tahun 2023, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2024, sedikit menurun menjadi 60,81 persen. Hal ini disebabkan karena upaya dari

pemerintah daerah melalui dinas teknis melaksanakan kegiatan peningkatan jalan yang bersumber dari APBD maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Grafik 2.110
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

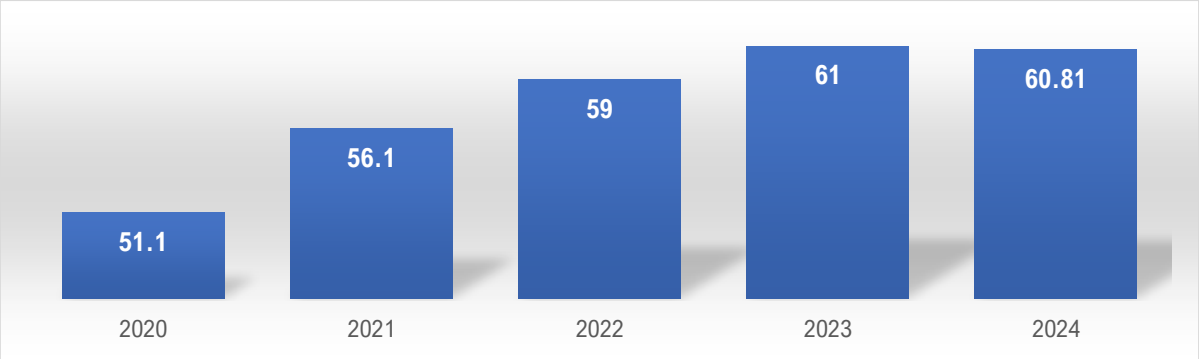

Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

b. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Pertumbuhan ekonomi memerlukan ketersediaan infrastruktur untuk memastikan mobilitas manusia serta barang dan jasa bisa berlangsung dengan lancar. Keberadaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi pada kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan pemerataan ekonomi di wilayah-wilayah. Untuk daerah dominan daratan, kualitas infrastruktur jalan adalah yang utama untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Dukungan infrastruktur terhadap kegiatan masyarakat dapat dilihat dari indikator panjang jalan terhadap jumlah penduduk. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani atau menunjukkan tingkat kepadatan jalan. Angka yang terlalu tinggi menunjukkan beban jalan dalam melayani masyarakat semakin berat atau padat begitupun sebaliknya.

Dalam lima tahun terakhir rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk mencapai 0,4 persen. Namun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 0,39 persen. Angka ini mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 0,29 persen. Penyebab dari menurunnya rasio tersebut dikarenakan jumlah panjang jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun 5 tahun terakhir stagnan dan tidak ada penambahan panjang jalan yaitu sepanjang

1.290,04 Km sedangkan jumlah penduduk berdasarkan data BPS 5 tahun terakhir selalu bertambah. Pemerintah daerah bisa menjadikan data ini sebagai dasar untuk mengambil kebijakan membangun infrasturktur jalan. Jika rasionya rendah (dibawah 1), sebaiknya tidak lagi melakukan pembangunan infrastruktur jalan. Tapi bila penduduk bertumbuh cepat, maka keputusan membangun adalah yang terbaik.

Grafik 2.111
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2020-2024

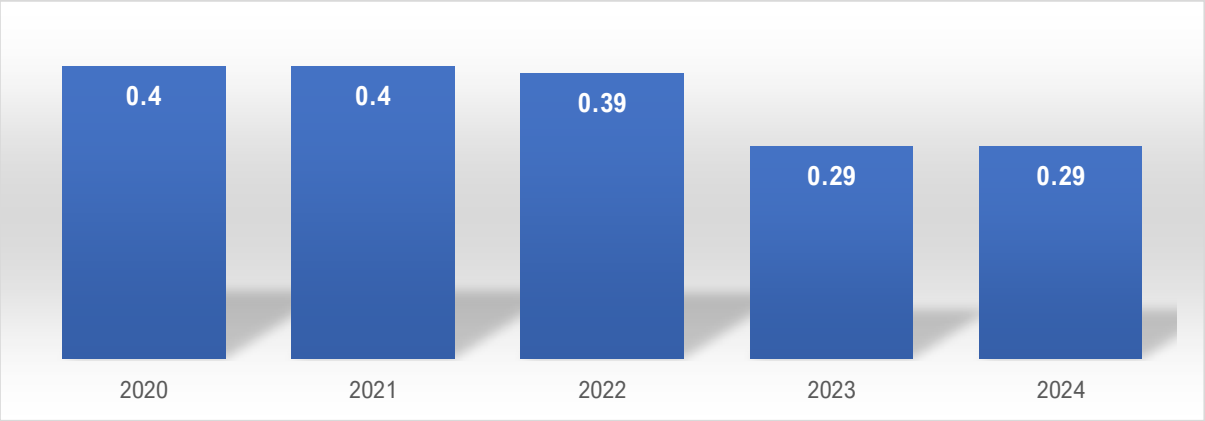

Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

c. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Laporan Bank Dunia berjudul *Infrastructure Sector Assessment* Program (InfraSAP) menyebut infrastruktur Indonesia berkualitas rendah dan tidak terencana dengan matang. Menurut Bank Dunia, buruknya kualitas infrastruktur karena dibangun tanpa pra-studi kelayakan dan analisis bertahap sebelum pelaksanaannya. Studi pendahuluan yang dimaksud terkait sisi hukum, teknis, ekonomi, komersial, lingkungan, dan aspek sosialnya. Jika dilevel nasional kualitas infrastruktur masih dikategorikan buruk, kondisi daerah sangat mungkin jauh lebih buruk. Buruknya kualitas infrastruktur merupakan hal krusial karena berhubungan dengan pertumbuhan daerah.

Karena wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dominan daratan, maka infrastruktur jalan yang paling penting. Kualitas jalan sangat menentukan perekonomian daerah secara umum dan mobilitas penduduk pada khususnya. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas infrastruktur jalan indikator yang dapat digunakan adalah persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam). Berdasarkan rilis data Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat, kualitas infrastruktur Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat 53,42 persen jalan dengan kondisi baik. Persentase ini terus meningkat dan mencapai 60,81 persen pada tahun 2024.

Kualitas infrastruktur jalan Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh faktor terbatasnya anggaran yang selalu menjadi penyebab utama buruk infrastruktur di banyak daerah. Pemerintah daerah membutuhkan anggaran besar pemeliharaan jalan yang hampir sama besar dengan biaya pembangunannya. Itu sebabnya, pemerintah daerah masih belum bisa memperbaiki kondisi jalan rusak yang angkanya 39,19 persen di tahun 2024.

Grafik 2.112
Persentase Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)
Tahun 2020-2024

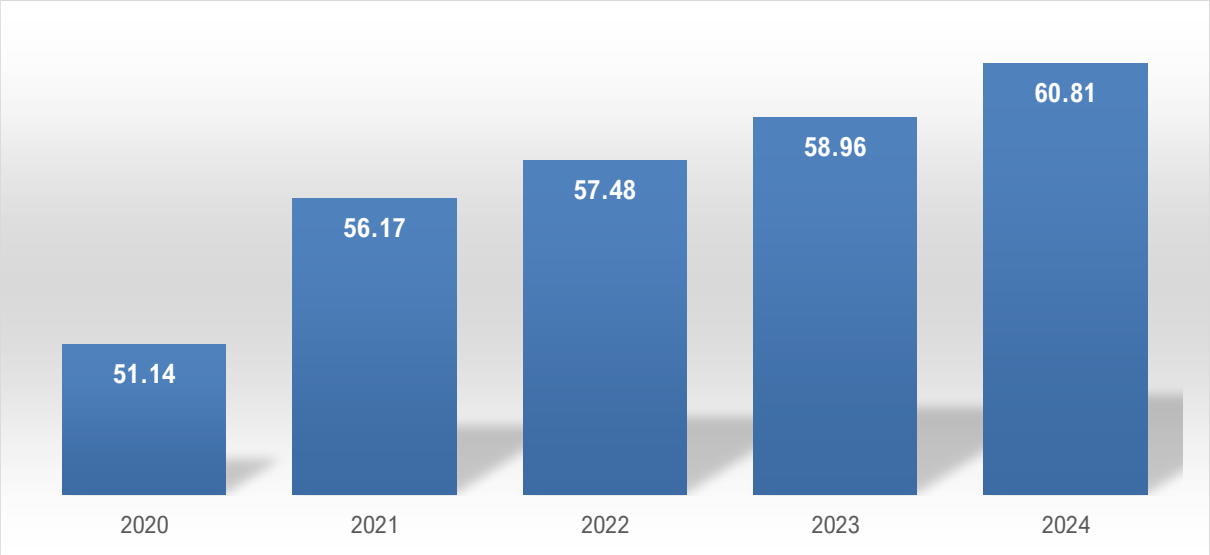

Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2025

d. Persentase Kawasan Permukiman yang belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 (Empat)

Kawasan pemukiman yang tidak dapat dilalui roda empat merupakan salah satu karakteristik pemukiman kumuh. Sesuai dengan definisinya, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Padatnya bangunan membuat kawasan ini sulit untuk dilalui kendaraan roda empat. Kondisi ini sangat berbahaya jika terjadi persitiwa kebakaran. Beberapa kejadian kebakaran di pemukiman padat menimbulkan kerugian besar karena sulit untuk dilakukan pemadaman diakibatkan oleh buruknya infrastruktur jalan.

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah yang tidak memiliki kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Data dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2024 persentase kawasan pemukiman yang belum bisa dijangkau kendaraan roda empat telah mencapai 0 persen.

e. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Selain menjamin bahwa setiap lahan pertanian bisa dialiri air, pemerintah daerah juga mesti memperhatikan infrastruktur air minum bagi masyarakatnya. Ketersediaan air minum bagi masyarakat merupakan hak dasar yang mestinya bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam lima tahun terakhir, persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 berada di angka 89,19 persen dan terus meningkat hingga mencapai 93.98 persen pada tahun 2024.

Grafik 2.113
Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

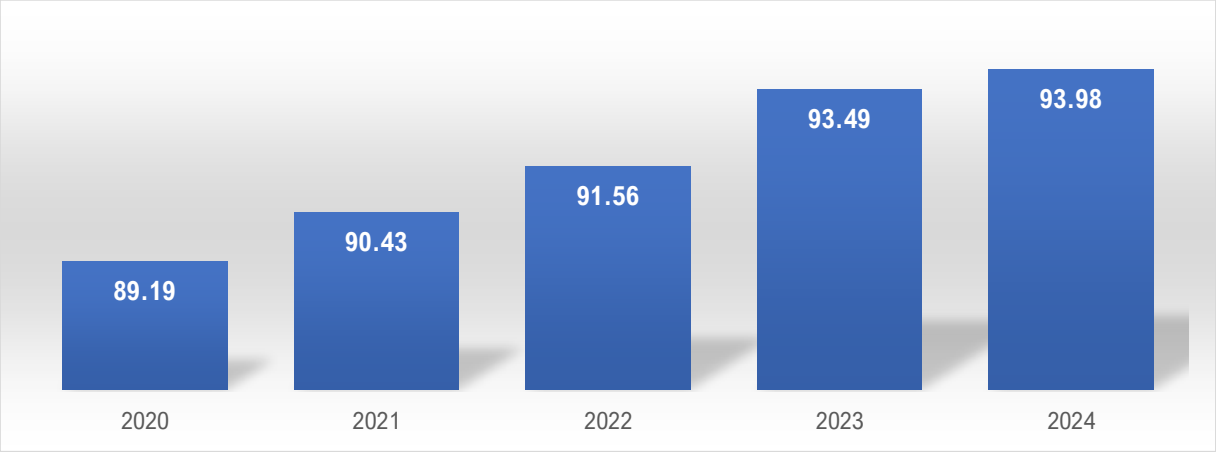

Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

f. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Perkotaan dan Pedesaan

Memperluas akses air minum kepada penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang tidaklah cukup, sebab akses air minum tersebut satu persoalan, sementara sumber air minumnya merupakan permasalahan lain. Sangat mungkin bagi penduduk sebuah daerah 100 persen memiliki akses terhadap air minum, tapi sumbernya dari mata air tidak terlindungi atau artinya tidak bersih dan tidak layak konsumsi.

Di Kabupaten Sidenreng, angka proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan masih sangat rendah. Tahun 2020, proporsi tersebut mencapai 89,19 persen, kemudian stagnan di angka 90,43 persen pada tahun 2021. Angka ini mengalami kenaikan di tahun 2022 dan 2023 dengan masing-masing nilai 90,43 persen dan 91,56 persen, hingga akhirnya pada tahun 2024 meningkat Kembali menjadi 93,49 persen. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 6,51 persen penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang yang memang memiliki akses air minum, tapi diperoleh dari sumber tidak layak minum. Ini merupakan masalah serius pemerintah daerah, mengingat pentingnya air minum bersih dan berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat.

Grafik 2.114
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (%)

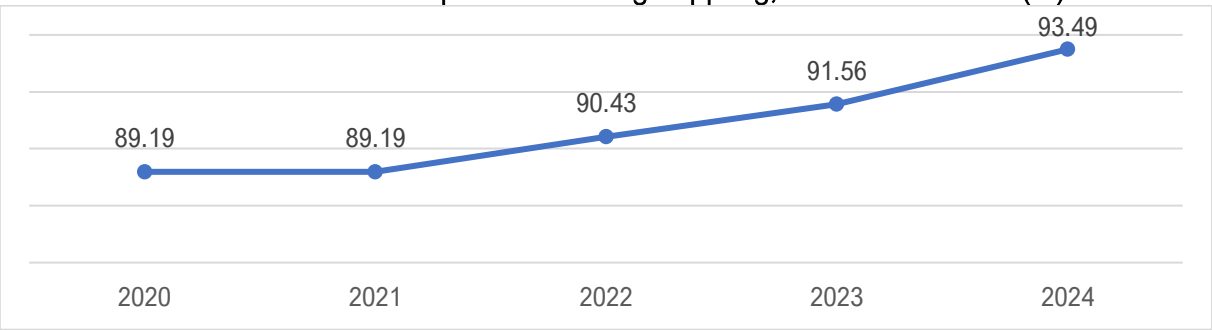

Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

g. Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang salah satunya disebabkan oleh masalah pada produktivitas sektor pertanian. Sebagai sektor dengan kontribusi dominan dalam struktur ekonomi daerah, perubahan nilai tambah sektor pertanian sangat menentukan cepat-lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa tahun terakhir, terlihat jelas sektor pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang menghadapi masalah serius.

Pengairan lahan pertanian adalah satu dari sekian banyak masalah pertanian yang dihadapi oleh petani di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagian lahan pertanian, terutama komoditas padi tidak memiliki jaringan irigasi dan hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber air satu-satunya. Karena hanya mengandalkan air hujan, petani hanya melakukan panen sekali dalam setahun, mengikuti siklus musim penghujan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka produktivitas sektor pertanian akan terus menurun.

Pemerintah daerah sudah berupaya setidaknya untuk menjaga agar jaringan irigasi yang sudah ada dapat berfungsi dengan baik. Tahun 2020 jaringan irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kondisi baik tercatat sebesar 53.84 persen. Selama lima tahun terakhir, angka ini terus meningkat hingga mencapai 68.55 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat telah bekerja sama secara efektif dalam membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi terutama untuk mengelola air genangan yang sering menyebabkan sawah petani terendam banjir saat musim penghujan. Meski demikian, masih terdapat 31.45 persen jaringan irigasi yang tidak berfungsi dengan baik, yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah terutama dalam konteks penurunan produktivitas sektor pertanian yang dapat diperbaiki dengan pengelolaan irigasi yang baik.

Grafik 2.115
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

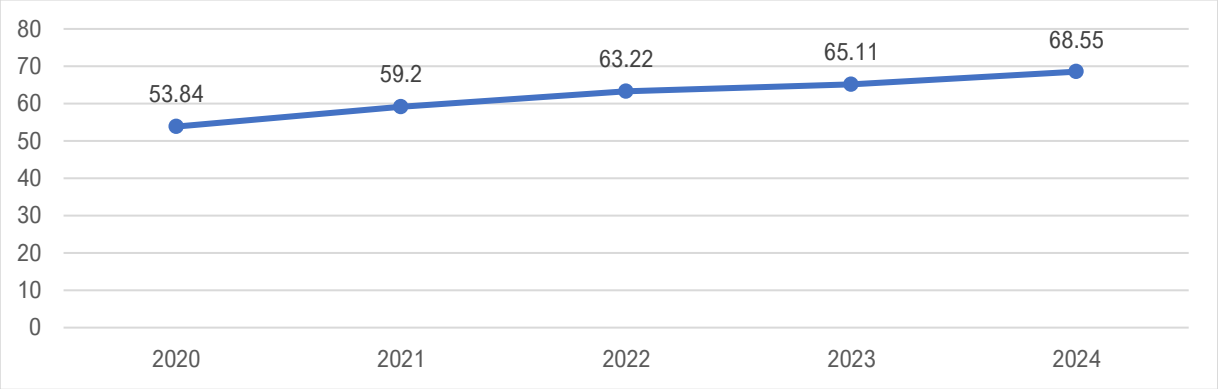

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

h. Rasio Jaringan Irigasi

Selama lima tahun terakhir, rasio jaringan irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang tidak pernah mengalami perubahan, masih diangka 3,4. Angka ini menunjukkan bahwa setiap satu hektar lahan budidaya pertanian memiliki 3 Km panjang jaringan irigasi. Angka tersebut tentu sangat rendah sebab pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan lapangan usaha utama, sehingga memerlukan jaringan irigasi yang lebih memadai untuk mencukupi kebutuhan air pada lahan budidaya. Rasio jaringan irigasi tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan karena luas lahan pertanian dan panjang saluran masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun terdapat peningkatan kualitas pengaliran air di beberapa sawah irigasi.

Grafik 2.116
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

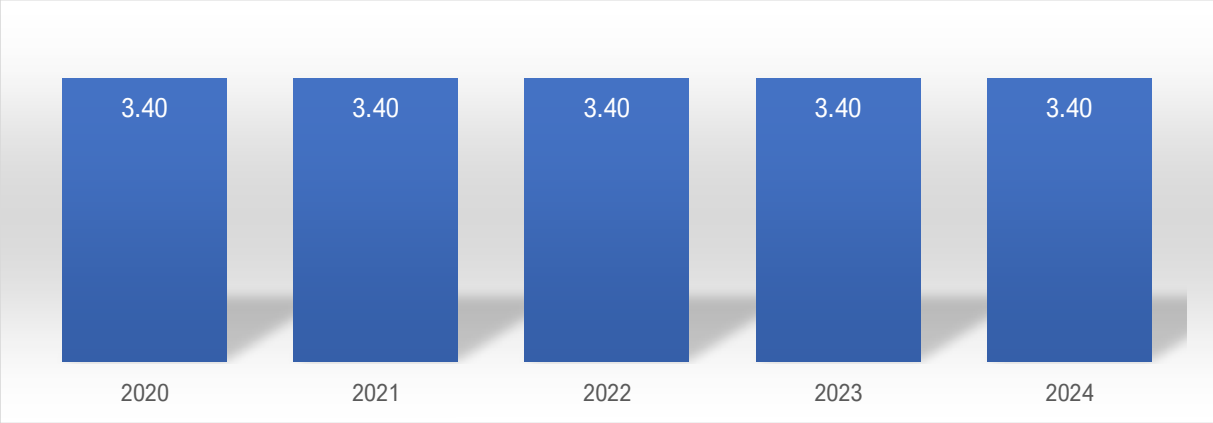

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur permukiman dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang baik, sehingga pembangunan harus

didukung oleh strategi yang matang dan didukung dengan fakta, data, serta regulasi yang mampu menjangkau dan mengantisipasi permasalahan pembangunan ke depan.

Infrastruktur permukiman berperan penting dalam membantu pembangunan masyarakat. Penataan lingkungan, jaringan penerangan jalan umum, saluran drainase, jalan lingkungan, penyediaan air minum, penyediaan bak sampah di sekitar permukiman merupakan suatu sistem infrastruktur terpadu. Keberhasilan dan keteraturan sistem infrastruktur tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni menunjukkan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Dalam lima tahun terakhir, rasio rumah layak huni mengalami penurunan dari 82.22 persen di tahun 2020 menjadi 80.63 persen di tahun 2024. Penurunan jumlah rumah layak huni dapat disebebkan oleh beberapa hal, termasuk berkurangnya kegiatan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) reguler dan strategis salah satunya program bedah rumah.

Grafik 2.117
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

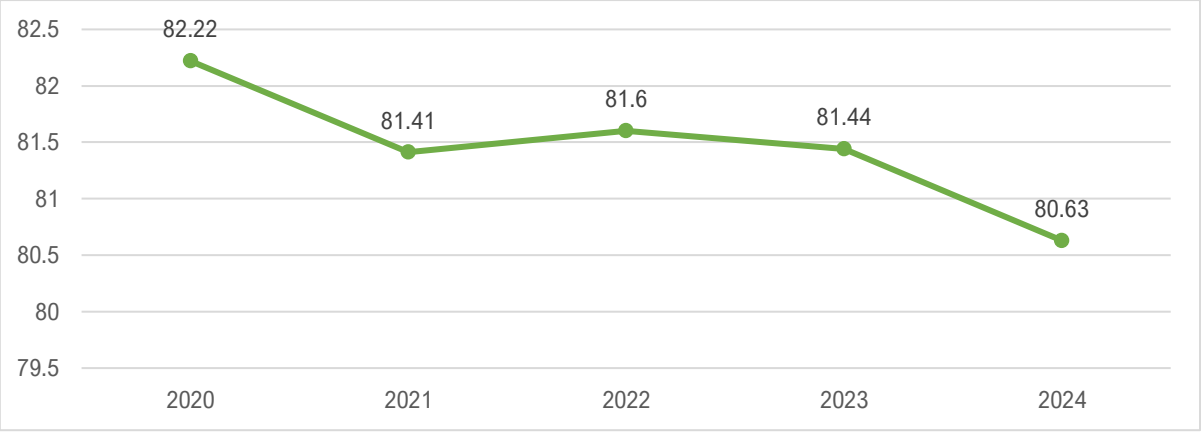

Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

b. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak huni menunjukkan perbandingan antara luas pemukiman layak huni dengan luas wilayah pemukiman. Dalam lima tahun terakhir, rasio permukiman layak huni menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2019, rasio permukiman layak huni tercatat sebesar 0,238, naik menjadi 0,29 di tahun 2023. Kenaikan rasio

permukiman layak huni didorong oleh adanya program kegiatan perbaikan permukiman diantaranya pembangunan drainase lingkungan dan pengurangan kawasan kumuh perkotaan.

Grafik 2.118
Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023

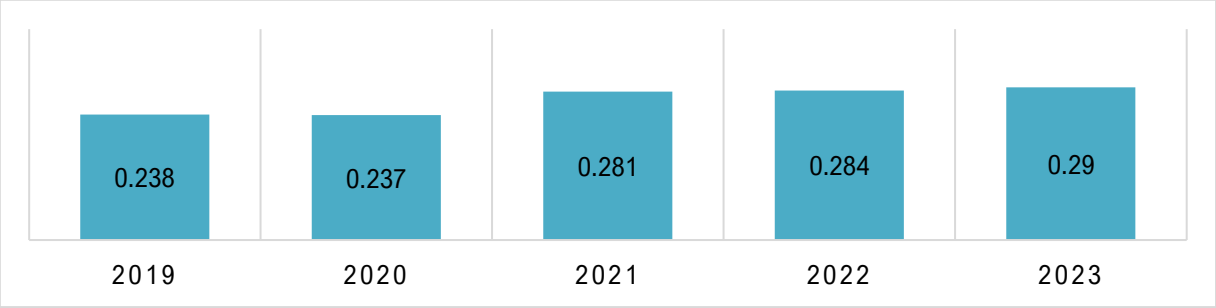

Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2024

c. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018. Indikator rumah layak huni salah satunya adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni. Nilai Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 100 persen. Dalam lima tahun terakhir, cakupan ketersediaan rumah layak huni menunjukkan tren meningkat, dari 87,14 persen di tahun 2019 menjadi 96,50 persen di tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi SPM. Faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya cakupan ketersediaan rumah layak dengan SPM yakni, ketersediaan lahan.

Grafik 2.119
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2019-2023 (%)

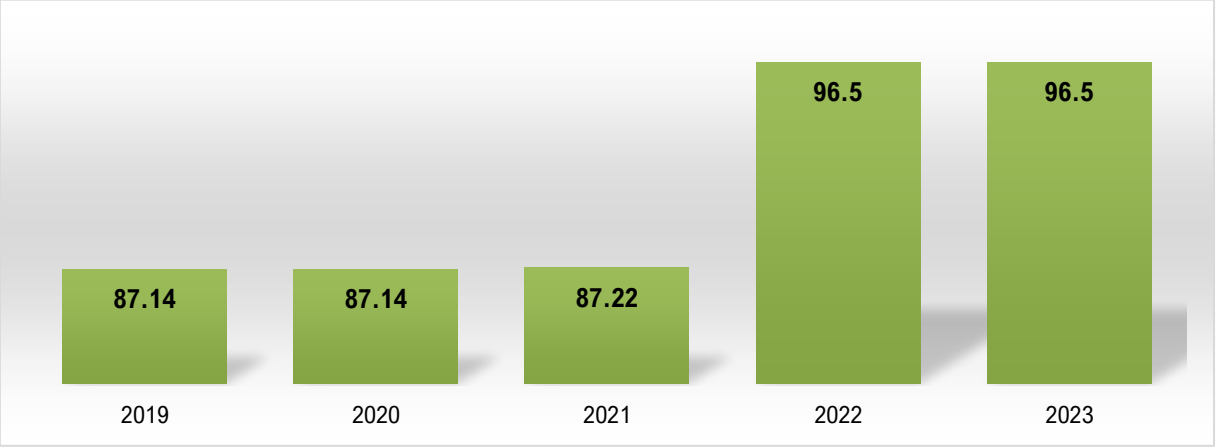

Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

d. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyakarat. Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun disewa oleh seluruh lapisan masyakarat. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/PERMEN/M/2008, nilai SPM untuk indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 70 persen. Dalam lima tahun terakhir, cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau menunjukkan tren peningkatan. Hal ini seiring dengan naiknya jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau. Meskipun demikian cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau belum mencapai SPM sebesar 70 persen.

Grafik 2.120
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2019-2023(%)

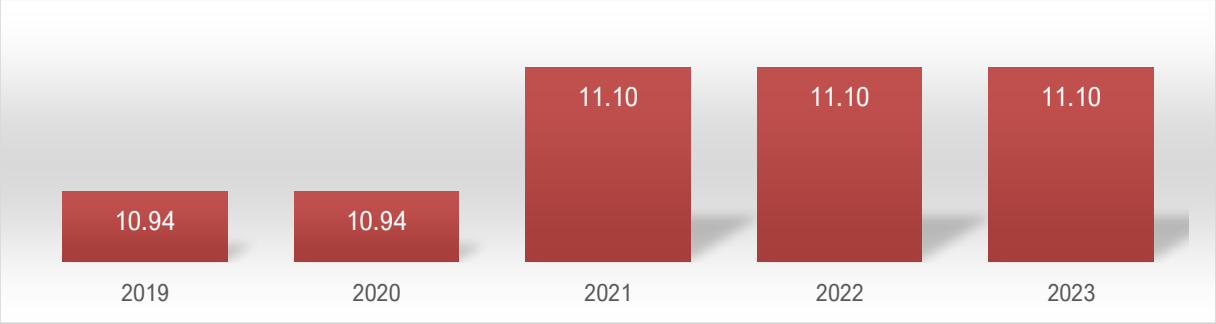

Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

e. Persentase Permukiman yang Tertata

Persentase pemukiman yang tertata menunjukkan perbandingan antara luas area permukiman tertata dengan luas area permukiman keseluruhan. Pada tahun 2019, persentase pemukiman yang tertata tercatat sebesar 3,09 persen. Angka ini mengalami peningkatan yang stabil hingga mencapai 3,25 persen di tahun 2023. Peningkatan ini belum menunjukkan kinerja yang signifikan karena presentase nya masih sangat kecil yang membuat masih terdapat rumah penduduk yang saling berhimpit satu dengan lainnya.

Grafik 2.121
Persentase Pemukiman yang Tertata di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023

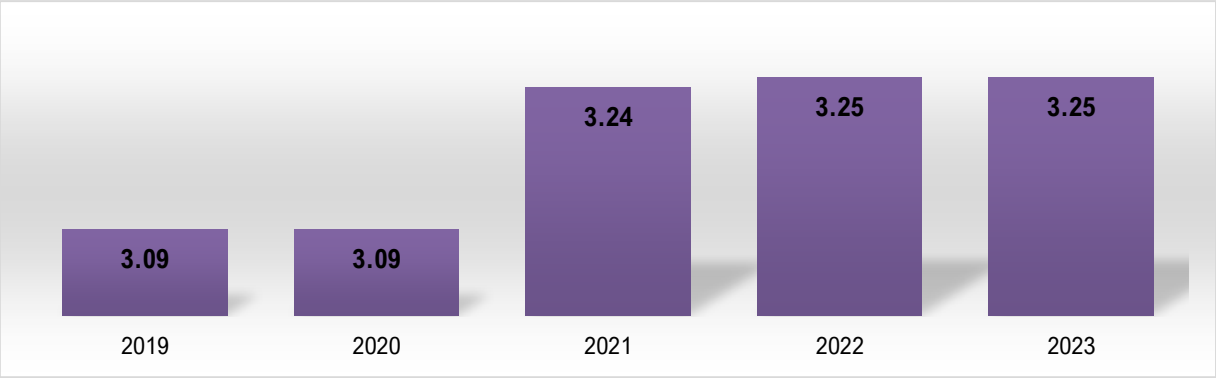

Sumber:Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

f. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Persentase lingkungan permukiman kumuh menunjukkan perbandingan antara luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah. Dalam lima tahun terakhir, persentase lingkungan permukiman kumuh menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2020, persentase lingkungan permukiman kumuh mencatatkan angka 6,05 persen, menurun menjadi 5,97 persen di tahun 2022. Lalu merosot drastis diangka 0,32 di tahun 2024. Persentase lingkungan permukiman kumuh menunjukkan perbandingan antara luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah.

Grafik 2.122
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

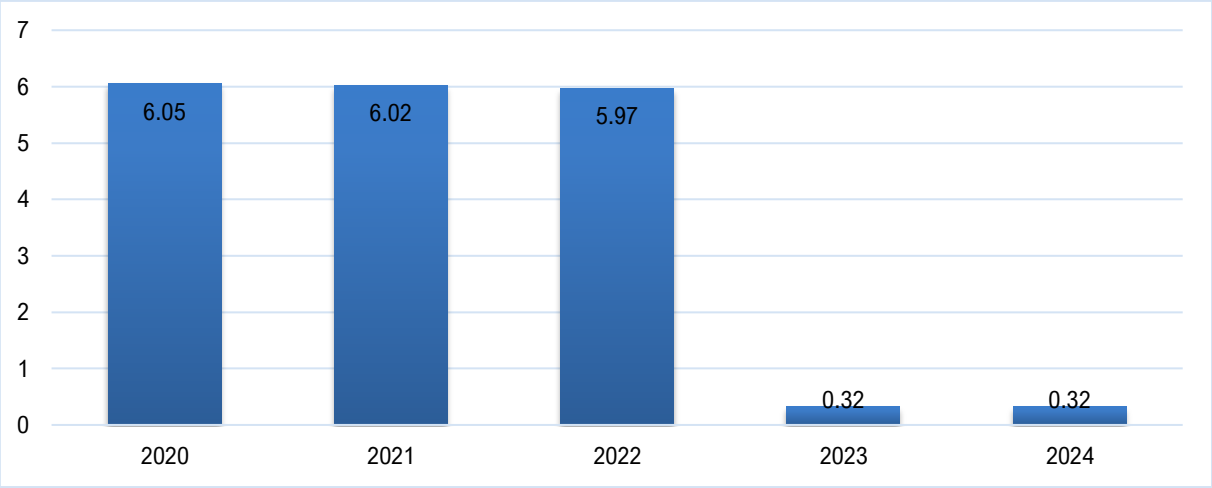

Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

g. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Grafik 2.123
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023

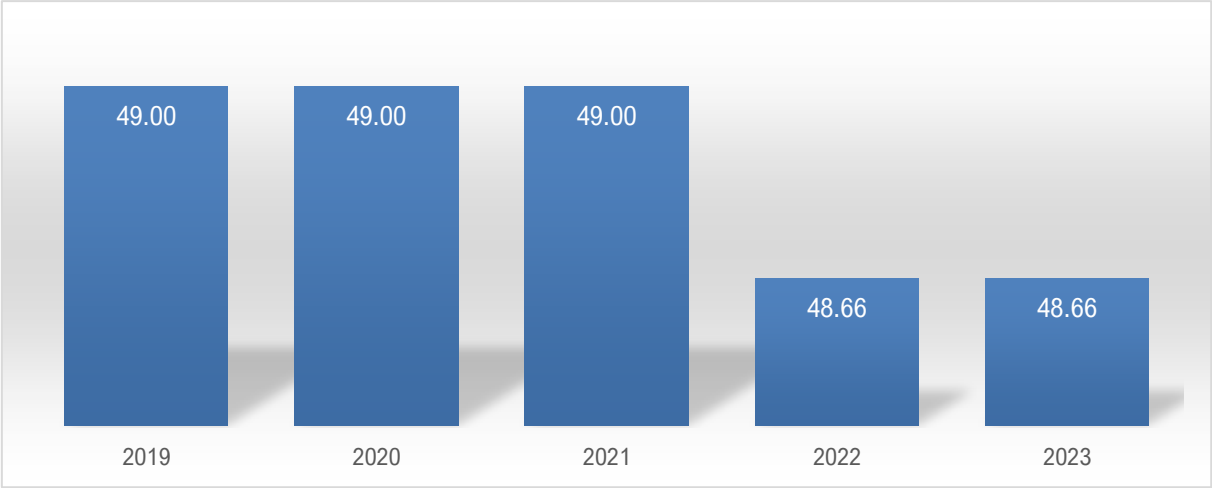

Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

h. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Proporsi rumah tangga kumuh adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya. Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai >7, 2 m2 per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Pada tahun 2019, proporsi rumah tangga kumuh di sebesar 0,193 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 0,12 persen di tahun 2023.

Grafik 2.124
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 (%)

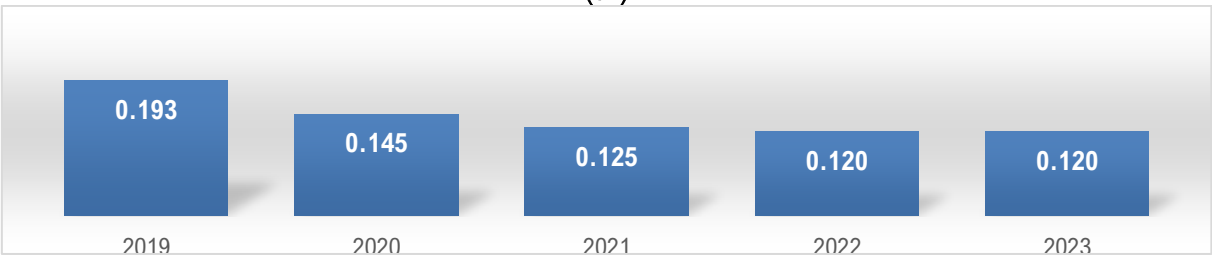

Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2024

i. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Pemukiman kumuh juga dicirkan dengan kondisi sanitasi yang buruk. Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Praktik mencuci atau mandi di sungai dimana orang membuang sampah dan kotoran merupakan contoh dari kondisi sanitasi yang buruk. Dampaknya bisa menyebabkan timbulnya penyakit diare, kolera, typhoid fever, dan paratyphoid fever, disentri, penyakit cacing tambang, ascariasis, hepatitis A dan E, penyakit kulit, trakhoma, schistosomiasis, cryptosporidiosis, malnutrisi, dan penyakit yang berhubungan dengan malnutrisi.

Perkiraan kasus kesakitan pertahun di Indonesia akibat sanitasi buruk adalah penyakit diare sebesar 72%, kecacingan 0,85%, scabies 23%, trakhoma 0,14%, Hepatitis A 0,57%, Hepatitis E 0,02% dan Malnutrisi 2,5%, sedangkan kasus kematian akibat sanitasi buruk adalah diare sebesar 46%, kecacingan 0,1%, scabies 1,1%, hepatitis A 1,4% dan hepatitis E 0,04%.

Selama lima tahun terakhir, persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2020, sebesar 85,04 persen rumah tinggal sudah bersanitasi, meningkat menjadi 85,74 persen di tahun 2021. Angka ini kembali mengalami kenaikan di tahun 2022 dan 2023 menjadi 93,14 persen dan 94,86 persen. Namun pada tahun 2024 angka ini Kembali turun menjadi 90,88 persen. Pasokan air bersih yang masih terbatas dibeberapa wilayah merupakan salah satu penyebab menurunnya persentase rumah bersanitasi begitupun dengan kesadaran masyarakat tentang pentingya sanitasi layak masih rendah, sehingga tidak ada kepedalian untuk mewujudkan lingkungan bersih.

Grafik 2.125
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

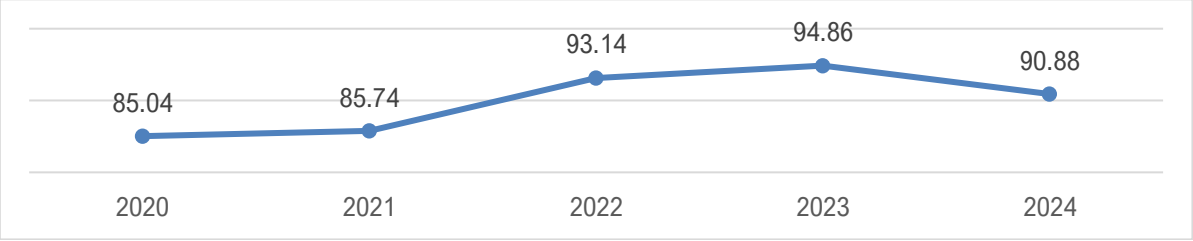

Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

j. Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU

Sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/Permen/M/2008, tercantum bahwa indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2019, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mencatatkan angka 56 persen, meningkat menjadi 75,47 persen di tahun 2023, dapat dikatakan bahwa cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU menunjukkan perbaikan berarti dalam lima tahun terakhir.

Grafik 2.126
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2019-2023 (%)

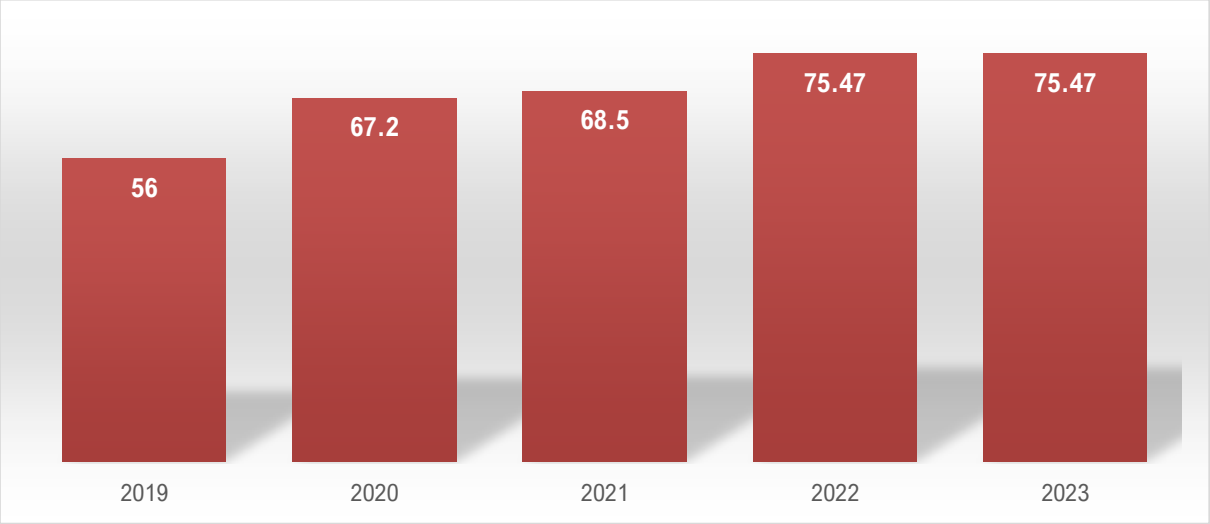

Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2024

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) merupakan tujuan pokok dalam penegakan hukum. Kebutuhan akan ketentraman dan ketertiban masyarakat ini merupakan syarat fundamental bagi terciptanya masyarakat manusia yang teratur. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah ketentraman dan ketertiban dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Selama periode 2020-2024, persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan menunjukkan tren positif. Pada tahun 2020, gangguan trantibum yang dapat diselesaikan mencapai angka 89 persen, lalu meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2024. Cakupan petugas Linmas sangat memengaruhi tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum, sebab jika laporan meningkat sementara jumlah petugasnya berkurang maka penyelesaian pelanggaraan akan terhambat.

Grafik 2.127
Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

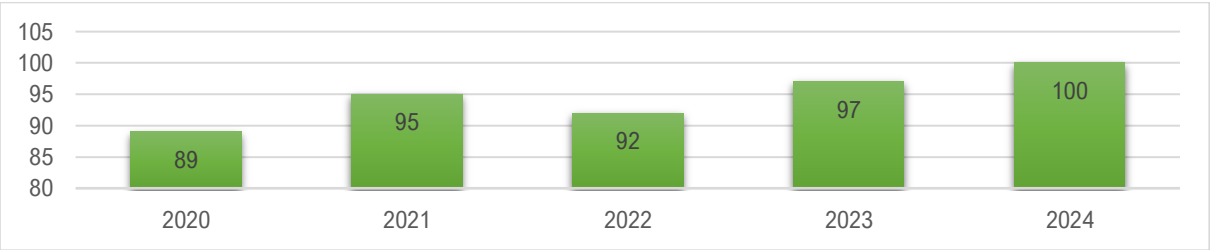

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Semakin berkembang suatu daerah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, aktivitas sosial masyarakat seringkali terganggu dengan berbagai tindakan-tindakan kriminal. Untuk melindungi masyarakat dari berbagai ganguan, maka pemerintah daerah

bertanggung jawab atas pemberian perlindungan hingga tingkat desa. Tanggung jawab tersebut tertuang dalam Permendagri No. 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Disebutkan bahwa perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan. Warga yang dipersiapkan untuk memberikan perlindungan dikenal dengan sebutan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas.

Satuan perlindungan masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Tugas Satlinmas berdasrakan Permendagri No. 84 Tahun 2014 yaitu membantu dalam penanggulangan bencana, membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, dan membantu upaya pertahanan negara.

Karena peranannya yang penting, maka Kabupaten Sidenreng Rappang memasukkan Satlinmas dalam struktur Dinas Satpol PP. Dalam peraturan perundang-undangan, Satlinmas diusulkan pada tingkat desa dan kemudian dilantik oleh kepala daerah melalui Dinas Satpol PP. Karena jumlahnya terus bertambah, cakupan Satlinmas Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2020 hingga 2022 sebesar 29,24 persen, lalu pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 30 persen.

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Cakupan petugas Linmas sangat memengaruhi tingkat penyelesaikan pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan (K3), sebab jika laporan meningkat sementara jumlah petugasnya berkurang maka penyelesaikan pelanggaran pasti terhambat. Kondisi tersebut terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana dari tahun 2020 hingga 2024 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 berkisar di angka 95 persen.

Grafik 2.128
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (%)

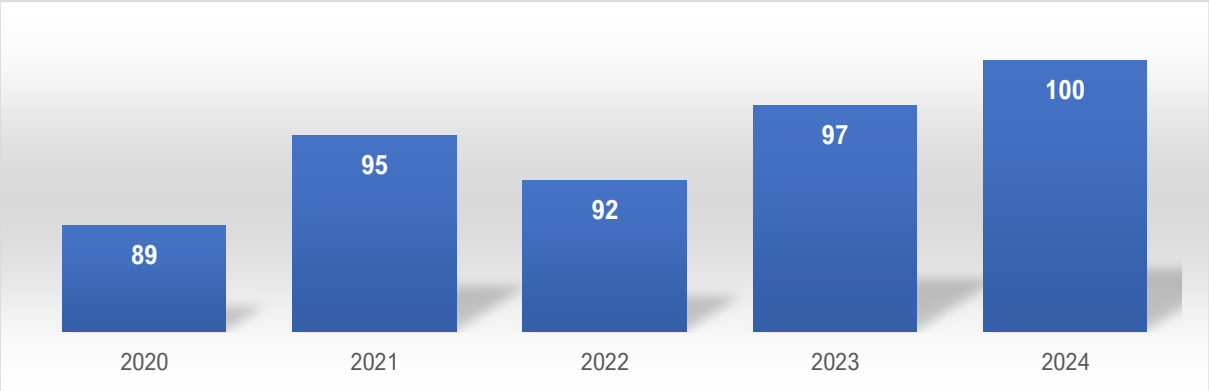

Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

c. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan ketentraman dan perlindungan masyarakat menuntut ketepatan dan kecepatan penanganan. Salah satu pelayanan publik yang sangat membutuhkan kecepatan penanganan adalah pemadam kebakaran. Itu sebabnya untuk mengukur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran indikatornya adalah tingkat waktu tanggap (*response time rate*) yang dibutuhkan oleh petugas ketika terjadi kebakaran. Waktu tanggap adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air/ penyemprotan air pertama).

Grafik 2.129
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (%)

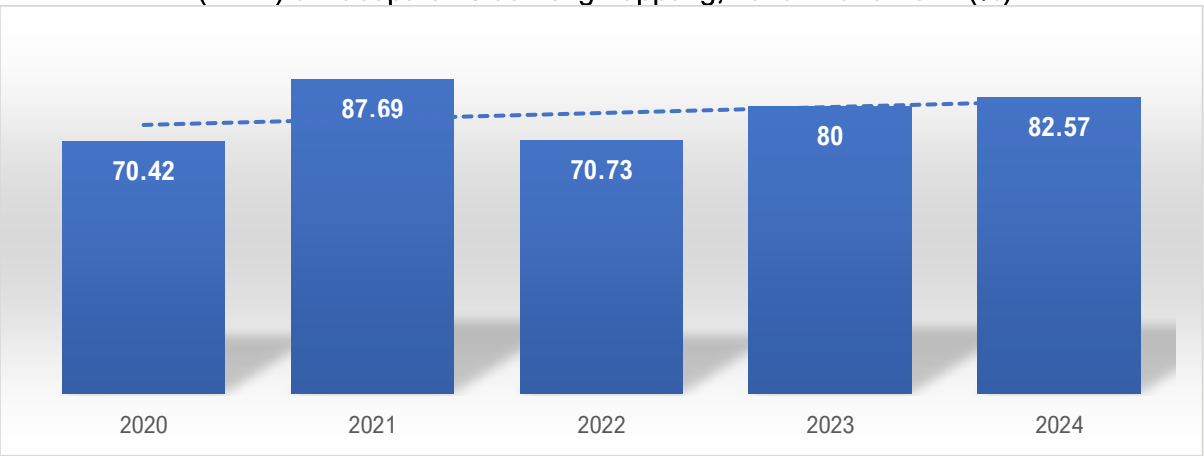

Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah yang memiliki tingkat waktu tanggap manajemen kebakaran cukup tinggi. Tahun 2020, persentase kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit mencapai 70.42 persen, kemudian pada tahun 2021 bahkan mencapai 87,69 persen, namun mengalami tren penurunan menjadi 82.57 persen di tahun 2024.

d. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Bencana alam dan kerusuhan ataupun konflik sosial tetap perlu mendapatkan perhatian karena kejadian bencana umumnya menimbulkan korban jiwa, kerugian dan kehilangan harta benda yang tidak sedikit, yaitu kerusakan rumah, serta sarana dan prasarana umum lainnya. Kejadian bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung sering terjadi di beberapa tempat di wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Bencana alam sering tidak dapat diperkirakan lokasi, waktu, dan besaran kejadiannya. Oleh karena itu, bantuan sosial sudah seharusnya menjadi salah satu kewajiban pemerintah kepada masyarakat ketika tertimpa bencana.

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat menunjukkan perbandingan antara jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Dalam lima tahun terakhir, seluruh korban bencana selama masa tanggap darurat memperoleh bantuan sosial. Hal ini ditunjukkan oleh persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencatatkan angka 100 persen selama tahun 2020 sampai tahun 2024.

e. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Dalam upaya meminimalisir korban bencana sangat diperlukan sarana dan prasarana yang lengkap.

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap menunjukkan perbandingan antara jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dengan jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. Seluruh korban bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat yang lengkap. Hal ini ditunjukkan oleh persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap mencatatkan angka 100 persen selama tahun 2020 hingga tahun 2024.

6. Urusan Sosial

a. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kerawanan sosial ekonomi, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi PMKS, juga merupakan masalah-masalah yang masih harus diatasi. Selain itu, bencana alam dan sosial, merupakan masalah yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat. Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan secara langsung tanpa adanya kewajiban berkontribusi dari masyarakat. Bantuan ini diharapkan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat dan memberdayakan mereka yang lemah dan tidak mampu untuk dapat mempertahankan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kehidupan manusia dalam melewati berbagai situasi.

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah PMKS yang diberikan bantuan dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Dalam lima tahun terakhir, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mencatatkan angka 93,7 persen, turun drastis menjadi 14,71 persen di tahun 2021. Angka ini mengalami sedikit peingkatan di tiga tahun berikutnya yakni tahun 2022 menjadi 30 persen dan 34 persen di tahun 2023 dan 2024. Tren penurunan ini disebabkan karena jumlah PMKS yang bertambah atau di temukan sedangkan anggaran untuk bantuan sosial kepada PMKS, hal ini menunjukkan pentingnya perhatian pemerintah untuk tetap meningkatkan akses terhadap PMKS tidak hanya dilakukan melalui penjangkauan tetapi juga dilakukan melalui pendekatan persuasif.

Grafik 2.130
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2020-2024

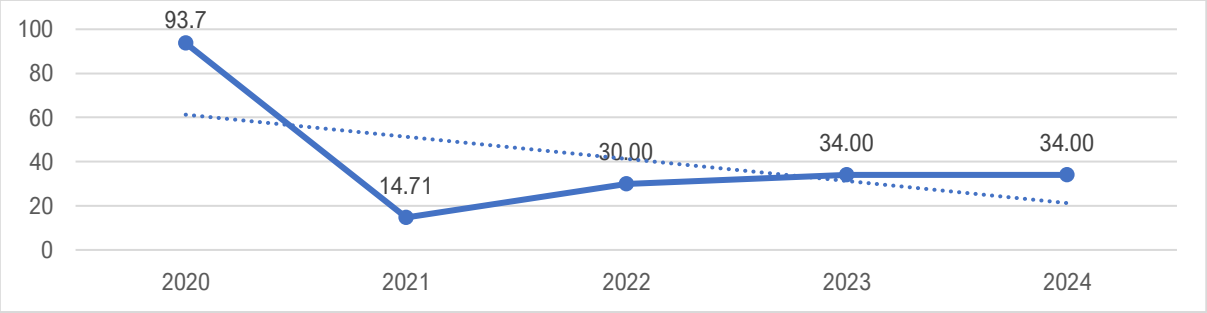

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

b. Persentase PMKS yang Tertangani

Pembangunan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah selama ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterpencilan, dan penanganan korban akibat kejadian bencana alam

serta bencana sosial. Namun, ternyata pembangunan yang dilaksanakan masih dihadapkan pada sejumlah persoalan penting seperti keterbatasan anggaran, kurangnya efektivitas pelaksanaan bantuan dan pelayanan jaminan sosial, serta luasnya cakupan pelayanan.

Penanganan para PMKS sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penanganan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial.

Dalam lima tahun terakhir, persentase PMKS yang tertangani menunjukkan tren menurun yang signifikan. Pada tahun 2020, persentase PMKS yang tertangani 93,7 persen, namun mengalami tren penurunan yang signifikan menjadi 34 persen di tahun 2024, hal ini disebabkan karena jumlah PMKS yang di temukan bertambah.

Grafik 2.131
Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

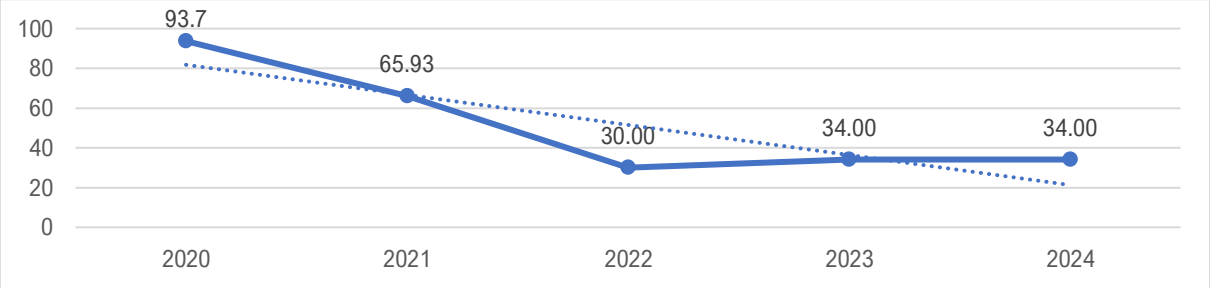

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

c. Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang dihadapi oleh PMKS adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam lima tahun terakhir, Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung menurun. Tahun 2020, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 52.7 persen, mengalami tren penurunan menjadi hanya sebesar 34 persen di tahun 2024.

Grafik 2.132
Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

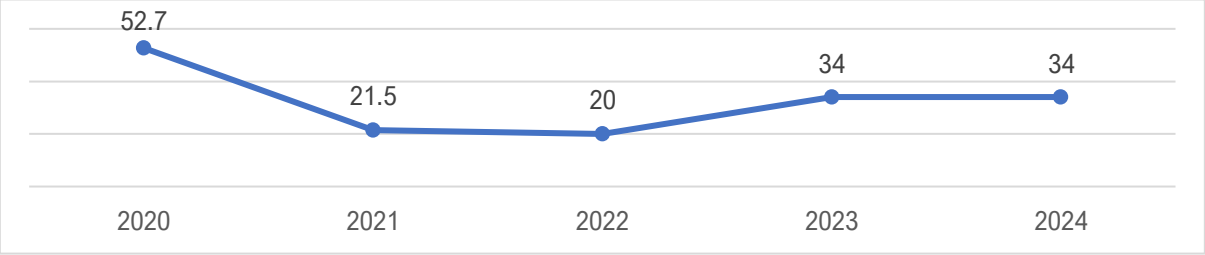

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

d. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Panti sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS agar mampu berperan aktif serta berkehidupan dalam masyarakat. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dengan jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial. Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat empat (4) panti sosial yang melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS. Dalam lima tahun terakhir, seluruh panti sosial tersebut tidak menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial.

e. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga, maupun jaringan pendukungnya baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dengan jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Di tahun 2020, terdapat bantuan dari pemerintah pusat. Akan tetapi di tahun 2021 hingga tahun 2024 sudah tidak ada bantuan anggaran dari pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah yang artinya partisipasi usaha kelompok ataupun lembaga berbasis sosial masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang masih belum ada dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

f. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Kecacatan sering menyebabkan gangguan dan kendala bagi para penyandangnya, apalagi bila dikaitkan dengan masalah sosial lain, seperti kemiskinan dan pengangguran. Persoalan ini memengaruhi aktivitas fisik, kepercayaan, harga diri, dan interaksi sosial para penyandang cacat dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, para penyandang cacat juga menghadapi kondisi lain seperti, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sosial, minimnya aksesibilitas pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan penyandang cacat, pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh penyandang cacat. Hal itu mengakibatkan hak dasar mereka untuk tumbuh kembang dan berkreasi sebagaimana manusia yang sempurna menjadi terkendala.

Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.3064/M.PPN/05/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang perencanaan pembangunan yang memberi aksesibilitas bagi penyandang cacat telah menegaskan bahwa masyarakat dan pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas sarana dan prasarana umum bagi penyandang cacat pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, dan angkutan umum yang dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat.

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dengan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial. Selama tahun 2020, persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial di Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah menerima jaminan sosial mencatatkan angka 100 persen. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat maupun pemerintah terhadap penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. Di tahun 2021 hingga 2024 penyandang catat fisik dan mental menurun drastis hingga 0,19 persen, hal ini disebabkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang di temukan bertambah sedangkan anggaran untuk pemenuhan jaminan sosial sangat minim.

Grafik 2.133
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

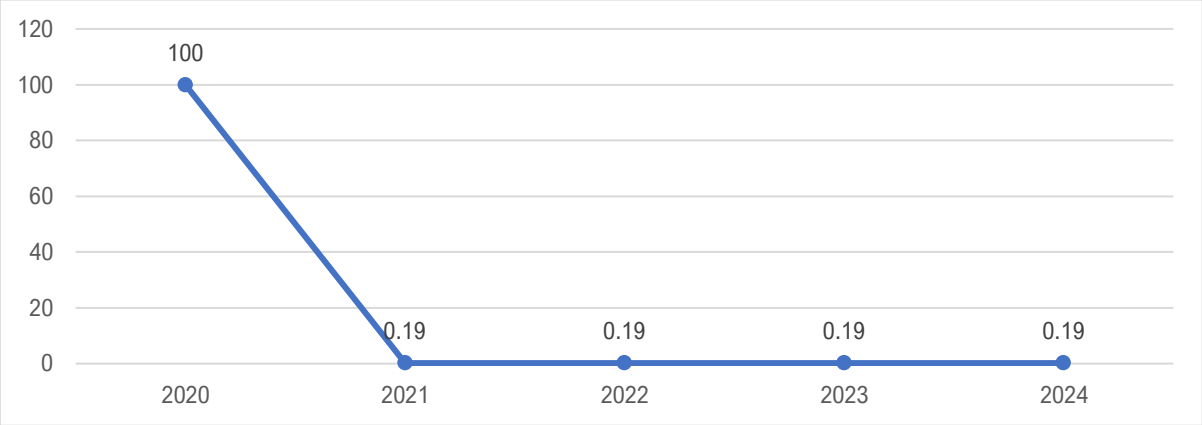

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

2.1.5.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

a. Angka Sengketa Pengusaha Pekerjaan Per Tahun

Dalam pelaksanaan hubungan industrial dimungkinkan terjadi perbedaan persepsi dan penafsiran maupun tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama/peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pengusaha maupun pekerja/buruh yang dapat berujung kepada terjadinya perselisihan hubungan industrial. Pada tahun 2020 sampai 2024, angka sengketa pengusaha-pekerja mencatatkan angka 0 persen yang berarti tidak ada satu pun kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja di Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Dalam lima tahun terakhir, seluruh kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama. Dalam rentang waktu dari tahun 2020 sampai 2024 tidak ada satu pun kasus yang membutuhkan penyelesaian dengan perjanjian bersama di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 Mediator Hubungan Industrial berkewajiban memanggil para pihak yang berselisih untuk dapat didengar keterangan yang diperlukan; mengatur dan memimpin mediasi; membantu membuat perjanjian bersama, apabila tercapai kesepakatan; membuat anjuran secara tertulis, apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian; membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial; membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

c. Keselamatan dan Perlindungan

Setiap pekerjaan memiliki risiko masing-masing yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaanyang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 35 Ayat 3 disebutkan bahwa pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Karena itu pemerintah membuat peraturan pelaksana yaitu PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Kewajiban perusahaan untuk menerapakan K3 diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012. Peraturan pemerintah tersebut menggunakan istilah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Oleh karena itu, penerapan SMK3 merupakan kewajiban perusahaan.

Namun faktanya di Kabupaten Sidenreng Rappang, kewajiban ini belum dijalankan oleh seluruh perusahaan. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, hanya sebanyak 4,46 persen dari total perusahaan yang aktif menerapkan praktik K3 dalam aktivitas operasional tahun 2020 sampai 2022. Baru pada tahun 2023 dan 2024 sedikit meningkat menjadi 13,61 dan 13,75 persen perusahaan. Sementara itu, masih terdapat 86,25 persen perusahaan yang belum menerapkan K3. Ini menunjukkan masih rendahnya keselamatan dan perlindungan dari perusahan kepada karyawannya.

Grafik 2.134
Persentase Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

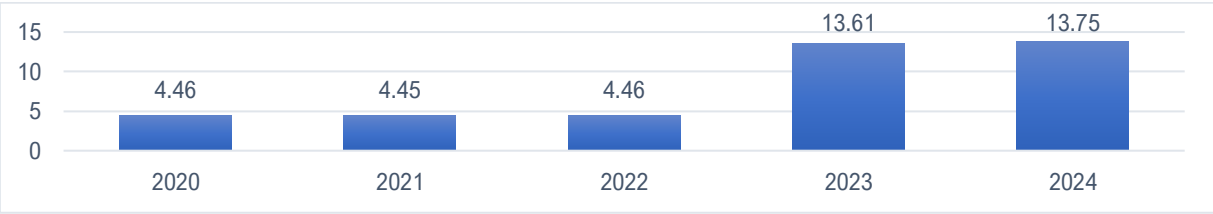

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

d. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Ketika seorang pekerja pensiun atau mengalami PHK secara drastis pendapatan rumah tangga akan mengalami perubahan. Jika yang pensiun adalah ASN, mereka tak perlu khawatir, sebab setiap bulan negara masih menjamin pendapatan melalui gaji pensiun, namun yang jadi persoalan jika yang pensiun adalah pegawai swasta. Persoalan lainnya adalah ketika seorang pegawai swasta mengalami PHK, maka mereka hanya menerima

pesangon beberapa bulan gaji dan tunjangan. Perusahaan tidak akan menanggung sama seperti negara menanggung pekerjanya. Untuk itulah dibentuk BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya dikenal Jamsostek.

BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi pekerja di seluruh Indonesia. Melalui berbagai programnya, BPJS Ketenagakerjaan berusaha memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi siapapun yang mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP). Perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerjanya, harus mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban tersebut diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Meskipun sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. pada tahun 2024, besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek berkisar di angka 16,95 persen. Kurangnya sosialisasi pentingnya asuransi ketenagakerjaan sangat diperlukan sehingga pekerja merasa membutuhkan BPJS ketenagakerjaan.

Grafik 2.135
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Tabel 2.56
Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja
1	2020	70,88
2	2021	34,26
3	2022	67,50
4	2023	68,00
5	2024	45,97

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap; 2025

e. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Perusahaan yang melanggar ketentuan perundang-undangan wajib diperiksa oleh pemerintah daerah. Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan persentase perusahaan yang diperiksa mengalami penurunan lima tahun terakhir. Tahun 2020 angkanya senilai 20,00 persen, namun tidak konsisten. Tahun berikutnya persentase naik menjadi 40,00 persen di tahun 2021. Pada tahun 2022 turun menjadi 20 persen dan penurunan kembali terjadi di tahun 2023 dan 2024 menjadi 13,61 persen.

Grafik 2.136
Besaran Pemeriksaan Perusahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

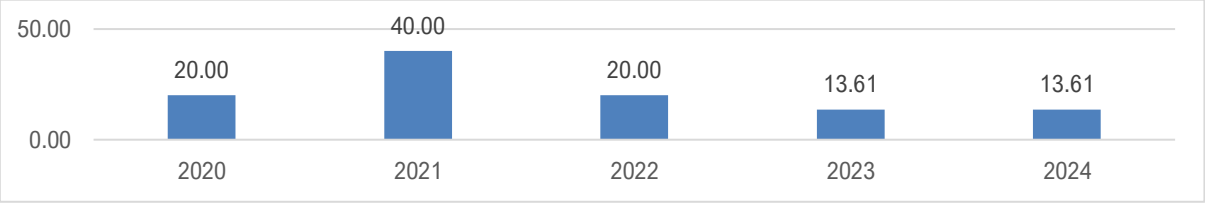

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

f. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Unit pengawas ketenagakerjaan juga memiliki kewanangan untuk memerikan semua peralatan milik perusahaan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pengujian peralatan perusahaan berdasar pada UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dan Perpres No. 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, kewajiban tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Selama lima tahun terakhir, tahun 2020 hingga 2024, tidak ada perusahaan yang peralatannya telah di periksa oleh unit pengawas ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap aspek-aspek keselamatan dan Kesehatan kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang.

g. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga kerja merupakan faktor produksi utama dalam proses produksi barang dan jasa. Jumlah output yang bisa dihasilkan oleh sebuah perusahaan, bergantung pada produktivitas tenaga kerja, semakin tinggi produktivitas maka semakin besar besar pula output yang dihasilkan, begitupun sebaliknya. Pada level daerah, produktivitas tenaga kerja menentukan nilai PDRB. Oleh karena itu, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mensyaratkan pemerintah untuk mendorong produktivitas tenaga kerja.

Produktivitas tenaga kerja ditentukan oleh modal manusia (*human capital*) yang terdiri dari pengetahuan dan keahlian (*skill*). Seorang pekerja bisa saja menyandang gelar pendidikan tinggi, tapi belum tentu ahli pada bidang tertentu. Pemerintah daerah bisa memfasilitasi pekerja untuk meningkatkan kualitas modal manusia salah satunya dengan pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan oleh tempat kerja.

Dalam lima tahun terakhir, Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya untuk memfasilitasi pelatihan berbasis kompetensi bagi para pekerja. Namun tidak semua pekerja yang mendaftar untuk ikut pelatihan dapat diikutkan. Pada awalnya di tahun 2020 tidak terdapat tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Angka ini mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 26,78 persen di tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 dan 2024 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi menurun drastis menjadi hanya 0,06 persen.

Grafik 2.137
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

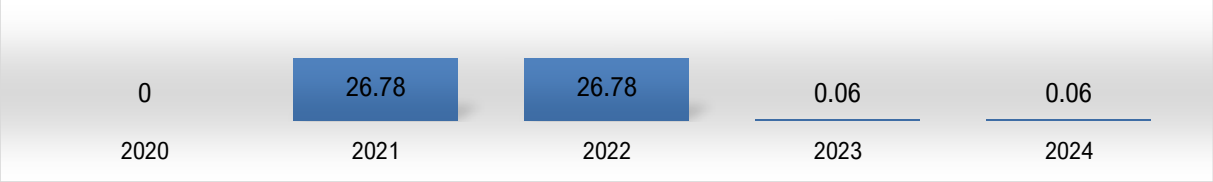

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Angka ini sangat rendah, salah satu penyebabnya karena kemampuan daerah memfasilitasi pekerja untuk mendapatkan pelatihan sangat terbatas. Menyelenggarakan pelatihan mengharuskan Pemda mengalokasikan anggaran besar, apalagi jika pendaftarnya cukup banyak.

h. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, baik yang mengacu pada standar kompetensi maupun non standar. Tujuanya agar kompetensi dan pengetahuan masyarakat bisa meningkat untuk mengelola sumber daya daerahnya hingga menghasilkan pendapatan dan pengalaman kerja.

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah yang melakukan pelatihan berbasis masyarakat. Namun dilihat dari angka besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, kinerja pemerintah daerah tidak begitu baik. Tahun 20, pemerintah daerah berhasil melatih 61 persen pekerja dari seluruh pendaftar pelatihan. Angka ini

mengalami kenaikan secara persisten dalam lima tahun terakhir hingga mencapai 100 persen di tahun 2022 sampai tahun 2024.

Grafik 2.138
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

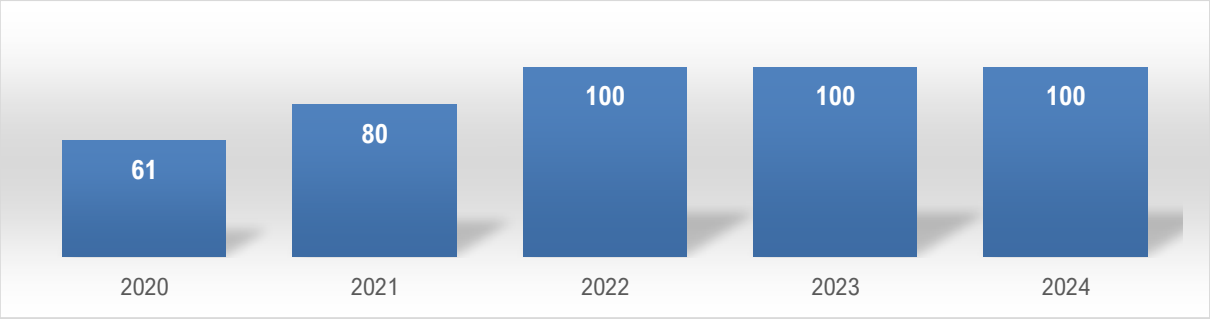

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

i. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Indonesia sedang berupaya untuk masuk dalam jajaran negara-negara perekonomian terbesar di dunia. Namun tantangan yang dihadapi adalah kurangnya wirausaha. Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausaha baru untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi sebab saat ini rasio wirausaha di dalam negeri masih sekitar 3,1 persen dari total populasi penduduk. Untuk mencetak wirausaha baru, peran pemerintah daerah sangat strategis.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membuat pelatihan kewirausahaan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan berbisnis dengan harapan mereka bisa menciptakan kesempatan kerja bagi orang lain. Dalam lima tahun terakhir, cakupan tenaga kerja/masyarakat yang mendapatkan pelatihan wirausaha cenderung naik dilhat dari angka besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Terdapat 80 persen tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di tahun 2020. Angka ini mengalami kenaikan kembali masing-masing menjadi 90 dan 100 persen di tahun 2021 hingga tahun 2024. Itu artinya, dari seluruh pendaftar pelatihan, sudah mendapatkan pelatihan.

Grafik 2.139
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah dengan pemberian akses yang seluas mungkin bagi perempuan untuk berperan aktif dalam seluruh aktifitas termasuk dalam hal partisipasi pada lembaga pemerintah. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Dalam lima tahun terakhir, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan perubahan signifikan di tahun 2024 setelah mengalami stagnasi pada empat tahun sebelumnya. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023, berada pada angka 35 persen. Namun pada tahun 2024, melonjak drastis menjadi 66,85 persen. Angka ini memberikan gambaran bahwa pelibatan perempuan oleh pemerintah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan baik dalam aktifitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, maupun politik. Melihat tren penurunan selama 4 (empat) tahun terakhir, maka diperlukan upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah yang sifatnya mendorosng kaum perempuan untuk berani tampil dan memiliki kepekaan untuk berpartisipasi dalam lembaga pemerintah sehingga di tahun-tahun selanjutnya kembali meningkat.

Grafik 2.140
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

b. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan. Partisipasi di badan legislatif merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dari tahun 2020 sampai 2024, partisipasi perempuan di badan legislatif tetap stagnan di angka 8,57 persen. Angka ini menunjukkan bahwa peluang serta keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat legislatif masih jauh dari angka 30 persen sesuai yang di amanatkan undang-undang.

Grafik 2.141
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2020-2024 (%)

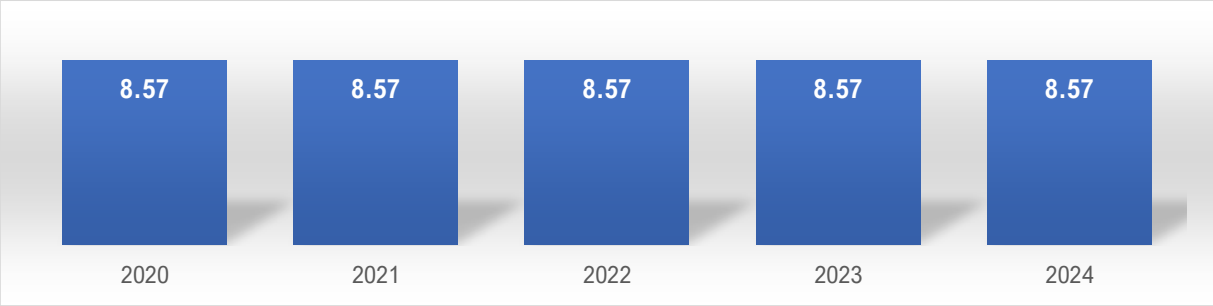

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

c. Partisipasi Perempuan Sebagai Tenaga Profesional

Selain partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, partisipasi perempuan di lembaga swasta juga memberikan gambaran sejauh mana perempuan memiliki akses dalam dunia kerja serta aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Semakin besar persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta tentu memiliki dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi di suatu wilayah begitupun sebaliknya.

Grafik 2.142
Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Persentase partisipasi perempuan di lembaga profesional menggambarkan proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga profesional terhadap seluruh pekerja perempuan. Dalam lima tahun terakhir, persentase perempuan sebagai tenaga profesional mengalami tren penurunan. Tahun 2020-2022 angka partisipasi perempuan konsisten di angka 33,8 persen, namun terjadi penurunan menjadi 33,1 persen di tahun 2023, sedikit naik di tahun 2024 menjadi 33,3 persen.

d. Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu isu penting dalam pemberdayaan perempuan. Tindakan KDRT dapat menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis bagi perempuan. Besaran angka kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Selama lima tahun terakhir, rasio KDRT di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren penurunan. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio KDRT adalah 0,027 persen, kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 0,0027 persen di tahun 2023. Penurunan berlanjut di tahun 2024 yang semakin rendah di angka 0,0021 persen. Walaupun angka ini menunjukkan penurunan yang positif, namun tetap mengindikasikan keberadaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.57
Rasio KDRT Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio KDRT	0,027	0,027	0,021	0,0027	0,0021

Sumber: Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

e. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Menurut Peraturan Menteri PPPA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sementara kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) yang teridentifikasi di pelayanan kesehatan merupakan fenomena gunung es karena belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat. Kasus KtP/A sangat mempengaruhi kesehatan korban sehingga berdampak pada penurunan kualitas manusia. Untuk itu,

peran pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan kasus KtP/A salah satunya dengan fungsi Unit Pelayanan Terpadu. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut UPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan.

Dalam lima tahun terakhir, seluruh KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang mendapatkan penanganan pengaduan secara profesional di UPT. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan KtP/A yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPT yang mencatatkan angka 100 persen. Capaian ini sesuai dengan SPM sebesar 100 persen dan artinya pelayanan UPT di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk penanganan pengaduan KtP/A sudah sangat baik.

f. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Layanan kesehatan menjadi salah satu SPM untuk KtP/A. Layanan kesehatan yang dimaksud adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dari tahun 2020 sampai tahun 2024 KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskemas mencapai 100 persen, artinya telah mencapai SPM yang ditetapkan sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perempuan dan anak korban kekerasan telah mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas dan mampu untuk tatalaksana KtP/A dan PPt/PKT di rumah sakit.

Grafik 2.143
Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT Rumah Sakit di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

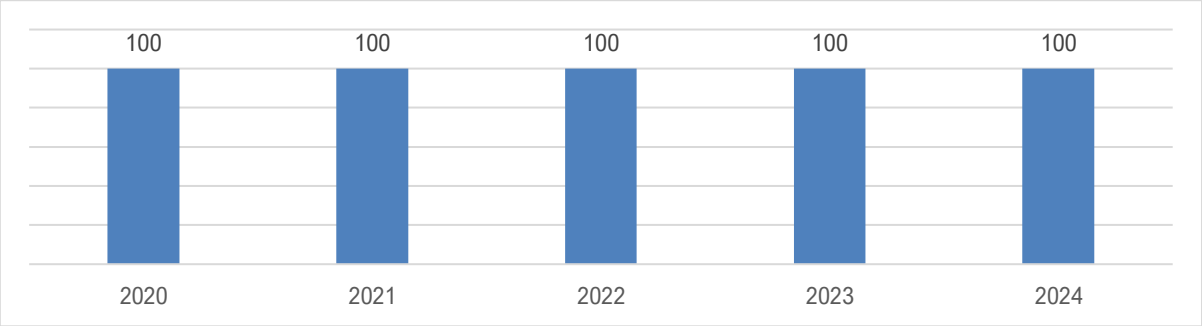

Sumber: Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

g. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Salah satu dampak dari kekerasan bagi perempuan dan anak yakni disfungsi sosial. Disfungsi sosial membuat individu tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya

sesuai dengan status sosialnya. Untuk itu layanan rehabilitasi sosial bagi korban KtP/A menjadi penting. Layanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam lima tahun terakhir, tidak ada perempuan dan anak korban kekerasan terdata yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial. Hal ini berarti perempuan maupun anak korban kekerasan dapat pulih secara cepat tanpa layanan rehabilitasi sosial meskipun sebenarnya telah terdapat petugas layanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang.

h. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

   Selain upaya perbaikan layanan kesehatan, aspek penegakan hukum juga perlu menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penegakan hukum merupakan tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan penegakan hukum atas kasus-kasus KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang konsisten mencatatkan angka 100 persen dari tahun 2020-2024. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kasus KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang telah memperoleh penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan.

i. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

   Pemberikan dukungan pada pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi kasus KtP/A menjadi isu penting. Informasi mengenai hukum, maupun hal teknis sederhana untuk membantu mendapat layanan yang menjadi haknya diperlukan bagi korban KtP/A. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. Sejalan dengan penegakan hukum, seluruh korban KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh layanan bantuan hukum. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan KtP/A yang mendapatkan layanan bantuan hukum mencatatkan angka 100 persen selama tahun 2020-2024. Hal ini juga menunjukkan perbaikan layanan dan penegakan hukum di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Urusan Pangan

a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

   Dalam rangka mendorong ketahanan pangan, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan cadangan pangan sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Cadangan pangan merupakan Langkah preventif untuk mengatasi potensi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan/atau keadaan darurat yang terkait dengan pangan.

Selama 2020-2023, tidak ada dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan daerah. Namun di tahun 2024 sudah ada penguatan Cadangan pangan sebesar 3,33% namun belum memenuhi kuantitas standar cadangan pangan sebanyak 100ton sesuai dengan ketentuan yang diatur.

b. Ketersediaan Pangan Utama

Sebagai salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap penyediaan pangan utama di Sulawesi Selatan, ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang cukup tinggi, meskipun 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan penurunan. Karena produktivitas sektor pertanian, terutama komoditas padi turun, secara langsung memengaruhi *supply* beras dan membuat angkanya hanya mencapai 847.78 Kg pada tahun 2020. Tahun 2021 sedikit mengalami kenaikan menjadi 881.40 Kg. Kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan capaian 932,03 Kg, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 866 Kg dan penurunun berlanjut pada tahun 2024 dengan angka terendah yaitu 788 Kg. Walaupun begitu, hal ini menunjukkan perlu ada upaya lebih maksimal dalam pemenuhan kebutuhan pangan utama di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.144
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Kg)

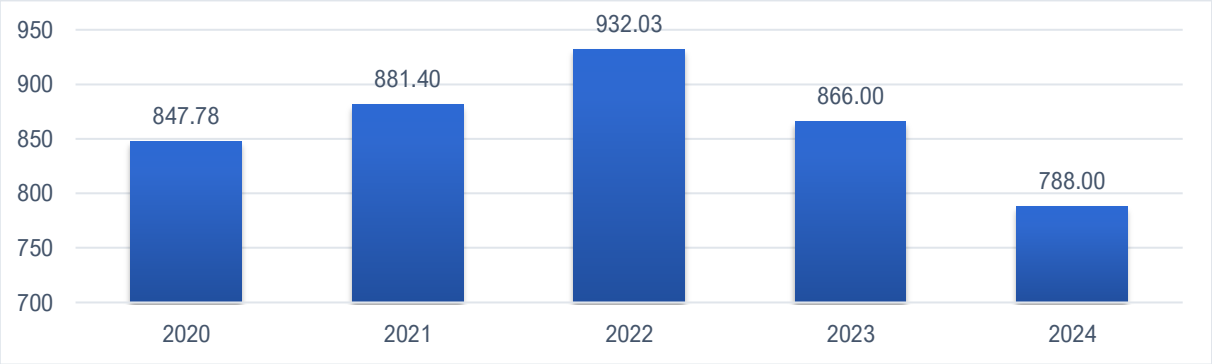

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sideneng Rappang; 2025

c. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan utama salah satu bagian penting untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk menghitung ketersediaan

energi, pangan utama menjadi salah satu pertimbangannya. Setiap hari, masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang mengonsumsi 4.877 kkal energi pada tahun 2020. Angka ini kemudian mengalami penurunan yang signifikan menjadi 9.823 kkal/hari di tahun 2021. Ketersediaan energi kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 menjadi 4.100 kkal/hari, dan berlanjut pada tahun 2023 dengan mencapai 4.615 kkal/hari. Namun di tahun 2024, konsumsi energi masyarakat mengalami penurunan kembali menjadi 2.743 kkal/hari.

Grafik 2.145
Ketersediaan Energi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Kkal/Hari)

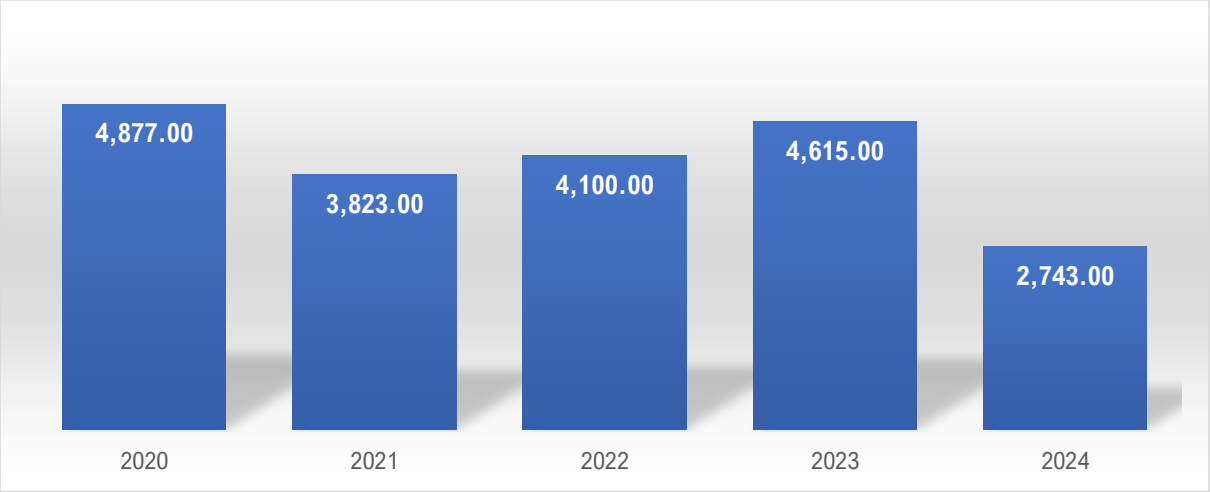

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Grafik 2.146
Ketersediaan Protein di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Gram/Hari)

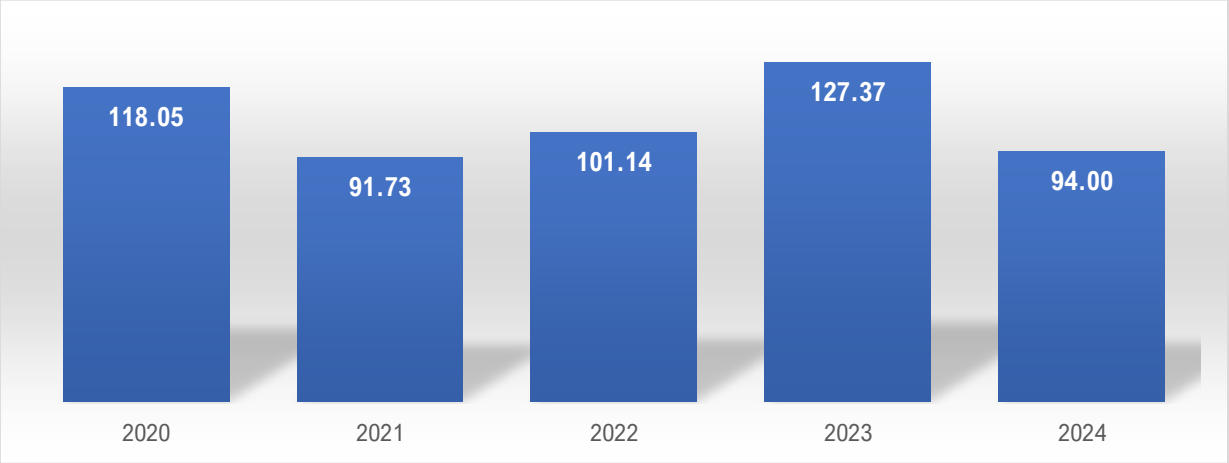

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

d. Data Populasi Ternak dan Produksi Peternakan

Tabel 2.58
Data Populasi Ternak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sapi	35.947	37.113	29.805	25.426	29.959

2.	Kerbau	1.589	1.575	1.697	1.502	1.137
3.	Kuda	201	161	171	168	124
4.	Kambing	6.019	5.800	5.209	4.292	3.256
5.	Ayam Buras	565.753	542.793	529.410	473.434	512.513
6.	Ayam Pedaging	2.345.500	1.888.000	2.001.250	1.587.650	2.722.500
7.	Ayam Petelur	4.680.103	4.562.924	3.984.953	3.794.705	4.094.117
8.	Itik	469.083	433.912	444.295	419.609	434.784
9.	Manila	78.527	79.583	79.559	74.119	74.929

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Tabel 2.59
Data Produksi Peternakan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	PRODUKSI TELUR					
	a) Ayam Ras	48.322.063	47.112.190	12.896.890	39.180.329	42.271.758
	b) Itik	2.341.662	2.166.089	712.427	2.094.688	2.170.442
	c) Ayam Buras/ Lokal	237.616	227.973	85.698	198.842	215.255
	d) Manila	392.007	397.278	109.195	370.002	374.046
2.	PRODUKSI DAGING					
	a) Sapi Potong	654.252	1.070.836	107.434	552.934	405.943
	b) Kambing	9.398	10.748	12.002	29.702	24.958
	c) Ayam :					
	1) Petelur	610.753	595.462	105.539	495.209	534.282
	2) Pedaging	1.020.293	821.280	176.871	690.628	1.184.288
	3) Buras	213.289	204.633	761	178.485	193.217
	4) Itik	182.942	169.226	11.183	163.648	169.566
	5) Manila	30.626	31.037	3.927	28.906	29.222

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

4. Urusan Pertanahan

a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Sertifikasi tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara akan kepemilikan lahannya secara sah dan legal. Selain itu, sertifikasi tanah juga merupakan alat pembuktian yang kuat dengan tujuan melakukan pendaftaran tanah dalam rangka memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, serta terjaminnya tertib administrasi di bidang pertanahan sehingga tampak dan dirasakan baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanahnya dalam rangka tertib administrasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di masa yang akan datang. Adapun masyarakat yang telah mendaftarkan tanahnya akan mendapatkan

jaminan kepastian hukum yang meliputi kepastian status hak, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah sebagai suatu proses yang diakhiri dengan terbitnya sertifikat oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota dan mendapatkan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara umum, persentase luas lahan yang bersertifikat di Kabupaten Sidenreng Rappang terus mengalami peningkatan sepanjang 2019-2023 dari 22,54 persen di tahun 2019 menjadi 23,55 persen di tahun 2023. Adapun peningkatan persentase luas lahan bersertifikat ini sejalan dengan jatah sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PSTL) yang juga bertambah.

Grafik 2.147
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023

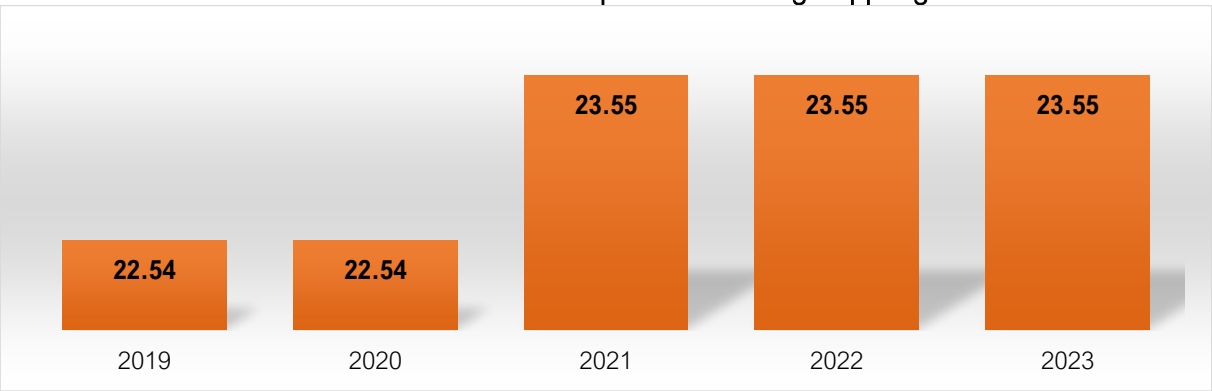

Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2024

5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Sesuai UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah disetiap tingkatan wajib menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dalam UU nomor 32 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem masih banyak lagi tujuan lainnya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pada tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diawali dengan proses perencanaan yang mana pada pelaksanaan perencanaan, salah satunya melalui tahapan penyusunan RPPLH yang memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Dalam empat tahun terakhir, yaitu tahun 2020-2023, Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penyusunan RPPLH. Penyusunan dokumen RPPLH ini telah diatur dalam

UU. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian pemerintah terkait dengan isu lingkungan hidup.

b. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

RPPLH secara garis besar memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dan pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Pada akhirnya RPPLH ini menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Karena belum tersedianya dokumen RPPLH dalam lima tahun terakhir, maka rencana pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang belum terintegrasi dengan RPPLH. Salah satu permasalahannya adalah belum tersosialisasikan ke seluruh OPD.

c. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Air merupakan kebutuhan makhluk yang utama dalam kehidupan sehari-hari. Pemantauan kualitas air perlu dilakukan pada air sungai, air laut, air danau, air rawa, dan air tanah sehingga air dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Selain kebutuhan air minum, sumber air juga memainkan peran penting di berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, produksi ternak, kehutanan, kegiatan industri, pembangkit tenaga air, perikanan, dan kegiatan kreatif lainnya. Salah satu indikator untuk menilai kualitas air yakni Indeks Kualitas Air.

Dalam lima tahun terakhir, indeks kualitas air di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, indeks kualitas air tercatat sebesar 58,40 poin, lalu mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 50,00 poin di tahun 2021, hal ini disebabkan adanya pencemaran rendah, dimana semakin rendah nilai kualitas air maka semakin baik kualitas air tersebut. Angka ini kemudian mengalami kenaikan di tahun-tahun berikutnya menjadi 53,64 di tahun 2022 dan 54 poin di tahun 2023, sebelum nilainya kembali menurun menjadi 50 poin di tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten Sidenreng Rappang memenuhi baku mutu dengan berada direntang 0-1 poin. Meskipun demikian, peningkatan kualitas air perlu pengadaan laboratorium supaya untuk melakukan tes kualitas air tidak perlu lagi ke Makassar, begitu pula dengan Sumber Daya Manusia perlu ada peningkatan melalui pelatihan untuk pengoperasian alat.

Grafik 2.148
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

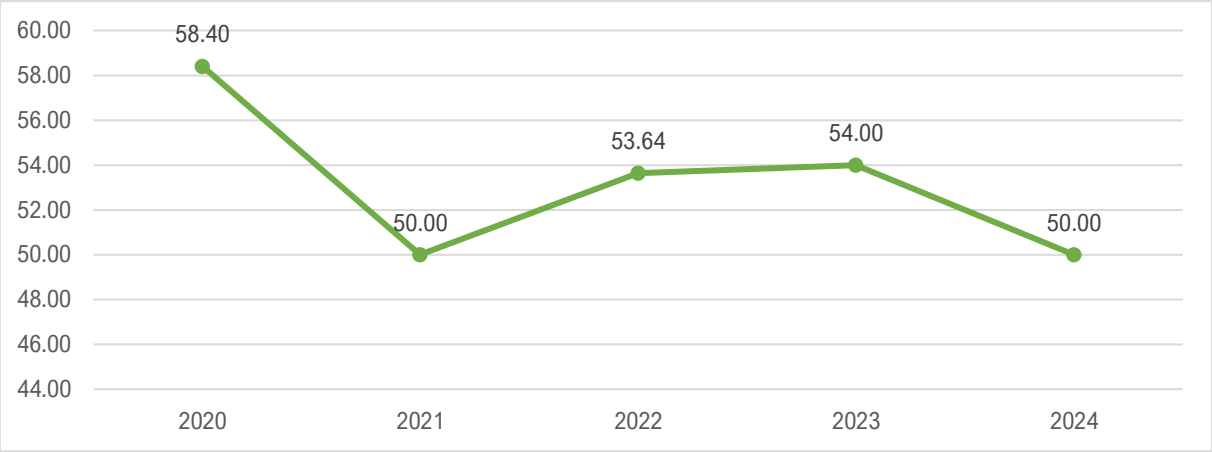

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

d. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. IKU merupakan suatu nilai yang menjelaskan dan menginformasikan kondisi dan perubahan kualitas udara dan menjadi masukan bagi pemerintah untuk perencanaan tentang udara bersih. Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Sementara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk. Dalam lima tahun terakhir, IKU di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, IKU mencatatkan angka 87,55 poin, dan sedikit meningkat menjadi 87,81 poin di tahun 2021 dan 87,9 poin di tahun 2022. Namun kembali merosot turun di angka 85,59 persen di tahun 2023. Pada tahun 2024, IKU kembali melonjak mencapai angka 94,22 poin.

Grafik 2.149
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

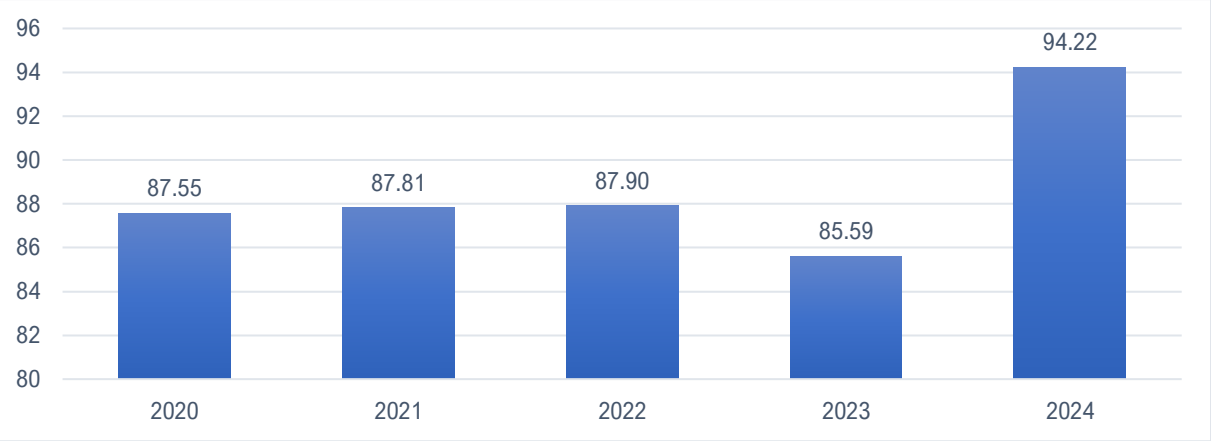

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

e. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010 penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut. Perhitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTL tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya.

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2020, IKTL tercatat sebesar 49,19 poin, sedikit menurun menjadi 48,63 poin pada tahun 2021 dan stabil di angka tersebut pada tahun 2022. Tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan menjadi 49,44 poin. Tahun 2024 berhasil mencapai nilai 50,23 poin.

Grafik 2.150
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2020-2024

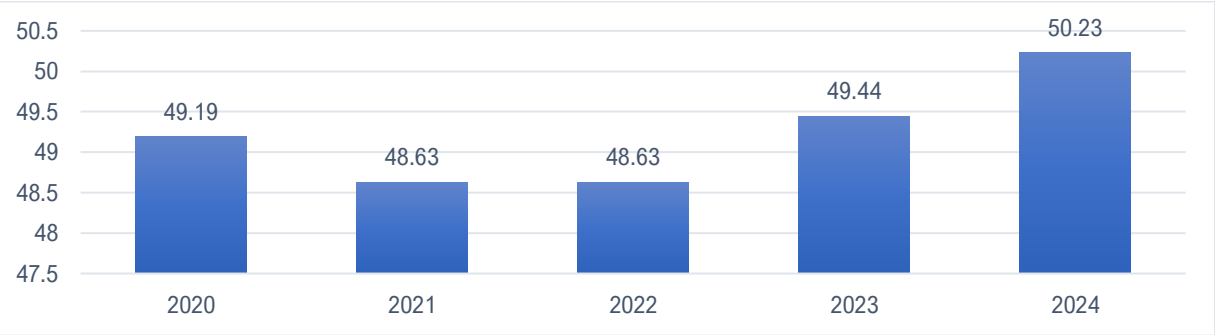

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

f. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH D Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk mendorong kegiatan dan/atau usaha agar tertib administrasi, sehingga memudahkan proses pengawasan dan pembinaan yang diperlukan intervensi dari pemerintah. Adapun sepanjang tahun 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 35 usaha/kegiatan setiap tahunnya. Capaian ini sejalan dengan target tahunan yang diharapkan mampu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 35 usaha/kegiatan.

g. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Pemberian penghargaan lingkungan hidup bertujuan untuk mendorong dan memotivasi serta mengapresiasi insan individu, kelompok, maupun instansi dalam berkontribusi menjaga dan memajukan lingkungan hidup. Adapun penghargaan lingkungan hidup ini terdiri dari Penghargaan Adipura dan Penghargaan Adiwiyata.

Penghargaan Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Sementara itu, Penghargaan Adiwiyata merupakan penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup melalui penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah dan berhasil meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah, lingkungan sekitarnya, dan daerah.

Untuk Penghargaan Adipura, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengikut pada surat dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk tahun 2020 ditiadakan penilaian karena adanya covid-19. Tahun 2021 target pemberian Penghargaan Adiwiyata 15 sekolah namun hanya satu sekolah saja yang siap untuk mengikuti penilaian, hal ini disebabkan oleh terlambatnya penerbitan surat terkait penilaian Penghargaan Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup yakni bulan Nopember 2021. Di tahun 2022, angka ini mengalami kenaikan menjadi 2 sekolah. Tahun 2023, Kabupaten Sidenreng berhasil melakukan penghargaan adipura sebanyak 1 kali namun tidak ada Penghargaan Adiwiyata. Di tahun 2024 tidak ada penghargaan adipura, namun terdapat 5 sekolah dengan penghargaan Adiwiyata.

Grafik 2.151
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Adipura) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

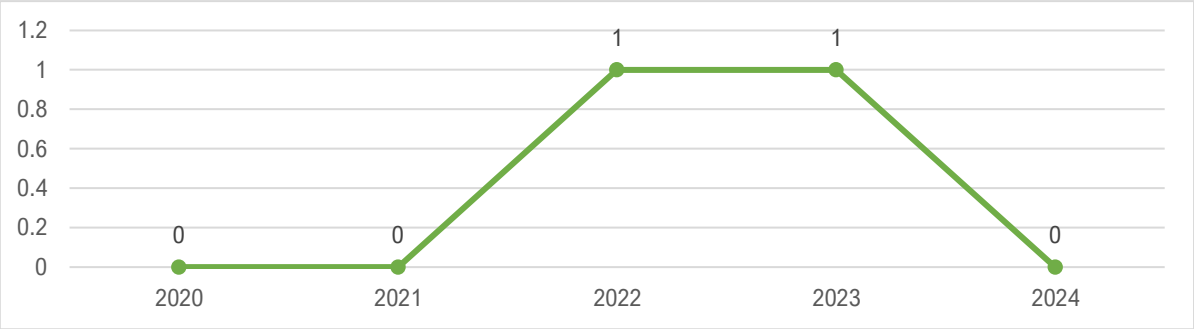

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

h. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Pengaduan masyarakat terkait izin tersebut cenderung masih mengalami fluktuasi sepanjang 2020-2024. Adapun pada tahun 2020, terdapat 46 aduan masyarakat terkait izin lingkungan, jumlah ini kemudian meningkat menjadi 66 aduan pada tahun 2021, dan meningkat signifikan pada tahun 2022 dan 2023 dengan jumlah aduan masing-masing sebesar 86 dan 90 aduan. Sayangnya, di tahun 2024 sedikit menurun di angka 80. Ini menandakan adanya penurunan informasi pengaduan masyarakat kepada Pemda (Dinas Lingkungan Hidup) tentang masalah lingkungan hidup.

Grafik 2.152
Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

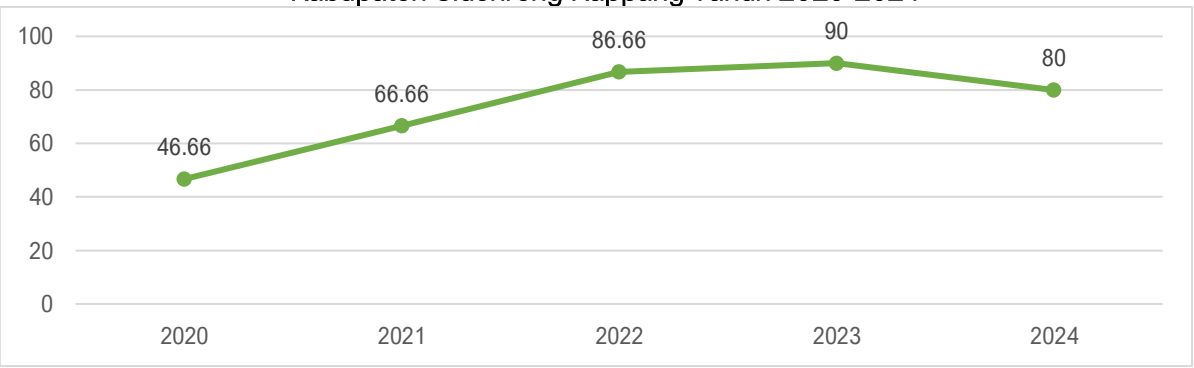

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

i. Timbulan Sampah yang Ditangani

Sampah selalu menjadi persoalan klasik yang muncul sebagai akibat dari adanya residual dari berbagai kegiatan individu maupun kelompok. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk mengurangi sampah melalui berbagai program dan himbauan guna menciptakan lingkungan yang asri, bersih, dan nyaman. Sepanjang tahun 2020-2024, jumlah timbulan sampah yang ditangani mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase sampah yang ditangani mencapai 50,07 persen, dan meningkat signifikan hingga 74 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023,

mencatat penurunan tajam menjadi 47,80 persen sebelum kembali meningkat hingga mencapai 80 persen pada tahun 2024.

Fluktuasi ini mengindikasikan perlunya peningkatan sarana dan prasarana, optimalisasi penerapan program 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), serta pengembangan teknologi dan keterampilan sumber daya manusia di bidang pengelolaan sampah.

Grafik 2.153
Timbulan Sampah yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

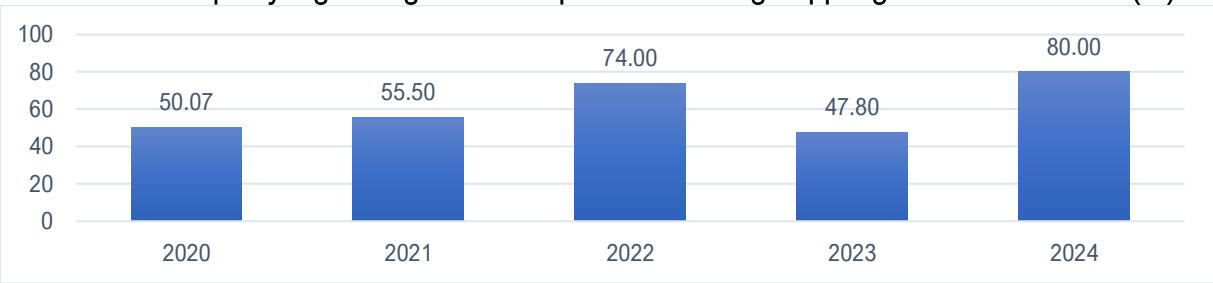

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

j. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangan Melalui 3R

Dalam upaya mengurangi jumlah sampah, program 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) terus dioptimalkan untuk meminimalisir limbah kotor. Persentase capaian pengelolaan sampah melalui program 3R menunjukkan tren fluktuatif sepanjang tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, capaian pengelolaan sampah melalui program 3R mencapai 17.83 persen. Persentase ini meningkat pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing mencapai 19,45 persen dan 24 persen. Sayangnya, capaian ini kembali menurun menjadi 19,63 persen pada tahun 2023 dan 19,18 persen di tahun 2024. Dalam rangka mengurangi jumlah sampah yang ada, program 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) terus dioptimalkan sehingga persoalan sampah yang cenderung menghasilkan limbah kotor dapat diminimalisir.

Grafik 2.154
Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

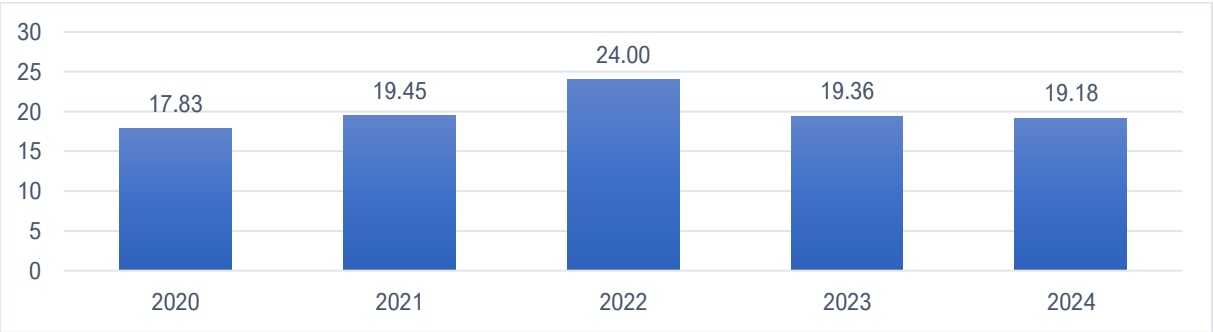

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

k. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Cakupan area dalam melayani pengelolaan sampah masih belum mencapai hasil yang optimal. Pada tahun 2020, cakupan area layanan pengelolaan sampah mencapai 67,9 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga mencapai 74,5 persen.

Namun, di tahun berikutnya, cakupan area layanan kembali menurun menjadi 67,90 persen. Angka ini konsisten hingga tahun 2024. Capaian ini masih jauh dari target 100 persen. Faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya cakupan area layanan adalah masih kurangnya armada pengangkutan sampah yang tersedia.

Grafik 2.155
Cakupan Area Pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

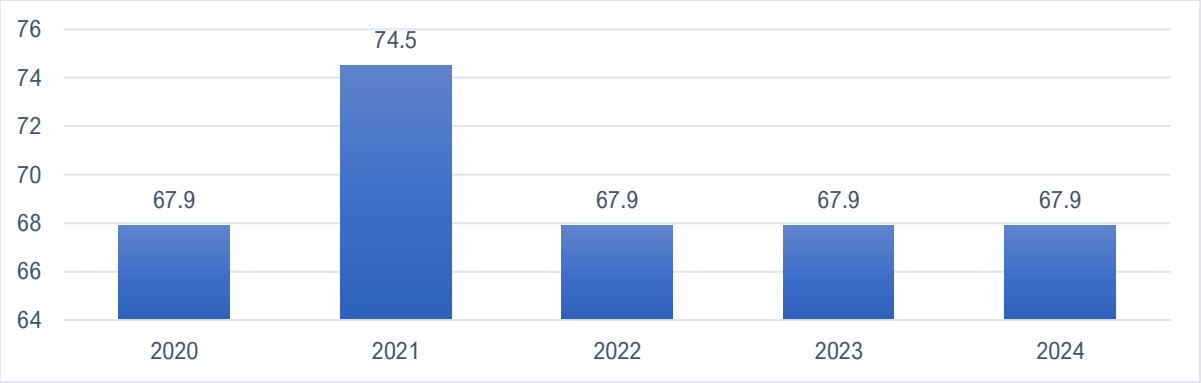

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

l. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Jumlah sampah yang tertangani masih cukup rendah pada tahun 2020 yakni 50,07 persen, terus mengalami kenaikan hingga mencapai 74 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah sampah yang tertangani kembali mengalami penurunan signifikan menjadi 55,58 persen. Dan terus menurun di tahun 2024 menjadi hanya 54,97 persen sampah yang tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun kendala yang menyebabkan capaian yang belum maksimal adalah karena masih kurangnya armada pelayanan pengangkutan sampah dan aktifitas masyarakat yang padat.

Grafik 2.156
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

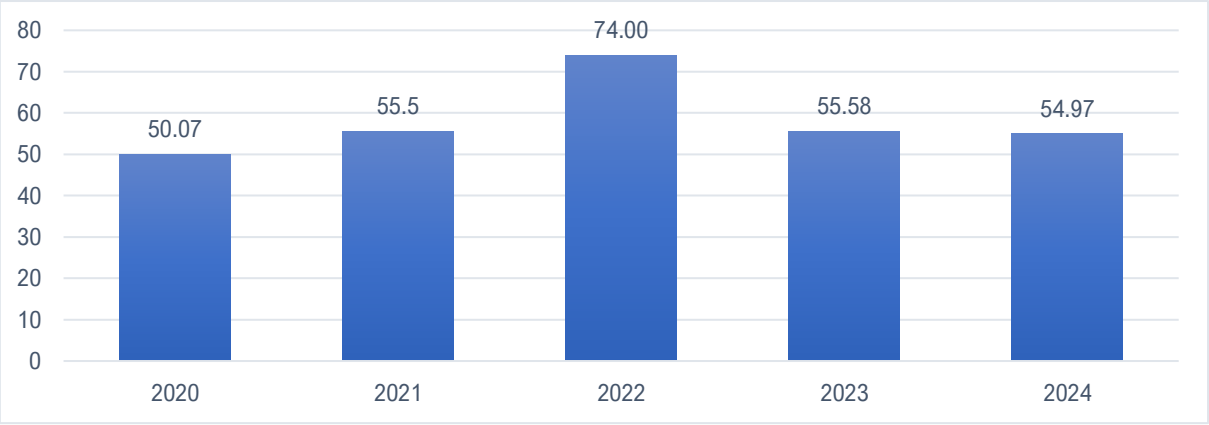

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

m. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Tempat pembuangan sampah menjadi sangat penting untuk pengelolaan sampah akhir secara terpadu yang terkumpul dari berbagai tempat dan menjadi salah satu aspek

penilaian piala adipura sudah sesuai dengan program. Untuk mendapatkan piala adipura, nilainya harus lebih besar atau sama dengan 71. Di tahun 2020, nilai Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai nilai TPA 71 sehingga mendapatkan piala adipura. Nilai ini konsisten bertahan di tahun berikutnya hingga naik menjadi 80 di tahun 2022. Namun di tahun 2023 dan 2024, kembali menurun dengan nilai TPA 74 dan 71.

Grafik 2.157
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

6. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

a. Persentase Penduduk Ber-KTP

Dokumen administrasi kependudukan seperti KTP harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tanpa adanya dokumen ini, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menggunakan berbagai layanan publik seperti kesehatan, perbankan, pendidikan dan lainnya.

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Sidenreng Rappang telah menunjukkan tren yang stabil dalam persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada tahun 2020, persentase penduduk yang ber-KTP tercatat sebesar 99,92 persen. Mengalami peningkatan menjadi 100 persen pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 menurun menjadi 99,9 persen. Pada tahun 2023, persentase tersebut kembali sedikit menurun menjadi 99,31 persen, dan meningkat sedikit pada tahun 2024 menjadi 99,48 persen, yang berarti bahwa masih ada 0,52 persen penduduk yang belum memiliki KTP.

Grafik 2.158
Persentase Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

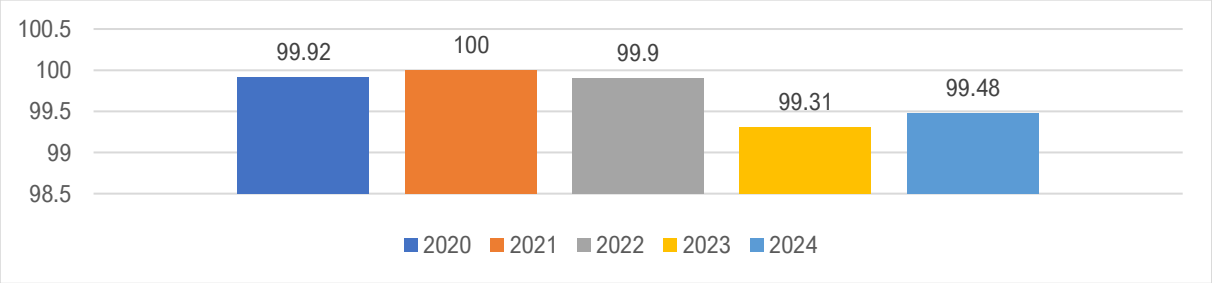

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

b. Persentase Penduduk Umur 0 – 17 tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Akta kelahiran digunakan untuk menghitung banyaknya bayi yang memiliki akta kelahiran sebelum melewati masa umur yang dianggap sebagai anak dan dapat memasuki dunia kerja maupun usia pernikahan. Kepemilikan akta tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dan jaminan sosial serta pelayanan masyarakat. Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

Selama lima tahun terakhir, persentase penduduk usia 0-17 tahun berakta kelahiran di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, persentase penduduk 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran tercatat sebesar 87,09 persen. Angka ini meningkat secara konsisten setiap tahunnya, dan mencapai 95,46 persen pada tahun 2024. Hal ini berarti dari setiap 100 bayi yang baru lahir, 95 orang diantaranya sudah memiliki akta kelahiran. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya pendataan dan pembuatan dokumen resmi penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.60
Presentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran	%	87,09	98,00	93,03	95,56	95,46

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

c. Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran

Sama halnya KTP, semua warga negara yang lahir dan memenuhi syarat seharusnya semuanya telah mendapatkan akta kelahiran. Namun, faktanya masih ada bayi lahir di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa akta kelahiran. Tahun 2020 penduduk yang memilki akta kelahiran hanya 48,93 persen. Di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 53,05

persen. Meningkat kembali menjadi 53,05 persen di tahun 2021, namun kemudian kembali mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 51,99 persen, dan tahun 2023, meningkat menjadi 56 persen. Puncaknya di tahun 2024, tingkat penduduk yang memiliki akta kelahiran kembali meningkat pesat menjadi 95,46 persen. Dari data tersebut, terlihat bahwa usaha pemerintah dalam percepatan perekaman data telah memberikan hasil yang signifikan.

Grafik 2.159
Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2020-2024

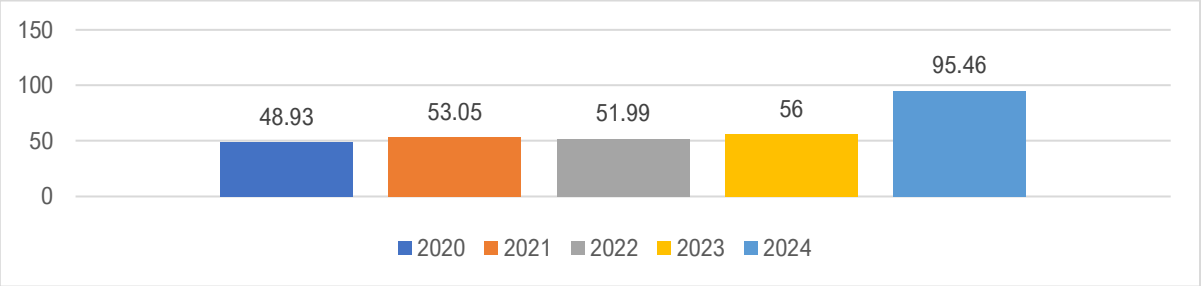

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

a. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas pelayanan publik di wilayah pedesaan. Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran yang didukung dari sumber daya manusia serta kelembagaan yang baik, diharapkan dapat menjadi motor penggerak perbaikan pelayanan di wilayah perdesaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam lima tahun terakhir, cakupan sarana dan prasarana perkantoran desa mencatatkan capaian yang baik yaitu 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah memiliki sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan berkondisi baik.

b. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, PKK merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan yang menjadi mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Adapun rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2020-2024 adalah 106 kelompok. Hal ini berarti secara rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalami perkembangan selama lima tahun terakhir.

c. Persentase PKK Aktif

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK, hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri dan harmonis serta mempunyai peran dalam mengembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Dari tahun 2020-2024, seluruh PKK di Kabupaten Sidenreng Rappang aktif melakukan kegiatan keorganisasiannya. Hal ini ditunjukkan oleh persentase PKK yang aktif mencatatkan angka 100 persen. Ini menjelaskan bahwa perempuan aktif dalam mengekspresikan kemampuannya dalam memimpin organisasi, menjalin hubungan sosial sesama anggota, berkreatif dan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

d. Persentase Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat di desa/kelurahan dan dikelola oleh Pengelola Posyandu, yang dikukuhkan dengan keputusan kepala desa/lurah. Pada tahun 2020-2024, persentase posyandu yang aktif telah mencapai angka 100 persen.

8. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) merupakan istilah yang digunakan di bidang demografi untuk menggambarkan jumlah rata-rata anak yang akan terlahir dari seorang wanita sepanjang hidupnya bila ia akan mengalami tingkat kesuburan spesifik usia terkini yang pasti dan ia akan selamat dari kelahiran sepanjang usia reproduktifnya. TFR di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pola yang sejalan dengan tren pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TFR sebesar 2,13 persen. Namun di tahun 2021 turun menjadi 2,08. Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 2,19 persen. TFR kembali menurun pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 2,12 dan 2,07 persen, sebelum akhirnya mengalami penurunan kembali.

Grafik 2.160
Total Fertility Rate Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (%)

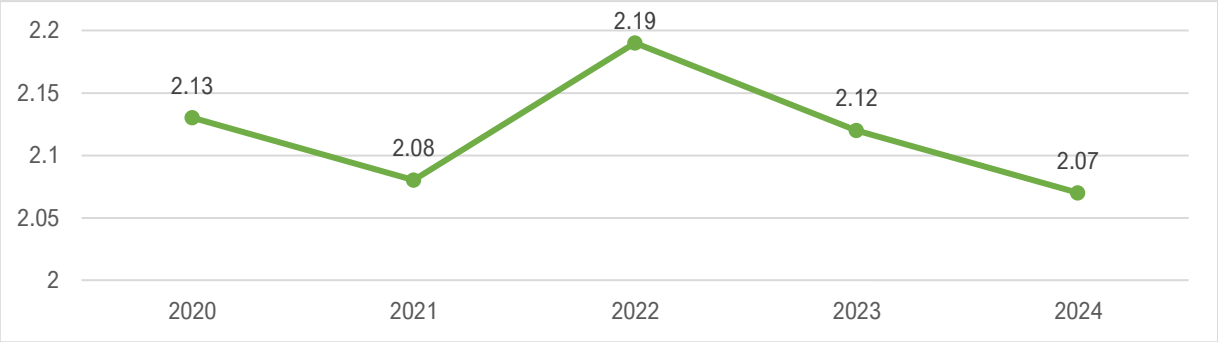

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

b. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, NonFormal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Selain aspek koordinasi, regulasi, dan peran sektoral, peran penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan juga diperlukan untuk mendukung pengendalian penduduk.

Dari Tahun 2020-2024, jumlah kerjasama penyelengaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan rata-rata sebesar 427. Dalam lima tahun tersebut, jumlah kerjasama tersebut tidak mengalami perubahan, hal ini mengindikasikan masih banyak sekolah siaga kependudukan (SSK) yang belum aktif.

c. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah sanak per keluarga di di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung terkendali. Capaian ini ditunjukkan melalui rata-rata jumlah anak sepanjang tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, rata-rata jumlah anak per keluarga sebesar 2,13, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 1,6 di tahun 2024. Capaian ini masih sedikit lebih tinggi dibanding dengan target yang ditentukan sebesar 2 anak.

Grafik 2.161
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

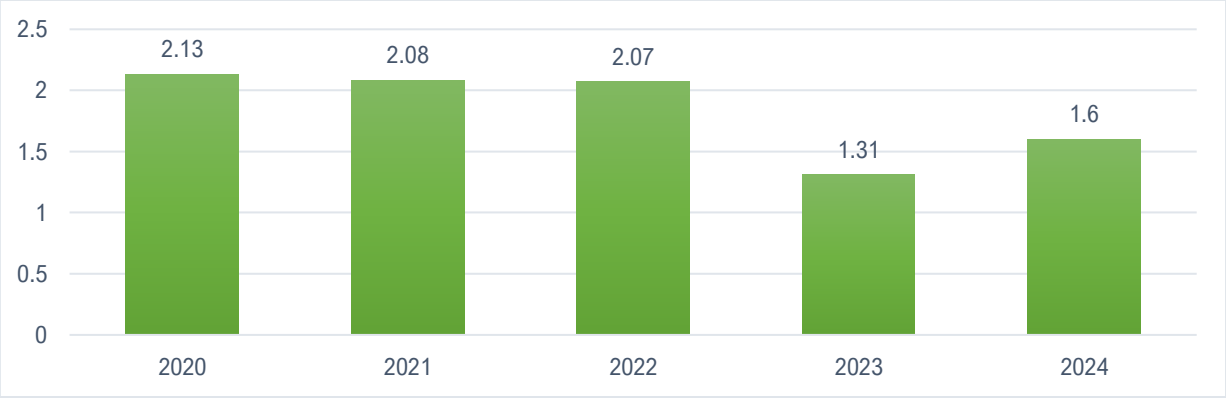

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

d. Ratio Akseptor KB

Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti program gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB menurut sasarannya terbagi

menjadi tiga fase yaitu fase menunda atau mencegah, fase penjarangan kehamilan, dan fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan.

Dalam lima tahun terakhir, rasio akseptor KB di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio akseptor KB mencatatkan angka 55,84 persen, lalu mengalami tren peningkatan hingga mencapai 68,98 di tahun 2024. Capaian ini masih rendah dibanding dengan target yang telah ditentukan sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan masih kurangnya partisipasi pasangan usia subur untuk ber-KB terutama laki-laki di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.162
Ratio Akseptor KB di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

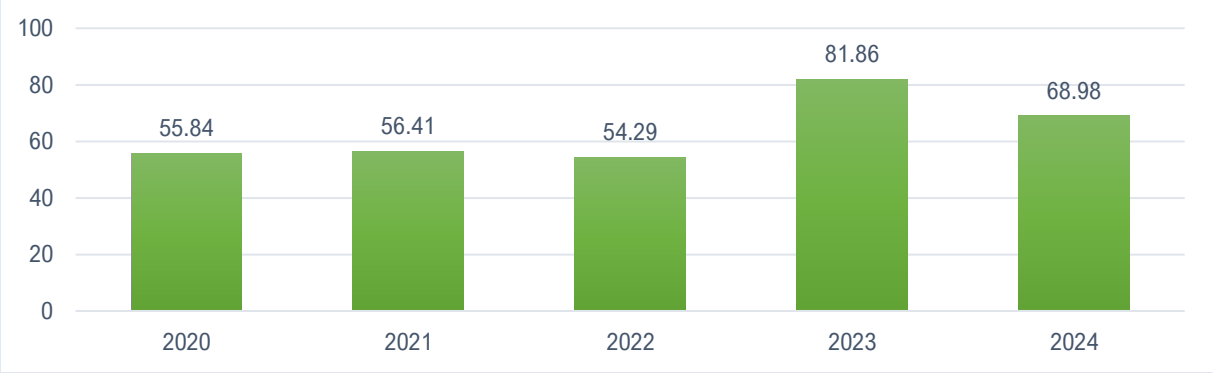

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

e. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagu Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Kontrasepsi merupakan salah satu upaya pengaturan kelahiran melalui metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya, perencanaan, pembekalan, dan penggunaan kontrasepsi disebut sebagai keluarga berencana.

Grafik 2.163
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49
Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (%)

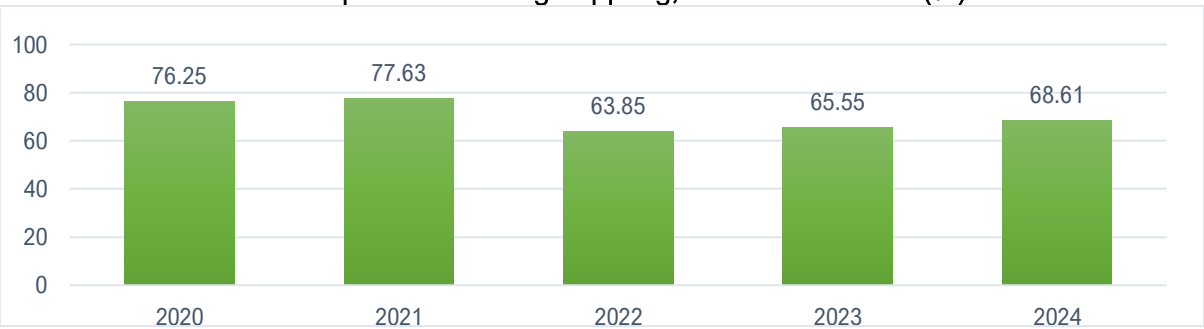

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Dalam lima tahun terakhir, angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 menunjukkan tren penurunan, sebesar 76,25 persen di tahun 2020 menjadi 68,61 persen di tahun 2024. Angka ini belum mencapai target yang ditentukan sebesar 80,00 persen. Jumlah pemakai kontrasepsi/CPR diharapkan akan semakin

meningkat sehingga akan berdampak terhadap pengendalian penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

f. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 – 19) per 1.000 Perempuan Usia 15 – 19 Tahun (AFR 15 – 19)

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 yang dipublikasikan tahun 2018 memperlihatkan, jumlah kelahiran remaja di Indonesia masih di angka 36 per 1.000 kelahiran. Artinya, dari 1.000 perempuan yang melahirkan, 36 di antaranya berusia di bawah 19 tahun. Perkawinan dini menyumbang tingginya kelahiran pada remaja, dan angka stunting atau balita pendek akibat gizi kronis. Angka kelahiran remaja di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2020, angka kelahiran remaja tercatat sebesar 42 per 1000 kelahiran, mengalami penurunan hingga mencapai 37 kelahiran per 10000 kelahiran di tahun 2024. Masih diperlukan sosialisasi tentang risiko perkawinan dini dan melahirkan di usia remaja masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kemampuan merencanakan masa depan termasuk saat berkeluarga, hamil, dan mengurus anak juga perlu disosialisasikan.

Grafik 2.164
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

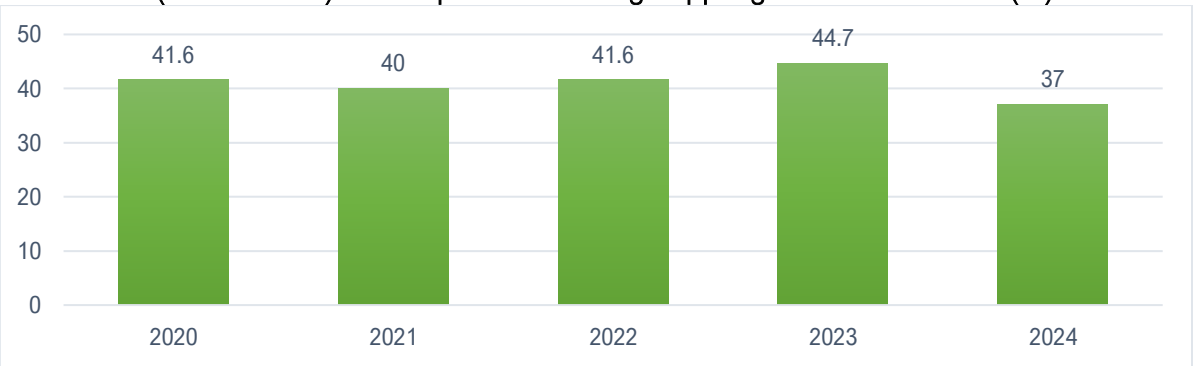

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

g. Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi atau yang lebih dikenal melalui istilah *Unmet Need* merupakan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kondisi mengindikasikan keinginan PUS terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi.

Grafik 2.165
Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi *(Unmet Need)* Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

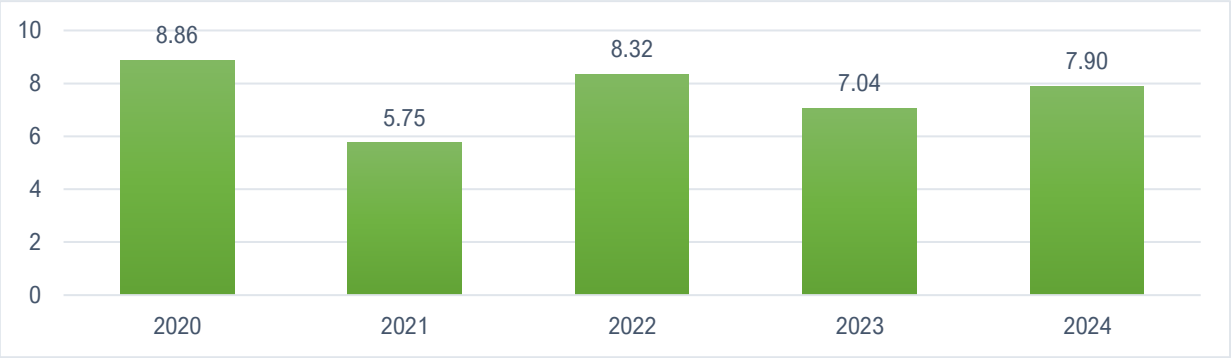

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Dalam lima tahun terakhir, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi menunjukkan tren fluktuatif. Walaupun begitu, trennya menurun dari 8,86 persen di tahun 2020 menjadi 7,90 persen di tahun 2024. Ini mengindikasikan masih kurangnya fasilitas KB yang tersedia.

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, MKJP lebih rasional dan mempunyai efek samping lebih sedikit.

Adapun persentase penggunaan MKJP di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dari 14,66 persen di tahun 2020, naik menjadi 24,55 persen di tahun 2021 kemudian mengalami penurunan kembali menjadi 10,4 persen di tahun 2023, dan naik signifikan di tahun 2024 menjadi 68,98.

Grafik 2.166
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

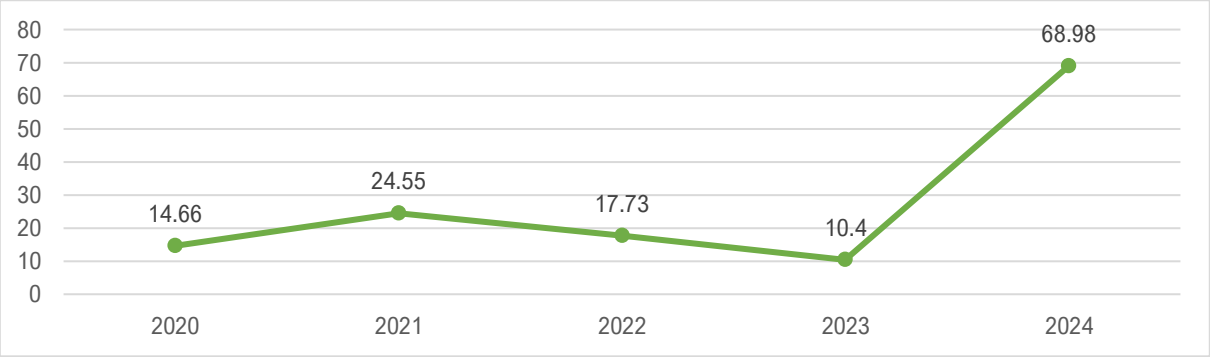

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

h. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi menjadi indikator pengendalian penduduk dari sisi pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat tertentu. Semakin tinggi tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi diharapkan akan semakin mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang.

Grafik 2.167
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

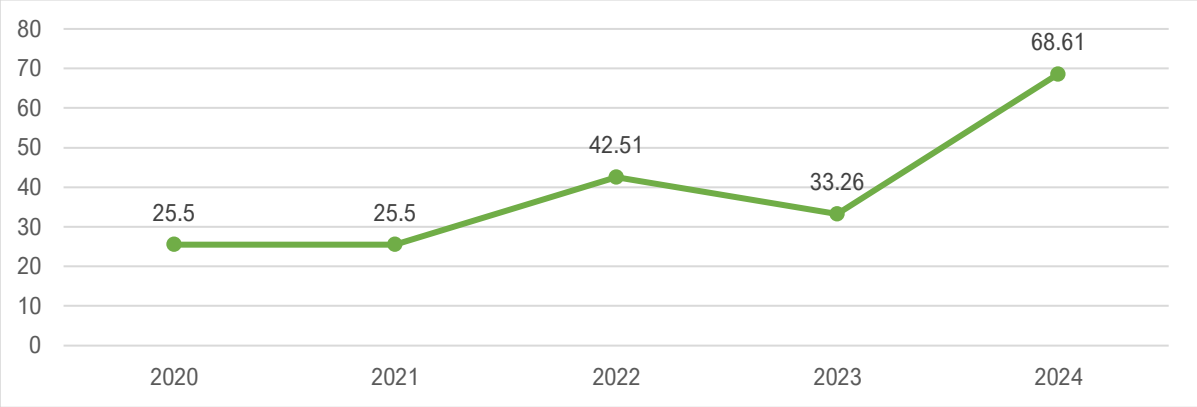

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

i. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

BKB adalah kegiatan khusus yang mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur yang dilakukan oleh sejumlah kader. BKB menyasar dalam peningkatan pengetahuan serta keterampilan dalam mengasuh anak. Secara umum, seluruh jumlah anggota kelompok BKB di Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan KB. Hal ini ditunjukkan oleh angka cakupan anggota BKB yang ber-KB dari tahun 2020-2024 mencatatkan angka 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan anggota terkait dengan pengendalian penduduk.

j. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

BKR merupakan program yang ditujukan bagi keluarga yang memiliki anak remaja sebagai wadah dan sumber informasi bagi orangtua untuk memperoleh pengetahuan tentang remaja. BKR menjadi salah satu indikator penting terutama bagi pendidikan dan pengetahuan orang tua yang memiliki anak remaja. Secara umum, seluruh jumlah anggota kelompok BKR di Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan KB. Hal ini ditunjukkan oleh angka cakupan anggota BKR yang ber-KB tercatat sebesar 100 persen pada tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan peningkatan pengetahuan anggota BKR terkait dengan pengendalian penduduk.

k. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah Kelompok Kegiatan Keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia, dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Sama halnya dengan BKB dan BKR, anggota BKL di Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan melakukan KB. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan BKL yang ber-KB mencatatkan angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok Bina

Keluarga yang dibentuk di Kabupaten Sidenreng Rappang mampu meningkatkan pengetahuan anggotanya terkait pentingnya KB untuk pengendalian penduduk.

l. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

PPKS merupakan wadah kegiatan untuk memberikan pelayanan keluarga melalui pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), konseling, bimbingan dan fasilitasi pembentukan wadah KIE dan konseling langsung pada keluarga yang berbasis untuk menuju keluarga berkualitas.

Adapun (PPKS) di setiap kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang 2020-2024 masih mencapai 1 tempat saja. Ke depan, PPKS harus didorong untuk lebih banyak sehingga akan semakin banyak keluarga terlayani KIE dan konseling dan pada akhirnya akan berdampak terhadap pembangunan keluarga yang berkualitas.

m. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (IPPKS) yang ber-KB Mandiri

UPPKS merupakan kelompok usaha ekonomi produtif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera baik pasangan usia subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan. Adapun cakupan sebagaimana dimaksud di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2020-2024 mencatatkan angka 100 persen. Artinya seluruh anggota UPPKS melakukan KB secara mandiri selama lima tahun terakhir.

n. Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

PPKBD adalah merupakan perpanjangan tangan dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam menyampaikan informasi ke masyarakat luas. PPKBD adalah kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program KB di tingkat desa atau kelurahan. Adapun rasio petugas PPKBD di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2020-2024 tercatat sebesar 103,7 atau 104. Artinya dari total desa atau kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 104 PPKBD yang tersebar.

o. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Fasilitas kesehatan adalah fasilitas yang disiapkan kepada masyarakat untuk berobat. Adapun persentase faskes dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan menunjukkan tren meningkat dalam lima tahun terakhir. Selama periode tahun 2020-2024 persentase faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai angka 100 persen.

Capaian di tahun 2024 sudah memenuhi target yang ditentukan sebesar 100 persen. Artinya jejaring faskes sudah semuanya bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan.

p. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara usia kawin pertama (UKP) dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Dalam lima tahun terakhir rata-rata UKP wanita di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 20 tahun. Artinya rata-rata penduduk menikah di Kabupaten Sidenreng Rappang saat berusia 20 tahun. UKP berhubungan terbalik dengan jumlah kelahiran, UKP yang semakin rendah mengindikasikan tingkat fertilitas yang tinggi.

9. Urusan Perhubungan

a. Rasio Ijin Trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Rasio ijin trayek menunjukkan perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2020 rasio ijin trayek tercatat sebesar 0,14, kemudian menurun menjadi 0,06 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 0,17, tetapi kembali turun 0,104 di tahun 2023. Penurunan ijin trayek berlanjut pada tahun 2024 menjadi 0,03, terendah dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang semakin pesat menjadi sebab kurangnya penumpang yang berdampak pada semakin berkurangnya armada angkutan umum.

Grafik 2.168
Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

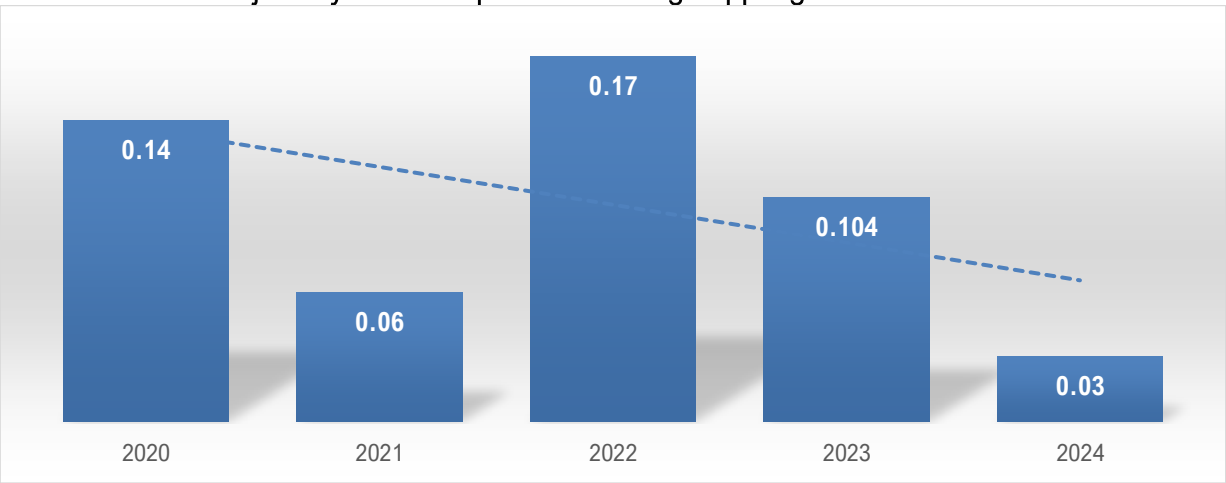

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

b. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Setiap mobil berpenumpang umum, bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan diharuskan melakukan dua pengujian yaitu uji tipe dan uji KIR atau dikenal dengan istilah uji berkala. Tujuannya adalah agar kendaraan yang dimaksud tersebut bisa berfungsi dengan baik ketika dijalan sehingga mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keharusan untuk melakukan uji berkala tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan Permenhub No. 133 tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Uji Kir yang dimaksud adalah pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor dan pengesahan hasil uji dilakukan sekali dalam enam bulan.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah kendaraan umum yang melakukan Uji KIR di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktuasi. Tahun 2020 sebanyak 3.477 kendaraan umum telah melakukan pengujian. Tapi setahun kemudian pada tahun 2020 tidak ada kendaraan yang melakukan uji KIR dikarenakan UPT PKB Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi standar pengujian berintegrasi atau terakreditasi. Namun pada tahun 2021 jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR sebanyak 3.373 kendaraan walaupun pada dasarnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor terakreditasi baru mulai pada bulan Mei. Di tahun 2022, angka ini kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 4000 kendaraan yang di uji KIR. Tahun 2023, jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR hanya sebanyak 2.250 kendaraan, dan penurunan berlanjut pada tahun 2024 dengan hanya 1882 kendaraan. Penurunan yang terjadi selama 5 tahun kecuali pada tahun 2022 tidak dapat langsung disimpulkan bahwa terjadi penurunan kendaraan Uji KIR, tetapi dapat juga disebabkan karena jumlah kendaraan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang yang ingin mengurus baru atau memperpanjang Uji KIR memang berkurang. Di samping itu penurunan kendaraan yang melakukan Uji KIR juga dapat dipengaruhi oleh telah terakreditasinya tempat Uji KIR di masing-masing kabupaten tetangga.

Grafik 2.169
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Kendaraan)

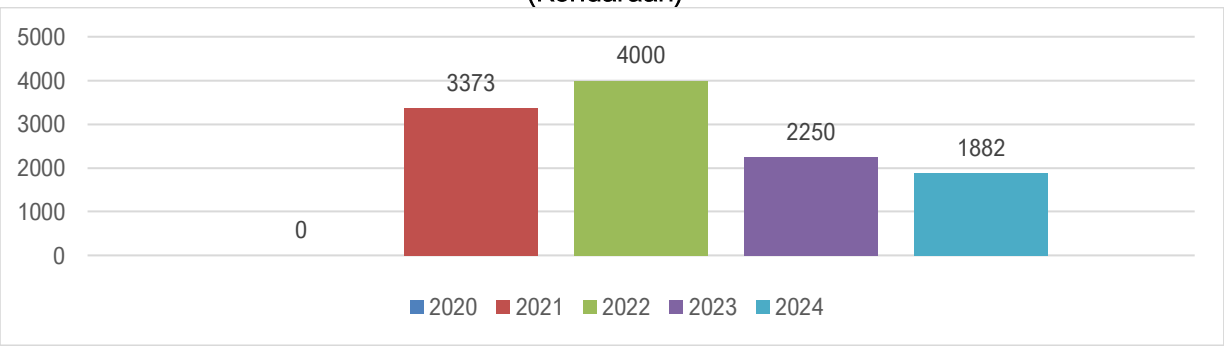

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

c. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Selain jalan, berbagai infrastruktur dasar juga dibutuhkan untuk memperlancar perpindahan barang dan manusia seperti pelabuhan laut, bandar udara, dan terminal bus. Perpindahan barang dan manusia merupakan parameter penting untuk melihat intensitas perdagangan dan aktivitas ekonomi disebuah daerah. Itu sebabnya daerah yang aktivitas ekonominya sangat pada (seperti misalnya Kota Makassar) pasti memiliki infrastruktur pendukung tersebut.

Berbeda dengan Kota Makassar yang memang merupakan pusat kegiatan ekonomi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan intensitas kegiatan ekonominya masih relatif rendah tidak memiliki semua infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan bandar udara. Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memiliki satu terminal bus dan jumlahnya tidak pernah berubah dalam lima tahun terakhir. Ini mengidikasikan bahwa perpindahan barang dari luar daerah ke Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengandalkan beberapa pelabuhan yang ada di daerah lain atau bandara yang berada di Kota Makassar.

d. Persentase Layanan Angkutan Darat

Pertumbuhan penduduk yang pesat membawa banyak implikasi terhadap banyak sektor, salah satunya transportasi. Transportasi merupakan instrumen fundamental untuk mendukung mobilitas penduduk, terutama mendukung kegiatan ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk dan struktur demografi harusnya berdampak pada penyesuaian terhadap moda transportasi. Misalnya di Kota Makassar, dengan jumlah penduduk yang banyak dan sebagian besar adalah usia produktif tidak lagi relevan menggunakan moda transportasi lama (misalnya angkot), mereka membutuhkan layanan transportasi yang cepat seperti transportasi online. Melihat struktur demografi dan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang, seharusnya sudah terlihat penyesuaian.

Penyesuaian paling utama setidaknya adalah penambahan moda transportasi umum untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Namun sepertinya penyesuain tersebut belum begitu terlihat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun terakhir angka persentase layanan angkutan darat di kabupaten ini memperlihatkan fluktuasi yang signifikan. Tahun 2020 persentase layanan angkutan darat sebesar hanya sebesar 5,97 dan meningkat menjadi 65,58 persen di tahun 2021 dan 50,61 persen di tahun 2022. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk/penumpang di Kabupaten Sidenreng Rappang hanya tersedia angkutan darat sebanyak 5 unit, menggambarkan bahwa cakupan layanan angkutan darat di daerah ini masih sangat terbatas. Namun di tahun 2023, mengalami penurunan drastis menjadi 5,76 persen, dan sedikit meningkat di tahun 2024 dengan 6,08 persen. Sarana dan prasarana tansportasi yang tersedia tidak

mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat akan transportasi. Jika kondisi ini dibiarkan, maka mobilitas penduduk pasti terhambat.

Grafik 2.170
Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

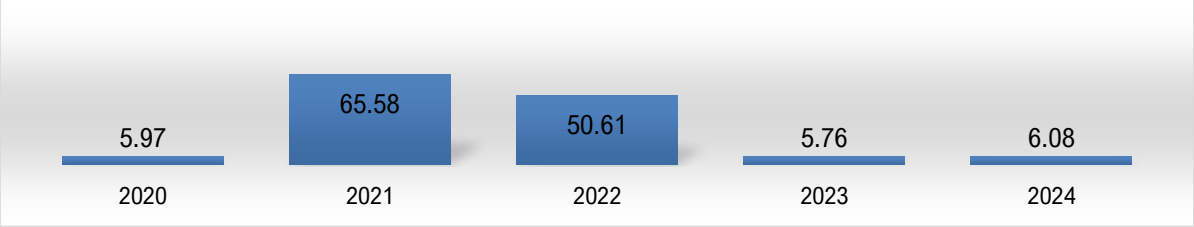

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

e. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Penurunan jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR pada bagian sebelumnya tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai ketaatan pemilik kendaraan dalam melakukan Uji Kir. Indikator tersebut harus dilengkapi dengan indikator persentase kepemilikan Kir angkutan umum, merupakan persentase kepemilikan Kir terhadap total kendaraan umum.

Tahun 2020, tidak terlaksananya pelayanan uji berkala karena UPT PKB Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi standar pengujian berintegrasi atau terakreditasi sehingga tidak ada pelayanan uji KIR atau dengan kata lain persentase kepemilikan untuk tahun 2020 adalah 0 persen. Baru di tahun 2021 setelah pengujian kendaraan terakreditasi persentase kepemilikan KIR angkutan umum meningkat kembali menjadi 97,28 persen dan mengalami penurunan kembali menjadi 95,35 persen di tahun 2022. Pada tahun 2023 persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum semakin mengalami penurunan menjadi 56,25 persen, dan berlanjut tahun 2024 yang hanya 47,05 persen.

Grafik 2.171
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020 - 2024

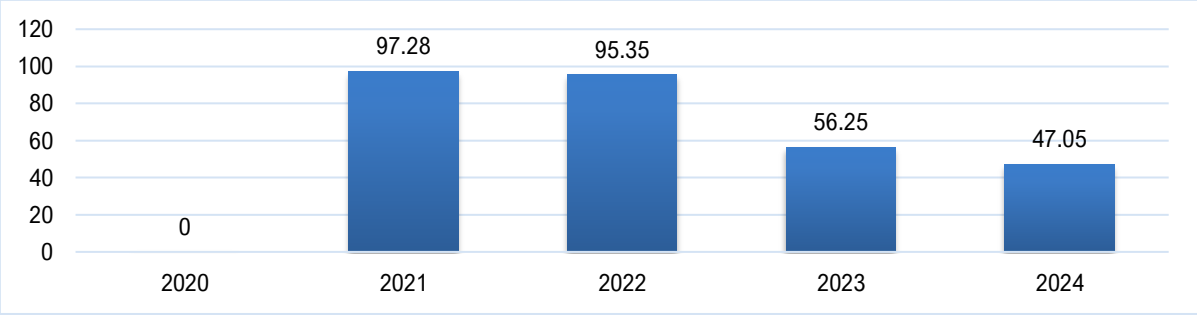

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

f. Pemasangan Rambu – Rambu

Pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan bertujuan untuk memudahkan dan mengefektifkan dalam mengatur arus lalu lintas. Karena pemasangan rambu yang tepat dapat membantu para pengguna jalan yang mematuhi rambu-rambu yang berada di

bagian atau sudut jalan agar lalu lintas menjadi tertib. Selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan 2024, tidak ada pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini karena kondisi *existing* rambu lalu lintas yang terpasang saat ini banyak yang rusak karena sudah melebihi umur teknis.

g. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan menunjukkan perbandingan antara jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Dari tahun 2020 hingga 2024 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tercatat sebesar 1,6 persen, namun mengalami penurunan menjadi 0,97 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan kembali mengalami peningkatan menjadi 1,44 persen disebabkan oleh voulem kendaraan yang meningkat disetiap tahun yang tidak diimbangi dengan kapasitas jalan yang tersedia. Pada tahun 2024 lagi-lagi mengalami penurunan di angka 0,9 persen.

Grafik 2.172
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

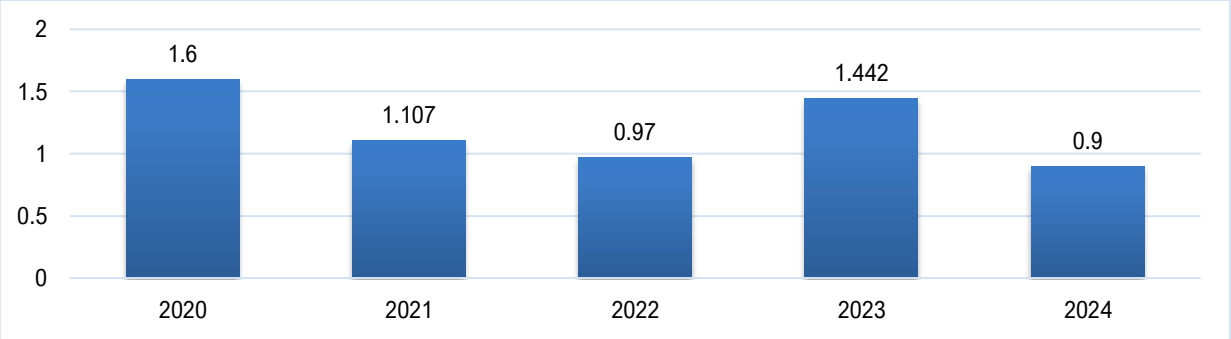

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

h. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Kondisi geografis Kabupaten Sidenreng Rappang yang di dominasi oleh daratan, berimplikasi pada pemanfatan moda transportasi. Hampir semua manusia dan barang Sidenreng Rappang berpindah dengan memanfaatkan angkutan umum. Data menunjukkan, bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah orang/barang yang terangkut oleh angkutan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren menurun. Tahun 2020, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tercatat sebesar 17,000unit dan

mengalami peningkatan menjadi 27.000 unit di tahun 2022. Namun pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum menjadi 18.739 dan 16,530 unit. Hal ini menunjukkan sarana dan prasarana transportasi yang tersedia tidak mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat akan transportasi dan semakin berkurangnya penggunaan angkutan umum karena pelayanannya yang dirasakan kurang memuaskan bagi para penumpang.

Grafik 2.173
Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

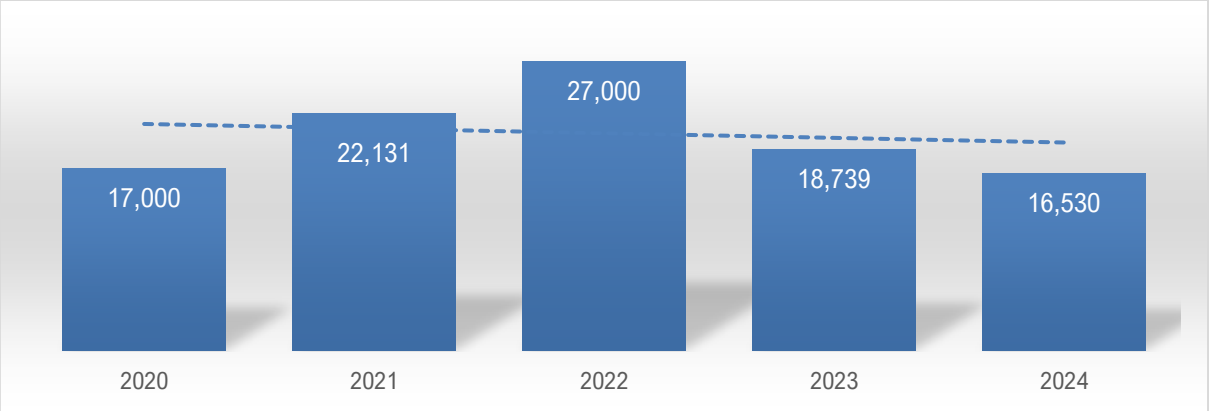

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

10. Urusan Komunikasi Dan Informatika

a. Cakupan Pengembangan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kebutuhan informasi saat ini menjadi kebutuhan umum masyarakat selain kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Informasi yang baik akan meningkatkan pola pikir masyarakat untuk bergerak aktif terutama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan perkembangan masyarakat serta upaya memberdayakannya melalui jejaring informasi yang akurat. KIM merupakan lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Adapun cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di Kabupaten Sidenreng Rappang terus mengalami perbaikan cakupan KIM mencapai 100 persen pada tahun 2020 hingga tahun 2024 yang mengindikasikan pengembangan dan pemberdayaan KIM telah mencapai target yang optimal.

b. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Penyebaran informasi yang aktual dan akurat tidak akan terjadi tanpa adanya cakupan layanan telekomunikasi yang memadai. Berbagai kebijakan yang mendukung perluasan

layanan komunikasi dilakukan untuk memastikan semua kalangan masyarakat dapat mengakses informasi sehingga akan mendorong masyarakat yang aktif dan partisipatif.

Adapun capaian cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2019-2023. Secara spesifik, mulai pada tahun 2019 cakupan layanan telekomunikasi mencapai 71,47 persen, kemudian terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 78,15 persen pada tahun 2023. Cakupan layanan komunikasi yang terus mengalami peningkatan, disebabkan adanya penambahan infrastruktur telekomonikasi sehingga hal ini dapat menambah luas jangkauan.

Grafik 2.174
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 (%)

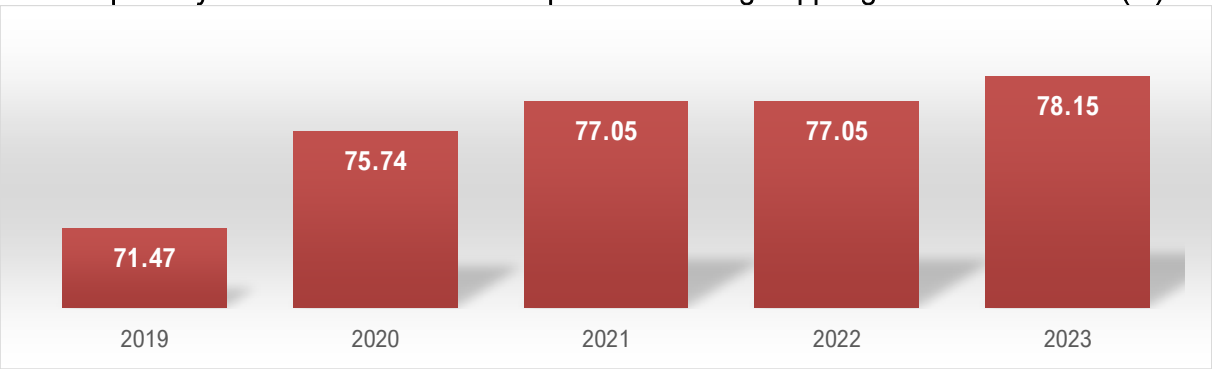

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2024

c. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Perkembangan Informasi harus dibarengi dengan sarana prasarana yang memadai terutama akses internet. Lebih jauh, internet menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat yang sekarang bergantung pada akses informasi melalui HP/Telepon. Adanya internet akan memperkuat cakupan informasi kepada setiap lapisan masyarakat.

Namun demikian, proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami tren fluktuatif, dari 82,89 persen di tahun 2020, naik pada tahun 2021 menjadi 91,66 persen. Tahun 2022 menurun menjadi 87,82 persen sebelum kembali naik di tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 88,26 persen dan 88,91 persen.

Grafik 2.175
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (%)

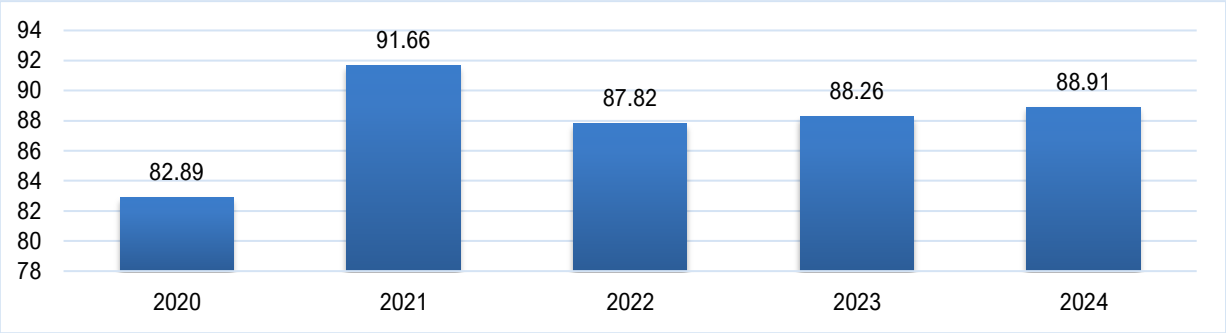

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

d. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Selain media HP/Telepon dan televisi, komputer juga menjadi salah satu kebutuhan penting di era digital seperti saat ini. Hampir semua jenis pekerjaan pada membutuhkan komputer sebagai penunjang utamanya. Namun demikian, dibandingkan dengan HP/Telepon maka komputer pribadi relatif masih lebih mahal sehingga belum banyak masyarakat yang mampu menjangkaunya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2020-2024 sudah cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi mencapai 82.89 persen, kemudian naik signifikan di tahun 2021 menjadi 91.66 persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 97,82 persen. Pada dua tahun berikutnya yaitu tahun 2023 dan 2024, sedikit meningkat menjadi 88,26 dan 88,91 persen.

Grafik 2.176
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

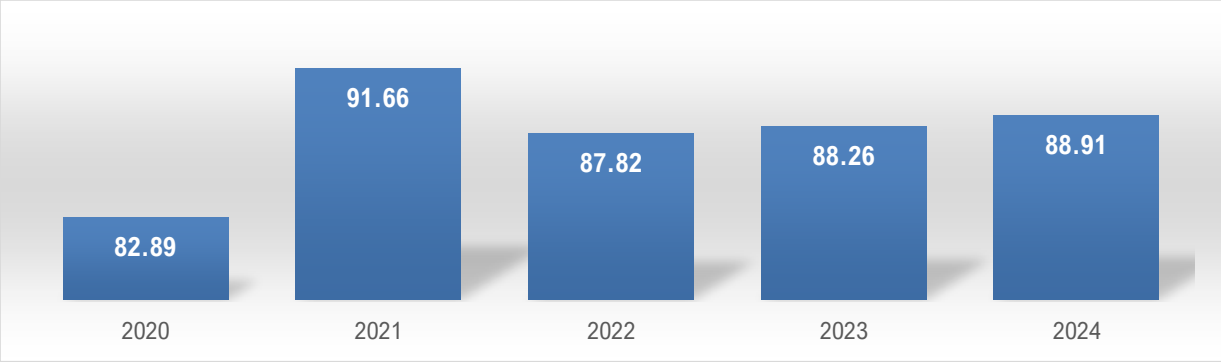

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Sejak lama koperasi sering disebut sebagai soko guru (tiang penyangga) perekonomian Indonesia, seperti yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945, koperasi merupakan instrumen penting untuk mencapai kesejahteraan sosial, sebab pada koperasi tercermin tentang cara bagaimana perekonomian Indonesia dikelola yaitu dengan

kekeluargaan. Sampai sekarang, koperasi masih terus berkembang diberbagai daerah dan sebagian benar-benar menjadi kelembagaan ekonomi dan mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Meskipun berkembang, tapi tak sedikit koperasi yang tidak berfungsi optimal (praktiknya mirip dengan perbankan), bahkan tidak lagi aktif.

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan dinamika yang sangat signifikan selama lima tahun terakhir, dari 51,1 persen di tahun 2020, mengalami penurunan tajam di tahun 2022 dan 2023 menjadi 10,64 persen. Kemudian meningkat mencapai 68,42 persen di tahun 2024.

Grafik 2.177
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

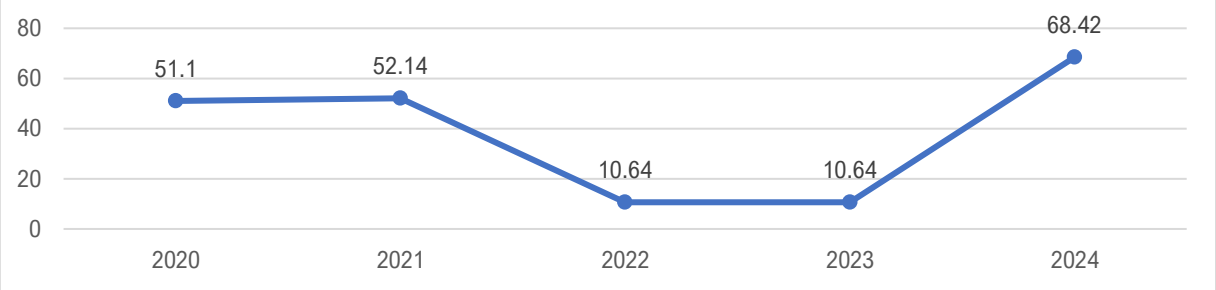

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

b. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif

Sama dengan koperasi, keberadaan UKM dalam perekonomian Indonesia merupakan tiang penyangga aktivitas ekonomi. Kontribusi UMKM terhadap ekonomi Indonesia jauh lebuh besar daripada UB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41 persen dengan jumlah UMKM hampir mencapai 60 juta unit. Data tersebut menunjukkan, bahwa penggerak roda perekonomian Indonesia pada dasarnya adalah UMKM.

Perkembangan UMKM yang pesat, tergambar dari keragaman aktivitas bisnisnya, sebagian bergerak di perdagangan, namun ada beberapa yang masuk dalam sektor keuangan berbentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Bagi negara-negara berkembang, termasuk juga di daerah, keberadaan LKM sangat membantu masyarakat miskin yang seringkali tidak diterima oleh perbankan karena dianggap tidak *bankable*. Kondisi tentu wajar melihat praktik perbankan saat ini, tapi juga ironis sebab sebagian dari mereka yang ditolak adalah UMKM yang berusaha bertahan hidup atau berkembang namun tidak memiliki akses permodalan. Peran LKM adalah membantu akses permodalan bagi pelaku UMKM, dengan persyaratan lebih mudah dan suku bungan lebih rendah dari perbankan pada umumnya.

Karena perannya yang penting, perkembangan LKM bisa dilihat hampir disemua daerah, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam kurun waktu 2020 sampai 2024, persentasi LKM di kabupaten ini sudah hampir mencapai 100 persen.

Grafik 2.178
Persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

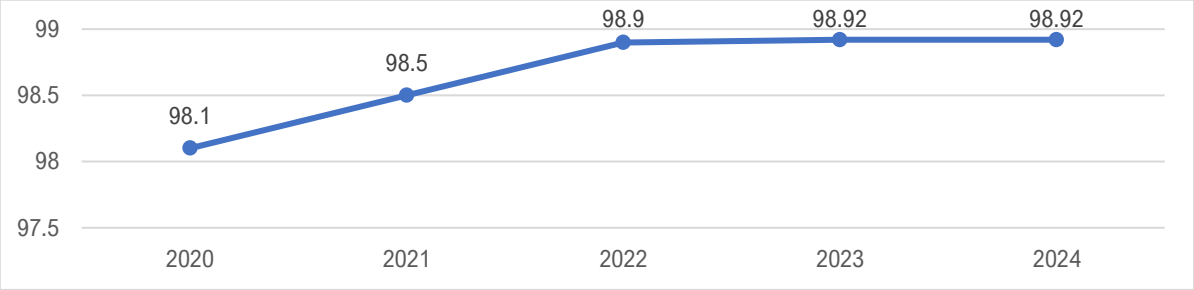

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

c. Persentase BPR/LKM Aktif

Selain Non BPR, praktik BPR juga besar proporsinya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Menurut OJK, usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR hanya empat yaitu pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kedua memberikan kredit, ketiga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah,sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan keempat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Dalam lima tahun terakhir, terjadi tren fluktuaktif dalam persentase BPRL/LKM aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tahun 2020 terdapat 65,2 persen BPR/LKM aktif, kemudian mengalami sedikit peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2021 tercatat 65,7 persen, tahun 2022 menjadi 66 persen, tahun 2023 dan 2024 stabil di angka 66,1 persen.

Grafik 2.179
Persentase BPR/LKM Aktif di Kabupaten Sidenrang Rappang Tahun 2020-2024

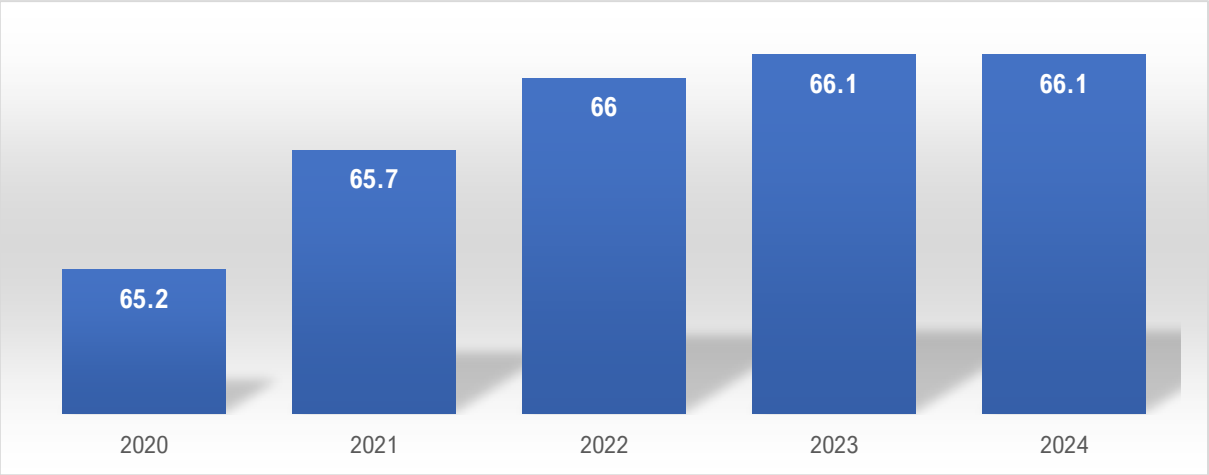

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

d. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro dan kecil sudah terbukti melalui berbagai penelitian memberikan pengaruh besar terhadap perbaikan kesejahteraan rumah tangga miskin. Semua kalangan sepakat, bahwa usaha mikro dan kecil merupakan instrumen yang efektif untuk menaikkan status kesejahteraan rumah tangga miskin karena dibanyak daerah kegiatan usaha UMKM selalu muncul dari rumah tangga rentan atau miskin sebagai upaya mempertahankan ekonomi rumah tangga. Oleh sebab itu, mendorong dan mengembangkan UMKM merupakan hal yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah jika ingin mengentaskan kemiskinan.

Dari sekian banyak UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagian besar skala usahanya masih mikro dan kecil. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha dan omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta. Ciri lain yang dapat menandai usaha mikro dan kecil adalah perkembangan usahanya relatif stagnan sebab tujuan dari bisnisnya memang bukan dikembangkan tapi hanya bertahan hidup (subsisten). Persentase usaha mikro dan kecil terhadap total usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kestabilan yang konsisten, di tahun 2020 ada 94 persen usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang dari total seluruh UMKM. Angka ini mengalami sedikit penurunan yaitu 93,6 persen di tahun 2024.

Grafik 2.180
Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

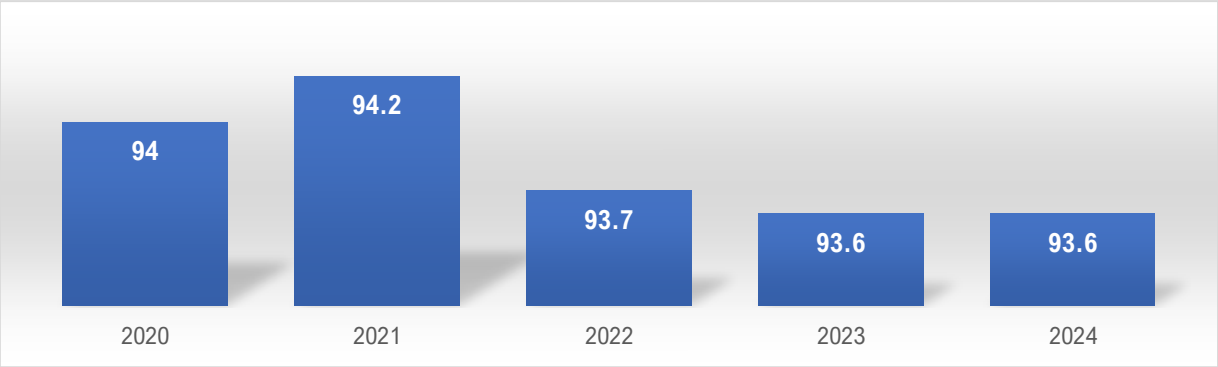

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

12. Urusan Penanaman Modal

a. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi merupakan variabel penentu pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Semua literatur dan penelitian tentang investasi dan pertumbuhan menyimpulkan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Berbeda dengan konsumsi, investasi bekerja seperti bahan bakar, dimana kendaraan hanya bisa dijalankan jika bahan bakarnya cukup. Jika investasi sebuah negara/daerah rendah, maka pastinya melambat, begitupun sebaliknya. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami perlambatan yang signifikan, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan nilai dan pertumbuhan investasi (PMA/PMDN). Tahun 2020 sebesar Rp. 204,49 miliar, total investasi PMA dan PMDN terus meningkat hingga mencapai Rp. 4.0 triliun di tahun 2023. Namun di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 3,5 triliun. Faktor penyebab turunnya investasi PMA dan PMDN secara umumnya dapat dikaitkan dengan iklim investasi di daerah. Iklim investasi ini terdiri dari banyak komponen, misalnya kemudahan mengurus perizinan dan biayanya, pajak, upah pekerja, dan lain sebagainya.

Grafik 2.181
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024 (Miliar Rp)

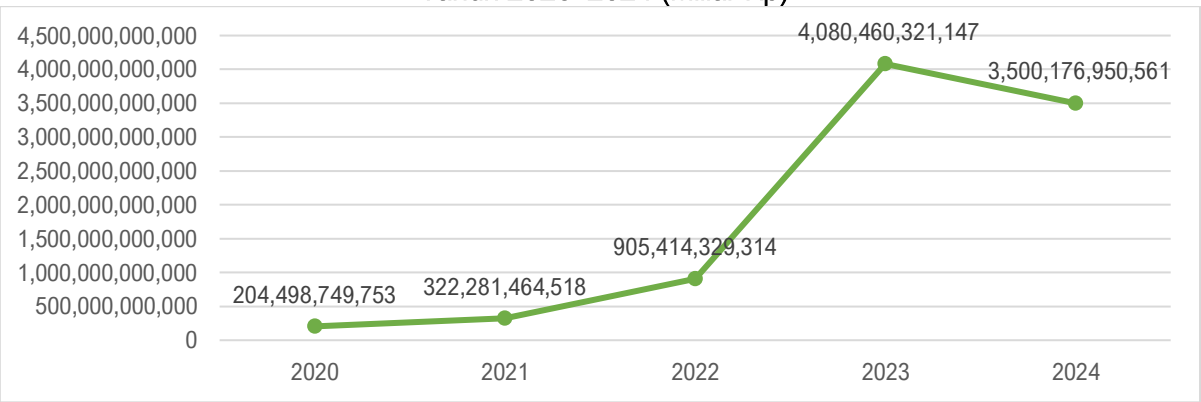

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

b. Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA

Tren nilai realisasi PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan, dari 126,93 persen di tahun 2020 menurun menjadi -14,22 persen di tahun 2024.

Grafik 2.182
Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

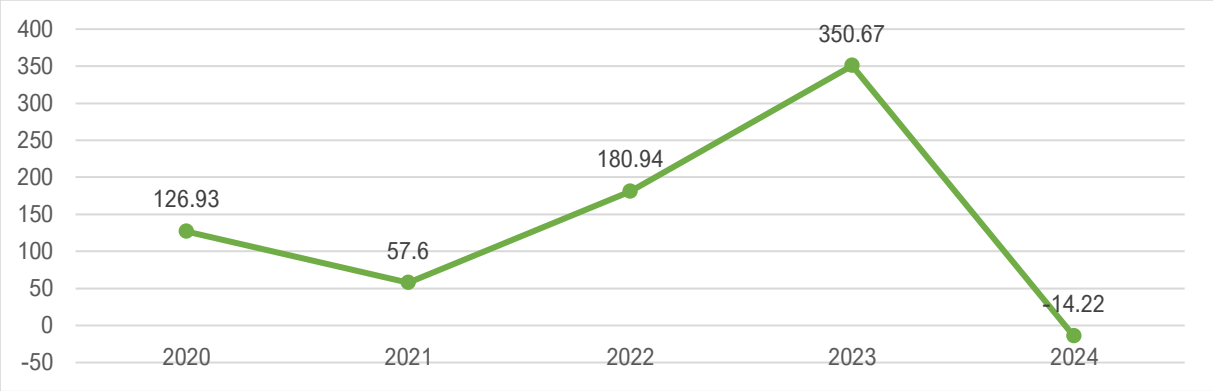

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

13. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

a. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Kedudukan organisasi kepemudaan sangat penting sebagai wadah berhimpunnya pemuda dalam upaya melaksanakan kerja organisasi untuk mendukung cita-cita terbentuknya negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Organisasi pemuda pada tingkat daerah semakin penting mengingat terbatasnya sumber daya manusia di daerah yang mampu menggerakkan dan berkontribusi bagi pembangunan.

Adapun persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Sindenreng Rappang selama kurun waktu 2020-2024 mengalami angka yang fluktuatif. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Grafik 2.183
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

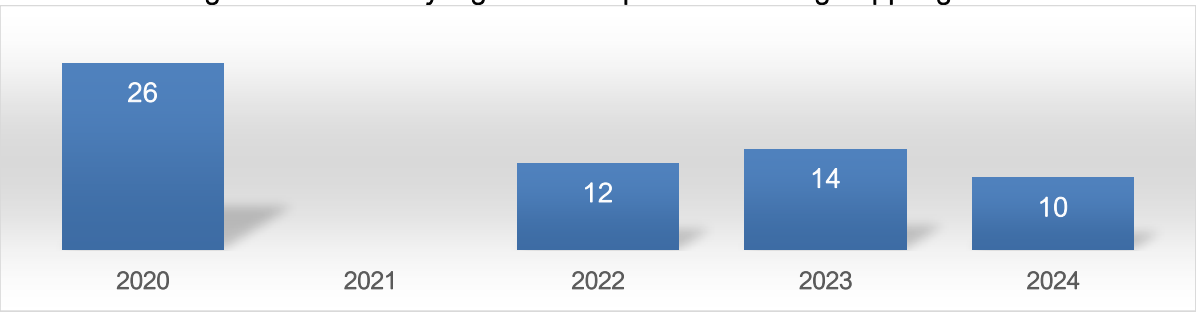

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

b. Persentase Wirausaha Muda

Di tengah semakin ketatnya seleksi untuk mendapatkan pekerjaan, pemuda memainkan peran penting untuk bisa membuka lapangan kerja baik untuk dirinya sendiri atau orang lain. Wirausaha sendiri masih menjadi tantangan karena masih belum banyak orang bahkan pemuda itu sendiri yang mampu melakukannya. Karena kunci utama menjadi wirausaha adalah harus mau mengambil risiko dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Apabila hal tersebut dikuasai, akan semakin banyak aktivitas ekonomi yang bergerak sekaligus juga berdampak pada perluasan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Persentase wirausaha muda di Kabupaten Sidenreng Rapang selama tahun 2020-2024 masih cukup rendah. Artinya masih terdapat banyak peluang yang bisa diisi untuk mengisi kekurangan wirausaha muda. Diperlukan upaya dan dukungan pemerintah dan pemuda untuk bersama-sama mendorong lahir wirausaha muda melalui pendidikan dan pelatihan serta permodalan yang memadai.

Grafik 2.184
Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

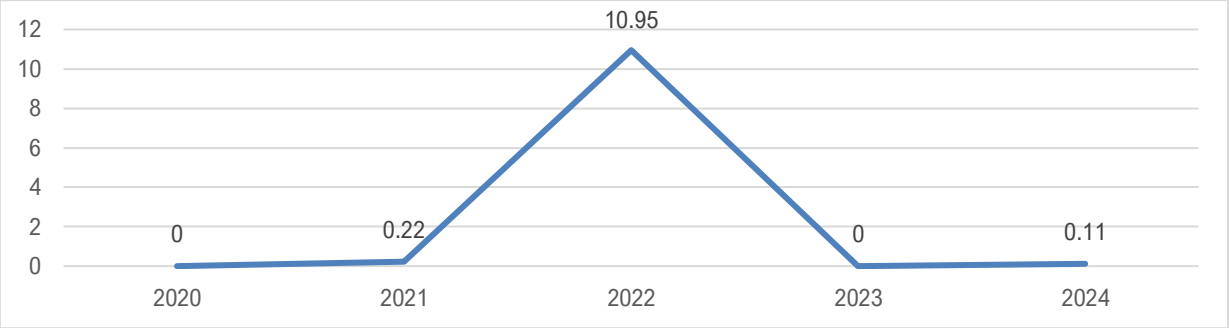

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

c. Cakupan Pembinaan Olahraga

Untuk mencapai prestasi tertinggi dalam suatu bidang, diperlukan pembinaan yang dilakukan sejak dini dan ketat terutama di bidang olahraga. Pembinaan olahraga sendiri merupakan bagian dan upaya peningkatan kualitas manusia yang ditujukan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat serta pengembangan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional.

Grafik 2.185
Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

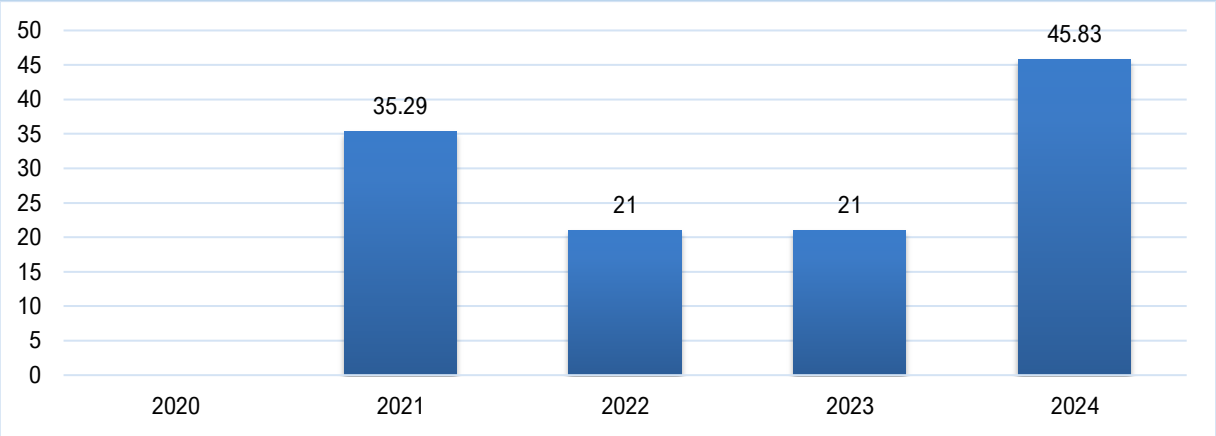

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Adapun capaian cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2020-2024 menunjukkan variasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 mencatat angka 35,29 persen yang disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan pembatasan aktivitas fisik dan sosial serta penutupan fasilitas olahraga. Dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2022-2020 stagnan di 21 persen. Pada tahun 2024 mencapai angka 45,83 persen.

d. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Untuk mendorong pencapaian terbaik di bidang olahraga, tidak hanya faktor pemain itu sendiri namun juga kehadiran pelatih yang berkualitas dan bersertifikasi memainkan peran yang tidak kalah penting. Pelatih yang bersertifikasi akan membawa suasana pembinaan olahraga sejalan dengan standar yang telah ditetapkan. Pelatih bersertifikasi juga memastikan kualitas output yang dihasilkan diharapkan akan mampu untuk bersaing. Pada tahun 2020 hingga 2021, cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 36,36 persen. Tahun 2024, mengalami sedikit penurunan menjadi 28 persen.

Grafik 2.186
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

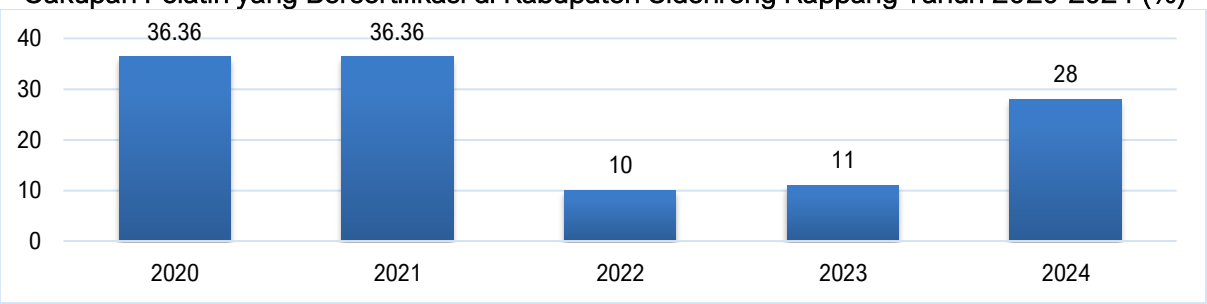

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Pembinaan atlet sejak usia dini menjadi sangat penting untuk mencapai prestasi terbaik terutama dalam jangka panjang. Atlet muda merupakan investasi penting dalam

pengembangan olahraga di masa depan. Diperlukan cakupan pembinaan yang luas supaya bisa menjaring lebih banyak bakat potensial agar semakin banyak peluang setiap pemuda memperoleh peluang pembinaan.

Adapun cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2020-2024 masih cenderung meningkat. Pada tahun 2021 cakupan pembinaan atlet muda sebesar 69.52 persen, kemudian meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 79 persen di tahun 2024.

Grafik 2.187
Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2025 (%)

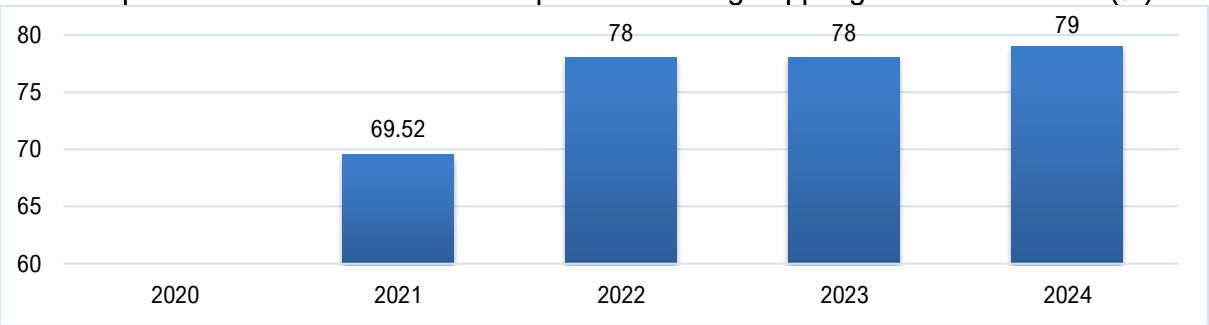

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

f. Jumlah Atlet Berprestasi

Hasil akhir dari sebuah pembinaan adalah target untuk mencapai prestasi terbaik. Secara umum, keberhasilan dari sebuah pembinaan di bidang olahraga adalah atlet yang berhasil merengkuh kemenangan dalam sebuah pertandingan. Namun demikian, diperlukan upaya progresif bersama semua pihak terkait untuk mencapai hal tersebut. Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, tercatat ada sebanyak 25 dan 21 atlet berprestasi, namun pada tahun 2022, tidak ada atlet yang berhasil mencatatkan prestasi. Kondisi ini sempat membaik pada tahun 2023 dimana jumlah atlet berprestasi meningkat menjadi 36 orang. Capaian tersebut kembali menurun pada tahun 2024 dengan hanya ada 4 atlet yang mencatatkan prestasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.188
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

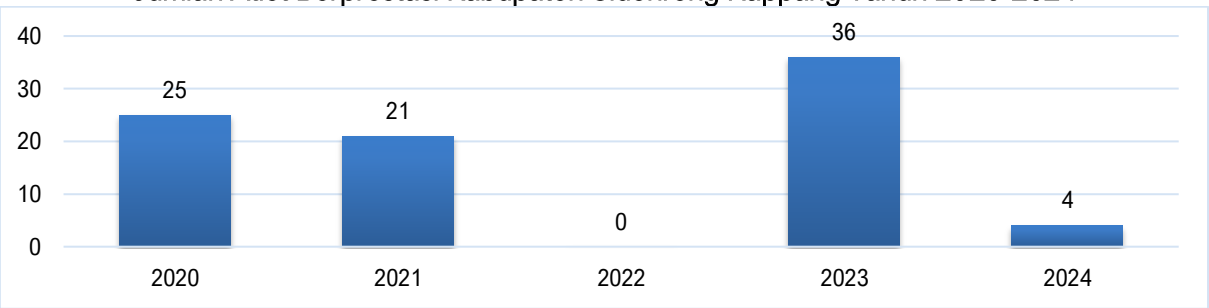

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

g. Jumlah Prestasi Olahraga

Prestasi olahraga merupakan tujuan akhir dari pembinaan pelatihan yang telah dilakukan sejak jauh hari. Atlet dipersiapkan untuk mampu bersaing dengan pesaing lainnya untuk menjadi yang terbaik dalam suatu pertandingan sehingga mampu mengecap prestasi terbaik dalam suatu bidang olahraga. Untuk mendapatkan prestasi olahraga terbaik diperlukan usaha dan kemauan yang tinggi dari atlet dan pelatih itu sendiri dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Grafik 2.189
Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-202 (Orang)

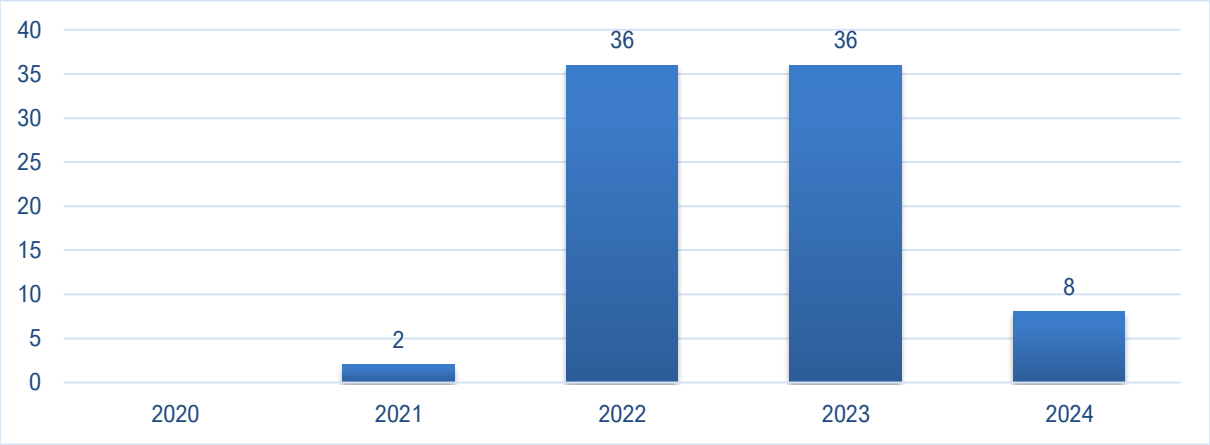

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

14. Urusan Statistik

a. Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi

Data statistik merupakan bagian paling mendasar dalam siklus perencanaan pembangunan. Saat merumuskan masalah, data ada syarat utama yang mesti dipenuhi dan ketika melakukan monitoring-evaluasi, para teknokrat juga membutuhkan data. Karena tingkat kepentingannya sangat tinggi, maka seharusnya data harus dapat diakses dengan mudah dan komprehensif (memuat semua indikator pembangunan daerah). Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib memiliki sistem data statistik yang mengintegrasikan semua perangkat daerah (data mikro sektoral).

Grafik 2.190
Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Ada/Tidak Ada)

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan, sudah memiliki sistem data dan statistik yang terintegrasi. Salah satu yang sangat baik adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam

Negeri. Meski bukan inisasi Pemda, tapi adanya SIPD sangat membantu daerah untuk membenahi dan memperbaharui data, sehingga ketika dibutuhkan dapat dengan diakses.

b. Buku Kabupaten Dalam Angka

Salah satu publikasi data statistik yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Buku Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka. Publikasi ini selalu dijadikan rujukan bagi para tenaga perencana dan pengambil kebijakan di daerah karena data yang termuat cukup lengkap. Berdasarkan pada Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2025, ada 12 pengelompokan data mulai dari Geografi hingga Sistem Neraca Regional, dan sebagian besar sumber datanya juga dari OPD lingkup pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada bagian akhir, BPS Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan perbandingan beberapa data dengan daerah di Sulawesi Selatan untuk menunjukkan posisi relatif masing-masing kabupaten/kota.

Grafik 2.191
Buku Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

c. Buku PDRB

Publikasi BPS Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak kalah pentingnya dan selalu digunakan oleh pemerintah daerah pada saat penyusunan dokumen perencanaan adalah Buku PDRB. Buku PDRB yang dipublikasi BPS Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi dua, yaitu PDRB sisi lapangan usaha dan PDRB sisi pengeluaran. Publikasi PDRB sisi lapangan usaha berisi tentang data-data PDRB berdasarkan 17 lapangan usaha berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Selain itu beragam data turunan, seperti kontribusi sektoral terhadap PDRB, pertumbuhan ekonomi sektoral, dana pendapatan perkapita juga termasuk dalam publikasi ini. Semua disajikan dalam bentuk time series lima tahunan.

Grafik 2.192
Buku PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Badan Pusat Statistik juga mempubikasikan Buku PDRB Pengeluaran, yang berisi tentang data PDRB sisi pengeluaran mulai dari konsumsi RT hingga ekspor-impor. Selain termuat data PDRB pengeluaran atas dasar harga berlaku dan harga konstan, publikasi ini juga mencatat data turunan, seperti pertumbuhan ekonomi berdasarkan komponen pengeluaran, kontribusi masing-masing komponen pengeluaran, dan pendapatan perkapita. Setiap kali publikasi, BPS Kabupaten Sidenreng Rappang menyajikanya dalam bentuk *time series* lima tahun terakhir.

15. Urusan Persandian

a. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Komunikasi antara perangkat daerah menggunakan sandi merupakan tuntutan perkembangan zaman dalam rangka menjaga rahasia dan keamanan data. Adapun capaian persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah selama kurun waktu 2020-2024 telah terimplementasi secara baik mencapai 100 persen.

16. Urusan Kebudayaan

a. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Salah satu cara melestarikan warisan budaya dan menyebarluaskannya adalah menggelar festival seni dan budaya. Kegiatannya bisa bermacam-macam seperti perlombaan musik tradisional bugis, dan salah satu yang terbesar adalah Festival Danau Sidenreng. Namun tidak setiap tahun pemerintah daerah menggelar festival seni dan budaya. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat perubahan dalam frekuensi festival seni budaya selama tahun 2020-2024. Tahun 2020, festival seni budaya diadakan hanya sekali. Memasuki tahun 2021, diadakan 12 kali pagelaran festival seni budaya. Tahun 2021, tidak ada festival seni dan budaya yang diadakan. Tahun 2023, festival seni budaya kembali dihelat satu kali. Dan pada tahun 2024, kembali tidak ada penyelenggaraan festival seni dan budaya.

Grafik 2.193
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

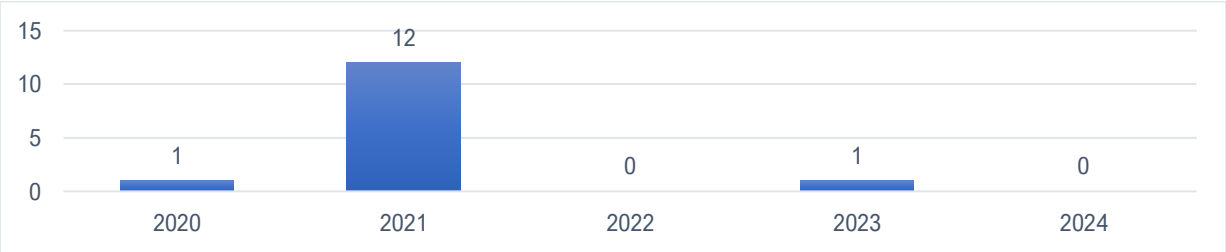

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki benda, situs, dan kawasan cagar budaya cukup banyak dan tersebar di beberapa kabupaten/kota, salah satunya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena dianggap sebagai warisan budaya, berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat UU hingga peraturan gubernur dibuat untuk menjaga kelestariannya. Namun upaya pelestarian tersebut sepertinya belum optimal dilakukan oleh pemerintah daerah karena angka persentase warisan budaya yang dilestarikan angkanya sangat rendah. Tahun 2020, terdapat 7 cagar budaya yang dilestarikan. Angka ini kemudian mengalami kenaikan yang konsisten di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 15 benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2024.

Grafik 2.194
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

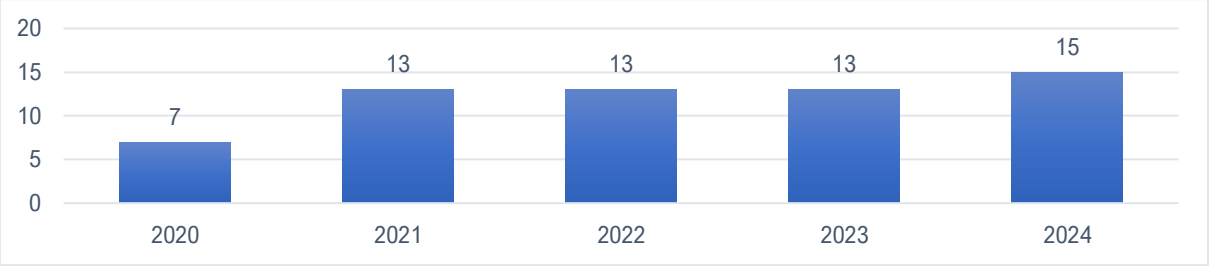

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya adalah Struktur Makam Syeh Keramat Padomai, Struktur Makam Nenek Petta Bolong Aje, Makam Puatta Punri Mojong, Langgara Tungga, Makam Korban 40.000 Jiwa Kulo, Makam Nene Mallomo, Makam Petta Soppo Batu, Bangunan Kolonial Belanda, Makam Andi Pajala Kitta. Semuanya tentu perlu dilestarikan, tidak hanya bendanya, tapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

c. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi

Kabupaten Sidenreng Rappang satu diantara banyak daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki cukup banyak kerya kebudayaan. Berdasarkan catatan Kongres Kebudayaan, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki karya kesenian masyarakat diantaranya adalah Cule Cule To Riolo, Manu Gagak (Ayam Ketawa), Paduppa (Marellau Pammase Dewata), Padendang, Bosara, Massempe Ri Parinyameng, pettenung, Pakkacaping Sarapo, Cule-cule Pakkacaping dan Meong Palo Karelle. Selain itu, daerah ini juga memiliki permainan rakyat beberapa diantaranya adalah Mappolo Becceng, Maccubbu, Massempek, Mammencak, Mappadendang, Makkurung Manuk, Mallanca, Maccukke/Maccengke,

Maggasing dan Maggeccik. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara aktif melakukan revitalisasi dan inventarisasi karya budaya.

Grafik 2.195
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

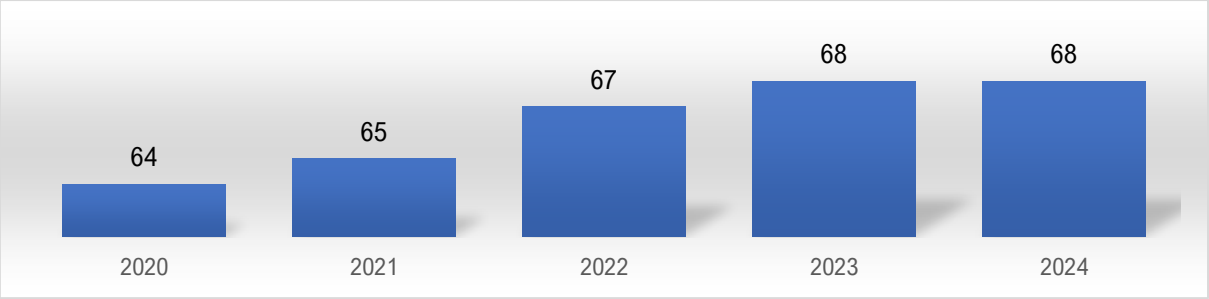

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

d. Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Sebagai bentuk upaya pelestarian dan pengelolaan warisan kebudayaan, termasuk cagar budaya, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengeluarkan Perda No. 10 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Cagar Budaya. Dalam Perda tersebut, pengelolaan diartikan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah telah secara konsisten meningkatkan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pengelolaan ini tidak hanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda, tetapi juga merupakan tonggak awal dalam upaya pelestarian warisan budaya.

Grafik 2.196
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

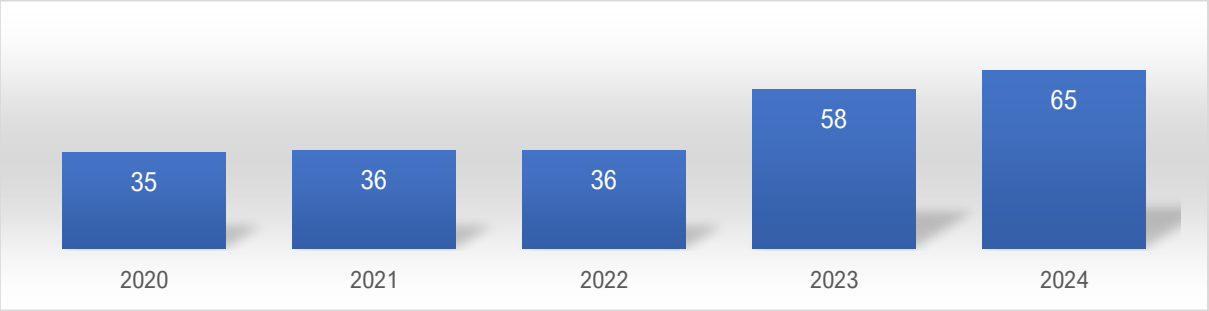

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

17. Urusan Perpustakaan

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis Peradaban Perpustakaan merupakan jendela dunia. Negara yang memiliki literasi tinggi akan cenderung memiliki masyarakat yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata.

Selanjutnya, masyarakat yang cerdas akan mendorong perekonomian lebih produktif karena sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perpustakaan memainkan peran penting dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Perpustakaan dianggap berhasil adalah perpustakaan yang banyak dikunjungi. Di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2020-2024, jumlah kunjungan perpustakaan selalu mengalami fluktuatif yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, jumlah pengunjung ke perpustakaan mencapai 43,065 orang, di tahun 2021 mengalami penurunan pengunjung menjadi 12.960, terus mengalami penurunan hingga hanya ada 7.655 pengunjung di tahun 2022. Dan pada tahun 2023, mengalami peningkatan yang signifkan yaitu sebesar 124.327 pengunjung. Namun di tahun 2024 kembali menurun menjadi 93,360 pengunjung. Hal ini juga menunjukkan menurunnya minat baca masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.197
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

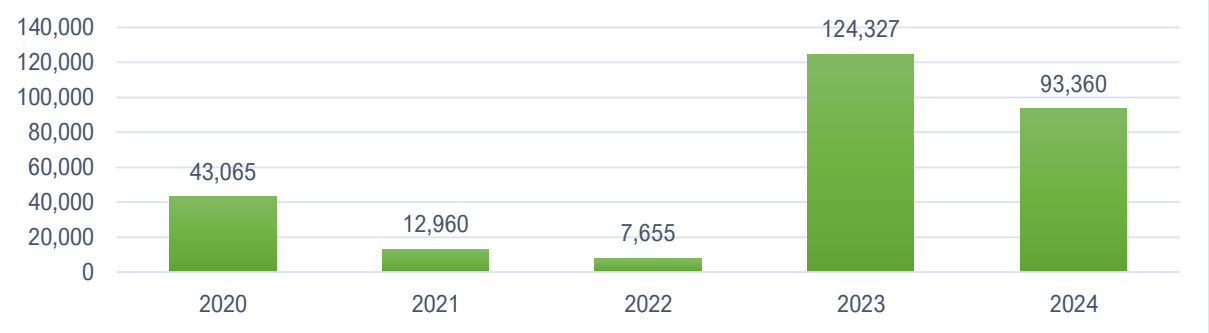

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

b. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Untuk mendorong minat baca masyarakat, maka ketersediaan jumlah buku harus lebih banyak dengan berbagai macasm topik yang lebih variatif sehingga bisa menjangkau kalangan pembaca dari usia muda hingga usia tua. Adapun jumlah dan judul koleksi buku merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian pengelola perpustakaan dengan terus melakukan penambahan serta melakukan perawatan yang baik.

Grafik 2.198
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

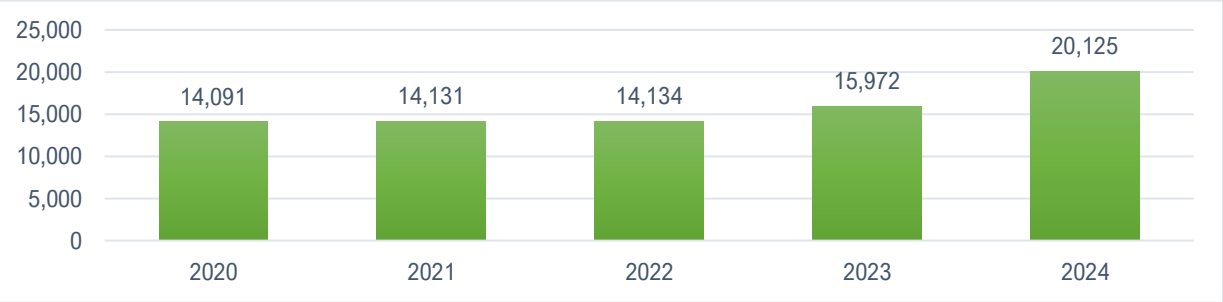

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Jumlah koleksi buku di perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2020 sebanyak 14.091 eksamplar, kemudian meningkat menjadi 14.131 pada tahun 2021. Angka ini kemudian meningkat lagi menjadi 14.134 pada tahun 2022, dan mencapai 15.972 koleksi pada 2023. Tahun 2024 jumlah koleksi buku bertambah signifikan menjadi 20,125 eksemplar. Meskipun demikian, capaian jumlah koleksi buku di perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang masih terbatas.

c. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Rasio perpustakaan persatuan penduduk menjadi indikator seberapa besar perpustakaan akan mampu menjadi daya tampung. Adapun rasio ini penting untuk menjadi perhatian terhadap kebutuhan perpustakaan. Apabila dirasa rasio terlalu besar, maka diperlukan perluasan pengembangan atau pendirian perpustakaan baru sehingga operasional, manfaat, dan efektivitas perpustakaan bisa lebih optimal.

Grafik 2.199
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024

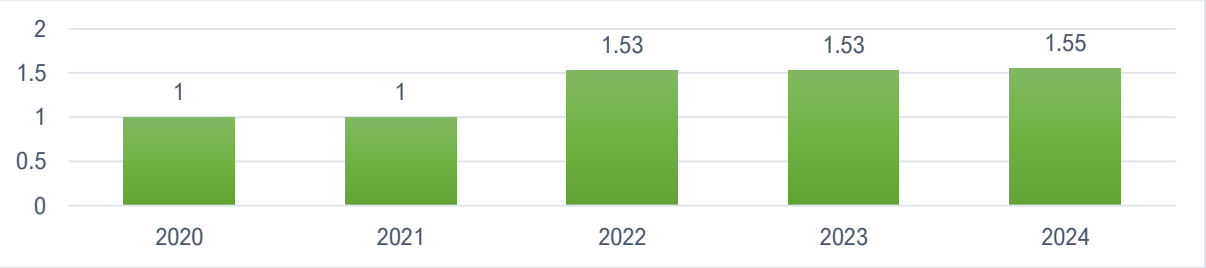

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Selanjutnya, rasio perpustakaan per satuan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rapppang selama kurun waktu 2020-2024 tidak mengalami perubahan dimana rasionya adalah 1:1000. Artinya, 1 perpustakaan secara umum hanya mampu melayani 1000 penduduk. Dengan demikian, diperlukan perluasan atau pengembangan perpustakaan agar mampu lebih banyak melayani penduduk yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

d. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun

Perpustakaan merupakan jendela dunia. Negara yang memiliki literasi tinggi akan cenderung memiliki masyarakat yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Selanjutnya, masyarakat yang cerdas akan mendorong perekonomian lebih produktif karena sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perpustakaan memainkan peran penting dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Adapun perpustakaan yang berhasil adalah perpustakaan yang banyak dikunjungi. Di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2020-2024, jumlah kunjungan

perpustakaan mengalami fluktuasi dalam jumlah kunjungan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan minat baca dan rasa ingin tahu yang tinggi di kalangan masyarakat. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan tercatat sebanyak 3.589, kemudian meningkat signifikan menjadi 10,360 kunjungan pada tahun 2023, namun mengalami penurunan secara drastis menjadi 7,780 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlu ada upaya yang lebih signifikan agar supaya persentase pengunjung ke perpustakaan meningkat, salah satunya adalah membangun perpustakaan yang sesuai standar nasional.

Grafik 2.200
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Orang)

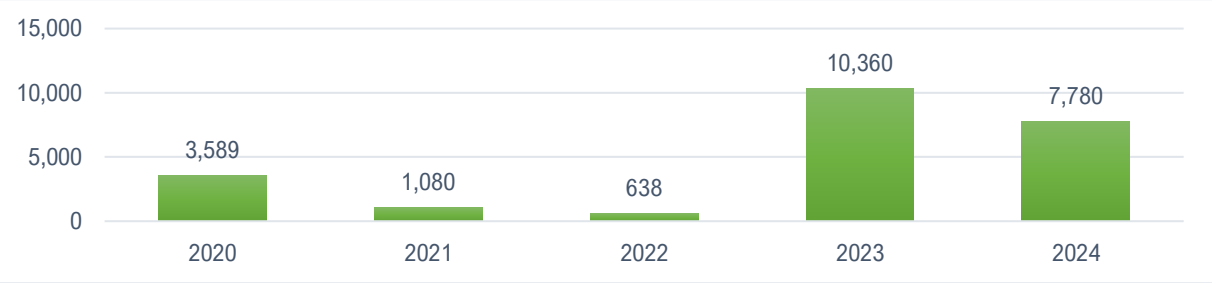

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

e. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Untuk mendorong minat baca masyarakat, maka ketersediaan jumlah buku harus lebih banyak dengan berbagai macam topik yang lebih variatif sehingga bisa menjangkau kalangan pembaca dari usia muda shingga usia tua. Adapun jumlah dan judul koleksi buku merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian pengelola perpustakaan dengan terus melakukan penambahan serta melakukan perawatan yang baik.

Peningkatan koleksi judul buku di perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020 ada sebanyak 7.046 judul buku, meningkat menjadi 7.066 pada tahun 2021. Angka ini terus meningkat di tahun 2022 dan 2023 mencapai 7.067 dan 7.349 judul. Pada tahun 2024 kembali mengalami penambahan signifikan menjadi 9.484 judul buku perpustakaan.

Grafik 2.201
Jumlah Koleksi Judul Buku di Perputakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

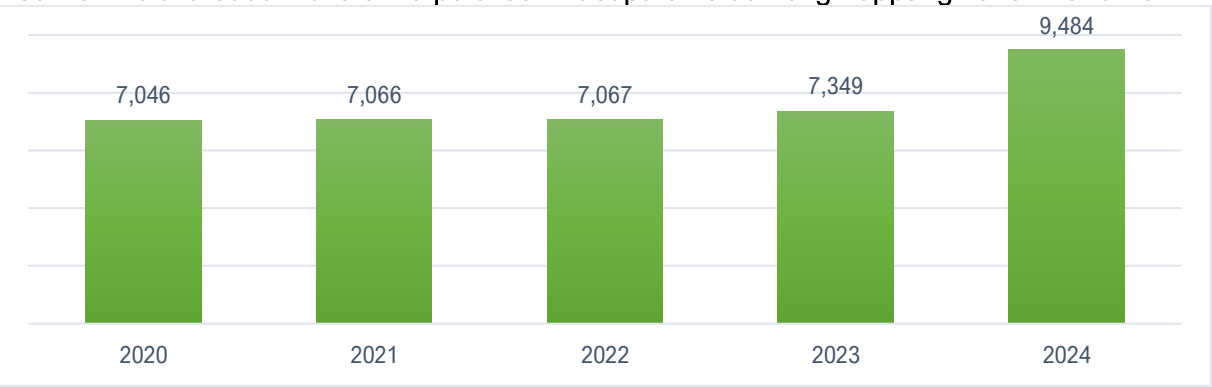

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

f. Jumlah Pustakawan, Tenaga Perpustakaan

Selain ketersediaan buku, pustakawan dan tenaga perpustakaan juga menunjang minat baca pengunjung perpustakaan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang upaya untuk meningkatkan minat baca tampak jelas dengan ksenaikan jumlah pustakawan dan tenaga perpustakaan dari 18 orang di tahun 2020 menjadi 45 orang di tahun 2024.

Grafik 2.202
Jumlah Tenaga Perpustakaan, Pustakawan di Perputakaan Kabupaten Rappang Tahun 2020-2024

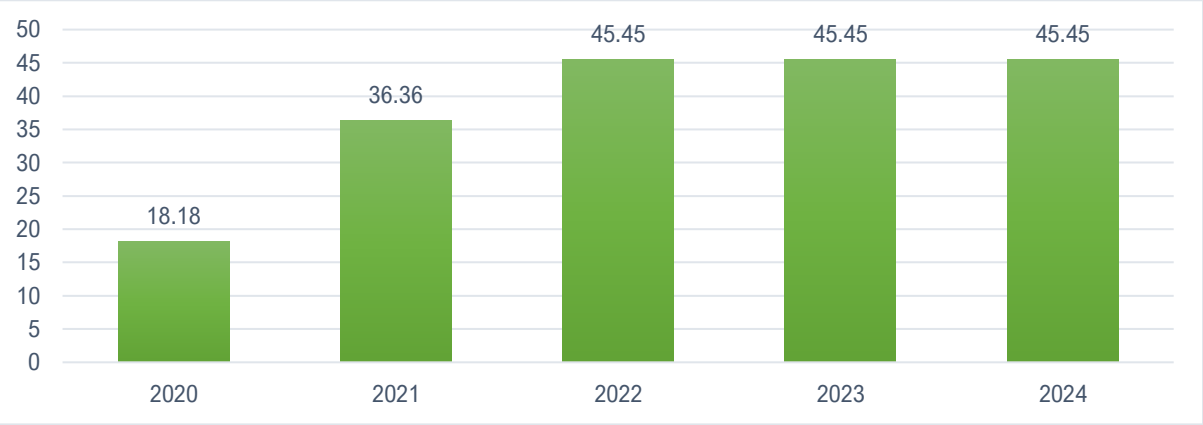

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

18. Urusan Kearsipan

a. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pendokumentasian merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan, sebab sebelum menyusun program, para teknokrat perlu melihat pencapaian masa lalu dan pencapaian tersebut terekam dalam banyak dokumen disebut dengan arsip. Definisi arsip berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pengarsipan, maka berbagai regulasi, mulai dari UU hingga peraturan pelaksana sudah dibuat agar ada standar baku pengarsipan mulai dari level nasional hingga daerah.

Tapi karena seringkali dianggap tidak begitu penting, upaya pengarsipan secara baku belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal tersebut tercermin dari masih rendahnya angka persentase perangkat daerah yang mengalola arsip secara baku. Tahun 2020 – 2022 hanya 25 persen perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Namun pada tahun 2023, ada sedikit peningkatan menjadi 27,50 persen perangkat

daerah yang mengelola arsip secara baku. Kemudian meningkat signifikan di tahun 2024 menjadi 43,90 persen. Ini menunjukkan bahwa hanya seperempat perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengelola arsipnya berdasarkan aturan, padahal pengarsipan baku tersebut penting untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan.

Grafik 2.203
Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2020 - 2024

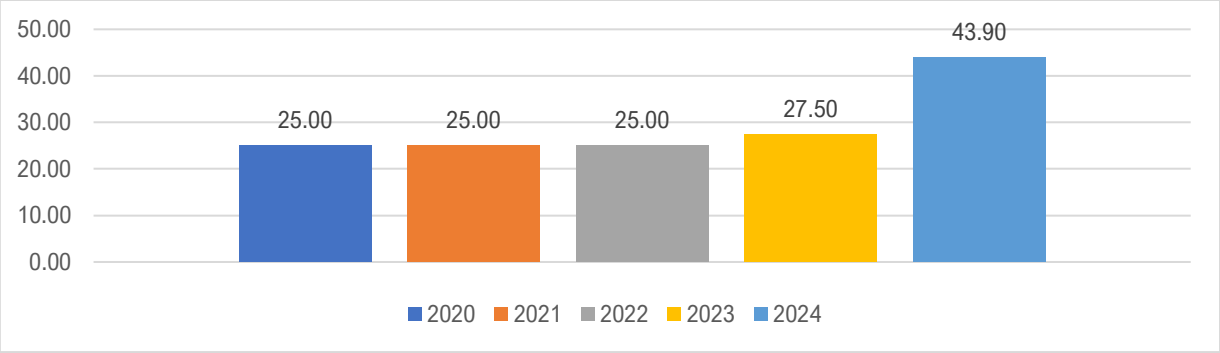

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Dalam mendorong perbaikan pengelolaan kearsipan agar sesuai dengan standar baku, maka kualitas SDM pengelola menjadi salah satu faktor pendorong. Semakin banyak SDM yang berkompeten, maka perbaikan pengelolaan kearsipan agar sesuai standar baku akan semakin cepat. Pada tahun 2020 dan 2021, tercatat ada 2 orang pengelola arsip yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Namun pada tahun 2022 sampai tahun 2024 turun menjadi hanya 1 orang. Capaian ini masih sangat rendah dibanding dengan target sebesar 49 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM perangkat daerah untuk menerapkan arsip baku masih sangat terbatas.

Grafik 2.204
Jumlah Pengelola Arsip yang Mengikuti Peningkatan SDM di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

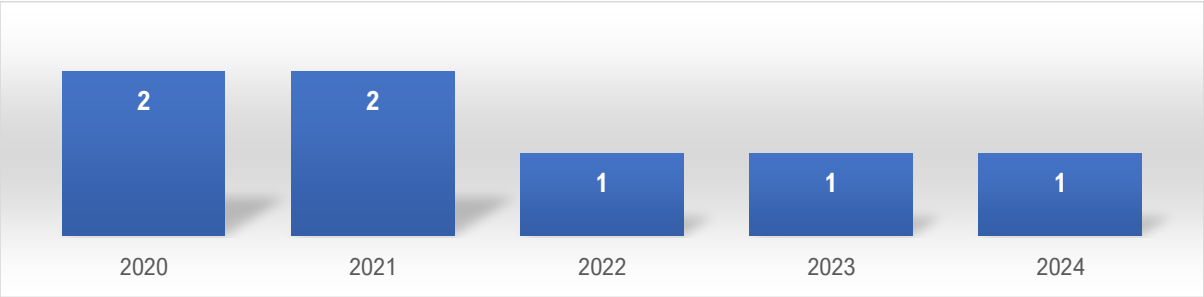

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

2.1.5.3. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan Dan Perikanan

a. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Produksi komoditas perikanan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagian besar merupakan sumbangan dari kelompok nelayan. Meski begitu, proporsi kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah dalam lima tahun terakhir tak begitu banyak. Tahun 2020, tidak ada bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan, sehingga tidak ada kelompok nelayan yang mendapatkan bina dari pemerintah pada tahun tersebut. Namun pada tahun 2021, cakupan bina kelompok nelayan naik signifikan mencapai 42,86 persen sekaligus menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sayangnya, tren kenaikan tersebut tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2022 mengalami penurunan cukup drastis hanya tersisa 8,57 persen, lalu di tahun 2023 angka semakin menurun menjadi 1,43 persen. Di tahun 2024, bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan sedikit meningkat menjadi 4,28.

Grafik 2.205
Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

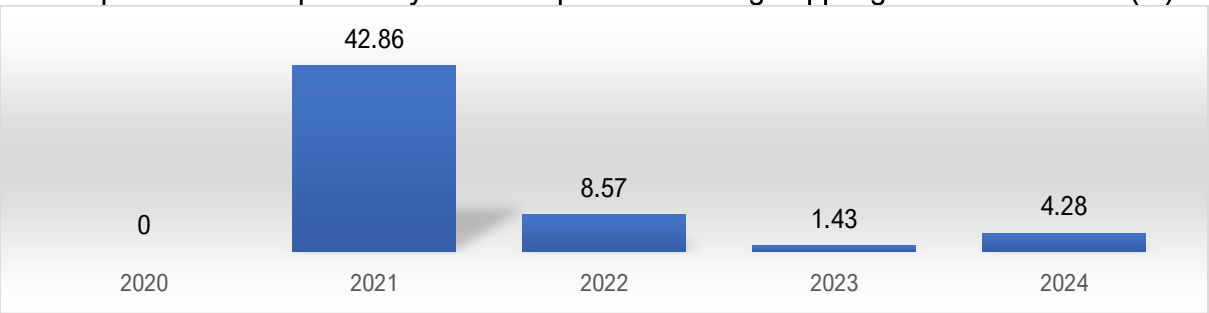

Sumber: Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

b. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Tahun 2020 kelompok nelayan di Kabupaten Sidenreng Rappang menyumbang sebanyak 83.17 persen produksi perikanan. Presentasinya pernah mencapai 100,04 persen di tahun 2021 kemudian mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 81.7 persen di tahun 2024. Hasil produksi ikan di Kabupaten Sidenreng Rappang masih bersumber dari kelompok nelayan, sementara sisanya adalah hasil tangkapan nalayan tanpa kelompok.

Grafik 2.206
Kontribusi Kelompok Nelayan terhadap Total Tangkapan Ikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

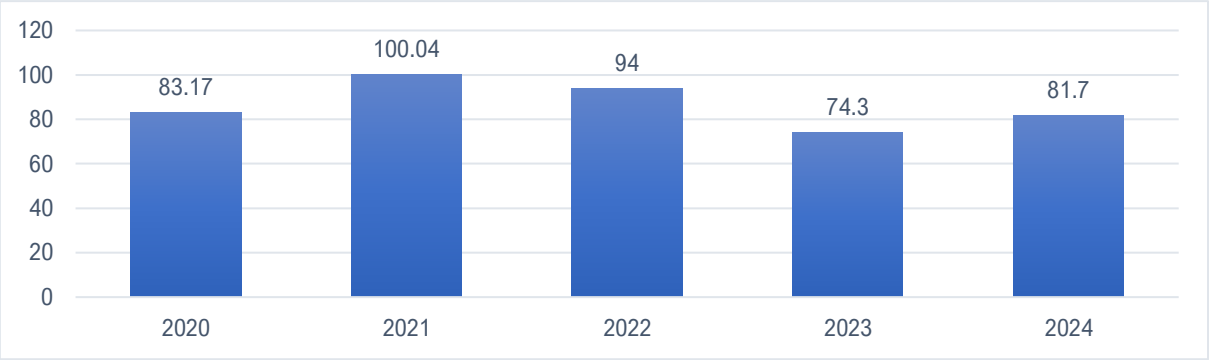

Sumber: Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

c. Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman

Walaupun potensi sektor perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain, namun aktivitas penangkapan ikan harus tetap memperhatikan daya dukung habitat. Aktivitas penangkapan ikan yang dilkukan secara terus-menerus membuat kuantitas ikan perlahan berkurang, sehingga jika tidak dijaga kelestarianya maka kuantitas ikan pada waktu tertentu akan habis. Itu sebabnya aktivitas penangkapan ikan harus tetap memperhatikan batasan biologi aman. Aktivitas penangkapan ikan di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020-2024 sudah berada dalam batasan biologi aman.

d. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Kabupaten Sidenreng Rappang salah satu daerah yang tidak banyak memiliki wilayah laut. Namun dengan keterbatasan tersebut, pemerintah menetapkan kawasan lindung perairan. Data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tidak ada atau 0 hektar kawasan lahan lindung perairan dari setiap satu hektar lahan perairan di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

2. Urusan Pariwisata

a. Kunjungan wisata

Wisatawan merupakan setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat/wilayah yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain: (a) Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga. keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain; dan (b) Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain. Secara umum wisatawan terdiri atas dua, yaitu mancanegara dan nusantara. Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan industri pariwisata yang memberikan dampak kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Grafik 2.207
Jumlah Kunjungan Wistawan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Orang)

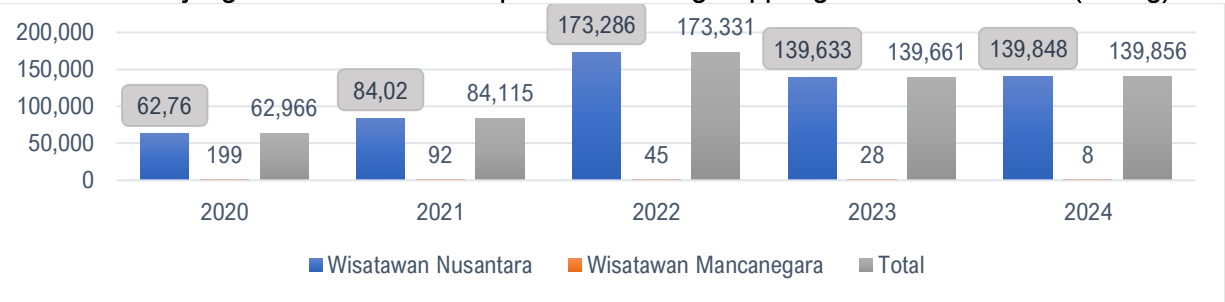

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

b. Lama Kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisatawan menunjukkan lamanya wisatawan mengunjungi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam satu kali kunjungan. Selain jumlah kunjungan wisatawan, lama kunjungan wisatawan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya pendapatan yang diperoleh daerah. Selama kurun waktu 2020-2024, rata-rata lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 1 hari. Artinya rata-rata wisatawan yang berkunjung merupakan wisatawan harian yang tidak memerlukan tempat tinggal sementara (akomodasi).

c. PAD Sektor Pariwisata

Perkembangan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang. Sektor pariwisata memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi di sektor lainnya seperti, agen perjalanan (*travel*), operator wisata, hotel, restoran, dan perdagangan eceran. Meningkatnya aktivitas sektor pariwisata memberikan dampak langsung terhadap PAD. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih sangat kecil hanya 1,12 persen di tahun 2024.

Grafik 2.208
PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024

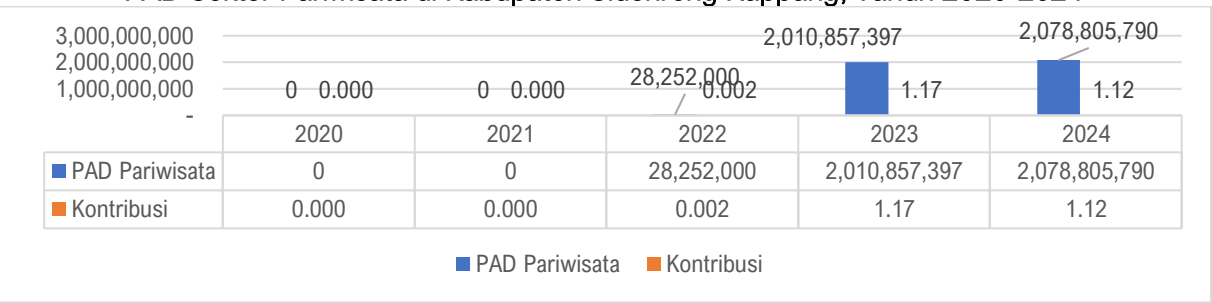

	2020	2021	2022	2023	2024
PAD Pariwisata	0	0	28,252,000	2,010,857,397	2,078,805,790
Kontribusi	0.000	0.000	0.002	1.17	1.12

Sumber: Dinas Pemuda. Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

3. Urusan Pertanian

a. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal sebagai salah satu daerah pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan serta merupakan lumbung padi nasional. Hal ini terlihat dari peran sektor pertanian terutama tanaman pangan yang memiliki andil cukup besar dalam pertumbuhan perekonomian.

Perkembangan produksi padi Kabupaten Sidrap mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024. Berdasarkan pada gambar produksi padi sawah Kabupaten Sidrap paling tinggi pada tahun 2022 yaitu 5.67 Ton/ha Ton dan paling rendah pada tahun 2024 yaitu 5.08 Ton/ha. Kabupaten Sidrap mengalami fluktuasi karena faktor cuaca dan ketersediaan air khusus irigasi sangat menentukan keberhasilan swasembada padi di Sidrap dan optimis dalam mewujudkan swasembada pangan.

Permasalahan ini harusnya mendapat perhatian pemerintah daerah karena berkaitan dengan kedaulatan pangan. Bisa saja data kecukupan pangan menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang bisa mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya, tapi pangan tersebut dibeli dari luar daerah (impor).

Grafik 2.209
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kab. Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (Ton/ha)

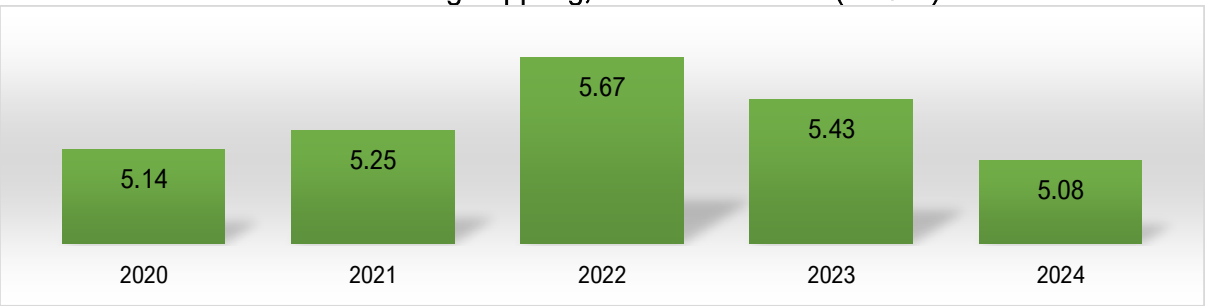

Sumber : Dinas TPHPKP kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

b. Cakupan Bina Kelompok Petani

Selain faktor alam, kemungkinan penyebab menurunya produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor non alamiah seperti adopsi teknologi yang lambat, ketersediaan saprodi, kualias bibit, dll. Berbagai program bantuan sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, misalnya program kartu tani, program bantuan bibit, program pupuk bersubsidi, dan masih banyak program bantuan lainya. Meskipun pemerintah daerah sudah melakukan banyak hal untuk membantu petani, tapi cakupannya masih sangat terbatas, bahkan lima tahun terakhir terus menurun.

Tahun 2020, kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah hanya 11,22 persen. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 39,96 persen. Angka ini kemudian mengalami kenaikan kembali menjadi 48,27 persen di tahun 2022. Walaupun pun angka tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, masih terdapat sekitar 51,73 persen kelompok petani di Sidenreng Rappang tahun 2022 tidak

mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Pada tahun 2023 tingkat bantuan tetap relatif tinggi dengan 46,33 persen kelompok petani yang masih menerima bantuan dari pemerintah daerah. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, di mana persentasenya meningkat menjadi 54,28 persen. Kenaikan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian melalui pemberian bantuan kepada kelompok tani.

Grafik 2.210
Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

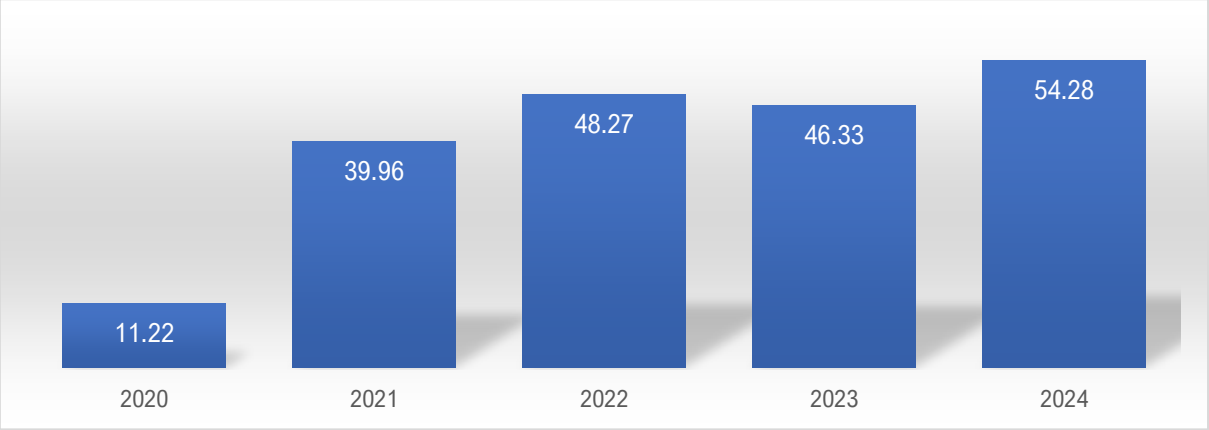

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2025

4. Urusan Perdagangan

a. Ekspor Bersih Perdagangan

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal menunjukkan besarnya jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan binaan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2020 jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan binaan pemerintah daerah adalah sebesar 67,5 persen. Namun pada tahun 2021 – 2023 mengalami penurunan drastis menjadi 20 persen. Pada tahun 2024, persentase kelompok pedagang yang mendapatkan bantuan binaan kembali mengalami peningkatan menjadi 30 persen. Hal ini menunjukkan wawasan dan pengetahuan pedagang informal tentang dunia usaha meningkat.

Grafik 2.211
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

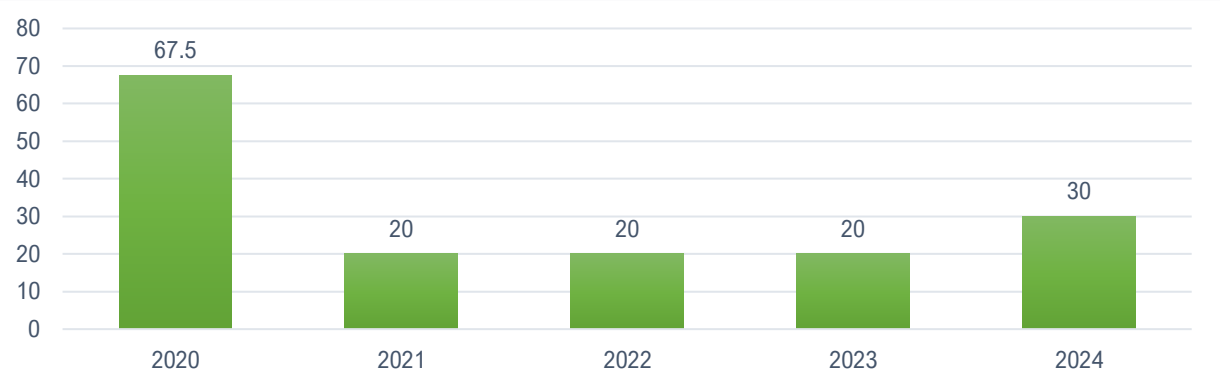

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

5. Urusan Perindustrian

Cakupan bina kelompok pengrajin menggambarkan perbandingan antara jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dengan keseluruhan pengrajin. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menerapkan teknologi tepat guna, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menerapkan teknologi tepat guna, meningkatkan produksi, memperluas akses pasar dan bahan baku, serta mempromosikan produk unggul.

Cakupan bina kelompok pengrajin mulai tahun 2020 hingga 2024 mencatatkan angka 0 persen. Artinya pengrajin di Kabupaten Sidenreng Rappang belum mendapatkan bantuan binaan dari pemerintah setempat.

2.1.5.4. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Menyusun dokumen perencanaan merupakan keharusan bagi pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan perundanga-undangan tersebut mengemukaan bahwa perancanaan pembangunan nasional terdiri atas tiga bagian yaitu rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Grafik 2.212
Ketersediaan Dokumen RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Ada/Tidak Ada)

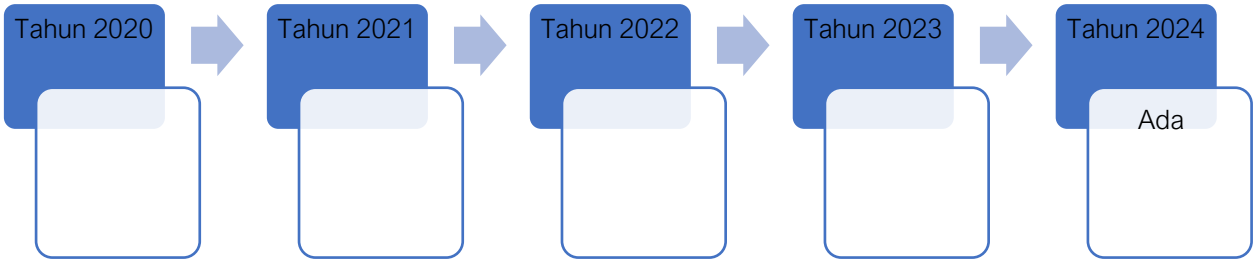

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2025

Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sudah membuat dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang ditetapkan oleh Perda yaitu Perda No. 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2025.

b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Selain mengamanatkan penyusunan RPJPD dan RPJMD, pemerintah daerah juga harus menyusun dokumen perencanaan tahunan atau RKPD. Menurut Permedagri 86 Tahun 2017. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Grafik 2.213
Ketersediaan Dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Ada/Tidak Ada)

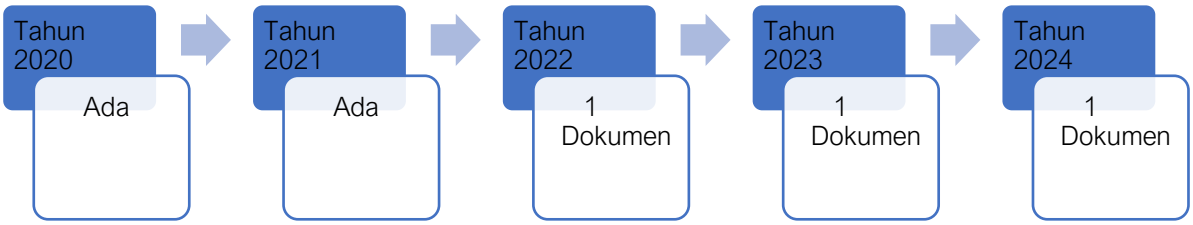

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2025

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Selain mengamanatkan penyusunan RPJPD dan RPJMD, pemerintah daerah juga harus menyusun dokumen perencanaan tahunan atau RKPD. Menurut Permedagri 86 Tahun 2017. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Grafik 2.214
Ketersediaan Dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2020-2024 (Ada/Tidak Ada)

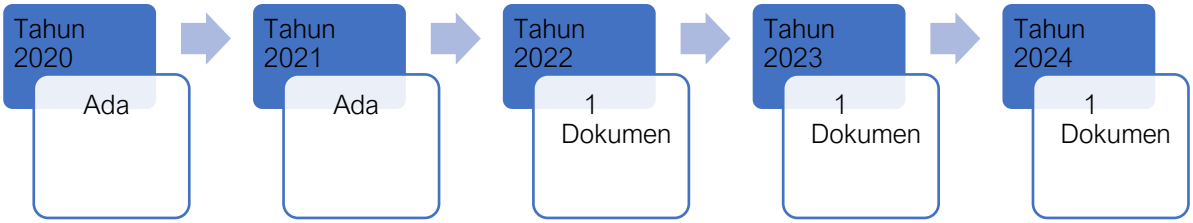

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Kewajiban menyusun dokumen RKPD sudah diselesaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahunya dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, Pemerintah daerah membuat Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

d. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Pemanfaatan ruang merupakan aktivitas menata ruang menjadi bermacam peruntukan, misalnya dijadikan sebaga pusat kegiatan daerah atau pusat pertumbuhan daerah, tergantung dari bagaimana pemerintah daerah mengarahkan pembangunan. Setiap program pembangunan daerah tidak bisa dijalankan jika melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW). Artinya dokumen RTRW pada dasarnya memuat rencana pemanfaatan ruang dan harus ditaati oleh pemerintah daerah. Dokumen RTRW adalah salah satu dokumen wajib dari sekian banyak dokumen perencanaan pemangunan berdasrakan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Sama halnya dengan dokumen wajib lainya, pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyusun dan menetapkan dokumen RTRW. Dokumen tersebut ditetapkan dengan Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 atas pertimbangan pemanfaatan ruang yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Grafik 2.215
Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Ada/Tidak Ada)

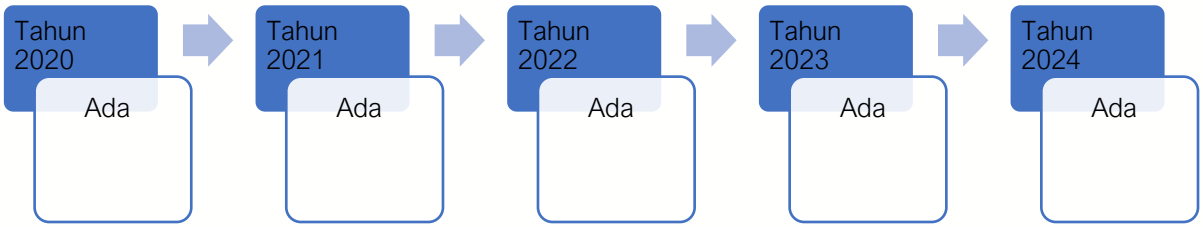

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; diolat Tahun 2025

e. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Dokumen RPJMD merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang mesti dijabarkan kedalam program pembangunan tahunan. Perangkat daerah Bappeda diberikan kewenangan untuk menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan harapan ada harmonisasi antara ketiga dokumen tersebut karena dibuat oleh perangka daerah yang sama, meskipun dalam penyusunannya Bappeda harus bekerja sama dengan perangkat daerah lain. Selama ini, salah satu isu yang berkembang dalam dunia perencanaan adalah konsistensi dokumen perencanaan, baik RPJPD ke RPJMD ataupun dengan RKPD.

Namun sepertinya isu inkonsistensi antara RPJMD dan RKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terjadi terlihat dari angka persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD yang mencapai 100 persen sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa program dalam RPJMD tahun berkenaan Sebagian besar telah dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan atau RKPD. Hal ini tentu sangat positif sebab sebagian rencana pembangunan daerah dalam RPJMD adalah janji politik kepala dan wakil kepala daerah terpilih, sehingga jika kedua dokumen tersebut tidak konsisten maka sangat mungkin ada janji kampanye yang tidak terealisasi.

f. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Setelah RKPD dibuat, maka tahapan selanjutnya adalah penganggaran. Pada tahapan ini, dokumen RKPD harus menjadi pedoman utama dalam menyusun rencana anggaran (RAPBD), setelah sebelumnya telah dibuat KUA PPAS sebagai jembatan antara RKPD dan RAPBD. RKPD sebagai dokumen yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk satu tahun ke depan, harus menjadi acuan utama dalam penyusunan RAPBD. Penjabaran tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2024, penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD sudah mencapai 100 persen, menunjukkan bahwa konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran sudah baik.

g. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Dokumen RTRW memuat struktur dan pola ruang yang akan diwujudkan oleh pemerintah daerah sepanjang periode RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu tahun 2012 hingga 2032. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Jika sudah ditentukan,

maka semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah harus mengikuti struktur dan pola ruang.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini telah sepenuhnya mengikuti RTRW. Selama tahun 2020 hingga 2025, persentase program/kegiatan pemerintah daerah yang sesuai dengan RTRW adalah 100 persen dan tidak pernah mengalami perubahan selama periode tersebut. Artinya selama lima tahun terakhir, program/kegiatan pemerintah daerah 83 persen sudah sesuai dengan struktur dan pola ruang yang telah ditentukan dalam dokumen RTRW. Hal tersebut tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik itu UU Tentang Penataan Ruang maupun Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang RTRW.

2. Keuangan

a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Adapun 4 jenis opini yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah sebagai berikut.

1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP): Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3) Opini Tidak Wajar: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4) Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Pemberian opini sangat baik atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2020-2024 merupakan prestasi yang membanggakan. Hal ini menegaskan bahwa

pengelolaan anggaran daerah telah memenuhi standar, kaidah, dan prinsip-prinsip akuntantabilitas yang berlaku.

b. Persentase SILPA

SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto dalam APBD tahun bersangkutan. Dalam proses penyesuaian APBD, nilai SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Capaian SILPA di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2020-2024 cenderung fluktuatif. Adanya peningkatan nilai SILPA menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam menggunakan dana APBD untuk penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah.

Grafik 2.216
Persentase SILPA Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024

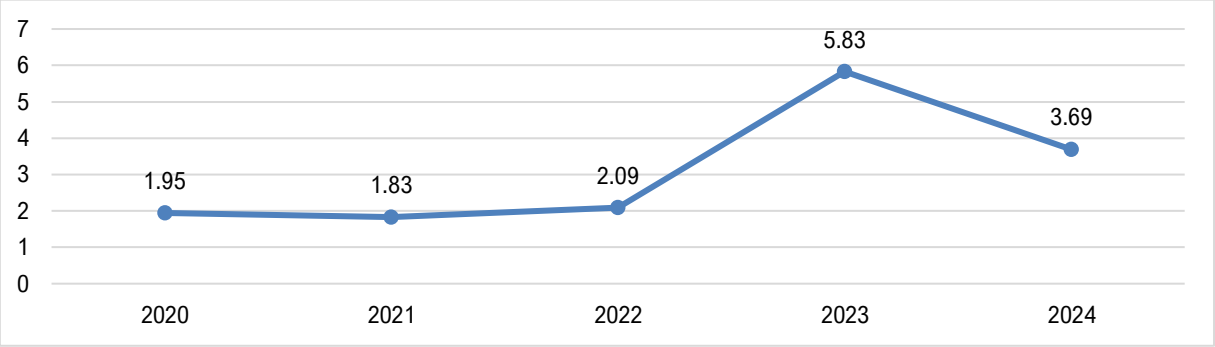

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

c. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4, yang menetapkan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen, baik melalui intervensi APBN maupun APBD telah dijalankan dengan baik. Tujuan pengalokasian tersebut telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Tahun 2020-2024, Kabupaten Sidenreng Rappang telah mencapai pencapaian yang sesuai dengan amanat konstitusi terkait belanja pendidikan.

Grafik 2.217
Persentase Belanja Pendidikan (20%) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

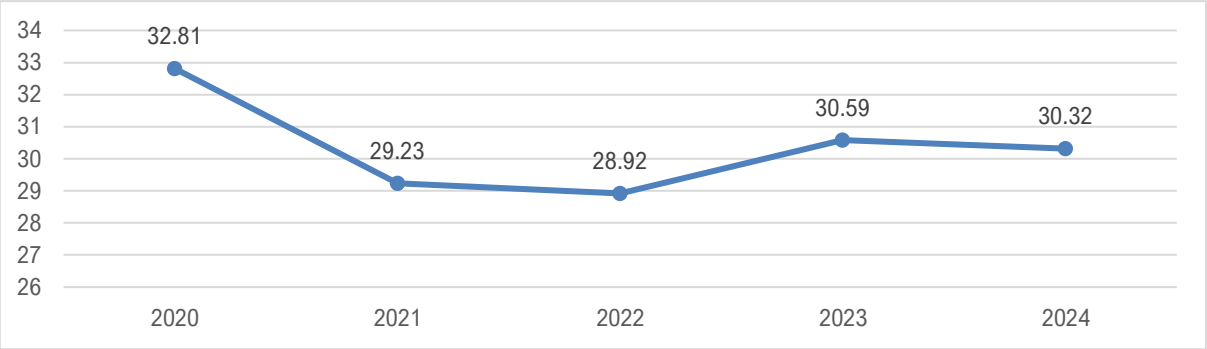

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

d. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Dukungan pembiayaan yang memadai dibutuhkan untuk pembangunan kesehatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menetapkan alokasi anggaran minimal 5 persen dar APBN dan 10 persen dari APBD untuk sektor kesehatan. Data menunjukkan selama periode tahun 2020-2024, persentase belanja kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang secara konsisten berada di atas ambang minimal alokasi anggaran dari APBD yang ditetapkan dengan tren yang meningkat dalam tiga tahun terakhir. Dengan pengalokasian anggaran yang kuat, terintegrasi, stabil, dan berkelanjutan, pemerintah daerah dapat meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Grafik 2.218
Persentase Belanja Kesehatan (10%) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

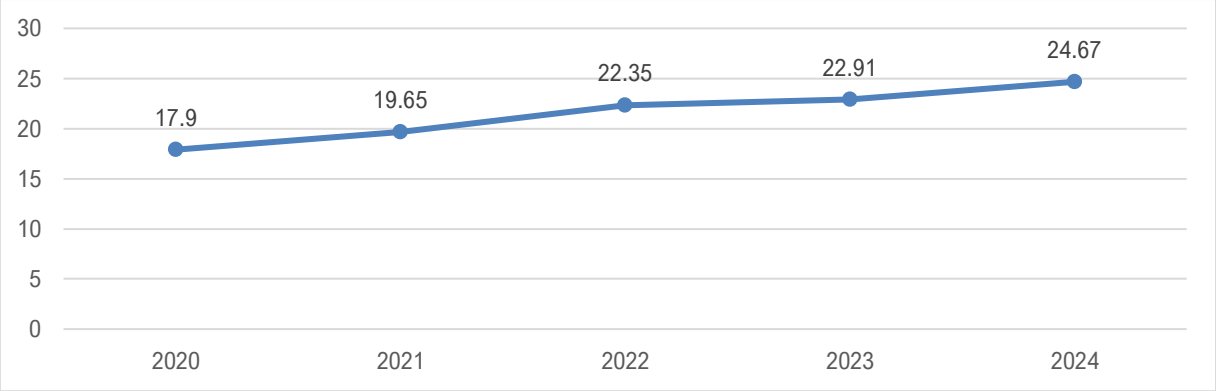

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

e. Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa

Bagi hasil merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki implikasi yang sangat luas, tidak hanya bagi pemerintah daerah itu sendiri, tetapi juga bagi berbagai pihak yang terlibat. Prinsip dasar dari bagi hasil adalah memastikan asas keadilan bagi daerah yang berhak.

Dalam lima tahun terakhir, bagi hasil kabupaten/kota dan desa di Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2020, bagi hasil mencatatkan angka 11,71 persen, mengalami penurunan signifikan di tahun 2021 dan

2022 menjadi 6,43 dan 3,21 persen. Kemudian kembali mengalami tren positif di tahun 2023 dan 2024 menjadi 10,11 dan 10,62 persen.

Grafik 2.219
Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

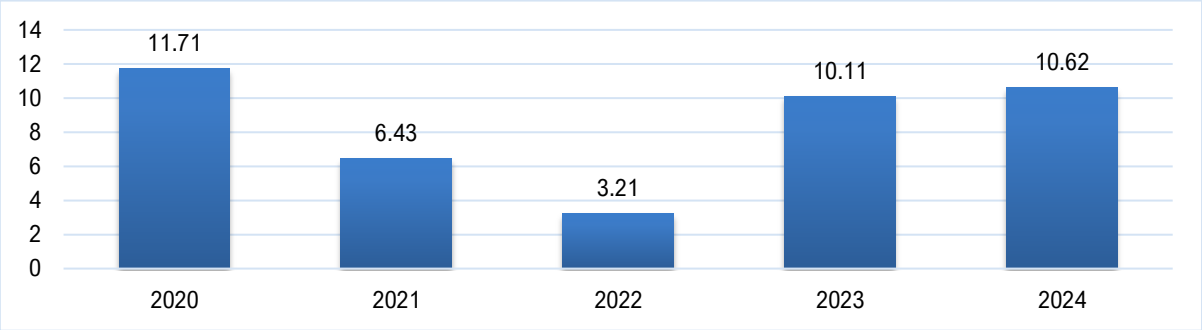

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

f. Penetapan APBD

Setiap tahun APBD Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan melalui proses pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). APBD disusun dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan pendapatan daerah. Selama kurun waktu 2020-2024, penetapan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang selalu dilakukan tepat waktu.

3. Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan

a. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Meningkatkan kualitas pegawai merupakan bagian integral dari upaya reformasi pemerintahan untuk mencapai *good governance*. Salah satu strategi yang digunakan adalah melalui penyediaan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi serta tuntutan perkembangan internal dan eksternal. Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Sidenreng Rappang telah secara konsisten mengalokasikan rata-rata 20 jam pembelajaran per tahun bagi pegawai dalam program Pendidikan dan pelatihan.

Grafik 2.220
Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (JP/Tahun)

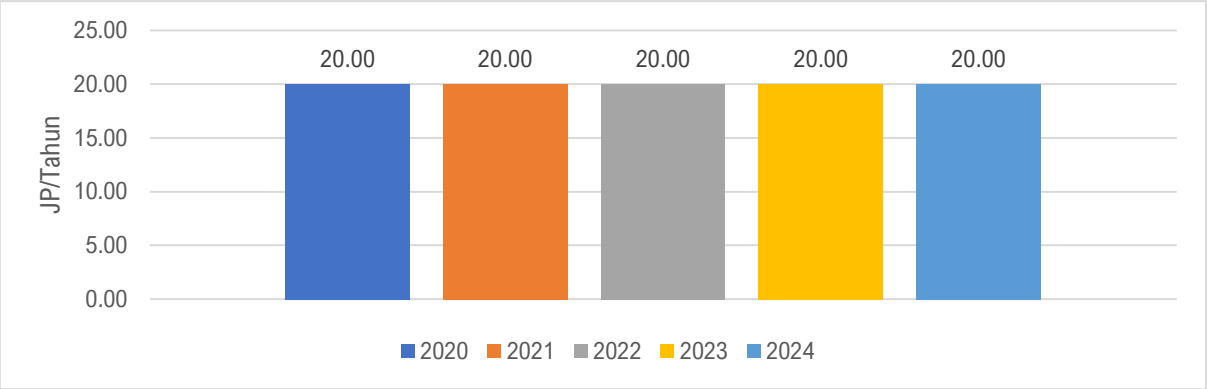

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

b. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dalam upaya meningkatkan kualitas ASN, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengambil langkah melalui pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 210 Ayat (2) mengenai pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, dan/atau pelatihan (Diklat). Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan bagi ASN dilaksanakan melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar. Pada tahun 2019, hanya 2,59 persen dari total ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Angka ini sedikit meningkat pada tahun 2020 menjadi 3,00 persen, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2023 yang hanya mencapai 0,38 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN di Kabupaten Sidenreng Rappang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.

Tabel 2.61
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
3,00	1,04	1,57	0,38	2,86

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

c. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Selama lima tahun terakhir, partisipasi ASN dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan belum mencapai seperdua dari total ASN. Meskipun demikian, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2021, dimana 75 persen pejabat ASN telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Namun karena kendala anggaran, pada tahun 2022, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kembali menurun drastis menjadi hanya 13 persen. Tren negatif ini berlanjut pada tahun 2023, di mana hanya 2,91 persen. Tahun 2024, ada sedikit peningkatan pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan structural, dengan angka 8,94 persen.

Grafik 2.221
Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

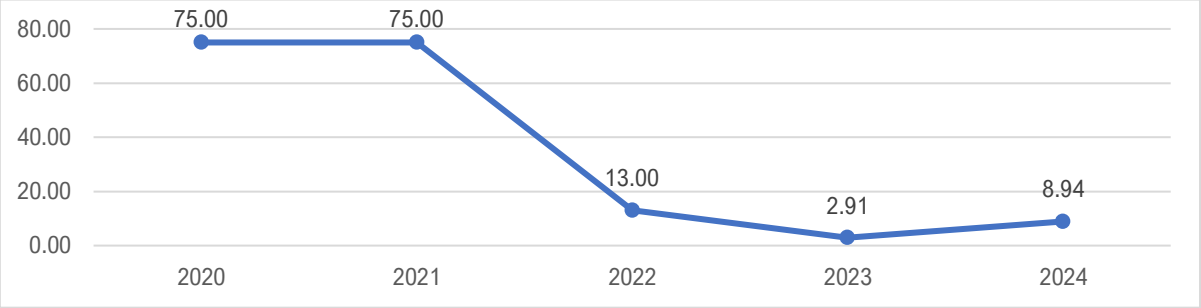

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

d. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Pada tahun 2017 terjadi penyesuaian sesuai dengan amanat PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 yang mengakibatkan adanya perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya yang berjumlah 27 jabatan. Tahun 2020, mencatat jumlah jabatan pimpinan tinggi di pemerintah daerah, mencapai 33 orang. Namun, mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 30 dan 32 jabatan, sebelum kembali meningkat menjadi 33 jabatan di tahun 2023 sampai tahun 2024.

Grafik 2.222
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2020-2024

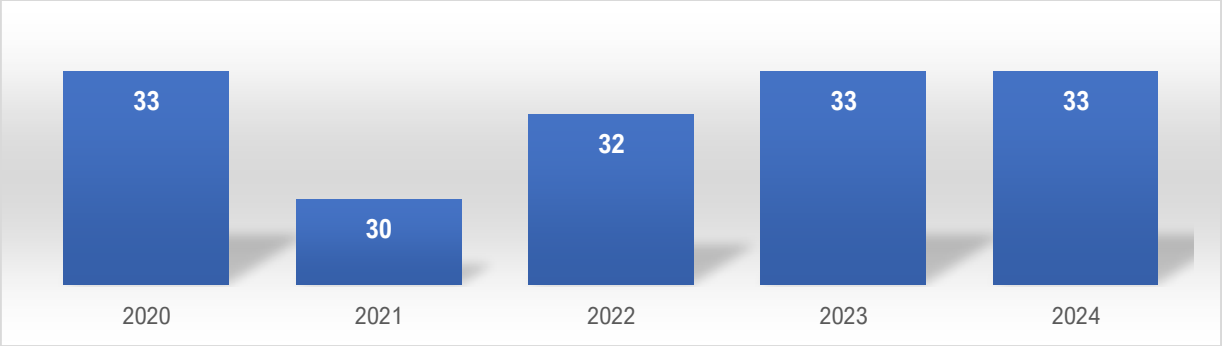

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

e. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

Selama lima tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah jabatan administrasi. Dari 817 jabatan pada tahun 2020, melonjak menjadi 1.281 jabatan di tahun 2024.

Grafik 2.223
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2020-2024

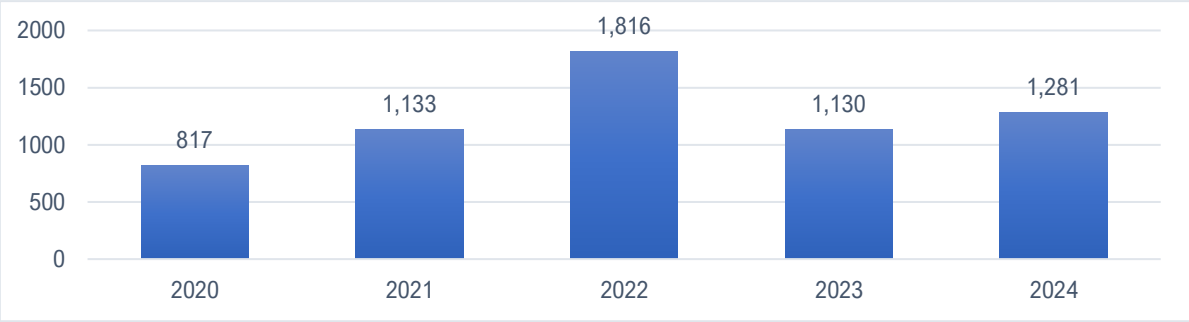

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

f. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam periode waktu 2020 hingga 2024 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah pemangku jabatan fungsional mencapai 3.073, kemudian mengalami penurunan menjadi 3.505 pada tahun 2021. Di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 3.100 jabatan fungsional baru karena penyetaraan jabatan. Angka ini kemudian mengalami penurunan di tahun 2023 dan 2024 menjadi 2.970 dan 2.960 pemangku jabatan fungsional tertentu.

Grafik 2.224
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah
di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024

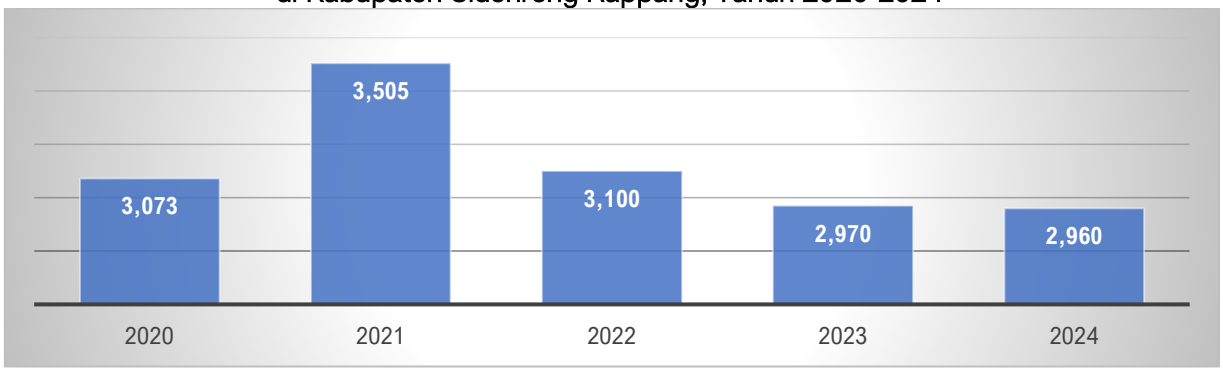

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

4. Penelitian Dan Pengembangan

a. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah memberikan pedoman yang jelas tentang perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Pada bagian kedua tentang rencana kerja Kelitbangan Pasal 9 dijelaskan bahwa Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun Rencana Kerja Kelitbangan. Rencana Kerja Kelitbangan terdiri dari Rencana Induk Kelitbangan (RIK) yang

berlaku untuk jangka waktu lima tahun, serta Rencana Kerja Tahunan. RIK menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah wajib mengintergrasikan kegiatan Kelitbangan ke dalam agenda pembangunan jangka Panjang yang sudah di rencanakan.

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Sidenreng Rappang memasukkan semua rencana Kelitbangan dalam RPJMD ke RKPD. Indikator yang dapat digunakan adalah angka persentase implementasi rencana Kelitbangan yang mencapai 100 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Itu berarti, pemerintah daerah mengadopsi semua rencana kelitbangan di RPJMD masuk kedalam RKPD.

b. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Hasil penelitian yang tidak diaplikasikan secara efektif sering kali menjadi masalah dalam pengelolaan sumber daya. Tantangan selanjutnya setelah penelitian dilakukan adalah memastikan bahwa temuan tersebut tidak hanya berakhir sebagai dokumen, tetapi bermanfaat, baik dalam bentuk kebijakan atau teknologi tepat guna. Dengan merancang inplementasi yang jelas dan memastikan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi, hasil penelitian dapat menjadu sumber daya berharga dalam memecahkan permasalahan di daerah. Berbeda dengan daerah lain, Kabupaten Sidenreng Rappang satu diantara sedikit daerah yang memanfaatkan hasil Kelitbangan secara optimal, dilihat dari angka persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan yang sudah mencapai 100 persen sejak tahun 2020 hingga 2024.

c. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Selain penyusunan rencana induk Kelitbangan, perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan diharuskan untuk membuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa). SIDa merupakan suatu system komprehensif yang memfasilitasi proses kolaboratif untuk menumbuhkembangkan inovasi antara berbagai lembaga dan entitas, termasuk pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat setempat. Dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK) dan SIDa saling melengkapi dengan tujuan untuk mengubah hasil penelitian menjadi inovasi yang efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada di daerah.

Perangkat dearah yang bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan berperan sebagai fasilitator utama yang memfasilitasi semua perangkat dalam menerapkan inovasi. Selama lima tahun terakhir, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mencapai 100 persen pada tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menandakan bahwa semua

perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang telah disiapkan dan didukung untuk melaksanakan inovasi dalam rangka pembangunan daerah.

d. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan Di Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengalami kemajuan yang siginifikan dalam menerapkan inovasi di berbagai sektor dalam implementasi rencana kelitbangan, pemanfaatan kelitbangan dan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan inovasi dengan mencapai angka 100 persen, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan dan peningkatan kualitas layanan publik sehingga relatif mudah untuk menerapkan semua inovasi yang diusulkan.

2.1.5.5. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

a. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Persentase tindak lanjut temuan merujuk pada angka atau proporsi hasil audit atau evaluasi yang diikuti oleh langkah-langkah tindak lanjut. Tujuan dari persentase tindak lanjut adalah untuk mengukur sejauh mana rekomendasi atau temuan yang diidentifikasi selama audit atau evaluasi telah direspons dan diimplementasikan oleh pihak yang bersangkutan. Persentase tindak lanjut temuan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuasi. Pada tahun 2020, persentase temuan yang ditindaklanjuti mencapai angka tertinggi yaitu 93,46 persen, namun kemudian mengalami penurunan hingga berada di angka 87.15 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya penurunan kepatuhan dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK oleh perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK seharusnya dilakukan dengan cepat dan memadai, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pasal 20 dan 26 dalam undang-undang tersebut mewajibkan pejabat terkait untuk secara serius menindaklanjuti hasil pemeriksaaan BPK.

Grafik 2.225
Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

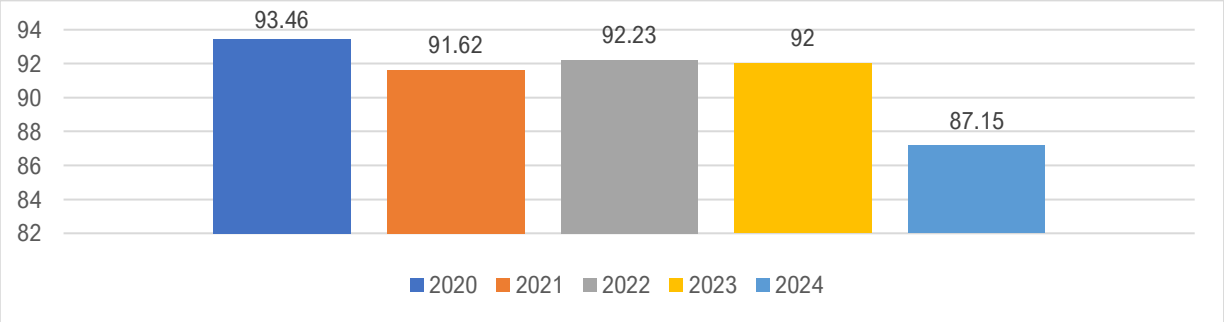

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2025

b. Jumlah Temuan BPK

Selama lima tahun terakhir, jumlah temuan BPK mengalami tren fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, tercatat ada 17 kasus temuan, kemudian mengalami peningkatan menjadi 34 kasus pada tahun 2021. Namun angka tersebut kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 23 kasus, sebelum mengalami penurunan kembali di tahun 2023, menjadi 23 kasus. Pada tahun 2024, meningkat kembali menjadi 22 kasus temuan BPK.

Grafik 2.226
Jumlah Temuan BPK di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

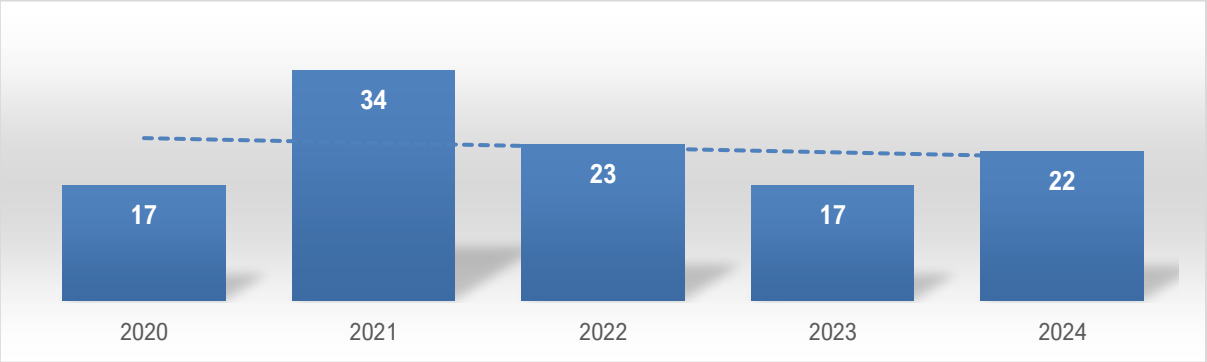

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

2.1.6. Standar Pelayanan Minimal

2.1.6.1. Urusan Pendidikan

1. Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar

Partisipasi pendidikan dasar merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur capaian program wajib belajar 9 tahun. Rentang usia 7 – 15 tahun mencakup anak-anak yang semestinya berada pada jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Tingkat partisipasi anak pada rentang usia ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar telah terpenuhi secara merata. Indikator ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkualitas.

Grafik 2.227
Jumlah Warga Negara yang Berpartisipasi Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

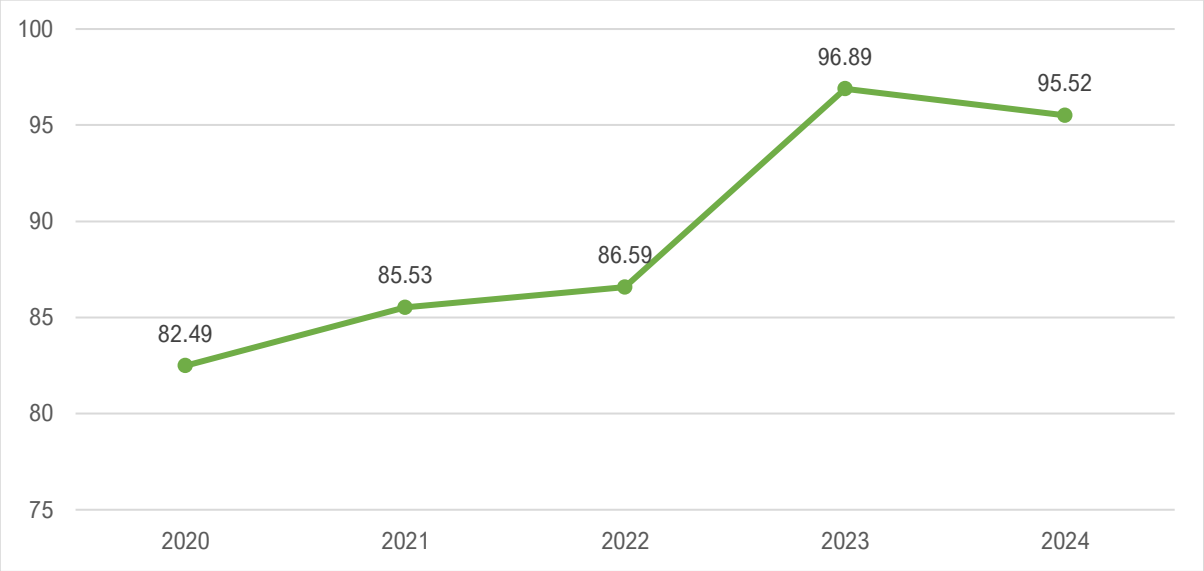

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren yang positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat sebesar 82,49 persen. Angka ini terus meningkat pada tahun 2021 dan 2022 berturut-turut menjadi 85,53 persen dan 86,59 persen. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023, melonjak menjadi 96,89 persen. Namun mengalami penurunan menjadi 95,52 persen pada tahun 2024.

Penurunan angka partisipasi pendidikan dasar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya terbatasnya fasilitas pendidikan yang memadai, terutama di daerah terpencil, serta masalah ekonomi yang masih dihadapi oleh sebagian keluarga yang menghambat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, fenomena putus sekolah pada jenjang SMP masih menjadi masalah serius yang perlu dicarikan solusinya. Terdapat pula faktor sosial yang mempengaruhi keputusan orang tua dalam menyekolahkan anak, seperti ketidakmampuan ekonomi dan kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan.

2. Persentase Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional

Kemampuan literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar yang sangat penting bagi siswa sekolah dasar sebagai fondasi dalam proses pembelajaran di jenjang berikutnya. Literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca, tetapi juga mencakup keterampilan memahami, menafsirkan, serta menggunakan informasi dari berbagai jenis teks. Sementara itu, numerasi meliputi kemampuan untuk berpikir logis, memahami konsep bilangan, serta menerapkan keterampilan matematika dalam kehidupan sehari-hari.

Grafik 2.108
Persentase Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

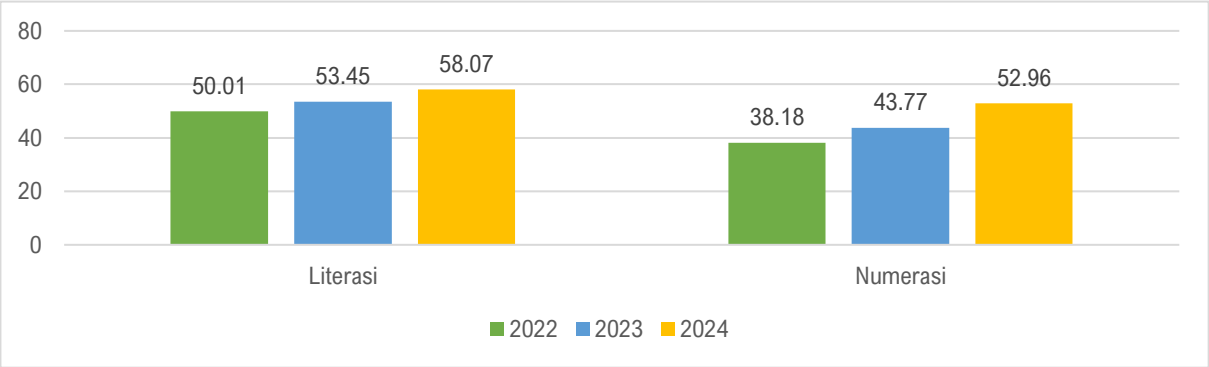

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan adanya peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa sekolah dasar dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, persentase capaian literasi siswa berada di angka 50,01 persen, kemudian meningkat signifikan dari 53,45 persen pada tahun 2023 menjadi 58,07 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pembelajaran literasi di tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mencerminkan upaya yang lebih baik dalam membekali siswa dengan kemampuan dasar membaca, menulis, dan memahami teks.

Sementara itu, kemampuan numerasi siswa sekolah dasar berdasarkan hasil asesmen nasional juga menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2022, persentase capaian numerasi baru mencapai 38,18 persen. Mengalami peningkatan signifikan dari 43,77 persen pada tahun 2023 menjadi 52,96 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan dalam kemampuan siswa untuk memahami dan menerapkan konsep matematika dasar, seperti operasi bilangan, pengukuran, dan pemecahan masalah sederhana.

Grafik 2.108
Persentase Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SMP Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

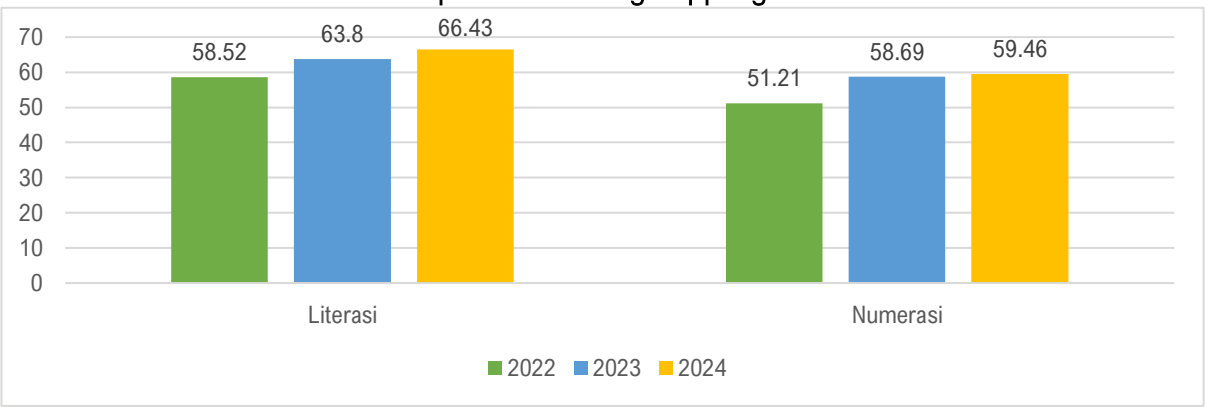

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan adanya peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa sekolah menengah pertama dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, persentase

capaian literasi siswa berada di angka 58,52 persen, kemudian meningkat menjadi 63,8 persen pada tahun 2023, dan 59,46 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan adanya kemajuan dalam kualitas pengajaran literasi di tingkat sekolah menengah pertama, yang mencerminkan peningkatan kemampuan siswa dalam memahami teks dan berkomunikasi secara efektif.

Pada aspek kemampuan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil asesmen nasional mengalami sedikit peningkatan dari 58,69 pada tahun 2023 menjadi 59,46 pada tahun 2024. Meskipun peningkatannya tidak sebesar pada level SD, hal ini tetap menunjukkan adanya kemajuan dalam kemampuan siswa SMP dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep matematika yang lebih kompleks.

3. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan bentuk layanan pendidikan nonformal yang ditujukan bagi warga negara, khususnya usia 7–18 tahun, yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Program ini menjadi solusi bagi anak-anak yang putus sekolah atau tidak dapat mengakses pendidikan formal karena berbagai hambatan sosial, ekonomi, atau geografis. Melalui satuan pendidikan nonformal seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), mereka dapat mengikuti program Paket A, Paket B, dan Paket C yang setara dengan SD, SMP, dan SMA.

Partisipasi dalam pendidikan kesetaraan mencerminkan komitmen negara untuk menjamin hak setiap anak atas pendidikan, tanpa terkecuali. Selain memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan formal secara setara, program ini juga membekali peserta dengan keterampilan dasar dan penanaman nilai-nilai karakter, agar mereka dapat kembali ke jalur pendidikan atau terjun ke dunia kerja dengan lebih siap dan percaya diri.

Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (untuk mereka yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah) mengalami kenaikan signifikan dari 7,56% pada tahun 2023 menjadi 16,88% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan akses terhadap pendidikan kesetaraan di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang membantu anak-anak dan remaja yang sebelumnya tidak dapat mengakses pendidikan formal untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara.

Grafik 2.228
Jumlah warga negara yang berpartisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

4. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional diperoleh dari jumlah satuan pendidikan di daerah yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah. Literasi membaca adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi berbagai jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), sedangkan kemampuan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Grafik 2.229
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Sidenreng RappangTahun 2021-2024

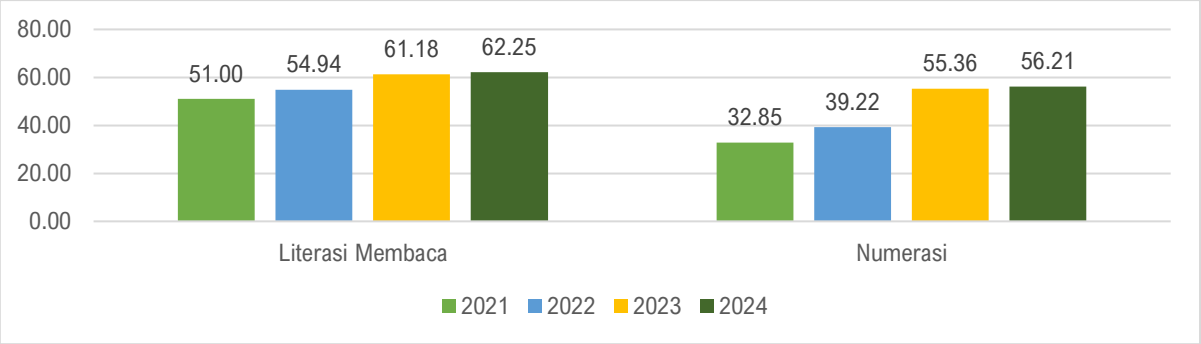

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk kemampuan literasi membaca tercatat 51,00 persen, meningkat menjadi 62,25 persen pada tahun 2024. Demikian halnya pada kemampuan numerasi, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum juga mengalami peningkatan, yaitu 32,85 persen pada tahun 2021, meningkat menjadi

56,21 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan kualitas pemerataan pendidikan terutama pada aspek hasil pembelajaran di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Salah satu indikator untuk melihat kemajuan sumberdaya manusia yang berdaya saing adalah kualitas pendidikan yang digambarkan dari hasil pembelajaran melalui capaian literasi membaca dan numerasi suatu daerah. Literasi membaca adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), sedangkan Kemampuan numerasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Pada tahun 2024 capaian literasi pada tingkat SD/Sederajat berdasarkan surat edaran Mendikbudristek sebesar 58,07 persen dan capaian numerasi 52,96 persen sementara untuk jenjang SMP/Sederajat capaian literasi sebesar 66,43 persen dan untuk capaian numerasi pada jenjang yang sama sebesar 59,46 persen.

5. Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak.

Grafik 2.230
Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)

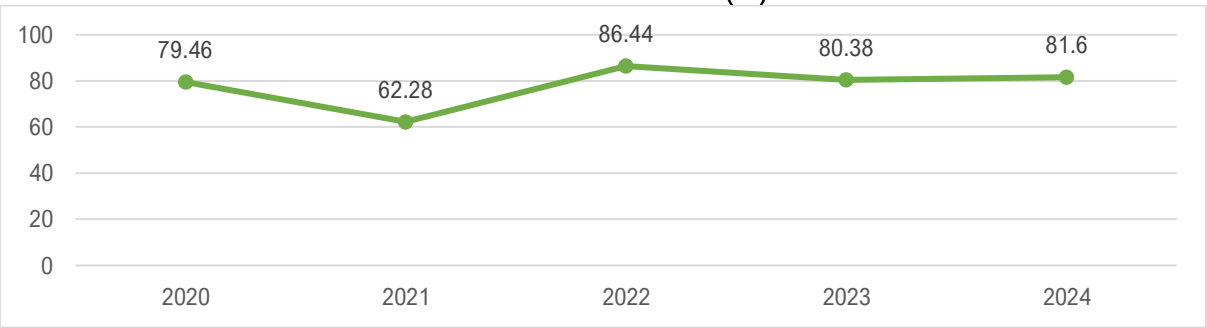

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

Tingkat partisipasi anak usia 5 – 6 tahun pada PAUD di Kabupaten Sidenreng Rappang terus menunjukkan fluktuatif sepanjang lima tahun terakhir. Tahun 2020, tingkat partisipasi tercatat sebesar 79,46 persen, menurun signifikan menjadi 62,28 persen pada tahu 2021 dan terus meningkat hingga mencapai 86,44 persen pada tahun 2022. Tren ini mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 80,38 persen, yang mengalami sedikit di tahun 2024 dengan capaian 81,6 persen. Kenaikan ini menggambarkan adanya kemajuan dalam penyediaan layanan PAUD

dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dini bagi perkembangan anak-anak usia tersebut.

2.1.6.2. Urusan Kesehatan

1. Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil merupakan indikator penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Berdasarkan data terbaru, tercatat peningkatan signifikan jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan secara rutin, baik di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. Hal ini menunjukkan keberhasilan program intervensi seperti pemeriksaan kehamilan (ANC), imunisasi tetanus, serta edukasi gizi dan persiapan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Capaian ini menjadi cerminan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan kesehatan selama masa kehamilan, sekaligus hasil dari perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.

Berdasarkan data capaian pelayanan kesehatan ibu hamil di kabupaten Sidenreng rappang, tahun 2020 diperoleh data 84,4% dan meningkat signifikan di tahun 2024 menjadi 96,09%. Hal ini karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan di Puskesmas, Poskesdes, Pustu atau di Rumah sakit.

Grafik 2.231
Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024

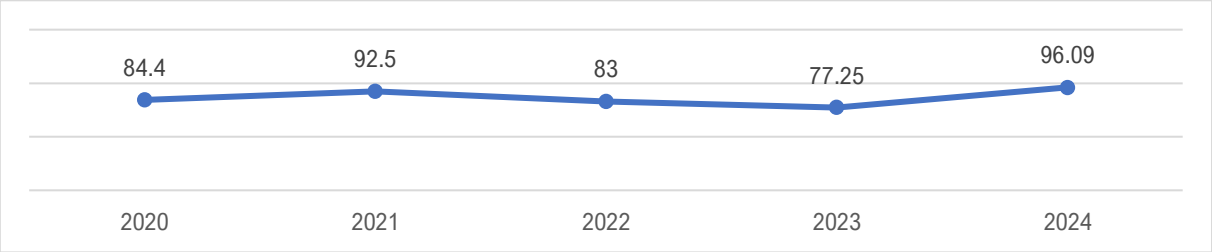

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

2. Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin merupakan aspek krusial dalam menjamin keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan. Saat ini, semakin banyak ibu melahirkan yang mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini berkontribusi langsung dalam menurunkan risiko komplikasi, seperti perdarahan dan infeksi pasca persalinan. Program persalinan aman yang digalakkan pemerintah, termasuk peningkatan kualitas Puskesmas dan rumah sakit, serta ketersediaan bidan di desa, telah mendorong meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong tenaga medis. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjamin hak setiap ibu untuk mendapatkan persalinan yang aman dan bermartabat.

Capaian Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktiatif, dari tahun 2020 sebanyak 100% mengalami penurunan di tahuh 2022 dan 2023 namun kembali mengalami kenaikan di tahun 2024 hingga menjadi 98,1%. Capaian menurun disebabkan masih ada beberapa fasilitas atau tenaga kesehatan di beberapa daerah yang belum terjangkau.

Grafik 2.232
Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024

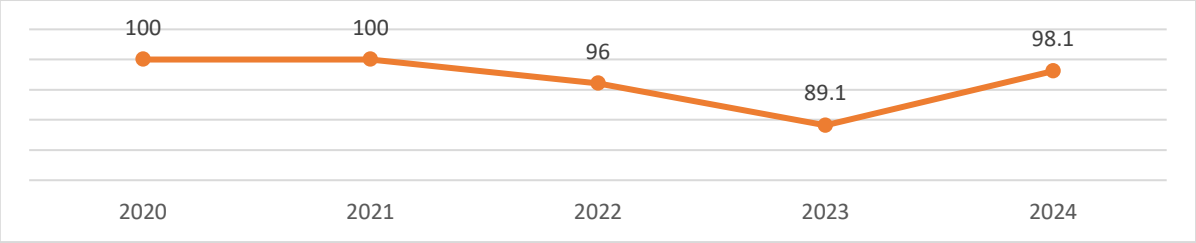

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

3. Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Saat ini, semakin banyak bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan segera setelah dilahirkan, seperti pemeriksaan fisik dasar, inisiasi menyusu dini (IMD), imunisasi hepatitis B, serta penimbangan dan pencatatan status gizi. Cakupan layanan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran orang tua dan peran aktif tenaga kesehatan dalam memberikan perlindungan sejak hari pertama kehidupan. Upaya ini menjadi bagian integral dari strategi nasional untuk menurunkan angka kematian neonatal dan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan awal kehidupan yang sehat dan layak.

Capaian jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang yaitu, di tahun 2020 mencapai 100% namun mengalami flutktuatif menurun di tahun 2022 dan 2023 dan kembali naik di tahun 2024 dengan nilai 97,4%. Capaian menurun disebabkan masih ada beberapa fasilitas atau tenaga kesehatan di beberapa daerah yang belum terjangkau.

Grafik 2.233
Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024

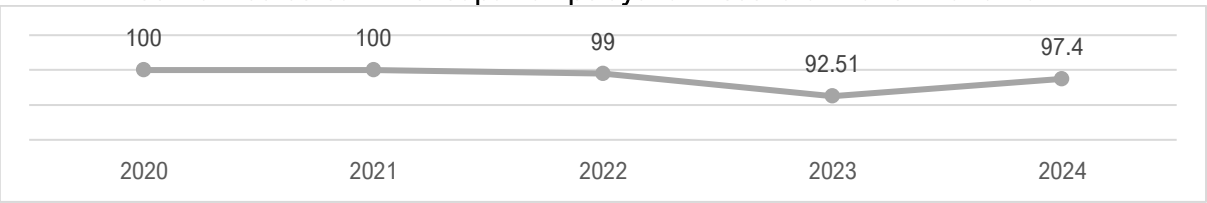

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

4. Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi balita memegang peran penting dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal pada masa-masa awal kehidupannya. Pemeriksaan rutin di Posyandu maupun Puskesmas, seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan,

pemberian imunisasi dasar lengkap, serta pemantauan perkembangan motorik dan kognitif, menjadi bagian dari layanan yang terus ditingkatkan. Selain itu, pemberian vitamin A, deteksi dini stunting, dan edukasi gizi kepada orang tua turut menjadi bagian dari upaya pencegahan masalah kesehatan sejak dini. Cakupan pelayanan yang semakin luas ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan generasi balita yang sehat, cerdas, dan bebas dari gizi buruk.

Capaian jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktuatif tiap tahunnya dimana di tahun 2020 mencapai 86,4% mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 99,45%. Capaian meningkat disebabkan karena kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat untuk membawa bayinya ke posyandu ataupun ke puskesmas.

Grafik 2.234
Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024

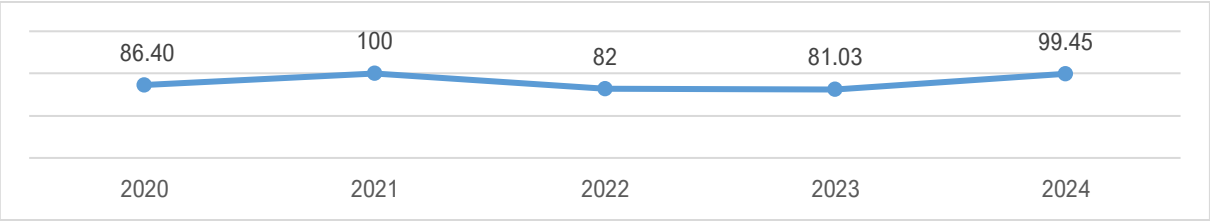

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

5. Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial mereka selama masa sekolah. Melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), anak-anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan berkala, imunisasi lanjutan, penyuluhan tentang kebersihan diri, serta pemantauan status gizi. Layanan ini juga mencakup deteksi dini gangguan penglihatan, pendengaran, dan kesehatan gigi. Dengan adanya kolaborasi antara sekolah, puskesmas, dan orang tua, diharapkan anak-anak usia sekolah dapat tumbuh sehat, aktif, serta lebih siap mengikuti proses pembelajaran dengan optimal

Capaian jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan, dimana di tahun 2020 mencapai 49,7% dan naik menjadi 96,59% di tahun 2024. Capaian peningkatan ini disebabkan karena sudah adanya layanan pemeriksaan kesehatan di sekolah-sekolah.

Grafik 2.235
Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024

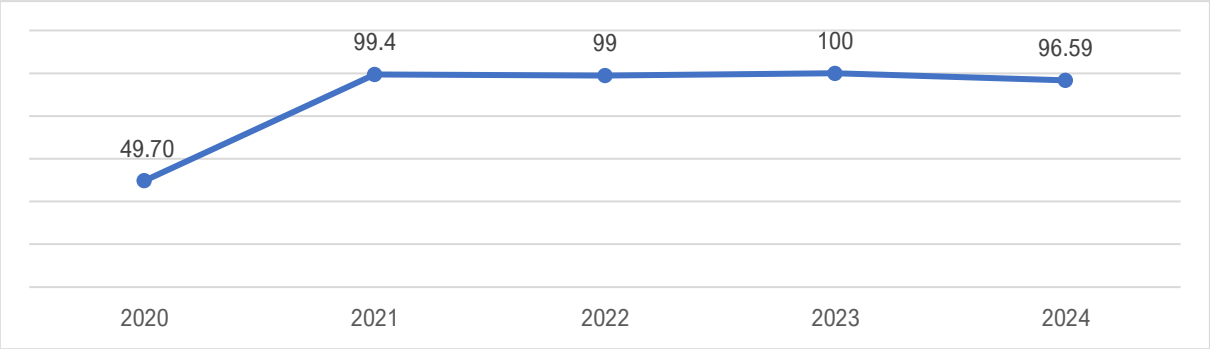

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

6. Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan

Kelompok usia produktif merupakan pilar penting dalam pembangunan, sehingga pelayanan kesehatan bagi mereka menjadi prioritas utama. Layanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan berkala, edukasi gaya hidup sehat, deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, serta pemeriksaan kesehatan reproduksi. Selain itu, program kesehatan kerja dan kesehatan jiwa juga mulai diperkuat untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental di tengah tekanan kehidupan modern. Dengan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan mudah diakses, diharapkan usia produktif tetap sehat, bugar, dan mampu berkontribusi maksimal dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Capaian jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan, dimana di tahun 2020 hanya mencapai 43,05% dan naik menjadi 97,56% di tahun 2024. Capaian peningkatan ini disebabkan karena sudah adanya inovasi layanan kesehatan yang mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat usia produktif, disamping itu juga kesadaran masyarakat yang sudah meningkat untuk meriksakan kesehatannya di fasilitas layanan kesehatan terdekat.

Grafik 2.236
Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024

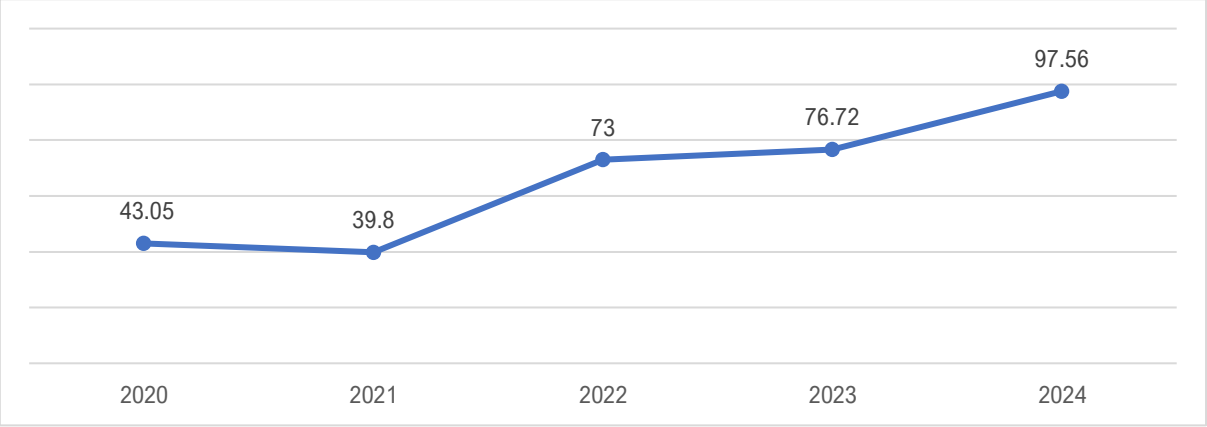

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

7. Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi usia lanjut menjadi semakin penting seiring meningkatnya harapan hidup dan jumlah penduduk lansia. Layanan ini difokuskan pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia, seperti pemeriksaan rutin tekanan darah, kadar gula darah, kesehatan jantung, serta penanganan penyakit kronis dan degeneratif. Selain itu, layanan kesehatan lansia juga mencakup konseling gizi, kebugaran jasmani, dan dukungan kesehatan jiwa untuk menjaga kualitas hidup mereka. Melalui posyandu lansia, kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan, dan fasilitas ramah lansia di Puskesmas maupun rumah sakit, pemerintah berupaya memastikan bahwa lansia tetap sehat, mandiri, dan bermartabat di masa tua.

Capaian jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan, dimana di tahun 2020 hanya mencapai 58,69% dan naik menjadi 83,22 % di tahun 2024. Capaian peningkatan ini disebabkan karena sudah adanya layanan kesehatan posyandu terintegrasi untuk usia lanjut, disamping itu juga kesadaran masyarakat yang sudah meningkat untuk meriksakan kesehatannya di fasilitas layanan kesehatan terdekat.

Grafik 2.237
Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024

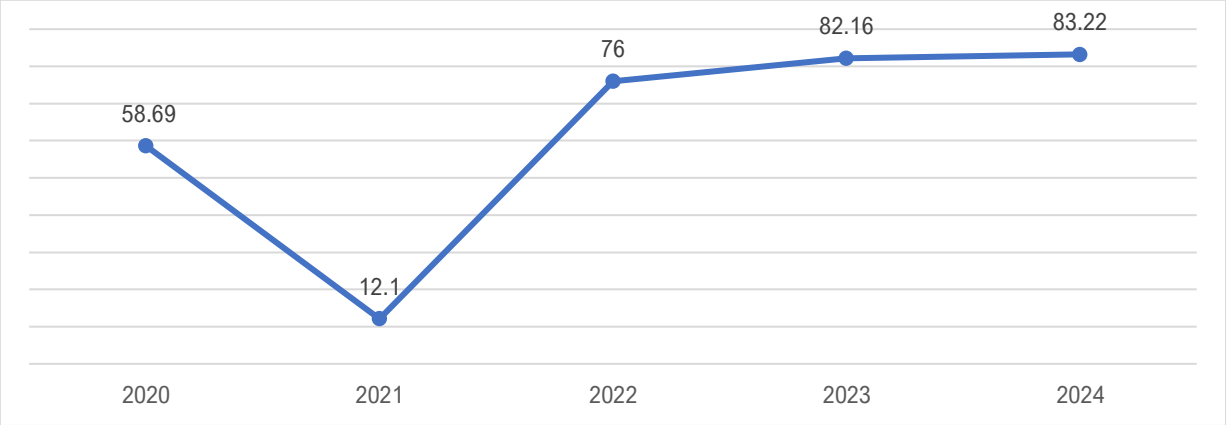

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

8. Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan komplikasi penyakit tidak menular seperti stroke, gagal jantung, dan penyakit ginjal kronis. Layanan ini mencakup deteksi dini melalui pemeriksaan tekanan darah secara rutin, edukasi tentang pola makan sehat rendah garam, peningkatan aktivitas fisik, serta kepatuhan minum obat. Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya juga menyediakan program manajemen penyakit kronis (Prolanis) yang mendampingi penderita hipertensi dalam mengontrol tekanan darah secara berkelanjutan. Dengan pendekatan preventif dan pengelolaan yang baik, diharapkan kualitas hidup penderita hipertensi dapat tetap terjaga dan risiko komplikasi dapat ditekan

Capaian jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan, dimana di tahun 2020 hanya mencapai 23,75% dan naik menjadi 41,91% di tahun 2024. Walaupun sudah ada capaian peningkatan, namun capaian di tahun 2024 masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih menganut paradigma sakit, yaitu Penderita hipertensi memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan hanya ketika dia sakit.

Grafik 2.238
Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Tahun 2020-2024

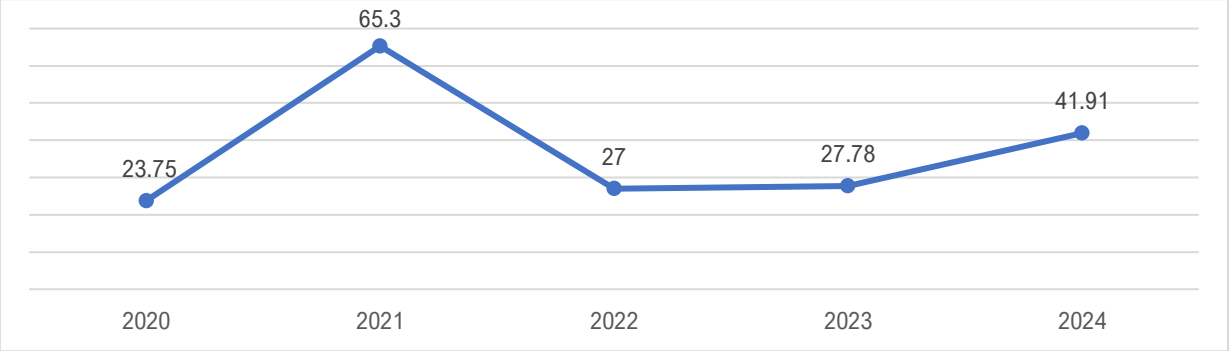

Sumber: Data diolah, 2025

9. Jumlah warga negara penderita Diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus difokuskan pada pengelolaan jangka panjang untuk mencegah komplikasi serius seperti kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, hingga penyakit jantung. Layanan ini mencakup pemeriksaan gula darah secara berkala, edukasi tentang pengaturan pola makan, aktivitas fisik, serta kepatuhan dalam penggunaan obat atau insulin. Melalui program Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) di Puskesmas, penderita diabetes mendapatkan pendampingan berkelanjutan dari tenaga kesehatan. Pendekatan holistik dan terintegrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan menekan angka komplikasi akibat diabetes.

Capaian jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan, dimana di tahun 2020 hanya mencapai 44,59% dan naik menjadi 95,95% di tahun 2024. Capaian peningkatan ini ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat serta keberhasilan program PROLANIS di Puskesmas khususnya untuk penderita penyakit Diabetes Melitus.

Grafik 2.239
Jumlah warga negara penderita diabetes meilitus 2020-2024

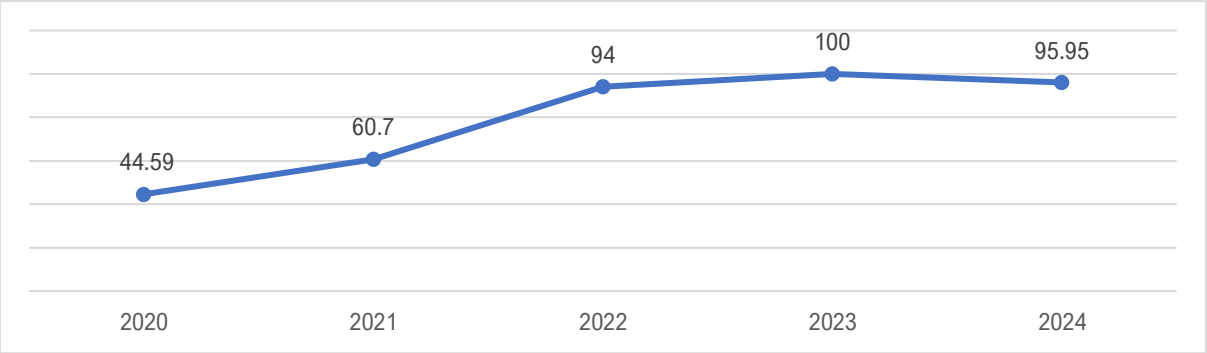

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

10. Jumlah warga negara penderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan untuk penderita gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia dan gangguan bipolar, dirancang untuk memberikan dukungan menyeluruh—mulai dari deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial. Melalui layanan di Puskesmas serta Rumah Sakit Jiwa (RSJ), pasien mendapatkan akses konsultasi psikiatri, terapi psikososial, dan terapi obat-obatan standar sesuai pedoman WHO dan Kementerian Kesehatan. Program pengobatan secara berkala digabungkan dengan kegiatan rehabilitasi melalui Klinik Kesehatan Jiwa dan posyandu lansia/jiwa, memberikan lingkungan ramah dan pendampingan bagi pasien. Selain itu, keluarga dilibatkan aktif sebagai bagian dari proses perawatan—mendapatkan edukasi tentang gejala, manajemen risiko kekambuhan, dan cara mendukung pemulihan pasien di rumah

Capaian jumlah warga negara penderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan, dimana di tahun 2020 hanya mencapai 88,2% dan naik menjadi 97,78% di tahun 2024. Capaian peningkatan ini ini disebabkan karena sudah optimalnya layanan kesehatan di Puskesmas serta kolaborasi dengan pemerintah desa/kelurahan setempat khususnya dalam penaganan penderita gangguan jiwa berat.

Grafik 2.240
Jumlah warga negara penderita gangguan jiwa berat 2020-2024

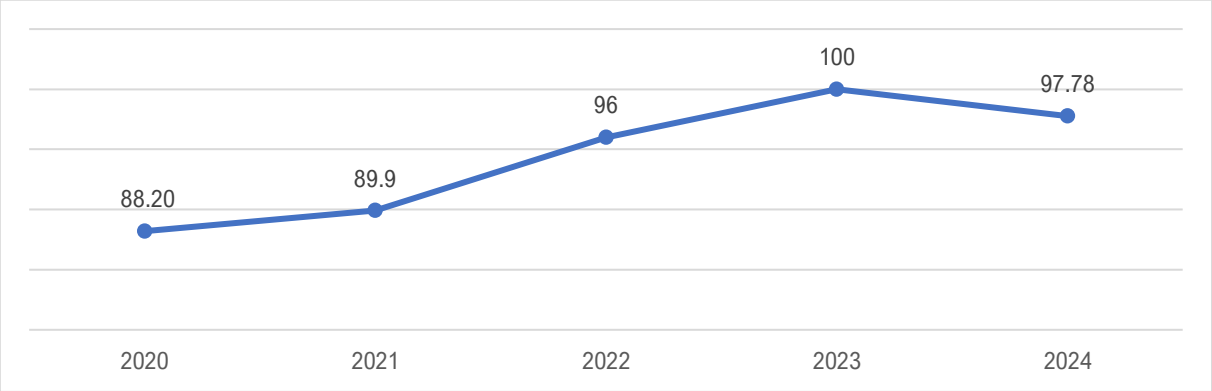

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

11. Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)* yang mendapatkan layanan Kesehatan

Layanan kesehatan bagi warga yang berisiko atau telah terinfeksi HIV/AIDS merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah dalam pengendalian penyakit menular yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Melalui layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT), penderita dapat mengetahui status HIV mereka secara rahasia dan aman. Bagi yang terkonfirmasi positif, fasilitas kesehatan menyediakan terapi antiretroviral (ARV) secara gratis untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh. elain pengobatan, layanan juga mencakup pendampingan psikososial, edukasi untuk mencegah penularan lebih lanjut, serta program pencegahan penularan dari ibu ke anak. Upaya ini diperkuat oleh jejaring layanan dari rumah sakit, Puskesmas, dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam edukasi dan advokasi. Dengan layanan yang komprehensif dan ramah, diharapkan orang dengan HIV dapat hidup sehat, produktif, dan bebas dari stigma.

Capaian jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan, dimana di tahun 2020 hanya mencapai 80,58% dan naik menjadi 82,09% di tahun 2024. Capaian peningkatan ini ini disebabkan karena sudah optimalnya layanan kesehatan di Puskesmas serta kolaborasi dengan pemerintah desa/kelurahan setempat khususnya dalam penaganan penderita gangguan jiwa berat

Grafik 2.241
Jumlah Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia
(Human Immunodeficiency Virus) 2020-2024

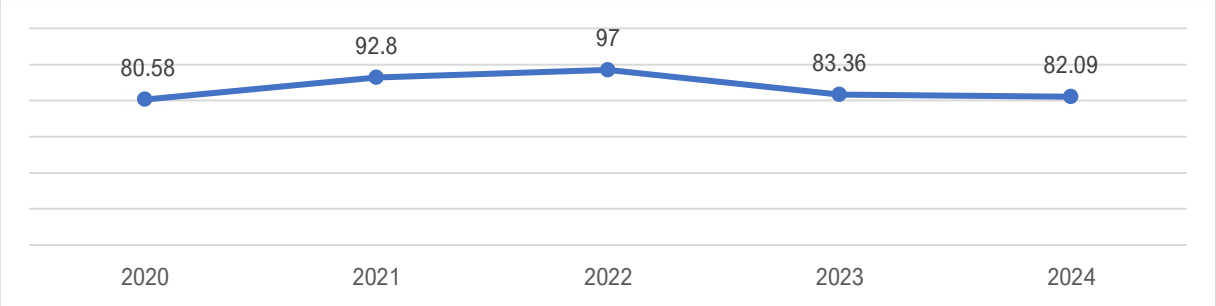

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

12. Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)* yang mendapatkan layanan Kesehatan

Layanan kesehatan bagi warga yang berisiko atau telah terinfeksi HIV/AIDS merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah dalam pengendalian penyakit menular yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Melalui layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT), penderita dapat mengetahui status HIV mereka secara rahasia dan aman. Bagi yang terkonfirmasi positif, fasilitas kesehatan menyediakan terapi antiretroviral (ARV) secara gratis untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh. elain pengobatan, layanan juga mencakup pendampingan psikososial, edukasi untuk mencegah penularan lebih lanjut, serta program pencegahan

penularan dari ibu ke anak. Upaya ini diperkuat oleh jejaring layanan dari rumah sakit, Puskesmas, dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam edukasi dan advokasi. Dengan layanan yang komprehensif dan ramah, diharapkan orang dengan HIV dapat hidup sehat, produktif, dan bebas dari stigma.

Capaian jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan, dimana di tahun 2020 hanya mencapai 80,58% dan naik menjadi 82,09% di tahun 2024. Capaian peningkatan ini ini disebabkan karena sudah optimalnya layanan kesehatan di Puskesmas serta kolaborasi dengan pemerintah desa/kelurahan setempat khususnya dalam penaganan penderita gangguan jiwa berat.

Grafik 2.242
Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 2020-2024

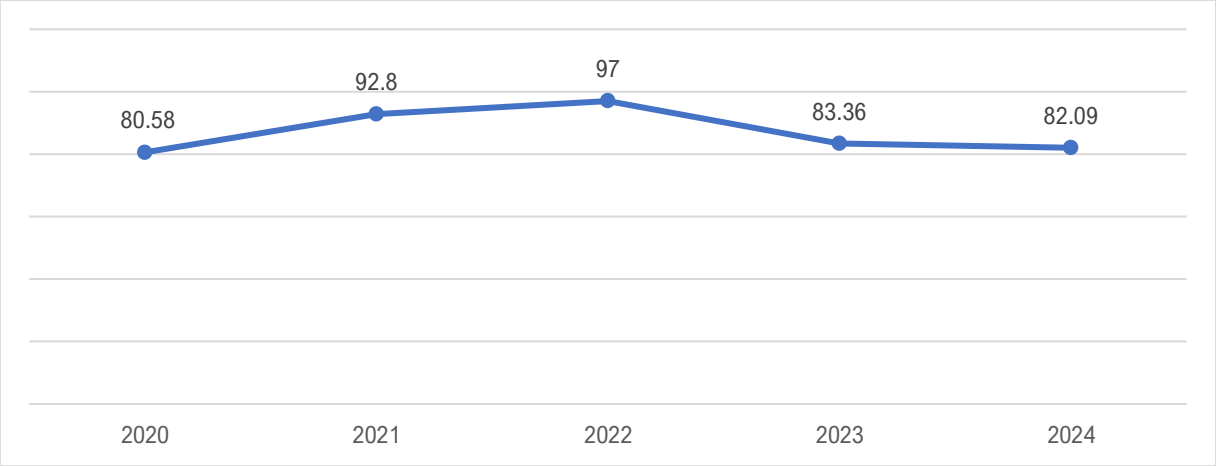

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

2.1.6.3. Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang

1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Layanan pengolahan air limbah domestik merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Air limbah domestik mencakup limbah dari kegiatan rumah tangga seperti air bekas cucian, dapur, kamar mandi, serta limbah dari kloset (black water). Pengelolaan limbah ini sangat penting agar tidak mencemari air tanah, sungai, dan sumber daya alam lainnya. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik terus meningkat, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki sistem terpusat atau tangki septik individual yang terstandar. Pemerintah daerah melalui unit pengelola sanitasi dan dukungan dari pusat berupaya memperluas cakupan layanan ini melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), sistem pengangkutan lumpur tinja terjadwal, dan edukasi masyarakat mengenai sanitasi aman.

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 mencapai 85,04 persen, meningkat menjadi 90,88

persen pada tahun 2024. Peningkatan terjadi karena adanya tambahan Pembangunan yang bersumber dari APBD maupun hibah air limbah setempat (HALS).

Grafik 2.243
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik
Tahun 2020-2024

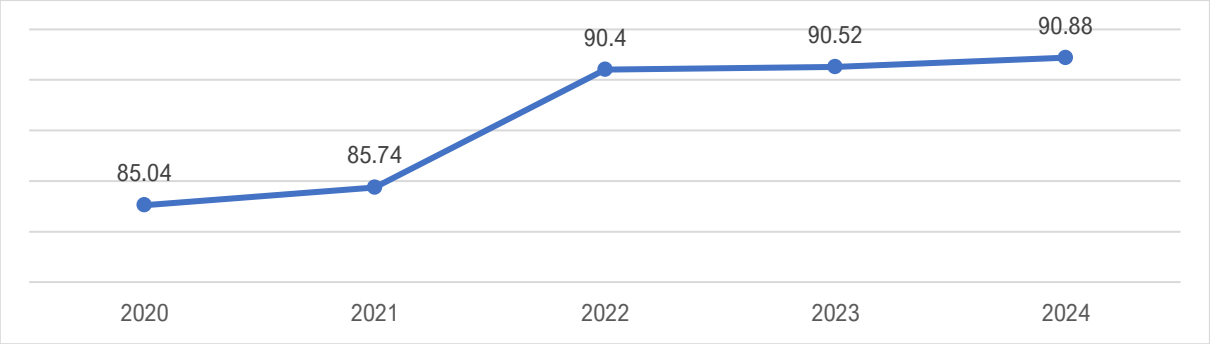

Sumber: Dinas Bina marga, cipta karya, pertanahan dan perumahan rakyat; 2025

2.1.6.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Jumlah warga negara korban bencana alam yang memperoleh rumah layak huni

Warga negara yang menjadi korban bencana alam berhak memperoleh perlindungan, termasuk hunian yang layak sebagai bagian dari pemulihan kehidupan pascabencana. Pemerintah melalui berbagai program, seperti pembangunan hunian tetap (huntap) dan bantuan stimulan perumahan, memberikan dukungan agar para korban dapat kembali hidup dengan aman dan bermartabat. Rumah yang dibangun tidak hanya memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan, tetapi juga dirancang tahan terhadap risiko bencana di masa depan. Upaya ini mencerminkan komitmen negara dalam memenuhi hak dasar warga dan membangun ketangguhan komunitas secara berkelanjutan.

Jumlah warga negara korban bencana alam yang memperoleh rumah layak huni di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 mencapai 2024 orang, menurun menjadi tidak ada di tahun 2024. Penurunan terjadi karena menurunnya anggaran yang bersumber dari APBD untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Grafik 2.244
Jumlah Warga Negara Korban Bencana Alam Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun
2020-2024

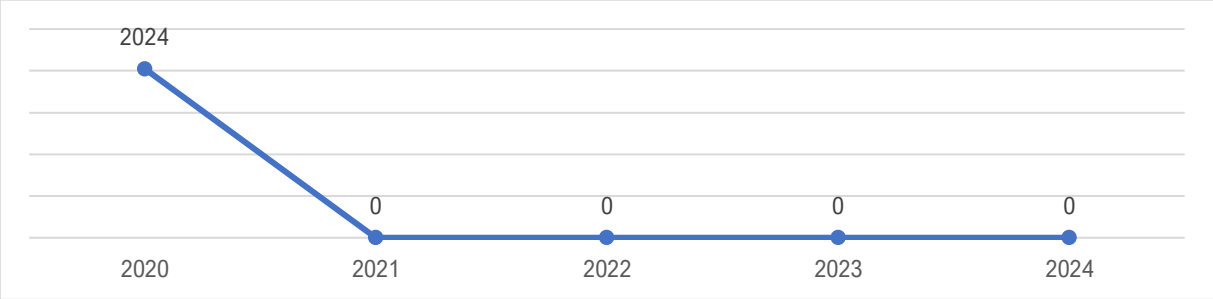

Sumber: Dinas Bina marga, cipta karya, pertanahan dan perumahan rakyat; 2025

2. **Jumlah warga negara yang terekena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni**

Relokasi warga akibat program pembangunan oleh pemerintah daerah, seperti penataan kawasan kumuh, pembangunan infrastruktur, atau normalisasi sungai, merupakan langkah strategis yang sering kali berdampak langsung pada pemukiman masyarakat. Untuk menjamin hak dasar warga yang terdampak, pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitasi berupa rumah layak huni sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemulihan.

Jumlah warga negara yang terkena relokasi di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 hingga tahun 2024 tidak ada, hal ini karena belum pernah dilakukan relokasi yang berdampak karena adanya program pemereintah setempat.

Grafik 2.245
Jumlah Warga Negara Korban Bencana Alam Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024

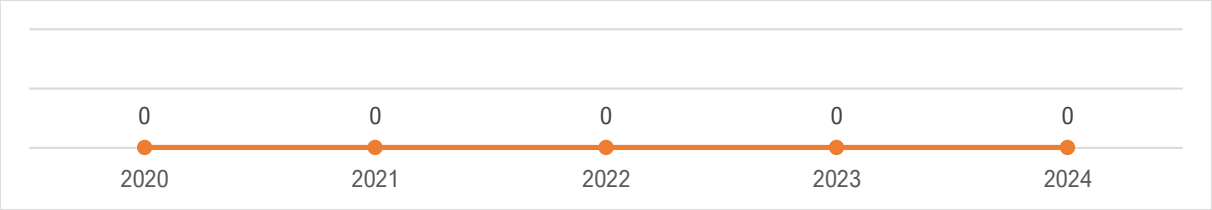

Sumber: Dinas Bina marga, cipta karya, pertanahan dan perumahan rakyat; 2025

2.1.6.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. **Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada**

Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta menjamin pelaksanaan kebijakan daerah secara efektif. Dalam proses penegakan tersebut, tidak sedikit warga negara yang terlibat atau terdampak langsung, dan oleh karena itu, pemerintah daerah juga menyediakan berbagai bentuk layanan pendukung, baik bersifat edukatif, preventif, maupun rehabilitatif. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada dapat mencakup mereka yang terjaring razia (seperti PKL, gepeng, atau pelanggar aturan ketertiban), pelaku pelanggaran ringan, atau masyarakat yang terdampak kebijakan penertiban wilayah. Layanan yang diberikan biasanya berupa pembinaan sosial, konseling, pemberian informasi hukum, pelatihan keterampilan, atau bahkan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 mencapai 70 persen, meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2024. Peningkatan terjadi karena layanan penegakan hukum dan perda sudah dapat dimanfaatkan oleh seluruh Masyarakat.

Grafik 2.246
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada Tahun 2020-2024

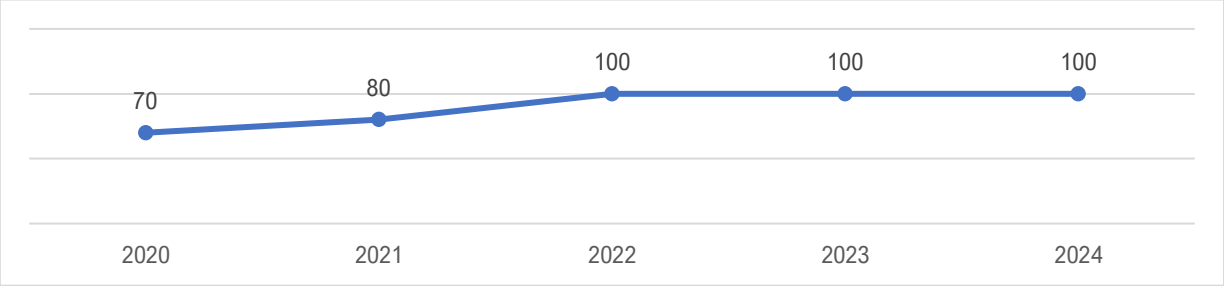

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 2025

2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan salah satu bentuk layanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda warga negara. Ketika terjadi kebakaran, petugas pemadam kebakaran (damkar) bersama tim penyelamat berperan penting dalam merespons cepat, mengevakuasi korban, serta mencegah meluasnya dampak kebakaran. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi mencerminkan efektivitas kesiapsiagaan daerah dalam menangani situasi darurat. Layanan ini tidak hanya ditujukan untuk korban langsung yang berada di lokasi kejadian, tetapi juga meliputi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang membutuhkan penanganan khusus saat evakuasi. Pelayanan ini menjadi bagian penting dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin rasa aman dan cepat tanggap terhadap risiko kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi di lingkungan permukiman, fasilitas umum, atau kawasan padat penduduk.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 mencapai 70,42 persen, meningkat menjadi 82,57 persen pada tahun 2024. Peningkatan terjadi karena layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sudah optimal dilakukan oleh pemadam kebakaran.

Grafik 2.247
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2020-2024

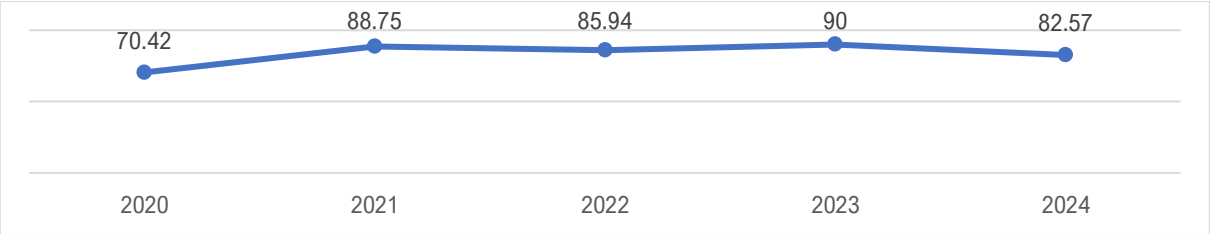

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 2025

3. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Layanan Layanan informasi rawan bencana merupakan bagian penting dari upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Layanan ini bertujuan memberikan edukasi dan peringatan dini kepada masyarakat mengenai potensi bahaya bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, atau tsunami. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana mencerminkan jangkauan pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi yang tepat, cepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi ini disampaikan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, sirine peringatan dini, radio komunitas, aplikasi digital, hingga sosialisasi langsung ke komunitas dan sekolah.

Dengan meningkatnya jumlah warga yang menerima informasi ini, diharapkan risiko korban jiwa dan kerugian akibat bencana dapat ditekan, karena masyarakat menjadi lebih siap, waspada, dan tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat terjadi. Layanan ini merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 mencapai 76 persen, meningkat menjadi 91 persen pada tahun 2024. Peningkatan terjadi karena sudah memanfaatkan media sosial, website resmi pemerintah, dan platform pesan instan untuk menyebarkan informasi bencana secara luas dan cepat yang dilakukan oleh BPBD

Grafik 2.248
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2020-2024

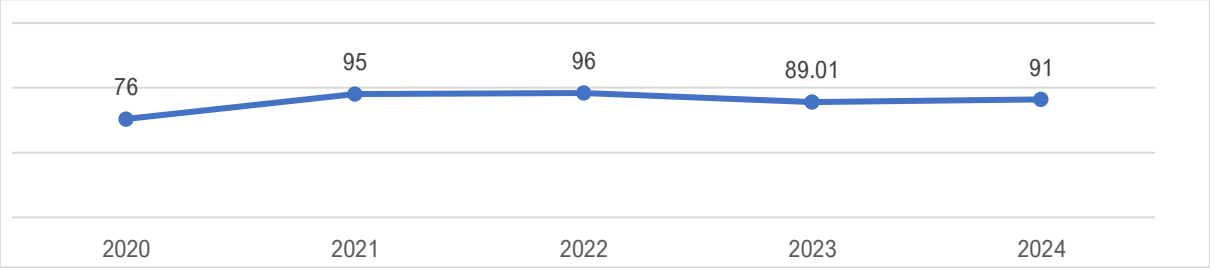

Sumber: Badan Penanggulangan bencana Daerah; 2025

4. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana

Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan bagian penting dari upaya pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat. Layanan ini mencakup berbagai kegiatan seperti edukasi kebencanaan, pelatihan evakuasi, penyusunan rencana tanggap darurat, simulasi bencana, serta penguatan komunitas siaga bencana. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan ini mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana. Semakin

banyak warga yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, semakin besar pula potensi untuk mengurangi dampak negatif saat bencana terjadi.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 mencapai 77 persen, meningkat menjadi 91 persen pada tahun 2024. Peningkatan terjadi karena kegiatan pelatihan pelatihan kesiapsiagaan di beberapa desa/kelurahan dan juga sekolah-sekolah yang dilakukan oleh BPBD.

Grafik 2.249
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2020-2024

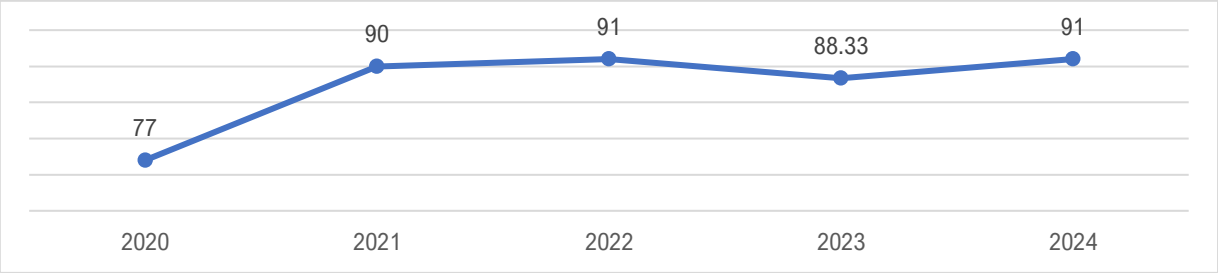

Sumber: Badan Penanggulangan bencana Daerah; 2025

5. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Layanan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana merupakan bagian krusial dari respons darurat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui tim tanggap bencana seperti BPBD, pemadam kebakaran, TNI/Polri, dan relawan. Layanan ini bertujuan untuk menyelamatkan jiwa, memindahkan warga dari zona berbahaya ke tempat aman, serta memberikan bantuan pertama pada saat kejadian bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau kebakaran besar. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi mencerminkan kapasitas daerah dalam merespons bencana secara cepat dan efektif. Semakin tinggi cakupan layanan ini, semakin besar pula peluang untuk mengurangi jumlah korban jiwa dan luka-luka, serta mempercepat proses pemulihan.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 mencapai 91 orang, menurun menjadi 57 norang pada tahun 2024. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya karena minimnya bencana yang terjadi di tahun 2024 sehingga layanan penyelematan dan evakuasi korban bencana juga kurang.

Grafik 2.250
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
Tahun 2020-2024

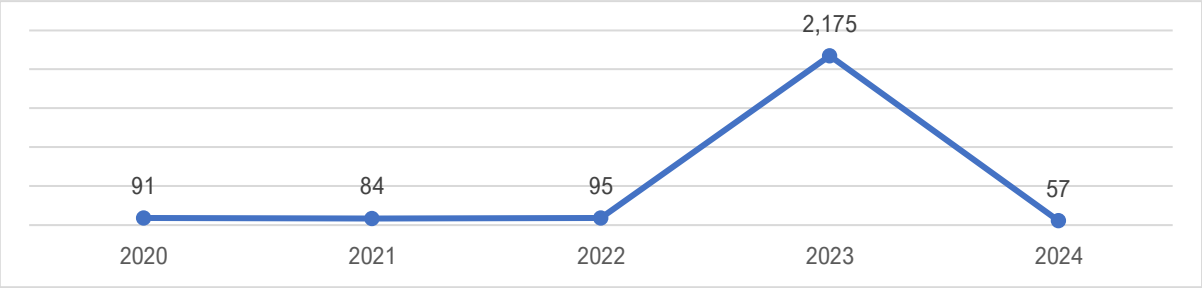

Sumber: Badan Penanggulangan bencana Daerah; 2025

2.1.6.6. Urusan Sosial

1. **Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti**

Rehabilitasi sosial di luar panti bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk layanan yang bertujuan meningkatkan kemandirian, partisipasi sosial, dan kualitas hidup mereka tanpa harus tinggal di lembaga. Layanan ini mencakup pendampingan psikososial, pelatihan keterampilan, terapi fisik dan mental, bantuan alat bantu, serta penguatan keluarga dan komunitas. Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial di luar panti terus mengalami peningkatan, seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendorong pendekatan berbasis masyarakat (community-based rehabilitation/CBR). Pendekatan ini dinilai lebih inklusif, karena memungkinkan penyandang disabilitas untuk tetap tinggal bersama keluarga dan berperan aktif di lingkungan sekitarnya.

Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi di luar panti di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari 73% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan layanan penyediaan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas sudah dijalankan dengan sempurna.

Grafik 2.251
Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti Tahun 2020-2024

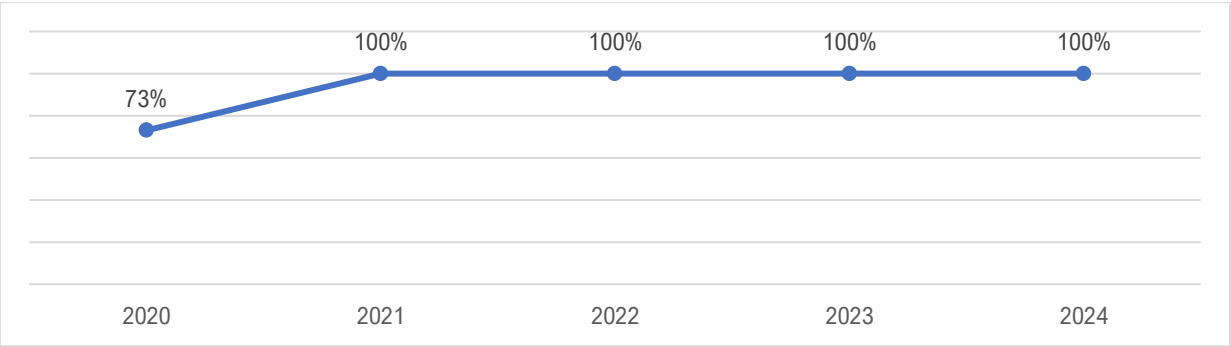

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

2. **Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti**

Rehabilitasi sosial di luar panti bagi anak terlantar merupakan bentuk layanan berbasis masyarakat yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan fungsi sosial anak tanpa harus tinggal di lembaga. Layanan ini mencakup pendampingan psikososial, latihan hidup

mandiri, konseling, terapi, dan dukungan dari tenaga sosial, yang semuanya dilakukan di lingkungan keluarga atau komunitas. Peningkatan cakupan layanan menandakan komitmen negara untuk memastikan anak-anak terlantar mendapatkan dukungan yang layak, tanpa harus dipisahkan dari keluarga dan komunitas mereka.

Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari 33% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan layanan penyediaan rehabilitasi sosial di luar panti untuk anak terlantar sudah dijalankan dengan sempurna.

Grafik 2.252
Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti Tahun 2020-2024

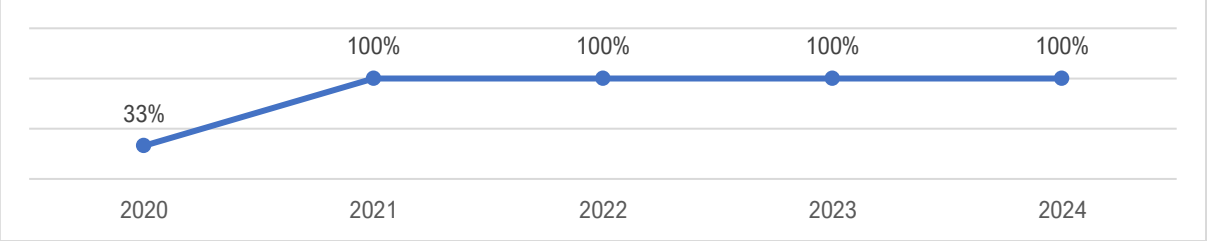

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

3. Jumlah jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti

Rehabilitasi sosial di luar panti bagi lanjut usia terlantar merupakan bentuk layanan sosial yang bertujuan untuk memulihkan, mengembangkan, dan mempertahankan fungsi sosial lansia agar mereka tetap mandiri dan bermartabat di tengah masyarakat. Layanan ini meliputi pendampingan psikososial, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dasar, pelatihan kemandirian, serta penguatan dukungan keluarga dan komunitas. Jumlah lansia terlantar yang memperoleh layanan ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan arah kebijakan yang lebih menekankan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas (community-based care) daripada penempatan di panti. Hal ini dinilai lebih efektif karena memungkinkan lansia untuk tetap berada di lingkungan sosial yang familiar, sekaligus mengurangi isolasi sosial

Jumlah warga nega lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari 7% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan layanan penyediaan rehabilitasi sosial di luar panti untuk warga negara lanjut usia sudah dijalankan dengan sempurna.

Grafik 2.253
Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti Tahun 2020-2024

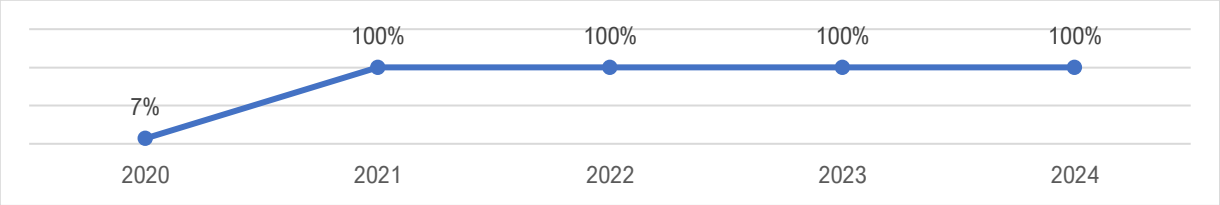

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

4. **Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti**

Rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis (gepeng) di luar panti merupakan bentuk layanan sosial yang ditujukan untuk memulihkan fungsi sosial kelompok rentan ini, agar mereka dapat hidup mandiri dan bermartabat dalam masyarakat. Layanan ini meliputi penjangkauan, konseling, pelatihan keterampilan, dukungan administratif, bantuan kebutuhan dasar, dan integrasi kembali ke keluarga atau komunitas. Jumlah gepeng yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti terus meningkat, didorong oleh pendekatan baru yang lebih humanis dan berbasis komunitas. Pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Sosial dan lembaga mitra berupaya menjangkau kelompok tuna sosial ini langsung di lapangan dan memberikan intervensi yang cepat tanpa harus menempatkan mereka di panti secara permanen.

Jumlah gelandangan dan pengemis yang yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020 berada di angka 6,67% dan meningkat menjadi 100% di tahun 2024. Angka ini menunjukkan layanan rehabilitasi untuk warga negara gelandangan dan pengemis sudah dijalankan dengan sempurna.

Grafik 2.254
Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial Tahun 2020-2024

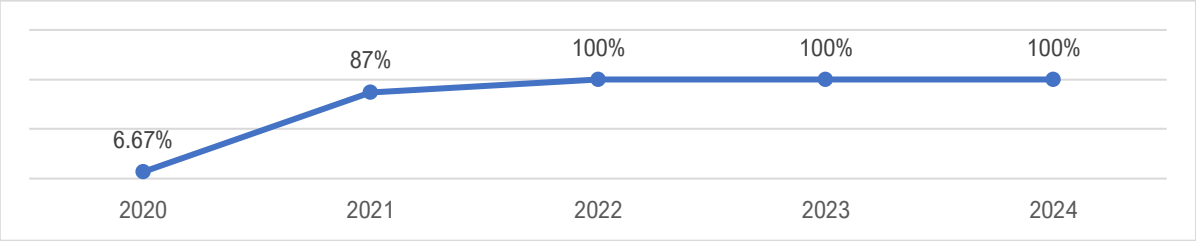

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

5. **Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**

Perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negara yang menjadi korban bencana alam maupun bencana sosial merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas rasa aman dan pemulihan kehidupan. Layanan ini mencakup pemberian bantuan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, tempat pengungsian yang layak, dukungan psikososial, hingga bantuan pemulihan ekonomi dan sosial. Jumlah warga korban bencana yang memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial di kabupaten/kota terus mengalami peningkatan, seiring dengan perbaikan sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif dan terkoordinasi. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan lembaga sosial dan kemanusiaan, berupaya memastikan bahwa setiap korban bencana menerima bantuan secara cepat, tepat, dan merata.

Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020 ke tahun 2024 berada di angka 100%. Angka ini menunjukkan layanan perlindungan dan jaminan sosial untuk warga negara korban bencana sudah dijalankan dengan sempurna.

Grafik 2.255
Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial Tahun 2020-2024

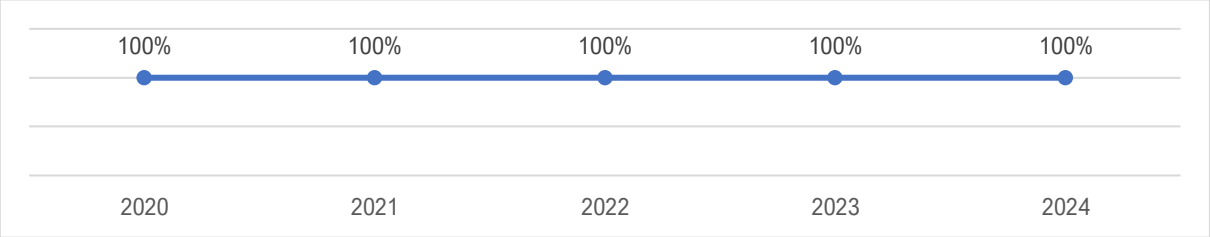

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

2.1.7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kemudian baru-baru ini diperbaharui pada Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022. TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;

11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian TPB/SDGs tahun 2024 diperoleh hasil dari 118 indikator yang diintervensi ada 43 indikator yang tidak tercapai atau sekitar 36,44% dan yang tercapai sebanyak 55 indikator atau sekitar 46,61%. Upaya pemerintah daerah dalam mengintervensi indikator SDGs masih belum optimal sehingga perlu pendekatan holistik dan integratif untuk mendukung target SDGs kedepannya. Hingga pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kembali menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs tahun 2025-2029 yang terdiri dari beberapa 76 indikator SDGs dengan komposisi

1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan (6 indikator)
2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan (5 indikator);
3. Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (15 indikator);
4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas (2 indikator);
5. Tujuan 5: Kesetaraan Gender (5 indikator);
6. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak (2 indikator);
7. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau (0 indikator);
8. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (12 indikator);
9. Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (4 indikator);
10. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan (4 indikator);
11. Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (2 indikator);
12. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (1 indikator);
13. Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim (1 indikator);
14. Tujuan 14: Ekosistem Lautan (1 indikator);
15. Tujuan 15: Ekosistem Daratan (1 indikator);
16. Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (11 indikator);
17. Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (4 indikator).

Adapun capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2020–2024 menunjukkan berbagai perkembangan yang signifikan dalam upaya pencapaian target pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tabel berikut menyajikan data capaian dari masing-masing indikator, yang mencerminkan kontribusi lintas sektor dalam mendukung agenda global serta komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Data ini menjadi dasar evaluasi dan perencanaan strategis untuk memastikan keberlanjutan program-program pembangunan di masa mendatang. Adapun Capaian Indikator TPB/ SDGs 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Capaian Target TPB/SDG's Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
PILAR SOSIAL TUJUAN 1: MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	5,05	5,04	5,11	5,14	5,02	Dinas Sosial
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	67,2	64	66,9	53,13	57,62	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	195,2	208,5	250,38	60,6	5,23	Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	0,02	0,02	0,01	BPBD
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP	Rp12.375.865.000	Rp5.365.088.000	Rp5.365.088.000	Rp20.425.900.000	Rp33.507.000	BPBD
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	0	0	0	0	0	BPBD
PILAR SOSIAL TUJUAN 2: TANPA KELAPARAN							
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*)	9,62	6,33	8,71	6,81	4,58	DTPHPKP
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	4,33	4,02	4,73	3,63	2,82	DTPHPKP
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	8,4	7,12	6,31	6,29	5,9	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	0,01	0,01	1,98	2,2	2,7	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil 15-49 tahun	10,51	12,4	8,67	6,84	10,2	Dinas Kesehatan
PILAR SOSIAL TUJUAN 3: KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	6	7	3	5	8	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh (a) tenaga kesehatan terlatih (b) di fasilitas kesehatan.	100	100	99,7	100	100	Dinas Kesehatan
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angkat Kematian Bagi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	0	0	0,4	0	0	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	3	7	10,3	10,9	17	Dinas Kesehatan
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	0,005	0,01	0,0011	0,09	0,549	Dinas Kesehatan
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	86	141	202	176	236	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	3	14	39	0,1	0,07	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	18	22	23	23	12	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	0,56	0,65	0,2	0,7	28,8	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	0,25	0,32	0,39	0,07	30	Dinas Kesehatan
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.				1	1,60	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun, umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	44,7	41,6	31,8	31,8	37	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,13	2,08	2,19	2,12	2,07	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	8,86	5,75	8,32	0,18	7,88	Dinas Pengendalian Penduduk & KB

No	Indikator	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	24,20	24,71	25,10	23,65	25,05	Dinas Kesehatan
PILAR SOSIAL TUJUAN 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS							
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	91,72	92,16	91,94	93,51	92,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan			58,98	49,80	62,41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PILAR SOSIAL TUJUAN 5: KESETARAAN GENDER							
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	2	4	3	2	2	Dinas Pemdes PPA
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	46	50	125	623	623	Dinas Pemdes PPA
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	4	4	4	4	4	Dinas Pemdes PPA
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	11	11	13	13	2	Dinas Pemdes PPA
PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	89,19	90,43	91,56	93,49	93,98	Dinas Biciptapera
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	85,04	85,74	93,14	90,52	90,88	Dinas Biciptapera
PILAR EKONOMI TUJUAN 8: PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	-5,10	7,29	8,52	8,06	6,83	Bapperida
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	44,12	47,34	51,37	55,51	59,31	Bapperida

No	Indikator	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	6,73	6,75	7,09	7,11	6,61	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	20,8	20,9	44,89	44,9	35,09	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
8.3.1.(a)	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal.	0,76	0,96	1,8	1,89	1,89	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp17.100	Rp17.500	Rp17.800	Rp17.940	Rp18.140	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	5,9	L: 3.9 P: 6.9	L: 3.4 P: 3.8	L: 3.07 P: 0.04	L: 02.01 P: 5.0	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	10,2	10	9	6,5	14,12	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	0,7	0,74	0,79	0,82	0,81	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
8.9.1.(a)	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.	92	80	45	28	8	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata

No	Indikator	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
8.9.1.(b)	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara.	62.767	84.023	173.286	139.633	139.848	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	30	55	70	72	72	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
PILAR EKONOMI TUJUAN 9: INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR							
9.1.1(a)	Kondisi mantap jalan kabupaten	51,1	56,1	59			Dinas Biciptapera
9.2.1*	Rasio PDB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita	13,47	13,61	14,52	15,01	15,09	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.2.1.(a)	Pertumbuhan PDB industri pengolahan.	-1,7	7,13	12,17	8,13	4,71	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	24,4	25	25,19	27,88	28,18	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
PILAR EKONOMI TUJUAN 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN							
10.1.1(a)	Rasio Gini.	0,349	0,358	0,354	0,345	0,319	Dinas Sosial
10.1.1.(c)	Jumlah daerah tertinggal.	1	1	1	1	0	Dinas Pemdes PPA
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	4	12	20	30	33	Dinas Pemdes PPA
10.1.1.(e)	Jumlah Desa tertinggal.	3	2	0	1	1	Dinas Pemdes PPA
PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 11: KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	74,94	78,12	78,70	82,08	79,71	Dinas Biciptapera

No	Indikator	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	0,02	0,02	0,01	BPBD
PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 12: KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB							
12.5.1. (a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang.	8559,44	9057,3	7417,2	9452,5	9428,5	Dinas Lingkungan Hidup
PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 13: PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM							
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	0	0	0,02	0,02	0,01	BPBD
PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 14: TUJUAN EKOSISTEM LAUTAN							
14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan.	57	110,9	121,9	110	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 15: EKOSISTEM DARAT							
15.9.1. (a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis	1	1				Dinas Lingkungan Hidup
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA TUJUAN 16: PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	367	30	49		69	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	0	0	0	0,004	0,004	Dinas Pemdes PPA
16.2.3. (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	0	0	0	4	4	Dinas Pemdes PPA

No	Indikator	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	92,49	93,71	91,45	92,76	95,55	Bapperida
16.6.1. (a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	WTP	WTP	WTP	WTP		Badan Keuangan dan Aset Daerah
16.6.1. (b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B	60.03 (Nilai Hasil Evaluasi)	61.37 (Nilai Hasil Evaluasi)	63.53 (Nilai Hasil Evaluasi)	64.25 (Nilai Hasil Evaluasi)	65.08 (Nilai Hasil Evaluasi)	Inspektorat
16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	Dinas Pemdes PPA
16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	10	10	10	10	4,87	Dinas Pemdes PPA
16.9.1. (b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	87,09	98,00	93,03	95,56	95,46	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	0,084	0,079	0,1352	0,066	0,063	Badan Pendapatan Daerah
17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,003	0,003	0,005	0,003	0,003	Badan Pendapatan Daerah
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	0,288	0,017	0,047	0,042	0,041	Badan Pendapatan Daerah
17.19.2. (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Data diolah, 2025

2.2. Indikator Pembangunan Daerah

2.2.1. Capaian Indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 – 2024

Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan proses sistematis untuk mengukur dan menilai pencapaian target-target strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan implementasi program dan kegiatan pembangunan daerah selama periode lima tahun.

Hasil evaluasi IKU menjadi dasar penting dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan strategi pembangunan ke depan. Temuan evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang perlu diprioritaskan, realokasi anggaran, serta penyesuaian target dan strategi implementasi. Selain itu, evaluasi IKU juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus menjadi pembelajaran berharga untuk penyusunan RPJMD periode berikutnya. Indikator kinerja utama (IKU) adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang mencerminkan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada RPD Tahun 2024-2026 telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) tujuan dan 9 (sembilan) sasaran dengan total indikator kinerja utama sebesar 11 (sebelas) indikator.

Dalam melakukan evaluasi terhadap capaian target-target RPJMD dan RKPD digunakan penilaian berdasarkan kriteria:

1. Sangat Tinggi dengan symbol “ST” dengan capaian 91 % ≤ 100 %;
2. Tinggi dengan symbol “T” dengan capaian 76 % ≤ 90%
3. Sedang dengan symbol “S” dengan capaian 66 % ≤ 75 %
4. Rendah dengan symbol “R” dengan capaian 51 % ≤ 65 %
5. Sangat Rendah dengan symbol “SR” dengan capaian ≤ 50 %

Berikut ini disajikan evaluasi capaian IKU RPD Tahun 2024-2026:

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPD Tahun 2024

Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2023	Tahun 2024			
							Target RPD	Target RKPD	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Tujuan 1	Meningkatkan pembangunan ekonomi		1	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	55.51	53.97	53.97	59.31	109.89
	Sasaran 1	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	2	Laju pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.28	5.76	5.76	4.05	70.31
	Sasaran 2	Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	3	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3.29	3.47	3.47		112.97
Tujuan 2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		4	Tingkat Kemiskinan	Persen	5.14	4.52	4.52	5.02	88.94
	Sasaran 3	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74.38	73.21	73.21	74.81	102.19
			6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.53	92.66	92.66	93.32	100.71
	Sasaran 4	Berkurangnya ketimpangan pendapatan	7	Gini Ratio	Poin	0.345	0.343	0.343	0.319	93.00
	Sasaran 5	Membaiknya kehidupan sosial kemasyarakatan	8	Tingkat kriminalitas yang Tertangani	Persen	87.40	77.20	77.20	94.96	123.01
Tujuan 3	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan		9	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	65.79	65.86	65.86	67.96	103.19
	Sasaran 6	Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	119.20	116.15	116.15	119.20	97.37
Tujuan 4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		11	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	48.74	58.36	58.36	68.51	117.39
	Sasaran 7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12	Nilai Sakip	Poin	64.25	65.89	65.89	65.08	98.77

Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2023	Tahun 2024			
							Target RPD	Target RKPD	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
	Sasaran 8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	13	IKM	Persen	77.41	80.33	80.33	75.46	93.93
	Sasaran 9	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	66.56	65.33	65.33	78.60	120.32

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Semester II Tahun 2024

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah merupakan proses penting dalam tata kelola pemerintahan daerah untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Hasil evaluasi capaian IKU daerah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis, penyusunan kebijakan, dan perencanaan program di masa mendatang. Selain itu, evaluasi ini juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024, kinerja pembangunan daerah menunjukkan hasil yang beragam dengan beberapa pencapaian yang melampaui target dan beberapa yang masih perlu perbaikan. Dalam aspek pembangunan ekonomi, pendapatan perkapita berhasil mencapai 109,89% dari target dengan realisasi sebesar 59,31 juta rupiah, melampaui target RKPD sebesar 53,97 juta rupiah. Namun, laju pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 70,31% dari target dengan realisasi 4,05% dibandingkan target 5,76%. Di sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 3,02%, bahkan lebih baik dari target 3,47% dengan capaian 112,97%. Untuk kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan dengan capaian 88,94% dari target, dimana realisasi 5,02% masih lebih tinggi dari target 4,52%. Namun, kualitas sumber daya manusia menunjukkan perbaikan dengan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 102,19% dari target (74,81 dari target 73,21) dan Indeks Pembangunan Gender mencapai 100,71% (93,32 dari target 92,66). Ketimpangan pendapatan juga membaik dengan Gini Ratio mencapai 0,319, lebih rendah dari target 0,343 dengan capaian 93,00%. Aspek keamanan menunjukkan perbaikan signifikan dengan tingkat kriminalitas yang tertangani mencapai 123,01% dari target. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 103,19% dari target dengan nilai 67,96. Sementara itu, Indeks Risiko Bencana mencapai 97,37% dari target, menunjukkan upaya mitigasi kebencanaan yang cukup baik meskipun belum optimal. Tata kelola pemerintahan menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, dengan Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 117,39% dari target (68,51 dari target 58,36). Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah juga sangat baik dengan capaian 120,32% (78,60 dari target 65,33). Namun, masih terdapat ruang perbaikan pada Nilai SAKIP yang mencapai 98,77% dari target dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang hanya mencapai 93,93% dari target dengan realisasi 75,46% dibandingkan target 80,33%.

Secara keseluruhan, dari 14 indikator yang dievaluasi, 8 indikator berhasil mencapai atau melampaui target (di atas 100%), sementara 6 indikator lainnya masih memerlukan upaya perbaikan untuk mencapai target yang ditetapkan.

2.2.2. Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang 2020-2024

Indikator kinerja urusan pemerintahan merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memonitor capaian kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya di berbagai bidang urusan pemerintahan. Indikator-indikator ini dirancang untuk dapat menunjukkan sejauh mana pemerintah telah berhasil memberikan pelayanan, fasilitas, dan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penetapan indikator kinerja yang tepat dan terukur sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Indikator-indikator ini harus disusun secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, agar dapat mengakomodasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, indikator kinerja juga perlu ditinjau dan disesuaikan secara berkala untuk menjamin kesesuaiannya dengan perkembangan situasi dan prioritas pembangunan. Evaluasi secara periodik terhadap capaian indikator kinerja urusan pemerintahan akan memberikan umpan balik yang berharga bagi pemerintah dalam memperbaiki kinerja, meningkatkan kualitas layanan, dan menyusun rencana strategis yang lebih efektif di masa mendatang. Dengan demikian, indikator kinerja urusan pemerintahan menjadi fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Capaian indicator penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69
Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI						
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-0.59	5.54	4.86	3.77-4.10	4,04
2	Laju Inflasi	%	2.45	1.61	4.09	2.10	1,03
3	PDRB Perkapita (ADHB)	Triliun Rp	14,073,432.74	15,250,127.36	16,699,0	56.64	
4	Rasio Gini	Angka	0.349	0.358	0.354	0.345	0,319
5	Tingkat Kemiskinan	%	4.79	5.05	5.04	5.14	5,02
6	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	14.44	15.36	15.25	15.75	15.48
7	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0.6	0.82	0.64	0.54	0,51
8	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	95.21	94.95	94.96	94.86	-
	KESEJAHTERAAN SOSIAL						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71.05	71.21	71.54	74.38	74,81
	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69.59	69.83	70.01	70.74	83,77
	Angka Melek Huruf (AMH)	Tahun	94.9	76.92	91.92	93.51	-
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.83	7.84	7.94	8.20	8,21
	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.93	12.94	12.95	13.02	13,03
	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	12,039	12,073	12,201	12,739	13,209
2	Persentase Balita Stunting	%	9.81	8.4	7.12	6.56	5,9
3	Angka Partispasi Angkatan Kerja	%	56.2	56.92	58.7	96.71	96,98
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.91	4.93	3,56	3.29	3,02
	Jumlah Pengangguran	Ribu Jiwa	5,875	7,845	6,813	4.596	4.713
5	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	95.25	94.09	95.07	96.71	96,98
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	10.17	11.2	11.4	14.71	14,83
8	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	86	83.3	81.4	80.10	88,41

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	Penguatan Cadangan Pangan	%	100	100	100	100	-
12	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB (Hortikultura)	%	27.45	24.75	22.20	23.89	22,29
13	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	%	11.14	11.86	9.35	11.00	8,48
14	Produksi Sektor Pertanian	Trilyun Rupiah	643,448.11	628,638.17	650,585	483,869	615.473,97
15	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	7.27	4.84	6.08	8.51	5,72
16	Produksi Sektor Perkebunan	Trilyun Rupiah	8,389.64	9,783.10	8,149	8,551	8,559
17	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	57.18	54.33	56.74	56.94	-
18	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	9.39	11.22	39.96	46.33	54,28
20	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	4.89	4.99	5.13	5,41	5,33
21	Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	1.21	1.21	Belum Ada Data	1.33	1,29
22	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	10.45	10.07	10.12	10.71	10,75
23	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	13.56	13.47	13.61	15.01	15,09
25	Pertumbuhan PDRB Industri	%			12,17	8,13	4,71
	OLAHRAGA						
1	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	22	25	21	36	4
2	Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang	17	17	23	25	12
3	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	36.36	36.36	36.36	37	28
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	PELAYANAN URUSAN WAJIB DASAR						
	Pendidikan						
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	52,49	54,63	58,3	85,91	78,26
2	APM SD Sederajat	%	85,85	92,42	96,81	99,63	82,17
3	APM SMP Sederajat	%	73,49	60,67	62,78	96,52	87,36
4	Angka Putus Sekolah (Apts) SD/MI	%	0,23	0,09	0,18	0,12	0,12

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Angka Putus Sekolah (Apts) SMP/Mts	%	0,85	0,53	0,41	0,51	0,50
6	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	99,26	99,87	100	98
	Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts	%	100	96,15	98,67	100	97
7	Angka Melanjutkan (AM) Dari SD/MI Ke SMP/Mts	%	102	112,32	106,82	70,63	-
8	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar	Angka	1.386	1.381	772,29	77,7	5,8
9	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 64 Tahun	%	91,72%	92,16%	91,94	93,51	-
10	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	97,96	95,76	96,36	92,59	93,58
	Kesehatan						
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	Orang	4	4	6		
2	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu (Balita)	Orang	0	0	0		
3	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu (Neonatal)	Orang	2	3	18		
4	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	4	4	9.5	1	1
5	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	0	0	0	0	0
6	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	2.3	3	7	10.9	17
7	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka (per 100.000 KH)	1	1	126.9	5	3
8	Rasio Posyandu per satuan Balita	Angka per 1000 balita	0.101388889	0.095138889	0.090972222	1:76	1:82
		Angka Per 1000 Penduduk	02:40.7	02:46.7	02:47.7		

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Angka per 1.000 Penduduk	01:06.6	01:06.0	01:05.9	1:107.735 1:6.628	1:81.803
10	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Penduduk Angka per 1.000	0.152 01:08.9	0.156	0.156		1:4.596
11	Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk	Penduduk	0.291	0.316		1:8.781	1:2.381
12	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	100	131	150	89.9	100
13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	96.9	103	115	100	100
14	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	98.1	96	99.1	100	63,2
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100	100	100
16	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	99.8	97.8	111.3	118.5	81
17	NonPolio AFP Rate per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	2.53	1.26	1.29	1.28	4,88
18	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	7.43	3.89	6.04	3.62	4,63
19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	32	38	63	51.7	43,8
20	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	Per 100.000 Penduduk	86	141	202	577	195
21	Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis	Per 100.000 Penduduk	6,8	9,9	10,2	6.88	-
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Kasus	369	426	656	567	647
23	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	Kasus	193	242	-	168	100

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
24	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
25	Penderita Diare yang ditangani	Orang	2,591	2,069	2,127	2,945	2,683
26	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	0.01	0.05	0.13	0,10	22
27	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi	%	0.005	0.01	0.011	0,014	50
28	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	26.5	4.33		-	-
29	Cakupan Kunjungan Bayi	%	96.1	100	118	92.5	95
30	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	80	85	94	75.6	74
31	Cakupan Pelayanan Nifas	%	97.1	102	114	88.8	64
32	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	%	41		57	14.6	8,4
33	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	78.2	88	106	81	97
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 Bln keluarga miskin	%	98.54	100	100	100	83
35	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	83.3	36.58		-	-
36	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100		-
37	CakupanDesa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24jam	%	100	100	100	100	100
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	53.4	51.1	56.1	61	60,81
2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Km/jiwa	0.43	0.43	0.4	0.29	0,29
3	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (Minimal1.5 Meter)	%	3.87	3.97		4	4,00
4	Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar	%	0.06	0.06	0.06	0.06	-
5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	83.27	85.04	85.75	94.86	90,88
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	%	83.27	85.04	85.74	93.9	-

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	9.98	11.34	11.8		-
8	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	72.71	59.31	76	65.11	68,55
9	Rasio Jaringan Irigasi	M/Ha	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
10	Persentase Penduduk Berakses air minum	%	89.19	90.43	91.56	97.6	93.98
11	Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum	%	90,43	91,56	93,49	97,6	93,98
12	Proporsi Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	89.19	90.43	91.56	93,49	93,98
13	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	5.25	5.25		94.86	93,98
14	Ketaatan terhadap RTRW	%	40	40	41	41	41
15	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Unit/Jiwa	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
16	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	22.2	23.12		28.38	-
17	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan Perkotaan	%	11.34	11.34		11.45	11.45
18	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	9.5	9.5		10.2	0.172
	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman						
1	Rasio Rumah Layak Huni	%	0.237	0.2363	0.238	0.2397	0.24
2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	9.56	6.05	6.02	0.32	0.32
	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat						
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	per 10.000 penduduk	38	31	29.00	30	30
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	67	67.89	96.00	97	100
3	Persentase Penegakan PERDA	%	67	70	100	89	89
	Sosial						
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	97.2	93.7	14.71	34.00	34.00
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	97.2	93.7	65.93	34.00	34.00
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	97.2	52.7	21.5	34.00	34.00

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	0	0	0
5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan
6	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Wahana	Tidak Ada Wahana
7	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	%	100	100	100	100	100
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	0.19	0.19	0.19
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100
	PELAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR						
	Tenaga Kerja						
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	55.39	56.92	58.7	96.71	96.98
2	Rasio Penduduk yang bekerja	%	95.25	94.09	95.07	96.71	45.77
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0	0	0	0	0
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0	0	0	0	0
5	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	68.5	25		4.62	5.86
6	Keselamatan dan perlindungan	%	46.2	46.2	46.2	13.61	13.75
8	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	18.5	20	20	13.61	13.61
9	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	0	0	0	0	0
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	80	80	80	100	100
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	60.71	43.74	35	35	66.85

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	33.54	33.8	33.8	33.1	33.3
4	Rasio KDRT	%	0.027	0.027	0.027	0.0027	0.0021
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	34.31	34.31	34.32	33.01	33.01
7	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100	100	100	100	100
8	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	0	0	0	0	0
9	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat	%	99.38	99.38	99.16	98.8	0
10	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/ laki-laki di SMP/ MTs/ sederajat	%	76.12	76.13	76.89	103.45	0
11	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMA/MA/Sederajat	%	58.45	58.45	58.67	101.4	0
12	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	50.62	60	60	97.82	0
13	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	29.33	30	30	95.26	0
	Pangan						
1	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	848.78	881.40	932.03	866.00	788.00
2	Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	%	93,166	82,115	80,334.62	-	85.80
3	Ketersediaan Energi Perkapita	%	2,670	4,877	3,823	4,615	2,743
4	Ketersediaan Protein Perkapita	%	77	118.05	91.73	127.37	94.00
	Pertanahan						
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	22.54	22.54	23.55	23.55	0
	Lingkungan Hidup						
2	Tersusunnya RPPLH	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada / Tidak Ada	3 Dok	1 Dok	Tidak Ada	3 Dokumen	-
6	Indeks Kualitas Air	%	38.34	58.4	58.3	54.00	50.00
7	Indeks Kualitas Udara	%	84.67	84.77	84.7	85.59	94.22
8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	48.06	49.19	48.63	49.44	50.23
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	66.53	62.53	65.01	66.79	67.96
14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100
15	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
16	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Kasus	5	7	66	100	-
18	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada Kabupaten/Kota	%	46.55	50.07	55.5	74.94	74.98
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Angka	96.04	98.68	99.05	99.31	99.48
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Angka	85.41	87.09	98	95.56	95.46
3	Rasio pasangan berakte nikah	Angka	83	34.21	48.2	57	50.89
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	96.04	98.64	99.05	99.31	99.48
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	99.21	48.93	53.05	56	58.17

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	%	100	100	100	100	100
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	106	106	106	106	106
4	Persentase LPM Berprestasi	%	100	100	100	0	0
5	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100
	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0.95	1.77	1.77	1.31	-
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.13	2.08	2.19	2.12	2.07
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak/ Keluarga	2.13	2.08	2.07	1,31	1.6
4	Rasio Akseptor KB	%	55.84	56.41	54.29	81,86	68.98
5	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	76,25	77,63		65,55	68.61
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	41.6	40		44,7	37
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	58.51	58.51	31.96	0,96	-
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	8.86	5.75	8.32	7,04	7.90
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	14.66	24.55	17.73	10,4	68.98
10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	25.5	42.51	61.51	33,26	68.61
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	100	100	100	100	100
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	100	100	100	100	100
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	100	100	100	100	100
14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	1 Tempat	1 Tempat	1 Tempat	1 Tempat	1 Tempat

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	100	100	100	100	100
16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7
17	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100
21	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	766,590,500	231,375,000	15.00.0000	15.000.000	15.000.000
	Perhubungan						
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Juta Orang	3245	3400		5940	5250
2	Rasio ijin trayek	Rasio	0.06	0.14	0.06	0.104	0.03
3	Persentase layanan angkutan darat	%	5.6	5.9	5.9	5.76	6.08
4	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal BIS	Unit	1	1	1	1	1
5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1.6	1.6	1.49	1.442	0.9
6	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	16,225	17,000		18,739	16,530
	Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	90.84	91.24	90.15	89.36	88.91
2	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	69.67	70.17	77.21	78.42	70.42
3	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	82.89	91.66	87.82	88.26	88.91
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
1	Persentase koperasi aktif	%	50.7	51.1	51.07	10.64	68.42
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	93	94	94.05	93.6	93.6
	Penanaman Modal dan Investasi						
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Triliun rupiah	90.114.003.280	205.118.999.753	335.572.253.290	4.080.460.321.147	3.500.176.950.561
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	219	227	996	4655	3.474

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/ proyek	327.85	501.76	129.41	3.09	2.9
4	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rupiah	-66.88	127.62	63.59	350.67	-14.22
	Kepemudaan dan Olah Raga						
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	21	26	12.00	14	10
2	Persentase wirausaha muda	%	0.04	0.04	0.22		0.11
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	0	35.29	21	21	45.83
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	36.36	36.36	10	11	28
5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	71.25	69.34	78	78	79
6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	25	21	0	36	4
7	Jumlah prestasi olahraga	Medali		2	36	36	8
	Statistik						
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Persandian						
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100.00	100	100
	Kebudayaan						
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	12	0	1	0
2	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	7	13	13	13	15
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	64	65	65.00	68	68
	Perpustakaan						
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	43,065	12,960	7,655	124,327	-
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp.	14,091	14,131	14,134	15,972	-
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Unit/Jiwa	1,000	1,000	1.53	1.42	-

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	7,046	7,066	7,067	7,349	-
5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	18.18	36.36	45.45	45.45	-
	Kearsipan						
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	25	25	25	27.5	-
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	2	2	1	1	1
	PELAYANAN URUSAN PILIHAN						
	Pariwisata						
1	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	Kunjungan	62.767	84,023	173,331	139,633	139,848
2	Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	Kunjungan	199	92	45	28	8
3	Lama kunjungan Wisata	Hari	1	1	1	1	1
4	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	0	0	28,252,000	2,010,857,397	2,078,805,790
	Pertanian						
1	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	25.04	24.75	22.20	23.89	22.29
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	11.86	9.35	9.31	11.00	8.48
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	4.84	6.08	7.75	8.51	5.72
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (Perkebunan)	%	54.33	56.74	55.13	56.94	-
5	Cakupan bina kelompok tani (Perkebunan)	%	11.22	39.96	48.27	46.33	54.28
6	Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB	%			4.17	4.3	-
7	Produktivitas Hasil Peternakan (Daging)	Ton	2,724,313	2,750,266	417,717	2,137.511	2,541,476
8	Produktivitas Hasil Peternakan (Telur)	Ton	51,293,349	49,903,530	43,982,071	41,843,861	45,030,921
10	Kontribusi Produksi Kelompok Tani Perkebunan terhadap PDRB	%					-
	Perdagangan						
1	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	%	0	45.75	67.5		30

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Perindustrian						
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	5.65	10.1	8.38	20.04	0
	Transmigrasi						
1	Persentase transmigran umum	%	1.54	1.54	1.54		1.5
	Kelautan dan Perikanan						
1	Produksi perikanan	%	70.15	101.59	100	155.5	87.15
2	Cakupan bina kelompok nelayan	%	0	32.5	0	42.86	1.43
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	82.27	79.23	83.17	100.04	74.3
5	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	80	80	80	80.00	0
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	Angka	0.35	0.35	0.35		0
7	Volume produksi perikanan tangkap	Ton					
8	Konsumsi Ikan	%	40.09	38	38	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data
	Penunjang Urusan						
	Perencanaan Pembangunan						
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	89.49	93.78	98.93	96.01	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	96.10	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Keuangan						
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum Rilis
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	9.72	10.17	11.2	11.4	
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1.90	1.83	2.09	5.83	3.64
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	32.81	29.23	28.92	30.59	30.32
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	17.90	19.65	22.35	22.91	24.67
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (tidak sesuai perhitungan 100 %)	Rasio	51.77	49.81	48.13		-
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	11.71	6.43	3.21	10.11	10.62
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan						
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP/ Tahun	20	20	20	20	20
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	3	1.04	1.57	0.38	2.86
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	75	75	13	2.91	8.94
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	33	30	32	33	33
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	817	1,133	1.816	1.130	1.281
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah	Orang	3,073	3,505	3.100	2.970	2.960
	Penelitian dan Pengembangan						
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	100	100	100	100

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pengawasan						
1	Persentase tindak lanjut perangkat daerah terhadap hasil pemeriksaaan APIP	%	93.46	91.62	92.23	92.00	87.15
2	Persentase pemyelesaian tidak lanjut hasil pengawasan umum dan teknis	%	0.6	0.58	0.16	12	-
3	Jumlah temuan BPK	Kasus	17	34	23	17	22
	Sekretariat Dewan						
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/ Kota Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda.dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	ASPEK DAYA SAING						
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Juta Rupiah	1,042,420	1,218,069	1,107,459	1,259,261	1,259,261
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	51.01	47.46	48.85	52.02	49.1
3	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	0.6583	0.7825	0.7974	0.785	0.7973
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB/PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	0.69	0.68	0.69		
5	Angka Kriminalitas yang tertangani	Angka	367	344	496	730	751
6	Rasio Ketergantungan	Angka	50.72	50.53	47.52	47.09	

Sumber: diolah Tim Penyusun RKPD Tahun 2025

Indikator penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja dan efektivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, hingga pelaksanaan program-program pembangunan. Indicator penyelenggaraan pemerintahan meliputi tiga aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Rakyat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Ketiga aspek ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, peningkatan daya saing daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Demikian pula, pelayanan umum yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga menjadi daya tarik bagi investasi, yang akhirnya mendukung daya saing daerah. Dalam praktiknya, pemerintah daerah perlu menyeimbangkan ketiga aspek ini dalam perencanaan dan pelaksanaan program-programnya. Evaluasi terhadap indikator-indikator dalam ketiga aspek ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2.2.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan seperangkat ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengevaluasi dan memonitor kinerja suatu program, kebijakan, atau organisasi. IKK berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan tujuan strategis menjadi target-target terukur yang dapat dilacak pencapaiannya. Penetapan IKK yang tepat memungkinkan pihak-pihak terkait untuk menilai sejauh mana suatu inisiatif atau rencana kerja telah berhasil diimplementasikan dan memberikan dampak yang diharapkan. IKK yang efektif harus memenuhi kriteria SMART: Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Terikat Waktu. Indikator-indikator ini dapat mencakup berbagai dimensi, seperti input, output, outcome, dan dampak. Input merujuk pada sumber daya yang digunakan, sedangkan output adalah hasil langsung dari kegiatan. Outcome mengacu pada perubahan yang terjadi sebagai akibat dari output, dan dampak adalah efek jangka panjang yang dihasilkan. Penetapan IKK harus dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, agar dapat mengakomodasi kebutuhan dan perspektif yang beragam. Selain itu, IKK perlu ditinjau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan situasi dan perkembangan terkini. Dengan demikian, IKK menjadi alat yang vital dalam mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil.

Evaluasi indikator kinerja kunci (IKK) merupakan langkah penting untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas suatu program atau kebijakan. IKK berfungsi sebagai tolok ukur yang objektif dan terukur dalam menilai pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Proses evaluasi

IKK melibatkan analisis data dan informasi secara komprehensif untuk mengetahui sejauh mana target-target tersebut terealisasi.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.70
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1			Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
1	1		Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi		
1	1	1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.17
1	1	2	Laju Inflasi	Persen	3
1	1	3	Pendapatan Perkapita (ADHB)	Rp. Juta	4.900.000
1	1	4	Rasio Gini	Poin	0.319
1	1	5	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	Persen	5,02
1	1	6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75.11
1	1	7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,03
1	1	8	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,21
1	1	9	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,45
1	1	10	Persentase Balita Stunting	Persen	5,9
1	1	11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,02
1	1	12	Persentase penduduk yang bekerja	Persen	96,98
1	1	13	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	Persen	
1	1	14	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	14,83
1	1	15	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	88,41
1	1	16	Penguatan Cadangan Pangan (Data timpang)	Persen	3,33
1	1	17	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data timpang)	Persen	0,00
1	1	18	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	Persen	22,29
1	1	19	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	Persen	8,48
1	1	20	Produksi sektor pertanian	Ton	615.473,97
1	1	21	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	Persen	5,72
1	1	22	Produksi sektor perkebunan	Ton	8.559,00
1	1	23	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	Persen	-
1	1	24	Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persen	1,29
1	1	25	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	10,75
1	1	26	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	15,09
1	1	27	Pertumbuhan PDRB Industri	Persen	4,71
1	1	28	Indeks Pendidikan	Point	63,56
1	1	29	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	-

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	1	30	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	Persen	-
1	1	31	Rata-rata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	63,25
1	1	32	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	64,45
1	1	33	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	55,85
1	1	34	Indeks Iklim Keamanan SD	Indeks	76,11
1	1	35	Indeks Iklim Keamanan SMP	Indeks	72,34
1	1	36	Indeks Iklim Kebinekaan SD	Indeks	74,18
1	1	37	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Indeks	70,28
1	1	38	Indeks Inklusivitas SD	Indeks	62,92
1	1	39	Indeks Inklusivitas SMP	Indeks	61,35
2			Aspek Pelayanan Umum		
2	1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
2	1		Pendidikan		
2	1	1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,21
2	1	2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,03
2	1	3	APK Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	141,56
2	1	4	APM SD Sederajat	Persen	92,17
2	1	5	APM SMP Sederajat	Persen	87,36
2	1	6	Angka Melek Huruf	Persen	92,84
2	1	7	Persentase Pendidik SD/Sederajat Tersertifikasi	Persen	-
2	1	8	Persentase Pendidik SMP/ Sederajat Tersertifikasi	Persen	-
2	1	9	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Persen	77,46
2	1	10	Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SD	Persen	92,17
2	1	11	Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SMP	Persen	87,36
2	1	12	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan.	Persen	-
2	1	13	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	93,58
2	2		Kesehatan		
2	2	1	Indeks Kesehatan	Indeks	83,77
2	2	2	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,03
2	2	3	Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	Kasus	8
2	2	4	Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 kelahiran hidup)	Per1000 Kelahiran	19,19
2	2	5	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,13
2	2	6	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	Persen	100
2	2	7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	96,09

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
2	2	8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	98,1
2	2	9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	97,4
2	2	10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	99,45
2	2	11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	96,59
2	2	12	Persentase Orang Usia 15-29 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	97,56
2	2	13	Persentase Orang Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	83,22
2	2	14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	41,91
2	2	15	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	95,95
2	2	16	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100,00
2	2	17	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	Persen	86,85
2	2	18	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	82,09
2	2	19	Rasio tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan	Persen	-
2	2	20	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yamg memiliki izin	Persen	100,00
2	2	21	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	74,6
2	**3**		**Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**		
2	3	1	Indeks infrastruktur daerah	Persen	8,74
2	3	2	Tingkat kemantapan jalan	Persen	60,81
2	3	3	Persentase kesesuaian tata ruang	Persen	68,85%
2	3	4	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	68,55
2	3	5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persen	93,98
2	3	6	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persen	90,88
2	3	7	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	62,31
2	3	8	Persentase Pemukiman yang Tertata	Persen	-
2	3	9	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Persen	0,172
2	3	10	Proporsi Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	60,81
2	3	11	Rasio tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi	Persen	-

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
2	3	12	Persentase Bangunan Gedung yang ber IMB	Persen	0,172
2	3	13	Persentase Kesesuaian elaahan SKRK (Sura Kesesuaian Rencana Kabupaten)	Persen	-
2	**4**		**Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**		
2	4	1	Rasio rumah layak huni	Persen	-
2	4	2	Persentase rumah yang mengakses air bersih	Persen	-
2	4	3	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100
2	4	4	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100
2	4	5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	Persen	-
2	4	6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	11,71
2	4	7	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	-
2	**5**		**Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**		
2	5	1	Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100
2	5	2	Persentase Penegakan PERDA	Persen	89
2	5	3	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Majamenen Kebakaran (WMK)	Persen	82,57
2	5	4	Persentase warga Negara yang mendapat layanan perlindungan terhadap bencana	Persen	100
2	5	5	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda	Persen	100
2	5	6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	82,57
2	5	7	Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	-
2	5	8	Persentase warga Negara yang mendapat layanan perlindungan terhadap bencana	Persen	100
2	5	9	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	91
2	5	10	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	91
2	5	11	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	82
2	**6**		**Sosial**		
2	6	1	Persentase PMKS yang Tertangani	Persen	34%
2	6	2	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan	KK	16.799
2	6	3	Persentase Lembaga di bidang kesos yang mendapatkan peningkatan Kualitas Pelayanan	Persen	83
2	6	4	Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Persen	100%

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
2	6	5	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100%
2	6	6	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dluar panti	Persen	100%
2	6	7	Jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100%
2	6	8	Persentase Keluarga yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat	Persen	100%
2	6	9	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	100%
2	6	10	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	Persen	33
3			**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**		
3	**1**		**Tenaga Kerja**		
3	1	1	Pertumbuhan rata-rata Produksi koperasi dan UMKM	Persen	0,53
3	1	2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	96,98
3	1	3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	7,11
3	1	4	Persentase tenaga kerja bersetifikat kompetensi	Persen	30
3	1	5	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	13,75
3	**2**		**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**		
3	2	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indkes	Blm kluar 2024
3	2	2	Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama
3	2	3	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan	Persen	100
3	2	4	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	Persen	100
3	2	5	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	Persen	88,57
3	2	6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Persen	0
3	2	7	Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	Persen	100
3	2	8	Cakupan Data Gender dan Anak	Persen	100
3	2	9	Indeks perlindungan anak (IPA)	Indeks	62,45
3	2	10	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100
3	**3**		**Pangan**		
3	3	1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	87.92
3	3	2	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	88,41
3	3	3	Persentase Ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Persen	3,33

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
3	3	4	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	0,00
3	3	5	Persentase pangan yang aman dikonsumsi sesuai standar	Persen	N/A
3	**4**		**Pertanahan**		
3	4	1	Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Persen	
3	4	2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	0
3	**5**		**Lingkungan Hidup**		
3	5	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Persen	50,00
3	5	2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Persen	94,22
3	5	3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	50,24
3	5	4	Persentase Pengelolaan sampah dan Limbah kabupaten	Persen	74,18
3	5	5	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	Persen	30
3	5	6	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persen	100
3	5	7	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persen	100
3	5	8	Persentase luas RTH Publik dan Privat dari Wilayah Kota/ Perkotaan	Persen	23,52
3	5	9	Persentase Pengurangan Limbah B3	Persen	100
3	5	10	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah/ kota	Persen	97,14
3	5	11	Cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persen	1,67
3	5	12	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	Persen	100
3	5	13	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti	Persen	80
3	5	14	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	Persen	71,25
3	**6**		**Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**		
3	6	1	IKM dukcapil	Persen	77,425
3	6	2	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	78,82
3	6	3	Persentase Perekaman KTP elektronik	Persen	99,48
3	6	4	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen	95,46
3	6	5	Persentase OPD yang telah memamfaatkan data kepedundukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	46,67
3	**7**		**Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**		
3	7	1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	0.7973
3	7	2	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Poin	0.7815

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
3	7	3	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Poin	0.785
3	7	4	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Poin	0.7353
3	7	5	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	1.47
3	7	6	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tertib administrasi desa dan pelaporan tepat waktu	Persen	100
3	7	7	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	100
3	**8**		**Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**		
3	8	1	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	Indeks	60.4
3	8	2	Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	Rata-rata Jumlah Anak	2.07
3	8	3	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) pada kelompok umur 25-49 Tahun	Tahun	21
3	8	4	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive prevalence Rate/mCPR)	Persen	54,4
3	8	5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ ASFR)	Nilai	37
3	**9**		**Perhubungan**		
3	9	1	Persentase Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB	Persen	2,59
3	9	2	Persentase Keselamatan transportasi Angkutan Darat	Persen	23,05
3	9	3	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	83.33
3	**10**		**Komunikasi Dan Informatika**		
3	10	1	Indeks SPBE	Persen	3,04
3	10	2	persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet	Persen	-
3	10	3	Persentase penyebarluasan informasi dan kerjasama media yang dikelola	Persen	64,45
3	10	4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100
3	10	5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	-
3	**11**		**Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**		
3	11	1	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	Rp Juta per tahun	3190
3	11	2	Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	22,81
3	11	3	Persentase koperasi aktif	Persen	68,42
3	11	4	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	50,00
3	11	5	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	Persen	2,5
3	**12**		**Penanaman Modal**		
3	12	1	Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rupiah	3.500.176.950.561

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
3	12	2	Jumlah Investor PMDN dan PMA	Investor	3.474
3	12	3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	88,14
3	12	4	Persentase perencanaan investasi yang ditindaklanjuti	Persen	-
3	12	5	Persentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Persen	-
3	12	6	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	Persen	-
3	12	7	Persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan peraturan penanaman modal	Persen	-
3	12	8	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses	Persen	-
3	**13**		**Kepemudaan dan Olahraga**		
3	13	1	Persentase Jumlah Pemuda yang berhasil meraih prestasi dibidang keolahragaan	Persen	9,09
3	13	2	Persentase pemuda yang menjadi pengurus organisasi kepemudaan atau Sosial kemasyarakatan	Persen	1,39
3	13	3	Persentase cabang olahraga yang memperoleh medali	Persen	71,43
3	13	4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,11
3	13	5	Jumlah prestasi olahraga	Medali	12
3	13	6	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab	Orang	827
3	**14**		**Statistik**		
3	14	1	Persentase Data statistik yang dipublikasikan	Persen	100
3	14	2	persentase data statistik sektoral yang tersedia pada portal satu data daerah	Persen	-
3	14	3	persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	Persen	-
3	**15**		**Persandian**		
3	15	1	Persentase jumlah aset informasi daerah yang diamankan	Persen	-
3	15	2	jumlah insiden siber terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Insiden	2
3	15	3	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	Persen	55,97
3	**16**		**Kebudayaan**		
3	16	1	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Persen	-
3	16	2	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Persen	-
3	16	3	Persentase karya budaya yang diresgistrasi	Persen	-
3	16	4	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	Persen	-
3	16	5	Persentase Dokumen Sejarah yang Direvitalisasi	Persen	-
3	16	6	Persentase Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan	Persen	-

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
3	16	7	Persentase Peningkatan Pengunjung Museum	Persen	-
3	**17**		**Perpustakaan**		
3	17	1	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	68,48
3	17	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	93,86
3	17	3	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Persen	-
3	17	4	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	-
3	17	5	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	-
3	17	6	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Rasio	-
3	17	7	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	Persen	100
3	**18**		**Kearsipan**		
3	18	1	Nilai Pengawasan Kearsipan	Persen	66,58
3	18	2	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	-
3	18	3	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Persen	72,32
3	18	4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	40,8
3	18	5	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Persen	0
4			**Urusan Pemerintahan Pilihan**		
4	**1**		**Kelautan dan Perikanan**		
4	1	1	Kontribusi Perikanan Terhadap PDRB	Persen	1,29
4	1	2	Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	90,87
4	1	3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.334,00
4	1	4	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.240,78
4	1	5	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	Persen	100
4	**2**		**Pariwisata**		
4	2	1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	1,12
4	2	2	Persentase Kunjungan Wisata	Persen	0,14
4	2	3	Presentase pengembangan destinasi wisata	Persen	-
4	2	4	Jumlah kunjungan wisata	Orang	139.856
4	2	5	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang bersertifikat	Medali	-
4	**3**		**Pertanian**		
4	3	1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	-2,51
4	3	2	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	-8,95
4	3	3	Peningkatan produksi hortikultura	Persen	324.86
4	3	4	Peningkatan produksi perkebunan	Persen	0,12

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
4	3	5	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	536,43
4	3	6	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	Persen	95,24
4	3	7	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen	100,00
4	3	8	Persentase Kenaikan kelas Kelompok Tani	Persen	2,89
4	3	9	Jumlah Produksi Daging	Kg	2.541.476,00
4	3	10	Jumlah Produksi Telur	Kg	45.031.501
4	3	11	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian/Peternakan	Persen	95,24
4	3	12	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	21
4	3	13	Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%)	Persen	-
4	3	14	Rasio Penyuluhan Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/ Kelompok Ternak	Rasio	1:14
4	**4**		**Perdagangan**		
4	4	1	Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	10,75
4	4	2	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Persen	2.108,42
4	4	3	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	0
4	4	4	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	Persen	100
4	4	5	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	Persen	0
4	4	6	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Persen	92,83
4	**5**		**Perindustrian**		
4	5	1	Kontribusi Sub Sektor Perindustrian terhadap PDRB	Persen	15,09
4	5	2	Nilai PDRB Sektor Perindustrian	Persen	2.959,56
4	5	3	Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapatkan pembinaan	Persen	49,55
4	**6**		**Transmigrasi**		
4	6	1	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	Persen	0,01
4	6	2	Persentase peningkatan sarana/ prasarana di wilayah transmigrasi	Persen	6,89
4	6	3	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	Persen	100
4	6	4	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	Persen	100
5			**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**		
5	**1**		**Sekretariat Daerah**		
5	1	1	Kategori penilaian nasional hasil laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	Blm ada
5	1	2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Persen	92
5	1	3	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan	Persen	100

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
5	1	4	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah	Persen	100
5	1	5	Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang Mengajukan Proposal	Persen	80
5	1	6	Jumlah Produk hukum yang Dihasilkan	Dokumen	570
5	1	7	Jumlah Kerjasama daerah yang dihasilkan	Dokumen	35
5	1	8	Persentase Laporan Perekonomian yang dilaksanakan	Persen	100
5	1	9	Cakupan Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Persen	100
5	1	10	Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu	Persen	1,00
5	**2**		**Sekretariat DPRD**		
5	2	1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Persen	-
5	2	2	Persentase pelaksanaan program kerja tepat waktu	Persen	100
5	2	3	Persentase Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD	Persen	67
6			**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**		
6	**1**		**Perencanaan**		
6	1	1	Nilai SAKIP Kabupaten: Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	65,08
6	1	2	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100
6	1	3	Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD	Persen	100
6	1	4	Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	Persen	100
6	1	5	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	Persen	100
6	1	6	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100
6	1	7	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100
6	1	8	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100
6	**2**		**Keuangan**		
6	2	1	Opini Laporan Keuangan	Persen	Belum rilis
6	2	2	Presentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persen	100
6	2	3	Presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi	Persen	Belum Rilis
6	2	4	Presentase Barang Milik Daerah yang terinventarisasi	Persen	96,32
6	2	5	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	
6	2	6	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Persen	
6	2	7	Kontribusi retribusi daerah (dikelola Bapenda) terhadap PAD	Persen	
6	2	8	Presentase Kesesuaian APBD dengan KUA PPAS	Persen	100

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
6	2	9	Presentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100
6	2	10	Presentase Realisasi Keuangan APBD	Persen	-
6	2	11	Presentase Aset Daerah yang dikelola dengan Baik	Persen	100
6	2	12	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola Bapenda	Persen	-
6	**3**		**Kepegawaian**		
6	3	1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	-
6	3	2	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	Persen	99,87
6	3	3	Nilai Rata-rata SKP ASN	Nilai	-
6	3	4	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD	Persen	
6	**4**		**Pendidikan dan Pelatihan**		
6	4	1	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	2,86
6	4	2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase	31,88
6	**5**		**Penelitian dan Pengembangan**		
6	5	1	Indeks Inovasi Daerah	Poin	47,72
6	5	2	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti di Kabupaten Sidenreng Rappang	Persen	100
6	5	3	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah	Persen	100
6	5	4	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi	Persen	100
7	**1**		**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**		
7	**1**		**Inspektorat Daerah**		
7	1	1	Level Maturitas SPIP Pemda	Nilai	3
7	1	2	Level Kapabilitas APIP	Level	3
7	1	3	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	87,15
7	1	4	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas	Persen	100
8	**1**		**Unsur Kewilayahan**		
8	**1**		**Kecamatan**		
8	1	1	Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Persen	100
8	1	2	Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik	Persen	99
8	1	3	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	Persen	100
8	1	4	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100
8	1	5	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100
8	1	6	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	Persen	99

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
8	1	7	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100
9	**1**		**Unsur Pemerintahan Umum**		
9	**1**		**Kesatuan Bangsa dan Politik**		
9	1	1	Pesentase Penyelesaian Konflik (Sara, Poleksosbud)	Persen	100
9	1	2	Tingkat pemahaman masyarakat tentang ideologi karakter Kebangsaan	Persen	-
9	1	3	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan/ Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Persen	-
9	1	4	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Persen	-
9	1	5	Persentase Organisasi Masyarakat dan Masyarakat yang Diberdayakan	Persen	-
9	1	6	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	-
9	1	7	Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik Dalam Daerah	Persen	100
10	**1**		**NON URUSAN**		
10	1	1	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100

Sumber: diolah Tim Penyusun RKPD Tahun 2025

2.2.4. Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah propinsi maupun daerah kabupaten/kota. Legalitas Standar Pelayanan Minimal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun capaian penerapan indikator standar pelayanan minimal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.72
Capaian Indikator SPM Tahun 2023-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
I	Pendidikan			
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	77.46%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	90.52%
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	53.45%	63.25%
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	43.77%	55.85%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100%	-%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional siswa	-	-
II	Kesehatan			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	77,25%	96.09%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	89.10%	98.1%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	92.51%	97.4%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	81.03%	99.45%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	96.59%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	72.72%	97.56%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	82.16%	83.22%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	27.78%	41.91%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	95.95%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	97.78%
11	Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	86.85%
12	Pelayanan kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human immunodeficiency Virus*)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	83.36%	82.09%
III	Pekerjaan Umum			
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	95%	93.98%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	82,73%	90.99%
IV	Perumahan Rakyat			
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	98.57%	100.00%
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100.00%
V	Trantibumlinmas			
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	89.01%	91%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	88.33%	91%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
4	Pelayanan penyelamtan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	57%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	90%	100%
VI	Sosial			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasartuna sosial khususnya glandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	100%	100%

Sumber Data: Laporan Penerapan SPM Tahun 2024, diolah.

2.2.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Suistainable Development Goals* (TPB/SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan kemudian baru-baru ini diperbaharui pada Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022. TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat daerah. Adapun capaian target TPB/SDGs tahun 2018-2022 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.73
Capaian target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Suistainable Development Goals (TPB/SDG's)

No	Tujuan / Indikator Tujuan 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2024)	Realisasi Tahun 2024	OPD Pelaksana
	Target 1.2: Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7-8%	7%	4.90%		Dinas Sosial
	Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
2	1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	90%	75%	80%	57.62	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
3	1.3.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat		30%	16.95	Dinkop, UKM, Nakertrans
4	1.3.1. (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	17.12%	11.73%	525 KPM	-	Dinas Sosial
5	1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	2,8 juta RT	178.594 RT	11.000 RT	-	Dinas Sosial
	Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro						
6	1.4.1. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	70%	81%	100%	83	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
7	1.4.1. (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	63%	63%	75%	118.4	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
8	1.4.1. (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	65%	68%	85%	80%	

9	1.4.1. (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat.	Meningkat	101%	95%	92.17%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
10	1.4.1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat.	Meningkat	105.40%	80%	87.36%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
11	1.4.1. (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	77.40%	77.40%	95%	95.46%	Dinas Duk Dan Capil
	Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
12	1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	39 daerah	24 Kab/Kota	13 lokasi	3 Lokasi	BPBD
13	1.5.1. (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat		3 lokasi	6 Lokasi	BPBD
	Tujuan / Indikator		**Target Nasional**	**Target Provinsi**	**Target Kabupaten (2023)**		**OPD Pelaksana**
	Tujuan 2. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN					**2024**	
	Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
14	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun		7%	4.58%	DTPHPKP
15	2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	17%	22.10%	4%		DTPHPKP
16	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	33.86%	3.85%	2.82%	Dinas Tanaman Pangan, HPKP
17	2.1.2. (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	8.50%	15.87%	7.50%	-	
	Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						

18	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.	Menurun	33.86%	6%	5.90%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB
19	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	7.25%	0%	2,7%	
20	2.2.2. (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	28%	28.50%	7%	10.2	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
21	2.2.2. (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	50%	44%	75%	83.4	
	Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.						
22	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat		Rp 250 Juta	5.23	Dinkop, UKM, Nakertrans
	Tujuan / Indikator		**Target Nasional**	**Target Provinsi**	**Target Kabupaten (2023)**		**OPD Pelaksana**
	Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera					**2024**	
	Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						
23	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	306	104	3 kasus		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB
24	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	95%	96%	100%	100%	
25	3.1.2. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	85%	81%	100%	83%	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
	Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.						
26	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun		0/1000	0	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
27	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun		0/1000	17	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
28	3.2.2. (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	24		2/1000	1	

	Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
29	3.3.1. (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	< 0,5%	< 0,5%	0.00%	0.549	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
30	3.3.2. (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	245	158	80/ 100 rb	236 100 rb	
31	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	<1	0 kasus	0.07	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
32	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	338.635	5 Orang	12	
	Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan						
33	3.4.1. (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	5.40%	6%	10%	92	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
34	3.4.1. (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	24.30%	19.82%	0.40%	28.8	
35	3.4.1. (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	15.40%	13.60%	0.20%	30	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
36	3.4.2. (a)	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.			11 Kec	11 Kec	
	Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
37	3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	65%	68%	70%	5.46	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
38	3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	23.50%	11%	7500 Orang	26.703	
39	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).	38	-	43%	37	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB

40	3.7.2. (a)	*Total Fertility Rate* (TFR).	2.28	-	2%	2.07	
	Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
41	3.8.1. (a)	*Unmet Need* pelayanan kesehatan.	9.91%	-	5.50%	7.88	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB
	Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.						
42	3.b.1. (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	83%	90%		Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
	Tujuan / Indikator		**Target Nasional**	**Target Provinsi**	**Target Kabupaten (2023)**		**OPD Pelaksana**
	Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas					**2024**	
	4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
43	4.1.1. (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat.	114.09%	-	105%	124.95	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
44	4.1.1. (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.	106.94%	-	101%	126.51	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.						
45	4.2.2. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	77.20%	-	55%	141.56	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Tujuan / Indikator		**Target Nasional**	**Target Provinsi**	**Target Kabupaten (2023)**		**OPD Pelaksana**
	Tujuan 5. Kesetaraan Gender					**2024**	

	Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.						
46	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	16	10	35 Kebijakan	34 Kebijakan	Dinas Pemdes, Perempuan Dan PPA
	Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
47	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	-	0 Kasus	2 kasus	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
48	5.2.1. (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun	-	0 Kasus	2 kasus	
49	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	-	0 Kasus	2 kasus	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
50	5.2.2. (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	70%	70%	100%	100	
	Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.						
51	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	-	35%	623 Orang	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.						
52	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	16.60%	60 Orang	4 kursi	4 kursi	Dinas Pemdes, Perempuan Dan PPA
53	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat		15 Orang	2 Orang	
	Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.						

54	5.6.1. (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	9.90%	-	5%	7.90%	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
	Tujuan / Indikator		**Target Nasional**	**Target Provinsi**	**Target Kabupaten (2023)**		**OPD Pelaksana**
	Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak					**2024**	
	Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.						
55	6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	100%	-	94%	93.98	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Pera
56	6.1.1. (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	100%	-	11%	12.83	
	Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.						
57	6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	100%	100%	87%		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
58	6.2.1. (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	45000	-	106 desa/kel	106 Desa/Kel	
59	6.2.1. (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	-	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
	Target 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.						
60	6.5.1. (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	108 Rencana	-	40 Rencana	38 Rencana	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
61	6.5.1. (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 Wilayah	-	2 Wilayah	1 Wilayah Sungai	
62	6.5.1. (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 Wilayah	-	2 Wilayah	1 Wilayah Sungai	

	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)		OPD Pelaksana
	Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi					2024	
	Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.						
63	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	9.29%	6.34%	10%		Bappeda Litbang
64	8.1.1. (a)	PDRB per kapita.	50 juta	48,21 juta	47 juta		
	Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.						
65	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	-	8%	6.61	Dinkop, UKM, Nakertrans
	Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.						
66	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	-	30%	35.09	Dinkop, UKM, Nakertrans
67	8.3.1. (a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	44.97%	66%	33.76%	
68	8.3.1. (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	39.42%	40%	35.09%	Dinkop, UKM, Nakertrans
69	8.3.1. (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	20%	1.20%	1.89%	
	Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.						
70	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	-	Rp 18.000	Rp18140	Dinkop, UKM, Nakertrans
71	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	-	5%	02.01 5.0	
72	8.5.2. (a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	Menurun	8.50%	14.12%	Dinkop, UKM, Nakertrans
	Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.						

73	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	meningkat	25%	12.42	Dinkop, UKM, Nakertrans
	Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.						
74	8.9.1. (a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	20 Juta Orang	151 763 Orang	250 Orang	8 Orang	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
75	8.9.1. (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	6.000.000 Orang	70.000 Orang	179	Dinkop, UKM, Nakertrans
76	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	Meningkat	2.25%	1230	
	Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.						
77	8.10.1. (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	20%	75%	72%	Dinkop, UKM, Nakertrans
	Tujuan / Indikator		**Target Nasional**	**Target Provinsi**	**Target Kabupaten (2023)**		**OPD Pelaksana**
	Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur					**2024**	
	Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.						
78	9.1.1 (a)	Propoporsi Panjang Jalan Kondisi Baik	-	-	60%		Dinas Bicipta Pera
	Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
79	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	Meningkat	14.25%	18%	15.09	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

80	9.2.1. (a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	Meningkat	9.25%	10%	4.71	Dinkop, UKM, Nakertrans
81	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	287269 Orang	25.50%	28.18	Dinkop, UKM, Nakertrans
	Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.						
82	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	53,000	0.10%	3.1	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
83	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	-	1%		
	Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.						
84	9.c.1. (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	-	-	77%		Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Tujuan / Indikator		**Target Nasional**	**Target Provinsi**	**Target Kabupaten (2023)**		**OPD Pelaksana**
	Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan					**2024**	
	Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						
85	10.1.1*	Koefisien Gini.	0.36	0.36	0.3		Dinas Sosial
86	10.1.1. (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Meningkat	-	1 Desa	0 Desa	Dinas Pemdes, Dan PPA
87	10.1.1. (c)	Jumlah desa tertinggal.	Menurun	-	0 Desa	1Desa	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
88	10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat	-	15 Desa	33 Desa	
89	10.1.1. (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkat	Meningkat	0.65	0.5167	

	Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.						
90	10.3.1. (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Menurun	-	0 Kebijakan		Sekretariat Daerah
	Tujuan / Indikator		**Target Nasional**	**Target Provinsi**	**Target Kabupaten (2023)**		**OPD Pelaksana**
	Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang Berkelanjutan					**2024**	
	Target 11.1 Pada Tahun 2030, Menjamin Akses Bagi Semua Terhadap Perumahan Yang Layak, Aman, Terjangkau, Dan Pelayanan Dasar, Serta Menata Kawasan Kumuh.						
91	**11.1.1***	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Menurun	-	45%		Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Pera
92	11.1.1. (a)	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau.	3,7 Juta rumah	-	15%		
	Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.						
93	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	5.598 Orang	0/ 100 rb	0.01	BPBD
94	11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	30%	24%	116.15	119.2	
95	11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Ada	75	1 Sistem	0	BPBD
96	11.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	-	Rp 4.555.000	Rp.33.507.000	
	Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.						
97	11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	80%	80%	99.30%	47.802	Dinas LH

	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)		OPD Pelaksana
	Tujuan 12. Kota dan pemukiman yang Berkelanjutan					2024	
	Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.						
98	12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 Ton/Hari	20 Ton/Hari	10.000 Ton	9.428.53	Dinas LH
	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)		OPD Pelaksana
	Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim					2024	
	Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.						
99	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	1 Dok	1 Dok	0	BPBD
	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)		OPD Pelaksana
	Tujuan 14. Ekosistem Lautan					2024	
	Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.						
100	14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	87%	-	85%	100	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)		OPD Pelaksana
	Tujuan 15. Ekosistem Daratan					2024	
	Target 15.9 Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.						
101	15.9.1. (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	1 Dok	2 Dok	-	Dinas Lingkungan Hidup

	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)		OPD Pelaksana
	Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh					2024	
	Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.						
102	16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	-	0 Kasus	0 Kasus	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
103	16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	-	0 Orang	0 Kasus	
104	16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	-	200 Kasus		
	Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.						
105	16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	-	0%	0%	Dinas Pemdes, PPA
106	16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	-	0 Kasus	0 Kasus	
107	16.2.3. (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	-	0%	0%	
	Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.						
108	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	Rp. 190.759.499.612	97%	-	Bappeda Litbang
109	16.6.1. (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Menurun	-	WTP	Belum rilis	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
110	16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	75%	BB	62.25	65.08	Inspektorat

111	16.6.1. (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	80%	100%	50%	50.38	Sekretariat Daerah
	Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.						
112	16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	meningkat	60 Orang	8.57%	8.57%	Dinas Pemdes, PPA
113	16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	-	21%	4.87%	
	Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
114	16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	85%	-	90%	95.46	Dinas Duk dan Capil
	Tujuan / Indikator		**Target Nasional**	**Target Provinsi**	**Target Kabupaten (2023)**		**OPD Pelaksana**
	Tujuan 17. Kemitraan Untuk mencapai tujuan					**2024**	
	Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.						
115	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	Meningkat	Rp. 9.292.958.272.501	10%	0.063	Badan Pendapatan Daerah
116	17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Meningkat	-	0.50%	0.003	
117	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	-	35%	0.041	Badan Pendapatan Daerah
	Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.						
118	17.19.2. (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	ada	ada	ada	Dinas Duk dan Capil

Sumber: Data diolah Tim Penyusun RKPD Tahun 2025.

2.3. Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2024

Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan prinsip fundamental dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengharuskan adanya keterkaitan, keselarasan, dan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Konsistensi ini memastikan bahwa setiap dokumen perencanaan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dalam satu kesatuan sistem yang utuh dan terintegrasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan RKPD tahunan, di mana setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD harus bersumber dan sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Konsistensi vertikal ini memastikan bahwa perencanaan tahunan tidak menyimpang dari arah pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian target pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan terarah. Lebih lanjut, konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran tercermin dalam keterkaitan yang erat antara RKPD dan APBD, di mana setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD harus memperoleh alokasi anggaran yang memadai dalam APBD. Konsistensi horizontal ini memastikan bahwa seluruh rencana pembangunan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber daya keuangan yang telah dialokasikan secara proporsional sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

2.3.1. Penjabaran Program RPJMD

Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.74
Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPD	RKPD	Renja-PD	APBD	RKPD & RPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPD	RKPD & RPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	7	7	7	7	7	7	7	1	0	0	1
2	Dinas Kesehatan	8	5	5	5	5	5	5	5	3	0	0	3
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	4	4	0	4	4	0	4	0	0	4
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
5	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	13	13	13	13	13	13	13	13	0	0	0	0
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
8	Dinas Sosial	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
9	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	8	8	8	6	8	8	6	6	0	0	2	2
10	Dinas Lingkungan Hidup	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	10	10	7	7	10	7	7	7	0	3	3	3
13	Dinas Perhubungan	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
15	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	9	9	9	8	9	9	8	8	0	0	1	1

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPD	RKPD	Renja-PD	APBD	RKPD & RPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPD	RKPD & RPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPD
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6	6	6	4	6	6	4	4	0	0	2	2
19	Dinas Peternakan Dan Perikanan	9	9	8	8	9	8	8	8	1	0	1	1
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6	6	6	4	6	6	4	4	0	0	2	2
21	Sekretariat Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
22	Sekretariat DPRD	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Danpengembangan Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
24	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
25	Badan Pendapatan Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	1
27	Inspektorat	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
28	Kecamatan	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
29	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	1
TOTAL		156	154	150	143	150	150	143	139	11	3	11	21

Sumber: Laporan evaluasi RKPD Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran program RPD ke dalam RKPD dan APBD antara lain sebagai berikut:

a. Kesesuaian program RPD dan RKPD

1. Jumlah program dalam RPD yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 156 program, sedangkan jumlah program dalam RKPD Tahun 2024 adalah 154 program. Dari 154 program dalam RKPD tersebut, seluruhnya merupakan program RPD.
2. Terdapat 3 program RPD yang tidak terdapat di RKPD

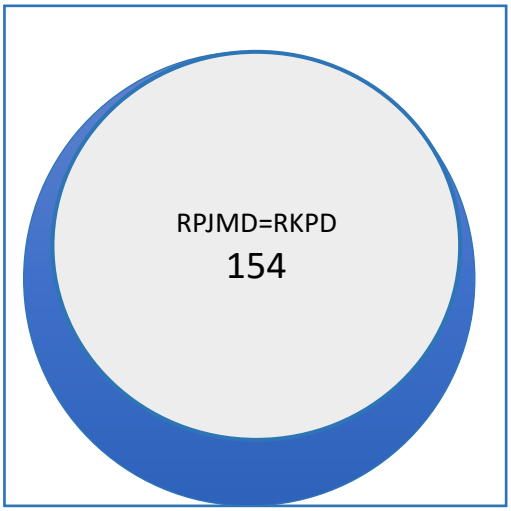

b. Kesesuaian program RKPD dan Renja-PD

keseluruhan program Renja Perangkat Daerah adalah program RKPD sebanyak 150 program

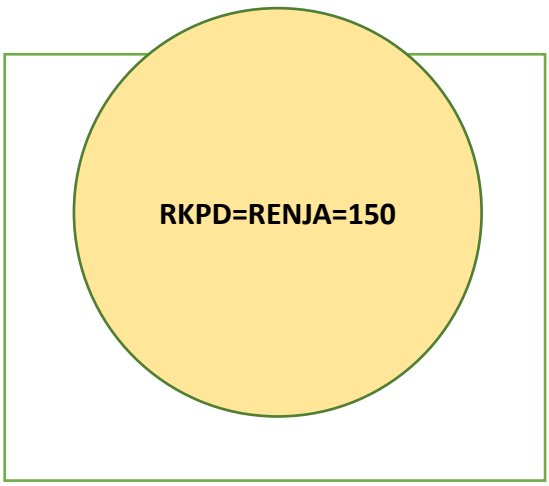

c. Kesesuaian program RKPD dan APBD

1. jumlah program yang ada di RKPD sebabanyak 154 program, sedangkan program yang dilaksanakan pada APBD sebanyak 143 program, jadi sebanyak 11 program RKPD tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2024
2. Program RKPD yang tidak dilaksanakan pada APBD terdapat pada OPD:

   Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan

Anak, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

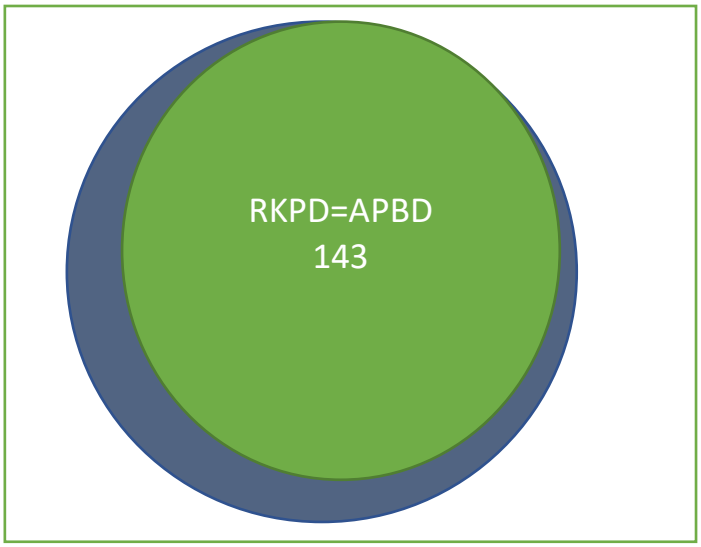

d. Kesesuaian program RPD dan APBD

1. jumlah program RPD sebanyak 156 program yang dilaksanakan pada APBD sebanyak 143 program, jadi sebanyak 17 program RPD tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2024.
2. sebanyak 10 perangkat daerah yang mempunyai program RPD yang tidak dialksanakan pada APBD yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tanaman Pangan , Holtikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

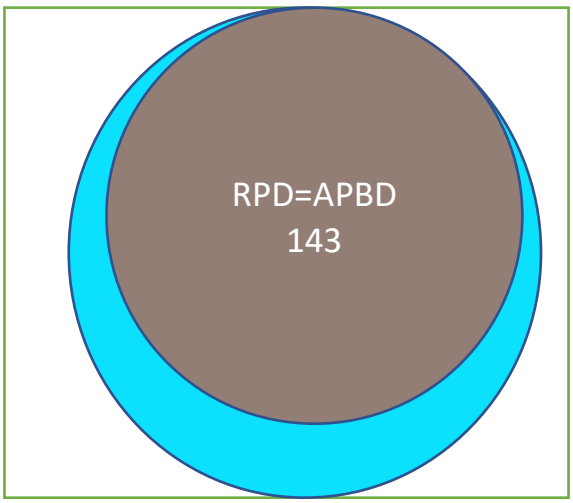

Konsistensi antardokumen dalam penjabaran program RPD & RKPD, RKPD & Renja, RKPD & APBD dan RPD & APBD sebagaimana diuraikan di atas dapat digabarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 2.1.
Konsistensi Program antar Dokumen Perencanaan

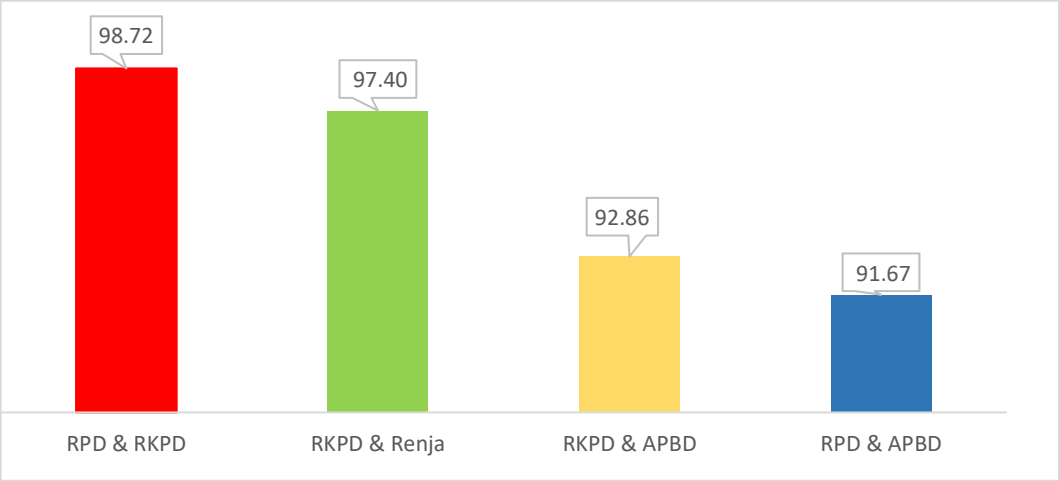

Sumber data: Data diolah

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa konsistensi RPD & RKPD sebesar 98.72%, RKPD & Renja sebesar 97.40%, RKPD & APBD sebesar 192.86% dan RPD & APBD sebesar 91.67.

Konsistensi anara dokumen perencanaan dan penganggaran tidak mencapai 100% merupakan pekerjaan bersama antara TAPD perencaaan dan penganggaran yang dengan pengintegrasian perencanaan dan penganggaran dalam SIPD Kemendagri diharapkan tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

2.1. Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD

Salah satu hal penting yang termuat dalam RPD adalah program pembangunan daerah. Program tersebut menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun kegiatan dalam Renstra-PD. Kegiatan dalam Renstra-PD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-PD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan pada KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan R-APBD untuk ditetapkan menjadi kegiatan dalam APBD dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan data pada Gambar 2.2, dapat digambarkan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Tidak Sama	
		Renja	RKPD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16	16	16	16	16	0	0
2	Dinas Kesehatan	30	30	21	30	21	0	9
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			11	0	0		
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	7	7	6	7	6	0	1
5	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	17	17	17	17	17	0	0
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12	12	9	12	9	0	3
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	10	10	10	10	0	0
8	Dinas Sosial	11	11	11	11	11	0	0
9	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	15	15	10	15	10	0	5
10	Dinas Lingkungan Hidup	18	18	17	18	17	0	1
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11	11	11	11	11	0	0
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	11	11	11	11	11	0	0
13	Dinas Perhubungan	13	13	13	13	13	0	0
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	12	12	12	12	12	0	0
15	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	17	17	16	17	16	0	1
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	12	11	12	11	0	1
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	17	17	16	17	16	0	1
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	17	17	10	17	10	0	7
19	Dinas Peternakan Dan Perikanan	16	16	15	16	15	0	1
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10	10	8	10	8	0	2
21	Sekretariat Daerah	20	20	19	20	19	0	1
22	Sekretariat DPRD	16	16	16	16	16	0	0
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Danpengembangan Daerah	15	15	15	15	15	0	0
24	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	12	12	12	12	12	0	0
25	Badan Pendapatan Daerah	8	8	8	8	8	0	0

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Tidak Sama	
		Renja	RKPD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	12	12	12	12	0	0
27	Inspektorat	10	10	10	10	10	0	0
28	Kecamatan Panca Lautang	9	9	9	9	9	0	0
29	Kecamatan Tellu Limpoe	11	11	11	11	11		
30	Kecamatan Watang Pulu	9	9	9	9	9	0	0
31	Kecamatan Maritengngae	10	10	10	10	10	0	0
32	Kecamatan Watang Sidenreng	10	10	10	10	10	0	0
33	Kecamatan Dua Pitue	11	11	11	11	11	0	0
34	Kecamatan Pitu Riawa	9	9	9	9	9	0	0
35	Kecamatan Pitu Riase	10	10	10	10	10	0	0
36	Kecamatan Baranti	10	10	10	10	10	0	0
37	Kecamatan Panca Rijang	10	10	9	10	9	0	1
38	Kecamatan Kulo	8	8	8	8	8	0	0
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	9	9	9	9	9	0	0
	TOTAL	481	481	458	481	447	0	34

Keterangan Tabel:
Kolom (1) adalah nomor.
Kolom (2) adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Kolom (3) memuat jumlah rencana kegiatan dalam Renja-PD pada setiap OPD.
Kolom (4) memuat jumlah rencana kegiatan dalam RKPD pada setiap OPD.
Kolom (5) memuat jumlah kegiatan dalam APBD pada setiap OPD.
Kolom (6) memuat jumlah rencana kegiatan yang sama antara Renja-PD dan RKPD
Kolom (7) memuat jumlah rencana kegiatan RKPD yang dilaksanakan dalam APBD.
Kolom (8) memuat jumlah kegiatan yang tidak sesuai antara Renja-PD dan RKPD. Penghitungan dilakukan dengan menambahkan jumlah kegiatan pada Renja-PD yang tidak ada dalam APBD dengan jumlah kegiatan dalam RKPD yang tidak ada dalam Renja-PD (8 = (3 - 6) + (4 - 6)).
Kolom (9) memuat jumlah kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD. Penghitungan dilakukan dengan menambahkan jumlah kegiatan pada RKPD yang tidak ada dalam APBD dengan jumlah kegiatan dalam APBD yang tidak ada dalam RKPD (9 = (4 - 7) + (5- 7)).

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

a. RKPD dan Renja-PD.
   1. Kegiatan dalam RKPD dan Renja Perangkat daerah adalah sama yaitu 481 dengan konsistensi 100%

b. RKPD dan APBD.
   1. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 481 (jumlah pada kolom 4) dan APBD 458 kegiatan
   2. Sebanyak 458 kegiatan pada APBD merupakan kegiatan RKPD, sebanyak 23 kegiatan pada RKPD tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2024.
   3. Sebanyak 19 perangkat daerah yang mempunyai kegiatan RKPD yang tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2024.
   4. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 95.22%.

2.2. Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD

Sub kegiatan adalah langkah tambahan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian diikuti oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, oleh sebab itu dalam hal evaluasi terhadap pelakksaaan RKPD tidak hanya berheti pada kegiatan (intermediate outcome) tetapi harus sampai pada sub kegiatan yang bersifat outcome, maka berikut ini adalah konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan pada RKPD dan APBD:

Tabel 2.3.
Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama		Sub Kegiatan Tidak Sama	
		Renja	RKPD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	77	77	73	77	73	0	4
2	Dinas Kesehatan	132	132	108	132	108	0	24
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	95	95	23	95	23	0	72
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	22	22	20	22	20	0	2
5	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	40	40	36	40	36	0	4
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	53	53	20	53	20	0	33
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22	22	22	22	22	0	0
8	Dinas Sosial	22	22	17	22	17	0	5
9	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	51	51	33	51	33	0	18
10	Dinas Lingkungan Hidup	40	40	35	40	35	0	5
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	25	25	22	25	22	0	3
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	42	42	29	42	29	0	13
13	Dinas Perhubungan	27	27	27	27	27	0	0
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	30	30	27	30	27	0	3
15	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	32	32	29	32	29	0	3
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27	27	25	27	25	0	2
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	31	31	26	31	26	0	5
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	60	60	34	60	34	0	26
19	Dinas Peternakan Dan Perikanan	27	27	26	27	26	0	1
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	17	17	14	17	14	0	3
21	Sekretariat Daerah	66	66	64	66	64	0	2

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama		Sub Kegiatan Tidak Sama	
		Renja	RKPD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD
22	Sekretariat DPRD	58	58	56	58	56	0	2
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Danpengembangan Daerah	61	61	42	61	42	0	19
24	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	88	88	72	88	72	0	16
25	Badan Pendapatan Daerah	41	41	30	41	30	0	11
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43	43	43	43	43	0	0
27	Inspektorat	28	28	27	28	27	0	1
28	Kecamatan Panca Lautang	26	26	19	26	19	0	7
29	Kecamatan Tellu Limpoe	34	34	33	34	33	0	1
30	Kecamatan Watang Pulu	22	22	21	22	21	0	1
31	Kecamatan Maritengngae	32	32	24	32	24	0	8
32	Kecamatan Watang Sidenreng	24	24	20	24	20	0	4
33	Kecamatan Dua Pitue	28	28	25	28	25	0	3
34	Kecamatan Pitu Riawa	25	25	24	25	24	0	1
35	Kecamatan Pitu Riase	27	27	24	27	24	0	3
36	Kecamatan Baranti	28	28	25	28	25	0	3
37	Kecamatan Panca Rijang	20	20	19	20	19	0	1
38	Kecamatan Kulo	21	21	18	21	18	0	3
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	24	24	22	24	22	0	2
	TOTAL	1568	1568	1254	1568	1254	0	314

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

a. RKPD dan Renja-PD.

Sub kegiatan dalam RKPD dan Renja Perangkat daerah adalah sama yaitu 1.568 dengan konsistensi 100%

b. RKPD dan APBD.

1. Sub kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1.568 dan APBD sebanyak 1.254 sub kegiatan
2. Sebanyak 1.254 sub kegiatan pada APBD merupakan kegiatan RKPD, sebanyak 314 sub kegiatan pada RKPD tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2024
3. Sebanyak 36 perangkat daerah yang mempunyai kegiatan RKPD yang tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2023.
4. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 79.97%.

2.3. Penjabaran Kerangka Pendanaan

Salah satu hal penting dalam muatan RPJMD dan RKPD adalah adanya kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dalam APBD. Penjabaran pendanaan belanja langsung dalam RPJMD ke dalam RKPD dan APBD selengkapnya pada setiap perangkat daerah berdasarkan data pada Tabel 2.5 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Penjabaran Kerangka Pendanaan RPD Ke Dalam RKPD Dan APBD

No.	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPD (Rp)	RKPD (Rp)	% RPD	APBD (Rp)	% RPD	RKPD dan RPD	APBD dan RKPD	APBD dan RPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6-3	10 = 6-3
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**755,416,019,242**	**751,644,458,242**	**100**	**825,755,636,500**	**109**	**-3,771,561,000**	**74,111,178,258**	**70,339,617,258**
101	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	384,257,928,553	382,736,367,553	100	380,237,937,400	99	-1,521,561,000	-2,498,430,153	-4,019,991,153
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	384,257,928,553	382,736,367,553	100	380,237,937,400	99	-1,521,561,000	-2,498,430,153	-4,019,991,153
102	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	269,034,297,767	269,034,297,767	100	317,606,093,300	118	0	48,571,795,533	48,571,795,533
	Dinas Kesehatan	269,034,297,767	269,034,297,767	100	317,606,093,300	118	0	48,571,795,533	48,571,795,533
103	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86,247,047,740	83,997,047,740	97	106,109,351,800	123	-2,250,000,000	22,112,304,060	19,862,304,060
	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	18,458,870,520	18,664,205,000	101	19,121,730,000	104	205,334,480	457,525,000	662,859,480
	Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan Dan Perumahan Rakyat	67,788,177,220	65,332,815,704	96	86,987,621,800	128	-2,455,361,516	21,654,806,096	19,199,444,580
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	350,000,000	350,000,000	100	1,030,294,000	294	0	680,294,000	680,294,000
	Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan Dan Perumahan Rakyat	350,000,000	350,000,000	100	1,030,294,000	294	0	680,294,000	680,294,000
105	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	11,309,365,236	11,309,365,236	100	17,543,629,000	155	0	6,234,263,764	6,234,263,764
	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	8,774,481,014	8,774,481,014	100	14,739,957,000	168	0	5,965,475,986	5,965,475,986
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,534,884,222	2,534,884,222	100	2,803,672,000	111	0	268,787,778	268,787,778
106	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	4,217,379,946	4,217,379,946	100	3,228,331,000	77	0	-989,048,946	-989,048,946
	Dinas Sosial	4,217,379,946	4,217,379,946	100	3,228,331,000	77	0	-989,048,946	-989,048,946
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**74,732,341,087**	**74,107,425,087**	**99**	**96,079,431,000**	**129**	**-624,916,000**	**21,972,005,913**	**21,347,089,913**

No.	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPD (Rp)	RKPD (Rp)	% RPD	APBD (Rp)	% RPD	RKPD dan RPD	APBD dan RKPD	APBD dan RPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6-3	10 = 6-3
207	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2,264,138,000	2,264,138,000	100	6,322,242,000	279	0	4,058,104,000	4,058,104,000
	Dinas Koperasi Ukm Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2,264,138,000	2,264,138,000	100	6,322,242,000	279	0	4,058,104,000	4,058,104,000
208	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	285,000,000	285,000,000	100	3,688,491,100	1,294	0	3,403,491,100	3,403,491,100
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan Dan Perlindungan Anak	285,000,000	285,000,000	100	3,688,491,100	1,294	0	3,403,491,100	3,403,491,100
209	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	405,000,000	405,000,000	100	8,838,047,000	2,182	0	8,433,047,000	8,433,047,000
	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	405,000,000	405,000,000	100	8,838,047,000	2,182	0	8,433,047,000	8,433,047,000
21	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	25,000,000	25,000,000	100	1,038,420,200	4,154	0	1,013,420,200	1,013,420,200
	Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan Dan Perumahan Rakyat	25,000,000	25,000,000	100	1,038,420,200	4,154	0	1,013,420,200	1,013,420,200
211	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	11,519,743,143	11,519,743,143	100	11,600,091,000	101	0	80,347,857	80,347,857
	Dinas Lingkungan Hidup	11,519,743,143	11,519,743,143	100	11,600,091,000	101	0	80,347,857	80,347,857
212	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,131,152,696	3,131,152,696	100	4,501,172,000	144	0	1,370,019,304	1,370,019,304
	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3,131,152,696	3,131,152,696	100	4,501,172,000	144	0	1,370,019,304	1,370,019,304
213	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,472,136,220	3,472,136,220	100	678,285,900	20	0	-2,793,850,320	-2,793,850,320
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan Dan Perlindungan Anak	3,472,136,220	3,472,136,220	100	678,285,900	20	0	-2,793,850,320	-2,793,850,320
214	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6,723,608,600	6,723,608,600	100	8,330,899,000	124	0	1,607,290,400	1,607,290,400

No.	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPD (Rp)	RKPD (Rp)	% RPD	APBD (Rp)	% RPD	RKPD dan RPD	APBD dan RKPD	APBD dan RPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6-3	10 = 6-3
	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6,723,608,600	6,723,608,600	100	8,330,899,000	124	0	1,607,290,400	1,607,290,400
215	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	11,880,373,397	11,880,373,397	100	11,314,053,200	95	0	-566,320,197	-566,320,197
	Dinas Perhubungan	11,880,373,397	11,880,373,397	100	11,314,053,200	95	0	-566,320,197	-566,320,197
216	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	5,269,024,368	5,269,024,368	100	4,860,074,000	92	0	-408,950,368	-408,950,368
	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,269,024,368	5,269,024,368	100	4,860,074,000	92	0	-408,950,368	-408,950,368
217	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4,347,405,727	3,722,489,727	86	9,537,735,000	219	-624,916,000	5,815,245,273	5,190,329,273
	Dinas Koperasi Ukm Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4,347,405,727	3,722,489,727	86	9,537,735,000	219	-624,916,000	5,815,245,273	5,190,329,273
218	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	2,810,493,205	2,810,493,205	100	3,424,285,000	122	0	613,791,795	613,791,795
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,810,493,205	2,810,493,205	100	3,424,285,000	122	0	613,791,795	613,791,795
219	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14,200,589,803	14,200,589,803	100	15,734,885,000	111	0	1,534,295,197	1,534,295,197
	Dinas Kepemudaan Olaharaga Dan Pariwisata	14,200,589,803	14,200,589,803	100	15,734,885,000	111	0	1,534,295,197	1,534,295,197
22	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	63,492,000	63,492,000	100	48,641,000	77	0	-14,851,000	-14,851,000
	Dinas Komunikasi dan Informatika	63,492,000	63,492,000	100	48,641,000	77	0	-14,851,000	-14,851,000
221	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	57,992,000	57,992,000	100	94,000,000	162	0	36,008,000	36,008,000
	Dinas Komunikasi dan Informatika	57,992,000	57,992,000	100	94,000,000	162	0	36,008,000	36,008,000
222	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1,000,000,000	1,000,000,000	100	1,042,014,600	104	0	42,014,600	42,014,600
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,000,000,000	1,000,000,000	100	1,042,014,600	104	0	42,014,600	42,014,600
223	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	7,177,191,928	7,177,191,928	100	5,002,460,000	70	0	-2,174,731,928	-2,174,731,928

No.	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPD (Rp)	RKPD (Rp)	% RPD	APBD (Rp)	% RPD	RKPD dan RPD	APBD dan RKPD	APBD dan RPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6-3	10 = 6-3
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7,177,191,928	7,177,191,928	100	5,002,460,000	70	0	-2,174,731,928	-2,174,731,928
224	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	100,000,000	100,000,000	100	23,635,000	24	0	-76,365,000	-76,365,000
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100,000,000	100,000,000	100	23,635,000	24	0	-76,365,000	-76,365,000
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**37,596,326,804**	**36,596,326,804**	**97**	**31,780,226,000**	**85**	**-1,000,000,000**	**-4,816,100,804**	**-5,816,100,804**
325	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	8,209,264,059	8,209,264,059	100	9,397,993,000	114	0	1,188,728,941	1,188,728,941
	Dinas Petenakan dan Perikanan	8,209,264,059	8,209,264,059	100	9,397,993,000	114	0	1,188,728,941	1,188,728,941
326	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	2,612,392,000	2,612,392,000	100	744,821,000	29	0	-1,867,571,000	-1,867,571,000
	Dinas Kepemudaan Olaharaga Dan Pariwisata	2,612,392,000	2,612,392,000	100	744,821,000	29	0	-1,867,571,000	-1,867,571,000
327	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	19,858,072,796	19,858,072,796	100	16,013,453,000	81	0	-3,844,619,796	-3,844,619,796
	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	19,393,497,296	19,393,497,296	100	14,427,070,000	74	0	-4,966,427,296	-4,966,427,296
	Dinas Petenakan dan Perikanan	464,575,000	464,575,000	100	1,586,383,000	341	0	1,121,808,000	1,121,808,000
328	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	6,196,597,949	5,196,597,949	84	3,501,199,000	57	-1,000,000,000	-1,695,398,949	-2,695,398,949
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6,196,597,949	5,196,597,949	84	3,501,199,000	57	-1,000,000,000	-1,695,398,949	-2,695,398,949
329	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	600,000,000	600,000,000	100	2,122,760,000	354	0	1,522,760,000	1,522,760,000
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	600,000,000	600,000,000	100	2,122,760,000	354	0	1,522,760,000	1,522,760,000
33	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	120,000,000	120,000,000	100	0	0	0	-120,000,000	-120,000,000
	Dinas Koperasi Ukm Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	120,000,000	120,000,000	100		0	0	-120,000,000	-120,000,000
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**47,634,910,019**	**47,634,910,019**	**100**	**51,849,671,081**	**109**	**0**	**4,214,761,062**	**4,214,761,062**
401	Sekretariat Daerah	19,185,469,081	19,185,469,081	100	19,185,469,081	100	0	0	0
	Sekretariat Daerah	19,185,469,081	19,185,469,081	100	19,185,469,081	100	0	0	0

No.	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPD (Rp)	RKPD (Rp)	% RPD	APBD (Rp)	% RPD	RKPD dan RPD	APBD dan RKPD	APBD dan RPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6-3	10 = 6-3
402	Sekretariat DPRD	28,449,440,938	28,449,440,938	100	32,664,202,000	115	0	4,214,761,062	4,214,761,062
	Sekretariat DPRD	28,449,440,938	28,449,440,938	100	32,664,202,000	115	0	4,214,761,062	4,214,761,062
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**169,712,501,760**	**170,212,501,760**	**100**	**167,304,005,419**	**99**	**500,000,000**	**-2,908,496,341**	**-2,408,496,341**
501	Perencanaan	5,036,570,349	5,036,570,349	100	5,044,945,655	100	0	8,375,306	8,375,306
	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	5,036,570,349	5,036,570,349	100	5,044,945,655	100	0	8,375,306	8,375,306
502	Keuangan	157,039,130,264	157,039,130,264	100	157,109,130,264	100	0	70,000,000	70,000,000
	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	142,928,450,270	142,928,450,270	100	142,768,450,270	100	0	-160,000,000	-160,000,000
	Badan Pendapatan Daerah	14,110,679,994	14,110,679,994	100	14,270,679,994	101	0	160,000,000	160,000,000
503	Kepegawaian	7,036,801,147	7,403,801,147	105	4,553,518,500	65	367,000,000	-2,850,282,647	-2,483,282,647
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,036,801,147	7,403,801,147	105	4,553,518,500	65	367,000,000	-2,850,282,647	-2,483,282,647
504	Pendidikan dan Pelatihan	100,000,000	233,000,000	233	298,205,500	298	133,000,000	65,205,500	198,205,500
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,000,000	233,000,000	233	298,205,500	298	133,000,000	65,205,500	198,205,500
505	Penelitian dan Pengembangan	500,000,000	500,000,000	100	298,205,500	60	0	-201,794,500	-201,794,500
	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	500,000,000	500,000,000	100	298,205,500	60	0	-201,794,500	-201,794,500
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**10,026,412,282**	**10,026,412,282**	**100**	**9,723,901,000**	**97**	**0**	**-302,511,282**	**-302,511,282**
601	Inspektorat Daerah	10,026,412,282	10,026,412,282	100	9,723,901,000	97	0	-302,511,282	-302,511,282
	Inspektorat	10,026,412,282	10,026,412,282	100	9,723,901,000	97	0	-302,511,282	-302,511,282
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**44,537,870,257**	**44,537,870,257**	**100**	**43,695,235,000**	**98**	**0**	**-842,635,257**	**-842,635,257**
701	Kecamatan	44,537,870,257	44,537,870,257	100	43,695,235,000	98	0	-842,635,257	-842,635,257
	Kecamatan	44,537,870,257	44,537,870,257	100	43,695,235,000	98	0	-842,635,257	-842,635,257
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**14,168,618,549**	**14,168,618,549**	**100**	**25,667,337,000**	**181**	**0**	**11,498,718,451**	**11,498,718,451**

No.	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPD (Rp)	RKPD (Rp)	% RPD	APBD (Rp)	% RPD	RKPD dan RPD	APBD dan RKPD	APBD dan RPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6-3	10 = 6-3
801	Kesatuan Bangsa dan Politik	14,168,618,549	14,168,618,549	100	25,667,337,000	181	0	11,498,718,451	11,498,718,451
	Kesatuan Bangsa dan Politik	14,168,618,549	14,168,618,549	100	25,667,337,000	181	0	11,498,718,451	11,498,718,451
TOTAL		**1,153,825,000,000**	**1,148,928,523,000**	**99.58**	**1,251,855,443,000**	**108**	**-4,896,477,000**	**102,926,920,000**	**98,030,443,000**

Keterangan Tabel:

Kolom (1) memuat nomor urut.
Kolom (2) memuat perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Kolom (3) memuat jumlah kerangka pendanaan pada setiap perangkat daerah sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 9 Tahun 2017.
Kolom (4) memuat jumlah pagu indikatif pada masing-masing perangkat daerah sebagaimana yang tercantum dalam RKPD dan persentasenya dibanding dengan kerangka pendanaan dalam RPD.
Kolom (5) memuat jumlah pagu anggaran pada masing-masing perangkat daerah sebagaimana yang tercantum dalam Perda APBD Perubahan dan persentasenya dibanding dengan kerangka pendanaan dalam RPD.
Kolom (6) memuat jumlah selisih pagu indikatif RKPD dengan kerangka pendanaan RPD.
Kolom (7) memuat jumlah selisih pagu APBD dengan pagu indikatif RKPD.
Kolom (8) memuat jumlah selisih pagu APBD dan kerangka pendanaan RPD.

Grafik 2.2.
Konsistensi Kerangka Pendanaan antar Dokumen Perencanaan

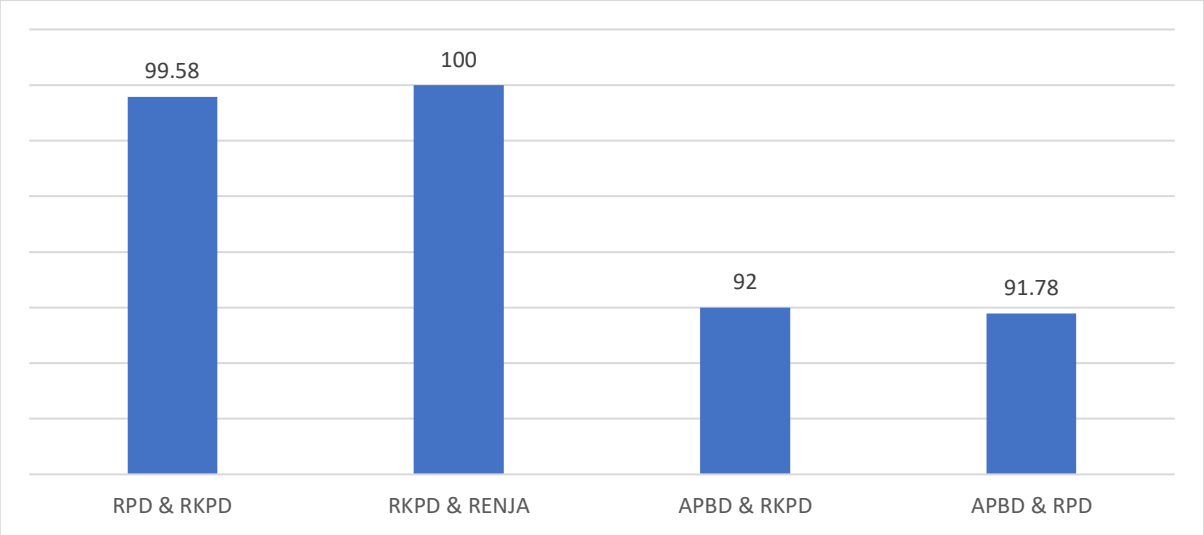

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa konsistensi RPD & RKPD sebesar 99.58%, RKPD dan Renja sebesar 100.00 %, RKPD dan APBD sebesar 92% dan RPJMD & APBD sebesar 91.78%. RKPD merupakan penjabaran RPD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPD.

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat gambaran pada tabel di atas antara lain adalah sebagai berikut:

a. RKPD terhadap RPD

   Jumlah pagu indikatif RPD lebih besar dibanding RKPD (99.58%), dengan total selisih Rp. 4,896,477,000,- (Empat milyar delapar ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

b. APBD terhadap RKPD

   1. Jumlah pagu indikatif RKPD lebih kecil dari pagu APBD dengan selisih Rp. 102,926,920,000 (Seratu dua milyar sembilan ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
   2. Sebanyak 16 (enam belas) perangkat daerah yang mempunyai pagu APBD lebih besar dari pagu RKPD;

c. APBD terhadap RPD

   Jumlah pagu RPD lebih kecil dibanding kerangka pendanaan APBD (91.78%), dengan total selisih Rp. 98,030,443,000,- (sembilan puluh delapan milyar tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribuh).

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan komponen krusial yang menentukan arah dan fokus pembangunan daerah dalam periode satu tahun. Permasalahan pembangunan yang tercantum dalam RKPD harus mencerminkan kondisi riil daerah berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek pembangunan. Tujuan utama dari perumusan program pembangunan daerah adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh daerah, terutama jika masalah tersebut terjadi ditengah masyarakat. Permasalahan pembangunan perlu dirumuskan dengan cermat agar tidak keliru menentukan tujuan dan sasaran pembangunan. Keliru dalam merumuskan permasalahan, membuat agenda pembangunan daerah hanya menjadi rutinitas formal dan tidak akan pernah berhasil berkontribusi bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan desain program dan kegiatan untuk akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam setiap tahapannya.

Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode tahun sebelumnya. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Masalah pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua, yaitu permasalahan prioritas pembangunan daerah (makro daerah) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (mikro sektoral/perangkat daerah).

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, berbagai permasalahan pembangunan pada level makro daerah, diidentifikasi sebagai berikut:

2.4.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi;

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rapang selama beberapa tahun terakhir (2019-2024) cenderung mengalami perlambatan dari angka 4,65% di tahun 2019 menjadi 4,05 persen di tahun 2024. Di Tahun 2024 ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang bahkan lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional. Kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan karena menurunnya produktivitas pertanian yang menyumbangkan kontribusi terbesar pada struktur ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penurunan produktivitas sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah ini dipicu oleh berbagai faktor struktural yang saling berkaitan, antara lain perubahan

iklim yang menyebabkan ketidakstabilan pola curah hujan, degradasi kualitas lahan pertanian, terbatasnya akses petani terhadap teknologi pertanian modern dan benih unggul serta belum optimalnya sistem irigasi dan infrastruktur pertanian yang belum mampu mengantisipasi dampak perubahan cuaca ekstrem, sehingga petani sering mengalami gagal panen atau penurunan hasil produksi yang signifikan. Selain faktor teknis pertanian, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga disebabkan oleh lemahnya diversifikasi ekonomi daerah yang masih sangat bergantung pada sektor primer. Sektor industri pengolahan dan jasa yang seharusnya dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi alternatif masih belum berkembang optimal karena terbatasnya investasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya infrastruktur pendukung industri. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian membuat perekonomian daerah menjadi rentan terhadap guncangan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas pertanian dan perubahan iklim.

Permasalahan lain yang turut mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi adalah lemahnya daya saing produk lokal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas dan standarisasi produk, terbatasnya akses pasar dan informasi pasar, serta lemahnya branding dan promosi produk unggulan daerah. Kondisi ini mengakibatkan produk-produk Kabupaten Sidenreng Rappang sulit bersaing dengan produk dari daerah lain yang memiliki kualitas dan kemasan yang lebih baik.

Untuk mengatasi permasalahan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi ini, diperlukan strategi pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi melalui modernisasi sektor pertanian, diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan daya saing produk lokal. Upaya ini harus didukung oleh kebijakan yang kondusif, alokasi anggaran yang memadai, dan kerjasama yang sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

b. Meningkatnya Angka Kemiskinan;

Angka kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang menempati posisi terendah kedua setelah makassar dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Angka ini lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Meskipun demikian, capaian angka kemiskinan selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dari angka 4.79% di tahun 2019 menjadi 5.02% di tahun 2024. Trend peningkatan angka kemiskinan ini menjadi keprihatinan serius mengingat posisi Kabupaten Sidenreng Rappang yang seharusnya dapat mempertahankan atau bahkan menurunkan angka kemiskinan dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Peningkatan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja dan menurunnya

pendapatan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama.

Faktor struktural yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan adalah keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya produktif seperti lahan pertanian, modal usaha, dan teknologi. Permasalahan kemiskinan juga terkait erat dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan masyarakat berpendapatan rendah yang memiliki akses terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat miskin sulit mengakses pekerjaan yang memberikan upah layak, sementara kondisi kesehatan yang kurang optimal mengurangi produktivitas kerja dan meningkatkan beban pengeluaran keluarga untuk biaya pengobatan.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah juga menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kemiskinan, di mana sebagian wilayah pedesaan dan daerah terpencil masih mengalami keterlambatan pembangunan dibandingkan dengan pusat kota. Lemahnya sistem perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan yang belum tepat sasaran turut memperburuk kondisi kemiskinan di daerah. Program bantuan sosial yang ada belum mampu memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin karena lebih bersifat konsumtif daripada produktif. Selain itu, pendataan kemiskinan yang belum akurat dan mekanisme penyaluran bantuan yang belum efektif menyebabkan tidak semua masyarakat miskin dapat mengakses program penanggulangan kemiskinan yang disediakan pemerintah.

Untuk mengatasi permasalahan meningkatnya angka kemiskinan ini, diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan berkelanjutan melalui peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, perbaikan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta penguatan sistem perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

c. Masih Rendahnya Kualitas Pembangunan Manusia;

Kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang konsisten berapa tahun terakhir, dari 71,05 poin di tahun 2019 menjadi 74,81 di tahun 2024. Walaupun demikian, angka ini masih be vrada dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Bila melihat pembentuknya, yang terdiri dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli masyarakat, komponen pembentuk IPM yang paling rendah di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah komponen pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Rendahnya komponen pendidikan dalam pembentukan IPM mencerminkan adanya permasalahan struktural dalam sistem pendidikan daerah yang memerlukan perhatian serius. Harapan Lama Sekolah yang masih rendah menunjukkan bahwa banyak anak di Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang seharusnya mereka capai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas, serta kondisi ekonomi keluarga yang mengharuskan anak untuk bekerja membantu keluarga daripada melanjutkan sekolah. Kualitas pendidikan yang masih rendah juga tercermin dari rendahnya Rata-rata Lama Sekolah, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk dewasa di Kabupaten Sidenreng Rappang hanya menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang relatif rendah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tersedia di daerah, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan daya saing ekonomi daerah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menyebabkan terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengadopsi teknologi baru dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja modern.

Permasalahan dalam komponen kesehatan juga turut berkontribusi terhadap rendahnya IPM, meskipun tidak serendah komponen pendidikan. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas masih terbatas. Keterbatasan tenaga medis spesialis, fasilitas kesehatan yang belum memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan preventif menyebabkan angka kesakitan dan kematian masih relatif tinggi, yang pada akhirnya mempengaruhi usia harapan hidup dan kualitas hidup masyarakat.

Aspek kemampuan daya beli masyarakat yang tercermin dalam komponen standar hidup layak juga menunjukkan adanya permasalahan dalam distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi. Meskipun secara agregat perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, namun manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan pendapatan yang masih tinggi menyebabkan sebagian masyarakat memiliki daya beli yang rendah sehingga sulit mengakses kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, perumahan layak, dan layanan pendidikan serta kesehatan berkualitas.

Untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas pembangunan manusia ini, diperlukan strategi pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, perbaikan sistem layanan kesehatan, pengurangan ketimpangan ekonomi, penguatan koordinasi antar sektor pembangunan, peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan manusia, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam investasi pembangunan manusia untuk mencapai peningkatan IPM yang signifikan dan berkelanjutan.

d. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup;

Kualitas lingkungan hidup suatu daerah diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian IKLH di Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir mengalami perbaikan, dari 66,53 di tahun 2019 menjadi 67,96 poin di tahun 2024. Walaupun begitu, Angka ini juga masih berada dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Rendahnya IKLH di Kabupaten Sidenreng Rappang mencerminkan adanya berbagai permasalahan lingkungan yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan. Salah satu permasalahan utama adalah degradasi kualitas air yang disebabkan oleh pencemaran dari limbah domestik, limbah pertanian, dan aktivitas industri kecil yang belum memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai. Kondisi ini diperparah dengan masih minimnya infrastruktur sanitasi di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan, sehingga limbah rumah tangga langsung dibuang ke sungai atau saluran air tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Permasalahan kualitas udara juga menjadi tantangan lingkungan yang signifikan, terutama akibat dari pembakaran lahan pertanian, pembakaran sampah rumah tangga, dan emisi kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Praktik pembakaran lahan yang masih dilakukan oleh sebagian petani untuk membersihkan lahan pertanian tidak hanya menyebabkan polusi udara tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan iklim dan hilangnya kesuburan tanah. Selain itu, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di daerah perkotaan tanpa diimbangi dengan sistem transportasi publik yang memadai menyebabkan peningkatan emisi gas buang yang memperburuk kualitas udara.

Pengelolaan sampah yang belum optimal menjadi permasalahan lingkungan lainnya yang berdampak signifikan terhadap IKLH. Sistem pengelolaan sampah yang masih konvensional dengan metode open dumping dan minimnya fasilitas pengolahan sampah terpadu menyebabkan penumpukan sampah yang tidak terkendali. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan tetapi juga menjadi sumber penyakit dan menurunkan estetika lingkungan. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dan minimnya praktik reduce, reuse, dan recycle, turut memperparah permasalahan ini.

Kerusakan tutupan lahan dan hutan juga berkontribusi terhadap rendahnya kualitas lingkungan hidup di daerah ini. Konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian dan permukiman yang tidak terkendali menyebabkan berkurangnya tutupan hijau dan hilangnya habitat alami. Praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan, tidak hanya mencemari tanah dan air tetapi juga mengurangi keanekaragaman hayati dan merusak ekosistem alami.

Permasalahan lain yang mempengaruhi kualitas lingkungan adalah lemahnya sistem monitoring dan evaluasi lingkungan hidup. Keterbatasan peralatan dan tenaga ahli untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala menyebabkan tidak terdeteksinya pencemaran lingkungan secara dini. Selain itu, lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup menyebabkan penanganan permasalahan lingkungan menjadi tidak komprehensif dan berkelanjutan. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Kurangnya edukasi lingkungan dan program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga kualitas lingkungan untuk keberlanjutan hidup mereka. Pola konsumsi masyarakat yang belum ramah lingkungan dan kebiasaan yang merusak lingkungan masih banyak dijumpai di berbagai lapisan masyarakat.

Permasalahan tata ruang yang kurang terkendali juga berkontribusi terhadap rendahnya kualitas lingkungan hidup. Pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan di berbagai wilayah. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang dan lingkungan hidup menyebabkan praktik-praktik yang merusak lingkungan terus berlanjut tanpa ada sanksi yang tegas. Keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk program-program pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi kendala dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan. Alokasi anggaran yang terbatas untuk infrastruktur lingkungan, program konservasi, dan kegiatan monitoring lingkungan menyebabkan penanganan permasalahan lingkungan menjadi tidak optimal dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas lingkungan hidup ini, diperlukan strategi pengelolaan lingkungan yang komprehensif dan berkelanjutan melalui peningkatan infrastruktur sanitasi dan pengolahan limbah, penguatan sistem pengelolaan sampah terpadu, implementasi program konservasi dan rehabilitasi lingkungan, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, penguatan sistem monitoring dan evaluasi lingkungan, perbaikan tata kelola ruang yang berkelanjutan, serta peningkatan alokasi anggaran dan sumber daya untuk program-program lingkungan hidup.

e. Belum Kondusifnya Kondisi Keamanan, Ketertiban Umum serta Kehidupan Sosial Masyarakat:

Angka kriminalitas di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan signifikan dari 400 kasus di tahun 2021 menjadi 834 kasus di tahun 2024. Tingginya angka kriminalitas mencerminkan adanya tantangan serius dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Fenomena ini mencerminkan adanya kompleksitas permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum yang saling terkait. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, capaian angka kriminalitas beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat besar dengan kasus

yang mendominasi yaitu penipuan berbasis IT dan penyalahgunaan narkoba. Kasus penipuan semakin canggih di era digital, seringkali memanfaatkan kerentanan masyarakat dan kurangnya literasi. Permasalahan narkoba, baik dari sisi peredaran maupun penyalahgunaan, terus menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Tingginya angka kriminalitas ini tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga memiliki efek domino terhadap keamanan masyarakat, beban sistem peradilan, dan bahkan pertumbuhan ekonomi. Penanganan yang komprehensif, melibatkan aspek pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi, diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Sementara itu, prostitusi dalam kedok tempat hiburan malam (THM) dan perjudian juga meningkat, meskipun illegal, di banyak tempat mereka tetap bertahan karena adanya permintaan pasar dan seringkali terkait dengan jaringan kriminal terorganisir.

Sementara itu, rendahnya pengamalan nilai-nilai/norma lokal dan pembangunan kebudayaan menunjukkan melemahnya kohesi sosial dan identitas budaya yang dapat menjadi penyangga moral dan etika dalam masyarakat. Kedua aspek ini saling mempengaruhi, di mana melemahnya nilai-nilai lokal dan kebudayaan dapat berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas, sedangkan tingginya angka kriminalitas semakin mengikis kepercayaan dan solidaritas dalam masyarakat. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas kehidupan sosial, rasa aman, dan keharmonisan dalam masyarakat. Situasi ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengurangi daya tarik daerah bagi investasi, dan pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan dan kemajuan daerah secara keseluruhan.

f. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang tercermin oleh indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Kabupaten Sidenreng Rappang selama beberapa tahun terakhir menunjukkan angka perbaikan dari 47,12 di tahun 2020 menjadi 68,51 poin di tahun 2024. Walaupun mengalami perbaikan, capaian ini sangat jauh dari target akhir periode RPJMD sebelumnya yang menargetkan 77,11 (predikat baik) di tahun 2023. Capaian ini memberikan interpretasi bahwa Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang sangat membutuhkan perbaikan dan perhatian dari pemerintah daerah.

Rendahnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah mengindikasikan kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, kurangnya kompetensi ASN dan belum efektifnya sistem pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Aspek ini saling mempengaruhi dan membentuk suatu hambatan struktural bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance). Akibatnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat menurun, efisiensi penggunaan sumber daya publik terhambat, dan pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Sidenreng Rappang masih sangat jauh dari harapan dengan nilai 1,73 di tahun 2024 dengan predikat D (Prioritas Pembinaan). Capaian ini bahkan lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang senilai 2,47 poin dengan predikat C- (Cukup, dengan catatan). Indeks Pelayanan Publik (IPP) ini merupakan instrument penting untuk menilai kualitas pelayanan publicksehingga Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mengidentifikasi area yang harus ditingkatkan dalam pelayanan publik.

g. Minimnya ketersediaan Infrastruktur Daerah

Indeks layanan infrastruktur adalah indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketersediaan infrastruktur di daerah. Indeks layanan infrastruktur meliputi persentase jalan dalam kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, cakupan irigasi, dan persentase rumah layak huni. Capaian indeks layanan infrastruktur mengalami penurunan dari 76,02% di tahun 2022 menjadi 75.8% di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pembangunan dan distribusi infrastruktur, baik yang mendukung aktivitas ekonomi maupun yang menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Infrastruktur ekonomi, seperti jalan, jembatan, irigasi yang belum memadai di beberapa wilayah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi daya saing daerah, dan membatasi akses pasar. Sementara itu, keterbatasan infrastruktur dasar seperti fasilitas air bersih, sanitasi dan perumahan layak huni di beberapa area dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan menghambat pembangunan sumber daya manusia. Ketidakmerataan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingginya tingkat kerusakan infrastruktur akibat bencana, penataan dan pengelolaan tata ruang yang belum optimal, perencanaan yang kurang komprehensif, atau ketidakseimbangan dalam prioritas pembangunan. Akibatnya, terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah, dimana beberapa daerah berkembang pesat sementara yang lain tertinggal. Masih rendahnya pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan ekonomi inilah yang menjadi masalah pokok ketersediaan infrastruktur di daerah

Sedangkan permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah (mikro sektoral), diidentifikasi sebagai berikut:

2.4.2. Urusan Wajib

a. Pendidikan

Beberapa masalah yang teridentifikasi pada urusan pendidikan diantaranya:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan;
2. Kekurangan guru berkualitas dan distribusi guru yang tidak merata antar sekolah;

3. Tingginya angka putus sekolah;
4. Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa;
5. Lemahnya sistem informasi manajemen pendidikan daerah.

b. Kesehatan

Untuk urusan kesehatan, beberapa masalah yang dapat diidentifkasi, yaitu:

1. Masih rendahnya pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di fasilitas kesehatan;
2. Masih Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB);
3. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu;
4. Masih tingginya angka penyakit menular, khususnya AIDS, Tuberculosis, dan Malaria;
5. Masih adanya balita penderita gizi buruk;
6. Kekurangan tenaga medis spesialis dan paramedis;
7. Lemahnya sistem kesehatan preventif dan promosi kesehatan

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, adalah:

1. Masih tingginya persentase jalan Kabupaten kondisi rusak;
2. Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kabupaten tidak lagi mampu melayani perkembangan kota;
3. Belum tercapainya akses air minum 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Belum tercapainya akses Sanitasi 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Banyaknya infrastruktur jaringan irigasi yang rusak akibat banjir;
6. Kurangnya operasi dan pemeliharaan baik secara rutin maupun berkala pada sistem irigasi.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, adalah:

1. Masih ada beberapa kawasan kumuh yang belum tertangani;
2. Masih tingginya rumah dengan kondisi tidak layak huni
3. Masih belum tersedianya lahan untuk relokasi penanganan bencana.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, adalah:

1. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas;

2. Masih tingginya angka krmininalitas dan gangguan terhadap kemananan dan ketertiban masyarakat;
3. Lemahnya sistem penringatan dini bencana;
4. Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
5. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana;

f. Sosial

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan sosial, adalah:

1. Masih rendahnya cakupan pemberian bantuan sosial;
2. Kurangnya fasilitas dan layanan bagi penyandang disabilitas;
3. Belum akuratnya data terpadu penanggulangan kemiskinan dan data penerima manfaat bantuan sosial;
4. Kurangnya SDM tenaga professional.

g. Ketenagakerjaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan Ketenagakerjaan, adalah:

1. Rendahnya cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
2. Masih rendahnya kualitas pencari kerja;
3. Ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri;
4. Lemahnya sistem informasi pasar kerja;
5. Kurangnya lembaga pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi.

h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adalah:

1. Masih Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Tingginya angka perkawinan usia anak;
3. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
4. Masih lemahnya sistem perlindungan perempuan dan anak.

i. Pangan

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pembangunan pada urusan Pangan, adalah:

1. Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat;
2. Pola konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA);
3. Masih terdapat wilayah yang berpotensi rawan pangan;
4. Penanganan daerah rawan pangan belum optimal dan terintegrasi;
5. Fluktuasi harga pangan masih tinggi untuk beberapa komoditas strategis.

j. Pertanahan

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pembangunan pada urusan ini, adalah:

1. Masih banyak lahan pemerintah daerah yang belum tersertifikasi;
2. Lambatnya proses sertifikasi tanah dan birokrasi yang berbelit;
3. Masih rendahnya pemenuhan lahan untuk kepentingan umum.

k. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan lingkungan hidup, adalah:

1. Pencemaran air, udara, dan tanah yang semakin meningkat;
2. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan;
3. Lemahnya sistem pengelolaan sampah dan limbah;
4. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Kabupaten;
5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan;
6. Lemahnya sistem pengawasan lingkungan.

l. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, adalah:

1. Masih banyak penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap;
2. Masih rendahnya peningkatan SDM ASN dan Operator Pelayanan;
3. Masih belum optimalnya Sosialisasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan;
4. Masih kurangnya penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
5. Kesulitan akses layanan bagi masyarakat di daerah terpencil.

m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, adalah:

1. Keterbatasan kapasitas SDM pengelola program pemberdayaan;
2. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan;
3. Minimnya akses permodalan untuk usaha mikro dan kecil;
4. Kesenjangan pembangunan antara desa mandiri, maju dan tertinggal;
5. Lemahnya koordinasi antar lembaga pemberdayaan masyarakat.

n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, adalah:

1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk;
2. Masih rendahnya pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) / Akseptor KB;
3. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need);
4. Lemahnya program pendidikan reproduksi.

o. Perhubungan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perhubungan, adalah:

1. Belum tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
2. Minimnya penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota;
3. Belum optimalnya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
4. Belum optimalnya pelayanan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten Kota;
5. Tidak adanya PPNS LLAJ di Dinas Perhubungan;
6. Belum optimalnya Pelakasanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dari segi Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana.

p. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan komunikasi dan informatika, adalah:

1. Adanya kesenjangan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet antar wilayah;
2. Rendahnya literasi digital masyarakat;
3. Kurangnya SDM bidang TIK;
4. Lemahnya sistem informasi publik.

q. Koperasi, Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan koperasi, usaha kecil menengah, adalah:

1. Rendahnya daya saing produk UMKM;
2. Lemahnya koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan'
3. Terbatasnya akses teknologi dan inovasi bagi UMKM;
4. Rendahnya persentase koperasi aktif;
5. Keterbatasan akses UMKM terhadap permodalan dan pasar.

r. Penanaman Modal

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan penanaman modal, adalah:

1. Rendahnya realisasi investasi;
2. Kurangnya SDM perizinan yang berkualitas;
3. Kurangnya sarana dan prsarana pelayanan publik;
4. Kurangnya promosi potensi investasi daerah;
5. Keterbatasan infrastruktur pendukung investasi.

s. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kepemudaan dan olahraga, adalah:

1. Kurangnya fasilitas olahraga dan kepemudaan;
2. Rendahnya prestasi olahraga daerah;
3. Lemahnya program pengembangan bakat pemuda;
4. Masih kurangnya SDM dan tenaga ahli di bidang olahraga;

5. Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
6. Masih kurangnya pelatihan keterampilan pemuda;
7. Masih kurangnya pelatihan pelaku olahraga.

t. Statistik

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan statistik, adalah:

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data sectoral;
2. Masih kurangnya upaya mewujudkan single data dan penguatan pengelolaan data statistik sectoral;
3. Kurangnya akurasi dan ketepatan waktu penyediaan data;
4. Masih rendahnya persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik (SDGs).

u. Persandian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan statistik, adalah:

1. Lemahnya sistem keamanan informasi pemerintah;
2. Kurangnya SDM bidang persandian dan keamanan siber;
3. Keterbatasan infrastruktur keamanan informasi.

v. Kebudayaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kebudayaan, adalah:

1. Kurangnya pelestarian dan pengembangan seni budaya;
2. Terbatasnya fasilitas kebudayaan;
3. Masih Kurangnya akses masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
4. Belum Optimalnya Upaya Pelindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya Menjadi Bernilai Ekonomis;
5. Belum Tersedianya Bangunan Museum Daerah Kondisi Baik.

w. Perpustakaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perpustakaan, adalah:

1. Keterbatasan koleksi dan fasilitas perpustakaan;
2. Rendahnya Minat Baca Masyarakat;
3. Kurangnya perpustakaan di tingkat desa/kelurahan;
4. Kurangnya tenaga perpustakaan yang kompeten.

x. Kearsipan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kearsipan, adalah:

1. Masih rendahnya Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku;
2. Kurangnya SDM Pengelola Kearsipan baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kearsipan;
4. Rendahnya kesadaran pentingnya pengelolaan arsip.

2.4.3. Layanan Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

1. Masih terbatasnya penggunaan benih berkualitas dan terbatasnya akses dan tingginya harga pakan ikan;
2. Belum optimalnya upaya penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur;
3. Masih adanya kelompok nelayan yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah;
4. Menurunnya produksi perikanan kelompok nelayan;
5. Rendahnya kapasitas kelembagaan dan SDM peternak, pembudidaya dan nelayan;
6. Terbatasnya akses peternak, pembudidaya dan nelayan terhadap permodalan;
7. Rusaknya lingkungan dan ekosistem danau;
8. Belum optimalnya perlindungan sumber daya ikan.

b. Pariwisata

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pariwisata, adalah:

1. Kurangnya promosi, branding dan pemasaran destinasi wisata;
2. Infrastruktur pendukung pariwisata yang belum memadai;
3. Rendahnya kualitas SDM sektor pariwisata;
4. Rendahnya Inovasi dan Kreasi produk wisata dari pelaku usaha ekonomi kreatif yang kurang menghasilkan produk – produk baru yang dapat menjadi daya tarik wisata.

c. Pertanian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas pertanian menurun;
2. Maraknya alih fungsi lahan pertanian;
3. Produksi sektor perkebunan cenderung mengalami penurunan;
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian;
5. Masih Tingginya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
6. Keterbatasan SDM penyuluh pertanian;
7. Produktifitas usaha peternakan terutama produk ayam petelur mengalami penurunan;
8. Fluktuasi harga komoditas peternakan;
9. Belum optimalnya produksi dan produktifitas peternakan.

d. Perdagangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perdagangan, adalah:

1. Sulitnya akses pasar bagi produk UMKM local;
2. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur perdagangan seperti pasar;
3. Fluktuasi harga komoditas yang merugikan petani/nelayan;

4. Kompetensi aparatur (SDM) yang kurang memadai;

e. Perindustrian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perindustrian, adalah:

1. Rendahnya daya saing produk industri local;
2. Keterbatasan SDM terampil untuk sektor industri;
3. Lambatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM);
4. Masih kurangnya jaringan kemitraan usaha bagi penguatan IKM dan fasilitasi kemitraan investasi dan penjualan produk.

f. Transmigrasi

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perindustrian, adalah:

1. Persentase transmigran swakarsa yang stagnan;
2. Masih kurangnya optimalnya pelaksanaan pemetaan calon transmigran pada saat proses seleksi sehingga pengiriman transmigran tidak sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan dilokasi;
3. Kurangnya infrastruktur/ sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi.

2.4.4. Penunjang Urusan

a. Perencanaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perencanaan, adalah:

1. Ketersediaan data akurat yang kurang memadai;
2. Masih Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi pembangunan;
3. Kualitas para perencana di Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota masih belum memadai;
4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan antar perangkat daerah;
5. Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan;
6. Inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan implementasi.

b. Keuangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan keuangan, adalah:

1. Ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat;
2. Realisasi pendapatan daerah yang cenderung menurun;
3. Rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Masih Lemahnya pengelolaan aset daerah;
5. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;
6. Belum optimalnya penerimaan pajak dan retribusi yang didukung oleh sarana IT (belum terintegrasi dan belum online).

c. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang teridentifikasi pada kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, adalah:

1. Distribusi PNS yang tidak merata antar wilayah dan antar unit kerja;
2. Masih Rendahnya kompetensi dan kinerja sebagian ASN;
3. Masih Kurangnya sistem merit dalam pengembangan karier;
4. Rendahnya tingkat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi ASN.

d. Kelitbangan/ Inovasi

Permasalahan yang teridentifikasi pada kelitbangan adalah:

1. Pelaksanaan penelitian belum sepenuhnya dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan program pembangunan daerah;
2. Hasil kajian belum menjadi acuan dalam perumusan perencanaan/kebijakan pembangunan daerah;
3. SDM peneliti yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kajian yang dibutuhkan;
4. Rendahnya budaya inovasi dalam birokrasi pemerintahan;
5. Minimnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset.

e. Pengawasan

Permasalahan yang teridentifikasi pada pengawasan adalah:

1. Masih ada temuan yang tidak ditindak lanjuti oleh perangkat daerah;
2. Masih ada ASN yang melakukan pelanggaran;
3. Masih adanya temuan BPK;
4. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang berarti OPD belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi OPD;
5. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga masih diperlukan sosialisasi serta membuka jalur pengaduan secara terbuka dan respon yang lebih cepat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
6. Masih terdapat temuan-temuan hasil pengawasan yang sifatnya berulang;
7. Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal;
8. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik;
9. Belum meratanya kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawasan.

f. Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan yang teridentifikasi adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebhinekaan dan Pancasila;
2. Kurang optimalnya pembinaan terhadap kegiatan keagamaan dan sarana dan prasarana

tempat ibadah belum terpenuhi;

3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sehingga terkadang ada kasus kejahatan yang tidak terlapor;
4. Peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika.

2.5. Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode sebelumnya. Di sisi yang lain, mandatori pembangunan dari nasional maupun lingkungan global menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola. Kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di suatu daerah di masa mendatang ini disebut sebagai Isu Strategis. Isu strategis dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan semestinya dan jika dapat dikelola secara tepat akan menjadi potensi pembangunan yang signifikan. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif atas berbagai kondisi yang tidak ideal atau permasalahan di masa depan sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

Rumusan isu strategis dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

A. Isu Strategis Global

A 1. Perubahan Iklim

Salah satu isu strategis global yang berpotensi memengaruhi kinerja pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perubahan iklim global. Faktor utama terjadinya perubahan iklim global adalah dampak pemanasan global (*Global Warming*). Pemanasan global adalah suatu kondisi yang menyebabkan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa kenaikan air dipermukaan laut diperkirakan akan terus berlanjut selama lebih dari seribu tahun walaupun tingkat emisi gas rumah kaca telah stabil. Kondisi tersebut merupakan ancaman terhadap planet bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Potensi terjadinya bencana alam sangat besar, cepat atau lambat akan dihadapi oleh manusia di bumi. Khusus bagi Negara-negara yang memiliki banyak pulau termasuk Indonesia, ancaman terhadap tenggelamnya pulau-pulau kecil cukup besar. Menurut Laporan BRIN bahwa pada tahun 2100 sekitar 115 pulau di Indonesia diperkirakan tenggelam akibat dari kenaikan suhu air laut dan penurunan permukaan tanah.

Perubahan iklim secara ekstrem di berbagai belahan dunia berdampak negatif terhadap berbagai kehidupan manusia terutama sektor pertanian. Para petani sulit menentukan ketepatan dalam musim tanam yang baik karena adanya ketidakjelasan perbedaan antara musim kemarau dan musim hujan. Perubahan iklim tersebut berdampak luas terhadap daerah-daerah penghasil

produksi sektor pertanian. Fenomena El Nino dan La Nina menyebabkan banyak daerah-daerah di wilayah Indonesia mengalami kegagalan panen termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakah salah satu sentra produksi beras terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Penurunan produksi sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang berimplikasi terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB), selanjutnya terhadap pendapatan para petani dan ketahanan pangan. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2019 hingga tahun 2023 cenderung menurun yaitu 29,80 persen menjadi 28,81 persen. Sepanjang tahun 2024, produksi sektor pertanian terutama produksi beras di Kabupaten Sidenreng Rappang diprediksikan menurun akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan. Untuk mengantisipasi dampak negatif luas terhadap perekonomian di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perubahan iklim global merupakan isu strategis yang menjadi bagian penting, mendesak, dan mendasar di dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang. Dibalik ancaman perubahan iklim global yang mengganggu sektor pertanian terhadap Kabupaten Sidenreng Rappang, namun terdapat pula peluang dari perubahan iklim global yang perlu dipikirkan oleh masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memperkuat pembangunan di daerahnya. Misalnya memanfaatkan tanaman-tamanan pangan lainnya yang cocok dengan kondisi musim.

A 2. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dalam dua puluh tahun ke depan masih menjadi perdebatan dunia. Seiring dengan perubahan lingkungan yang begitu cepat, akan berdampak terhadap pembangunan dunia yang berimplikasi terhadap wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Perhatian dunia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan didorong melalui upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

SDGs sebagai komitmen global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan yang mencakup empat bidang pembangunan yaitu bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. SDGs yang terdiri atas 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator pembangunan, telah disepakati oleh lebih 190 negara untuk mewujudkannya hingga tahun 2030. Adapun ke-17 tujuan SDGs yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9)

Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Dari 17 tujuan tersebut terdistribusi ke empat pilar pembangunan yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan berkeadilan.

Berdasarkan laporan SDGs September 2023, bahwa di tingkat global hanya 15 persen target TPB/SDGs yang berstatus on track dan hanya 14,4 persen pada tahun 2022 target SDGs tercapai di Tingkat regional Asia and the Pacific (SDG Progress Report 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan sekitar 42 tahun ke depan pencapaian target-target SDGs. Untuk di Indonesia, tingkat pencapaian target SDGs semakin membaik. Skor SDGs di tahun 2019 sebesar 65,2 meningkat menjadi 69,16 di tahun 2022 dan 70,2 di tahun 2023. Dengan skor SDGs, Indonesia mengalami peningkatan posisi dunia terhadap pencapaian target SDGs dari peringkat 102 pada tahun 2019 menjadi peringkat 75 dunia pada tahun 2023. Sekitar 60 persen indikator telah mencapai target SDGs, yang berarti masih terdapat sekitar 40 persen yang belum mencapai target. Berdasarkan laporan SDGs 2022, Indonesia masih mendapat label 'merah' dan memiliki tantangan besar pencapaian target-target SDGs terutama terkait penanganan masalah kelaparan, kesehatan, keberlanjutan kota, pelestarian ekosistem laut dan daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan, serta kemitraan global.

Dengan mengamati tingkat capaian SDGs dunia termasuk Indonesia yang tergolong masih rendah, mengindikasikan masih perlunya perhatian dunia dalam mendorong upaya pencapaian target- target SDGs hingga tahun 2030. Sisa waktu 7 (tujuh) tahun merupakan waktu yang sangat pendek dan diiringi dengan tantangan isu strategis lainnya yang saling bersinggungan dan bertabrakan. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya strategis dan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan target-target pencapaian SDGs. Beberapa bentuk upaya yang secara signifikan memberikan hasil nyata adalah mengintegrasikannya SDGs kedalam perencanaan pembangunan daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB yang memandatkan Kementerian PPN/Bappenas untuk membentuk Tim Pelaksana Nasional, Kelompok Kerja Nasional, Tim Pakar, dan Sekretariat Nasional Pelaksanaan TPB 2020-2024. Selain itu, pemerintah melibatkan seluruh pihak, termasuk sektor swasta, filantropi, perguruan tinggi, dan pihak lain untuk secara bersama terlibat mewujudkan dunia yang lebih baik melalui capaian TPB/SDGs. Oleh karena itu, Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi bagian penting untuk mewujudkan SDGs sehingga masih ditetapkan sebagai isu strategis global agar pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat memanfaatkan peluang-peluang strategis untuk mencapai target-target SDGs baik pada skala daerahnya, nasional, maupun global.

A 3. Kemajuan Teknologi

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan pembangunan daerah 20 tahun ke depan menjadi semakin besar. Hal ini erat kaitannya dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi dengan kehidupan manusia, Perkembangan teknologi yang begitu cepat seiring dengan kehadiran Revolusi Industri 4.0, revolusi industri 5.0, dan bahkan akan hadirnya revolusi industri 7.0 yang memperlihatkan semakin berkembangnya penggunaan teknologi modern yang terintegrasi dengan dunia online di seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam revolusi industri 4.0, setidaknya terdapat lima pilar utama yang menjadi penopang dalam mengembangkan industri yang siap digital yaitu Internet of Thing (IoT), Big data, Artificial Intelligence, cloud computing, dan additive manufacturing. Dalam konteks global, perkembangan industri 4.0 dapat memberikan peluang bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk meningkatkan daya saing industri terhadap industri global. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan fisik, negara-negara berkembang dapat meningkatkan produktivitas sektor industri yang didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur. Peningkatan produktivitas sektor industri dalam Revolusi industri 4.0 sangat memungkinkan dapat dicapai karena adanya penggunaan kombinasi dari sistem fisik-cyber, Internet of Things (IoT), dan Internet of Systems. Para pelaku industri dalam sistem ini membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Untuk di Indonesia, beberapa sektor industri nasional telah siap memasuki era Industri 4.0 dan salah satunya adalah industri otomotif yang saat ini dalam proses produksinya, industri otomotif telah menggunakan sistem robotik dan infrastruktur IoT.

Perkembangan teknologi canggih tidak hanya berdampak besar terhadap sektor industri manufaktur, namun berdampak luas terhadap sektor-sektor pembangunan lainnya termasuk sektor pertanian. Peningkatan efisiensi, produktivitas, dan inovasi di sektor pertanian juga dapat dicapai dalam era revolusi industri 4.0. Misalnya penggunaan traktor, mesin pemrosesan otomatis, dan mesin panen membantu mengurangi ketergantungan tenaga kerja manusia serta mengoptimalkan waktu dan sumber daya. Penggunaan drone yang dilengkapi dengan kamera dapat membantu petani mendeteksi masalah tanaman lebih dini seperti kekurangan nutrisi atau serangan hama. Hasil rekaman Drone memberikan informasi kepada petani untuk segera mengambil tindakan dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Penggunaan internet memudahkan para petani mengakses informasi yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan juga memudahkan untuk memasarkan produk-produk ke pasar yang lebih luas, tidak terbatas pada pasar lokal namun dapat menembus pasar global.

Meskipun revolusi industri 4.0 telah memberi dampak positif terhadap sektor-sektor pembangunan, namun terdapat pula tantangan yang harus segera diatasi. Secara umum, tantangannya tercermin dari kemampuan sumberdaya manusia (SDM) beradapsi dan

mengadopsi kemajuan teknologi baik dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam pelaksanaan sektor-sektor pembangunan. Tantangan lainnya selain dari kesiapan SDM yang berkualitas dan mempunyai keterampilan dan inovasi yang tinggi, juga biaya adopsi teknologi tinggi, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, keamanan data, ketidakseimbangan akses informasi.

Perkembangan kemajuan teknologi begitu cepat mengalami perubahan, revolusi industri 4.0 belum semua diterapkan dalam industri, namun telah muncul revolusi industri 5.0 yang juga dapat memengaruhi perkembangan pembangunan dunia, nasional, daerah dalam 20 tahun mendatang. Revolusi Industri 5.0 lebih menitikberatkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti AI, IoT, dan teknologi robot teknologi dengan keahlian manusia dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem produksi yang lebih adaptif terhadap perubahan permintaan pasar, lebih berfokus pada pengalaman pelanggan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas. Secara keseluruhan, Revolusi Industri 5.0 diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi industri, pelanggan, pekerja dan masyarakat pada umumnya, seperti meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keamanan produksi, serta menciptakan peluang kerja baru dan mengurangi dampak lingkungan yang negatif.

Revolusi industri 4.0 dan 5.0 menciptakan banyak peluang besar bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di tingkat petani, para petani dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya, para pelaku UMKM dapat mengakses informasi yang lebih luas baik informasi terkait pengembangan output UMKM maupun akses pemasaran yang lebih luas, para birokrasi atau apparat pemerintah daerah, dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan tercipta peluang untuk melakukan inovasi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, kemajuan teknologi juga mempunyai ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Penggunaan teknologi yang cenderung menggeser sebagian penggunaan tenaga kerja manusia dapat menjadi ancaman terjadinya pengangguran di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penduduk yang berpotensi akan tergeser dari kemajuan teknologi harus dipikirkan solusinya dan salah satu bentuknya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia.

B. Isu Strategis Nasional

Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045, Kabupaten Sidenreng Rapang selain diperhadapkan dengan isu strategis global juga diperhadapkan oleh berbagai isu strategis nasional yang berpotensi dapat berdampak positif dan negatif terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B 1. Pemanfaatan Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu kondisi yang terjadi saat sebuah negara memiliki jumlah

penduduk usia produktif yang lebih besar daripada penduduk usia non-produktif. Saat ini Indonesia telah memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak terjadi antara tahun 2020-2030. Pada tahun 2020, penduduk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebesar 142.213.796 orang, lebih tinggi daripada penduduk usia non-porduktif (usia muda dan usia tua) sebesar 82.995.161 orang (Statistik Indonesia, 2023). Angka tersebut meningkat hingga tahun 2024 yaitu jumlah penduduk usia produktif sebanyak 196.558.195 orang (69,58%) dan penduduk usia tidak produktif sebanyak 85.919.389 orang. Banyaknya jumlah penduduk usia produktif merupakan sumber penyediaan tenaga kerja, pelaku usaha, dan sekaligus merupakan konsumen besar untuk berperan utama dalam mempercepat pembangunan. Semakin tinggi usia produktif penduduk cenderung semakin banyak volume konsumsi dan jenis barang yang dikonsumsi. Jika bonus demografi tersebut dimanfaatkan dengan baik, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sangat besar di satu sisi, Namun di sisi lain, akan menjadi ancaman terhadap aspek ketenagakerjaan yang dapat berimplikasi negatif terhadap kriminalitas jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Untuk memperoleh benefit dari bonus demografi tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi yang paling tepat.

Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan juga mempunyai struktur penduduk sama dengan Indonesia, yang ditandai oleh usia penduduk produktif lebih besar daripada usia penduduk tidak produktif. Kondisi tersebut terjadi selama tiga tahun terakhir yaitu di tahun 2020, penduduk usia produktif di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 216.911 orang sementara penduduk usia tidak produktif sebesar 133.638 jiwa. Pada tahun 2024, penduduk usia produktif sebesar 196.560 jiwa (59,54%), sementara penduduk usia tidak produktif (anak muda dan lansia) sebesar 104.254. Tingginya usia produktif di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah juga merupakan potensi untuk memperbesar nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Bonus demografi juga ditandai oleh penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian sehingga merubah struktur penduduk, dimana komposisi penduduk terkategori anak berkurang dan komposisi penduduk terkategori tua meningkat. Rasio beban ketergantungan Indonesia pada tahun 2020 sebesar 47,7 dan menurun di tahun 2024 menjadi 45,0 per 100 orang usia produktif. Rasio beban ketergantungan Provinsi Sulawesi Selatan menurun dari 45,84 di tahun 2020 menjadi 42,52 di tahun 2024. Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, angka beban ketergantungan juga mengalami penuruan dari 47,52 di tahun 2020 menjadi 47,09 di tahun 2021 dan 46,19 di tahun 2024. Meskipun beban ketergantungan mempunyai pola yang sama, akan tetapi rasio ketergantungan Kabupaten Sidenreng Rappang masih di atas dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Penurunan rasio ketergantungan disebabkan oleh keberhasilan dari penerapan program keluarga berencana yang membatasi angka kelahiran dan perbaikan derajat Kesehatan yang mengakibatkan penurunan angka kematian. Implikasi penting dari penurunan

jumlah anak adalam keluarga dapat mendukung peningkatan produktiftas anggota keluarga yang selanjutnya berdampak terhadap pendapatan keluarga.

Tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan adalah (i) kualitas sumberdaya manusia. Bonus demografi diperkirakan memegang peran penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di masa periode 2020-2030/2040, sepanjang semua penduduk usia produktif termanfaatkan atau ikut terlibat dalam proses pembangunan didukung oleh kualitas sumberdaya daya manusia yang handal, (ii) masa berakhir bonus demografi akan meningkatkan jumlah penduduk usia tua yang mengakibatkan beban anggaran perlindungan sosial semakin bertambah.

B 2. Kemiskinan Ekstrem dan Ketimpangan Pendapatan

Salah satu isu strategis nasional yang saat ini menjadi perhatian pemerintah adalah penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengurangan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan ekstrem adalah suatu kondisi Ketika seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, kesehtan, dan tempat tinggal. Ukuran kemiskinan ekstrem berdasarkan ukuran Bank Dunia yaitu US$ 1,9 (PPP). Berdasarkan data BPS (2022), angka kemiskinan ekstrem Indonesia di tahun 2022 sebesar 2,04 persen menurun dari 4,0 di tahun 2021, dan ditargetkan mencapai 0 persen di tahun 2024 lebih cepat 6 (enam) tahun dari target SDGs 2030. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya strategis salah satu diantaranya adalah mengeluarkan Instruksi Presiden No.4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Terdapat tiga strategis yang termuat di dalam Inpres tersebut untuk mencapai target 0 persen di tahun 2024 adalah (i) pengurangan beban pengeluaran, (ii) peningkatan pendapatan, dan (iii) meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.

Kabupaten Sidenreng Rappang juga menghadapi permasalahan kemiskinan ekstrem meskipun persentase penduduk miskin ekstrem lebih rendah dari kabupaten lainnya seperti Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, dan beberapa kabupaten lainnya. Berdasarkan publikasi BPS, jumlah penduduk miskin Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 sebesar 15.360 orang meningkat menjadi 15.570 orang di tahun 2023. Demikian halnya persentase penduduk miskin juga cenderung meningkat dari 5,05 persen di tahun 2020 menjadi 5,14 persen di tahun 2023. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk mengatasinya. Jika dilihat dari Indeks keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan, Angka Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktuasi lima tahun terakhir.

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dijadikan salah satu isu strategis karena dapat menjadi peluang bagi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk turut berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

adalah mensinergikan program-program pengentasan kemiskinan berbasis lokal dengan program pengentasan kemiskinan nasional yang muaranya adalah mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

Isu strategis nasional lainnya yang juga disebutkan di dalam RPJPN 2025-2045 adalah pengurangan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan secara nasional semakin lebar yang menunjukkan bahwa dalam perspektif perencanaan jangka panjang perlu mendapat priotitas dalam penanganannya. Ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio mencatat angka yang semakin meningkat selama lima tahun terakhir, yaitu 0,284 di tahun 2019 menjadi 0,345 di tahun 2023. Isu ini perlu ditangani secara serius dari pemerintah melalui program peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif, penyediaan infrastruktur dasar pada wilayah-wilayah yang tertinggal, dan pengenaan pajak progresif untuk menekan para pemilik modal memonopoli sumberdaya pembangunan. Isu strategis ini menjadi peluang bagi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menekan ketimpangan pendapatan masyarakat. Jika tidak dimanfaatkan, isu strategis nasional ini akan berpotensi semakin memperparah permasalahan ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

B 3. Prevalensi Stunting

Pada tahun 2017, prevalensi stunting Indonesia mencapai 36,54 persen dan merupakan urutan ketiga negara tertinggi di Asia. Dengan angka tersebut, Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap anak penderita stunting di negara sedang berkembang. Stunting merupakan sebuah kondisi panjang atau tinggi badan seseorang yang kurang dari normal berdasarkan usia dan juga jenis kelamin. Penyebab utama anak menderita stunting adalah terkait dengan gizi. Bagi anak penderita stunting mengalami asupan gizi yang kurang atau malnutrisi dalam jangka waktu yang lama mulai dari masa kehamilan sampai usia anak 24 bulan (dua tahun).

Dengan kondisi tersebut, maka stunting merupakan salah satu permasalahan serius di bidang Kesehatan yang harus segera ditangani karena mempunyai dampak besar terhadap generasi di masa akan datang. Anak yang menderita stunting mengalami gangguan pertumbuhan, gangguan intelektual, produktivitas kerja, dan kualitas anak terganggu, kemampuan daya tahan tubuh dan beberapa dampak buruk lainnya. Oleh karena itu, jika stunting tidak ditangani sedini mungkin maka dalam jangka panjang akan menjadi penghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Angka prevalensi stunting nasional menurut Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 21,6 persen di tahun 2022 menjadi 21,5 persen di tahun di tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan angka stunting, penurunannya sangat kecil sekali dan masih lebih tinggi dari persyaratan WHO yakni di bawah dari 20 persen. Atas dasar itu, maka stunting telah menjadi isu strategis nasional dan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia telah menargetkan angka stunting di tahun 2024 mencapai 14 persen dan di dalam Dokumen

RPJPN periode 2025-2045, target prevalensi stunting di tahun 2045 mencapai 5,0 dengan baseline 13,4 di tahun 2025. Anak penderita stunting tersebar di seluruh daerah di Indonesia sehingga dalam penanganannya dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah.

Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari permasalahan stunting. Sejak stunting menjadi prioritas pembangunan nasional, maka setiap daerah harus menjadikan penanganan stunting di daerahnya sebagai program prioritas. Kabupaten Sidenreng Rappang telah memanfaatkan peluang tersebut. Penurunan stunting pada skala nasional merupakan salah satu hasil dari kerja keras berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berhasil menurunkan Balita stunting dari 27,3 persen di tahun 2022 menjadi 26,4 persen di tahun 2023. Meskipun pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah berhasil menurunkan angka stunting, namun upaya penanganannya masih perlu lebih ditingkatkan karena penurunannya tidak tajam dan potensi munculnya anak penderita stunting masih cukup besar. Oleh karena itu, upaya pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan sampai anak umur 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. Tidak hanya sampai di situ, namun pemeliharaan kesehatan tetap berlanjut pada periode setelah lahir. Penanganan yang harus diutamakan pada pasca lahir adalah pemantauan pertumbuhan anak yang dilakukan setiap bulan secara rutin. Dengan demikian dapat diketahui sejak dini apabila anak mengalami gangguan pertumbuhan.

C. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

C 1. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Wilayah Sulawesi Selatan disebut sebagai pintu gerbang internasional Kawasan Timur Indonesia karena memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sulawesi Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional dan dikenal sebagai lumbung pangan nasional yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya swasembada pangan nasional. Selain pertanian, berbagai sektor juga memiliki peran penting untuk ekonomi nasional seperti perikanan, peternakan, dan industri kerajinan.

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan sebagai penunjang transportasi logistik di Kawasan timur Indonesia merupakan peluang bagi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menyokong kebutuhan pangan. Hingga saat ini, produk pertanian seperti beras, daging, telur di Kawasan Timur Indonesia, sebagain besar masih didistribusikan melalui Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki peluang besar untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut dikarenakan memiliki surplus produksi pertanian dan peternakan dan relatif dekat dengan pelabuhan Parepare dan Makassar sehingga dapat meminimalkan biaya logistik. Hal tersebut berpotensi menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi pusat baru pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan melalui pengembangan industri pangan.

C 2. Konektivitas Wilayah

Konektivitas yang baik merupakan syarat untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan suatu wilayah. Meningkatkan infrastruktur, terutama konektivitas, adalah kunci untuk mengatasi tantangan geografis dan menuai hasil dari lokasi strategisnya. Logistik yang baik mendorong peluang diversifikasi ekonomi dan berkontribusi terhadap perbedaan harga. Misalnya, daerah dengan akses baik ke pasar karena logistik pengiriman barang yang baik memiliki ekonomi yang terdiversifikasi tinggi dibandingkan dengan daerah akses yang buruk. Dalam pengembangan produk atau barang dengan nilai tambah tinggi dibutuhkan jadwal pengiriman yang cepat, murah, andal, dan dapat diprediksi. Di Indonesia, konektivitas masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan. Studi Bappenas (2019) menyimpulkan bahwa infrastruktur, terutama konektivitas, masih menjadi penghambat besar bagi pertumbuhan ekonomi. Rendahnya investasi di masa lalu telah menyebabkan penurunan stok modal infrastruktur. Biaya logistik yang tinggi merupakan cerminan dari masih buruknya konektivitas wilayah. Pada tahun 2022, biaya logistik Indonesia mencapai 23,5 persen dari PDB atau tertinggi didunia.

Infrastruktur yang buruk menyumbang biaya logistik yang tinggi dengan menghasilkan ketidakefisienan dan jalur distribusi yang tidak dapat diandalkan. Untuk konteks Sulawesi, Bank Dunia (2022) menunjukkan bahwa total biaya logistik yang dikeluarkan oleh produsen di Sulawesi mencapai 23,31 persen dari nilai penjualan, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 17,07 persen. Statistik ini menunjukkan bahwa konektivitas wilayah di Sulawesi termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang masih menjadi isu regional yang mempengaruhi produktivitas dan efisiensi ekonomi. Kualitas infrastruktur transportasi jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang juga masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh masih terdapat 41 persen jalan dengan kondisi sedang atau buruk, sehingga menimbulkan inefisiensi dalam distribusi.

C 3. Hilirisasi Komoditas Unggulan

Dalam dokumen akhir RPJPN 2025-2045 juga disebutkan komoditas dan sektor potensial wilayah Sulawesi di masa mendatang adalah komoditas pertanian, perkebunan (kakao, kelapa sawit, cengkeh, pala, rempah), perikanan tangkap (tuna, cakalang, kerapu, selar dan teri), industri logam nikel, tembaga, dan emas-perak. Potensi nikel dan tembaga di wilayah Sulawesi dapat mendukung pengembangan dan implementasi Energi Baru Terbarukan, serta potensi ekspor yang menjanjikan. Kunci utama dalam peningkatan nilai tambah dan pendorong daya saing komoditas tersebut yakni hilirisasi.

Hilirisasi komoditas unggulan menjadi peluang bagi pengembangan industri berbasis sumber daya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Daya saing dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan di Kabupaten Sidenreng Rappang perlu dikembangkan secara terintergrasi mulai dari hulu hingga hilir. Artinya, petani ataupun peternak misalnya akan terhubung dengan *offtaker*, pembiayaan, dan dengan teknologi mutakhir. Selain itu, pengembangan industri tersebut

didukung dengan riset dan teknologi untuk menghasilkan produk-produk yang saling berkaitan, menekankan industri yang adaptif dengan permintaan pasar serta sejalan dengan tren ekonomi hijau serta industri berkelanjutan. Hadirnya industri berbasis sumber daya dapat menjadi penyedia lapangan kerja, pemenuhan konsumsi, optimisasi sumber daya alam serta pendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, beberapa tantangan yang perlu diantisipasi di antaranya akses permodalan, sarana produksi, perizinan, dan teknologi. Selain itu, kesiapan infrastruktur dan sistem rantai pasok mutlak diperlukan untuk mendorong hilirisasi.

C 4. Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Swasembada pangan, air, dan energi menjadi asta cita ke dua presiden dan wakil presiden menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menargetkan swasembada pangan pada tahun 2028 serta mendorong penerapan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Selain dua hal itu, Pemerintah juga mengharapkan Indeks Ketahanan Air Indonesia dapat mencapai 200 m^3/kapita/tahun dengan sebaran yang merata di seluruh Indonesia.

Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian memberikan target luas tanam kepada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1.554.786 hektar dengan target hasil produksi sebesar 6.339.302 ton gabah. Besaran tersebut diharapkan dapat menyumbang 11,23 persen dari target nasional. Di tahun 2023, produksi padi di Sulawesi Selatan mencapai 4.943.096 ton padi, 25 persen dari hasil produksi ini mensuplai beras nasional yang membuat wilayah ini menjadi satu dari 10 provinsi di Indonesia yang menjadi lumbung padi nasional. Kabupaten Sidenreng Rappang juga dikenal sebagai penyangga pangan nasional dengan produksi beras di tahun 2023 sebesar 298.306,57 ton sedangkan kebutuhan konsumsi sebesar 36.663,74 ton sehingga surplus sebesar 261.642,83 ton. Capaian ini masih bisa ditingkatkan dengan intensifikasi lahan, diversifikasi pangan, pengendalian hama, pengembangan kelembagaan petani, dan modernisasi irigasi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri menargetkan menjadi provinsi pertama swasembada air untuk mendukung swasembada pangan. Pembangunan bendungan serta Pengelolaan dan penyaluran irigasi sampai ke petani perlu dioptimalkan untuk mendukung program tersebut.

Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi wilayah yang diharapkan dapat swasembada energi mengingat potensi energi terbarukan mencapai sekitar 19,3 GW. Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri dikenal karena memiliki PLTB pertama dan terbesar di Asia Tenggara dengan 30 turbin dengan total kapasitas 75 MW dan masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Swasembada pangan, air, dan energi menjadi salah satu isu strategis dan perlu menjadi prioritas pemerintah karena menjadi salah satu penopang pembangunan.

D. Isu Strategis Daerah

Berangkat dari berbagai permasalahan daerah, isu strategis global, isu strategis nasional dan isu strategis regional, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten

Sidenreng Rappang dengan berbagai pertimbangan yaitu: (1) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan regional, (2) merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah, (3) dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat, (4) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah, (5) kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani, dan (6) kesesuaian terhadap visi dan misi ranperda RPJPD. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

D 1. Revitalisasi Sektor Pertanian

Pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB selama kurun waktu 2019 – 2023 menunjukkan kecenderungan melambat, namun pertanian masih memberikan kontribusi terbesar dalam struktur PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengandalkan pertanian sebagai sektor andalan menyebabkan ketergantungan besar terhadap sektor ini. Artinya, jika pertumbuhan ekonomi sektor pertanian melaju, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami hal serupa, tapi sebaliknya, jika nilai tambah pertanian bertumbuh lambat, dampaknya pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Revitalisasi sektor pertanian akan mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. Sektor ini dapat menghasilkan surplus produksi yang lebih besar, meningkatkan pendapatan petani, dan menciptakan efek multiplier dalam perekonomian lokal. Modernisasi teknologi pertanian dan perbaikan infrastruktur tidak hanya dapat meningkatkan hasil panen, tetapi juga membuka peluang kerja baru di sektor pendukung seperti manufaktur alat pertanian dan jasa penyuluhan. Pengembangan agroindustri dan rantai nilai yang lebih kuat dapat menciptakan nilai tambah yang substansial, mendorong ekspor, dan menarik investasi ke daerah tersebut. Diversifikasi produk pertanian dan pengembangan produk bernilai tinggi dapat membuka pasar baru dan meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan pendapatan petani akan meningkatkan daya beli, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan sektor lain seperti ritel dan jasa. Selain itu, penguatan sektor pertanian dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan, memperbaiki neraca perdagangan daerah, dan meningkatkan ketahanan ekonomi. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, revitalisasi pertanian tidak hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi katalis untuk transformasi struktural ekonomi daerah, menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan jangka panjang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

D 2. Infrastruktur Daerah

Infrastruktur daerah merupakan aspek krusial dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi regional. Infrastruktur yang memadai dan terintegrasi menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, dan pemerataan pembangunan. Fokus utama meliputi pengembangan jaringan transportasi, termasuk jalan, jembatan, irigasi dan sistem transportasi

massal, yang berperan vital dalam memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk. Penyediaan infrastruktur energi, seperti jaringan listrik dan distribusi energi alternatif, menjadi kunci dalam mendukung aktivitas industri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi penting untuk mengurangi kesenjangan digital dan mendorong inovasi. Infrastruktur sumber daya air, meliputi sistem irigasi, pengelolaan banjir, dan penyediaan air bersih, menjadi prioritas untuk mendukung ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Tantangan utama dalam pengembangan infrastruktur daerah mencakup keterbatasan anggaran, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta kebutuhan untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pelestarian lingkungan. Pendekatan yang inovatif dalam pembiayaan, seperti kemitraan pemerintah-swasta dan skema pembiayaan alternatif, diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Perencanaan yang matang dan koordinasi antar sektor menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan infrastruktur wilayah. Keberhasilan dalam mengatasi isu ini akan berdampak langsung pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

D 3. Perwujudan *Good Governance*

Perwujudan good governance di pemerintah daerah merupakan isu strategis yang mencakup berbagai aspek pengelolaan pemerintahan untuk menciptakan tata kelola yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini meliputi upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui implementasi sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan akses informasi publik. Perbaikan pelayanan publik menjadi fokus utama dengan penyederhanaan prosedur birokrasi dan penerapan sistem pelayanan terpadu. Partisipasi masyarakat diperkuat melalui keterlibatan dalam perencanaan pembangunan dan pengawasan kebijakan. Pemberantasan korupsi diintensifkan dengan penguatan sistem pengawasan dan implementasi whistle-blowing system. Pengembangan e-government mendorong digitalisasi layanan dan peningkatan efisiensi administrasi. Peningkatan kapasitas SDM aparatur, penguatan koordinasi antar lembaga, dan reformasi regulasi juga menjadi komponen penting. Manajemen keuangan daerah dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya. Meskipun menghadapi tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya, keberhasilan implementasi good governance dapat meningkatkan kepercayaan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perwujudan good governance memerlukan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan dan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi dan penyesuaian terus-menerus sesuai dengan dinamika dan kebutuhan daerah.

D 4. Penurunan Angka Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan di daerah merupakan tantangan multidimensi yang

memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada kualitas hidup individu tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial daerah secara keseluruhan. Upaya pengentasan kemiskinan melibatkan berbagai aspek, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan peluang ekonomi yang lebih luas. Program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan kewirausahaan, menjadi kunci dalam meningkatkan ekonomi kelompok rentan. Perbaikan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, berperan penting dalam membuka akses terhadap pasar dan layanan dasar. Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti UMKM dan pertanian, menjadi fokus untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Perlindungan sosial melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran dan jaring pengaman sosial diperlukan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap guncangan ekonomi. Tantangan utama meliputi keterbatasan anggaran, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta kebutuhan untuk mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan dengan strategi pembangunan daerah secara keseluruhan. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program menjadi penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan upaya pengentasan kemiskinan. Keberhasilan dalam mengatasi isu ini akan berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

D 5. Maraknya Penyakit Sosial Masyarakat

Penyakit masyarakat merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian serius dan penanganan komprehensif. Fenomena ini tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berdampak negatif pada stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup penduduk, kesehatan masyarakat dan stabilitas keluarga. Berbagai faktor berkontribusi terhadap peningkatan penyakit sosial ini, termasuk kesenjangan ekonomi, pengangguran, urbanisasi yang tidak terencana, dan lemahnya penegakan hukum. Di Kabupaten Sidenreng Rappang kasus penipuan berbasis IT, penyalahgunaan narkoba, seks bebas dan sabung ayam menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah yang mengancam keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial masyarakat. Penipuan berbasis IT, seperti scam online, *phishing*, dan pencurian identitas digital, semakin canggih dan meluas seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan internet. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem digital dan *e-commerce*. Sementara itu, penyalahgunaan narkoba terus menjadi masalah persisten yang merusak kesehatan individu, menghancurkan keluarga, dan berkontribusi pada peningkatan kejahatan lainnya. Kedua jenis kejahatan ini sering kali saling terkait, dengan jaringan narkoba memanfaatkan teknologi untuk memperluas operasi mereka. Seks bebas, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda,

berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, dan masalah sosial lainnya. Sementara itu, praktik sabung ayam meskipun mungkin dianggap sebagai tradisi di beberapa daerah, seringkali terkait dengan perjudian ilegal, kekerasan, dan eksploitasi hewan. Kedua isu ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pendidikan moral, kurangnya pengawasan sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Tantangan utama dalam mengatasi masalah ini meliputi resistensi budaya, keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan kompleksitas jaringan yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan penegakan hukum, edukasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan etika sosial, serta program pemberdayaan ekonomi untuk memberikan alternatif kegiatan yang positif. Kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pemuka agama, dan organisasi masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi akar permasalahan ini. Upaya pencegahan melalui peningkatan pengawasan komunitas dan penguatan peran keluarga juga perlu diprioritaskan. Keberhasilan dalam menangani isu ini akan berkontribusi pada perbaikan moral masyarakat, peningkatan kesehatan publik, dan terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman dan harmonis bagi seluruh lapisan masyarakat.

D 6. Mitigasi Perubahan Iklim

Mitigasi perubahan iklim merupakan salah satu isu strategis yang sangat mendesak untuk ditangani. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi lokal. Perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca telah mengakibatkan berbagai dampak negatif seperti kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Upaya mitigasi bertujuan untuk mengurangi atau mencegah emisi gas rumah kaca, terutama melalui transisi ke energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, penghentian deforestasi, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengintegrasikan upaya mitigasi perubahan iklim dengan manajemen risiko bencana di tingkat daerah. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Oleh karena itu, perlu memperluas fokusnya dari penanganan bencana reaktif menjadi pendekatan proaktif yang mencakup mitigasi perubahan iklim. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan instansi terkait untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih canggih, memperkuat infrastruktur tahan iklim, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim serta berperan dalam penyusunan rencana kontingensi yang mempertimbangkan skenario perubahan iklim jangka panjang. Selain itu, pemerintah daerah dapat mendorong integrasi aspek mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah. Ini termasuk advokasi untuk pembangunan infrastruktur hijau, konservasi daerah resapan air, dan perlindungan ekosistem pesisir yang berperan dalam mengurangi risiko bencana sekaligus menyerap karbon.

Tantangan utama dalam implementasi strategi mitigasi di daerah termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas teknis, dan potensi konflik dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga penelitian menjadi kunci dalam merancang dan melaksanakan program mitigasi bencana yang efektif dan berkelanjutan.

D 7. Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan isu strategis yang krusial dalam konteks pembangunan lokal. Konsep ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab, memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Isu ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan hutan, air, mineral, dan keanekaragaman hayati. Tantangan utamanya adalah menyeimbangkan kebutuhan ekonomi jangka pendek dengan kelestarian lingkungan jangka panjang. Dalam konteks ini, beberapa isu kunci yang perlu diperhatikan adalah pencegahan eksploitasi berlebihan, penerapan praktik pengelolaan yang ramah lingkungan, perlindungan ekosistem kritis, dan distribusi manfaat yang adil dari pemanfaatan sumber daya alam. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi diperlukan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan komunitas ilmiah. Inovasi teknologi dan pengetahuan tradisional sama-sama memiliki peran penting dalam mengembangkan solusi berkelanjutan. Implementasi kebijakan dan regulasi yang efektif, peningkatan kesadaran publik, serta penguatan kapasitas institusi lokal menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan perbaikan terus-menerus dalam praktik pengelolaan.

Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak terkendali, seperti penebangan hutan secara ilegal, penambangan yang tidak bertanggung jawab, atau penangkapan ikan berlebih, secara langsung berkontribusi pada kerusakan ekosistem. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah, pencemaran air dan udara, serta perubahan iklim mikro dan makro. Kerusakan ini pada gilirannya mengurangi kapasitas alam untuk memulihkan diri dan terus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan manusia. Di sisi lain, praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi dan mencegah kerusakan lingkungan. Misalnya, penerapan sistem agroforestri dapat membantu mengurangi erosi tanah dan meningkatkan kesuburan lahan. Pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu dapat menjaga kualitas dan kuantitas air sekaligus mengurangi risiko banjir dan kekeringan. Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dapat membantu memulihkan populasi ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi semakin penting. Pendekatan ini

mempertimbangkan keterkaitan antara berbagai komponen ekosistem dan berupaya menjaga integritasnya secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya membantu mencegah kerusakan lingkungan, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap tekanan eksternal seperti perubahan iklim.

Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan harus berjalan seiring dengan penerapan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini memerlukan perubahan paradigma dalam pembangunan, yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama, bukan sekadar pertimbangan sampingan dalam pengejaran pertumbuhan ekonomi.

D 8. Prevalensi Stunting

Stunting, yang ditandai dengan pertumbuhan tinggi badan yang terhambat pada anak-anak, adalah indikator kunci malnutrisi kronis dan memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan kognitif. Angka prevalensi stunting masih tinggi, mencerminkan adanya kesenjangan dalam akses terhadap nutrisi yang memadai, layanan kesehatan, sanitasi, dan pendidikan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi stunting di daerah meliputi kemiskinan, ketahanan pangan yang rendah, praktik pengasuhan yang kurang optimal, sanitasi yang buruk, dan akses terbatas ke layanan kesehatan berkualitas. Kondisi geografis yang sulit di beberapa daerah juga dapat mempersulit distribusi pangan bergizi dan penyediaan layanan kesehatan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan praktik pemberian makan yang tepat untuk anak-anak turut memperparah situasi. Mengatasi stunting di tingkat daerah membutuhkan pendekatan multisektoral yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat. Strategi yang efektif harus mencakup peningkatan akses ke makanan bergizi, perbaikan sanitasi dan higiene, penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi masyarakat tentang praktik pengasuhan dan pemberian makan yang optimal. Program-program seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, serta intervensi 1000 Hari Pertama Kehidupan, perlu diprioritaskan dan disesuaikan dengan konteks lokal.

2.6. Inovasi Daerah

Inovasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentngan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya dan juga tidak untuk kepentingan sendiri.

Berikut ini sejumlah bentuk inovasi daerah yang telah diinisiasi, diterapkan dan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.78
Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 – 2025

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
1	WANITA HEBATKU (Kawasan Agrobisnis Taman Herbal Obat Keluarga)	Inovasi Wanita Hebatku bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menurunkan jumlah penyakit dan angka kesakitan dengan membiasakan masyarakat untuk mengkonsumsi sayur mayur yang murah namun bergizi tinggi dna tanaman obat herbal yang mudah diakses.yang kedua mandiri secara ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menjual mentah hasil produksi tanaman obat keluarga dan mengolahnya mejadi produk makanan dan minuman, seperti abon cabe, abon jantung pisang, abon pepaya, stik labu kuning, teh dan kopi stamina yang dikemas dengan baik sehingga menarik minat konsumen.yang ketiga adalah ramah lingkungan dengan memanfaatkan lahan pekarangan tanpa harus menyewa atau membeli lahan sebagai taman obat keluarga, menambah jenis tanaman TOGA sehingga tercipta lingkungan yang indah, tertata rapi, bebas dari pencemaran udara sehingga layak untuk dikunjungi dan menjadi tempat berwisata bagi para pecinta tanaman dan obat herbal. yang keempat sosial budaya serta terbentuknya kader dan kelompok TOGA sebagai penggerak pelaksana inovasi dan menjadi wadah bersilahturahmi antar kelompok dan masyarakat sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis. Sasaran inovasi ini adalah masyarakat di wilayah Puskesmas Lancirang	Puskesmas Lancirang	7 Agustus 2017
2	JURUS SANG PENDEKAR (Jaga Ibu Hamil Bersama Bidan Desa, Suami dan Ibu Mertua dalam Penanganan Anemia/ Kurang Zat Besi)	JURUS SANG PENDEKAR merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko anemia ibu hamil di Desa Mojong Inovasi JURUS SANG PENDEKAR dirintis untuk memecahkan masalah tersebut dengan sasaran semua ibu hamil. Dan semua layanan yang diberikan bersifat gratis. Caranya dengan merekrut kader posyandu menjadi kader Fe yang bertugas	Pukesmas Empagae	3 Oktober 2017

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		melakukan deteksi dini kehamilan bersama keluarga. Mereka dipilih karena setiap hari memiliki mobilitas tinggi dan jejaring informasi yang kuat di masyarakat. Bagi ibu hamil anemia akan didampingi mulai saat hamil sampai 42 hari masa nifas. Keberhasilan inisiatif ini berbanding lurus dengan komitmen Bidan Desa dan keberanian untuk melakukan reformasi pelayanan dengan menggabungkan 5 JURUS SANG PENDEKAR, memberikan pendampingan ibu hamil anemia melalui para kader Fe dan keluarga terdekat serta membangun sinergitas dengan melibatkan banyak unsur di masyarakat tenyata hasilnya sangat menggembirakan.Bahkan, sampai mampu menekan angka anemia,komplikasi persalinan dan bayi menjadi ZERO. Sasaran dari inovasi ini yaitu Masyarakat Desa Mojong dan masyarakat di wilayah Puskesmas Empagae		
3	PIA BUJANG ASIK (PIAGAM IBU PEJUANG ASI EKSKLUSIF)	Pemberian piagam untuk ibu yang telah memberikan asi ekslusif dan balita yang tamat posyandu	Puskesmas Baranti	2 Januari 2018
4	MBAH SIJAKA (LIMBAH SISA JADI BERKAH)	Inovasi ini diinisiasi oleh Instalazi Gizi RS Arifin Nu'mang yang bertujuan untuk mengurangi limbah sisa makanan di unit dapur. Sisa nasi serta bahan makanan adalah salah satu limbah yang hampir setiap hari diproduksi dan dibuang begitu saja di tempat sampah tanpa ada pengolahan lanjutan, hingga lambat laun memberikan efek bau yang kurang sedap pada lingkungan dan pemandangan yang tidak menyenangkan serta menjadi media serangga dan dapat memunculkan penyakit. Inovasi ini pula dapat dimanfaatkan pada sektor pertanian karena pupuk organik Mbah Sijaka tidak mengandung bahan – bahan kimia yang berbahaya bagi tanaman lainnya sehingga dapat digunakan bagi petani, mengingat daerah Kabupaten Sidrap merupakan daerah agraris. Manfaat inovasi ini Mengurangi sampah organik ataupun sisa nasi yang ada di Instalasi Gizi Rumah Sakit Arifin Nu'mang Rappang ddan Meningkatkan kesadaran petugas	RSUD Arifin Nu'Mang	1 Agustus 2019

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		untuk pengolahan lebih lanjut dari sisa makanan dibuang begitu saja yang dapat menimbulkan penyakit. Sasaran inovasi ini Petani, Pasien dan Petugas Kesehatan RSUD Nene Mallomo		
5	Pemanfaatan Sumber Daya Lokal untuk Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan Petani	Inovasi Mikroba Local Padat Inovasi Pupuk Organik Padat Inovasi pupuk organik cair daun InovasibPestisida Nabati Pertanian Padi Ramah Lingkungan	BLUD UPT Puskesmas Belawae	8 Januari 2020
6	WIROSABLENG (Wadah Edukasi Remaja Putri untuk Stop Hamil Usia Belia melalui Penyuluhan KESPRO Cegah Stunting)	Inovasi Wirosableng merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk menurunkan angka kehamilan pada remaja dan prevalensi stunting di Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, melalui 4 langkah inovatif melalui kolaborasi dengan semua stakeholder dalam kegiatan "FRESH" (forum remaja sehat/ posyandu remaja) dan "TERAS REMAJA "(Pojok Literasi khusus remaja) melalui platform WA, memonitoring sasaran remaja putri dengan menggunakan "BENDERA SANTRI", Pemberian konseling dan penghargaan sebagai reward keberhasilan dalam menunda kehamilan dan pembetukan SATGAS 1000 HPK (hari pertama kehidupan). Mnfaat dari inovasi ini yaitu menurunnya angka kehamilan remaja, menurunkan anemia dan Berat bayi lahir rendah. Sasaran inovasi ini yaitu Desa Mojong Kec. Watang Sidenreng	Puskesmas Empagae	1 Februari 2020
7	GAYA SEHATKI (Gerakan Keluarga Sayang Seribu Hari Pertama Kehidupan)	Inovasi ini wadah Pemberdayaan Masyarakat dalam mencegah dan menurunkan angka kejadian stunting di desa Sumpang Mango. Inovasi ini didasari oleh data Stunting Desa Sumpang Mango paling tinggi di Kecamatan Pituriawa tahun 2020, di mulai sejak bulan Oktober 2020. Sebagai upaya dalam melakukan Intervensi gizi spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif dengan melibatkan elemen masyarakat di fasilitasi oleh LintasPROGRAM Pelayanan Puskesmas dan Lintas Sektor	Puskesmas lancirang	20 Oktober 2020

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		Tingkat Desa. Manfaat dari inovasi ini adalah menurunnya angka stunting di desa sumpang mango kec.pitu riawa Sasaran inovasi ini adalah Pasangan Usia Subur (PUS), kehamilan, Persalinan, Neonatus, Bayi sampai berumur 24 Bulan di Desa Sumpan Mango		
8	*English corner* SIPEMBERANI	*English corner* si pemberani merupakan salah satu program bagian dari *English corner* goes to school yang dirintis oleh *English corner*. *English corner* merupakan organisasi bahasa Inggris terbesar yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berpusat di SMP Negeri 1 duapitue program *English corner* si pemberani ini telah berjalan sejak 2021 sampai saat ini dan telah menjangkau ribuan siswa dan ratusan sekolah. Program ini pada dasarnya memberikan pengajaran bahasa Inggris secara gratis kepada siswa SD yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.	UPT SMPN 1 DUAPITUE	3 Februari 2021
9	ANJANG SANA ANJANG SINI	Masalah kesehatan masyarakat Indonesia yang dihadapi saat ini adalah meningkatnya kasus Penyakit tidak menular (PTM). Untuk menyelesaikan permasalahan ini dan sesuai Amanah Permenkes No.71 tahun 2015 tentang penanggulangan PTM, maka kami menginisiasi membuat Inovasi "Anjang Sana Anjang Sini" yang telah diujicobakan pada Tahun 2021 dan diterapkan secara intens di tahun 2022 Tujuan inovasi adalah Meningkatkatkan pelayanan skrining kesehatan dalam rangka deteksi dini dan penemuan kasus penyakit tidak menular (PTM) di wilayah kerja Puskesmas Pangkajene.	UPT Puskesmas Pangkajene	2 April 2021
10	PESAN TOBAT DARI SURGA PESAN TOBAT DARI SURGA (Peduli Sanitasi Total Berbasis Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa)	inovasi ini hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab permasalahan yang dialami oleh para penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa. Inovasi ini mampu memberdayakan penyandang disabilitas dan meningkatkan kepedulian masyarakat, memandirikan penyandang disabilitas, khususnya Dalam mengimplenasikan Lima Pilar	Puskesmas Lancirang	1 Juli 2021

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		STBM di kalangan Rumah Tangga dan khusus untuk ODGJ bisa tertangani dan tidak terlantar Serta Mengakses Sanitasi Dasar serta Mengiplemntasikan Lima Pilar STBM. Manfaat dari Inovasi ini adalah Manfaat lahirnya Inovasi ini yaitu mendukung program pemerintah "Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)" Dan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyrakat), sebagai upaya memulihkan keberfungsian orang yang mengalami hambatan fisik, mental, psikologis, maupun sosial, dengan bertumpu pada peran keluarga dan kelompok masyarakat, serta mendayagunakan berbagai potensi sumber daya masyarakat untuk membentuk kemandirian penyandang disabilitas Dan Orang Dengn Gangguan Jiwa Sehingga Dapat Meberikan Kontribusi yang Besar Untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat bersih dan nyaman. Sasaran dari Inovasi Ini adalah masyarakat di Desa Lasiwala Kec. Pitu riawa		
11	LAUT BANDA (Layanan Utama Bank Data)	Inovasi LAUT BANDA (Layanan Utama Bank Data) merupakan kegiatan pengelolaan data dengan tujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapatdipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan daerah yang memenuhi prinsip satu data. Dimana data yang dikumpulkan merupakan indikator Permendagri 86 tahun 2017 tentang perencanaan pembangunan daerah, indikator permendagri 18 tahun 2019 tentang LPPD, indikator Perpres 59 Tahun 2017 tentang SDGs, indikator Permendagri 100 tahun 2018 tentang SPM. Manfaat dan output dari inovasi ini adalah meningkatnya ketersediaan data, terwujudnya akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasiPROGRAM pembangunan dan juga terwujudnya single data (satu data) serta penguatan pengelolaan data statistik sektoral Organisasi	Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6 September 2021

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		Perangkat Daerah (OPD). Sasaran Inovasi Inovasi ini adalah Organisasi Perangkat daerah dan Masyarakat Umum		
12	LEMOTA BERSOLEK	Inovasi ini adalah sebuah edukasi di bidang pertanian tentang bagaimana kita mampu mengelola potensi sumber daya yang ada di suatu desa agar bermanfaat secara utuh. Melihat potensi wilayah di desa betao adalah jeruk nipis dengan luasan lebih dari 300 Ha, maka dipilhlah judul Lemota yang artinya ''jeruk kita'' sedangkan bersolek adalah kepanjangan dari ''Bersih olah ekonomi kemilau''. Inovasi ini berusaha meningkatkan nilai ekonomi dengan cara melakukan pengolahan terlebih dahulu agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi dengan memanfaatkan Sumber daya manusia khususnya wanita tani disekitar berupa jeruk nipis bubuk instan, sirup, sabun cuci tangan dan limbah menjadi pupuk organik cair. Sasaranya adalah Wanita tani di Wilayah Kerja BPP Pitu riawa	UPT BPP Pitu riawa Dinas Tanaman Pangan, hortikutura, perkebunan dan ketahanan pangan Kab. Sidrap	7 September 2021
13	KLIK IDE (Klinik Inovasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Inovasi ini merupakan sebuah KLINIK yang memfasilitasi, menganalisis hingga melahirkan INOVASI yang mampu terintegrasi terhadap perencanaan pembangunan daerah yang disiapkan oleh perangkat daerah dari RPJMD, RKPD, RENSTRA hingga RENJA dan terejawantah menjadiPROGRAM, KEGIATAN dan . Manfaat dari inovasi ini yaitu Menyelesaikan masalah, pokok masalah dan akar masalah pembangunan di kabupaten Sidenreng Rappang, Menyusun/ MerancangPROGRAM, Kegiatan dan serta Mencapai target realisasi capaianPROGRAM visi misi RPJMD, capaian dataPROGRAM dan data makro, capaian indikator target perencanaan pembanguanan daerah. Manfaat yang diperoleh yaitu masuk Prolegda Perda Inovasi Daerah tahun 2022, dilakukan revisi terhadap Perbup TPP agar ASN yang memiliki Inovasi mendapatkan REWARD/ Penghargaan sebagai prestasi kerja setelah menjalankan inovasinya selama	Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	13 Desember 2021

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		1 tahun, serta Beberapa calon innovator telah aktif ke KLIK IDE melakukaan koordinasi, konsultasi dalam Menyusun dan melaksanakan Inovasi Daerah sesuai urusannya. Sasaran Inovasi Ini adalah Inovator dari Kepala Daerah, DPRD,Perangkat Daerah, ASN, dan Masyarakat Umum		
14	CEGAT DENGAN PEKA (CEGAH DAN DETEKSI DINI AMPUTASI DIABETES DENGAN PERAWATAN KAKI)	inovasi " CEGAT DENGAN PEKA", yang merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan perawatan yang berguna untuk mencegah dan mendeteksi dini luka diabetik pada penderita diabetes. Kegiatan pemeriksaan dan perawatan yang dimaksud adalah dengan cara 3 M, yaitu : M1: Memeriksa kaki secara rutin untuk menemukan masalah secara dini, M2: Memberikan edukasi tentang cara menjaga kaki, M3: Memberikan perawatan untuk masalah kaki yang serius. Manfaat dari Inovasi ini adalah menurunkan jumlah pasien diabetes yang menderita luka pada kaki. danjuga pasien diabetes semakin semangat dalam memeriksakan kesehatannya dan rutin dalam melakukan perawatan kaki. Sasarannya adalah Pasien RSUD Nene Mallomo	RSUD Nene Mallomo	5 Februari 2022
15	MIPC (Mapping of Integrated Pest Controller)	Inovasi Media Penyuluhan berupa Penyediaan informasi terkait konsep pengendalian hama terpadu yang disertai dengan penggunaan istilah masyarakat lokal yang ada di lapangan. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) ini adalah suatu konsep pengendalian OPT atau hama dan penyakit dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan memanfaatkan beragam taktik pengendalian yang kompatibel dalam suatu kesatuan koordinasi pengelolaan.manfaat dari Inovasi ini mengurangi intensitas serangan hama dan penyakit. Hama dan penyakit utama yang menyerang untuk setiap musim tanam adalah tikus, penggerek batang putih yang menyebabkan sundep dan beluk, hawar daun bakteri (kresek), dan wereng batang coklat (WBC).kemudian yang kedua meningkatkan kapasitas petani	UPT BPP Pancarijang DInas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	18 Mei 2022

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		dalam Penggunaan pestisida yang tidak bijaksana yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, pengguna, dan konsumen. dengan menerapkan konsep PHT (Pengendalian Hama Terpadu). Sasarannya adalah Petani di wilayah BPP Pancarijang		
16	RUMAH LANGIT (Ruang Masyarakat Khusus Layanan Pendidikan Non Formal Gratis Terintegrasi)	Inovasi ini bertujuan memberi layanan pendidikan Non formal kepada masyarakat didaerah-daerah tertentu melalui ruang yang dibentuk untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dibidang pendidikan dan menjadikan rumah sebagai wadah atau sarana pendidikan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi-informasi terkait pendidikan dibidang pendidikan melalui kerjasama pihak Satuan Pendidikan Non Formal "UPT SPNF SKB SIDRAP" dengan pihak-pihak terkait. Manfaat yang dapat diperoleh dari inovasi ini yaitu masyarakat sadar pentingnya pendidikan , Mengurangi angka putus sekolah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakanPROGRAM pendidikan kesetaraan, Muncul bibit-bibit baru yang unggul dan sadar akan Pendidikan dan individu-individu yang aktif, kreatif, inovatif dan berdaya dengan adanyaPROGRAM pendidikan, pemberdayaan dan kepemudaan, masyarakat dapat mendeteksi lebih awal potensi-potensi masalah yang akan muncul diwilayahnya dan lebih peka terhadap masalah-masalah sosial dan budaya yang ada di sekitarnya, Munculnya komunitas komunitas baru yang bergerak kearah yang positif, terciptanya tenaga pendidik lebih sadar dan memahami makna pekerjaan dalam memberi pelayanan dibidangnya. Sasarannya adalah Masyarakat Umum Putus Sekolah atau belum sekolah.	UPT SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20 Mei 2022

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
17	SIAP TILANG! (Scan Barcode, Isi APlikasi, Tindak Lanjuti dan Tangani Langsung)	Inovasi ini berupa aplikasi layanan pengaduan pasien rumah sakit Nene Mallomo menggunakan konsep scan barcode. aplikasi ini bisa dilakukan oleh semua lini pemberi pelayanan, untuk memudahkan masyarakat memberikan informasi yang bersifat aduan baik dari segi SDM maupun dari segi sarana dan prasarananya, agar pemangku kebijakan dalam hal ini pimpinan instansi terkait dapat dijadikan bahan evaluasi atau segera mengetahui apabila ada hal hal yang tidak berjalan sesuai aturan yang ada. Manfaat dari adanya inovasi ini, informasi terkait masalah masalah yang ada dipelayanan dapat segera diketahui, segera bisa dilakukan perbaikan, dan bisa menjadi bahan evaluasi oleh pimpinan RSUD Nene Mallomo. Dengan inovasi ini peningkatan mutu pelayanan bisa ditingkatkan lagi sesuai harapan masyarakat. Sasaran Inovasi ini Pasien RSUD Nene Mallomo	RSUD Nene Mallomo	1 Juli 2022
18	D-ROBOTICS: DIGITAL ROBOTICS FOR INNOVATION & CREATIVE STUDENTS (Inovasi Layanan Pendidikan Berbasis Robotika untuk Memperkuat Literasi Digital dan STEM di Satuan Pendidikan)	D-ROBOTICS merupakan program kokurikuler berbasis teknologi yang mengintegrasikan pelatihan robotika sederhana, pemprograman, dan literasi STEM ke dalam kegiatan sekolah. Program ini melibatkan siswa secara aktif untuk merakit dan memprogram robot, serta mengembangankan soft skills seperti kolaborasi dan kreativitas. Tujuan dari inovasi ini antara lain: untuk menarik minat masyarakat untuk bersekolah di SMP Negeri 1 Pancarijang, meningkatkan kesiapan digital dan STEM peserta didik, menjadikan sekolah sebagai pionir pendidikan teknologi di Kabupaten Sidrap, serta membangun model pembelajaran robotika yang dapat direplikasi.	SMP Negeri 1 Panca Rijang	Juli 2022
19	SIDRAP BERAS	SIDRAP BERAS: B : Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU) E : Edukasi dan Partisipasi Masyarakat R : Retribusi Sampah A : Angkutan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	1 Juli 2025

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		S : Sumber Sampah Inovasi ini bertujuan untuk mengembangkan Inovasi Pengolahan Sampah dengan mendorong pengembangan teknologi. Pendekatan Smart City dalam tata kelola persampahan dengan menekankan pentingnya menciptakan akun atau rekening sampah bagi setiap warga sebagai dasar sistem yang adil dan transparan.		
20	Smart Is Beauty (SISTEM PELAYANAN INFORMASI OBAT BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK MASYARAKAT)	Sistem Pelayanan Informasi Obat Berbasis Elektronik Untuk Masyarakat (Smart Is Beauty) dikembangkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan, penyimpanan bahkan cara membuang obat sisa yang ada dirumah. Inovasi ini merupakan aplikasi mobile berbasis android yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi obat yang diinginkan masyarakat dengan memperhatikan akses informasi obat secara cepat, singkat, akurat dan mudah dipahami	PKM Rappang	3 Januari 2023
21	PHARMACY RAJA INSTANT	Inovasi Pharmacy Raja Instant dibuat karena kurangnya informasi obat yang didapatkan pasien serta kurang patuhnya pasien dalam minum obat secara tepat waktu. Hal inilah yang menjadi serangkaian upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait obat di Kecamatan Pitu Rawa Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuktikan dengan hasil adanya beberapa pasien yang datang berkunjung ke Puskesmas Lancirang, setelah dilakukan metode wawancara dan pembagian kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat seperti nama obat, khasiat/kegunaan dari obat, aturan pakai, cara penggunaan serta efek samping obat. Dari hasil survei internal yang dilakukan di UPT Puskesmas Lancirang pada bulan Juli di tahun 2022 yakni dengan cara pengambilan sampel secara acak sebanyak 100 pasien/responden dari berbagai kalangan (baik dari segi pendidikan dan usia)	PKM LANCIRANG	3 Januari 2023

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		didapatkan bahwa dari total responden tersebut, sebanyak 15% pasien tidak tahu cara menggunakan obat atau aturan pakai obat,45 % pasien kurang tahu cara menggunakan obat atau aturan pakai obat dan 40 % pasien yang tahu cara menggunakan obat. Adapun untuk kepatuhan minum obat secara tepat waktu, sebanyak 65% kurang tau tentang pentingnya minum obat tepat waktu, 35 % pasien yang tau tentang pentingnya minum obat tepat waktu. Dari data tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pasien tentang obat serta pentingnya minum obat tepat waktu masih kurang dikarenakan pasien kurang mendapatkan informasi yang jelas, lengkap dan menyeluruh oleh petugas farmasi, serta pasien tidak mau bertanya kepada petugas farmasi terkait informasi yang diberikan, meskipun informasi yang diberikan masih kurang lengkap. Hal ini yang menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan obat yang benar		
22	DVD SCHOOL (DASHBOAR VISUALISASI DATA)	Inovasi ini merupakan aplikasi penyajian layanan visualisasi data sekolah, dengan harapan akan semakin meningkatkan efisiensi proses pencarian informasi. aplikasi ini berisi Visualisasi data peserta didik, Visualisasi data perkembangan jumlah peserta didik, Visualisasi data kehadiran guru dan peserta didik, Visualisasi data keadaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan Visualisasi data laporan BK. manfaat inovasi ini yaitu :Tersesianya data dan informasi yang lengkap, yang disajikan dalam visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, Termonitornya perkembangan hasil belajar, kehadiran peserta didik dan kehadiran guru, Tersedianya data visual yang mudah dipahami tersebut, memudahkan pembuatan kesimpulan dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan serta membantu dalam hal pencarian data dalam jumlah besar dan waktu yang sigkat.	SMP Muhammadiyah Boarding School Dinas Pendidikan	16 Januari 2023

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
23	Kampung RUBUHA (RUMAH BURUNG HANTU	Tujuan Inovasi ini adalah untuk mengendalikan serangan hama tikus yang berdampak pada penurunan produksi padi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Outcome yang diharapkan dari inovasi ini adalah: Meningkatnya jumlah produksi padi yang didapatkan oleh petani di sekitar RUBUHA dan Menurunnya jumlah serangan hama tikus yang dirasakan oleh petani di sekitar RUBUHA. Output Yang diharapkan dari inovasi ini adalah: Jumlah pembuaatan dan pemasangan rumah burung hantu meningkat di wilayah dua desa 5 unit tiap tahun, dan Jumlah penyuluhan yang dilakukan 4 kali tiap minggu.	BPP Kecamatan Tellu Limpoe DTPHPKP	Agustus 2023
24	PAKAJAKI' (PEDOMAN PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN BERDASARKAN KINERJA DAN KEWILAYAHAN)	Salah satu persoalan dalam pembangunan daerah di kabupaten Sidenreng Rappang adalah adalah proses penentuan anggaran atau dana yang dialokasikan untuk setiap kecamatan menimbulkan polemik karena belum adanya regulasi yang mengatur hal tersebut. Penentuan pagu indikatif kecamatan masih berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya saja, tanpa memperhatikan faktor lain seperti ketersediaan sumber daya, kondisi sosial ekonomi, potensi ekonomi, kondisi geografis dan capaian kinerja dari kecamatan sehingga muncul ketidakadilan dalam penentuan anggarannya. Sekaitan dengan permasalahan diatas, dibutuhkan suatu strategi atau instrumen untuk dapat memastikan pembagian alokasi pagu indikatif kecamatan dapat dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan berbagai faktor. Adapun tujuan inovasi ini yaitu tersedianya formulasi anggaran berdasarkan karakteristik wilayah dan kinerja kecamatan, terintegrasinya formulasi anggaran ke penyusunan dokumen perencanaan yang kemudian menjadi dasar dalam penentuan pagu pada APBD, dan meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan, menurunnya angka kemiskinan dan stunting pada wilayah kerja kecamatan serta mendorong	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	September 2023

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		kemandirian daerah melalui meningkatnya pencapaian realisasi PBB.		
25	" PENARI " (PEMBINA MURID)	"PENARI" adalah akronim dari (Pembina Murid). Merupakan salah satu program yang ada di sekolah kami untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa dalam berbicara dan berpikir kritis serta melatih kepercayaan dirinya. Mereka bergiliran tampil menjadi PEMBINA MURID memberikan amanat/wejangan kepada teman-teman mereka setiap hatinya saat apel pagi.	UPT SMPN 3 DUA PITUE	2 Januari 2024
26	Melestarikan Kesenian Tari dan Musik Tradisional Masyarakat Bugis: Kearifan Lokal	Kearifan lokal merupakan aset penting yang melambangkan identitas dan budaya suatu masyarakat. Salah satu elemen penting dalam kearifan lokal masyarakat Bugis adalah seni tari dan musik tradisional, yang tidak hanya merupakan sarana hiburan, tetapi juga mengandung nilai-nilai sejarah, spiritual, dan sosial yang mendalam. Projek ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melestarikan budaya lokal, khususnya seni tari dan musik tradisional masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menghadapi tantangan besar di tengah perkembangan.	UPT SMPN 4 DUA PITUE	8 Januari 2024
27	Menstimulus konsentrasi belajar siswa melalui pembiasaan literasi berbasis pendekatan Hipnoterapy (baca Qur'an)	15 menit sebelum memulai pembelajaran Peserta didik diberikan waktu untuk membaca Al'quran guna supaya mereka lebih fokus serta lebih tenang menerima materi yang akan disajikan oleh bapak/ibu guru.	UPT SMPN 5 PANCA RIJANG	16 Januari 2024
28	Passalama (Pelajar Pancasila dalam Mitigasi Bencana)	Inovasi Pelajar Pancasila dalam Mitigasi Bencana merupakan projek penguatan profil pelajar pancasila yang mengintegrasikan nilai-nilai pancasila dalam mitigasi bencana. Projek ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap tanggap bencana dalam kehidupan sehari-hari	SMP MUHAMMADIYAH RAPPANG	5 Februari 2024

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
29	Si Raja Baca (Sidrap Sejahtera Karena Membaca)	Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menghadapi tantangan dalam meningkatkan budaya membaca di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pelajar dan orang dewasa. Meskipun sudah ada fasilitas perpustakaan dan program pendidikan, minat baca masyarakat masih tergolong rendah, yang berpotensi menghambat perkembangan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Inovasi "Si Raja Baca" atau "Sidrap Sejahtera Karena Membaca" diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk mengubah mindset dan kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Praktik baik ini sangat penting, karena membaca merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan informasi, yang pada gilirannya akan mendukung kemajuan daerah dan pembangunan SDM yang lebih baik. Peserta dalam praktik ini meliputi: 1. Masyarakat, secara umum yang diharapkan berperan aktif dalam mengakses bahan bacaan dan mengikuti kegiatan yang ada. 2. Petugas perpustakaan, yang bertanggung jawab dalam menyediakan layanan berkualitas serta melakukan promosi dan pengelolaan program. 3. Pemerintah daerah, yang mendukung kebijakan serta pendanaan untuk melaksanakan kegiatan ini. 4. Stakeholder, di antaranya bersama komunitas literasi, ataupun komunitas lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang	3 April 2024
30	PEKA PAS Perawat	Isi daripada Penilaian Kinerja Perawat: 1. Sikap Kerja, 2. Kinerja Pelayanan (Uraian Tugas), 3. Mutu Pelayanan.	UPT RSUD NENE MALLOMO	1 Juli 2024
31	Pustakawan Pintar (Pustakawan Profesional, Inovatif, Kreatif, Adaptif, Responsif)	Hingga saat ini, Kabupaten Sidenreng Rappang menghadapi tantangan dalam pengelolaan perpustakaan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya tenaga	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang	7 Juli 2024

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		perpustakaan atau pustakawan yang memiliki inovasi dalam mengelola perpustakaan. Banyak pustakawan yang bekerja di instansi pendidikan, terutama di sekolah-sekolah, namun belum memiliki keterampilan yang cukup untuk mengelola dan mengembangkan perpustakaan secara inovatif dan kreatif. Kondisi ini membuat peran pustakawan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak maksimal dalam meningkatkan minat baca, mengelola koleksi perpustakaan, dan menyediakan akses informasi yang efektif bagi masyarakat, terutama siswa. Banyak pustakawan yang hanya menjalankan tugas administratif tanpa adanya inovasi dalam pelayanan perpustakaan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan atau inovasi untuk meningkatkan kemampuan pustakawan di daerah ini. Pustakawan Pintar, yang merupakan akronim dari Pustakawan Profesional, Inovatif, Kreatif, Adaptif, dan Responsif, menjadi sebuah inisiatif yang sangat penting untuk menjawab tantangan ini. Inovasi ini bertujuan untuk mendorong pustakawan sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang agar menjadi agen perubahan yang tidak hanya mengelola koleksi buku, tetapi juga berinovasi bak dalam memanfaatkan teknologi ataupun penerapan metode baru untuk meningkatkan minat baca, menyediakan informasi, serta mendukung proses pembelajaran di sekolah. Peran dan tanggung jawab peserta dalam praktik ini sangat krusial. Pustakawan yang terlibat diharapkan untuk menjadi lebih dari sekadar penjaga buku, melainkan sebagai fasilitator pembelajaran, penyedia informasi yang akurat, serta kreator kegiatan literasi yang dapat memotivasi siswa dan guru untuk memanfaatkan perpustakaan secara lebih maksimal.		

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
32	SIDRAP OK (sidenreng Rappang Online Kependudukan))	SIDRAP OK adalah inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menggunakan aplikasi WahatsAPP untuk memberikan layanan administrasi kependudukan. dimana masyarakat yang ingin mengurus administrasi Kependudukannya tidak perlu datang Ke Dinas Dukcapil melainkan bisa menggunakan whatsApp untuk megurus dokumen kependudukannya dengan menghubungi Kontak Whatsapp yang ditentukan.dan setelah diverivikasi dan dproses oleh petugas kemudian berkas yang sudah jadi dikirim melalui amail pemohon untuk di cetak di lokasi pemohon.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25 Juli 2024
33	INOVASI KARTU DIGITAL SISWA	Inovasi Kartu Digital Siswa hadir sebagai solusi untuk membangun keterhubungan yang transparan antara sekolah, siswa, dan orang tua. Melalui fitur-fitur terintegrasi, kartu ini membantu memantau perkembangan belajar, kehadiran, asesmen, hingga laporan disiplin siswa secara real-time dan efisien. Inilah langkah kecil menuju sekolah digital yang berdampak besar. sekolah sering menghadapi tantangan dalam menyampaikan informasi perkembangan siswa kepada orang tua secara cepat, akurat, dan menyeluruh. Keterbatasan sistem manual membuat komunikasi dan pelaporan kurang optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami menghadirkan Kartu Digital Siswa sebagai solusi terpadu yang mengintegrasikan berbagai aspek penting dalam pemantauan dan pelaporan perkembangan siswa.	UPT SMP Negeri 4 PITU RIAWA	1 Januari 2025
34	TAHFIDZ TALQIN JUARA	Kelas Tahfidz yang kami buat adalah kelas tahfidz pertama di sekolah dasar negeri Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi mata pelajaran wajib di satuan pendidikan kami. Program ini menjawab kebutuhan masyarakat akan pentingnya meningkatkan keimanan murid dengan pembiasaan positif melalui hafalan Qur'an.Metode yang digunakan adalah metode talqin protaba dan dipandu oleh guru kelas di UPT SD Negeri 11 Rappang yang telah mendapat	UPT SD Negeri 11 Rappang	2 Januari 2025

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		lisensi/sertifikat sebagai pelatih tahfidz. Kelas tahfidz ini menjadi bagian dari mata pelajaran sekolah dan ciri khas keunggulan sekolah kami, bukan lagi kegiatan ekstrakurikuler. Kelas tahfidz dimulai setiap hari sekolah selama 1 jam pelajaran dan akan ditambah sesuai hasil evaluasi tiap bulan sesuai kurikulum yang telah disediakan. Selain kurikulum yang terstruktur, kami juga melengkapi kelas tahfidz dengan media pembelajaran audio visual sehingga mampu memfasilitasi tipe belajar tiap murid: audio, visual, dan audio-visual.		
35	SELALU DI HATI (Senyum,Laksanakan Pelayanan Untuk Dikembangkan menjadi Harapan Sehat Masyarakat Indonesia)	Membentuk tim Duta Pelayanan dimana Duta Pelayanan mulai dari Kluster 1,Kluster 2,kluster 3 dan Lintas Kluster mendampingi selama dilakukan pelayanan sampai selesai,mengisi link survey kepuasan dan meninggalkan Puskesmas.	BLUD UPT Puskesmas Belawae	2 Januari 2025

Sumber: Data diolah Tim RKPD Tahun 2025.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi global dan nasional, kondisi ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, serta prospek dan tantangan perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2026. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi Qkeuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2025. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2026 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026.

3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

Memasuki tahun 2026, perekonomian daerah di Indonesia menghadapi dinamika yang semakin kompleks, seiring dengan pergeseran ekonomi global, transformasi digital, serta tantangan iklim dan geopolitik. Di tengah upaya pemulihan pascapandemi dan adaptasi terhadap ekonomi hijau, peran pemerintah daerah menjadi semakin strategis dalam memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan. Prospek perekonomian daerah tahun 2026 diantaranya yaitu pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Setelah beberapa tahun pascapandemi, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di kisaran 5,2 persen hingga 5,5 persen memberikan dampak positif bagi daerah. Sektor-sektor seperti pariwisata, pertanian, dan industri pengolahan diperkirakan akan terus mengalami pemulihan dan ekspansi. Akselerasi digital dan ekonomi kreatif tahun 2026 diperkirakan akan menjadi momentum peningkatan kontribusi sektor digital dan ekonomi kreatif di berbagai daerah. UMKM semakin terhubung secara digital, didukung oleh peningkatan infrastruktur TIK dan literasi digital masyarakat. Peluang investasi daerah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) juga terus didorong karena akan membuka peluang besar bagi daerah untuk menarik investasi melalui integrasi kawasan industri, pelabuhan, dan akses logistik yang semakin efisien. Kesadaran global terhadap perubahan iklim

menciptakan ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi energi terbarukan, sektor pertanian berkelanjutan, serta ekowisata. Inisiatif ekonomi hijau menjadi peluang pertumbuhan baru, terutama di daerah yang memiliki potensi energi matahari, air, dan biomassa. Seiring dengan adanya prospek perekonomian daerah, maka muncul pula sejumlah tantangan perekonomian daerah seperti kesenjangan wilayah dan ketimpangan akses ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan stabil, ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia serta antar daerah perkotaan dan perdesaan masih menjadi persoalan utama. Pemerataan pembangunan dan akses terhadap layanan dasar tetap menjadi pekerjaan rumah utama. Kapasitas fiskal daerah yang terbatas juga menjadi tantangan karena masih banyak daerah mengandalkan transfer dari pusat dan memiliki ruang fiskal yang terbatas. Hal ini menghambat fleksibilitas kebijakan daerah dalam menggerakkan ekonomi lokal secara mandiri. Ketimpangan dalam kualitas pendidikan dan keterampilan kerja membuat banyak daerah tertinggal dalam menyerap peluang kerja di sektor-sektor baru seperti teknologi, industri hijau, dan jasa digital. Daerah-daerah dengan kerentanan tinggi terhadap bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi. Adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi kebutuhan mendesak. Masih terdapat tantangan dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan antarlevel pemerintahan. Beberapa daerah juga menghadapi persoalan tata kelola, lemahnya data pembangunan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Tahun 2026 menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah melalui strategi pembangunan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Percepatan digitalisasi, transformasi ekonomi hijau, serta penguatan kualitas SDM menjadi kunci utama untuk menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan prospek ekonomi ke depan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat akan menentukan keberhasilan arah pembangunan ekonomi daerah di tahun-tahun mendatang.

3.1.1.1. Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian daerah memainkan peranan krusial dalam mendukung ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Memasuki tahun 2026, Indonesia berada dalam fase pemulihan dan transformasi ekonomi yang penting. Setelah menghadapi berbagai tantangan global, termasuk dampak lanjutan dari pandemi COVID-19, krisis energi, dan ketidakpastian geopolitik, fokus pembangunan ekonomi kini lebih menekankan pada keberlanjutan, pemerataan, dan digitalisasi. Dalam konteks ini, perekonomian daerah diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif dan tangguh, dengan mengoptimalkan potensi lokal serta memperkuat daya saing regional.

Prospek perekonomian daerah pada tahun 2026 cukup menjanjikan, seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di kisaran 5,2 persen hingga 5,5 persen. Daerah-daerah yang selama ini mengalami ketertinggalan mulai menunjukkan perbaikan dalam

struktur ekonomi dan distribusi pembangunan. Didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah timur Indonesia dan kawasan perbatasan, pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah diperkirakan akan semakin membaik. Pertumbuhan sektor-sektor tradisional seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan diperkirakan masih mendominasi di banyak daerah, namun mulai diimbangi oleh ekspansi sektor jasa, industri kreatif, dan manufaktur ringan yang berbasis potensi lokal.

Program percepatan pembangunan infrastruktur yang dilanjutkan pemerintah pusat hingga 2026 membawa dampak besar terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah. Jalan tol trans-regional, pelabuhan, bandara, dan jaringan logistik yang semakin efisien memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan arus barang, jasa, dan manusia secara lebih cepat dan murah. Hal ini akan mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata di luar Pulau Jawa. Kawasan industri terpadu, kawasan ekonomi khusus (KEK), serta pengembangan sentra produksi berbasis komunitas lokal akan menjadi motor penggerak ekonomi baru di daerah-daerah.

Digitalisasi terus menjadi salah satu pilar transformasi ekonomi daerah pada 2026. Peningkatan penetrasi internet, perluasan jaringan 5G, serta kebijakan digitalisasi UMKM secara nasional mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi digital hingga ke pelosok. Daerah yang mampu mengintegrasikan teknologi dalam sistem layanan publik, perdagangan, dan sektor jasa akan memiliki daya saing lebih tinggi. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti kuliner, kriya, fesyen, musik, dan konten digital menjadi peluang besar bagi generasi muda di daerah untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan kewirausahaan.

Komitmen global terhadap pengurangan emisi karbon dan transisi energi membuka peluang baru bagi daerah, terutama yang memiliki potensi energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga air, tenaga surya, dan biomassa. Pemerintah pusat dan daerah mulai mengarahkan investasi ke proyek-proyek ramah lingkungan, termasuk pertanian berkelanjutan, pengelolaan sampah, dan pariwisata berbasis konservasi. Daerah yang mampu berinovasi dalam membangun ekonomi hijau akan menjadi pelopor dalam menarik investor dan bantuan internasional untuk pengembangan energi bersih dan keberlanjutan lingkungan.

Otonomi daerah yang semakin dewasa memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik lokal. Pada 2026, sinergi antara kebijakan fiskal, investasi, dan pembangunan sumber daya manusia di tingkat daerah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kapasitas tata kelola, memperkuat sistem perencanaan berbasis data, serta menggandeng sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Transfer Umum (DTU), Dana Insentif Daerah

(DID), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan terus berperan penting dalam mendorong pembiayaan pembangunan lokal.

Iklim investasi di daerah diperkirakan akan terus membaik pada 2026, didorong oleh penyederhanaan perizinan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*), insentif pajak, dan penguatan sistem promosi investasi daerah. Provinsi dan kabupaten/kota yang aktif membangun citra positif, menyediakan kemudahan berusaha, dan memiliki tenaga kerja kompeten akan menjadi tujuan utama investasi domestik dan asing. Sektor-sektor potensial seperti agrobisnis, manufaktur skala kecil-menengah, pariwisata, dan energi terbarukan diprediksi menjadi fokus investasi baru di banyak wilayah.

3.1.1.2. Tantangan Perekonomian Global

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global tercatat sebesar 3,3 persen, melanjutkan tren perlambatan dari pertumbuhan tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 3,6 persen dan 3,5 persen. Pada tahun 2025 dan 2026, ekonomi global diproyeksikan tumbuh melambat masing-masing sebesar 2,8 persen dan 3,0 persen. Perlambatan cukup dalam pada tahun 2025 dipicu oleh risiko perang dagang akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 dan 2026 utamanya masih ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Sementara negara maju diproyeksikan tumbuh lebih lambat.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Global (persen)

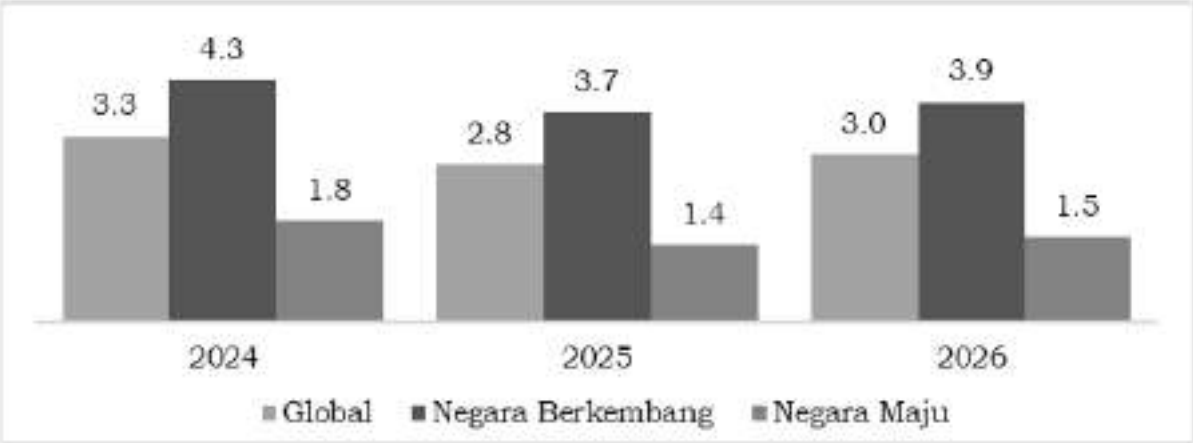

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026

Ekonomi global masih menghadapi tantangan utamanya berasal dari sisi geopolitik. Kebijakan pemerintah AS telah mendorong eskalasi perang dagang. AS menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra dagang yang memiliki surplus perdagangan dengan AS, seperti Tiongkok, Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut telah merespon kebijakan AS dengan melakukan retaliasi atas tarif impor produk AS, sehingga berpotensi menurunkan volume perdagangan bilateral dan global. Mengingat Indonesia memiliki surplus perdagangan terhadap AS, dampak eskalasi perang dagang ini perlu segera dimitigasi.

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 ditopang aktivitas perdagangan global yang meningkat, tecermin dari kenaikan rata-rata *Baltic Dry Index* ke level 1.742,66 dari 1.393,56 pada tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan kinerja perdagangan di negara berkembang seperti Tiongkok dan India, penguatan perdagangan jasa, serta praktik *frontloading*, yaitu peningkatan perdagangan sebelum kenaikan tarif impor oleh AS. Namun, kinerja perdagangan global pada tahun 2025 diperkirakan masih akan diliputi dengan ketidakpastian, terutama akibat kebijakan tarif yang diberlakukan secara luas oleh AS terhadap seluruh negara mitra dagang. Kebijakan ini telah memicu berbagai respons dari negara-negara lain, menciptakan dinamika perdagangan yang tidak menentu. Sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pelemahan permintaan global, termasuk AS dan Tiongkok, yang berdampak pada melambatnya aktivitas perdagangan internasional akibat disrupsi rantai pasok.

Aktivitas manufaktur tahun 2024 membaik dibanding tahun 2023, tecermin dari tren peningkatan *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur ke zona ekspansif di atas level indeks 50,0. Sementara itu, PMI sektor jasa tetap berada di zona ekspansi sepanjang tahun. Namun demikian, perang dagang akibat kebijakan resiprokal AS sejak April 2025 berisiko menurunkan permintaan global serta aktivitas manufaktur global ke depan.

Di sisi lain, pergerakan harga komoditas pada tahun 2024 bervariasi dibanding tahun 2023. Harga batu bara, minyak mentah, dan gandum melanjutkan tren penurunan, sementara harga logam dan *Crude Palm Oil* (CPO) meningkat. Hingga Maret 2025, harga komoditas batu bara; minyak mentah Brent; gandum; dan CPO masing-masing tercatat sebesar US$103,97 *per metric ton* (mt); US$72,57 per *barrel* (bbl); US$255,37 per *mt*; dan US$1.069,00 per *mt*.

Pada tahun 2024, inflasi di beberapa negara, seperti AS (3,0 persen), Inggris (2,5 persen), dan Kawasan Eropa (2,4 persen), telah mendekati target inflasi bank sentral sebesar 2,0 persen. Sehingga, bank sentral di negara-negara tersebut sepanjang 2024 telah beberapa kali menurunkan suku bunga acuannya untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. Namun, inflasi di negara berkembang masih di level tinggi bahkan meningkat menjadi 6,6 persen. Secara keseluruhan, inflasi global tahun 2024 melambat tetapi masih relatif tinggi pada level 5,7 persen.

3.1.1.3. Tantangan Perekonomian Nasional

Memasuki tahun 2025, ekonomi Indonesia tetap tumbuh resilien sebesar 4,87 persen (yoy) pada Triwulan I 2025, sesuai estimasi Pemerintah mempertimbangkan ketidakpastian global terutama akibat perang tarif. Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dengan pertumbuhan mendekati 5 persen, turut ditopang peran Pemerintah melalui stimulus fiskal seperti THR, diskon listrik dan tol, serta intervensi harga pangan. Investasi tumbuh membukukan pertumbuhan moderat sementara konsumsi pemerintah mengalami kontraksi akibat *high base effect* pemilu 2024, meskipun belanja meningkat di akhir triwulan. Ekspor masih stabil ditopang

oleh ekspor sawit yang mencakup 36 persen dari total ekspor, diikuti baja hasil hilirisasi (6,6 persen). Dari sisi produksi, pertanian menjadi penopang dengan pertumbuhan melampaui 10 persen terutama didukung distribusi pupuk yang semakin baik sehingga petani dapat mengoptimalkan momentum panen raya. Industri pengolahan yang menjadi andalan melalui hilirisasi juga tumbuh solid.

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2020-2025 (%, yoy)

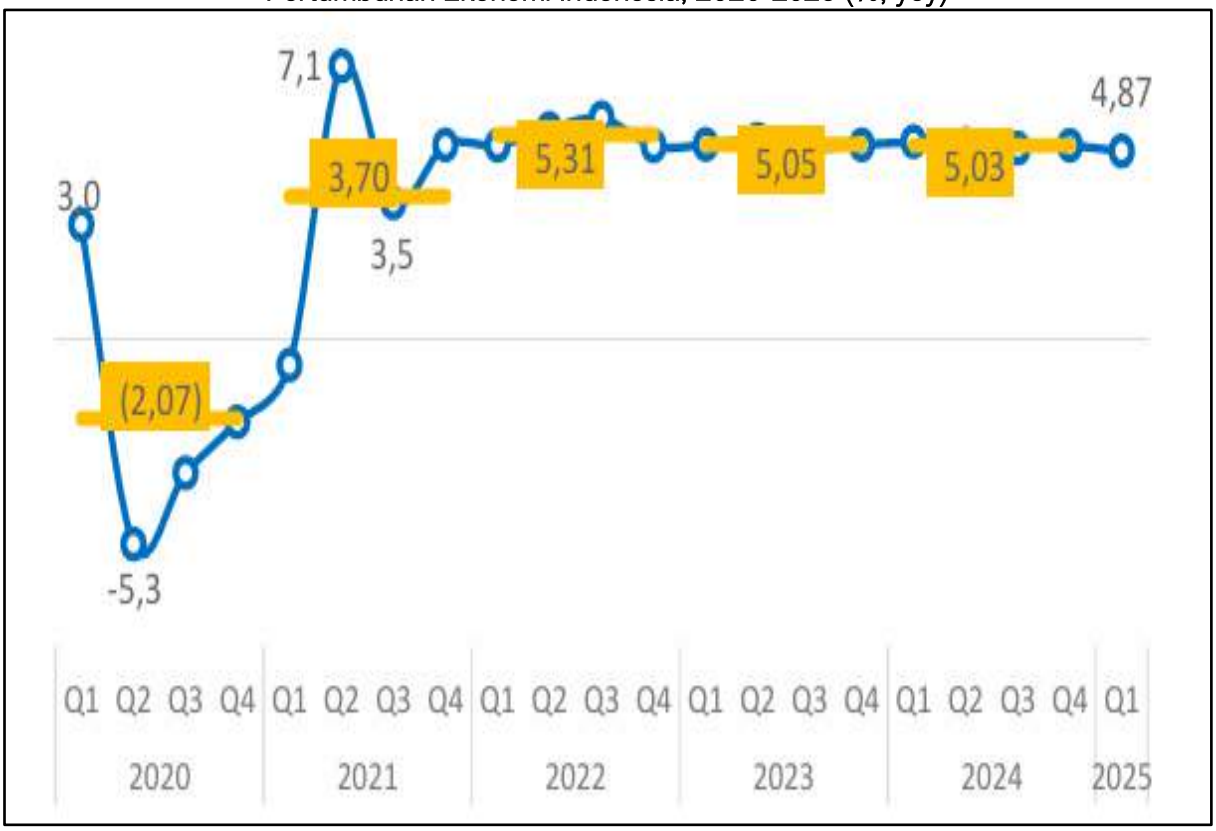

Sumber: KEM PPKF 2026

Konsumsi rumah tangga diproyeksikan tetap tumbuh stabil dan terjaga pada tahun 2025. Sampai dengan triwulan I 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen (yoy). Kinerja positif ini diharapkan terus menguat dengan berbagai kebijakan strategis Pemerintah. Program-program prioritas, antara lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk sektor perumahan dan insentif kendaraan listrik serta *hybrid*, diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan konsumsi masyarakat. Pemerintah juga berkomitmen menjaga keberlanjutan investasi pada proyek-proyek strategis yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, peran APBN terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli dengan mengalokasikan anggaran pada subsidi, program perlindungan sosial, dan insentif fiskal. Bauran kebijakan ini juga diperkuat dengan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan stabilitas harga yang berkelanjutan.

Gambar 3.3
Pertumbuhan Komponen Pengeluaran, 2021-2025 (%, yoy)

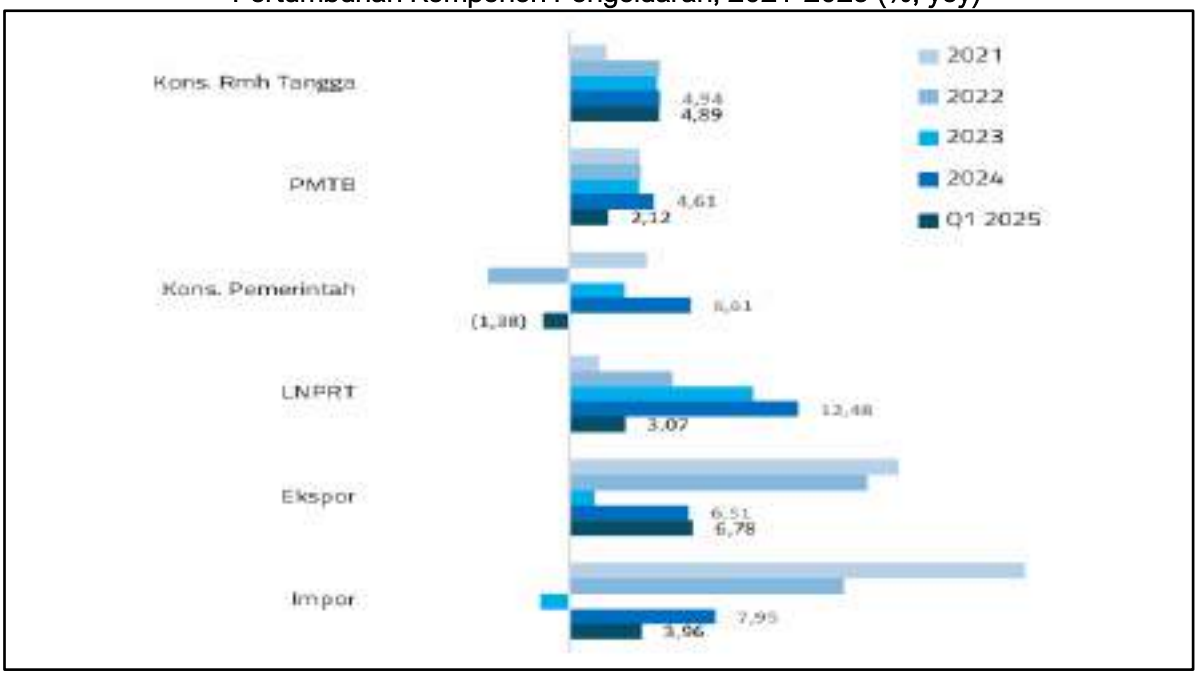

Sumber: KEM PPKF 2026

Kinerja P-KP pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh positif. Kebijakan tersebut seiring berbagai kebijakan perekonomian yang didukung Belanja Pemerintah, diantaranya pembentukan K/L baru, prioritas penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), dan pelaksanaan program Pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM dari sisi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seperti program MBG. Di samping itu, keberlanjutan berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat rentan dan kelas menengah, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja, dan Gaji ke-13 juga ditujukan untuk mendorong konsumsi masyarakat melalui belanja aparatur negara serta menjamin transformasi ekonomi terus berlanjut. RKP ke depan juga akan memengaruhi arah dan implementasi kebijakan fiskal, terutama besaran pengeluaran pemerintah dalam konsumsi barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik. Sampai dengan triwulan I 2025, konsumsi pemerintah terkontraksi sebesar 1,38 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh *high-base effect* belanja di triwulan I 2024.

Kinerja investasi yang terus tumbuh menguat diproyeksikan akan berlanjut pada 2025. Pemerintah terus memelihara iklim investasi yang kondusif melalui berbagai reformasi kebijakan dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif dan berdaya saing. Guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah memberikan insentif yang mendorong investasi di sektor dan kawasan tertentu, serta insentif untuk pengembangan SDM dan riset. Optimalisasi potensi *Sovereign Wealth Funds* (SWF) juga dilakukan dengan pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk percepatan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) oleh entitas milik negara guna meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri dan memperkuat daya saing global. Selain itu, kebijakan belanja Pemerintah dalam keberlanjutan pembangunan

infrastruktur nasional diharapkan secara langsung mendukung investasi dan melalui efek multiplier mengakselerasi aktivitas penanaman modal sektor swasta. Pada triwulan I 2025, investasi tumbuh 2,12 persen (yoy) seiring dengan langkah observatif investor menghadapi gejolak global di awal tahun.

Kinerja ekspor-impor riil Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan masih tumbuh positif di tengah perdagangan global yang semakin melambat. Produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Pada triwulan I 2025, ekspor dan impor secara riil masing-masing tumbuh sebesar 6,78 persen (yoy) dan 3,96 persen (yoy).

Sektor Manufaktur akan tetap menjadi penopang utama pada tahun 2025. Sektor tersebut diperkirakan tumbuh stabil dan berperan besar dalam struktur PDB nasional. Prospek positif datang dari hilirisasi, insentif ekspor, dan transformasi industri 4.0. Di sisi lain, Pemerintah juga terus mendorong industri kendaraan listrik, logistik, dan barang konsumsi. Pada triwulan I 2025, Sektor Manufaktur tumbuh sebesar 4,55 persen (yoy) ditopang oleh hilirisasi dan aktivitas produksi domestik lainnya.

Sektor Pertanian diproyeksikan menguat di tahun 2025. Penguatan ini mulai tecermin pada triwulan I 2025, di mana sektor pertanian menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2025 dan tumbuh kuat sebesar 10,52 persen (yoy). Langkah nyata Pemerintah melalui penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi dengan memangkas lebih dari 145 regulasi berhasil menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk. Kebijakan yang sejalan dengan perkembangan cuaca, berkontribusi terhadap meningkatnya produktivitas pertanian khususnya beras. Data BPS menunjukkan, produksi beras nasional periode Januari – Maret 2025 meningkat 51 persen secara yoy. Penguatan kinerja sektor pertanian pada tahun 2025 juga sejalan dengan laporan United States Department of Agriculture (USDA) outlook pada April 2025, yang memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 menjadi yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Produksi beras tersebut diperkirakan mencapai 34,6 juta ton (beras giling), tumbuh 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 33,03 juta ton.

Sektor Pertambangan diperkirakan masih menghadapi dinamika yang beragam. Pemerintah mendorong eksplorasi, hilirisasi berkelanjutan, dan adopsi teknologi untuk memperkuat sektor ini. Pada triwulan I 2025, Sektor Pertambangan terkontraksi sebesar 1,23 persen (yoy) seiring dengan penurunan harga komoditas pertambangan global. Selain itu, penurunan output pada sektor ini merupakan konsekuensi dari semakin meningkatnya aktivitas hilirisasi, sehingga secara sektoral, output yang telah mengalami proses produksi lanjutan dicatat sebagai aktivitas pada sektor industri pengolahan yang lebih hilir, tidak lagi dicatatkan sebatas pada output dari aktivitas pertambangan yang masih ada di sisi hulu.

Sektor Konstruksi tetap berada dalam jalur ekspansi. Meski ada sedikit moderasi dari puncak pertumbuhan 2024, pada triwulan I 2025 sektor ini tumbuh 2,18 persen (yoy). Kinerja ditopang oleh belanja modal pemerintah dan keberlanjutan proyek strategis.

Sektor Perdagangan diperkirakan terus tumbuh. Pertumbuhan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang masih kuat. Pada triwulan I 2025, sektor ini tumbuh sebesar 5,03 persen (yoy), didorong oleh permintaan selama Ramadan, peningkatan suplai domestik, dan impor barang konsumsi.

Sektor Akomodasi dan Makan Minum tumbuh solid. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan jumlah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pada triwulan I 2025, sektor ini tumbuh sebesar 5,75 persen (yoy). Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai dukungan Pemerintah untuk mendorong daya beli dan aktivitas masyarakat, antara lain melalui PPN DTP untuk tiket pesawat dan diskon tarif tol.

Pada triwulan I 2025, seluruh wilayah Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif. Wilayah Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 6,40 persen (yoy) yang didorong oleh sektor-sektor berbasis hilirisasi. Wilayah Jawa dan Sumatera tumbuh masingmasing sebesar 4,99 persen dan 4,85 persen, terutama karena meningkatnya aktivitas domestik selama bulan Ramadan. Kalimantan tumbuh 4,32 persen didorong oleh Sektor Manufaktur dan Perdagangan. Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan 3,12 persen didorong oleh Sektor Pertanian. Adapun wilayah Maluku dan Papua tumbuh sebesar 1,69 persen, seiring moderasi aktivitas pertambangan. Pertumbuhan ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang merata di berbagai wilayah, meskipun dengan dorongan yang berbeda-beda sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Menghadapi ketidakpastian global, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh resilien. Kinerja ini mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional yang solid, didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali. Stabilitas harga ini menjadi penopang utama daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan konsumsi domestik. Di saat yang sama, iklim investasi yang semakin kondusif sebagai hasil dari reformasi kebijakan struktural memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan sektor-sektor produktif. Pemerintah juga terus memperluas kebijakan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan memperkuat daya saing global. Berbagai program strategis nasional pada tahun 2025 ditujukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh.

3.1.1.4. Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Hingga Februari 2025, tingkat pengangguran di Sulsel mencapai sekitar 238.800 orang atau naik 3,97 persen dari tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang lebih cepat daripada penciptaan lapangan kerja. Banyak lulusan baru mengalami frustasi akibat

sistem rekrutmen yang tidak transparan dan seleksi informal. Ketiadaan penyerapan lapangan kerja formal cukup memperparah tekanan sosial. Kualitas sumber daya manusia di Sulawesi, termasuk Sulsel, masih rendah dan sering tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Kurangnya pelatihan vokasi, pendidikan berbasis industri, dan program pengembangan keterampilan menyebabkan *mismatch* yang memicu kesulitan pengusaha mencari tenaga kerja kompeten.

Meskipun telah dimulai pembangunan kereta api Makassar-Parepare sebagai bagian Trans-Sulawesi, mayoritas masih dalam tahap konstruksi dan belum sepenuhnya operasional hingga 2026. Sementara itu, sekitar 500 km jalan provinsi masih rusak, menghambat konektivitas antarwilayah terutama akses ke wilayah terpencil seperti Seko di Luwu Utara.

Sulawesi Selatan rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kekeringan yang mempengaruhi produktivitas pertanian, atau banjir yang menghancurkan infrastruktur dan lahan kritis. Proyeksi pertanian, khususnya komoditas padi, jagung, kakao, dan hortikultura, diprediksi akan tertekan jika adaptasi tidak segera dilakukan.

Ekonomi Sulawesi Selatan dan sekitarnya masih sangat bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan tambang, dengan diversifikasi ekonomi masih terbatas. Pertumbuhan sektor industri berbasis lokal dan kreatif masih dalam tahap awal dan memerlukan dukungan kebijakan, investasi, dan peningkatan kapasitas SDM lokal. Dampak dari investasi tambang dan pengolahan nikel misalnya, lebih banyak dinikmati oleh kelompok terbatas sehingga ketimpangan ekonomi tetap tinggi.

Meskipun Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk energi terbarukan, surya, air, biomassa, angin, namun hingga 2025 belum menjadikan ini prioritas. Implementasi kebijakan EBT masih lemah dan tidak terintegrasi dengan perencanaan pembangunan lainnya.

Pada 2025-2026, ketegangan perdagangan global (termasuk war dagang AS-Tiongkok) masih mengancam stabilitas ekspor komoditas Sulawesi Selatan, meskipun sebagian besar ekspor diarahkan ke Jepang dan Tiongkok. Perubahan tarif serta tantangan rantai pasok menyebabkan ketidakpastian pasar eksternal.

Kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan dunia usaha (*triple helix*) masih lemah. Peran kampus dalam pembangunan ekonomi belum optimal. Integrasi antar lembaga dalam menyusun kebijakan pembangunan, perencanaan berbasis data, dan pelibatan masyarakat dalam ekonomi hijau masih terbatas.

Menjelang 2026, tantangan perekonomian Sulawesi Selatan berkisar pada tingginya pengangguran, infrastruktur terbatas, kualitas SDM yang belum sebanding dengan kebutuhan industri, dampak perubahan iklim, dominasi sektor primer, ketimpangan pertumbuhan, integrasi energi hijau yang rendah, dan tata kelola pembangunan yang belum optimal. Untuk menghadapi tantangan ini, perlu langkah-langkah strategis seperti pengembangan pelatihan vokasi dan kemampuan wirausaha lokal, revitalisasi sektor pertanian dan perikanan melalui teknologi,

percepatan infrastruktur seperti kereta dan jalan provinsi, integrasi energi terbarukan dalam rencana pembangunan, perumusan ekonomi hijau dan inklusif, serta peningkatan koordinasi *triple helix* dalam pembangunan.

3.1.1.5. Tantangan Perekonomian Daerah

Posisi geografis Kabupaten Sidenreng Rappang strategis dengan beberapa kelebihan yang dimiliki secara struktural dimana Sidenreng Rappang merupakan salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Menjelang tahun 2026, Kabupaten Sidenreng Rappang menghadapi sejumlah tantangan struktural dalam pembangunan ekonominya. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian, khususnya padi, menjadikan Sidenreng Rappang rentan terhadap fluktuasi iklim, ketersediaan pupuk, dan infrastruktur irigasi yang belum merata. Di sisi lain, diversifikasi ekonomi masih lemah karena sektor industri pengolahan dan pariwisata belum berkembang optimal, sementara potensi sektor jasa digital belum dimanfaatkan secara luas akibat rendahnya literasi teknologi dan kualitas SDM. Rata-rata lama sekolah penduduk yang hanya sekitar 8 (delapan) tahun menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan keterampilan kerja. Keterbatasan akses permodalan dan lemahnya dukungan kelembagaan juga membatasi ruang gerak UMKM untuk naik kelas. Infrastruktur distribusi, termasuk jalan tani dan fasilitas pengolahan hasil pertanian, masih belum memadai untuk mendukung akses pasar yang luas. Selain itu, Sidenreng Rappang menghadapi tekanan harga komoditas yang fluktuatif, yang berdampak langsung terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Tantangan ini diperkuat oleh tata kelola pembangunan yang masih perlu didukung dari sisi data, transparansi, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi. Oleh karena itu, transformasi ekonomi Sidenreng Rappang ke depan sangat membutuhkan strategi penguatan sektor unggulan berbasis inovasi, peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan infrastruktur dan tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan.

Transformasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga menjamin pemerataan hasil pembangunan. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan berbagai pihak dalam memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan akses terhadap teknologi dan pasar, serta memperkuat kelembagaan petani. Penerapan prinsip berkelanjutan baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi akan memastikan bahwa pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga generasi mendatang. Kita patut mengapresiasi berbagai langkah strategis kebijakan ekonomi Sidenreng Rappang yang telah diambil pemerintah yang mampu menciptakan kemajuan berarti di tengah ketidakpastian ekonomi, indikasinya terlihat dari pertumbuhan ekonomi Sidenreng Rappang yang sesungguhnya masih berada pada tren positif.

Sekaitan dengan tahapan pembangunan tahun 2026 yaitu **"Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Melalui Penguatan Agrobisnis Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**

Inklusif" dimana ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam menciptakan kedaulatan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, maka di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, serta dinamika geopolitik yang mempengaruhi rantai pasok pangan, Indonesia dituntut untuk membangun sistem pangan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama yang dapat ditempuh adalah penguatan sektor agrobisnis sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi perdesaan dan nasional. Penguatan agrobisnis mencakup seluruh rantai nilai dari hulu ke hilir, mulai dari penyediaan sarana produksi pertanian, pengolahan hasil, hingga distribusinya. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, agrobisnis mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, serta menciptakan peluang usaha bagi kelompok rentan seperti perempuan dan generasi muda.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sidenreng Rappang tercatat sebesar 4,05 persen (*yoy*), inflasi pun terjaga dalam rentang target yaitu di angka 1,03 persen. Sejumlah indikator sosial membaik, seperti tingkat kemiskinan yang turun menjadi 5,02 persen, rasio gini turun menjadi 0,319 poin serta tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 3,02 persen yang berarti ekonomi kita masih sehat dan berkualitas. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya di daerah-daerah perdesaan, memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan masyarakat yang masih bergantung pada sektor pertanian. Ketika agrobisnis diperkuat secara terstruktur dan inklusif, maka manfaat ekonominya akan langsung dirasakan oleh masyarakat lokal. Dengan pendekatan agrobisnis, produk pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah dan dipasarkan dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Hal ini membuka peluang industri rumah tangga, UMKM, dan koperasi di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tumbuh dan berkembang, menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat lokal. Agrobisnis yang modern dan terintegrasi mampu menciptakan berbagai jenis lapangan kerja, mulai dari produksi, logistik, hingga manajemen pemasaran. Hal ini dapat menahan laju urbanisasi karena masyarakat, khususnya generasi muda memiliki alternatif pekerjaan di daerah dengan prospek penghasilan yang menjanjikan.

Seiring berkembangnya kegiatan ekonomi berbasis agrobisnis, pemerintah daerah dapat memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi dari sektor perdagangan, industri pengolahan sehingga dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah. Ketahanan pangan yang tercipta dari sistem agrobisnis yang kuat akan membuat daerah lebih resilien terhadap krisis nasional atau global, seperti fluktuasi harga pangan atau gangguan rantai pasok. Daerah menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya, sekaligus memiliki cadangan ekonomi yang stabil. Prospek ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang juga akan semakin cerah dengan masuknya teknologi tepat guna, digitalisasi pertanian, dan ekosistem inovasi berbasis lokal. Dengan mengembangkan agrobisnis sebagai sektor unggulan daerah, ketimpangan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikurangi. Pertumbuhan

ekonomi tidak lagi terpusat di kota besar, melainkan tersebar di berbagai wilayah sesuai dengan potensi lokal masing-masing.

3.1.1.5.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar perekonomian suatu daerah berdasarkan produksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah menghasilkan barang dan jasa mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi masuk menjadi salah satu indikator dalam aspek kesejahteraan masyarakat sebab kemakmuran penduduk selalu dimulai dari aktivitas ekonomi.

Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya tumbuh sebesar 4,05 persen (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha Pertanian. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 13,34 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kunjungan tempat wisata dan dibukanya lokasi wisata baru. Pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 12,19 persen diikuti oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan sebesar 9,53 persen.

Selain lapangan usaha yang disebutkan di atas, terdapat sepuluh lapangan usaha yang juga tumbuh di atas 5 persen diantaranya yaitu: Lapangan Usaha Administrasi Pemerintah sebesar 8,96 persen; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,92 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,66 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,87 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,37 persen; Jasa Pendidikan sebesar 6,11 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,08 persen; Real Estate sebesar 5,98 persen; Konstruksi sebesar 5,31 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,10 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dengan kontribusi PDRB terbesar mengalami kontraksi sebesar 0,78 persen.

Struktur PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang menurut lapangan usaha tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,76 persen; diikuti oleh Konstruksi sebesar 16,60 persen; Industri Pengolahan sebesar 15,09 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,75 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 71,20 persen. Pada tahun 2025, diharapkan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang bertumbuh di angka 4,25 persen dan pada tahun 2026 diproyeksikan berada di angka 4,95 persen. Angka ini merupakan gambaran optimisme yang tinggi dan ekonomi diharapkan tumbuh bertahap seiring

dengan reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian, industri pengolahan dan dukungan terhadap sektor UMKM.

Kegiatan ekonomi yang tumbuh stabil akan memberi peluang berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menumbuhkan objek-objek pajak dan penerimaan daerah yang semakin luas. Pada sisi yang lain, target pertumbuhan ekonomi tersebut berimplikasi pada kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dalam wujud kebutuhan belanja dan pengeluaran daerah yang besar, sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan tambahan pendanaan yang besar pula.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Target Tahun 2026 (Persen)

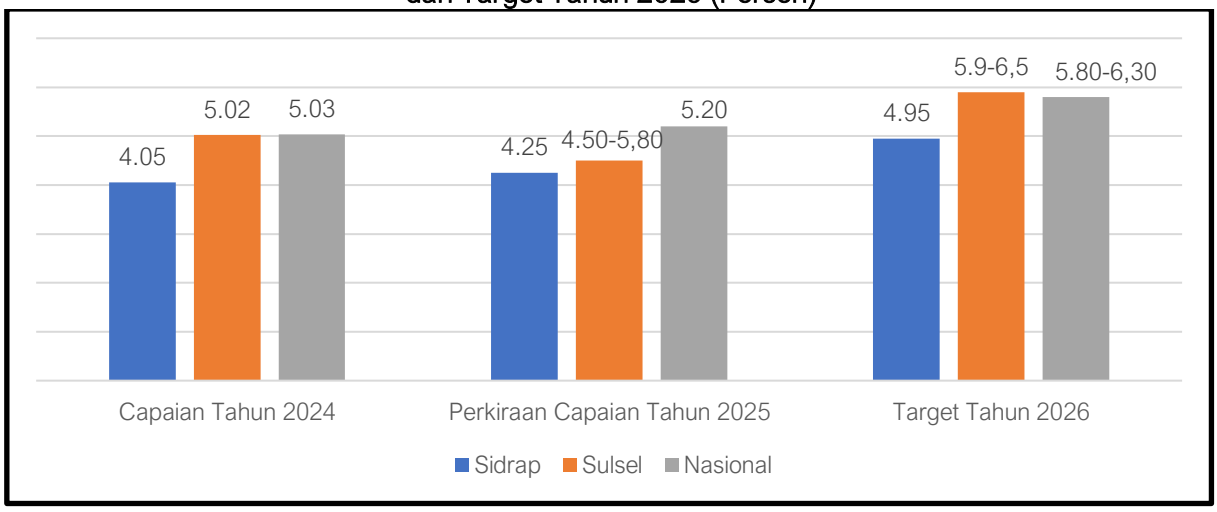

Sumber: BPS, Perubahan RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2025, Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dan Rancangan RKP Tahun 2026 (Data diolah Bapperida Kab. Sidenreng Rappang, 2025)

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024 (persen)

	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan					Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-4,01	5,38	4,00	0,48	-0,78	28,65	28,75	28,52	28,81	28,76
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,77	9,84	5,98	7,15	6,08	5,00	5,13	5,12	5,41	5,33
C.	Industri Pengolahan	-1,70	7,13	12,17	8,13	4,71	13,47	13,61	14,52	15,01	15,09
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,31	10,85	9,09	7,77	4,66	0,08	0,09	0,09	0,08	0,08
E.	Pengadaan Air	2,14	3,64	7,12	3,20	7,92	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	3,16	6,31	0,32	0,47	5,31	17,85	18,24	17,72	16,87	16,60

	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan					Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,67	6,77	7,27	6,10	6,37	10,07	10,12	10,46	10,71	10,75
H.	Transportasi dan Pergudangan	-8,55	6,21	11,56	5,27	6,87	1,99	2,09	2,29	2,55	2,59
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,63	11,34	11,90	9,27	5,10	0,70	0,74	0,79	0,82	0,81
J.	Informasi dan Komunikasi	10,40	6,26	5,11	5,45	7,66	2,92	2,88	2,84	2,77	2,79
K.	Jasa Keuangan	5,75	6,82	-0,69	-3,71	1,95	3,07	3,14	3,10	2,82	2,72
L.	Real Estate	0,88	3,09	5,49	7,74	5,98	4,10	3,95	3,86	3,88	3,89
M, N.	Jasa Perusahaan	-2,82	4,23	6,78	7,26	12,19	0,12	0,11	0,12	0,12	0,13
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib	0,01	-4,79	-0,01	-0,97	8,96	5,10	4,52	4,16	3,83	3,97
P.	Jasa Pendidikan	3,28	2,97	2,04	4,23	6,11	4,14	3,81	3,73	3,65	3,69
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,03	5,90	2,23	2,88	9,53	1,69	1,74	1,62	1,56	1,62
R, S, T, U.	Jasa Lainnya	-3,21	6,77	5,92	9,14	13,34	1,04	1,04	1,06	1,08	1,15
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**-0,59**	**5,54**	**4,86**	**3,28**	**4,05**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Data diolah Tim, 2025

3.1.1.5.2. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita (Produk Domestik Regional Bruto Perkapita) adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah yang dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Dengan kata lain, PDRB Perkapita adalah rata-rata nilai PDRB yang dikaitkan dengan setiap orang di daerah tersebut. Di tahun 2026, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang menggembirakan seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan berbagai kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi yang stabil berhasil meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong kesejahteraan secara umum. Di tingkat provinsi, Sulawesi Selatan juga mencatat peningkatan PDRB perkapita yang cukup signifikan, berkat pengembangan sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta pariwisata yang semakin maju. Namun, perbedaan antar kabupaten masih terlihat jelas, dimana Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan daerah agraris masih berada di bawah rata-rata Sulsel dalam hal PDRB perkapita. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada sektor primer dan keterbatasan akses terhadap investasi serta teknologi modern. Meskipun demikian, Sidrap terus berupaya meningkatkan produktivitas dan diversifikasi

ekonomi untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Dengan demikin, di tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia, Sulsel, dan Sidrap dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya tumbuh sebesar 4,05 persen *yoy*. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,34 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 10,48 persen.

Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan besaran PDRB ADHB tahun 2024 mencapai Rp.19,61 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai 9,99 triliun. Dengan berdasar pada jumlah penduduk interim Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024, PDRB Perkapita tercatat sebesar Rp.59,31 juta. Kontribusi terbesar PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,76 persen dari total PDRB ADHB sedangkan menurut Pengeluaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 57,40 persen.

Grafik 3.2
PDRB Perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Target Tahun 2026 (Persen)

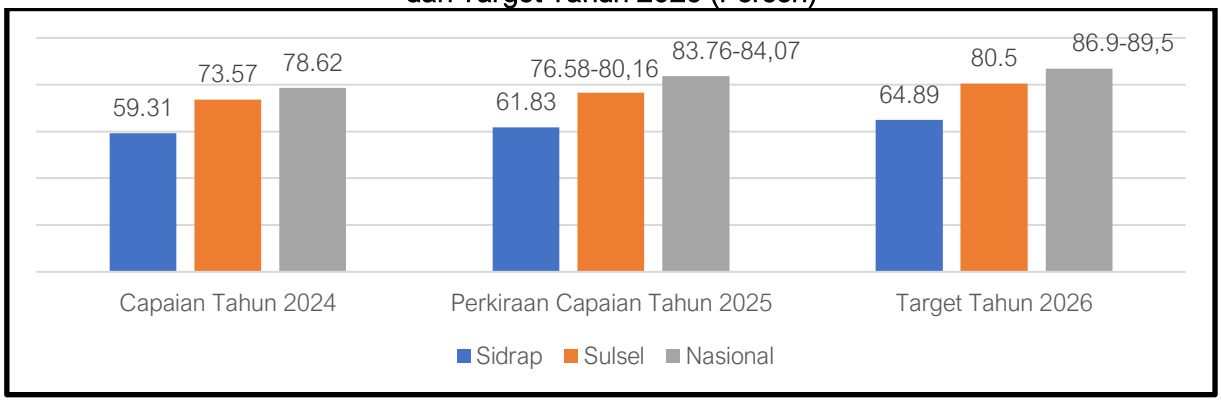

Sumber: BPS, Perubahan RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2025, Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dan Rancangan RKP Tahun 2026 (Data diolah Bapperida Kab. Sidenreng Rappang, 2025)

3.1.1.5.3. Inflasi

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Kondisi ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat karena uang yang dimiliki menjadi kurang bernilai dibandingkan sebelumnya. Pada tahun 2026, Pemerintah Indonesia menargetkan inflasi dapat dikendalikan dalam rentang 1,5 % hingga 3,5 %, sebagai bagian dari asumsi makroekonomi dalam perencanaan APBN 2026. Target ini diharapkan konsisten dicapai melalui sinergi kebijakan moneter dan fiskal serta penguatan sektor pangan melalui GNPIP. Bank Indonesia secara tegas

menyampaikan optimisme bahwa inflasi domestik tetap rendah dan sesuai sasaran, yaitu di kisaran 2,5 % ± 1 % pada tahun 2025-2026, sehingga mencerminkan proyeksi inflasi ideal diantara 1,5 % hingga 3,5 %. Beberapa lembaga internasional seperti OECD juga memberikan proyeksi stabil namun sedikit lebih tinggi, yaitu pada level sekitar 3,0 %, mengingat dampak dari memudarnya diskon harga listrik dan depresiasi rupiah perlahan mempengaruhi harga domestik. Sementara itu, model ekonometrik dari *Trading Economics* memprediksi inflasi Indonesia akan berada di sekitar 2 % pada tahun 2026, menunjukkan inflasi yang relatif rendah dan konsisten dengan tren moderat ke bawah.

Di wilayah Sulawesi Selatan, inflasi pada pertengahan 2025 tercatat sebesar 2,24 % (*year-on*-year), dengan beberapa daerah mencatat angka di atas rata-rata, seperti Kabupaten Sidrap. Komoditas utama penyumbang inflasi di Sulsel antara lain beras, cabai rawit, cabai merah, serta ikan bandeng. Dalam rangka menjaga inflasi tahun 2026 tetap stabil, Bank Indonesia wilayah Sulsel menargetkan inflasi tetap dalam kisaran nasional yaitu 2,5 % ± 1 %, dan mengembangkan program pengendalian berbasis digital serta peningkatan ketahanan pangan lokal. Dengan dukungan pemerintah daerah, inflasi di Sulsel diharapkan tetap terkendali seiring membaiknya distribusi barang dan pengawasan pasar.

Secara khusus di Kabupaten Sidenreng Rappang, inflasi tahun 2025 menunjukkan tren yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Sulsel. Pada bulan Juni 2025, Sidrap mencatat inflasi *year-on year* sebesar 3,01%, tertinggi diantara kota/kabupaten di provinsi Sulsel. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh fluktuasi harga pangan, khususnya beras dan cabai. Meskipun demikian, proyeksi inflasi tahun 2026 untuk Sidrap tetap diperkirakan akan mengikuti tren provinsi, yaitu berada dalam rentang 2% hingga 3,5%, dengan catatan adanya penguatan koordinasi TPID, peningkatan pasokan pangan lokal, serta intervensi pasar yang tepat sasaran.

Grafik 3.3
Inflasi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Target Tahun 2026 (Persen)

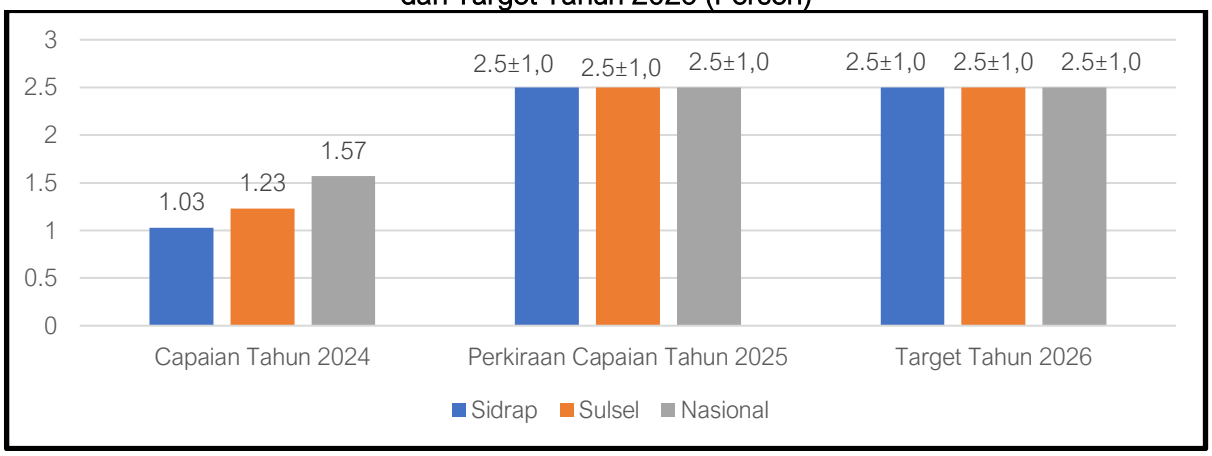

Sumber: BPS, Perubahan RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2025, Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dan Rancangan RKP Tahun 2026 (Data diolah Bapperida Kab. Sidenreng Rappang, 2025)

3.1.1.5.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia diperkirakan akan meningkat sedikit dari tahun sebelumnya, mencapai kisaran 5,1% naik dari sekitar 4,9% pada 2024 dan 5,0% pada 2025 berdasarkan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook April 2025. Proyeksi ini juga selaras dengan asumsi makro ekonomi nasional yang disepakati oleh pemerintah dan DPR RI melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), yang menetapkan target TPT berada pada rentang 4,44-4,96% untuk 2026. Dengan demikian, meski ada sedikit kenaikan, angka TPT diharapkan tetap berada di bawah level 5,2%

Di Sulawesi Selatan, data terbaru BPS mencatat TPT provinsi mencapai 4,96% pada Februari 2025, seiring kenaikan jumlah pengangguran absolut meskipun lapangan kerja juga bertambah, jumlah pengangguran meningkat sebesar 8.123 orang menjadi sekitar 238.800 orang. Mengingat kondisi ini dan tren pertumbuhan ekonomi regional yang moderat, proyeksi untuk tahun 2026 memperkirakan bahwa TPT Sulsel cenderung stagnan atau sedikit mengalami penurunan, kemungkinan berada di kisaran angka 4,01%, menyusul arah pergerakan nasional yang serupa.

Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, data capaian angka pengangguran di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 sebesar 3,29 persen kemudian menurun hingga 3,02 persen di tahun 2024. Sementara di tahun 2025 diperkirakan berada di angka 2,93 persen dan ditargetkan pada tahun 2026 adalah sebesar 2,84 persen.

Grafik 3.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Target Tahun 2026 (Persen)

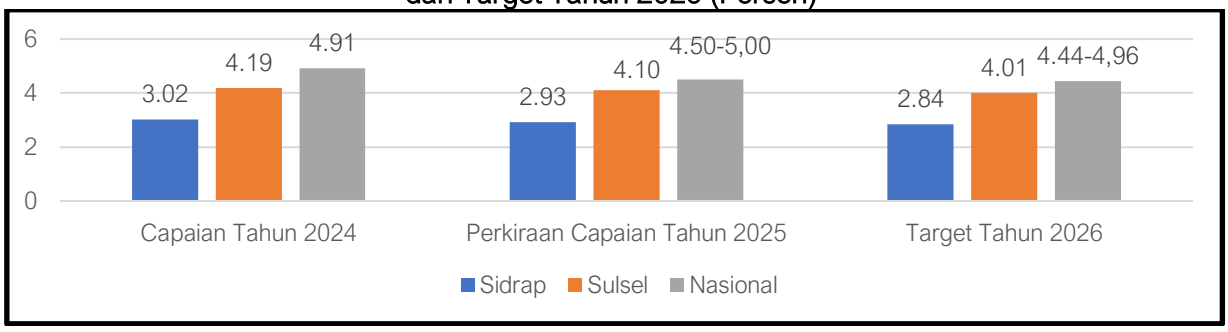

Sumber: BPS, Perubahan RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2025, Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dan Rancangan RKP Tahun 2026 (Data diolah Bapperida Kab. Sidenreng Rappang, 2025)

3.1.1.5.5. Kemiskinan

Pada tahun 2026, persentase penduduk miskin di Indonesia diperkirakan akan terus menurun secara moderat, mencapai kisaran 6,5%-7,5%. Tren penurunan ini sejalan dengan keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial tepat sasaran, peningkatan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, sanitasi), serta penguatan sektor UMKM dan

pertanian. Meskipun belum tersedia proyeksi nasional definitif hingga akhir tahun 2026, kecenderungan dari data BPS sepanjang tahun 2024-2025 menunjukkan penurunan kemiskinan yang konsisten, dengan angka nasional sekitar 8,5% pada awal 2025.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, data historis menunjukkan bahwa persentase kemiskinan secara konsisten menurun dari 8,06% pada Maret 2024, menjadi 7,77% pada September 2024, dan selanjutnya turun ke 7,60% pada Maret 2025. Momentum pertumbuhan ekonomi Sulsel yang mencapai 5,78% (*year-on-year*) pada kuartal I/2025 serta peningkatan sektor pertanian sebesar 16,56% memberi landasan bagi penurunan tingkat kemiskinan lebih lanjut. Dengan asumsi kesinambungan kebijakan dan pertumbuhan ekonomi positif, diproyeksikan bahwa tingkat kemiskinan Sulsel pada tahun 2026 berada sekitar 7,08% hingga 6,85%, menjaga tren penurunan stabil.

Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga masih menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2025. Berbagai program afirmasi pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya sangat efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan. Berbagai program perlindungan sosial, khususnya pada keluarga miskin dan rentan miskin, juga selalu menjadi prioritas penting, baik dalam bentuk perlindungan dasar berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun bantuan untuk akses ke layanan Pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah. Di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan berbagai upaya merespon penurunan angka kemiskinan diantaranya Program Bedah Rumah, Program Bantuan Masyarakat Miskin, Program Bantuan Ternak, Program Bantuan Tanaman Pekarangan serta Pelatihan untuk UMKM. Capaian angka kemiskinan pada tahun 2024 yaitu sebesar 5,02 persen mengalami penurunan 0,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 5,14 persen dan diharapkan angka kemiskinan pada tahun 2025 berada di kisaran angka 4,6-4,01 persen serta ditargetkan pada tahun 2026 sebesar 4,45-3,55 persen.

Grafik 3.5
Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Target Tahun 2026 (Persen)

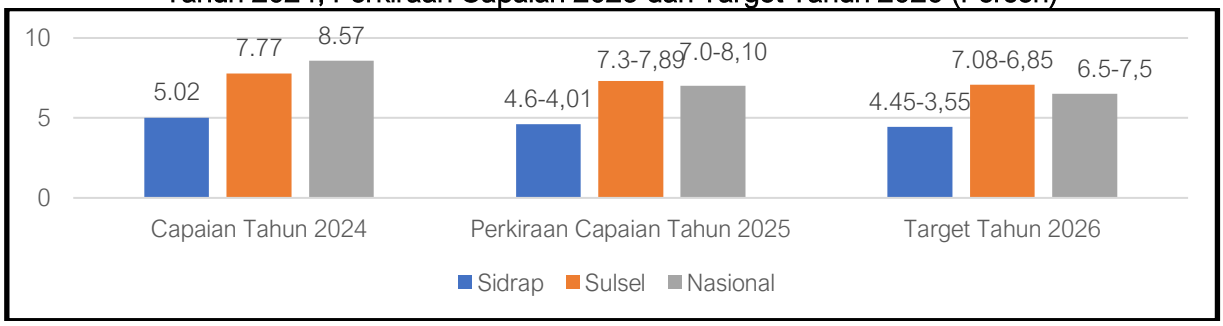

Sumber: BPS, Perubahan RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2025, Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dan Rancangan RKP Tahun 2026 (Data diolah Bapperida Kab. Sidenreng Rappang, 2025)

3.1.1.5.6. Gini Ratio

Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio adalah sebesar 0,381. Angka ini meningkat 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,379 dan menurun 0,007 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2023 yang sebesar 0,388. Gini ratio di daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,402; naik dibanding gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,399 dan turun dibanding gini ratio Maret 2023 yang sebesar 0,409. Gini ratio di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,308; naik dibanding gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,306 dan turun dibanding gini ratio Maret 2023 yang sebesar 0,313. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, pada September 2024, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,41 persen. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 21,39 persen. Di Sulawesi Selatan, tren serupa juga terlihat, meskipun tingkat ketimpangan masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan pendapatan antara wilayah perkotaan seperti Makassar dan daerah perdesaan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, gini ratio cenderung hanya menurun tipis. Ketimpangan pendapatan masih cukup terasa, terutama antara petani kecil dan pelaku usaha besar, serta antara masyarakat di pusat kecamatan dan desa-desa terpencil. Keterbatasan akses terhadap layanan publik, lapangan pekerjaan yang layak, dan teknologi modern menjadi penyebab utama ketimpangan tersebut. Oleh karena itu, upaya pengurangan ketimpangan di Sidrap perlu difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, pemerataan infrastruktur, serta penguatan ekonomi lokal agar distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk tahun 2024 di kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 0,319 menurun sebesar 0,026 poin dari tahun 2023 yang sebesar 0,345 dan ditargetkan pada tahun 2025 menjadi 0,313 dan pada tahun 2026 menjadi 0,306.

Grafik 3.6
Gini Ratio Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Target Tahun 2026 (Persen)

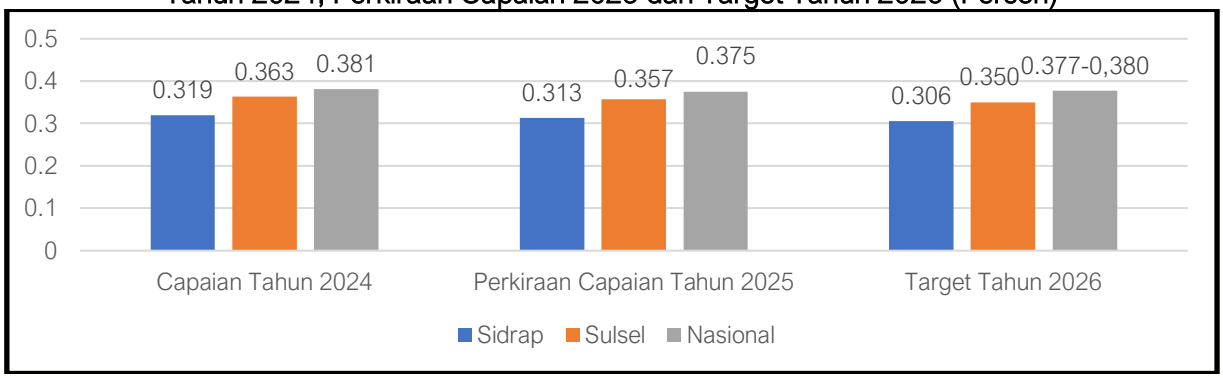

Sumber: BPS, Perubahan RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2025, Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dan Rancangan RKP Tahun 2026 (Data diolah Bapperida Kab. Sidenreng Rappang, 2025)

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian target sasaran makro ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 dan pencapaian target nasional, dimulai dari angka kemiskinan yang menurun, Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat, Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi, Tingkat Pengangguran Terbuka yang semakin rendah, Gini Ratio dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca yang menurun, serta PDRB Perkapita yang semakin meningkat. Dalam perspektif itulah arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya pada sektor pemerintah tetapi jauh lebih penting adalah untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional, maka ditetapkan indikator makro pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target Indikator Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026		
			RPJMD Kab. Sidrap	RKPD Prov. Sulsel	RKPD Kab. Sidrap
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	4,8-6,5	4,95
2	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	64,89	76,58-80,16	64,89
3	Inflasi	%	2,5 ± 1,0	2,5 ± 1,0	2,5 ± 1,0
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,84	4,01	2,84
5	Kemiskinan	%	4,45-3,55	7,08-6,85	4,45-3,55
6	Gini Rasio	Angka	0,306	0,35	0,306
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,44	N/A (berubah menjadi Indeks Modal Manusia)	75,44
8	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	13,27	33,26	13,27

Sumber: Ranhir RPJMD Kab. Sidenreng Rappang 2025-2029

3.1.2. Arah Kebijakan Nasional Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80-6,30 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US$5.870 serta

mempertahankan status Indonesia pada kategori *upper middle-income country*. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya
konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.

PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, nilai realisasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp2.093,3–2.175,3 triliun. Upaya lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor, yang tecermin dalam Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor yang ditargetkan meningkat masing-masing menjadi Rp194,30-205,31 triliun dan Rp68,04–71,90 triliun, serta dengan meningkatkan kontribusi investasi Luar Jawa menjadi 52,14–52,37 persen terhadap realisasi investasi nasional. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) diupayakan menurun ke kisaran 6,30–6,00.

Dalam upaya mencapai target investasi tersebut, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala yang dapat menghambat investasi. Salah satu aspek penting bagi iklim investasi adalah kepastian hukum, yang masih menghadapi tantangan akibat regulasi dan kewenangan yang tumpang tindih, implementasi kebijakan yang tidak konsisten, serta lemahnya penegakan hukum. Ketidakpastian hukum ini dapat mengurangi daya tarik investasi karena investor cenderung memilih negara dengan iklim investasi yang kondusif dan dapat diprediksi, baik dari segi biaya, jenis perizinan, maupun waktu pemrosesan. Oleh karena itu, upaya strategis dan mendesak untuk meningkatkan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kepastian berusaha guna memperkuat transformasi ekonomi, yang mencakup (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (ii) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan; serta (iii) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan

kemudahan investasi kepada pelaku usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor dan wilayah.

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global yang didukung oleh ekspansi pasar ekspor, peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global, serta memanfaatkan peluang di tengah ketidakpastian geopolitik global melalui strategi (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan tarif dan nontarif untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (ii) pengembangan pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, serta optimalisasi *market intelligence, business matching* dan pengamanan pasar ekspor; (iii) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan mendorong penguatan tatanan perdagangan global serta meningkatkan efektivitas implementasi *Free Trade Agreement* (FTA) dan/atau *Comprehensive Eonomic Partnership Agreement* (CEPA); (iv) peningkatan kapasitas eksportir untuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor, termasuk pelatihan ekspor dan bisnis *ecommerce* bagi pelaku UMKM, pengembangan *exporter tools* untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (v) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan database informasi pasar potensial dan *buyer* secara *real-time*; serta (vi) penguatan koordinasi kebijakan dan penyediaan data perdagangan jasa dan produk kreatif.

Tabel 3.3
Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2026 Sisi Pengeluaran (persen)

No.	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2026
1.	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,53–5,83
2.	Konsumsi Pemerintah	6,85–6,96
3.	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	6,17–7,18
4.	Ekspor Barang dan Jasa	7,05–7,17
5.	Impor Barang dan Jasa	7,34–7,50
	Pertumbuhan PDB	**5,80-6,30**

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026

Sektor industri pengolahan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,85–6,38 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai *trajectory* jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 21,20 persen di tahun 2026. Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2026 antara lain (i) beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2026, seperti proyek investasi petrokimia di Banten, pabrik sel baterai kendaraan listrik di Jawa Barat, serta proyek hilirisasi nikel ke arah baterai di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah; (ii) penerapan teknologi 4.0 yang lebih efisien dan ramah lingkungan; (iii) fasilitasi dan pendampingan sertifikasi industri hijau bagi 164 perusahaan untuk penurunan emisi

Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor *Industrial Process and Production Use* (IPPU) dan meningkatkan efisiensi produksi; serta (iv) penambahan kapasitas produksi industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mencapai 251.000 unit per tahun. Selain itu, beberapa faktor *demand side* pun diprakirakan turut menjadi pendorong kinerja industri pengolahan, seperti (i) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (ii) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali; (iii) perluasan program makan bergizi bagi anak dan ibu hamil yang mendorong permintaan subsektor industri makanan dan minuman; serta (iv) peningkatan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan yang didorong dengan kebutuhan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, penanggulangan penyakit, dan akses pelayanan kesehatan dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta.

Sektor pertanian dalam arti luas pada tahun 2026 ditargetkan mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 3,09–3,33 persen. Pertumbuhan sektor pertanian utamanya didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program MBG dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada pangan. Selain itu, program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada tahun 2026. Sektor konstruksi pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 7,80–7,91 persen, didorong oleh proyek-proyek seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan serta rumah sakit daerah dan pembangunan KI dan KEK.

Sektor perdagangan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,25–5,62 persen. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas ke pasar global, melalui strategi (i) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah; (ii) promosi dan misi dagang, serta kerja sama antardaerah di setiap provinsi; (iii) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah; (iv) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah; (v) pendampingan adaptasi *e-commerce* bagi pelaku usaha di daerah termasuk UMKM serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan *e-commerce* dan digitalisasi perdagangan; (vi) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antardaerah; (vii) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik; (viii) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya; serta (ix) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

Pada tahun 2026, rasio PDB pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60–4,70 persen serta diiringi oleh peningkatan nilai devisa pariwisata mencapai US$22,00–24,70 miliar.

Arah kebijakan pariwisata difokuskan pada peningkatan nilai tambah pariwisata yang dilakukan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Faktor-faktor pendukung kinerja sektor pariwisata meliputi (i) peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan bandara, pelabuhan dan transportasi darat yang mempermudah akses wisatawan serta peningkatan jumlah rute penerbangan langsung internasional ke Indonesia; (ii) kebijakan peningkatan kualitas SDM pariwisata; (iii) pengembangan atraksi dan *event* berkualitas meliputi peningkatan penyelenggaraan acara berskala internasional; (iv) penguatan pariwisata berkelanjutan melalui pelestarian budaya, pengembangan desa wisata berbasis komunitas, dan peningkatan sertifikasi dan regulasi untuk destinasi wisata yang ramah lingkungan; serta (v) optimalisasi pemasaran pariwisata melalui AI dan digitalisasi sektor pariwisata (*Tourism 5.0*).

Tabel 3.4
Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2026
Sisi Lapangan Usaha (Persen)

No.	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2026
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,09–3,33
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,70–1,85
3.	Industri Pengolahan	5,85–6,38
4.	Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es	5,68–6,10
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,22–2,38
6.	Konstruksi	7,80–7,91
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,25–5,62
8.	Transportasi dan Pergudangan	9,60–10,07
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,67–9,82
10.	Informasi dan Komunikasi	8,22–8,82
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,88–7,08
12.	Real Estate	2,78–2,98
13.	Jasa Perusahaan	8,57–9,20
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,87–4,15
15.	Jasa Pendidikan	4,07–4,37
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,18–9,31
17.	Jasa lainnya	7,24–7,76
	Pertumbuhan PDB	**5,80–6,30**

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka menggerakkan jalannya roda organisasi guna pencapaian tujuan, pemerintahan daerah memerlukan dukungan berbagai sumber daya. Keuangan daerah merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* melalui tata kelola pemerintahan dengan baik sehingga keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2026 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selain itu, pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang Pendapatan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola Pendapatan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian Pendapatan Daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki.

Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan realisasi penjualan industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Pendapatan Daerah merupakan kunci dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini selaras dengan visi Kabupaten Sidenreng Rappang yakni Maju dan Sejahtera dalam memajukan Pembangunan daerah melalui berbagai aspek kehidupan baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2026 diarahkan pada peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi atau memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi masing-masing OPD pengelola PAD, peningkatan efisiensi pengelolaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, koordinasi yang lebih intensif antara pusat dan daerah serta penerapan dan pemanfaatan inovasi digital untuk penyelenggaran pelayanan publik.

Sejak tahun 2025, Pemerintah Daerah mulai memberlakukan Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai Pajak Daerah yang dapat membuka potensi bertambahnya pendapatan daerah. Dalam Penerapan jenis pajak daerah baru ini telah didorong oleh beberapa langkah optimalisasi strategis seperti, sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media cetak, elektronik maupun media sosial, pendataan, penagihan, pengawasan serta monev opsen pajak serta rekonsiliasai data penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Untuk memperluas potensi pajak dan restribusi daerah, beberapa langkah konkret yang diambil oleh pemda sebagai bagian dari beberapa misi dan kebijakan pendapatan daerah, diantaranya adalah:

1. Mendorong dan membangun struktur perekonomian daerah yang kuat melalui percepatan dan pengembangan agrobisnis menuju agroindustri pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sehingga kedepannya juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor peternakan dan perikanan.
2. Keberagaman sumber penerimaan, yakni daerah mencari sumber penerimaan baru atau Peninjauan ulang potensi pendapatan yang belum tergali untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak atau retribusi tertentu.
3. Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
   a. Peningkatan penerimaan dari pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame.
   b. Pemanfaatan potensi retribusi daerah melalui peningkatan kualitas layanan publik.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan edukasi dan literasi perpajakan melalui sosialiasasi baik secara langsung maupun virtual.
5. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital. Diperlukan efisiensi dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk memaksimalkan proses pelayanan birokrasi, serta mendorong penggunaan aplikasi teknologi digital dalam pengelolaan data dan transaksi keuangan dan pengelolaan pendapatan daerah seperti implementasi sistem pembayaran elektronik untuk pajak dan retribusi daerah melalui platform QRIS, *virtual account*, dan dompet digital.
6. Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara tidak langsung dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak.

Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu tahun 2023-2024 meningkat sebesar 4,30 persen dari Rp.1.196.103.914.164,13 menjadi Rp.1.247.494.491.726,80. Target pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun

2025 meningkat menjadi Rp.1.263.931.577.000,00 atau meningkat 1,32 persen dari realisasi tahun 2024 yang disebabkan oleh adanya tambahan pajak daerah baru yaitu Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Sesuai Undang-undang HKPD, tarif Opsen PKB dan BBNKB ditetapkan dengan persentase tertentu yang bersifat *fix* (tetap) yaitu sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang (sesuai pasal 83 UU HKPD) yang bertujuan untuk memperluas ruang fiskal pemerintah kabupaten/kota. Opsen PKB dan Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB.

3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2027

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kinerja pendapatan daerah di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan dinamika yang bervariasi, dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan arah kebijakan fiskal nasional. Di tahun 2023 dan 2024, Kabupaten Sidenreng Rappang berhasil meningkatkan realisasi pendapatan daerah yang meningkat, menandakan perbaikan dalam optimalisasi pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum, meskipun masih bergantung pada transfer pusat, arah kebijakan pendapatan daerah mulai menunjukkan kecenderungan menuju kemandirian fiskal. Hal ini tercermin dari meningkatnya porsi PAD serta upaya untuk menggali potensi ekonomi lokal. Ke depan, tantangan seperti fluktuasi ekonomi nasional, tekanan fiskal pusat, dan dinamika politik daerah akan terus mempengaruhi realisasi maupun proyeksi pendapatan daerah. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan pendapatan, transparansi fiskal, serta inovasi pembiayaan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan fiskal di tingkat daerah.

3.2.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri dan mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan publik secara mandiri. PAD diperoleh dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Meningkatkan PAD menjadi tujuan strategis pemerintah daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, PAD dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi potensi PAD memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah masih menjadi penopang utama sektor pendapatan daerah. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp.184,95

milyar rupiah, mengalami peningkatan sebesar Rp.13,53 milyar rupiah (7,90 persen) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023 yang sebesar Rp.171,42 milyar rupiah. Target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp.28,06 milyar rupiah (15,17 persen) jika dibandingkan realisasi pada tahun 2024.

3.2.2.1.1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bersifat wajib bagi setiap individu atau badan usaha yang memenuhi ketentuan. Jenis-jenis pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, pemerintah dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah, memperluas cakupan layanan publik, dan memperkuat kemandirian dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemungutan pajak yang efisien, transparan, serta kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 sebesar Rp.51,70 milyar rupiah meningkat Rp.3,30 milyar rupiah (6,83 persen) dibandingkan penerimaan tahun 2023 yang sebesar Rp.48,39 milyar rupiah. Pada tahun 2025, ditargetkan menjadi sebesar Rp.82,57 milyar rupiah, meningkat Rp.30,87 milyar rupiah (59,73 persen) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

3.2.2.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh daerah. Jenis retribusi ini mencakup retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, yang semuanya diatur berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan dari retribusi daerah berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan pajak daerah yang bersifat tidak langsung, retribusi dibayarkan oleh masyarakat sebagai kompensasi atas manfaat langsung yang diterima, seperti pelayanan kebersihan, pemakaian pasar, atau izin mendirikan bangunan. Agar pemungutan retribusi efektif dan tidak membebani masyarakat, diperlukan pengelolaan yang transparan, pelayanan yang berkualitas, serta sosialisasi yang baik agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2024 sebesar Rp.8,98 milyar rupiah mengalami penurunan sebesar Rp.832,57 juta rupiah (-8,48 persen) dibandingkan penerimaan tahun 2023 yang sebesar Rp.9,81 milyar rupiah. Pada tahun 2025, ditargetkan menjadi sebesar Rp.8,90 milyar rupiah, menurun Rp.81,92 juta rupiah (-0,91 persen) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

3.2.2.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bentuk usaha lainnya. Pendapatan ini mencerminkan kontribusi dari aset-aset milik daerah yang dikelola secara profesional dan terpisah dari kekayaan pemerintah daerah, seperti saham, obligasi, atau bentuk investasi lainnya. Contohnya adalah dividen atau laba yang diperoleh dari BUMD yang bergerak di sektor air minum, energi, transportasi, maupun perdagangan. Optimalisasi hasil dari kekayaan daerah yang dipisahkan sangat bergantung pada kinerja BUMD dan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta strategi bisnis yang adaptif agar kekayaan daerah dapat dikelola secara produktif dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh positif pada tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp.5,74 milyar rupiah mengalami peningkatan Rp.49,17 juta rupiah (0,86 persen) dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2023 yang sebesar Rp.5,69 milyar rupiah. Pada tahun 2025, ditargetkan menjadi sebesar Rp.6,00 milyar rupiah, meningkat Rp.257,54 juta rupiah (4,48 persen) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

3.2.2.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan komponen PAD yang mencakup berbagai sumber pendapatan yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini bersumber antara lain dari penerimaan bunga bank, keuntungan selisih kurs, pendapatan dari denda keterlambatan, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, serta jasa giro dan pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun kontribusinya terhadap total PAD biasanya tidak sebesar komponen utama lainnya, namun lain-lain PAD yang sah tetap memegang peranan penting dalam mendukung keuangan daerah, terutama dalam meningkatkan fleksibilitas fiskal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengelola sumber-sumber ini secara cermat dan transparan, guna memastikan akuntabilitas serta meningkatkan efisiensi penerimaan daerah secara keseluruhan. Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2024 sebesar Rp.118,52 milyar rupiah, mengalami peningkatan sebesar 11,01 milyar rupiah (10,25 persen) dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp.107,51 milyar rupiah. Pada tahun 2025, ditargetkan menjadi sebesar Rp.115,54 milyar rupiah, menurun Rp.2,98 milyar rupiah (2,52 persen) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

3.2.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan salah satu sumber utama penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah

provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota. Pendapatan ini terdiri dari beberapa jenis, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta dana transfer lainnya yang bersifat spesifik maupun umum. Tujuan dari pendapatan transfer adalah untuk mendukung pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, serta membantu pembiayaan penyelenggaraan layanan publik yang menjadi kewenangan daerah. Karena sifatnya yang sangat menentukan kapasitas fiskal daerah, pengelolaan pendapatan transfer harus dilakukan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan agar dana transfer yang diterima dapat digunakan secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Realisasi pendapatan transfer mengalami peningkatan sebesar Rp.33,69 milyar rupiah (3,29 persen) dari Rp.1,02 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi Rp.1,05 triliun rupiah pada tahun 2024. Pada tahun 2025, ditargetkan menjadi sebesar Rp.1,04 triliun rupiah, menurun Rp.7,55 milyar rupiah (-0,72 persen) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

3.2.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan salah satu komponen pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari sumber-sumber di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Jenis pendapatan ini mencakup antara lain penerimaan hibah, bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, serta penerimaan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori utama pendapatan daerah, namun tetap sah menurut peraturan perundang-undangan. Meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah relatif kecil, keberadaan lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap penting sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi agar pendapatan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa menimbulkan permasalahan hukum atau administratif di kemudian hari. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023 sebesar Rp.1,91 milyar rupiah mengalami peningkatan Rp.4,15 milyar rupiah (217,17 persen) menjadi Rp.6,07 milyar rupiah di tahun 2024. Pada tahun 2025, ditargetkan menjadi sebesar Rp.2,00 milyar rupiah, menurun Rp.4,07 milyar rupiah (67,05 persen) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

Perbandingan realisasi Pendapatan Daerah selama kurun waktu 2023-2027, target capaian tahun 2025 serta proyeksi pendapatan tahun 2026 dan 2027 dari masing-masing jenis Pendapatan Daerah secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2027 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi (Rp.)		Target APBD (Rp.)	Proyeksi (Rp.)	
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Pendapatan Daerah	1.196.103.914.164,13	1.247.494.491.726,80	1.263.931.577.000,00	1.331.563.071.353,16	1.419.518.605.558,66
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	171.420.397.746,00	184.956.715.500,80	213.022.657.000,00	234.548.381.654,16	242.503.737.558,66
1.1.1	Pajak Daerah	48.396.308.690,00	51.700.996.630,00	82.579.585.000,00	95.550.862.282,16	99.862.006.805,66
1.1.2	Retribusi Daerah	9.817.068.958,00	8.984.495.217,00	8.902.572.000,00	9.180.053.900,00	9.627.086.014,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.693.280.114,00	5.742.455.882,00	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	107.513.739.984,00	118.528.767.771,80	115.540.500.000,00	122.817.465.472,00	126.014.644.739,00
	a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	12.000.000,00	1.423.550.800,00	100.000.000,00	-	-
	b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	231.825.000,00	789.160.774,59	125.000.000,00	-	200.000.000,00
	c. Hasil Kerja Sama Daerah		-	100.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
	d. Jasa Giro	1.704.570.011,00	2.043.001.835,00	1.600.000.000,00	1.000.000.000,00	1.350.000.000,00
	e. Pendapatan Bunga		23.433.109,00	-	-	-
	f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.490.320.984,00	5.151.779.270,00	787.500.000,00	500.000.000,00	525.000.000,00
	g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		5.016.506,00			
	h. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	218.810.572,00	578.105.087,00	750.000.000,00	150.000.000,00	750.000.000,00

No	Uraian	Realisasi (Rp.)		Target APBD (Rp.)	Proyeksi (Rp.)	
		2023	2024	2025	2026	2027
	i. Pendapatan Denda Pajak Daerah	217.504.582,00	120.805.884,00	-	-	-
	j. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	26.299.788,00	17.312.216,00	-	-	-
	k. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan daerah		-			
	l. Pendapatan dari Pengembalian	632.280.372,00	310.801.158,61	-	50.000.000,00	250.000.000,00
	m. Pendapatan BLUD	98.056.532.329,00	108.065.208.631,60	112.078.000.000,00	120.992.465.472,00	122.814.644.739,00
	n. Lain Pendapatan Sah Lainnya	-				
	o. Pendapatan Dana Kapitasi JKN	4.866.043.527,00				
	p. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	56.565.319,00				
	q. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	987.500,00	592.500,00			
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.022.769.516.418,13**	**1.056.467.147.194,00**	**1.048.908.920.000,00**	**1.097.014.689.699,00**	**1.177.014.868.000,00**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**931.622.355.227,00**	**988.330.791.026,00**	**975.951.228.000,00**	**1.042.014.689.699,00**	**1.122.014.868.000,00**
	a. Dana Perimbangan	849.822.898.227,00	921.641.974.026,00	908.133.478.000,00	966.191.712.699,00	1.036.191.891.000,00
	1. Dana Transfer Umum	619.822.934.179,00	693.940.454.000,00	714.100.296.000,00	729.100.296.000,00	746.191.891.000,00
	a) Dana Bagi Hasil (DBH)	16.134.459.322,00	16.237.662.000,00	16.408.405.000,00	16.408.405.000,00	18.500.000.000,00
	b) Dana Alokasi Umum (DAU)	603.688.474.857,00	677.702.792.000,00	697.691.891.000,00	712.691.891.000,00	727.691.891.000,00

No	Uraian	Realisasi (Rp.)		Target APBD (Rp.)	Proyeksi (Rp.)	
		2023	2024	2025	2026	2027
	2. Dana Transfer Khusus	229.999.964.048,00	227.701.520.026,00	194.033.182.000,00	237.091.416.699,00	290.000.000.000,00
	a) DAK Fisik	71.096.621.617,00	70.971.877.699,00	27.913.643.000,00	70.971.877.699,00	105.000.000.000,00
	b) DAK Non Fisik	158.903.342.431,00	156.729.642.327,00	166.119.539.000,00	166.119.539.000,00	185.000.000.000,00
	c) DAK Penugasan	0	0			
	d) DAK Afirmasi	0	0			
	b. Dana Insentif Daerah (DID)	20.900.516.000,00	5.478.445.000,00	6.994.773.000,00	15.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	c. Dana Desa	60.898.941.000,00	61.210.372.000,00	60.822.977.000,00	60.822.977.000,00	60.822.977.000,00
1.2.2	**Transfer Antar Daerah**	**91.147.161.191,13**	**68.136.356.168,00**	**72.957.692.000,00**	**55.000.000.000,00**	**55.000.000.000,00**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	80.388.580.691,13	63.064.400.168,00	72.957.692.000,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	10.758.580.500,00	5.071.956.000,00	-		
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**1.914.000.000,00**	**6.070.629.032,00**	**2.000.000.000,00**	**-**	**-**
1.3.1	Hibah	1.914.000.000,00	1.434.000.000,00	-		
1.3.2	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		-			
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		4.636.629.032,00	2.000.000.000,00		

Sumber: Bapenda dan BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025 (Diolah)

Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 sebesar Rp.1.247.494.491.726,80 dan tahun 2025 sebesar Rp.1.263.931.577.000 atau mengalami kenaikan sebesar 1,32 persen. Pendapatan Daerah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan sebesar 15,17 persen. Jika dirinci maka Pajak Daerah dari tahun 2024 hingga tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 59,73 persen atau bertambah Rp.30.878.588.370,00 dari Rp.51.700.996.630,00 menjadi Rp.82.579.585.000,00. Retribusi Daerah tahun 2024 hingga tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.81.923.217,00 atau sebesar 0,91 persen dari Rp.8.984.495.217,00 menjadi Rp.8.902.572.000,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 4,48 persen atau Rp.257.544.118,00 dari Rp.5.742.455.882,00 di tahun 2024 menjadi Rp.6.000.000.000,00 di tahun 2025. Untuk Lain-Lain PAD yang Sah mengalami penurunan sebesar 2,52 persen atau Rp.2.988.267.771,80 dari Rp.118.528.767.771,80 di tahun 2024 menjadi Rp.115.540.500.000,00 di tahun 2025.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa secara nominal realisasi penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan dari tahun 2024 hingga tahun 2025 sedangkan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah mengalami penurunan.

Pada tahun 2026 proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.331.563.071.353,16 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp.234.548.381.654,16; Pendapatan Transfer Rp.1.097.014.689.699,00; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp0.

Selain PAD, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang juga terus berusaha memaksimalkan pemanfaatan Pendapatan Transfer dari pusat yang diklasifikasikan sebagai Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang juga merupakan salah satu sumber-sumber Pendapatan Daerah. DAK merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAK didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) dan rencana kerja pemerintah (RKP) serta berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2023 bahwa rancangan arah kebijakan DAK memperhatikan arah kebijakan DAK dalam rencana pembangunan jangka menengah serta kerangka pendanaan jangka menengah berdasarkan perencanaan DAK lintas tahun. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan dan atau kebijakan tertentu dengan tujuan 1) mencapai prioritas nasional; 2) mempercepat pembangunan daerah; 3) mengurangi kesenjangan publik; 4) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan 5) mendukung operasionalisasi layanan publik.

Pemenuhan SPM yang dahulu diskemakan dengan DAK Reguler untuk kegiatan rutin idealnya dipenuhi melalui DAU dan penggunaannya disesuaikan dengan kinerja daerah dalam pencapaian SPM. DAK Fisik difokuskan berbasis tematik sedangkan DAK Reguler dilebur dalam formulasi DAU agar dapat mem-*boosting* pencapaian pembangunan di daerah. Tujuan dari pengaturan dan re-desain DAK Reguler menjadi DAU yang ditentukan penggunaannya adalah agar pola belanja lebih fokus pada layanan publik, pengurangan ketimpangan fiskal antar daerah dan percepatan ekualisasi layanan publik antar daerah melalui pengutamaan penggunaan DAU sesuai kinerja daerah, sedangkan DAK Tematik akan menitikberatkan pada peningkatan sinergi dan efisiensi belanja pusat, serta terciptanya keselarasan *output-outcome* antara pusat dan daerah. Di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.179.610.280.000,00 yang terbagi atas DAK Fisik sebesar Rp.12.890.741.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp.166.719.539.000,00. DAK Fisik terdiri dari Bidang Pendidikan Rp.589.765.000,00; Bidang Kesehatan Rp.7.683.713.000,00; dan Bidang Sanitasi Rp.4.617.263.000,00. Untuk DAK Non Fisik terdiri dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Rp.47.792.200.000,00; Tunjangan Guru ASN Daerah Rp.96.441.122.000,00; Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp.17.301.416.000,00 yang terdiri dari BOK Dinas Rp.6.263.541.000,00 dan BOK Puskesmas Rp.10.663.256.000,00; BOK Pengawasan Obat dan Makanan Rp.374.619.000,00; Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Rp.600.000.000,00; Bantuan Operasional Keluarga Berencana Rp.4.584.801.000,00; dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp.598.500.000,00.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu menerapkan serangkaian kebijakan Belanja Daerah yang berfokus pada peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, pengendalian utang pihak ketiga, rekrutmen tenaga PPPK dan kegiatan-kegiatan mandatori lainnya sesuai dengan regulasi yang telah diatur.

Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem, seperti program bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan pangan. Selain itu, fokus pada pengembangan keterampilan dan pelatihan kerja untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan juga penting. Program-program ini harus didesain dengan pendekatan yang holistik, berkelanjutan, dan berbasis data untuk memastikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan peningkatan kesehatan dan gizi anak merupakan faktor penting dalam mengurangi angka stunting. Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mengalokasikan dana yang signifikan untuk program pencegahan stunting, seperti program pemberian makanan tambahan, edukasi gizi

kepada ibu hamil dan balita serta perbaikan akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi yang baik.

Untuk program-program yang mendorong peningkatan investasi. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif pajak dan fasilitas bagi investor yang tertarik untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Selain itu, penting untuk memperkuat infrastruktur pendukung, seperti jalan, jembatan dan listrik, guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Dalam hal ini, kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah provinsi juga dapat ditingkatkan untuk mempercepat peningkatan investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran dengan bijak untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Investasi dalam sektor pertanian, perikanan dan peternakan dapat membantu meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan serta mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, penting untuk memperkuat sistem distribusi dan rantai pasok pangan serta melakukan pengawasan terhadap harga dan kualitas produk pangan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah juga perlu dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pegawai pemerintah daerah akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, stunting dan mendorong investasi. Selain itu, penting untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan Belanja Daerah.

Pemerintah daerah harus senantiasa melakukan pengendalian secara jangka pendek dan menengah atas kewajiban-kewajiban yang berasal dari pihak ketiga yang masih menjadi utang pemerintah daerah agar secara signifikan dan menjadi prioritas untuk diselesaikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan pemerintah daerah tanpa mengganggu pelaksanaan pembangunan daerah.

Kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku harus mendapat porsi anggaran belanja yang cukup dalam pembiayaan atau pendanaan kegiatan seperti belanja Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur, pengawasan APIP, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara serta belanja-belanja lainnya yang mengikat dan menjadi prioritas pembangunan nasional dan daerah.

3.2.3.1. Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau

barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2. Belanja Barang dan Jasa

   Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

3. Belanja Bunga

   Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

4. Belanja Subsidi

   Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Belanja Hibah

   Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

6. Belanja Bantuan Sosial

   Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.

   Berdasarkan Pasal 23 A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial

berdasarkan usulan/proposal yang diterima Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.3.2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi:

1. Belanja Modal Tanah

   Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

   Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

   Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

   Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

   Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja Aset Lainnya

   Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan untuk menganggarkan aset tetap

yang tidak memenuhi kriteria aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.2.3.3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.3.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja Transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

1. Belanja Bagi Hasil

   Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber pada pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemeritah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja Bagi Hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

   Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan

formula yaitu variabel pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan Keuangan terdiri atas:

- Bantuan Keuangan antar daerah provinsi;
- Bantuan Keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
- Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/ kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Secara rinci proyeksi Belanja Daerah sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2027 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi (Rp.)		Target APBD (Rp.)	Proyeksi (Rp.)	
		2023	2024	2025	2026	2027
2	**Belanja Daerah**	**1.151.082.329.008,64**	**1.266.456.132.250,82**	**1.281.656.577.000,00**	**1.331.563.071.353,16**	**1.419.518.605.558,66**
2.1	**Belanja Operasi**	**838.487.824.716,64**	**957.877.210.361,96**	**1.026.104.112.000,00**	**919.901.004.095,50**	**804.316.853.261,50**
2.1.1	Belanja Pegawai	472.483.506.773,00	540.153.881.905,00	617.857.772.975,00	560.763.380.000,00	520.153.881.000,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	335.407.215.461,64	346.989.604.241,96	374.355.797.730,00	343.072.624.095,50	268.097.972.261,50
2.1.3	Belanja Bunga	478.773.090,00	288.275.997,00	600.000.000,00		
2.1.4	Belanja Hibah	29.866.376.892,00	70.267.257.078,00	33.290.541.295,00	16.065.000.000,00	16.065.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	251.952.500,00	178.191.140,00	-		
2.2	**Belanja Modal**	**195.445.221.620,00**	**172.087.450.001,86**	**109.678.864.000,00**	**257.455.969.040,04**	**458.810.676.915,19**
2.2.1	Belanja Tanah	-	541.312.000,00	234.400.000,00		
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	28.809.927.970,00	43.971.274.302,00	35.824.480.517,00	34.827.624.600,00	48.000.000.000,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	82.185.556.904,00	54.199.987.160,86	32.283.151.830,00	122.010.766.599,00	144.927.781.400,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	84.109.936.746,00	63.411.175.975,00	39.882.919.453,00	100.617.577.841,04	265.882.895.515,19
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	339.800.000,00	9.963.700.564,00	1.453.912.200,00		
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**740.788.040,00**	**2.058.430.500,00**	**5.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	740.788.040,00	2.058.430.500,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2.4	**Belanja Transfer**	**116.408.494.632,00**	**134.433.041.387,00**	**140.873.601.000,00**	**144.206.098.217,62**	**146.391.075.381,97**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-		9.148.217.000,00	10.473.091.617,62	10.948.909.281,97
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	116.408.494.632,00	134.433.041.387,00	131.725.384.000,00	133.733.006.600,00	135.442.166.100,00

Sumber: BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025 (Diolah)

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar **Rp.1.331.563.071.353,16** yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar **Rp.919.901.004.095,50**; Belanja Modal sebesar **Rp.257.455.969.040,04**; Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp.10.000.000.000,00**; serta Belanja Transfer sebesar **Rp.144.206.098.217,62**. Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah tahun 2026.

Mendasarkan data realisasi belanja baik Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga maupun Belanja Transfer, maka kebijakan Belanja Daerah dirahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta fasilitas sosial yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.241.131.240.037,00** dengan rincian alokasi pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja terhadap Urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tahun 2026

No.	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	- Program Pengelolaan Pendidikan	83.775.715.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.060.000.000	
2	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	131.188.685.662	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.597.000.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
		- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.535.768.000	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Program Pengembangan Perumahan	300.000.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

No.	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.809.271.375	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.451.800.000	
6	Sosial	- Program Rehabilitasi Sosial	200.000.000	Dinas Sosial
		- Program Penanganan Bencana	144.000.000	
		- Program Penanggulangan Bencana	1.069.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Total			241.131.240.037	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, 2025

Kebijakan Belanja Daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Alokasi Belanja Daerah terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih berperspektif gender;
- Perencanaan Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- Alokasi Belanja Daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, maka program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis;
- Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi Belanja Modal diupayakan lebih besar dibanding dengan Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

Di sisi lain dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, telah ditetapkan proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2026 pada tabel di berikut ini.

Tabel 3.8
Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2026

No.	Perangkat Daerah	Periode RKPD 2026
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	388.545.198.000
2	Dinas Kesehatan	388.199.896.662
3	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	14.524.476.000
4	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	53.751.548.000
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	11.488.516.000
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.411.086.453
7	Dinas Sosial	4.271.000.000
8	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	16.359.404.000
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.252.720.000
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	16.203.021.367
11	Dinas Lingkungan Hidup	17.458.637.425
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	3.904.855.000
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.871.995.500
14	Dinas Perhubungan	14.931.557.000
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.510.455.000
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.370.585.000
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan	18.468.817.000
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.951.584.000
19	Dinas Peternakan Dan Perikanan	11.742.071.970
20	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	5.280.906.500
21	Sekretariat Daerah	35.875.674.800
22	Sekretariat DPRD	31.500.140.000
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah	8.672.839.000
24	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	170.532.597.713
25	Badan Pendapatan Daerah	16.065.314.500
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.389.617.000
27	Inspektorat	16.965.093.000
28	Kecamatan Panca Lautang	3.766.088.000
29	Kecamatan Tellu Limpoe	5.272.879.000
30	Kecamatan Watang Pulu	5.307.142.700
31	Kecamatan Maritengngae	7.383.470.040
32	Kecamatan Wattang Sidenreng	3.700.307.870

No.	Perangkat Daerah	Periode RKPD 2026
33	Kecamatan Dua Pitue	3.678.758.000
34	Kecamatan Pitu Riawa	3.214.237.000
35	Kecamatan Pitu Riase	2.180.732.000
36	Kecamatan Baranti	5.132.529.000
37	Kecamatan Panca Rijang	4.825.546.000
38	Kecamatan Kulo	1.690.046.000
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.911.729.000
Jumlah Total		1.331.563.071.500

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, 2025

Dalam upaya pencapaian target TPB/SDGs yang menjadi prioritas pembangunan memerlukan sinergi kebijakan perencanaan yakni pencapaian target, kesesuaian serta keselarasan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan. Sehingga dalam mendukung pencapaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai program-program yang mendukung pencapaian target-target TPB/SDGs agar dapat sejalan dengan tujuan RKPD untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tabel 3.9
Proyeksi Alokasi Pagu Anggaran Program Pembangunan Daerah terhadap TPB/SDGs
Tahun 2026

No.	Tujuan TPB/ SDGs		Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran 2026	Perangkat Daerah
1	**Tujuan 1**	1	Program Pemberdayaan Sosial	243.000.000	Dinas Sosial
	Tanpa Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;	2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	80.000.000	Dinas Sosial
		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	131.188.685.662	Dinas Kesehatan
		4	Program Hubungan Industrial	2.025.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		5	Program Penanggulangan Bencana	1.069.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	**Tujuan 2**	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	546.816.500	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
	Tanpa Kelaparan: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;	2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	81.909.400	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	131.188.685.662	Dinas Kesehatan
3	**Tujuan 3**	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	131.188.685.662	Dinas Kesehatan
	Kehidupan Sehat dan Sejahtera: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.150.000.000	Dinas Kesehatan
		3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	255.156.592.000	Dinas Kesehatan
		4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.211.159.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Tujuan TPB/ SDGs		Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran 2026	Perangkat Daerah
		5	Program Pengendalian Penduduk	359.222.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	**Tujuan 4**	1	Program Pengelolaan Pendidikan	83.775.715.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendidikan Berkualitas: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;	2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.060.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	**Tujuan 5**	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	40.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;	2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	26.000.000	
		3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	30.000.000	
		4	Program Perlindungan Khusus Anak	15.000.000	
		5	Program Perlindungan Perempuan	15.000.000	
6	**Tujuan 6**	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.535.768.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
	Air Bersih dan Sanitasi Layak: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.597.000.000	
		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	131.188.685.662	Dinas Kesehatan
7	**Tujuan 7** Energi Bersih dan Terjangkau: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;		-	-	-

No.	Tujuan TPB/ SDGs		Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran 2026	Perangkat Daerah
8	**Tujuan 8**	1	Program Perekonomian dan Pembangunan	803.900.000	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.245.379.360	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.075.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	175.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		5	Program Pengembangan UMKM	50.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	550.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		7	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.000.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		8	Program Pemasaran Pariwisata	587.517.000	
9	**Tujuan 9**	1	Program Penyelenggaraan Jalan	24.950.000.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
	Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inkusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;	2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	550.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.075.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	175.000.000	

No.	Tujuan TPB/ SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2026	Perangkat Daerah
10	**Tujuan 10**	1	Program Pemberdayaan Sosial	243.000.000	Dinas Sosial
	Berkurangnya kesenjangan: Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara;	2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	80.000.000	Dinas Sosial
		3	Program Administrasi Pemerintah Desa	55.628.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
11	**Tujuan 11**	1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	750.000.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan: Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	2	Program Penanggulangan Bencana	1.069.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	**Tujuan 12**	1	Program Pengelolaan Persampahan	10.257.194.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;				
13	**Tujuan 13**	1	Program Penanggulangan Bencana	1.069.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya				

No.	Tujuan TPB/ SDGs		Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran 2026	Perangkat Daerah
14	Tujuan 14 Ekosistem Laut: Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	1	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	20.000.000	Dinas Petenakan dan Perikanan
15	Tujuan 15 Ekosistem Daratan: Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.780.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
16	Tujuan 16	1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	783.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh: Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkat	2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	26.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	30.000.000	
		4	Program Perlindungan Khusus Anak	15.000.000	
		5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.192.672.000	Sekretariat Daerah
		6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	146.082.252.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		7	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	40.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		8	Program Pencatatan Sipil	125.450.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Tujuan TPB/ SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2026	Perangkat Daerah
17	**Tujuan 17**	1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.222.000.000	Badan Pendapatan Daerah
	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	2	Program Pencatatan Sipil	125.450.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, 2025 (Diolah)

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal perhitungan Pendapatan dan Belanja diperkirakan defisit, maka ditetapkan Pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya., pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2022-2024 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk Penyertaan Modal dan Pembayaran Cicilan Pokok. Sesuai dengan Pasal 22 dan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan diarahkan antara lain untuk;

- Penggunaan SiLPA tahun 2025 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2026, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
- SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan antara lain untuk:

- Pembayaran/pelunasan pokok utang jangka panjang yang berakhir di tahun 2025.

Selengkapnya realisasi, target dan proyeksi pembiayaan tahun 2023-2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2027

No	Uraian	Realisasi (Rp.)		Target APBD (Rp.)	Proyeksi (Rp.)	
		2023	2024	2025	2026	2027
	Surplus/defisit	**45.021.585.155,49**	**(18.961.640.524,02)**	**(17.725.000.000,00)**	**-**	**-**
3	**Pembiayaan**					
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**24.477.102.422,00**	**67.248.687.155,49**	**20.000.000.000,00**	**-**	**-**
3.1.1	Penggunaan SiLPA	24.477.102.422,00	67.248.687.155,49	20.000.000.000,00	-	-
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2.250.000.422,00**	**2.274.086.498,00**	**2.275.000.000,00**	**-**	**-**
3.2.1	Penyertaan Modal					
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok	2.250.000.422,00	2.274.086.498,00	2.275.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto	**22.227.102.000,00**	**64.974.600.657,49**	**17.725.000.000,00**	**-**	**-**
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	67.248.687.155,49	46.012.960.133,47	-	-	-

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025 (Diolah)

3.2.5. Pendanaan Pembangunan Lainnya

Pendanaan selain dari APBD dimaksudkan untuk menambah kapasitas pendanaan bagi daerah. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang diharapkan dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan, antara lain:

3.2.5.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dalam kerangka pembangunan nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran sentral sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, serta tuntutan percepatan pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia, APBN tidak hanya difokuskan pada belanja langsung, tetapi juga digunakan untuk mendorong berbagai skema pendanaan pembangunan lainnya.

Pendanaan pembangunan lainnya dari APBN mengacu pada strategi pembiayaan alternatif yang bersumber atau didukung oleh APBN, namun tidak dilakukan melalui belanja langsung (*direct spending*), melainkan melalui mekanisme yang lebih inovatif dan kolaboratif. Skema-skema ini digunakan untuk memperkuat peran APBN sebagai katalis pembangunan serta untuk mengatasi keterbatasan fiskal pemerintah.

3.2.5.2. Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Dalam upaya mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, peran sektor swasta, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta, menjadi sangat penting. Salah satu bentuk kontribusi nyata sektor usaha terhadap pembangunan adalah melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Melalui CSR, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari operasional bisnisnya.

1. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

   PKBL adalah program CSR yang khusus dilaksanakan oleh BUMN berdasarkan Peraturan Menteri BUMN. PKBL bertujuan untuk:

   - Meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui kemitraan dengan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
   - Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar melalui kegiatan bina lingkungan.

   a. Program Kemitraan

      Program Kemitraan dilakukan dengan memberikan pinjaman lunak atau pembinaan kepada UMKM agar dapat berkembang, mandiri, dan naik kelas. Bentuk bantuan ini dapat berupa:

      - Pembiayaan usaha kecil

- Pelatihan dan pendampingan
- Pemberian fasilitas produksi

Tujuannya adalah menciptakan kemandirian ekonomi di masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan di sektor riil.

b. Program Bina Lingkungan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional BUMN. Kegiatannya meliputi:

- Bantuan pendidikan (beasiswa, fasilitas sekolah)
- Bantuan kesehatan (pengobatan gratis, pembangunan fasilitas kesehatan)
- Bantuan untuk sarana dan prasarana umum
- Bantuan dalam penanggulangan bencana
- Pelestarian lingkungan

Melalui Program Bina Lingkungan, BUMN turut serta dalam pembangunan sosial, budaya, dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

TJSL merupakan pengembangan konsep CSR yang lebih komprehensif, mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana perusahaan terutama yang menjalankan kegiatan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan TJSL.

TJSL mencakup 3 (tiga) pilar utama:

- Sosial: Pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.
- Lingkungan: Pengelolaan dampak lingkungan, efisiensi energi, konservasi alam, dan pengurangan emisi.
- Ekonomi: Pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.

TJSL dilaksanakan tidak hanya oleh BUMN, tetapi juga oleh perusahaan swasta sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan sekitar. TJSL menjadi bagian dan strategi bisnis yang terintegrasi, bukan sekadar program filantropi.

3.2.5.3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang sebelumnya dikenal sebagai *Public Private Partnership* (PPP), adalah suatu bentuk kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanan publik untuk kepentingan umum. Skema KPBU bertujuan untuk mengatasi keterbatasan pendanaan pemerintah, mempercepat penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan publik.

KPBU dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, pembagian risiko yang adil, serta tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan badan usaha. Dalam pelaksanaannya, KPBU dapat melibatkan pendanaan swasta untuk membangun, mengelola, dan memelihara infrastruktur publik seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, rumah sakit, sistem air minum, dan sektor lainnya.

Pemerintah, dalam hal ini dapat berupa kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, bertindak sebagai penanggung jawab proyek dan bertugas menyusun perencanaan, pemilihan badan usaha mitra, serta melakukan pengawasan. Sementara itu, badan usaha sebagai mitra swasta memberikan kontribusi berupa pendanaan, keahlian teknis, dan manajemen operasional.

Skema KPBU memberikan sejumlah keuntungan, antara lain:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran negara secara langsung.
2. Transfer risiko kepada pihak swasta, terutama pada fase konstruksi dan operasional.
3. Peningkatan kualitas layanan publik melalui inovasi dan efisiensi dari pihak swasta.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konektivitas.

Adapun jenis-jenis KPBU yang umum digunakan di Indonesia meliputi:

1. *Build Operate Transfer* (BOT)
2. *Build Own Operate Transfer* (BOOT)
3. *Build Transfer Operate* (BTO)
4. *Design Build Finance Operate Maintain* (DBFOM)
5. *Operation and Maintenance* (O&M)

Untuk mendukung pelaksanaan KPBU, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan, seperti Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga menyediakan skema dukungan seperti *Viability Gap Fund* (VGF) dan jaminan pemerintah untuk menarik minat investor.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan infrastruktur nasional dan keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah, KPBU menjadi alternatif yang strategis dan berkelanjutan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, KPBU tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga wadah kolaborasi antara sektor publik dan swasta demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3.2.5.4. Pembiayaan Utang Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga,

perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

- Kewajiban Jangka Pendek

  Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Panjang

  Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

  1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
  2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang
  3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan yang disetujui.

Tabel 3.11
Rekapitulasi Utang Tahun Anggaran 2020-2024 Per 31 Desember 2024

No.	Tahun Anggaran (N)	Saldo Utang Per 31 Desember N-1		Saldo Awal Utang	Penambahan Utang		Pengurangan Utang		Sisa Utang		Saldo Akhir Utang (Operasi + Modal)
		Belanja Operasi	Belanja Modal	(Operasi + Modal)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 + 4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = 3 + 6 - 8*	*11 = 4 + 7 - 9*	*12 = 10 + 11*
4	2020	24.690.677.789,00	172.851.753.804,91	197.542.431.593,91	12.029.840.945,00	7.492.246.779,00	19.404.023.491,00	43.590.696.135,45	17.316.495.243,00	136.753.304.448,46	154.069.799.691,46
5	2021	17.316.495.243,00	136.753.304.448,46	154.069.799.691,46	57.118.106.761,67	23.319.129.814,00	13.155.053.582,00	59.356.729.958,76	61.279.548.422,67	100.715.704.303,70	161.995.252.726,37
6	2022	61.279.548.422,67	100.715.704.303,70	161.995.252.726,37	58.913.080.381,00	11.627.218.210,00	55.092.202.457,67	56.681.147.343,00	65.100.426.346,00	55.661.775.170,70	120.762.201.516,70
7	2023	65.100.426.346,00	55.661.775.170,70	120.762.201.516,70	39.070.282.269,60	5.654.290.667,00	62.401.353.936,90	24.097.598.610,00	41.769.354.678,70	37.218.467.227,70	78.987.821.906,40
8	2024	41.769.354.678,70	37.218.467.227,70	78.987.821.906,40	34.759.467.233,30	518.851.865,00	31.157.796.980,00	22.766.737.702,25	45.371.024.932,00	14.970.581.390,45	60.341.606.322,45

Sumber: BKAD Kab. Sidrap, 2025

Grafik 3.7
Rekapitulasi Utang Tahun Anggaran 2020-2024 Per 31 Desember 2024

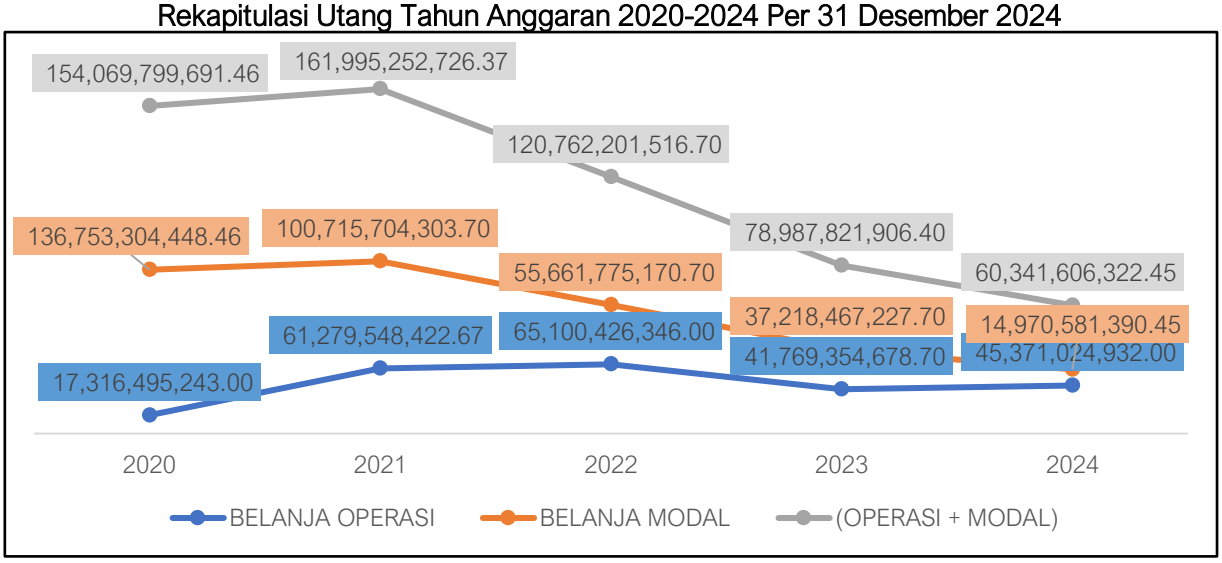

Sumber: BKAD Kab. Sidrap, 2025

Berdasarkan Tabel dan Grafik di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2024, total utang Kabupaten Sidenreng Rappang semakin menurun dari Rp.154.069.799.691,46 menjadi Rp.60.341.606.322,45. Total utang tersebut dapat dirinci menjadi utang Belanja Operasi Rp.17.316.495.243,00 di tahun 2020 menjadi Rp.45.371.024.932,00 di tahun 2024 dan utang Belanja Modal Rp.136.753.304.448,46 pada tahun 2020 menjadi Rp.14.970.581.390,45 pada tahun 2024.

3.2.6. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah. Mendasarkan pada proyeksi Pendapatan pada tabel sebelumnya, Kebijakan Kemampuan Keuangan Daerah diprioritaskan pada pemenuhan Belanja Operasi dan Pengeluaran Pembiayaan. Belanja Operasi antara lain terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Hibah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari rencana penyertaan modal pemerintah dan pembayaran pokok utang.

Tabel 3.12
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2027

No	Uraian	APBD (Rp) 2024	Target 2025	Proyeksi	
				2026	2027
1	Pendapatan	1.247.494.491.726,80	1.263.931.577.000,00	1.331.563.071.353,16	1.419.518.605.558,66
2	Pencairan Dana Cadangan				
3	SiLPA atau Penerimaan Daerah lainnya	46.012.960.133,47	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	APBD (Rp) 2024	Target 2025	Proyeksi	
				2026	2027
	Total Penerimaan	1.293.507.451.860,27	1.263.931.577.000,00	1.331.563.071.353,16	1.419.518.605.558,66
	Dikurangi:				
4	Belanja Pegawai + BTT+ Belanja Transfer	676.645.353.792,00	763.731.373.975,00	714.969.478.217,62	676.544.956.381,97
5	Pengeluaran pembiayaan	2.274.086.498,00	2.275.000.000,00	0,00	0,00
	Kapasitas Riil kemampuan Keuangan	614.588.011.570,27	497.925.203.025,00	616.593.593.135,54	742.973.649.176,69

Sumber: BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025 (Diolah)

Selanjutnya perhitungan kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas, yaitu:

Prioritas Pertama, untuk membiayai Belanja Wajib yang ketentuannya diatur di dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran Kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota dialokasikan secara memadai dari APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk mencapai target belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia;
d. Belanja yang bersumber dari Pajak Rokok, 70 persen untuk DBH Kabupaten/Kota, 30 persen hak Provinsi dengan komposisi: 50 persen *Specific Grant* dan 50 persen *Block Grant*, dari 50 persen *Spesific Grant*, 75 persen untuk iuran JKN, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Sedangkan Belanja Mengikat (*Mandatory Expenditure*), digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja JKN yang bersumber dari Pajak Rokok dan Belanja DAK BOS, Belanja Operasional Kantor, Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD), pemenuhan penerapan pelayanan dasar berupa implementasi urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pembinaan dan pengawasan APIP, peningkatan SDM berupa Pendidikan dan Pelatihan, kegiatan instruksional dan untuk memenuhi belanja yang

ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan lainnya seperti Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

Prioritas Kedua, untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Prioritas Ketiga, untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

Tabel 3.13
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2027

No.	Uraian	Target APBD 2025 APBD Pokok (Rp)	Proyeksi	
			2026 (Rp)	2027 (Rp)
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		**497.925.203.025,00**	**616.593.593.135,54**	**742.973.649.176,69**
1	Prioritas I	224.066.341.361,25	277.467.116.911,00	334.338.142.129,51
2	Prioritas II	174.273.821.058,75	215.807.757.597,44	260.040.777.211,84
3	Prioritas III	99.585.040.605,00	123.318.718.627,11	148.594.729.835,34

Sumber: BKAD dan Bapperida Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2025 (Diolah)

BAB IV

PRORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran operasional tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2025-2030, yang mencerminkan komitmen pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Sebagai dokumen perencanaan strategis, RKPD 2026 juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 untuk memastikan bahwa rencana kerja tahunan tetap berada dalam koridor pembangunan jangka panjang daerah dan mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Penyusunan RKPD 2026 menandai transisi penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena tidak lagi menggunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 sebagai acuan. Perubahan ini mengindikasikan penyesuaian dokumen perencanaan dengan periode kepemimpinan baru dan visi pembangunan jangka panjang yang telah diperbarui, sehingga tercipta kesinambungan yang lebih efektif antara perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Proses penyusunan RKPD 2026 dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2025-2029. Pendekatan simultan ini memungkinkan terciptanya sinkronisasi yang optimal antara target pembangunan jangka menengah dengan rencana kerja tahunan, serta memastikan koordinasi yang intensif antar pemangku kepentingan. Melalui proses penyusunan yang terkoordinasi, RKPD 2026 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang mandiri, tetapi merupakan penjabaran operasional dari target pembangunan jangka menengah daerah. Hal ini menjamin terciptanya keberlanjutan dan konsistensi dalam pelaksanaan Program pembangunan daerah dari tahun ke tahun, serta menciptakan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan nasional, RKPD 2026 telah disusun dengan mempertimbangkan keselarasan terhadap Prioritas Nasional Asta Cita yang termuat dalam RPJMN 2025-2029. Asta Cita yang merupakan delapan cita-cita utama bangsa Indonesia menjadi acuan strategis dalam menerjemahkan Program pembangunan daerah agar sejalan dengan arah pembangunan nasional. Keselarasan ini bukan hanya sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD 2026 telah dirancang untuk mendukung implementasi Asta Cita di tingkat daerah, khususnya dalam aspek-aspek yang relevan dengan karakteristik dan potensi daerah. Dukungan ini diwujudkan melalui integrasi prioritas

pembangunan nasional ke dalam Program pembangunan daerah, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan kondisi lokal. Hal ini memungkinkan terciptanya sinergi antara pembangunan nasional dan daerah yang lebih efektif dan efisien.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD 2026 merupakan penjabaran operasional dari tujuh tujuan dan tiga belas sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029. Tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Renja perangkat daerah Tahun 2026.

Tujuan dan sasaran, beserta indikator dan target yang telah diselaraskan dengan Visi dan Misi KDH terpilih yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA	M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan	T.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	1	Meningkatnya ketahanan pangan dan produktivitas sektor pertanian
				2	Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri
	M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif	T.2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3	Meningkatnya pendapatan masyarakat
				4	Menurunnya tingkat pengangguran
	M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua	T.3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif	5	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata
				6	Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	
					terjangkau dan responsif
				7	Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif
	M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan	T.4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	8	Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca
				9	Menurunnya tingkat risiko bencana
	M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius	T.5	Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama	10	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
				11	Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda
	M6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital	T.6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif	12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi
				13	Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
	M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	T.7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	14	Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029

Tabel 4.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta Indikator dalam RPJMD

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA	M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan	T 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah		1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.05	4.25	4.95	5.95	6.25	6.65	6.95
			1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dan produktivitas sektor pertanian	2	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian (%)	-0.78	3.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00
				3	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	87.92	88.27	88.62	88.98	89.34	89.69	90.05
			2. Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri	4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	15.09	15.54	16.32	17.14	17.90	19.25	20.60
	M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha,	T 2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		5	Tingkat Kemiskinan (%)	5.02	4.6-4.01	4.45-3.55	4.31-3.54	4.21-3.51	3.86-2.86	3.57-2.75
				6	Rasio Gini (poin)	0.319	0.313	0.306	0.300	0.294	0.288	0.281
			3. Meningkatnya pendapatan masyarakat	7	PDRB Perkapita (juta rupiah)	59.31	61.83	64.89	68.75	73.04	77.90	93.31

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif		4. Menurunnya tingkat pengangguran	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.02	2.93	2.84	2.75	2.66	2.57	2.47
	M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua	T 3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang inklusif		**9**	**Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)**	**74.81**	**75.10**	**75.44**	**75.80**	**76.19**	**76.47**	**76.79**
			5. Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata	10	Indeks Pendidikan (Indeks)	63.56	63.89	65.33	66.82	68.34	69.91	71.52
			6. Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif	11	Indeks Kesehatan (Indeks)	83.77	84.00	84.40	84.79	85.19	85.59	85.99
			7. Terwujudnya kesetaraan gender yang inklusif	12	Indeks pembangunan gender (Indeks)	93.32	93.64	93.85	94.07	94.29	94.51	94.73
	M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang	T 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya		**13**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**67.96**	**73.92**	**74.14**	**74.35**	**74.56**	**74.77**	**74.98**
			8. Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca	14	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	3.04	11.94	13.27	14.33	15.52	16.72	17.92

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Berkelanjutan	alam yang berkelanjutan	9. Menurunnya tingkat risiko bencana	15	Indeks Resiko Bencana (indeks)	119.20	118.90	118.40	117.90	117.40	116.90	116.40
	M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius	T 5. Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama		**16**	**Indeks Harmoni Indonasia (IHaI)**	**N/A**	**67.25**	**69.87**	**72.49**	**74.11**	**77.73**	**80.35**
			10. Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	17	Angka kriminalitas (kasus)	834	820	766	661	555	450	344
			11. Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda	18	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	18.71	18.99	19.34	19.72	20.12	20.62	21.32
				19	Indeks Pembangunan Kebudayaan (indeks)	55.26	55.36	55.46	55.56	55.66	55.76	55.86
				20	Indeks Pembangunan Pemuda (indeks)	64.13 (2023)	70.13	72.93	75.53	77.93	80.13	82.13
	M6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan	T 6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif,		**21**	**Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)**	**68.51**	**70.29**	**72.07**	**73.86**	**75.64**	**77.42**	**79.2**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
	yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital	transparan, akuntabel dan inovatif	12. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi	22	Nilai SAKIP (poin)	65.08	67.15	69.22	71.29	73.36	75.43	77.5
				23	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	47.72	50.58	53.62	56.84	60.25	63.86	67.69
				24	Indeks SPBE (Indeks)	3.04	3.22	3.42	3.62	3.84	4.07	4.31
			13. Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	25	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	1.73	2.03	2.33	2.64	2.94	3.24	3.54
				26.	Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks)	75.46	76.59	77.74	78.91	80.09	81.29	82.51
	M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	T 7. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas		27	**Indeks Daya Saing Daerah (Pilar Infrastruktur)**	**3.28**	**3.29**	**3.3**	**3.33**	**3.35**	**3.36**	**3.38**
			14. Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah	28	Indeks Infrastruktur (Indeks)	81.24	76.91	77.38	77.86	78.41	78.90	79.25

Sumber: RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan arahan dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari sistem pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Nasional secara keseluruhan. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pencapaian target-target pembangunan di tingkat yang lebih luas. Keterpaduan ini tercermin dalam harmonisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional, serta penyelarasan dalam penggunaan sumber daya dan implementasi Program-Program prioritas. Melalui pendekatan pembangunan yang terintegrasi, diharapkan dapat tercipta sinergi yang optimal antara berbagai tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing tinggi untuk kemajuan bangsa dan negara.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Dalam rangka pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029 yaitu **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"** dengan 8 (delapan) misi yang sekaligus merupakan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelendupan;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta cita tersebut memuat 17 Program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta Langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins.* Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai Program pembangunan nasional.

Tabel 4.3
17 Program Prioritas Presiden dalam RPJMN 2025-2029

17 Program Prioritas	
1	Swasembada pangan, energi, dan air
2	Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi dengan meningkatkan kesetaraan, kesamaan hak publik, dan digitalisasi
4	Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5	Pemberantasan kemiskinan dengan penurunan kemiskinan di bawah enam persen
6	Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7	Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat berupa peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8	Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi
9	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11	Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13	Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
14	Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16	Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah
17	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Sumber: RPJMN 2025-2029.

Tabel 4.4
8 Program Hasil Terbaik Cepat Presiden

8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*)	
1	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil

8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*)	
2	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten
3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5	Melanjutkan dan menambahkan Program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/Polri, dan pejabat negara
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan
8	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen

Sumber: RPJMN 2025-2029.

RKP 2026 disusun dengan merujuk kepada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 juga telah mengintegrasikan arahan presiden yang tersebar dalam 8 Prioritas Nasional Asta Cita, 17 Prioritas Presiden, 8 Program Hasil Terbaik Cepat dan 5 Direktif Presiden yaitu:

1. Digitalisasi Pendidikan;
2. Sekolah Rakyat;
3. Pengentasan Kemiskinan;
4. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
5. Pengelolaan Sampah.

Oleh sebab itu, RKP 2026 menjadi landasan arah dan intervensi kebijakan yang akan dijadikan acuan pembangunan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

4.2.1.1. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2026

Berdasarkan prioritas nasional dan arahan serta kebijakan pembangunan Tahun 2026, maka ditetapkan Tema RKP 2026 adalah **"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestic, menjawab tantangan global dan memastikan pembangunan yang berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, ketahanan pangan dan energi menjadi prasyarat menuju kemandirian bangsa, sementara produktivitas dan inklusifitas ekonomi menjadi jembatan untuk mencapai pertumbuhan yang merata dan bereadilan.

4.2.1.2. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Sasaran pembangunan nasional Tahun 2026 yang termuat dalam Rancangan RKP Tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 4.5
Sasaran Pembangunan Nasional 2026

No.	Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator	Target 2026		
			Nasional	Provinsi	Kab.Sidrap
1	Pertumbuhan tinggi berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.8-6.3	4.8-5.8	4.95
		Pendapatan Nasional Bruto/ PDRB perkapita (juta rupiah)	5.870 (U$)	86.9-89.5	64.89
		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37.14	33.46	13.27
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76.67	77.82	74.14
2	Penurunan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	6.5-7.5	6.85-7.08	4.65-4.45
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.44-4.96	3.64-4.03	2.84-2.87
		Rasio Gini (Nilai)	0.377-0.380	0.358	0.306
		Kemiskinan Ekstrem (%)	0.0-0.5		
3	Sumber Daya Manusia Berkualitas	Indeks Modal Manusia (nilai)/ Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	0.57	0.53	76.80

Sumber: Rancangan RKP 2026

RKP 2026 memetakan arah kebijakan umum untuk setiap wilayah berfokus pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah serta pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Pembangunan wilayah dalam RKP 2025 diarahkan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dengan mendorong peningaktan kontribusi PDRB dari Kawasan Timur Indonesia. Fokus tahun 2026 diarahkan pada penguatan ek osistem percepatan pembangunan daerah. **Tema pembangunan kewilayah untuk Provinsi Sulawesi Selatan adalah " Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA"**.

Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lumbung pangan dan penghasil pertanian berperan sebagai pemasok pangan utama dalam rantai superhub ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan luas pertanian yang signifikan dan produktivitas yang tinggi, Sidenreng Rappang menjadi salah satu tulang punggung ketahanan pangan regional. Peran ini diperkuat melalui pengembangan system pertanian modern yang menerapkan teknologi pertanian canggih, system pengairan yang efisien dan keragaman komoditas pangan strategis. Bukan hanya ketahanan pangan, Kabupaten Sidenreng Rappang juga memanfaatkan pengembangan rantai nilai industry pertanian sebagai dukungan industry berbasis sumber daya alam. Hal ini mencakup pembangunan industry pengolahan hasil pertanian seperti penggilingan padi modern dan pabrik pakan ternak serta industry berbasis komoditas unggulan lainnya yang sedang dikembangkan. Kabupaten Sidenreng Rappang tidak hanya berperan sebagai produsen pangan tradisional, tetapi berubah menjadi pusat industry pertanian modern yang terpadu dalam sistem pusat ekonomi

Sulawesi Selatan, dengan tetap mempertahankan fungsi utamanya sebagai lumbung pangan yang berkelanjutan.

Gambar 4.1
Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan

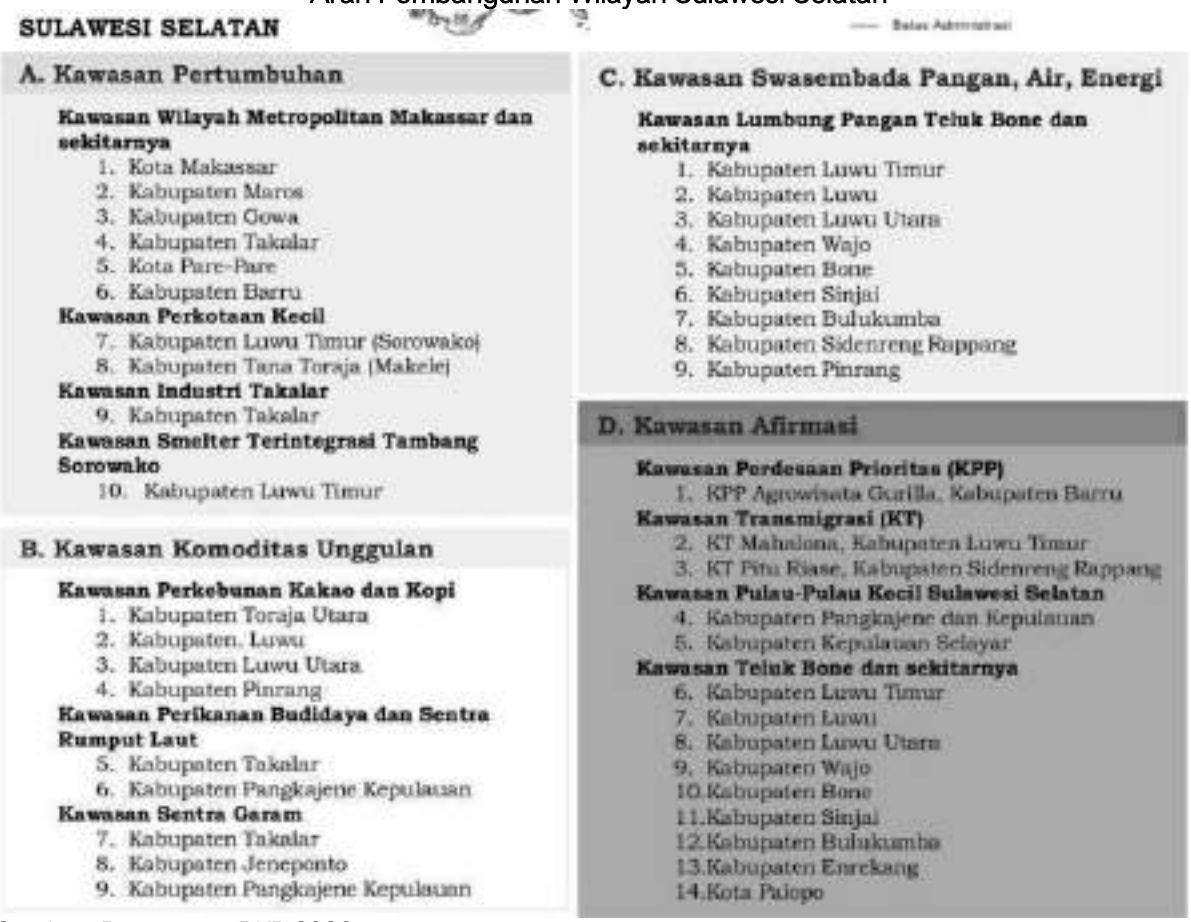

Sumber: Rancangan RKP 2026

Sedangkan untuk *Highlight* intervensi yang tertuang dalam Rancangan RKP 2026 untuk wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Highlight Intervensi RKP 2025 untuk Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Sulawesi Selatan	<u>Direktif Presiden:</u> Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk Program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor.

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Sulawesi Selatan	Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama.
	Provinsi Sulawesi Selatan	Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan.
	Provinsi Sulawesi Selatan	Direktif Presiden: Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi pembelajaran.
	Provinsi Sulawesi Selatan	Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. *Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia.*
	Provinsi Sulawesi Selatan	Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output; • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN).

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Sulawesi Selatan	Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9	Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya • C1: Kabupaten Luwu Timur • C2: Kabupaten Luwu • C3: Kabupaten Luwu Utara • C4: Kabupaten Wajo • C5: Kabupaten Bone • C6: Kabupaten Sinjai • C7: Kabupaten Bulukumba • C8: Kabupaten Sidenreng Rappang • C9: Kabupaten Pinrang	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, dengan output: • Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Peternakan; • Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan; • Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Perkebunan; • Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura; • Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan; • Pembangunan DI Gilireng dan DI Baliase serta rehabilitasi DI Kelara Karalloe, DI Pamukkulu, DI Saddang, dan DI Tinco; • Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan; • Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang (Udang Beku, Udang Olahan, Chitin Chitosan, Glukosamin), nila, dan rumput laut (Karagenan, Tepung Agar-Agar, Biostimulan); • Pengembangan koperasi sektor produksi; • Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; • Pengembangan kewirausahaan;
D2, D3	Kawasan Transmigrasi (KT) • D2: KT Mahalona, Kawasan Luwu Timur • D3: KT Pitu Riase, Kawasan Sidenreng Rappang	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pitu Riase di Kab. Sidenreng Rappang, melalui fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi, pemberian bantuan sarana produksi pertanian dan pengembangan jalan di kawasan transmigrasi.

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, dengan output: • Peningkatan kapasitas dan pengembangan infrastruktur SDM transportasi • Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, • Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan.
	Provinsi Sulawesi Selatan	Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T, dengan output: • Bantuan PSU bidang perumahan • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT) • Pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh • Pemenuhan akses air minum aman, • Pengembangan SPAM terintegrasi (salah satunya optimalisasi SPAM Curio), • Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik setempat/ Terpusat • Pembangunan TPS3R • SPAM berbasis masyarakat • Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik (PLTM dan PLTA), • Perluasan DAK Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan • Percepatan konversi BBM ke BBG • Pembangunan infrastruktur jaringan gas untuk industri dan rumah tangga • Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk, • Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, • Pengembangan SDM TIK • Digitalisasi masyarakat, • Perluasan layanan penyiaran digital
		Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, dengan output: • Pengembangan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi, • Peningkatan RS Tipe D menjadi tipe C di Kab. Toraja Utara, • Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak • Penyediaan dan optimalisasi sarana posyandu, puskesmas, dan rumah sakit • Pemenuhan dan peningkatan alat kesehatan, • Vaksin imunisasi Program, • BMHP untuk Skrining Kesehatan, • Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		• Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA • Melakukan sosialisasi Program pemeriksaan kesehatan gratis • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan Program pemeriksaan kesehatan gratis • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis • Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis • Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis • Alkes yang didampingi dalam pelaksanaan riset dan uji klinik • Penugasan khusus, pelatihan dan bantuan pendidikan SDM kesehatan • Transformasi digital (TK), • Implementasi layanan *telemedicine,* • Lembaga yang menggunakan pendekatan biomedis dan genom kesehatan
		Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), serta Pencegahan dan penurunan Stunting dan kematian ibu dan anak, dengan output: • Obat dan perbekalan kesehatan Program pencegahan dan pengendalian TB, • Purwarupa alat deteksi penyakit, • Masyarakat mendapatkan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, • Bahan Pencegahan dan Pengendalian TBC (LP-6), • Layanan informasi dan edukasi TBC • Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT) • Menanggulangi TB di tempat kerja • Memberikan bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh
		• Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC • Melakukan penemuan aktif dan skrining mobile • Mendorong pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta • Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan Program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat • Koordinasi pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS • Layanan deteksi dini dan respons kejadian penyakit menular • Obat dan perbekalan kesehatan Program pengendalian malaria • Layanan informasi dan edukasi malaria • Layanan surveilans dan deteksi dini kusta dan frambusia • Daerah mendapat pembinaan Program kusta dan frambusia di daerah

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		• Kemitraan pencegahan dan pengendalian zoonosis
		• Ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari buffer stock, • Tenaga kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, • Infrastruktur air minum berbasis masyarakat, • Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, • Penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, • Layanan imunisasi pendukung pencapaian Stunting, • Kegiatan surveilans gizi dan KIA, • Fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita, • Kampanye dan penyebarluasan informasi pencegahan Stunting • Peningkatan Pelayanan Kespro dan KB, • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon), • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja, • Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Program Kesehatan • Lingkungan yang Responsif Gender (Stunting/AKI, perubahan iklim, kespro)
		• Melakukan pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional • Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) • Meningkatkan pelatihan petugas penjamah makanan • Memberdayakan komunitas masyarakat dan pelaku usaha • Melakukan penguatan koordinasi dukungan lintas sektor
	Provinsi Sulawesi Selatan	• Pengembangan kawasan pertanian, perikanan, dan peternakan, dengan output:
		• bantuan sarana dan prasarana pertanian • Optimasi Lahan, • Cetak Sawah, • SID Cetak Sawah, • Kawasan Padi, • Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian, • Pembangunan Embung Pertanian • Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya • Revitalisasi tambak budi daya ikan air payau • Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan • Pengembangan pangan akuatik

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		• Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan
		• Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor peternakan • Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan • Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan • Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura • Sarana pascapanen tanaman perkebunan • Prasarana pengolahan tanaman perkebunan • Sarana pengolahan tanaman perkebunan • Sertifikasi produk • Bantuan Hijauan Pakan Ternak • Benih ternak unggul • Bibit ternak unggul • Sertifikasi benih/bibit ternak • Sertifikasi benih/bibit ternak upt • Bantuan ternak ruminansia perah • Bantuan ternak ruminansia potong
		• Bantuan ternak unggas • Bantuan ternak lainnya • Layanan kesehatan hewan • Koperasi sektor produksi, peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, pengembangan kewirausahaan • Pengembangan industri dan UMKM halal, • Peningkatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, • Penguatan ekosistem halal, • Penguatan keuangan syariah dan penguatan dana sosial syariah
	Provinsi Sulawesi Selatan	Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, dengan output:
		• Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru satuan PAUD • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SD
		• Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SMP • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SMA Menyediakan sarana madrasah untuk menunjang pembelajaran

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, rural heritage, pemanfaatan cagar budaya di kawasan karst (Geopark Maros Pangkep), dan revitalisasi budaya Bahari serta pengembangan teknologi tradisional Kapal Pinisi (Kabupaten Bulukumba), dengan output: • Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan • Cagar budaya, ODCB dan OPK yang dilestarikan • Desa pemajuan kebudayaan • Data dan informasi warisan budaya • Koleksi, cagar budaya nasional, dan benda budaya yang dikelola, • Pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan pada kawasan karst,
	Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: • Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan • Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan • Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan • Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses Pembangunan • Pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian layanan bagi korban perkawinan anak melalui penguatan data, koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
	Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan output: • Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai, • Penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi laut • Prasarana kawasan pesisir tangguh yang diserahkan ke masyarakat/pemda • Luas kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi • Pengembangan ruang terbuka hijau dan • Peningkatan kapasitas mitigasi bencana, • Koordinasi dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana • Penguatan desa/kelurahan tangguh bencana • Kawasan konservasi perairan yang operasional,
		• Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya, • Destinasi wisata alam yang dikembangkan sarprasnya, • Fasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat dalam pemanfaatan jasa wisata

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		• Pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air • Penyelamatan mata air yang berperan krusial • Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Konservasi • Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati • Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat • Peningkatan produktivitas hasil kehutanan, • Pengembangan produk melalui agroforestri, • Pengembangan kapasitas pengelola kawasan,
		• Penguatan kelompok perhutanan sosial, • Perlindungan serta pengamanan hutan • Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di das yang dipulihkan, • Penguatan perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), • Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) • Sarana SAR rafting boat, prasarana search and rescue (SAR),
		• Pembangunan ekosistem aksi dini, penguatan instrumen peringatan dini bencana, • Penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, • Penataan bangunan kawasan rawan bencana • Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional
	Provinsi Sulawesi Selatan	Percepatan pelaksanaan reforma agraria, dengan output: • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.

Sumber: Rancangan RKP 2026

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki posisi strategis dalam arah kebijakan pembangunan wilayah Sulawesi Selatan sesuai RKP 2026, di mana Sidenreng Rappang diarahkan sebagai salah satu kabupaten pendukung Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi dalam Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone. Posisi ini sejalan dengan visi Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis modern, yang diperkuat oleh potensi sumber daya alam dan lokasinya sebagai penghubung jalur Palopo-Toraja, berjarak sekitar 200 km dari Makassar. Potensi Sidenreng Rappang untuk mendukung arah pengembangan sebagai bagian dari Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone sangat signifikan. Dengan luas wilayah 188.325 Ha, dengan lahan sawah seluas 51.389 Ha yang didominasi oleh sawah irigasi (65%) selanjutnya sawah tadah hujan 32% dan rawa lebak 3%, dengan luas panen padi sebesar 86.549 Ha dan produksi padi sebesar 477.856 ton yang menjadika Sidenreng Rappang sebagai daerah dengan produksi padi keempat terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Sektor hortikultura juga menonjol dengan produksi cabai rawit (1.173

ton), cabai besar (117,9 ton), dan kacang panjang (101,7 ton) pada 2024, terutama di Kecamatan Panca Rijang dan Pitu Riawa, sementara buah-buahan seperti durian (109.701 kuintal) dan pisang (77.931 kuintal) memperkuat ketahanan pangan. Perkebunan menyumbang kakao (3.065 ton), kelapa (1.237 ton), dan kopi (308,5 ton), dengan potensi pengembangan lada dan cengkeh di Pitu Riase. Sektor peternakan juga unggul, dengan populasi sapi potong (23.959 ekor), ayam petelur (4.094.117 ekor), dan produksi telur ayam petelur (42.217.758 kg) pada 2024, menjadikan Sidrap salah satu penghasil telur terbesar di Sulawesi Selatan. Perikanan, dengan produksi perairan umum (2.333,7 ton) dan budidaya (1.488,42 ton), turut mendukung diversifikasi pangan.

Kawasan Transmigrasi Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi salah satu KT Prioritas Nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2026. KT Pitu Riase menawarkan potensi besar dengan luas 27.139,20 Ha dari total 95.139,78 Ha, yang dinilai layak untuk transmigrasi berdasarkan kesesuaian lahan, terutama kategori S1/S2 yang mendukung pertanian produktif. Infrastruktur jalan yang relatif baik memfasilitasi distribusi barang dan jasa, sementara potensi ekonomi mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan industri kecil. Daya tarik pariwisata seperti Taman Wisata Puncak Bila dan Air Terjun Salu Maridi di Desa Bila Riase dan Compong memperkuat nilai kawasan sebagai destinasi wisata alam yang dapat meningkatkan ekonomi lokal. Komoditas unggulan yang diarahkan untuk pengembangan di Pitu Riase meliputi pertanian seperti padi, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu; hortikultura seperti cabe rawit dan kacang panjang; tanaman farmakologi seperti jahe dan kunyit; serta perkebunan seperti kakao, cengkeh, jambu mete, kemiri, kelapa, kopi arabika, dan lada. Sektor peternakan mencakup sapi, kerbau, kambing, serta ayam buras dan ras. Meski memiliki potensi besar, kurangnya pembibitan untuk komoditas seperti kakao dan cengkeh menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan hasil produksi.

Analisis pengembangan wilayah menunjukkan bahwa Pitu Riase terstruktur dalam tiga Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dengan luas masing-masing 8.415,89 Ha (SKP A), 9.221,61 Ha (SKP B), dan 9.097,28 Ha (SKP C), mencakup 17 Satuan Permukiman (SP). Aksesibilitas saat ini bergantung pada transportasi darat, namun memerlukan pengembangan jaringan jalan baru untuk menghubungkan antar-SKP dan SP. Sektor ekonomi basis seperti pertanian dan konstruksi memiliki nilai Location Quotient (LQ) lebih dari satu, menandakan potensi ekspor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi Pitu Riase mengadopsi pendekatan kewilayahan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan hierarki perkotaan kelas III. Rencana ini mencakup pembangunan permukiman baru dan pugar, pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) di Barukku seluas 413,42 Ha, serta pembangunan infrastruktur

seperti jalan arteri dan lintas wilayah untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, yang menjadi prioritas utama dalam pengembangan kawasan.

Kawasan Pitu Riase memiliki potensi signifikan dengan lahan luas, kepadatan penduduk rendah (24.997 jiwa, 30 jiwa/km²), dan peluang pengembangan agribisnis serta pariwisata. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur transportasi dan kebutuhan pelepasan Hutan Lindung (HL) untuk Area Penggunaan Lain (APL) perlu diatasi. Rekomendasi meliputi pengusulan kawasan dalam RTRW Kabupaten Sidrap, pengurusan pelepasan HL di wilayah Lombo, peningkatan pembangunan jalan antar-kecamatan, dan penguatan pembibitan untuk komoditas unggulan guna memaksimalkan potensi ekonomi. Sidrap memiliki posisi strategis sebagai penghubung jalur Palopo-Toraja, berjarak 200 km dari Makassar, mendukung distribusi komoditas Pitu Riase ke pasar regional. Potensi pariwisata diperkuat oleh PLTB Sidrap, ladang kincir angin terbesar di Indonesia, yang menjadi destinasi wisata edukatif. Dalam RKP 2026, Sidrap bersinergi dengan Kabupaten Luwu Timur untuk memperkuat Program transmigrasi melalui kerja sama antardaerah, sejalan dengan konsep Transmigrasi 5.0 yang menekankan transformasi pembangunan kawasan berbasis kebutuhan lokal dan konektivitas regional.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang teralhir dijabarkan dari Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Adapun tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yaitu ***"Peningkatan Kualitas SDM Yang Berahlak dan Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif",*** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

PD1.	Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi;
PD2	Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan local, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal;
PD3	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
PD4	Peningkatan ekonomi dan fiscal daerah yang modern dan berdaya saing;
PD5	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan;
PD6	Transformasi digital dan tata Kelola pemerintahan yang berintegrasi, adaptif, dan melayani berbasis digital;

PD7	Peningkatan layanan padat karya dan berwawasan lingkungan;
PD8	Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, dijabarkan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kualitas Modal Manusia, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan secara merata;
   2) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif.
b. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Adaptif, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya kualitas demokrasi;
   2) Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan;
   3) Meningkatnya kualitas generasi dan kesetaraan gender.
c. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan;
   2) Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global inklusif;
   3) Meningkatnya stabilitas fiscal dan ekonomi makro daerah;
   4) Meningkatnya pembangunan perdesaan;
   5) Menurunnya angka pengangguran.
d. Meningkatnya Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
e. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegras, Adaptif dan Inovatif, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
   1) Terwujudnya birokrasi yang akuntabel, adaptif dan inovatif.
f. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan, Tangguh Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya pengelolaan infrastruktur;
   2) Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

4.2.3. Prioritas, Sasaran dan Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 disusun untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah Terpilih yaitu **"Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera"** yang menjadi landasan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029. RKPD 2026 menitikberatkan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui pendekatan yang inklusif dan terintegrasi.

Untuk mencapai visi RPJMD 2025-2029, maka ditetapkan delapan misi strategis sebagai landasan operasional pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Membangun struktur perekonomian daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis menuju agroindustri pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang adaptif;
3. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua;
4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradat dan religius;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital;
7. Mengembangkan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 pada hakikatnya merupakan penajaman fokus, perluasan cakupan, dan kelanjutan berkelanjutan dari prioritas pembangunan tahun-tahun sebelumnya yang telah menunjukkan hasil positif dan memerlukan penguatan lebih lanjut. Penetapan prioritas ini dilakukan sebagai respons strategis terhadap dinamika permasalahan pembangunan yang terus berkembang dan semakin kompleks, dengan tetap memperhatikan proyeksi tantangan masa depan serta kendala-kendala yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan. Prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dirumuskan melalui pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan upaya penyelesaian permasalahan mendasar pembangunan daerah, respons terhadap isu-isu strategis yang muncul, serta implementasi arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Perumusan prioritas ini juga memastikan terciptanya sinergitas dan keterpaduan antara agenda pembangunan nasional dengan kebutuhan spesifik pembangunan daerah, sehingga setiap Program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya memberikan dampak optimal bagi kemajuan daerah tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan. Prioritas pembangunan disjikan sebagai berikut:

PD1	Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah melalui Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan;
PD2	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan;
PD3	Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas;
PD4	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana;
PD5	Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius;
PD6	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
PD7	Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas.

Berdasarkan kerangka prioritas pembangunan yang telah dirumuskan secara komprehensif tersebut, penetapan tema pembangunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 menjadi langkah strategis untuk merangkum seluruh agenda prioritas ke dalam satu visi yang terpadu dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 adalah **"Ketahanan Pangan, SDM Unggul dan Ekonomi Berkelanjutan"** yang mencerminkan fokus pembangunan pada tiga pilar utama yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Ketahanan pangan dimaksudkan untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas, SDM unggul bertujuan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan produktif, sementara ekonomi berkelanjutan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan ramah lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2026 difokuskan pada sasaran pembangunan sebagaimana pada sajian tabel berikut di bawah ini:

Tabel 4.7
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan		Sasaran		No	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target	
								2025	2026
PD1. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah melalui Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan	T.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah			1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.05	4.25	4.95
			1	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan produktivitas sektor pertanian	2	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian (%)	-0.78	3	5
					3	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	87.92	88.27	88.62
			2	Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri	4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	15.09	15.54	16.32
PD2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan	T.2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat			5	Tingkat Kemiskinan (%)	5.02	4.6-4.01	4.45-3.55
					6	Rasio Gini (Indeks)	0.319	0.313	0.306
			3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	7	PDRB Perkapita (juta rupiah)	59.31	61.83	64.89
			4	Menurunnya tingkat pengangguran	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.02	2.93	2.84
PD3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas	T.3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif			9	Indeks Pembangunan Manusia	74.81	75.10	75.44
			5	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata	10	Indeks Pendidikan	63.56	63.89	65.33
			6	Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif	11	Indeks Kesehatan	83.77	84.00	84.40

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan		Sasaran		No	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target	
								2025	2026
			7	Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif	12	Indeks pembangunan gender	93.32	93.64	93.85
PD4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	T.4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan			13	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)**	**67.96**	**73.92**	**74.14**
			8	Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca	14	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	3.04	11.94	13.27
			9	Menurunnya tingkat risiko bencana	15	Indeks Resiko Bencana (indeks)	119.20	118.90	118.40
PD5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius	T.5	Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama			16	**Indeks Harmoni Indonasia (IHal)**	**N/A**	**67.25**	**69.87**
			10	Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	17	Angka kriminalitas (kasus)	834	820	766
			11	Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda	18	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	18.71	18.99	19.34
					19	Indeks Pembangunan Kebudayaan (indeks)	55.26	55.36	55.46
					20	Indeks Pembangunan Pemuda lindeks)	64.13 (2023)	70.13	72.93
PD6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	T.6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif			**21**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**68.51**	**70.29**	**72.07**
			12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi	22	Nilai SAKIP	65.08	67.15	69.22
					23	Indeks Inovasi Daerah	47.72	50.58	53.62
					24	Indeks SPBE	3.04	3.22	3.42

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan		Sasaran		No	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target	
								2025	2026
			13	Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	25	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	1.73	2.03	2.33
					26	Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks)	75.46	76.59	77.74
PD7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas	**T.7**	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas			**27**	**Indeks Daya Saing Daerah (Pilar Infrastruktur)**	**3.28**	**3.29**	**3.3**
			14	Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah	28	Indeks Infrastruktur	81.24	76.91	77.38

Sumber: RPJMD Tahun 2025-2029; diolah.

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026

Berdasarkan isu strategis serta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasran pembangunan daerah. strategi dan arah kebijakan sebagaiman tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Adapun rumusan strategi untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Strategi Pembangunan Tahun 2026

St.1	Pemetaan, identifikasi dan pengembangan wilayah komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan
St.2	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan, termasuk pengembangan infrastruktur sistem irigasi serta pembangunan dan rehabilitasi jalan tani
St.3	Peningkatan kapasitas SDM petani/peternak/nelayan dan penyuluh
St.4	Implementasi Program "pupuk lancar" untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani dan "listrik masuk sawah" untuk mendukung pompa irigasi, cold storage, dan alat pertanian modern
St.5	Penguatan sistem pengendalian hama dan penyakit secara terpadu serta pengembangan sistem asuransi pertanian untuk mitigasi risiko gagal panen
St.6	Peningkatan kapasitas produksi, pengembangan bibit unggul dan kemandirian pakan
St.7	Implementasi Program IP 300 untuk mendukung penanaman tiga kali setahun melalui optimalisasi pengelolaan lahan, penyediaan varietas tanaman cepat panen, dan koordinasi jadwal tanam
St.8	Pembentukan dan penguatan Brigade Pangan sebagai kelompok masyarakat untuk mendukung produktivitas pertanian melalui koordinasi sumber daya, penerapan praktik pertanian modern, dan pengawasan Program IP 300
St.9	Pengembangan kawasan pertanian terintegrasi (integrated farming), mekanisasi pertanian di sentra produksi serta Penerapan teknologi pertanian modern dan inovasi
St.10	Identifikasi sentra-sentra potensial untuk pengembangan produk unggulan daerah
St.11	Pemetaan potensi pemanfaatan produk unggulan untuk pengembangan ekonomi lokal
St.12	Pengembangan kemitraan antara petani, pelaku industri dan pengolahan
St.13	Penguatan akses pasar dan jaringan pemasaran serta fasilitasi pengembangan rantai pasok produk unggulan daerah
St.14	Standarisasi mutu dan sertifikasi produk agroindustri
St.15	Penguatan daya tarik produk unggulan daerah berbasis kearifan lokal dan penguatan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah
St.16	Menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, Penguatan pengendalian inflasi daerah untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi rumah tangga
St.17	Penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan pariwisata ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah
St.18	Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin dan rentan untuk intervensi tepat sasaran serta peningkatan peran dan fungsi TKPKD

St.19	Peningkatan efektivitas dan perluasan cakupan bantuan sosial, penguatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan
St.20	Peningkatan Kemanfaatan dan Keberlanjutan Sistem Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendampingan dan Peningkatan Keterampilan khusus bagi kelompok miskin dan rentan
St.21	Penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes dan Penyusunan rencana pengembangan UMKM berbasis potensi lokal
St.22	Fasilitasi akses permodalan, dan pemasaran bagi UMKM, pengembangan kemitraan koperasi dan UMKM termasuk implementasi Program Koperasi Merah Putih untuk pembentukan koperasi desa/kelurahan yang mendukung rantai pasok agroindustri local dan pengembangan Program UMKM Maju
St.23	Pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing serta pengembangan potensi wirausaha generasi Z dan milenial
St.24	Pengembangan Program ekonomi produktif untuk pemberdayaan keluarga miskin dan rentan
St.25	Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan Program pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja
St.26	Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui sektor ekonomi kreatif dan pariwisata serta pengembangan kawasan transmigrasi prioritas nasional
St.27	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal
St.28	Pemetaan, identifikasi serta Pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan anak tidak sekolah/putus sekolah dan Implementasi Program pemberian makanan bergizi gratis
St.29	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta pemerataan pendistribusian tenaga kependidikan secara proporsional
St.30	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
St.31	Pengembangan budaya literasi di semua tingkat pendidikan dan masyarakat serta penguatan pendidikan karakter dan soft skills
St.32	Pengembangan sekolah unggulan percontohan, Pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi serta implementasi Program Sekolah Rakyat
St.33	Penyusunan basis data kepesertaan Program BPJS Kesehatan Gratis dan penanganan stunting
St.34	Perluasan cakupan BPJS Kesehatan Gratis
St.35	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan status gizi ibu dan anak serta Implementasi Program "Anak-Anak Sidrap Sehat"
St.36	Peningkatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, akses layanan kesehatan berkualitas ke daerah terpencil serta peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan
St.37	Implementasi Program kesehatan promotif dan preventif berbasis masyarakat dalam rangka deteksi dini dan penanganan masalah kesehatan
St.38	Penguatan sistem pencegahan penyakit dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang komprehensif
St.39	Penyusunan kerangka regulasi daerah yang komprehensif tentang perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, anak, dan penyandang disabilitas)
St.40	Pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui Implementasi Program penguatan ketahanan keluarga
St.41	Pengembangan Program ekonomi produktif bagi perempuan dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan

St.42	Peningkatan aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas
St.43	Penguatan keberdayaan dan resiliensi kelompok rentan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar
St.44	Penguatan regulasi lingkungan hidup serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi Program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"
St.45	Pengelolaan lingkungan secara terpadu berbasis pelibatan stakeholder dan partisipasi masyarakat
St.46	Pengendalian pencemaran lingkungan, air, tanah dan udara
St.47	Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan Penataan ruang terbuka hijau
St.48	Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan
St.49	Penguatan regulasi mitigasi bencana serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi Program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"
St.50	Penguatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana
St.51	Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku yang mengganggu ketertiban sosial
St.52	Penguatan sistem keamanan terpadu dan peningkatan koordinasi antar lembaga dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
St.53	Meningkatkan dialog antarumat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung harmoni sosial dan mencegah konflik sosial
St.54	Peningkatan dukungan dan fasilitasi pemerintah terhadap kegiatan keagamaan, peningkatan sarana prasarana tempat ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan serta penguatan kapasitas tokoh agama dalam pembangunan sosial kemasyarakatan yang inklusif
St.55	Melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan lokal melalui penyelenggaraan festival, acara budaya, dan revitalisasi cagar budaya
St.56	Mengoptimalkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan keterampilan, karakter disiplin, dan potensi generasi muda berlandaskan nilai agama dan budaya lokal
St.57	Penyederhanaan proses birokrasi dan regulasi serta Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah
St.58	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengembangan inovasi pemerintahan
St.59	Pengembangan sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi
St.60	Penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit serta peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan terintegrasi
St.61	Pengembangan mekanisme pengawasan internal yang efektif dan preventif untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas KKN
St.62	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik
St.63	Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik
St.64	Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan optimalisasi sistem pengaduan pelayanan publik
St.65	Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan optimalisasi sistem pengaduan pelayanan publik

St.66	Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik serta kepatuhan dalam penerapan SOP pelayanan publik
St.67	Pemantapan sistem pelayanan publik yang terintegrasi, transparan, dan responsif
St.68	Identifikasi dan pemetaan kebutuhan infrastruktur prioritas
St.69	Meningkatkan alokasi dana infrastruktur melalui berbagai sumber pendanaan
St.70	Peningkatan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, perumahan layak huni, drainase dan permukiman melalui implementasi Program Nasional 3 Juta Rumah untuk pembangunan dan renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terintegrasi dengan pengembangan kawasan permukiman yang didukung fasilitas sanitasi dan drainase
St.71	Merehabilitasi dan membangun jalan jembatan serta infrastruktur transportasi darat untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperkuat sektor ekonomi unggulan
St.72	Menerapkan sistem pemeliharaan rutin infrastruktur daerah dan infrastruktur perhubungan darat guna memastikan fungsi jangka panjang dan efisiensi penggunaan

Untuk mengetahui keterkaitan dan keselarasan antara kebijakan RKPD Tahun 2026 dengan tujuan, sasaran dan strategi, maka disajikan tabel berikut:

Tabel 4.8
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2026

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
Visi " Kabupaten Sidenreng Rappang Maju Dan Sejahtera"	M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan	T.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	1	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian	Mengoptimalkan potensi kawasan komoditas unggulan, peningkatan infrastruktur dan kapasitas SDM, penyediaan pupuk, pengendalian hama, pengembangan bibit dan pakan, stabilisasi harga, implementasi Program IP 300, penguatan Brigade Pangan, serta penerapan teknologi modern dan mekanisasi	St.1	Pemetaan, identifikasi dan pengembangan wilayah komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan
							St.2	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan, termasuk pengembangan infrastruktur sistem irigasi serta pembangunan dan rehabilitasi jalan tani
							St.3	Peningkatan kapasitas SDM petani/peternak/nelayan dan penyuluh
							St.4	Implementasi Program "pupuk lancar" untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani dan "listrik masuk sawah" untuk mendukung pompa irigasi, cold storage, dan alat pertanian modern
							St.5	Penguatan sistem pengendalian hama dan penyakit secara terpadu serta pengembangan sistem asuransi pertanian untuk mitigasi risiko gagal panen
							St.6	Peningkatan kapasitas produksi, pengembangan bibit unggul dan kemandirian pakan

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
							St.7	Implementasi Program IP 300 untuk mendukung penanaman tiga kali setahun melalui optimalisasi pengelolaan lahan, penyediaan varietas tanaman cepat panen, dan koordinasi jadwal tanam
							St.8	Pembentukan dan penguatan Brigade Pangan sebagai kelompok masyarakat untuk mendukung produktivitas pertanian melalui koordinasi sumber daya, penerapan praktik pertanian modern, dan pengawasan Program IP 300
							St.9	Pengembangan kawasan pertanian terintegrasi (integrated farming), mekanisasi pertanian di sentra produksi serta Penerapan teknologi pertanian modern dan inovasi
				2	Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri	Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui identifikasi dan pemetaan sentra potensial, penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industri, peningkatan akses pasar dan rantai pasok, standarisasi	St.10	Identifikasi sentra-sentra potensial untuk pengembangan produk unggulan daerah
							St.11	Pemetaan potensi pemanfaatan produk unggulan untuk pengembangan ekonomi lokal
							St.12	Pengembangan kemitraan antara petani, pelaku industri dan pengolahan
							St.13	Penguatan akses pasar dan jaringan pemasaran serta fasilitasi pengembangan rantai pasok produk unggulan daerah

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
						mutu serta sertifikasi produk agroindustri, penguatan promosi berbasis kearifan lokal, pengendalian inflasi daerah, dan pembangunan kawasan ekonomi unggulan	St.14	Standarisasi mutu dan sertifikasi produk agroindustri
							St.15	Penguatan daya tarik produk unggulan daerah berbasis kearifan lokal dan penguatan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah
							St.16	Menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, Penguatan pengendalian inflasi daerah untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi rumah tangga
							St.17	Penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan pariwisata ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah
	M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif	T.2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin, peningkatan efektivitas bantuan sosial dan layanan dasar, penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes berbasis potensi lokal, fasilitasi akses permodalan dan pemasaran,	St.18	Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin dan rentan untuk intervensi tepat sasaran serta peningkatan peran dan fungsi TKPKD
							St.19	Peningkatan efektivitas dan perluasan cakupan bantuan sosial, penguatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan
							St.20	Peningkatan Kemanfaatan dan Keberlanjutan Sistem Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendampingan dan Peningkatan Keterampilan khusus bagi kelompok miskin dan rentan

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
						pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing, serta pemberdayaan wirausaha generasi Z dan milenial	St.21	Penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes dan Penyusunan rencana pengembangan UMKM berbasis potensi lokal
							St.22	Fasilitasi akses permodalan, dan pemasaran bagi UMKM, pengembangan kemitraan koperasi dan UMKM termasuk implementasi Program Koperasi Merah Putih untuk pembentukan koperasi desa/kelurahan yang mendukung rantai pasok agroindustri local dan pengembangan Program UMKM Maju
							St.23	Pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing serta pengembangan potensi wirausaha generasi Z dan milenial
							St.24	Pengembangan Program ekonomi produktif untuk pemberdayaan keluarga miskin dan rentan
				4	Menurunnya tingkat pengangguran	Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan penyerapan tenaga	St.25	Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan Program pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja
							St.26	Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui sektor ekonomi kreatif dan pariwisata serta pengembangan kawasan transmigrasi prioritas nasional

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
						kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal	St.27	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal
	M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua	T.3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif	5	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata	Pemetaan dan penanggulangan anak tidak sekolah, implementasi Program makanan bergizi gratis, peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik, penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang memadai, pengembangan budaya literasi, pendidikan karakter, dan soft skills, serta penguatan sekolah unggulan percontohan dengan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi	St.28	Pemetaan, identifikasi serta Pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan anak tidak sekolah/putus sekolah dan Implementasi Program pemberian makanan bergizi gratis
							St.29	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta pemerataan pendistribusian tenaga kependidikan secara proporsional
							St.30	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
							St.31	Pengembangan budaya literasi di semua tingkat pendidikan dan masyarakat serta penguatan pendidikan karakter dan soft skills
							St.32	Pengembangan sekolah unggulan percontohan, Pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi serta implementasi Program Sekolah Rakyat

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
				6	Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif	Perluasan jangkauan dan cakupan BPJS Kesehatan, penguatan Program pencegahan dan penanganan stunting, peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur kesehatan terutama di daerah terpencil, serta penguatan upaya promotif-preventif berbasis masyarakat dengan pendekatan keluarga.	St.33	Penyusunan basis data kepesertaan Program BPJS Kesehatan Gratis dan penanganan stunting
							St.34	Perluasan cakupan BPJS Kesehatan Gratis
							St.35	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan status gizi ibu dan anak serta Implementasi Program "Anak-Anak Sidrap Sehat"
							St.36	Peningkatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, akses layanan kesehatan berkualitas ke daerah terpencil serta peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan
							St.37	Implementasi Program kesehatan promotif dan preventif berbasis masyarakat dalam rangka deteksi dini dan penanganan masalah kesehatan
							St.38	Penguatan sistem pencegahan penyakit dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang komprehensif
				7	Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif	Penguatan kerangka regulasi daerah, pencegahan perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender, pengembangan	St.39	Penyusunan kerangka regulasi daerah yang komprehensif tentang perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, anak, dan penyandang disabilitas)
							St.40	Pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
						Program ekonomi produktif, peningkatan aksesibilitas infrastruktur publik, dan pembangunan ketahanan keluarga yang adaptif terhadap perubahan sosial.		Implementasi Program penguatan ketahanan keluarga
							St.41	Pengembangan Program ekonomi produktif bagi perempuan dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan
							St.42	Peningkatan aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas
							St.43	Penguatan keberdayaan dan resiliensi kelompok rentan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar
	M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan	T.4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	8	Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca	Penguatan regulasi lingkungan, peningkatan sarana-prasarana, pengelolaan lingkungan terpadu berbasis partisipasi masyarakat, pengendalian pencemaran air dan udara, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan penataan ruang terbuka hijau	St.44	Penguatan regulasi lingkungan hidup serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi Program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"
							St.45	Pengelolaan lingkungan secara terpadu berbasis pelibatan stakeholder dan partisipasi masyarakat
							St.46	Pengendalian pencemaran lingkungan, air, tanah dan udara
							St.47	Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan Penataan ruang terbuka hijau
							St.48	Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
				9	Menurunnya tingkat risiko bencana	Penguatan regulasi mitigasi bencana, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan sistem peringatan dini, serta penguatan kapasitas masyarakat dan lembaga penanggulangan bencana.	St.49	Penguatan regulasi mitigasi bencana serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi Program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"
							St.50	Penguatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana
	M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius	T.5	Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama	10	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial masyarakat melalui penguatan koordinasi antarlembaga, pendidikan nilai-nilai kebangsaan, dan pencegahan konflik sosial.	St.51	Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku yang mengganggu ketertiban sosial
							St.52	Penguatan sistem keamanan terpadu dan peningkatan koordinasi antar lembaga dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
							St.53	Meningkatkan dialog antarumat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung harmoni sosial dan mencegah konflik sosial

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
				11	Berkembangnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta kearifan lokal	Memperkuat nilai-nilai religius, melestarikan budaya lokal, dan memberdayakan pemuda melalui dukungan kegiatan keagamaan, pelestarian cagar budaya, serta pembinaan keterampilan berbasis nilai agama dan kearifan lokal	St.54	Peningkatan dukungan dan fasilitasi pemerintah terhadap kegiatan keagamaan, peningkatan sarana prasarana tempat ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan serta penguatan kapasitas tokoh agama dalam pembangunan sosial kemasyarakatan yang inklusif
							St.55	Melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan lokal melalui penyelenggaraan festival, acara budaya, dan revitalisasi cagar budaya
							St.56	Mengoptimalkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan keterampilan, karakter disiplin, dan potensi generasi muda berlandaskan nilai agama dan budaya lokal
	M6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital	T.6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif	12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi	Penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan, penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan inovasi pemerintahan, pengembangan administrasi	St.57	Penyederhanaan proses birokrasi dan regulasi serta Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah
							St.58	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengembangan inovasi pemerintahan
							St.59	Pengembangan sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
						berbasis elektronik yang terintegrasi, peningkatan kapasitas ASN berbasis merit, penguatan pengawasan internal, pemantapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis elektronik	St.60	Penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit serta peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan terintegrasi
							St.61	Pengembangan mekanisme pengawasan internal yang efektif dan preventif untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas KKN
							St.62	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik
				13	Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik, peningkatan sarana-prasarana pelayanan publik, optimalisasi sistem pengaduan masyarakat, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik, serta pemantapan penerapan SOP pelayanan publik	St.63	Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik
							St.64	Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan optimalisasi sistem pengaduan pelayanan publik
							St.65	Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan optimalisasi sistem pengaduan pelayanan publik
							St.66	Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik serta kepatuhan dalam penerapan SOP pelayanan publik
							St.67	Pemantapan sistem pelayanan publik yang terintegrasi, transparan, dan responsif

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
	M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	T.7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	14	Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah	Mengembangkan infrastruktur daerah yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan melalui perencanaan berbasis kebutuhan prioritas, optimalisasi sumber pendanaan, pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung	St.68	Identifikasi dan pemetaan kebutuhan infrastruktur prioritas
							St.69	Meningkatkan alokasi dana infrastruktur melalui berbagai sumber pendanaan
							St.70	Peningkatan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, perumahan layak huni, drainase dan permukiman melalui implementasi Program Nasional 3 Juta Rumah untuk pembangunan dan renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terintegrasi dengan pengembangan kawasan permukiman yang didukung fasilitas sanitasi dan drainase
							St.71	Merehabilitasi dan membangun jalan jembatan serta infrastruktur transportasi darat untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperkuat sektor ekonomi unggulan
							St.72	Menerapkan sistem pemeliharaan rutin infrastruktur daerah dan infrastruktur perhubungan darat guna memastikan fungsi jangka panjang dan efisiensi penggunaan

Sumber: RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, diolah.

Apabila arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah diselaraskan dengan Program prioritas pembangunan daerah, maka disajikan table sebagai berikut:

Tabel 4.9
Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi		Program Prioritas Daerah	Indikator	OPD Penanggungjawab
Kabupaten Sidenreng Rappang Maju Dan Sejahtera	M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan	T.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	1	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian	Mengoptimalkan potensi kawasan komoditas unggulan, peningkatan infrastruktur dan kapasitas SDM, penyediaan pupuk, pengendalian hama, pengembangan bibit dan pakan, stabilisasi harga, implementasi Program IP 300, penguatan Brigade Pangan, serta penerapan teknologi modern dan mekanisasi	St.1	Pemetaan, identifikasi dan pengembangan wilayah komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan
							St.6	Peningkatan kapasitas produksi, pengembangan bibit unggul dan kemandirian pakan		Jumlah Produksi Daging (Kg) Jumlah Produksi Telur (Kg)	Dinas Peternakan dan Perikanan
							St.2	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan, termasuk pengembangan infrastruktur sistem irigasi serta pembangunan dan rehabilitasi jalan tani	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
									Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Dinas Peternakan dan Perikanan
									Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Dinas Peternakan dan Perikanan
							St.7	Implementasi Program IP 300 untuk mendukung penanaman tiga kali setahun melalui optimalisasi pengelolaan lahan, penyediaan varietas tanaman cepat panen, dan koordinasi jadwal tanam	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersediaan prasarana pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan
							St.9	Pengembangan kawasan pertanian terintegrasi (integrated farming), mekanisasi pertanian di sentra produksi serta Penerapan teknologi pertanian modern dan inovasi			

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi		Program Prioritas Daerah	Indikator	OPD Penanggungjawab
							St.4	Implementasi Program "pupuk lancar" untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani dan "listrik masuk sawah" untuk mendukung pompa irigasi, cold storage, dan alat pertanian modern			
							St.5	Penguatan sistem pengendalian hama dan penyakit secara terpadu serta pengembangan sistem asuransi pertanian untuk mitigasi risiko gagal panen	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan
									Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadiaan dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan menular (%)	Dinas Peternakan dan Perikanan
							St.3	Peningkatan kapasitas SDM petani/ peternak/ nelayan dan penyuluh	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan
							St.8	Pembentukan dan penguatan Brigade Pangan sebagai kelompok masyarakat untuk mendukung produktivitas pertanian melalui koordinasi sumber daya, penerapan praktik pertanian modern, dan pengawasan Program IP 300		Rasio Penyuluh Peternakan terhadap Pelaku Utaman Peternakan/Kelompok Ternak (Rasio)	Dinas Peternakan dan Perikanan
									Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan
				2	Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri	Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui identifikasi dan pemetaan sentra potensial, penguatan kemitraan antara petani dan pelaku	St.10	Identifikasi sentra-sentra potensial untuk pengembangan produk unggulan daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
							St.13	Penguatan akses pasar dan jaringan pemasaran serta fasilitasi pengembangan rantai pasok produk unggulan daerah			

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi		Program Prioritas Daerah	Indikator	OPD Penanggungjawab
						industri, peningkatan akses pasar dan rantai pasok, standarisasi mutu serta sertifikasi produk agroindustri, penguatan promosi berbasis kearifan lokal, pengendalian inflasi daerah, dan pembangunan kawasan ekonomi unggulan	St.15	Penguatan daya tarik produk unggulan daerah berbasis kearifan lokal dan penguatan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
							St.11	Pemetaan potensi pemanfaatan produk unggulan untuk pengembangan ekonomi lokal			
							St.12	Pengembangan kemitraan antara petani, pelaku industri dan pengolahan			
							St.14	Standarisasi mutu dan sertifikasi produk agroindustri			
							St.17	Penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan pariwisata ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah			
							St.16	Menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, Penguatan pengendalian inflasi daerah untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi rumah tangga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan	T.2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin, peningkatan efektivitas bantuan sosial	St.18	Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin dan rentan untuk intervensi tepat sasaran serta peningkatan peran dan fungsi TKPKD	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Dinas Sosial

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi		Program Prioritas Daerah	Indikator	OPD Penanggungjawab
	Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif					dan layanan dasar, penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes berbasis potensi lokal, fasilitasi akses permodalan dan pemasaran, pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing, serta pemberdayaan wirausaha generasi Z dan milenial	St.19	Peningkatan efektivitas dan perluasan cakupan bantuan sosial, penguatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Dinas Sosial
							St.20	Peningkatan Kemanfaatan dan Keberlanjutan Sistem Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendampingan dan Peningkatan Keterampilan khusus bagi kelompok miskin dan rentan		Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	
										Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	
										Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	
									Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial	Dinas Sosial
							St.21	Penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes dan Penyusunan rencana pengembangan UMKM berbasis potensi lokal	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
									Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
							St.23	Fasilitasi akses permodalan, dan pemasaran bagi UMKM, pengembangan kemitraan koperasi dan UMKM termasuk implementasi Program Koperasi Merah Putih untuk pembentukan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi		Program Prioritas Daerah	Indikator	OPD Penanggungjawab
								koperasi desa/kelurahan yang mendukung rantai pasok agroindustri local dan pengembangan Program UMKM Maju			
							St.24	Pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing serta pengembangan potensi wirausaha generasi Z dan milenial	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasitasi pengembangan	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							St.25	Pengembangan Program ekonomi produktif untuk pemberdayaan keluarga miskin dan rentan			
				4	Menurunnya tingkat pengangguran	Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal	St.26	Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan Program pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersetifikat kompetensi	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							St.27	Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui sektor ekonomi kreatif dan pariwisata serta pengembangan kawasan transmigrasi prioritas nasional			
							St.28	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKSBipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan	T.3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif	5	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata	Pemetaan dan penanggulangan anak tidak sekolah, implementasi Program makanan bergizi gratis,	St.29	Pemetaan, identifikasi serta Pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan anak tidak sekolah/putus sekolah dan Implementasi Program pemberian makanan bergizi gratis	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 - 6 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi		Program Prioritas Daerah	Indikator	OPD Penanggungjawab
	Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua					peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik, penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang memadai, pengembangan budaya literasi, pendidikan karakter, dan soft skills, serta penguatan sekolah unggulan percontohan dengan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi	St.31	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan		Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 7 - 12 Tahun Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 13 - 15 Tahun Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun Kesetaraan	
							St.33	Pengembangan sekolah unggulan percontohan, Pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi serta implementasi Program Sekolah Rakyat	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							St.30	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta pemerataan pendistribusian tenaga kependidikan secara proporsional	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							St.32	Pengembangan budaya literasi di semua tingkat pendidikan dan masyarakat serta penguatan pendidikan karakter dan soft skills	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				6	Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif	Perluasan jangkauan dan cakupan BPJS Kesehatan, penguatan Program pencegahan dan penanganan stunting, peningkatan kualitas pelayanan dan	St.34	Penyusunan basis data kepesertaan Program BPJS Kesehatan Gratis dan penanganan stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
							St.35	Perluasan cakupan BPJS Kesehatan Gratis			
							St.36	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan status gizi ibu dan anak serta Implementasi Program "Anak-Anak Sidrap Sehat"			

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi		Program Prioritas Daerah	Indikator	OPD Penanggungjawab
						infrastruktur kesehatan terutama di daerah terpencil, serta penguatan upaya promotif-preventif berbasis masyarakat dengan pendekatan keluarga.	St.39	Penguatan sistem pencegahan penyakit dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang komprehensif			
							St.37	Peningkatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, akses layanan kesehatan berkualitas ke daerah terpencil serta peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
							St.38	Implementasi Program kesehatan promotif dan preventif berbasis masyarakat dalam rangka deteksi dini dan penanganan masalah kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Dinas Kesehatan
				7	Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif	Penguatan kerangka regulasi daerah, pencegahan perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender, pengembangan Program ekonomi produktif, peningkatan aksesibilitas infrastruktur publik, dan pembangunan ketahanan keluarga yang adaptif terhadap perubahan sosial.	St.40	Penyusunan kerangka regulasi daerah yang komprehensif tentang perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, anak, dan penyandang disabilitas)	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
							St.41	Pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui Implementasi Program penguatan ketahanan keluarga	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
							St.42	Pengembangan Program ekonomi produktif bagi perempuan dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan	Program Pegarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
							St.44	Peningkatan aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas			

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi		Program Prioritas Daerah	Indikator	OPD Penanggungjawab
							St.45	Penguatan keberdayaan dan resiliensi kelompok rentan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar			
	M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan	T.4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	8	Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca	Penguatan regulasi lingkungan, peningkatan sarana-prasarana, pengelolaan lingkungan terpadu berbasis partisipasi masyarakat, pengendalian pencemaran air dan udara, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan penataan ruang terbuka hijau	St.46	Penguatan regulasi lingkungan hidup serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi Program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
							St.50	Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
							St.47	Pengelolaan lingkungan secara terpadu berbasis pelibatan stakeholder dan partisipasi masyarakat			
							St.48	Pengendalian pencemaran lingkungan, air, tanah dan udara			
							St.49	Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan Penataan ruang terbuka hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luas RTH Publik dan Privat dari Wilayah Kota/Perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup
				9	Menurunnya tingkat risiko bencana	Penguatan regulasi mitigasi bencana, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan sistem peringatan dini, serta penguatan kapasitas masyarakat dan	St.51	Penguatan regulasi mitigasi bencana serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi Program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							St.52	Penguatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi		Program Prioritas Daerah	Indikator	OPD Penanggungjawab
						lembaga penanggulangan bencana.				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
	M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius	T.5	Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama	10	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial masyarakat melalui penguatan koordinasi antarlembaga, pendidikan nilai-nilai kebangsaan, dan pencegahan konflik sosial.	St.53	Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku yang mengganggu ketertiban sosial	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
							St.54	Penguatan sistem keamanan terpadu dan peningkatan koordinasi antar lembaga dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Ppenyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
							St.55	Meningkatkan dialog antarumat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung harmoni sosial dan mencegah konflik sosial	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
									Program pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				11	Berkembangnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta kearifan lokal	Memperkuat nilai-nilai religius, melestarikan budaya lokal, dan memberdayakan pemuda melalui dukungan kegiatan keagamaan, pelestarian cagar budaya, serta pembinaan	St.56	Peningkatan dukungan dan fasilitasi pemerintah terhadap kegiatan keagamaan, peningkatan sarana prasarana tempat ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan serta penguatan kapasitas tokoh agama dalam pembangunan sosial kemasyarakatan yang inklusif	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tepat waktu (%)	Sekretariat Daerah
										Perssentase kegiatan keagaamaan yang difasilitasi oleh pemerintah	
										Jumlah produk hukum yang dihasilkan	

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi		Program Prioritas Daerah	Indikator	OPD Penanggungjawab
						keterampilan berbasis nilai agama dan kearifan lokal				Jumlah kerjasama daerah yang dihasilkan	
							St.57	Melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan lokal melalui penyelenggaraan festival, acara budaya, dan revitalisasi cagar budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
										Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	
							St.58	Mengoptimalkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan keterampilan, karakter disiplin, dan potensi generasi muda berlandaskan nilai agama dan budaya lokal	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
									Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	M6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital	T.6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif	12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi	Penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan, penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan inovasi pemerintahan, pengembangan administrasi berbasis elektronik yang terintegrasi, peningkatan kapasitas ASN berbasis merit, penguatan pengawasan internal,	St.59	Penyederhanaan proses birokrasi dan regulasi serta Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD-RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
							St.60	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengembangan inovasi pemerintahan		Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	
										Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	
									Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
									Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pemanfaatan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi		Program Prioritas Daerah	Indikator	OPD Penanggungjawab
						pemantapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis elektronik				Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	
							St.61	Pengembangan sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Iternet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika
							St.64	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik			
							St.62	Penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit serta peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan terintegrasi	Program Kepegawaian Daerah	Rata-Rata SKP ASN Bernilai BAIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
										Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD	
							St.63	Pengembangan mekanisme pengawasan internal yang efektif dan preventif untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas KKN	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Temuan BPK	Inspektorat
										Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Tindakjanjuti	
				13	Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik, peningkatan sarana-prasarana pelayanan publik, optimalisasi sistem pengaduan masyarakat, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik,	St.65	Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
							St.66	Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan optimalisasi sistem pengaduan pelayanan publik			
							St.67	Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan optimalisasi sistem pengaduan pelayanan publik			
							St.68	Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik serta kepatuhan dalam	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi		Program Prioritas Daerah	Indikator	OPD Penanggungjawab
						serta pemantapan penerapan SOP pelayanan publik		penerapan SOP pelayanan publik			
							St.69	Pemantapan sistem pelayanan publik yang terintegrasi, transparan, dan responsif	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Pencacatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	T.7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	14	Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah	Mengembangkan infrastruktur daerah yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan melalui perencanaan berbasis kebutuhan prioritas, optimalisasi sumber pendanaan, pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung	St.70	Identifikasi dan pemetaan kebutuhan infrastruktur prioritas	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
							St.71	Meningkatkan alokasi dana infrastruktur melalui berbagai sumber pendanaan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
							St.72	Peningkatan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, perumahan layak huni, drainase dan permukiman melalui implementasi Program Nasional 3 Juta Rumah untuk pembangunan dan renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terintegrasi dengan pengembangan kawasan permukiman yang didukung fasilitas sanitasi dan drainase	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
									Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mengakses Air Minum Layak dan Aman	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
							St.73	Merehabilitasi dan membangun jalan jembatan serta infrastruktur transportasi darat untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperkuat sektor ekonomi unggulan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestic layak dan aman)	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Pera

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi		Program Prioritas Daerah	Indikator	OPD Penanggungjawab
							St.74	Menerapkan sistem pemeliharaan rutin infrastruktur daerah dan infrastruktur perhubungan darat guna memastikan fungsi jangka panjang dan efisiensi penggunaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah terpasang terhadap kondisi ideal	Dinas Perhubungan

Sumber: RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang,diolah

4.4. Keselarasan Perencanaan Pembangunan

Keselarasan pembangunan antara daerah, provinsi, dan nasional memiliki peran yang sangat krusial dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pentingnya keselarasan ini terletak pada beberapa aspek fundamental yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Keselarasan pembangunan memastikan adanya konsistensi dan koherensi dalam implementasi kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan. Capaian nasional merupakan akumulasi dari capaian daerah, pemerintah pusat dapat lebih efektif dalam merancang kebijakan dan Program yang mendorong pemerataan pembangunan. Hal ini juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dan bertanggung jawab dalam mengejar target-target pembangunan mereka, karena mereka memahami bahwa kinerja mereka berkontribusi langsung pada pencapaian nasional.

Keselarasan prioritas pembangunan RKPD 2026 dengan Asta Cita dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2026 dengan Asta Cita

Prioritas Nasional (Asta Cita)	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
PN1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	P6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	
PN2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P1. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah melalui Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan
PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
PN3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.	P7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah
PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	P3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas

Prioritas Nasional (Asta Cita)	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.	
PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemertaan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	P2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan
PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.	P4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan
	P5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius

Sumber: RPJMN 2025-2029, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, diolah.

Tabel 4.11
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Provinsi Sulsel

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
P1. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah melalui Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan	P4. Peningkatan Ekonomi dan Fiskal Daerah yang Modern dan Berdaya Saing
	P3. Hilirisasi Pertanian untuk mencapai Swasembada Pangan dan Lumbung Pangan, serta Sumber Daya Alam Lainnya yang berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
P2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan	P5. Peningkatan Kemandirian Desa melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Perdesaan dan Wilayah Sulit Akses untuk Pemerataan Ekonomi, Menekan Angka Pengangguran dan Pemberantasan Kemiskinan
P3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas	P1. Peningkatan Akses dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berbasis Akhlak dan Kompetensi
P4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	P8. Peningkatan Mitigasi dan Ketahanan Bencana untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
P5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius	P2. Peningkatan Layanan Keagamaan, Pemajuan Kebudayaan, Kearifan Lokal, Sosial Kemasyarakatan, Demokrasi Substansial dan Penguatan Peran Generasi Muda yang Inklusif dengan Memperhatikan Pelibatan Kelompok Marginal
P6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	P6. Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegrasi, Adaptif, dan Melayani Berbasis Digital
P7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas	P7. Peningkatan Layanan Transportasi (Darat, Laut, Udara) dan Infrastruktur Investasi Padat Karya dan Berwawasan Lingkungan

Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, diolah

Dalam penentuan tema pembangunan daerah Tahun 2026 tidak terlepas dokumen dokumen diatasnya sesuai dengan peraturan perundang undangan, yaitu RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, dan RKP Tahun 2026.

Gambar 4.2
Keselarasan Tema Pembangunan Tahun 2026

Sumber: RKP 2026, RKPD Prov Sulsel 2026, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, diolah.

Penahapan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penahapan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan yang setiap tahun tahunnya memiliki focus dan saling berkesinambungan. Penahapan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 untuk tahun 2026 diselaraskan dengan tema pembangunan Tahun 2026 untuk menjaga konsistensi antara focus pembangunan RPJMD dan RKPD untuk Tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.12
Keselarasan Tahapan Pembangunan RPJMD dengan Tema RKPD untuk Tahun 2026

Tahapan RPJMD untuk Tahun 2026	Tema RKPD 2026
"Ketahanan Pangan, SDM Unggul dan Ekonomi Berkelanjutan"	"Ketahanan Pangan, SDM Unggul dan Ekonomi Berkelanjutan"

Sumber: RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, diolah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2026 berfokus pada visi "Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perlindungan Sosial yang Merata untuk Sidenreng Rappang yang Tangguh". Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh masyarakat, sekaligus memperkuat sistem perlindungan sosial yang inklusif untuk mendukung ketahanan masyarakat terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi. Sementara itu,

tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 "Ketahanan Pangan, SDM Unggul dan Ekonomi Berkelanjutan" menjadi panduan operasional tahunan yang menjabarkan langkah-langkah strategis untuk mencapai visi RPJMD tersebut. Keselarasan antara keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

Visi RPJMD menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan Sidenreng Rappang. Hal ini selaras dengan tema RKPD 2026 yang menekankan "Ketahanan Pangan" sebagai prioritas. Dalam tahapan penyusunan RPJMD, ketahanan pangan diwujudkan melalui strategi peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan infrastruktur irigasi, dan diversifikasi pangan lokal. RKPD Tahun 2026 menjadi alat pelaksana jangka pendek yang mendukung pencapaian visi jangka menengah RPJMD dalam memastikan ketersediaan pangan yang merata dan berkelanjutan. Perlindungan Sosial yang Merata untuk membangun masyarakat yang tangguh. Ini selaras dengan tema RKPD 2026 yang mengedepankan "SDM Unggul". Dalam RPJMD, perlindungan sosial dirancang melalui penguatan jaring pengaman sosial, seperti bantuan sosial terpadu, asuransi kesehatan, dan Program pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, RKPD 2026 mendukung visi ini dengan Program peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, dan akses layanan kesehatan yang merata. Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu menghadapi tantangan sosial-ekonomi, sehingga mendukung ketahanan sosial yang diidamkan dalam RPJMD. Meskipun visi RPJMD tidak secara eksplisit menyebutkan ekonomi berkelanjutan, aspek ini tersirat dalam upaya membangun Sidenreng Rappang yang tangguh melalui ketahanan pangan dan perlindungan sosial. Tema RKPD 2026 "Ekonomi Berkelanjutan" melengkapi visi ini dengan menitikberatkan pada pengembangan sektor ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif. Dalam tahapan RPJMD, ekonomi berkelanjutan dicapai melalui diversifikasi ekonomi lokal, penguatan UMKM, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. RKPD 2026 menjabarkan langkah-langkah ini melalui Program seperti fasilitasi kredit UMKM, pengembangan industri berbasis pertanian, dan promosi ekonomi hijau. Dengan demikian, RKPD memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan visi ketahanan jangka menengah yang digariskan dalam RPJMD.

RKPD Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan tetap menjaga konsistensi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.13
Keterkaitan RPJMD dengan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan		Sasaran		Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan		Sasaran	
PD1. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah melalui Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan	T.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	1	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan produktivitas sektor pertanian	PD1. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah melalui Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan	T.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	1	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan produktivitas sektor pertanian
			2	Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri				2	Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri
PD2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan	T.2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PD2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan	T.2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3	Meningkatnya pendapatan masyarakat
			4	Menurunnya tingkat pengangguran				4	Menurunnya tingkat pengangguran
PD3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas	T.3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif	5	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata	PD3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas	T.3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif	5	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata
			6	Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif				6	Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan		Sasaran		Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan		Sasaran	
			7	Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif				7	Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif
PD4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	T.4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan			PD4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	T.4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan		
			8	Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca				8	Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca
			9	Menurunnya tingkat risiko bencana				9	Menurunnya tingkat risiko bencana
PD5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius	T.5	Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama			PD5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius	T.5	Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama		
			10	Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat				10	Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
			11	Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda				11	Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda
PD6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	T.6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif			PD6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	T.6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif		
			12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi				12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan		Sasaran		Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan		Sasaran	
			13	Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik				13	Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
PD7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas	T.7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	14	Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah	PD7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas	T.7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	14	Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah

Sumber: RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, diolah

Keselarasan Program prioritas provinsi dan kabupaten/kota merupakan kebutuhan imperative untuk memastikan sinergi antar level pemerintahan, keselarasan antar Program prioritas merupakan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan rakyat baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, keselarasan Program prioritas disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 4.14
Keselarasan Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sidenreng Rappang

RPJMD Provinsi Sulsel		RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang		Ket.
No.	Program Prioritas	No.	Program Prioritas	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
2	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
4	Program pengelolaan pendidikan	4	Program Pengelolaan Pendidikan	
5	Program pendidik dan tenaga kependidikan	5	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
6	Program pengembangan kurikulum	6	Program Pengembangan Kurikulum	
7	Program pembinaan perpustakaan	7	Program Pembinaan Perpustakaan	
8	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan			
9	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta busdaya politik			
10	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	8	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	
11	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	9	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
12	Program pembinaan dan pembangunan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	10	Program pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
13	Program kesejahteraan rakyat	11	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
14	Program pengembangan kebudayaan	12	Program Pengembangan Kebudayaan	

RPJMD Provinsi Sulsel		RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang		Ket.
No.	Program Prioritas	No.	Program Prioritas	
15	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	13	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
16	Program pemenuhan hak anak			
17	Program perlindungan khusus anak	14	Program Perlindungan Khusus Anak	
18	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	15	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
19	Program pengembangan daya saing keolahragaan	16	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	
20	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	17	Program Pegarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
21	Program perencanaan dan pembanguanan industri	18	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
22	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha keil, dan usaha mikro (UMKM)	19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
23	Program pengembangan UMKM	20	Program Pengembangan UMKM	
24	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	21	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
25	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			
26	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			
27	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	22	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
28	Program penanganan kerawanan pangan			
29	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	23	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
30	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	24	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
31	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	25	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
32	Program penyuluh pertanian	26	Program Penyuluhan Pertanian	
33	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	27	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
34	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	28	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	

RPJMD Provinsi Sulsel		RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang		Ket.
No.	Program Prioritas	No.	Program Prioritas	
35	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	29	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
36	Program pengelolaan perikanan tangkap	30	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
37	Program pengelolaan perikanan budidaya	31	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
38	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			
39	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan			
40	Program pengembangan ekspor			
41	Program standardisasi dan perlindungan konsumen			
42	Program pengendalian izin usaha industri			
43	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional			
44	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan			
45	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	32	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
46	Program pengembangan iklim penanaman modal	33	Program Pelayanan Penanaman Modal	
47	Program perekonomian dan pembangunan			
48	Program pengelolaan pendapatan daerah			
49	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat umum	34	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
50	Program administrasi pemerintah desa	35	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
51	Program perlindungan dan jaminan sosial	36	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
52	Program pemberdayaan sosial	37	Program Pemberdayaan Sosial	
53	Program rehabilitasi sosial	38	Program Rehabilitasi Sosial	
54	Program penaganan bencana			
55	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	39	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
56	Program penempatan tenaga kerja			
57	Program pengelolaan aplikasi informatika	40	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
58	Program pengelolaan dan komunikasi publik			

RPJMD Provinsi Sulsel		RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang		Ket.
No.	Program Prioritas	No.	Program Prioritas	
59	Program perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	41	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
60	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah			
61	Program penyelenggara pengawasan	42	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
62	Program penataan organisasi			*tidak ada di kab/kota*
63	Program pengelolaan barang milik daerah			
64	Program pengelolaan keuangan daerah	43	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
65	Program fasilitasi dan koordinasi hukum			*tidak ada di kab/kota*
66	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum			
67	Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa			*tidak ada di kab/kota*
68	Program pemerintahan dan otonomi daerah			*tidak ada di kab/kota*
69	Program pengelolaan aplikasi informatika			
70	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik			
71	Program kepegawaian daerah	44	Program Kepegawaian Daerah	
72	Program pengembangan sumber daya manusia			
73	Program pendaftaran penduduk	45	Program Pendaftaran Penduduk	
74	Program pencatatan sipil	46	Program Pencatatan Sipil	
75	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan			
76	Program penelitian dan pengembangan	47	Program Riset dan Inovasi Daerah	*nomenklatur berubah*
77	Program penataan bangunan dan lingkungannya			
78	Program penyelenggaraan jalan	48	Program Penyelenggaraan Jalan	
79	Program pengelolaan ketenagalistrikan			*tidak ada di kab/kota*
80	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	49	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
81	Program pengelolaan pelayaran			

RPJMD Provinsi Sulsel		RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang		Ket.
No.	Program Prioritas	No.	Program Prioritas	
82	Program pengembangan perumahan			
83	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	50	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	
84	Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum			
85	Program penataan bangunan gedung			
86	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional	51	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
87	Program pengelolaan sumber daya air	52	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
88	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	53	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
89	Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil			*tidak ada di kab/kota*
90	Program pengelolaan energi baru terbarukan			*tidak ada di kab/kota*
91	Program kawasan permukiman	54	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
92	Program pengelolaan hutan			*tidak ada di kab/kota*
93	Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan			*tidak ada di kab/kota*
94	Program pengelolaan sampah	55	Program Pengelolaan Persampahan	
95	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	56	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
96	Program penanggulangan bencana	57	Program Penanggulangan Bencana	
		58	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		59	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
		60	Program Perlindungan Perempuan	
		61	Program Hubungan Industrial	
		62	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	

Sumber: RPJMD Prov. Sulsel; RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang,diolah

4.4.3 Dukungan Daerah terhadap Prioritas Nasional ASTA CITA

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berkomitmen dalam mendukung pencapaian Asta Cita sebagai visi pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Sidenreng Rappang memposisikan diri sebagai mitra strategis dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa melalui harmonisasi Program pembangunan daerah dengan agenda nasional. Dukungan ini tercermin dalam upaya sistematis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan lokal dengan delapan agenda prioritas nasional yang telah dirumuskan. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap Asta Cita tidak hanya bersifat formal, namun juga substantif melalui implementasi berbagai inisiatif pembangunan yang sejalan dengan semangat transformasi nasional dengan berupaya memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target-target nasional. Pendekatan pembangunan yang dilakukan mengutamakan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, sehingga setiap Program yang dijalankan memiliki landasan yang kuat dan dukungan penuh dari masyarakat.

Sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan dalam rangka menjamin sinergisitas pembangunan pusat dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2026 didasari pada bagaimana outcome, Program, dan sub kegiatan daerah mendukung prioritas nasional (asta cita) sesuai bidang urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil kesepakatan Rakortekbang. Hasil kesepaktan Rakortekbang Nasional Tahun 2025 yang menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2026. Adapun dukungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai ASTA CITA disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.15
Dukungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap Prioritas Nasional (ASTA CITA)

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains teknologi pendidikan kesehatan prestasi olahraga kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	101	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	1010220139	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	50,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
							1010220232	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	3500	15,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
							1010220260	Bimbingan Teknis Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pelatihan dan/ atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	22	25,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
							1010220340	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	10	200,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
							1010220410	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Orang	110	185,000,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains teknologi pendidikan kesehatan prestasi olahraga	102	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1020220122	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	1.500,000,000.00	Dinas Kesehatan
							1020220123	Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	55	4.000,000,000.00	Dinas Kesehatan

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas						1020220225	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	311,000,000.00	Dinas Kesehatan
							1020220226	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2	74,187,641,000.00	Dinas Kesehatan
							1020220246	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	101,000,000.00	Dinas Kesehatan
					1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1020320202	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	3	40,000,000.00	Dinas Kesehatan
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	103	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan energi dan air	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1030220208	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km	2	2,000,000,000.00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
							1030220214	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	2	1,564,886,000.00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
					1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1030320128	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/detik	2.5	525,000,000.00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
							1030320132	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	150	525,000,000.00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian			Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1031220110	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	15000000000	Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan Dan Perumahan Rakyat

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	bangsa melalui swasembada pangan energi air ekonomi kreatif ekonomi hijau dan ekonomi biru						1031220111	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	200.000.000,00	Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan Dan Perumahan Rakyat
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	104	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya rumah layak terjangkau dan berkelanjutan	1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1040420101	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	15	750,000,000.00	Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan Dan Perumahan Rakyat
							1040420104						
					1.04.05	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	1040520111						Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan Dan Perumahan Rakyat
							1040520112	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Lokasi	3	7500000000	

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	Memperkokoh ideologi Pancasila demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)	105	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi pelayanan Satpol PP Satlinmas dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	1050320227	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	60,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							1050320405	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	10,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan				1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman	1050220115	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	4	1,223,771,375.00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur					Dan Ketertiban Umum		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	12	20,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
							1050220211	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	4	50,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
					1.05.04	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan	1050420113	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1	1,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)					
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	106	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	1060220304	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kot	Lembaga	7	75,000,000.00	Dinas Sosial
							1060220314	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	46	110,000,000.00	Dinas Sosial
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains teknologi pendidikan kesehatan prestasi olahraga kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas				1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1060520204	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	15,000,000.00	Dinas Sosial
					1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1060520206	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Soial Kesejahteraan Keluarga	Pm	15	30,000,000.00	Dinas Sosial
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi	207	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka	2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2070320101	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	790	10,000,000,000.00	Dinas Koperasi Ukm Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan			produktivitas tenaga kerja kesempatan kerja dan perlindungan pekerja				berdasarkan Klaster Kompetensi					
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains teknologi pendidikan kesehatan prestasi olahraga kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas				2.07.05	Program Hubungan Industrial	2070520101	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	20	25,000,000,000.00	Dinas Koperasi Ukm Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
							2070520205	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	1000	2,000,000,000.00	Dinas Koperasi Ukm Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM)	208	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan	Meningkatnya Kesetaraan Gender Peran Perempuan dan	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan	2080220111	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	1	10,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan Dan Perlindungan Anak
	sains teknologi pendidikan kesehatan prestasi olahraga kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda (generasi		Perempuan Dan Perlindungan Anak	Perlindungan Anak		Pemberdayaan Perempuan	2080220209	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang	100	15,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas				2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	2080720107	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan singkronisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Dokumen	5	5,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan Dan Perlindungan Anak
							2080720213	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	5	5,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan Dan Perlindungan Anak
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan energi air ekonomi kreatif ekonomi hijau dan ekonomi biru	209	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2090320107	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	15	158,597,000.00	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
							2090320108	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Laporan	5	123,286,000.00	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
					2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2090420202	Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	16,000,000.00	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							2090420203	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Laporan	1	12,719,000.00	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	210	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	2100620104	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					
							2100620106	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria					
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan energi air ekonomi kreatif ekonomi hijau dan ekonomi biru	211	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2110320107	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	2	15,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
							2110320112	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	2	20,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang				2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	2111120112	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	2702125	3,000,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	harmonis dengan lingkungan alam						2111120116	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persen	88	10,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
	dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur						2111120117	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R PDU TPST TPS SPA PSEL/ PLTSa RDF pusat pengomposan biodigester Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R PDU TPST SPA PSEL/PLTSa RDF pusat pengomposan biodigester Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	926002	1,779,942,000.00	Dinas Lingkugan Hidup
							2111120120	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST kabupaten /kota atau TPA/TPST Regional	Ton	38500	975,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains teknologi pendidikan kesehatan prestasi olahraga kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan	212	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	2120320202	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara hubungan timbal Balik Melalui Pembinaan masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	3	500,000.00	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	penyandang disabilitas						2120320206	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	12	500,000.00	Dinas Kpendudukan Dan Catatan Sipil
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	213	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	Program Penataan Desa	2130220106	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	1	20,000,000.00	Dinas Pemdes Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur				2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2130420108	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	68	15,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan Dan Perlindungan Anak
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains teknologi pendidikan kesehatan prestasi olahraga kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda (generasi	214	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2140320308	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	6	22,050,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
							2140320405	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	63	346,500,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	milenial dan generasi Z) dan				2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan	2140420116	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan	11	86,220,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	penyandang disabilitas					Keluarga Sejahtera (Ks)	2140420128	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	400	1,000,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	215	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	2150220202	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	Unit	1312	9,300,000,000.00	Dinas Perhubungan
							2150220311	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	Unit	1	6,500,000.00	Dinas Perhubungan
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong				2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	2150321303	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau					

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi						2150321311	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan					
16	Memperkokoh ideologi Pancasila demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)	216	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2160220116	Dukungan Administratif Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	-				
							2160220117	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	2	70.000,000.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
							2160220119	Monitoring Informasi Kebijakan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	25	5,000,000.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
							2160220121	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	50	27,368.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat				2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2160320225	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi yaitu Portal Pelayanan Publik Portal Administrasi	Layanan	1	50,000.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba judi dan penyelundupan								Pemerintahan dan/atau Portal Data Nasional				
							2160320234	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	-				Dinas Komunikasi Dan Informatika
							2160320236	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat	60	1,148,414,500.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
							2160320238	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	5,000,000.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	217	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	2170620103	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	5	5,000,000.00	Dinas Koperasi Ukm Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	yang berkualitas mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra		Usaha Kecil Dan Menengah					Dalam Pengembangan Ekonomi					
							2170620109	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit	10	15,000,000.00	Dinas Koperasi Ukm Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
					2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan	2170720104	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit usaha	30	140,000,000.00	Dinas Koperasi Ukm Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	produksi melalui peran aktif koperasi					Usaha Mikro (Umkm)	2170720115	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	15	15.000,000.00	Dinas Koperasi Ukm Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	218	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2180520104	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Orang	52	10,408.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							2180520106	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan usaha	30	15,761.000.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains teknologi pendidikan	219	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Meningkatnya kualitas pemuda budaya olahraga yang inklusif dan prestasi olahraga	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2190220111	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	110	5,000,000.000.00	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Kepariwisataan
	kesehatan prestasi olahraga kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan						2190220204	Koordinasi Sinkronisasi dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam	Orang	4	500,000,000.00	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Kepariwisataan

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas							berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/ Kota	Pengembangan Kepeloporan Pemuda				
					2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2190320306	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	3	150,000,000.00	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Kepariwisataan
							2190320309	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	1	50,000,000.00	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Kepariwisataan
							2190320510	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	1,000.000,000.00	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Kepariwisataan
20	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba judi dan penyelundupan	220	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Tercapainya kolaborasi integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2200220118	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data metadata interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	30	63,000.000.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2200220119	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	%	60	22,500.000.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	221	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2210220107	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Opd	29	10,502.000.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	bangsa melalui swasembada pangan energi air ekonomi kreatif												Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	ekonomi hijau dan ekonomi biru												
	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba judi dan penyelundupan						2210220108	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur Keputusan Gubernur maupun Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	1	7,000,000.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	222	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	2220220101	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan	Objek	70	200,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
							2220220102	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	umlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	1	75,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan				2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	2220520102	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Unit	18	10,900,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
							2220520202	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	4	50,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur												
2 3	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains teknologi pendidikan kesehatan prestasi olahraga kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	223	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	2230220113	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Unit	19	30,000,000.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
							2230220114	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Buah	500	5,000,000.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur				2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	2230320103	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan perawatan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	6	50,000,000.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
							2230320104	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksamplar	26	50,000,000.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	224	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	2240220103	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	20,000,000.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
				Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa			2240220301	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	50,000.000.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan energi air ekonomi kreatif ekonomi hijau dan ekonomi biru	325	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3250320201	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	10	40,000.000.00	Dinas Peternakan Dan Perikanan
							3250320202	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil					
							3250320204	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	15	280,000,000.00	Dinas Peternakan Dan Perikanan
					3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	3250520104	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Orang	415	20,000.000.00	Dinas Peternakan Dan Perikanan
							3250520106	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Orang	415	50000	Dinas Peternakan Dan Perikanan

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							3250520107	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota					
							3250520112	Pengawasan Ekstraksi Garam					
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	326	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3260220106	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	2	500,000,,000.00	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Kepariwisataan
							3260220109	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara Revitalisasi)	1 unit	1	500,000,000.00	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Kepariwisataan
							3260220208	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					
							3260220301	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
							3260220302	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
							3260220304	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	3260420101	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif					
							3260420202	Pengembangan Pendidikan					
							3260420209	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif					
							3260420212	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah					
							3260420216	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah					
							3260420222	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual					
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan energi air ekonomi kreatif ekonomi hijau dan ekonomi biru	327	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3270220101	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	305,250.000.00	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
							3270220103	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	O,1	2,000,000,00	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3270320103	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2	52,000,000,00	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
							3270320105	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	51105,3	50,000.000.00	
28	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan energi air ekonomi kreatif ekonomi hijau dan ekonomi biru	328	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan										
29	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan energi air ekonomi kreatif ekonomi hijau dan ekonomi biru	329	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral										
30	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	330	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	3300220603	Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)					

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	tambah di dalam negeri						3300220701	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA					
					3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	3300520102	Pameran Dagang Nasional					
							3300520104	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan					
31	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	331	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3310220101	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	150,000,000.00	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
							3310220105	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	200,000,000.00	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
					3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	3310320103	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota					
							3310320104	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan					

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)					
32	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	332	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	33203	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	3320320110	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	KK	5	5,000,000,00	Dinas Koperasi Ukm Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
							3320320120	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi					
					33204	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3320420101	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	KK	10	10,000,000.00	Dinas Koperasi Ukm Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
33	Memperkokoh ideologi Pancasila demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)	801	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	8010320103	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	100	988,700,000.00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan												

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur												
	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba judi dan penyelundupan				8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8010420103	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	6,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

4.4.4 Dukungan Daerah terhadap Program Strtaegis Nasional (ProSN)

Program Strategis Nasional merupakan Program yang ditetapkan Presiden sebagai Program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan Program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, Program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara Program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia.

Selain aspek ekonomi, ProSN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui Program- Program yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung Program-Program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Program Strategis Nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Dukungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap Program Strategis Nasional:

Tabel 4.16
Dukungan Daerah terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) Tahun 2026

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
1	Pengentasan Kemiskinan	1 Penanggulangan Kemiskinan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersetifikat kompetensi	%	32	10,075,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi
			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan	%	-	10,075,000,000	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun*	*Orang*	*790*	*10,000,000,000*	
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/Kota	*Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja*	*Unit*	*2*	*75,000,000*	
			Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 - 6 Tahun	%	87.53	707,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 7 - 12 Tahun	%	99.85		
				Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 13 - 15 Tahun	%	90.73		
				Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun Kesetaraan	%	18.40		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	%		377,000,000	
				Angka Kelulusan SD/MI	%			
				Persentase SD/MI dengan Kondisi Bangunan Baik	%			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	*Dokumen*	*1*	*100,000,000*	
			Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang*	*Dokumen*	*1*	*50,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pendidikan	*Pendidikan yang dilaksanakan*				
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	*Paket*	*5500*	*202,000,000*	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	*Peserta Didik*	10000	25,000,000	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	%		315,000,000	
				Angka Kelulusan SMP/MTs	%			
				Persentase SMP/MTs dengan Kondisi Bangunan Baik	%			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	*Dokumen*	*1*	*150,000,000*	
			Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	*Dokumen*	*1*	*50,000,000*	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	*Peserta Didik*	*3500*	*15,000,000*	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	*Paket*	*3500*	*100,000,000*	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	Persentase Lembaga PAUD Terakreditasi Minimal B	%		15,000,000	
				Persentase Pendidik PAUD yang Berkualifikasi Minimal S1/D4	%			
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Paud	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	*Peserta Didik*	*110*	*15,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Kesetaraan yang Terdata di Dapodik dan Aktif Menyelenggarakan Layanan	Persen		185,000,000	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	*Peserta Didik*	*110*	*185,000,000*	
		2 Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial**	**%**	**100**	**213,000,000**	**Dinas Sosial**
			Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sumbangan Daerah yang Terkumpul	%		8,000,000	
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau Barang	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang*	*Dokumen*	*4*	*8,000,000*	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang Tertangani	%		205,000,000	
			Fasilitasi Pemberian Penghargaan Dan Santunan Sosial Bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, Dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	*Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial*	*Orang*	*100*	*20,000,000*	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja sosial, pekerja sosial*	*Orang*	*7 Lembaga*	*75,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya*				
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	*Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya*	*Orang*	*46*	*110,,000,000*	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	**Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah terpasang terhadap kondisi ideal**	**%**	**35**	**138,250,000**	**Dinas Perhubungan**
			Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Angkutan Darat	%		138,250,000	
			Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten Kota*	*Laporan*	*12*	*138,250,000*	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**	**Ton**	**2428,29**	**320,000,000**	**Dinas Peternakan Dan Perikanan**
			Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya	Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%)	%	100,00	280,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota					
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)*	*Unit*	*15*	*280,000,000*	
			Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil (%)	%	100,00	40,000,000	
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	*Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitaasnya (Orang)*	*Orang*	*10*	*40,000,000*	
			Program Penanggulangan Bencana	**Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**%**	**100**	**30,000,000**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
				Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	**%**	**100**		
				Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**%**	**100**		
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang		30,000,000	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	*Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya selama 1(satu) tahun*	*Orang*	*100*	*30,000,000*	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**	**%**	**60**	**22,000,000**	**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase database kependudukan sidrap	%	100	22,000,000	
			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kerja sama Pemafaatan Data Kependudukan*	*Dokumen*	*3*	*1,000,000*	
			Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan*	*Dokumen*	*12*	*21,000,000*	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	**Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten / Kota**	**%**		**525,000,000**	**Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat**
			Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk berakses air minum	%		525,000,000	
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun*	*Liter / Detik*	*2.5*	*525,000,000*	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Psda)	**Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik**	**%**		**2,100,000,000**	**Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air**
			Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	%		2,100,000,000	
			Rehabilitasi Embung	*Jumlah Embung yang di Rehabilitasi*	*Unit*	*1*	*100,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan*	*Km*	*2*	*2,000,000,000*	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Cakupan pelayanan Kesehaatan Masyarakat**	**%**	**100**	**3,501,000,000**	**Dinas Kesehatan**
			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	3,501,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Orang	6,065	250,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Orang	6,750	200,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Orang	5,612	200,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Orang	25,100	200,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Orang	54,992	200,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	*Jumlah Usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Orang	195,092	200,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	*Jumlah penduduk Usia Lanjut yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Orang	21,212	200,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat*	Dokumen	2	413,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	Dokumen	1	50,000,000	
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	Dokumen	2	227,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	*Orang*	*17,895*	*200,000,000*	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	*Orang*	*2,876*	*200,000,000*	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar*	*orang*	*7,400*	*200,000,000*	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	*Dokumen*	*1*	*250,000,000*	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan NAPZA	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan*	*orang*	*252*	*200,000,000*	
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	*Dokumen*	*2*	*311,000,000*	
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ ASFR)**	**%**	**100**	**1,630,200,000**	**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
			Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kmasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui	Cakupan kelompok kemasyarakatan yang ikut dalam pelaksanaan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarg	%		1,630,200,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga					
			Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin /Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/ Balita)	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*	*Laporan*	*741*	*741,000,000*	
			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	*Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan*	*Laporan*	*741*	*889,200,000*	
		3 Sekolah Rakyat	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	**Persentase Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial**	**%**	**100**	**30,000,000**	Dinas Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				30,000,000	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Usulan Penindaklayakan Usulan yang terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan*	*Usulan*	*40*	*30,000,000*	
		4 Pembangunan 3 Juta Rumah	**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni**			**0**	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat
			Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program				0	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Program Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	*0*	*0*	
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	**Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani**			**750,000,000**	
			Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota				750,000,000	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki*	Unit Rumah	15	750,000,000	
2.	Ketahanan Pangan	1 Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Psda)**	**Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik**	**%**	**73**	**4,986,008,000**	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
			Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	%		750,000,000	
			Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,*	*Dokumen*	*1*	*100,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Konstruksi Bendungan, Embung Dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	*Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun*				
			Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sda Kewenangan Kabupaten/ Kota	*Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan*	*Lembaga*	*30*	*250,000,000*	
			Normalisasi/ Restorasi Sungai	*Panjang Sungai yang di Normalisasi/Restorasi*	*Km*	*1*	*100,000,000*	
			Pembangunan Tanggul Sungai	*Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun*	*Km*	*1*	*100,000,000*	
			Pembangunan Embung Dan Penampungan Air Lainnya	*Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang di Bangun*	*Unit*	*1*	*100,000,000*	
			Rehabilitasi Embung	*Jumlah Embung yang Direhabilitasi*	*Unit*	*1*	*100,000,000*	
			Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	%		4,236,008,000	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan*	*Km*	*2*	*2,000,000,000*	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi*	*Km*	*2*	*1,564,886,000*	
			Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara*	*Km*	*25*	*671,122,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	**Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun**	**%**	**5,69**	**886,796,500**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan**
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Terlaksana	Kegiatan	13	886,796,500	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	*Laporan*	*2*	*305,250,000*	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	*Laporan*	*3*	*569,546,500*	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	*Jumlah benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih yang diperbanyak*	*Ton*	*0,1*	*2,000,000*	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan*	*Laporan*	*1*	*2,000,000*	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura*	*Laporan*	*2*	*2,000,000*	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan*	*Laporan*	*5*	*2,000,000*	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan*	*Laporan*	*2*	*2,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura*	*Laporan*	*2*	*2,000,000*	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian**	**%**	**100**	**2,455,299,000**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan**
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pertanian yang terlaksana	Kegiatan	10	1,044,948,000	
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*	*Laporan*	*2*	*52,000,000*	
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	*Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan*	*Ha*	*511053*	*50,000,000*	
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	*Jumlah Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan*	*Unit*	*1*	*15,474,000*	
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	*Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan*	*Unit*	*65*	*202,000,000*	
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	*Jumlah Prasarana Pascapanen Hortikultura yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan*	*Unit*	*2*	*52,000,000*	
			Peningkatan Pascapanen Dan Pengolahan Hasil Perkebunan	*Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan*	*Unit*	*1*	*202,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	*Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan*	*Unit*	*2*	*202,000,000*	
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	*Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan*	*Unit*	*3*	*15,474,,000*	
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	*Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan*	*Unit*	*5*	*102,000,000*	
			Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	*Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian*	*Dokumen*	*1*	*152,000,000*	
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Unit	6	1,410,351,000	
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Embung Pertanian	*Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*Unit*	*1*	*5,000,000*	
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*Unit*	*1*	*1,228,851,000*	
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan DAM Parit	*Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*Unit*	*1*	*5,000,000*	
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Di Kecamatan Srta Sarana Pendukungnya	*Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*Unit*	*1*	*1,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*Unit*	*1*	*20,500,000*	
			Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*JumlahJaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi*	*Unit*	*1*	*150,000,000*	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)**	**%**	**100**	**310,000,000**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan**
			Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Hektar	2318	310,000,000	
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	*Ha*	*2313*	*305,000,000*	
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani*	*Ha*	*5*	*5,000,000*	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	**Persentase ketersediaan infrastruktur lumbung pangan**	**%**	***100***	***1,000,000***	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan**
			Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	Unit	1	1,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
			Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	*Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia*	*Unit*	*1*	*1,000,000*	
			Program Peningkatan Diverisifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	**Skor Pola Pangan Harapan**	**%**	**89.5**	**396,816,200**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan**
			Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Seusia Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitasi Pasokan Dan Harga Pangan				340,726,000	
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*	*Keluarga*	*15*	*158,597,000*	
			Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Di Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota*	*Laporan*	*5*	*123,286,000*	
			Pemantauan Stok Pangan	*Informasi Stok Pangan*	*Dokumen*	*11*	*29,002,000*	
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	*Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota*	*Laporan*	*2*	*1,000,000*	
			Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	*Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	*11*	*26,841,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan Pokok Strategis	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis*	*Laporan*	*11*	*1,000,000*	
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (Nbm)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*	*Dokumen*	*1*	*1,000,000*	
			Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	Ton	11	74,767,000	
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	*Ton*	*5*	*74,767,000*	
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Dokumen Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	2	56,090,200	
			Penyusunan Dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*	*Dokumen*	*1*	*35,095,600*	
			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	*Laporan*	*1*	*20,994,600*	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	**Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan**	**%**	**100**	**81,909,400**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan**
			Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	Dokumen	1	45,609,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*	*Dokumen*	*1*	*45,690,400*	
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			*1*	*36,219,000*	
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	*1*	*16,000,000*	
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Dan Gizi Kabupaten/Kota	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota*	*Laporan*	*1*	*12,719,000*	
			Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan Dan Gizi Kabupaten/Kota	*Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	*1*	*7,500,000*	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	**Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan**	**%**	**100**	**44,511,500**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan**
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				44,511,500	
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	*1*	*2,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	*1*	*36,761,500*	
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	*Jumlah pelaksanaan Koordinasi, dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan*	*Laporan*	*1*	*5,750,000*	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**	**Ton**	**2428,29**	**200,000,000**	**Dinas Peternakan Dan Perikanan**
			Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%)	%	100,00	200,000,000	
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)*	*Unit*	*15*	*200,000,000*	
			Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil (%)	%	100,00	120,000,000	
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	*Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitaasnya (Orang)*	*Orang*	*120*	*120,000,000*	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**	**Ton**	**1,290.91**	**600,000,000**	**Dinas Peternakan Dan Perikanan**
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			100	600,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)*	*Unit*	*2*	*300,000,000*	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)*	*Unit*	*12*	*300,000,000*	
			Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	**Persenase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikann (%)**	**%**	**75**	**20,000,000**	**Dinas Peternakan Dan Perikanan**
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				20,000,000	
			Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan Dan/Atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota*	*Pelaku Usaha*	*415*	*20,000,000*	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	**Jumlah produksi Daging (Kilogram)**	**Kilogram**	**3347561**	**920,000,000**	**Dinas Peternakan Dan Perikanan**
				Jumlah Produksi Telur		**50673257**		

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Akseptor Yang Dilayani (%)	%	10	40,000,000	
			Peningkatan Kualitas Sdg Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*	*Dokumen*	*12*	*40,000,000*	
			Peningkatan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota				15,000,000	
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	*Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil*	*Laporan*	*12 Laporan*	*15,000,000*	
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	%	20%	865,000,000	
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*	*Ton*	*0*		
			Pengadaan Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	*Ekor*	*2000 ekor ayam*	*480,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pengadaan Benih Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	*Dosis*	*4500 dosis*	*385,000,000*	
		2 Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani**	**%**	**3.35**	**31,000,000**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan**
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				31,000,000	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*Unit*	*11*	*5,000,000*	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan Dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*Unit*	*50*	*5,000,000*	
			Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	*Unit*	*11*	*5,000,000*	
			Pembentukan Dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi*	*Unit*	*2*	*5,000,000*	
			Penyediaan Dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	*Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya*	*Orang*	*32*	*5,000,000*	
			Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*Unit*	*1*	*5,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi Dan Inovasi Pertanian	*Jumlah Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian*	*Dokumen*	*2*	*1,000,000*	
			Program Penyuluhan Pertanian	**Rasio Penyuluh Peternakan terhadap Pelaku Utaman Peternakan/Kelompok Ternak (Rasio)**	Rasio	1:19	35,000,000	**Dinas Peternakan Dan Perikanan**
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluhan Peternakan Terhadap pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak	Rasio	1:19	35,000,000	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*Unit*	*11*	*15,000,000*	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan Dan Desa	*Jumlah kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*unit*	*1341*	*20,000,000*	
		3 Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun**	**%**	**5.69**	**886,796,500**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan**
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Terlaksana	Kegiatan	13	886,796,500	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	*Laporan*	*2*	*305,250,000*	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	*Laporan*	*3*	*569,546,500*	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman	*Jumlah benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih yang diperbanyak*	*Ton*	*0,1*	*2,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pangan Berbentuk Biji/ Benih					
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan*	*Laporan*	*1*	*2,000,000*	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura*	*Laporan*	*2*	*2,000,000*	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan*	*Laporan*	*5*	*2,000,000*	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan*	*Laporan*	*2*	*2,000,000*	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura*	*Laporan*	*2*	*2,000,000*	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian**	**%**	**100**	**2,455,299,000**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan**
			Pengembangan Prasarana Pertanian				1,044,948,000	
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*	*Laporan*	*2*	*52,000,000*	
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	*Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan*	*Ha*	*511053*	*50,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	*Jumlah Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan*	*Unit*	*1*	*15,474,000*	
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	*Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan*	*Unit*	*65*	*202,000,000*	
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	*Jumlah Prasarana Pascapanen Hortikultura yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan*	*Unit*	*2*	*52,000,000*	
			Peningkatan Pascapanen Dan Pengolahan Hasil Perkebunan	*Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan*	*Unit*	*1*	*202,000,000*	
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	*Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan*	*Unit*	*2*	*202,000,000*	
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	*Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan*	*Unit*	*3*	*15,474,000*	
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	*Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan*	*Unit*	*5*	*102,000,000*	
			Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	*Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian*	*Dokumen*	*1*	*152,000,000*	
			Pembangunan Prasarana Pertanian				1,410,351,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Embung Pertanian	*Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*Unit*	*1*	*5,000,000*	
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*Unit*	*1*	*1,228,851,000*	
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan DAM Parit	*Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*Unit*	*1*	*5,000,000*	
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Srta Sarana Pendukungnya	*Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*Unit*	*1*	*1,000,000*	
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*Unit*	*1*	*20,500,000*	
			Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*JumlahJaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi*	*Unit*	*1*	*150,000,000*	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)**	**%**	**100**	**310,000,000**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan**
			Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				310,000,000	
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	*Ha*	*2313*	*305,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani*	*Ha*	*5*	*5,000,000*	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	**Persentase ketersediaan infrastruktur lumbung pangan**	**%**	***100***	***1,000,000***	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan**
			Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan yang dimanfaatkan			1,000,000	
			Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	*Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia*	*Unit*	*1*	*1,000,000*	
			Program Peningkatan Diverisifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	**Skor Pola Pangan Harapan**	**%**	**895**	**407,491,000**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan**
			Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Seusia Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitasi Pasokan Dan Harga Pangan				312,724,000	
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*	*Keluarga*	*15*	*158,597,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Di Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota*	*Laporan*	*5*	*123,286,000*	
			Pemantauan Stok Pangan	*Informasi Stok Pangan*	*Dokumen*	*11*	*29,002,300*	
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	*Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota*	*Laporan*	*2*	*1,000,000*	
			Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	*Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	*11*	*26,841,000*	
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan Pokok Strategis	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis*	*Laporan*	*11*	*1,000,000*	
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (Nbm)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*	*Dokumen*	*1*	*1,000,000*	
			Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				150,000,000	
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	*Ton*	*5*	*150,000,000*	
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Dokumen Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	2	56,090,200	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Penyusunan Dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*	*Dokumen*	*1*	*35,095,000*	
			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	*Laporan*	*1*	*20,994,600*	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	**Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan**	**%**	**100**	**81,909,400**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan**
			Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	Dokumen	1	45,690,400	
			Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*	*Dokumen*	*1*	*45,690,400*	
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang Tertangani	Desa	1	36,219,000	
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	*1*	*16,000,000*	
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota*	*Laporan*	*1*	*12,719,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Kerawanan Pangan Dan Gizi Kabupaten/Kota					
			Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan Dan Gizi Kabupaten/Kota	*Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	*1*	*7,500,000*	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	**Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan**	**%**	**100**	**44,511,500**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan**
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				44,511,500	
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	*1*	*2,000,000*	
			Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	*1*	*36,761,500*	
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	*Jumlah pelaksanaan Koordinasi, dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan*	*Laporan*	*1*	*5,750,000*	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**	**Ton**	**2428,29**	**320,000,000**	**Dinas Peternakan Dan Perikanan**
			Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan				280,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota					
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)*	*Unit*	*15*	*280,000,000*	
			Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota				40,000,000	
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	*Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitaasnya (Orang)*	*Orang*	*10*	*40,000,000*	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**	**Ton**	**1,290,91**	**600,000,000**	**Dinas Peternakan Dan Perikanan**
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Produksi Perikanan Budidaya (%)	%	100	600,000,000	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)*	*Unit*	*2*	*300,000,000*	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)*	*Unit*	*12*	*300,000,000*	
			Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	**Persenase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikann (%)**	**%**	**75**	**20,000,000**	**Dinas Peternakan Dan Perikanan**
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat	Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Org)	orang		20,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					
			Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan Dan/Atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota	*Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota*	*Pelaku Usaha*	*415*	*20,000,000*	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	**Jumlah produksi Daging Jumlah produksi Telur**	**Kilogram**	**3347561 50673257**	**920,000,000**	**Dinas Peternakan Dan Perikanan**
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				40,000,000	
			Peningkatan Kualitas Sdg Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*	*Dokumen*	*12*	*40,000,000*	
			Peningkatan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota				15,000,000	
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	*Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil*	*Laporan*	*12 Laporan*	*15,000,000*	
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan				865,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	*Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*	*Ton*	*0*		
			Pengadaan Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	*Ekor*	*2000*	*480,000,000*	
			Pengadaan Benih Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	*Dosis*	*4500r*	*385,000,000*	
		4 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian**	**%**	**100**	**20,500,000**	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
			Pembangunan Prasarana Pertanian				20,500,000	
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*Unit*	*1*	*20,500,000*	
3.	Kesehatan untuk semua	1 Stunting	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat**	**%**	**100**	**1,050,000,000**	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan				1,050,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	*Orang*	*6,065*	*250,000,000*	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	*Orang*	*6,750*	*200,000,000*	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	*Orang*	*5,612*	*200,000,000*	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	*Orang*	*25,100*	*200,000,000*	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	*Orang*	*54,992*	*200,000,000*	
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ ASFR)**	**%**	**100**	**1,630,200,000**	**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
			Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga				1,630,200,000	
			Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*	*Laporan*	*741*	*741,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/ Balita)					
			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/Balita)	*Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan*	*Laporan*	*741*	*889,200,000*	
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	**Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive prevalence Rate/mCPR)**	**%**	**100**	**492,250,000**	**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
			Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Kader yang ikut dalam Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB	%	100	492,250,000	
			Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah DASHAT di Kampung KB*	*Unit*	*63*	*346,500,000*	
			Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	*Kampung*	*25*	*145,125,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di kampung KB	*Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB*	*Dokumen*	*1*	*625,000,000*	
			Program Pengendalian Penduduk	**Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) pada kelompok umur 25-49 Tahun**	**%**		**203,585,700**	**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD yang terlibat Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten			203,585,700	
			Penyediaan Data Dan Informasi Keluarga	*Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya*	*Dokumen*	*1*	*6,385,700*	
			Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*	*Laporan*	*11*	*65,200,000*	
			Pengolahan Dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan KB	*Jumlah LaporanPengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*	*Laporan*	*11*	*132,000,000*	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	**Persentase Rumah yang mengakses Air Bersih**	**%**	**95.21**	**2,535,768,000**	**Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat**
			Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk berakses air minum	%		2,535,768,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis SPAM	*Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun*	*Dokumen*	*1*	*170,000,000*	
			Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan/Perbaikan Spam	*Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM*	*Dokumen*			
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Peipaan	*Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu*	*Liter / Detik*	*15*	*1,315,768,000*	
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun*	*Liter / Detik*	*2,5*	*525,000,000*	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan*	*SR*	*150*	*525,000,000*	
			Program Pengelolaan Pendidikan	**Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 - 6 Tahun**			195,000,000	**Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan**
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	Persentase Lembaga PAUD Terakreditasi Minimal B	%		195,000,000	
				Persentase Pendidik PAUD yang Berkualifikasi Minimal S1/D4	%			
			Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	*Satuan Pendidikan*	223	195,000,000	
		2 Pemeriksaan Kesehatan Gratis	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat**	**%**	**100**	**3,501,000,000**	**Dinas Kesehatan**

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	3,501,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Orang	6,065	250,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Orang	6,750	200,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Orang	5,612	200,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Orang	25,100	200,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Orang	54,990	200,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	*Jumlah Usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Orang	195,092	200,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	*Jumlah penduduk Usia Lanjut yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Orang	21,212	200,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	*Dokumen*	*2*	*413,000,000*	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	Dokumen	1	50,000,000	
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	Dokumen	2	227,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	*Orang*	*17,895*	*200,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	*Orang*	*2,876*	*200,000,000*	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	*orang*	*7,400*	*200,000,000*	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	*Dokumen*	*1*	*250,000,000*	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan NAPZA	*Jumlah orang dengan masalah jiwa dan NAPZA mendapat pelayanan kesehatan*	*orang*	*252*	*200,000,000*	
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	*Dokumen*	*2*	*311,000,000*	
		3 Jaminan Kesehatan Nasional	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat**	**%**	**100**	74,187,641,000	**Dinas Kesehatan**
			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				74,187,641,000	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	Dokumen	2	74,187,641,000	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	**Persentase Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial**	**%**	**100**	**80,000,000**	**Dinas Sosial**

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			100	*30,000,000*	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan*	*Usulan*	*40*	*30,000,000*	
		4 Penuntasan TBC	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat**	**%**	**100**	**301,000,000**	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			301,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	*Orang*	*5999*	*200,000,000*	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	*Orang*	*890*	*101,000,000*	
		5 Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat**	**%**	**100**	**11,518,428,000**	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang tersedia	%	100	8,200,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana Dan Prasarana Pendukungnya	*Jumlah Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang terbangun*	Unit			
			Pengembangan Rumah Sakit	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*	*Unit*	*1*	*2,000,000,000*	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	*Unit*	*25*	*2,000,000,000*	
			Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Teelihara Sesuai Standar*	*Unit*	*5*	*200,000,000*	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	*Paket*	*55*	*4,000,000,000*	
			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2,929,770,000	
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	*Dokumen*	*1*	*2,929,770,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			*388,658,000*	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	*Dokumen*	*1*	*388,658,000*	
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1 Pembangunan dan Revitalisasi PAUD	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 - 6 Tahun**	**%**	**87.53**	**15,814,765,000**	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	Persentase Lembaga PAUD Terakreditasi Minimal B	%		15,814,765,000	
				Persentase Pendidik PAUD yang Berkualifikasi Minimal S1/D4	%			
			Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun*	*Unit*	11	7,739,000,000	
			Pengadaan Perlengkapan Paud	*Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia*	*Paket*	11	30,000,000	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Paud	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	*Peserta Didik*	110	15,000,000	
			Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD*	*Orang*	1	20,000,000	
			Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	*Orang*	1	35,000,000	
			Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	*Satuan Pendidikan*	223	195,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pengelolaan Dana Bop Paud	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*	*Satuan Pendidikan*	9775	6,000,000,000	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD*	*Orang*	223	15,000,000	
			Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan*	*Konten Digital*	223	10,000,000	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*	*Orang*	223	25,000,000	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	*Dokumen*	223	120,000,000	
			Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	*Dokumen*	1	15,000,000	
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi*	*Komunitas*	4	5,000,000	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	*Ruang*	11	200,000,000	
			Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	*Peerta Didik*	223	25,000,000	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	*Orang*	223	200,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (Usb)	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun*	*Unit*	10	200,000,000	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	*Paket*	11	50,000,000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*Unit*	11	202,000,000	
			Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa PAUD	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia*	*Paket*	11	289,765,000	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Paud	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar*	*Satuan Pendidikan*	223	20,000,000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat*	*Ruang*	20	202,000,000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*Ruang*	20	202,000,000	
			Program Pengembangan Kurikulum	**Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal**	**%**	**20**	**300,000,000**	**Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan**
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	Persentase Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	20	300,000,000	
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	*Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun*	*Dokumen*	2	100,000,000	
			Penyusunan Model-Model Pembelajaran Inovatif	*Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini*	*Dokumen*	2	100,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	*dan Pendidikan Nonformal yang tersusun*				
			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun*	*Dokumen*	2	100,000,000	
		2 Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 7 - 12 Tahun	%	99.85	63,325150,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 13 - 15 Tahun	%	90.73		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	%		41,253,250,000	
				Angka Kelulusan SD/MI	%			
				Persentase SD/MI dengan Kondisi Bangunan Baik	%			
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*	Ruang	12	802,000,000	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*	Ruang	10	302,000,000	
			Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	Unit	65	10,742,250,000	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	Paket	15	200,000,000	
			Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	Peserta didik	70	285,000,000	
			Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*	Orang	1	20,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	Orang	25	50,000,000	
			Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	Satuan Pendidikan	235	28,000,000,000	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*	Orang	235	20,000,000	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	Dokumen	1	100,000,000	
			Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	Dokumen	1	50,000,000	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	Paket	5500	202,000,000	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	Ruang	10	200,000,000	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untukPeningkatanKapasitasBidang Pendidikan yang dilaksanakan*	Orang	22	30,000,000	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belaja*	Satuan Pendidikan	237	25,000,000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	Ruang	13	200,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	Peserta didik	10000	25,000,000	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs			22,071,900,000	
				Angka Kelulusan SMP/MTs				
				Persentase SMP/MTs dengan Kondisi Bangunan Baik				
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*	Ruang	4	502,000,000	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*	Ruang	5	302,000,000	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*	Ruang	8	202,000,000	
			Pembangunan Laboratorium	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun*	Ruang	10	202,000,000	
			Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun*	Unit	10	202,000,000	
			Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	Unit	25	6,470,000,000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	Ruang	12	250,000,000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	*Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat*	Ruang	5	202,000,000	
			Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*	Paket	15	102,000,000	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	Paket	15	102,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	Peserta Didik	3500	15,000,000	
			Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	Peserta Didik	99	300,000,000	
			Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	Orang	1	20,000,000	
			Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	Orang	25	50,000,000	
			Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	Satuan Pendidikan	50	12,053,400,000	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*	Orang	50	20,000,000	
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*	Orang	50	305,500,000	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	Dokumen	1	150,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	Dokumen	1	50,000,000	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	Satuan Pendidikan	50	45,000,000	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	Ruang	8	200,000,000	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	Orang	22	25,000,000	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	Paket	3500	100,000,000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	Ruang	10	202,000,000	
		3 Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun Kesetaraan**	**%**	**18.40**	**2,290,800,000**	**Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan**
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2,290,800,000	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	Peserta Didik	110	185,000,000	
			Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	Orang	1	25,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	6	80,000,000	
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1048	1,738,800,000	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	223	50,000,000	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	6	25,000,000	
			Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	30,000,000	
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunikasi	4	25,000,000	
			Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	4	25,000,000	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	6	20,000,000	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	6	35,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	50	52,000,000	
		4 Makan Bergizi Gratis	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 - 6 Tahun**	**%**	**87.53**	**485,000,000**	**Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan**
				Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 7 - 12 Tahun	**%**	**99.85**		
				Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 13 - 15 Tahun	**%**	**90.73**		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI			150,000,000	
				Angka Kelulusan SD/MI				
				Persentase SD/MI dengan Kondisi Bangunan Baik				
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	*Dokumen*	*1*	*100,000,000*	
			Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	*Dokumen*	*1*	*50,000,000*	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs			200,000,000	
				Angka Kelulusan SMP/MTs				
				Persentase SMP/MTs dengan Kondisi Bangunan Baik				
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	*Dokumen*	*1*	*50,000,000*	
			Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	*Dokumen*	*1*	*150,000,000*	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	Persentase Lembaga PAUD Terakreditasi Minimal B			135,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
				Persentase Pendidik PAUD yang Berkualifikasi Minimal S1/D4	%	8462		
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	*Dokumen*	*223*	*120,000,000*	
			Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	*Dokumen*	*1*	*15,000,000*	
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1 Pengendalian Inflasi	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	%		30,000,000	Sekretariat Daerah
				Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan	%			
				Tingkat kematangan UKPBJ	Level			
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4	30,000,000	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	4		
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2		
			Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	*Laporan*	*2*	*30,000,000*	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	%	100	20,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar	Laporan	1	20,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Agen Dan Pasar Rakyat	*Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat*	*Laporan*	*12*	*20,000,000*	
			Program Peningkatan Diverisifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	**Skor Pola Pangan Harapan**	**%**	**89.5**	**450,000,000**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Ketahanan Pangan Dan Perkebunan**
			Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Seusia Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitasi Pasokan Dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Informasi Ketahanan Pangan			300,000,000	
			Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Di Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota*	*Laporan*	*5*	*123,286,000*	
			Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	*Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	*11*	*26,841,000*	
			Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang Dikelola			150,000,000	
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	*Ton*	*5*	*150,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)**	**%**	**100**	**310,000,000**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Ketahanan Pangan Dan Perkebunan**
			Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Hektar		310,000,000	
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	*Ha*	*2313*	*305,000,000*	
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani*	*Ha*	*5*	*5,000,000*	
			Program Rehabilitasi Sosial	**Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti**	**%**	**100**	**35,000,000**	**Dinas Sosial**
				Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti				
				Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti				
				Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti				
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi	%	100	35,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial					
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	*Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Orang*	*19*	*35,000,000*	
		2 Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase koperasi sehat**	**%**	**7.5**	**50,000,000**	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi
			Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	%	78	50,000,000	
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan*	*Unit usaha*	*30*	*50,000,000*	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	**Persentase koperasi aktif**	**%**	**68.50**	**30,000,000**	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi
			Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah	Persentase anggota koperasi yang dilatih	%		50,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota					
			Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian*	*orang*	*20*	*50,000,000*	
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	**Persentase Koperasi Berkualitas**	**%**	**23.20**	**25,000,000**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi**
			Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan Dan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab			25,000,000	
			Pembinaan Dan Pendampingan Bagi Keluarga Dan Kelompok Masyarakat Yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	*Pembinaan dan atau pendampingan yang dilaksanakan*	*Kelompok masyarakat*	*5*	*5,000,000*	
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataanmanajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha	*Jumlah unit usaha yg produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan maajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha*	*unit usaha*	*5*	*5,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pemberdayaan Koperasi Dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	*Koperasi dengan keanggotaan daerah kab/kota*	*unit usaha*	*10*	*15,000,000*	
		3 Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	100	146,082,252,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	%			
			Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Jumlah Dokumen yang Tersusun			600,000,000	
			Koordinasi Dan Penyusunan KUA Danppas	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	*Dokumen*	*2*	*100,637,400*	
			Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yangDisusun*	*Dokumen*	*2*	*69,672,000*	
			Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*	*Dokumen*	*3*	*36,000,000*	
			Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*	*Dokumen*	*3*	*45,000,000*	
			Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi*	*Dokumen*	*3*	*32,000,000*	
			Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi*	*Dokumen*	*3*	*27,000,000*	
			Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	*Dokumen*	*2*	*102,360,600*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	*Dokumen*	*2*	*78,000,000*	
			Koordinasi Dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	*Dokumen*	*2*	*21,989,000*	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan*	*Dokumen*	*2*	*18,536,000*	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah*	*Dokumen*	*2*	*21,317,000*	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan*	*Dokumen*	*2*	*21,988,000*	
			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	*Orang*	*2*	*25,500,000*	
			Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan		100%	195,000,000	
			Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan KasDaerah*	*Dokumen*	*12*	*50,000,000*	
			Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya*	*Laporan*	*12*	*25,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendaliandan Penerbitan Anggaran Kas Dan SPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	*Dokumen*	*12*	*25,000,000*	
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah*	*Dokumen*	*12*	*15,000,000*	
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangandan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangandan Dana Transfer Lainnya*	*Dokumen*	*12*	*15,000,000*	
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama Dan Pemantauan Transaksi Non Tunai Dengan Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan TransaksiNon Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*	*Dokumen*	*12*	*15,000,000*	
			Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	*Laporan*	*36*	*15,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Koordinasi Pelaksanaan Piutang Dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisispembiayaan Dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutangdan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas*	*Dokumen*	*6*	*5,000,000*	
			Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaandan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotonganatas SP2D dengan Instansi Terkait*	*Dokumen*	*2*	*15,000,000*	
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggungjawabansub Kegiatan	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaandan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*	*Dokumen*	*12*	*10,000,000*	
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	*Orang*	*2*	*5,000,000*	
			Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi		100%	214,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah*	*Laporan*	*12*	*10,000,000*	
			Rekonsiliasi Dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO Dan Beban	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*	*Dokumen*	*480*	*10,000,000*	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan Dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	*Laporan*	*18*	*15,000,000*	
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	*Laporan*	*1*	*10,000,000*	
			Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturankepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentangPenjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	*2*	*50,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	*Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	*Dokumen*	*1*	*50,000,000*	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaandan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*	*Dokumen*	*25*	*12,000,000*	
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	*Dokumen*	*1*	*5,000,000*	
			Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	*Dokumen*	*1*	*10,000,000*	
			Penyusunan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*	*Dokumen*	*1*	*10,000,000*	
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporandan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	*Orang*	*2*	*12,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Blud Kabupaten/Kota	*Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina*	*Lembaga*	*2*	*10,000,000*	
			Koordinasi Dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota*	*Laporan*	*1*	*10,000,000*	
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	145,058,252,000	
			Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok Dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah*	*Laporan*	*12*	*2,850,000,000*	
			Analisis Perencanaan Dan Penyaluranbantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	*Laporan*	*68*	*128,278,118,000*	
			Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	*Laporan*	*1*	*5,000,000,000*	
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*	*Laporan*	*12*	*8,930,134,000*	
			Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan		100%	15,000,000	
			Inventarisasi Dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah*	*Dokumen*	*12*	*5,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah*	*Dokumen*	*12*	*5,000,000*	
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	*Orang*	*12*	*5,000,000*	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Persentase PAD terhadap pendapatan daerah**	**%**	**17.94**	**4,222,000,000**	**Badan Pendapatan Daerah**
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	**%**	**100**		
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	**%**	**100**		
			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%		4,222,000,000	
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana pengelolaan Pajak Daerah*	*Dokumen*	*1*	*32,000,000*	
			Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah*	*Dokumen*	*3*	*56,285,000*	
			Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	*Laporan*	*2*	*48,340,000*	
			Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*	*Unit*	*2*	*96,892,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	*Laporan*	*4*	*5,075,000*	
			Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	*Laporan*	*1*	*291,013,000*	
			Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	*Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya*	*Objek Pajak*	*5000*	*2,967,680,000*	
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen ketetapan pajak daerah*	*Dokumen*	*10000*	*5,953,000*	
			Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	*Jumlah layanan dan konsultasi pajak Daerah*	*Layanan*	*12*	*2,310,000*	
			Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi*	*Dokumen*	*605*	*2,310,000*	
			Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	*Dokumen*	*30000*	*563,211,000*	
			Pengendalian, Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Dokumen*	*4*	*47,316,000*	
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti*	*Dokumen*	*10*	*7,310,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	*Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*	*Laporan*	*4*	*44,954,000*	
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	*Laporan*	*12*	*51,351,000*	
		4 Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja bersetifikat kompetensi**	**%**	**32**	**10,075,000,000**	
			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan	%	51	10,075,000,000	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*	*Orang*	*790*	*10,000,000,000*	
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/Kota	*Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja*	*Unit*	*2*	*75,000,000*	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	**Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun**	**%**	**5.69**	**886,796,500**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan**
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Terlaksana	Kegiatan	13	886,796,500	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	*Laporan*	*2*	*305,250,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi					
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	*Laporan*	*3*	*569,546,500*	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	*Jumlah benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih yang diperbanyak*	*Ton*	*0.1*	*2,000,000*	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan*	*Laporan*	*1*	*2,000,000*	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura*	*Laporan*	*2*	*2,000,000*	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan*	*Laporan*	*5*	*2,000,000*	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan*	*Laporan*	*2*	*2,000,000*	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura*	*Laporan*	*2*	*2,000,000*	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian**	**%**	**100**	**2,455,299,000**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan**
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pertanian yang terlaksana	Kegiatan	10	1,044,948,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*	*Laporan*	*2*	*52,000,000*	
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	*Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan*	*Ha*	*511053*	*50,000,000*	
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	*Jumlah Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan*	*Unit*	*2*	*15,474,000*	
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	*Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan*	*Unit*	*65*	*202,000,000*	
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	*Jumlah Prasarana Pascapanen Hortikultura yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan*	*Unit*	*2*	*52,000,000*	
			Peningkatan Pascapanen Dan Pengolahan Hasil Perkebunan	*Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan*	*Unit*	*1*	*202,000,000*	
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	*Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan*	*Unit*	*2*	*202,000,000*	
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	*Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan*	*Unit*	*3*	*15,474,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	*Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan*	*Unit*	*5*	*102,000,000*	
			Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	*Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian*	*Dokumen*	*1*	*152,000,000*	
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Unit	6	1,410,351,000	
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Embung Pertanian	*Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*Unit*	*1*	*5,000,000*	
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*Unit*	*1*	*1,228,851,000*	
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan DAM Parit	*Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*Unit*	*1*	*5,000,000*	
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Di Kecamatan Serta Sarana Pndukungnya	*Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*Unit*	*1*	*1,000,000,000*	
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*Unit*	*1*	*20,500,000*	
			Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*JumlahJaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi*	*Unit*	*1*	*150,,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	**Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha**	**%**	**20**	**175,000,000**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi**
			Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	%	20	175,000,000	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro*	*unit usaha*	*30*	*140,000,000*	
			Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	*Jumlah unit usaha mikro terdata*	*unit usaha*	*200*	*20,000,000*	
			Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Usaha Mikro Dan Kewirausahaan	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan*	*orang*	*15*	*15,000,000*	
			Program Pengembangan Umkm	**Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasitasi pengembang an**	**%**	**3.5**	**50,000,000**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi**
			Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasitasi pengembangan	%		50,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain Dan Teknologi	*Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi*	*unit*	*1*	*50,000,000*	
		5 Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**	**%**	**100**	**178,758,000**	Dinas Lingkungan Hidup
			Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PLH Kabupaten/Kota	%	100	168,758,000	
			Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	*Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan*	*Dokumen*	*1*	*168,758,000*	
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	%	-	10,000,000	
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	*Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun*	*Dokumen*	*1*	*5,000,000*	
			Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	*Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun*	*Dokumen*	*2*	*5,000,000*	
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	**Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup**	**%**	**100**	**100,000,000**	
			Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	%	100	75,000,000	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*	*Dokumen*	*2*	*25,000,000*	
			Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut	*Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)*	*Lokasi*	*2*	*15,000,000*	
			Pengambilan Contoh Uji Dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	*Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan*	*Paket*	*2*	*20,000,000*	
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan*	*Dokumen*	*2*	*15,000,000*	
			Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	%	100	25,000,000	
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan*	*Laporan*	*12*	*10,000,000*	
			Penghentian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	*Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan*	*Titik*	*12*	*15,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	**Persentase luas RTH Publik dan Privat dari Wilayah Kota/Perkotaan**	**%**	**24,46**	**1,755,000,000**	
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan RTH publik kewenangan DLH yang terkelola			1,780,000,000	
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Hektar*	*50*	*1,750,000,000*	
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	*Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Unit*	*1*	*30,000,000*	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	**Persentase Pengurangan Limbah B3**	**%**	**100**	**43,000,000**	
			Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	100	20,000,000	
			Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	*Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan*	*Usaha*	*6*	*20,000,000*	
			Pengumpulan Limbah B3 Dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				23,000,000	
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan,	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan*	*Dokumen*	*6*	*23,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Pemanfaatan, Pengolahan, Dan/Atau Penimbunan	*dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya*				
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH)	**Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**%**	**100**	37,000,000	
			Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				37,000,000	
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuaan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan*	*Dokumen*	*7*	*10,000,000*	
			Pengawasan Perizinan Berusaha Atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Perundang - Undang Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*	*Badan Usaha*	*35*	*27,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	**Presentase pengakuan keberadaan MHA, Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**%**	**100**	**10,000,000**	
			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, Dan Hak MH A Yang Terkait Dengan PPLH	Cakupan Data dan Informasi Tentang Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	%	100	10,000,000	
			Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data, Dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH*	*Dokumen*	*1*	*10,000,000*	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	**Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup**	**Predikat**	**Adiwiyata/Adipura**	**37,000,000**	
			Pemberiaan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	%		37,000,000	
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH*	*Entitas*	*8*	*37,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	**Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**15,000,000**	
			Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	%	100	15,000,000	
			Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani*	*Pengaduan*	*10*	*15,000,000*	
			Program Pengelolaan Persampahan	**Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota**	**%**	**81**	**10,257,194,000**	
			Pengelolaan Sampah				**10,257,194,000**	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*	*Kelompok*	*2*	*20,000,000*	
			Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Si TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	*Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, penguumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemprosesan akhir*	*Unit*	*2*	*4,442,252,000*	
			Penyusunan Rencana Kebiajakan Dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen kebijkan dan strategis daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan diterapkan*	*Dokumen*	*2*	*20,000,000*	
			Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	*Jumlah Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan*	*Ton*	*27021,25*	*3,000,000,000*	

No.	ProSN	Proyek/ Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Opd Pelaksana
			Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah	*Persentase luas layanan pengumpulan sampah*	*%*	*88*	*10,000,000*	
			Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PItsa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah Dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan*	*Ton*	*9260,03*	*1,779,942,000*	
			Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah	*Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah*	*Laporan*	*7*	*10,000,000*	
			Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST Kabupaten/Kota Atau TPA/TPST Regional	*jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional*	*Ton*	*38,500*	*975,000,000*	

Sumber: Tim Penyusun RKPD 2026, diolah.

4.5. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

Integrasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang demokratis dan partisipatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan DPRD harus menjadi bagian integral dalam penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan. Pokok-pokok pikiran DPRD telah melalui proses telaah, verifikasi dan validasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Mekanisme ini mencerminkan prinsip sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan daerah, dimana fungsi legislatif DPRD sebagai wakil rakyat dapat memberikan masukan substantif terhadap arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.

Proses integrasi dimulai dengan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD yang dilakukan pada saat pembahasan rancangan RKPD atau dalam forum-forum konsultasi perencanaan lainnya. Pokok-pokok pikiran ini merupakan penyaringan aspirasi masyarakat yang telah diserap oleh anggota DPRD melalui berbagai kegiatan seperti reses, kunjungan kerja, dialog dengan konstituen, maupun hasil kajian fraksi terhadap isu-isu strategis pembangunan daerah. Substansi pokok-pokok pikiran DPRD umumnya mencakup prioritas pembangunan yang perlu mendapat perhatian khusus, Program-Program inovatif yang perlu dikembangkan, penguatan pelayanan publik di bidang tertentu, pengembangan potensi ekonomi daerah, serta penyelesaian permasalahan-permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah. Saran dan masukan DPRD dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
2	Peningkatan Kualitas SDM Petani dan Peternak
3	Penanganan Hama dan penyakit Pertanian
4	Pengendalian Banjir
5	Sarana dan Prasarana Olahraga
6	Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan
7	Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan
8	Pemenuhan Air Bersih Masyarakat
9	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Irigasi
10	Peningkatan sarana prasarana tempat ibadah, pesantren dan tpa serta kegiatan keagamaan
11	Vaksinasi Ternak
12	Bantuan Bibit Ternak dan Benih Ikan
13	Pemberian Bantuan Masyarakat Miskin
14	Pemenuhan Sarana Perlengkapan Kelompok UMKM
15	Fasilitasi Modal Usaha UKM

16	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perikanan
17	Pengelolaan dan Pemasaran Produk Agribisnis
18	Infrastruktur Pendukung Pertanian seperti jalan tani, irigasi dan pompanisasi
19	Rehabilitasi Pasar
20	Peningkatan Kapasitas SDM pelaku agribisnis
21	Peningkatan Kualitas SDM pelaku UMKM
22	Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja
23	Perluasan cakupan bantuan sosial
24	Bedah Rumah
25	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
26	Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan
27	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
28	Peningkatan Mitigasi Bencana
29	Peningkatan keamanan lingkungan
30	Pembinaan kepemudaan
31	Infrastruktur Penunjang Perumahan
32	Pemasangan Instalasi Listrik bagi Masyarakat Miskin
33	Peningkatan Irigasi

Dalam perumusan prioritas pembangunan daerah tetap memperhatikan keterkaitanya dengan pokok-pokok pikiran DPRD, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.17
Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Pokok-pokok Pikiran DPRD
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
1	PD1. Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustri unggulan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
		Peningkatan Kualitas SDM Petani dan Peternak
		Penanganan Hama dan penyakit Pertanian
		Vaksinasi Ternak
		Bantuan Bibit Ternak dan Benih Ikan
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perikanan
		Pengelolaan dan Pemasaran Produk Agribisnis
		Infrastruktur Pendukung Pertanian seperti jalan tani, irigasi dan pompanisasi
		Rehabilitasi Pasar
		Peningkatan Kapasitas SDM pelaku agribisnis
2	PD2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan	Pemberian Bantuan Masyarakat Miskin
		Pemenuhan Sarana Perlengkapan Kelompok UMKM
		Fasilitasi Modal Usaha UKM
		Peningkatan Kualitas SDM pelaku UMKM
		Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja
		Perluasan cakupan bantuan sosial
		Bedah Rumah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
3	PD3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan
4	PD4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mitigasi bencana	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
		Peningkatan Mitigasi Bencana
		Pengendalian Banjir
5	PD5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius	Sarana dan Prasarana Olahraga
		Peningkatan sarana prasarana tempat ibadah, pesantren dan tpa serta kegiatan keagamaan
		Peningkatan keamanan lingkungan
		Pembinaan kepemudaan
6	PD6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	
7	PD7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas	Infrastruktur Penunjang Perumahan
		Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan
		Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan
		Pemenuhan Air Bersih Masyarakat
		Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Irigasi
		Pemasangan Instalasi Listrik bagi Masyarakat Miskin
		Peningkatan Irigasi

Sumber Data: Pokok-pokok Pikiran DPRD Kab. Sidrap, diolah.

4.6. Pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan, sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan, yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan, ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas, dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan. Penerapan pendekatan tersebut, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

Pendekatan tematik pada RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan agar permasalahan-permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tematik pembangunan dalam RKPD 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18
Integrasi Program pada Tematik Percepatan Penurunan Stunting

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
Penguatan Perencanaaan dan Penganggaran	Pembuatan Surat Keputusan Bupati Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting (SK TPPS)					Dinkes
	Verifikasi dan Evaluasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah terkait	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pangkajene Sidenreng	Bapperida
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan	Intervensi Kelompok Sasaran 1000 HPK	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, Pitu Riawa	Pemdes Ppa
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pengelolaan pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Fasilitasi Pembimbingan Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1.000 HPK	Pangkajene Sidenreng	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
	Peningkatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Perencanaan penyediaan PSU Permukiman	Pangkajene Sidenreng	Dinas Biciptapera
				Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang fungsi permukiman	Semua Kecamatan	Dinas Biciptapera
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman	Pangkajene Sidenreng	Dinas Biciptapera
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Premajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima Belas) ha	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, Pitu Riawa	Dinas Biciptapera
				Perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima Belas) Ha	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, Pitu Riawa	Dinas Biciptapera
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Semua Kecamatan	Dinkes
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Semua Kecamatan	Dinas Sosial

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
	Peningkatan Akses dan Kualitas Gizi dan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Semua Kecamatan	Dinkes
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Semua Kecamatan	Dinkes
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota	Semua Kecamatan	DTPHKPP
		Program Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	Penyedian dan penyeluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/ Distribusi ikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Semua Kecamatan	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	Peningkatan Kesadaran, Komitmen dan Praktik Pengasuhan dan Gizi Ibu dan Anak	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Semua Kecamatan	Dinkes
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pengelolaan pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja Tentang Generasi Berencana	Semua Kecamatan	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Peningkatan kualitas Pemantauan,	Penilaian Kinerja Intervensi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi	Perencanaan, Penganggaran dan	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Pangkajene Sidenreng	Bapperida

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
Evaluasi, dan pelaporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pemerintahan (RPJPD, PJMD dan RKPD)		
	Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaaan pembanungan daerah bidang pembangunan manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pangkajene Sidenreng	Bapperida
peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Peningkatan Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting	Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
	Peningkatan Kapasitas tenaga Kesehatan di Puskesmas dan RS	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Semua Kecamatan	Dinkes
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	Semua Kecamatan	Dinas Pemdes PPA

Sumber Data: tim penyusun RKPD Tahun 2026, diolah.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2026

Kerangka pendanaan daerah dalam RKPD menggambarkan rencana sumber dan alokasi dana untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun yang mencakup proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, kerangka pendanaan ini mempertimbangkan berbagai aspek seperti potensi dan kapasitas fiskal daerah, kebijakan keuangan nasional dan daerah, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Sumber-sumber pendanaan dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah.

Berdasarkan kerangka pendanaan Tahun 2026, kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Berlakunya UU HKPD berpotensi menggerek pendapatan daerah dan membuka potensi bertambahnya pendapatan daerah, diantaranya melalui pilar pengembangan sistem pajak daerah dari 16 menjadi 14 dan merasionalisasi retribusi daerah dari 32 menjadi 18 jenis layanan. Kemudian, UU balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dengan tarif 66 persen. Kebijakan UU HKPD tersebut telah diturunkan dalam bentuk Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan untuk kebijakan belanja daerah yaitu berfokus pada peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, pengendalian utang pihak ketiga, rekrutmen tenaga PPPK dan kegiatan-kegiatan mandatori lainnya sesuai dengan regulasi yang telah diatur. Berikut ini adalah proyeksi kerangka pendanaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026:

Tabel 5.1
Kerangka Pendanaan Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027

No	Uraian	Target APBD (Rp.)	Proyeksi (Rp.)	
		2025	2026	2027
1	Pendapatan Daerah	1.263.931.577.000	1.331.563.071.353	1.419.518.605.559
01.01	Pendapatan Asli Daerah	213.022.657.000	234.548.381.654	242.503.737.559
01.01.01	Pajak Daerah	82.579.585.000	95.550.862.282	99.862.006.806
01.01.02	Retribusi Daerah	8.902.572.000	9.180.053.900	9.627.086.014
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
01.01.04	Lain-lain PAD Yang Sah	115.540.500.000	122.817.465.472	126.014.644.739
	a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000	-	-
	b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	125.000.000	-	200.000.000
	c. Hasil Kerja Sama Daerah	100.000.000	125.000.000	125.000.000
	d. Jasa Giro	1.600.000.000	1.000.000.000	1.350.000.000
	e. Pendapatan Bunga	-	-	-
	f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	787.500.000	500.000.000	525.000.000
	g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain			
	h. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	750.000.000	150.000.000	750.000.000
	i. Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-	-
	j. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-
	k. Pendapatan dari Pengembalian	-	50.000.000	250.000.000
	l. Pendapatan BLUD	112.078.000.000	120.992.465.472	122.814.644.739
	m. Pendapatan Dana Kapitasi JKN			
	n. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah			

No	Uraian	Target APBD (Rp.)	Proyeksi (Rp.)	
		2025	2026	2027
	o. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir			
01.02	**Pendapatan Transfer**	**1.048.908.920.000**	**1.097.014.689.699**	**1.177.014.868.000**
01.02.01	**Transfer Pemerintah Pusat**	**975.951.228.000**	**1.042.014.689.699**	**1.122.014.868.000**
	a.Dana Perimbangan	908.133.478.000	966.191.712.699	1.036.191.891.000
	1. Dana Transfer Umum	714.100.296.000	729.100.296.000	746.191.891.000
	1) Dana Bagi Hasil (DBH)	16.408.405.000	16.408.405.000	18.500.000.000
	2) Dana Alokasi Umum (DAU)	697.691.891.000	712.691.891.000	727.691.891.000
	2. Dana Transfer Khusus	194.033.182.000	237.091.416.699	290.000.000.000
	1) DAK Fisik	27.913.643.000	70.971.877.699	105.000.000.000
	2) DAK Non Fisik	166.119.539.000	166.119.539.000	185.000.000.000
	3) DAK Penugasan			
	4) DAK Afirmasi			
	b.Dana Insentif Daerah (DID)	6.994.773.000	15.000.000.000	25.000.000.000
	c.Dana Desa	60.822.977.000	60.822.977.000	60.822.977.000
01.02.02	**Transfer Antar Daerah**	**72.957.692.000**	**55.000.000.000**	**55.000.000.000**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	72.957.692.000	55.000.000.000	55.000.000.000
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-		
01.03	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**2.000.000.000**	**-**	**-**
01.03.01	Hibah	-		
01.03.02	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis			
01.03.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000.000		
2	**Belanja Daerah**	**1.281.656.577.000**	**1.331.563.071.353**	**1.419.518.605.559**
02.01	**Belanja Operasi**	**1.026.104.112.000**	**919.901.004.096**	**804.316.853.262**
02.01.01	Belanja Pegawai	617.857.772.975	560.763.380.000	520.153.881.000
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	374.355.797.730	343.072.624.096	268.097.972.262

No	Uraian	Target APBD (Rp.)	Proyeksi (Rp.)	
		2025	2026	2027
02.01.03	Belanja Bunga	600.000.000		
02.01.04	Belanja Hibah	33.290.541.295	16.065.000.000	16.065.000.000
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	-		
02.02	**Belanja Modal**	**109.678.864.000**	**257.455.969.040**	**458.810.676.915**
02.02.01	Belanja Tanah	234.400.000		
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	35.824.480.517	34.827.624.600	48.000.000.000
02.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung	32.283.151.830	122.010.766.599	144.927.781.400
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	39.882.919.453	100.617.577.841	265.882.895.515
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.453.912.200		
02.03	**Belanja Tidak Terduga**	**5.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**
02.03.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
02.04	**Belanja Transfer**	**140.873.601.000**	**144.206.098.218**	**146.391.075.382**
02.04.01	Belanja Bagi Hasil	9.148.217.000	10.473.091.618	10.948.909.282
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	131.725.384.000	133.733.006.600	135.442.166.100
	Surplus/defisit	**-17.725.000.000**	-	-
3	**Pembiayaan**			
03.01	**Penerimaan Pembiayaan**	**20.000.000.000**	**-**	**-**
03.01.01	Penggunaan SiLPA	20.000.000.000	-	-
03.02	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2.275.000.000**	**-**	**-**
03.02.01	Penyertaan Modal			
03.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok	2.275.000.000	-	-
	Pembiayaan Netto	**17.725.000.000**	**-**	**-**
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah (diolah); 2025

Kerangka pendanaan daerah menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah yang seimbang, dengan target APBD 2025 sebesar Rp1.263.931.577.000 untuk pendapatan dan Rp1.281.656.577.000 untuk belanja, menghasilkan defisit Rp17.725.000.000 yang ditutup melalui pembiayaan netto. Proyeksi 2026 dan 2027 mencapai keseimbangan sempurna tanpa defisit, mencerminkan perencanaan keuangan yang lebih stabil di masa depan.

Pada sisi pendapatan daerah, terdapat peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan naik dari Rp213.022.657.000 pada 2025 menjadi Rp234.548.381.654 pada 2026 dan Rp242.503.737.559 pada 2027, didorong oleh kenaikan pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Pendapatan transfer, yang menjadi sumber utama, juga meningkat dari Rp1.048.908.920.000 pada 2025 menjadi Rp1.097.014.689.699 pada 2026 dan Rp1.177.014.868.000 pada 2027, terutama melalui dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Komponen lain seperti hibah dan sumbangan relatif minim atau nol di proyeksi mendatang, menekankan ketergantungan pada transfer pusat dan PAD.

Di sisi belanja daerah, alokasi total selaras dengan pendapatan, mencapai Rp1.331.563.071.353 pada 2026 dan Rp1.419.518.605.559 pada 2027. Belanja operasi mendominasi dengan fokus pada belanja pegawai dan barang/jasa, meskipun mengalami penurunan proporsi dari Rp1.026.104.112.000 pada 2025 menjadi Rp919.901.004.096 pada 2026. Belanja modal justru melonjak tajam, dari Rp109.678.864.000 pada 2025 menjadi Rp257.455.969.040 pada 2026 dan Rp458.810.676.915 pada 2027 yang diperuntukkan untuk belanja wajib pelayanan dasar, membiayai visi dan misi kepala daerah dan belanja lainnya. Belanja tidak terduga dan transfer juga dialokasikan secara konservatif, mendukung prioritas pembangunan jangka panjang.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen tahunan yang berisi rencana program dan kegiatan yang disusun dalam bentuk kerangka pendanaan untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 pada tahun berkenaan dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, program nasional, *Suistainable Development Goal's (SDGs)* maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sekaligus menjawab permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis yang ada dan menjawab aspirasi masyarakat serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Semua hal tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dihitung dari kapasitas riil kemampuan keunagan daerah berdasarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2026-2027

No	Uraian	APBD (Rp)	TARGET	PROYEKSI	
		2024	2025	2026	2027
1	Pendapatan	1.247.494.491.726,80	1.263.931.577.000,00	1.331.563.071.353,16	1.419.518.605.558,66
2	Pencairan Dana Cadangan				
3	SiLPA atau Penerimaan Daerah lainnya	46.012.960.133,47	0,00	0,00	0,00
	Total Penerimaan	1.293.507.451.860,27	1.263.931.577.000,00	1.331.563.071.353,16	1.419.518.605.558,66
	Dikurangi:				
4	Belanja Pegawai + BTT+ Belanja Transfer	676.645.353.792,00	763.731.373.975,00	714.969.478.217,62	676.544.956.381,97
5	Pengeluaran pembiayaan	2.274.086.498,00	2.275.000.000,00	0,00	0,00
	Kapasitas Riil kemampuan Keuangan	614.588.011.570,27	497.925.203.025,00	616.593.593.135,54	742.973.649.176,69

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (diolah); 2025

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.2, merupakan indikator penting yang menunjukkan dana tersedia setelah dikurangi belanja wajib seperti belanja pegawai, belanja tidak terduga (BTT), belanja transfer, dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas riil ini menjadi acuan untuk mengalokasikan anggaran guna memenuhi belanja prioritas daerah, yaitu Prioritas 1 (pemenuhan Standar Pelayanan Minimal/SPM), Prioritas 2 (pemenuhan visi dan misi kepala daerah), dan Prioritas 3 (belanja urusan pilihan). Dengan proyeksi kapasitas riil yang meningkat dari Rp497.925.203.025,00 pada 2025 menjadi Rp616.593.593.135,54 pada 2026 dan Rp742.973.649.176,69 pada 2027, daerah memiliki ruang fiskal yang semakin luas untuk mendanai prioritas tersebut, dengan catatan bahwa alokasi harus dilakukan secara strategis untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas.

Kapasitas riil berfungsi sebagai "ruang fiskal" yang menentukan seberapa besar dana yang dapat dialokasikan untuk ketiga prioritas tersebut setelah kewajiban wajib terpenuhi. Pada 2025, kapasitas riil yang relatif rendah menunjukkan perlunya prioritas ketat pada SPM, dengan ruang terbatas untuk Prioritas 2 dan 3. Namun, pada 2026 dan 2027, kapasitas riil yang lebih besar memungkinkan pendekatan yang lebih seimbang, di mana SPM tetap terpenuhi, visi kepala daerah mendapat alokasi signifikan melalui belanja modal, dan urusan pilihan dapat mulai didanai untuk mendukung diversifikasi pembangunan. Untuk memastikan efisiensi, daerah perlu menyusun skala prioritas yang jelas, dengan memanfaatkan data dari Tabel 5.1 dan 5.2 untuk mengalokasikan dana secara proporsional, meminimalkan risiko defisit, dan memaksimalkan dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat.

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan tahapan krusial yang menentukan arah dan fokus pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses ini dimulai dari cascading yang sistematis, dimana visi jangka panjang daerah diturunkan menjadi misi-misi strategis, kemudian dijabarkan dalam tujuan yang lebih spesifik, dan selanjutnya dioperasionalkan melalui sasaran-sasaran yang terukur. Setiap tingkatan dalam hierarki ini memiliki keterkaitan logis yang kuat, memastikan bahwa program prioritas yang akan dirumuskan benar-benar sejalan dengan cita-cita pembangunan daerah.

Proses identifikasi program prioritas dimulai dengan analisis mendalam terhadap arah kebijakan yang telah ditetapkan. Setiap arah kebijakan kemudian diturunkan menjadi program-program potensial yang dapat menjadi instrumen pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada tahap ini, pemerintah daerah melakukan pemetaan komprehensif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat, menganalisis kesenjangan antara kondisi saat ini dengan target yang ingin dicapai, serta mengidentifikasi berbagai stakeholder yang akan terlibat dalam implementasi

program. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang telah terkumpul melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) berjenjang.

Untuk memastikan visi, misi, tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan dan memperhatikan 14 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan program prioritas tahun 2026, sebagaimana pada Tabel dibawah:

Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Program Unggulan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
Visi " SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA"								
M1 Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan								
P3 Pupuk Lancar, P4 Listrik masuk sawah, P5 Harga Komoditas pertanian dan perkebunan stabil, P6 Peternakan dan perikanan sukses	PD1 Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah	**Tujuan 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah**		**Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**%**	**4,95**	**11.574.167.970**	
		Sasaran 1 Meningkatnya ketahanan pangan dan produktivitas sektor pertanian		**Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian (%)**	**%**	**5,00**	**10.524.167.970**	
				Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	**Indeks**	**88,62**		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tersedianya sarana pertanian berkualitas dengan distribusi merata	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	5,69	886.796.500	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan
				Jumlah Produksi Daging (Kg)	Kg	3347561	920.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
				Jumlah Produksi Telur (Kg)	Kg	50673257		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terwujudnya prasarana pertanian yang mendukung efisiensi produksi	Persentase ketersediaan prasarana pertanian	%	100	2.455.299.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	%	100	310.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan hewan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan Kejadiaan dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan menular (%)	%	21	352.327.970	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kompetensi penyuluh dan kelompok tani	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	%	3,35	31.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan
				Rasio Penyuluh Peternakan terhadap Pelaku Utaman Peternakan/Kelompok Ternak (Rasio)	Rasio	1:19	35.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	2428,29	320.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	1.290,91	600.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Tersedianya jaringan irigasi yang baik dan terpelihara	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	73	4.986.008.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya variasi konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	89,5	546.816.500	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
		Sasaran 2 Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri		**Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)**	**%**	**16,32**	**1.050.000.000**	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya sarana perdagangan yang efisien dan terintegrasi	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	18,75	300.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Terwujudnya perkembangan industri lokal yang kompetitif	Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	%	5,00	550.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tercapainya stabilitas harga barang pokok melalui pengawasan yang efektif	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	%	100	200.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
M2 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif								
P7 UMKM Maju, P8 Tersedianya Lapangan Kerja, P12 Pengembangan Potensi Wirausaha Generasi Z dan Milenial	PD2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan	**Tujuan 2 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**		**Tingkat Kemiskinan (%)**	**%**	**4.45 - 3.55**	**13.015.251.000**	
				Rasio Gini (Indeks)	**Indeks**	**0,306**		
		Sasaran 3 Meningkatnya pendapatan masyarakat		**PDRB Perkapita (juta rupiah)**	**Juta Rupiah**	**64.89**	**915.251.000**	
		Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial yang	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang	%	100	243.000.000	Dinas Sosial

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
			meningkatkan kapasitas masyarakat	Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial				
		Program Rehabilitasi Sosial	Tersedianya layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	%	100	200.000.000	Dinas Sosial
				Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	%	100		
				Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	%	100		
				Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	%	100		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terwujudnya perlindungan sosial yang menjangkau masyarakat rentan	Persentase Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial	%	100	80.000.000	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Terwujudnya kemandirian lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	61.623.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi wirausaha	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	20	175.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Terwujudnya tata kelola desa yang transparan dan partisipatif	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	100	55.628.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan berkualitas	Persentase koperasi aktif	%	68,50	50.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya skala usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasitasi pengembangan	%	3,5	50.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Sasaran 4 Menurunnya tingkat pengangguran		**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**	**%**	**2,84**	**12.100.000.000**	
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya tenaga kerja yang bersertifikasi dan kompeten	Persentase tenaga kerja bersetifikat kompetensi	%	32	10.075.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Hubungan Industrial	Terwujudnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKSBipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	%	17	2.025.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
M3 Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua								
P1 BPJS Kesehatan Gratis, P2 Pendidikan Unggul, P11 Anak-anak Sidrap Sehat	PD3 Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas	**Tujuan 3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif**		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**75,44**	**187.007.516.000**	
		Sasaran 5 Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata		**Indeks Pendidikan**	**Indeks**	**65,33**	**93.835.715.000**	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya akses pendidikan yang inklusif bagi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 - 6 Tahun	%	87,53	83.775.715.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 7 - 12 Tahun	%	99,85		
				Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 13 - 15 Tahun	%	90,73		
				Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun Kesetaraan	%	18,40		
		Program Pengembangan Kurikulum	Terwujudnya kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	20	500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tersedianya tenaga pendidik yang kompeten dan merata	Indeks Pemerataan Guru	Indeks	95,07	8.060.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik)	%	82		
		Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya akses layanan perpustakaan yang berkualitas	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	70,48	1.500.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
		Sasaran 6 Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif		**Indeks Kesehatan**	**Indeks**	**84,40**	**93.171.801.000**	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	100	91.741.801.000	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup bersih dan sehat	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	80	280.000.000	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai, berkualitas dan merata	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	rasio	85	1.150.000.000	
		Sasaran 7 Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif		**Indeks pembangunan gender**	**Indeks**	**93,85**	**70.000.000**	
		Program Pegarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Terwujudnya kebijakan pembangunan yang responsif gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	100	40.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
		Program Perlindungan Perempuan	Tersedianya layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	%	0,001	15.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	Tersedianya layanan perlindungan khusus bagi anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	15.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
M4 Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan								
P14 Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana	PD4 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan	**Tujuan 4 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan**		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks**	**74,14**	**13.206.194.000**	
		Sasaran 8 Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca		**Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)**	**%**	**13.27**	**12.137.194.000**	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	%	100	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terwujudnya pelestarian keanekaragaman hayati yang lestari	Persentase luas RTH Publik dan Privat dari Wilayah Kota/Perkotaan	%	24,46	1.780.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang efisien	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	%	81	10.257.194.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Sasaran 9 Menurunnya tingkat risiko bencana		**Indeks Resiko Bencana**	**Indeks**	**118,40**	**1.069.000.000**	
		Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	1.069.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100		
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		
M5 Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius								
P10 Sidrap Aman dan Religius	PD5 Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius	**Tujuan 5 Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama**		**Indeks Harmoni Indonesia (IHal)**	**Indeks**	**69,87**	**33.266.174.175**	

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
		Sasaran 10 Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat		**Angka kriminalitas**	**kasus**	**766**	**7.362.071.375**	
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda	%	100	1.809.771.375	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Layanan Pencegahan dan penyelamatan Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Ppenyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	4.451.300.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Meningkatnya deteksi dini dan penyelesaian konflik sosial	Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah	%	100	783.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya ketahanan masyarakat melalui pembinaan sosial budaya	Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	85	318.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
		Sasaran 11 Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan (%)	%	19.34	25.904.102.800	
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	55,46		
				Indeks Pembangunan pemuda	Indeks	72,93		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya kapasitas pemuda melalui wirausaha berbasis budaya lokal	Rasio wirausaha pemuda	%	0,06	6.500.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	%	8	7.000.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tepat waktu (%)	%	100	11.161.452.800	Sekretariat Daerah
				Perssentase kegiatan keagaamaan yang difasilitasi oleh pemerintah	%	100		
				Jumlah produk hukum yang dihasilkan	Dokumen	730		
				Jumlah kerjasama daerah yang dihasilkan	Dokumen	35		

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	55,90	435.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan terhadap cagar budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	40	90.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	80		
M6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital								
P13 ASN/ Perangkat Desa Sejahtera	PD6 Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	**Tujuan 6 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**72,07**	**161.649.219.644**	
		Sasaran 11 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi		**nilai SAKIP**	**Nilai**	**69,22**	**160.913.220.644**	
				Indeks Inovasi daerah	**Indeks**	**53,62**		
				Indeks SPBE	**Indeks**	**3,42**		
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang	Persentase Konsistensi Program RPJMD-RKPD	%	100	1.122.927.074	Badan Perencanaan Pembangunan,
				Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	%	100		

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
		Pembangunan Daerah	berkualitas dan terintegrasi	Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	100		Riset dan Inovasi Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan	Persentase penyampaian laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	%	100	146.082.252.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Upaya Eksensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%	100	4.222.000.000	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	17,94		
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100		
		Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kinerja ASN yang kompeten dan profesional	Rata-Rata SKP ASN Bernilai BAIK	Nilai	70	2.014.482.350	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD	%	91		
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pemanfaatan Pembangunan Daerah	%	100	196.998.720	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	100	480.000.000	

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Hasil Pengawasan dan Menurunnya Temuan BPK	Jumlah Temuan BPK	Temuan	22	5.157.182.500	Inspektorat
				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Tindakjanjuti	%	42,6		
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Iternet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	%	100	1.637.378.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Sasaran 12 Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik		**Indeks Pelayanan Publik (indeks)**	**Indeks**	**2,33**	**735.999.000**	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IIKM)	**Indeks**	**77.74**		
		Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftran penduduk	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	%	99,6	377.700.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Akta Pencacatan Sipil	%	84,39	125.450.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Terwujudnya pelayanan perizinan yang efisien dan sesuai SOP	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	%	100	232.849.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
M7 Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat								
P9 Jalan Mulus	PD7 Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah	**Tujuan 7 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas**		**Indeks daya saing daerah pilar infrastruktur**	**Indeks**	**3,3**	**48.040.048.000**	
		Sasaran 13 Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur daerah		**Indeks Infrastruktur**	**Indeks**	**77,38**	**48.040.048.000**	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya tingkat kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	41,94	24.950.000.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	63	2.053.000.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	%	81,27	750.000.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Minum yang layak	Persentase Rumah Tangga yang mengakses Air Minum Layak dan Aman	%	95,21	2.535.768.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestic layak dan aman)	%	92,26	7.597.000.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Pera
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	35	10.154.280.000	Dinas Perhubungan

Sumber: RPJMD Kab. Sidenreng Rappang 2025-2029, diolah

Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2026 dirancang untuk mewujudkan visi "SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA" melalui penjabaran tujuan dan sasaran serta integrasi yang erat dengan program unggulan Kepala Daerah (KDH). Program unggulan P3 (Pupuk Lancar), P4 (Listrik Masuk Sawah), P5 (Harga Komoditas Pertanian dan Perkebunan Stabil), dan P6 (Peternakan dan Perikanan Sukses), secara langsung mendukung misi pertama (M1) yaitu membangun struktur perekonomian daerah yang kuat melalui pengembangan agrobisnis menuju agroindustri. Prioritas pembangunan daerah (PD1) Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah selaras dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran seperti peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produk agroindustri. Program prioritas seperti Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, serta Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya, didukung anggaran mencapai Rp13.123.357.970, memastikan pencapaian indikator seperti pertumbuhan PDRB sektor pertanian sebesar 5% dan indeks ketahanan pangan 88,62. Hubungan ini menunjukkan bagaimana program unggulan KDH menjadi katalisator untuk prioritas daerah, memanfaatkan kapasitas riil keuangan untuk investasi produktif yang berkelanjutan.

Pada misi kedua (M2) yang menekankan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial adaptif, program unggulan seperti P7 (UMKM Maju), P8 (Tersedianya Lapangan Kerja), dan P12 (Pengembangan Potensi Wirausaha Generasi Z dan Milenial) terintegrasi dengan PD2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan. Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung sasaran penurunan tingkat kemiskinan menjadi 3,55-4,45% dan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,84%, dengan alokasi total Rp13.015.251.000. Program prioritas seperti Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, serta Hubungan Industrial, yang dikelola oleh dinas terkait seperti Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, langsung mendukung program unggulan KDH dengan fokus pada peningkatan wirausaha dan sertifikasi tenaga kerja. Integrasi ini memastikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, yang diproyeksikan meningkat pada 2026, dialokasikan untuk program inklusif yang mengurangi ketimpangan, selaras dengan visi KDH untuk masyarakat sejahtera.

Misi ketiga (M3) mengembangkan kualitas sumber daya manusia inklusif melalui pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua, dihubungkan dengan program unggulan P1 (BPJS Kesehatan Gratis), P2 (Pendidikan Unggul), dan P11 (Anak-anak Sidrap Sehat) dalam PD3 Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas. Tujuan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 75,44 didukung sasaran peningkatan mutu

dan akses pendidikan (indeks pendidikan 65,33) serta layanan kesehatan berkualitas, dengan anggaran mencapai Rp226.524.400.662. Program prioritas seperti Pengelolaan Pendidikan, Pengembangan Kurikulum, serta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan, secara langsung merealisasikan program unggulan KDH melalui indikator seperti angka partisipasi sekolah hingga 99,85% dan cakupan imunisasi dasar lengkap 95%. Hubungan ini menekankan prioritas KDH pada investasi manusia, di mana kapasitas riil keuangan memungkinkan perluasan akses layanan dasar tanpa mengorbankan kualitas.

Untuk misi keempat (M4) yang berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana, program unggulan KDH seperti P9 (Jalan Mulus) – meskipun lebih dominan di infrastruktur – turut mendukung melalui integrasi dengan PD4 Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Penanggulangan Bencana. Tujuan meningkatkan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana tercermin dalam sasaran peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 75, dengan program prioritas seperti Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Air Limbah, dan Penanggulangan Bencana, yang dialokasikan dana signifikan untuk pencapaian indikator seperti persentase penanganan sampah 100% dan pengurangan risiko bencana. Integrasi dengan program unggulan KDH memastikan pendekatan holistik, di mana infrastruktur ramah lingkungan mendukung ketahanan daerah.

Misi kelima (M5) mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradat, dan religius, dihubungkan dengan P10 (Sidrap Aman dan Religius) dalam PD5 Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius. Tujuan meningkatkan harmoni sosial (Indeks Harmoni Indonesia 69,87) didukung sasaran penurunan angka kriminalitas menjadi 766 kasus dan peningkatan partisipasi keagamaan 19,34%, dengan anggaran Rp33.266.174.175. Program prioritas seperti Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, serta Pengembangan Kebudayaan, yang dikelola oleh dinas seperti Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merealisasikan visi KDH untuk masyarakat harmonis melalui pembinaan budaya dan pencegahan konflik.

5.3. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2026 dirumuskan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Program Prioritas Pembangunan Daerah, maupun untuk pemenuhan Pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah hingga menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang ada. Kebutuhan penganggaran untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara

terperinci beserta kebutuhan anggaran yang nantinya sebagai pedoman dalam penggunaan belanja untuk menerjemahkan indicator kinerja yang akan dicapai. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, setiap perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor. Koordinasi antar perangkat daerah menjadi kunci utama dalam memastikan sinergi pelaksanaan program dan menghindari tumpang tindih kegiatan. Oleh karena itu, rencana yang disusun dalam dokumen ini telah melalui proses harmonisasi dan integrasi lintas sektor untuk memaksimalkan dampak pembangunan yang dihasilkan.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah Tahun 2026 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**388,545,198,000**							**400,562,938,325**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**387,935,198,000**							**399,952,938,325**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**387,935,198,000**							**399,952,938,325**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**295,599,483,000**							**300,399,773,325**	
		[Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**295,599,483,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,399,773,325**	-
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	107,741,800			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	107,741,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8,816,700	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		8,816,700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	11,345,500	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,345,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9,773,300	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		9,773,300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	16,107,500	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		16,107,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		15,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	16,698,800	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		16,698,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				4 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	294,109,143,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	298,909,433,325	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37600 Orang/bulan	294,038,143,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		298,838,433,325	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	263,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	263,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	250,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	140,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	140,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		45,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	822,306,200			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	822,306,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				414 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	105,048,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		105,048,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	715,758,200	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		715,758,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	157,292,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	157,292,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	82,292,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		82,292,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					**-**	**83,775,715,000**							**90,359,715,000**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 13 - 15 Tahun** **Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 - 6 Tahun** **Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 7 - 12 Tahun** **Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun Kesetaraan**	**21.45** **98.15** **99.97**	**16.88** **81.60** **87.03** **99.79**	**17.64** **84.56** **88.88** **99.82**	**90.73 %** **87.53 %** **99.85 %** **18.40 %**	**83,775,715,000**	-	-	-	-	-	-	**90,359,715,000**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						41,953,250,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	42,388,250,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				12 Ruang	802,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		802,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				10 Ruang	302,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		302,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				65 Unit	10,732,250,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,732,250,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				15 Paket	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		570,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				70 Peserta Didik	285,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		570,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				25 Orang	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				11 Satuan Pendidikan	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				235 Satuan Pendidikan	28,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		28,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				235 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				24 Orang	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				24 Orang	35,000,000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				5 Kegiatan	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				200 Buku	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5500 Paket	202,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		202,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				22 Orang	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		30,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				237 Satuan Pendidikan	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				13 Ruang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				10000 Peserta Didik	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	-	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						22,746,900,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	28,849,900,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	502,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		502,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	302,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		302,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				8 Ruang	202,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				10 Ruang	202,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		202,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				10 Unit	202,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		202,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				25 Unit	6,470,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,470,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				12 Ruang	250,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				5 Ruang	202,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		202,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				15 Paket	102,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		102,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				15 Paket	102,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		102,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3500 Peserta Didik	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		15,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				99 Peserta Didik	300,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				25 Orang	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		55,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				11 Satuan Pendidikan	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				50 Satuan Pendidikan	12,053,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		12,053,400,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				50 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	305,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		305,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				24 Orang	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	150,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				5 Kegiatan	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				50 Satuan Pendidikan	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		45,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				8 Ruang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				22 Orang	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				200 Buku	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3500 Paket	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	202,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		202,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						15,914,765,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	15,914,765,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				11 Unit	7,739,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		7,739,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				11 Paket	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		30,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				110 Peserta Didik	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		15,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1 Orang	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				223 Satuan Pendidikan	195,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		195,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				9775 Satuan Pendidikan	6,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				223 Orang	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		15,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				223 Konten Digital	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				223 Orang	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				223 Dokumen	120,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		120,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		15,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				4 Komunitas	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				11 Ruang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				223 Peserta didik	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				223 Orang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				10 Unit	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				11 Paket	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				11 Unit	202,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		202,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				11 Paket	289,765,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		289,765,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				223 Satuan Pendidikan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				20 Ruang	202,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		202,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Ruang	202,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		202,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						3,160,800,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	2,336,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				110 Peserta Didik	185,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		231,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Orang	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				6 Satuan Pendidikan	80,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		80,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				1048 Satuan Pendidikan	1,738,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,738,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				223 Orang	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				6 Dokumen	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		30,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				4 Komunitas	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				4 Kegiatan	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				200 Paket	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				200 Buku	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				6 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				6 Peserta Didik	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				4 Unit	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				2 unit	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				50 Paket	52,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		52,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**					**-**	**500,000,000**							**500,000,000**	
		[Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan]	**Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal**	**100**	**0**	**0**	**20**	**500,000,000**	-	-	-	-	-	-	**500,000,000**	-
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						200,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				41491 Buku	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				273 Orang	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		-				300,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				2 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun				2 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				2 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**					**-**	**8,060,000,000**							**8,693,450,000**	
		[Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan]	**Indeks Pemerataan Guru** **Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik)**	**86** **99.07**	**80** **93.07**	**81** **94.07**	**95.07 %** **82 %**	**8,060,000,000**	-	-	-	-	-	-	**8,693,450,000**	-
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Guru yang Berkualifikasi Minimal S1/DIV*	-			94.58%	8,060,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	8,693,450,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5 Dokumen	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		30,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				17 Laporan	8,030,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		8,663,450,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**610,000,000**							**610,000,000**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**610,000,000**							**610,000,000**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**					**-**	**435,000,000**							**435,000,000**	
		[Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan]	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan**	**97.00**	**19.11**	**27.18**	**55.90**	**435,000,000**	-	-	-	-	-	-	**435,000,000**	-
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				70 Objek	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	160,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	160,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	75,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		75,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				4 Sertifikat	85,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		85,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	75,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	75,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	75,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		75,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**					**-**	**50,000,000**							**50,000,000**	
		[Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah]	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal**	**55.71**	**21.43**	**34.29**	**38.57**	**50,000,000**	-	-	-	-	-	-	**50,000,000**	-
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				3 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**					**-**	**90,000,000**							**90,000,000**	
		[Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan]	**Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan**	**71.43 85.71**	**35.71 77.14**	**35.71 78.57**	**40.00 80.00**	**90,000,000**	-	-	-	-	-	-	**90,000,000**	-
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	10,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	10,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				18 Objek	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	80,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	80,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		30,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				4 Objek	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**					**-**	**35,000,000**							**35,000,000**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Museum]	**Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Ke Museum**	**70**	**53.80**	**55**	**58**	**35,000,000**	-	-	-	-	-	-	**35,000,000**	-
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-			-	35,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu														
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				1388 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN						**221,658,764,000**							**221,966,489,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**221,658,764,000**							**221,966,489,000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**221,658,764,000**							**221,966,489,000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**128,062,344,000**							**128,063,844,000**	
		[Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**128,062,344,000**	-	-	-	-	-	-	**128,063,844,000**	-
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	180,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	180,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	80,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		80,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		50,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	123,691,727,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	123,692,727,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1255 Orang/bulan	123,601,727,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		123,601,727,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				3 Laporan	40,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		40,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	70,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	70,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Lainungan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				3 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	43,560,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-	-	43,560,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				3 Dokumen	10,890,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		10,890,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				3 Dokumen	10,890,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,890,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				3 Laporan	10,890,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,890,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				3 Dokumen	10,890,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,890,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	93,500,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	93,500,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				17 Unit	6,050,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,050,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	9,075,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		9,075,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	9,075,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		9,075,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	18,150,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		18,150,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	18,150,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		18,150,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	11,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	22,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	442,350,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	442,350,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				`17 Paket	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		30,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	40,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		40,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		30,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				17 Paket	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		50,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				17 Paket	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		30,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				17 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		20,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				17 Dokumen	42,350,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		42,350,000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1,979,050,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	1,979,050,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	308,550,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		308,550,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1,500,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,500,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		50,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		60,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	60,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		60,500,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	945,157,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	945,157,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				18 Laporan	310,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		310,200,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Laporan	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	628,957,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		628,957,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	617,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	617,500,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	132,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		132,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	400,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		400,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		20,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		20,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		20,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		20,000,000	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**91,741,801,000**							**92,038,026,000**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat]	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**91,741,801,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92,038,026,000**	**-**
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9,712,500,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	9,712,500,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	550,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1,500,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,500,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	500,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		500,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		50,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	550,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Unit	500,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		500,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 Unit	500,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		500,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				17 Unit	1,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				5 Unit	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				55 Paket	4,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,000,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				2 Keluarga	121,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		121,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)														
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan				4 Layanan	181,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		181,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				14 Paket	60,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		60,500,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	81,496,041,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	81,792,266,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6.065 Orang	250,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		275,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6.750 Orang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5.612 Orang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25100 Orang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				54992 Orang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				195092 Orang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21212 Orang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17895 Orang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2876 Orang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				540 Orang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5999 Orang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				7400 Orang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				14 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		55,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				14 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	413,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		454,300,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		55,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		55,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		55,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	250,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		275,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				35 Orang	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		55,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				252 Orang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	311,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		342,100,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	74,187,641,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PAJAK ROKOK	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		74,187,641,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				1670 Orang	180,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		198,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	141,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		155,100,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				2 Dokumen	227,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		249,700,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				4 Unit	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	500,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		500,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				14 Unit	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		55,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				2 Dokumen	300,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		330,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				5 Unit	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		55,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				890 Orang	101,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		111,100,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				400 Orang	101,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		111,100,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1100 Orang	176,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		194,040,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				4 Tatanan	101,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		111,100,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	101,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		111,100,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	101,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		111,100,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	101,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		111,100,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	202,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		222,200,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		330,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	182,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200,200,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				300 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	18,260,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	18,260,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				18 Dokumen	18,260,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		18,260,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	515,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	515,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				17 Unit	220,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				17 Unit	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		100,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				17 Unit	120,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		120,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	75,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		75,000,000	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					**-**	**1,150,000,000**							**1,150,000,000**	
		[Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Sesuai Standar pada Fasilitas Kesahatan yang Ada]	**Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan**	**90**	**80**	**83**	**85**	**1,150,000,000**	-	-	-	-	-	-	**1,150,000,000**	-
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	30,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	30,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		30,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	120,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	120,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				3 Dokumen	40,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		40,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				200 Orang	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		50,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				4 Dokumen	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		30,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,000,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				110 Orang	1,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**					**-**	**424,619,000**							**424,619,000**	
		[Terwujudnya Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memiliki Izin]	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memiliki Izin**	**100**	**100**	**100**	**100**	**424,619,000**	-	-	-	-	-	-	**424,619,000**	-
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	50,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	50,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		50,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	-			-	160,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	160,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	160,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		160,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	100,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	100,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		100,000,000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-			-	54,619,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	54,619,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	54,619,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		54,619,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	60,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	60,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				110 Unit	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		60,000,000	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**-**	**280,000,000**							**290,000,000**	
		[Terwujudnya Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tengah Masyarakat]	**Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**	**88**	**75**	**75**	**80**	**280,000,000**	-	-	-	-	-	-	**290,000,000**	-
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	80,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	80,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	80,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		80,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	130,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	140,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				100 Keluarga	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		30,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	70,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	70,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 dokumen Dokumen	70,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		70,000,000	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO						**67,400,000,000**							**70,000,000,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**67,400,000,000**							**70,000,000,000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**67,400,000,000**							**70,000,000,000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**61,000,000,000**							**61,000,000,000**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100**	**61,000,000,000**	-	-	-	-	-	-	**61,000,000,000**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	61,000,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	61,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	61,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		61,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**6,400,000,000**							**9,000,000,000**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**				**100**	**6,400,000,000**								
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6,000,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	9,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	2,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				25 Unit	2,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	2,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	400,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	400,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG						**32,545,000,000**							**32,545,000,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**32,545,000,000**							**32,545,000,000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**32,545,000,000**							**32,545,000,000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**30,125,000,000**							**30,125,000,000**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100**	**30,125,000,000**	-	-	-	-	-	-	**30,125,000,000**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	30,125,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	30,125,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	30,125,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		30,125,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**2,420,000,000**							**2,420,000,000**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**				**100**	**2,420,000,000**							**2,420,000,000**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2,420,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	2,420,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	1,210,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,210,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1,210,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,210,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG
		RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE						**31,177,132,662**							**31,177,132,662**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**31,177,132,662**							**31,177,132,662**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**31,177,132,662**							**31,177,132,662**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**7,428,555,000**							**7,428,555,000**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100**	**7,428,555,000**	-	-	-	-	-	-	**7,428,555,000**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	5,358,280,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	5,358,280,000	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5,358,280,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,358,280,000	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2,070,275,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	2,070,275,000	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,070,275,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,070,275,000	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**23,748,577,662**							**23,748,577,662**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**				**100**	**23,748,577,662**							**23,748,577,662**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20,430,149,662			-	1.Peningkat an akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	20,430,149,662	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	1,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.Peningkat an akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				5 Unit	5,842,116,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.Peningkat an akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,842,116,000	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				45 Unit	8,530,103,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		8,530,103,000	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				25 Paket	5,047,930,662	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,047,930,662	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2,929,770,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	2,929,770,000	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	2,929,770,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,929,770,000	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	388,658,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	388,658,000	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	388,658,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		388,658,000	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
		UPT PUSKESMAS KULO						**2,415,000,000**							**2,656,400,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2,415,000,000**							**2,656,400,000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,415,000,000**							**2,656,400,000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**1,600,000,000**							**1,760,000,000**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100**	**1,600,000,000**	-	-	-	-	-	-	**1,760,000,000**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1,600,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	1,760,000,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,600,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,760,000,000	UPT PUSKESMAS KULO
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**808,288,000**							**889,016,800**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**				**100**	**808,288,000**							**889,016,800**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	220,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				16 Unit	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				9012 Keluarga	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	807,588,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	888,246,800	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				224 Orang	30,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,110,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				246 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				232 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				676 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1965 Orang	36,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		39,600,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9012 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1908 Orang	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30000 Orang	1,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,320,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				144 Orang	1,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,320,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				39 Orang	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,000,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				36 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				89 Orang	2,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,540,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				12 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	298,904,500	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		328,794,950	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	8,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		8,910,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,200,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		7,700,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	1,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,980,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1328 Orang	14,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		15,400,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				24 Orang	2,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3,080,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	81,402,500	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		89,542,750	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				2434 Orang	7,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		8,140,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	5,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,720,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	105,328,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		115,860,800	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				36 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				103 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				12 Tatanan	1,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,320,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		7,700,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	3,153,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3,468,300	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	14,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		15,400,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	34,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		37,400,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				12 Dokumen	1,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,320,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				12 Dokumen	1,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,320,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	500,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	550,000	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS KULO
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**-**	**6,712,000**							**7,383,200**	
		Terwujudnya Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tengah Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				**80%**	**6,712,000**							**7,383,200**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6,712,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	7,383,200	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
		UPT PUSKESMAS PANGKAJENE						**4,545,000,000**							**5,029,290,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4,545,000,000**							**5,029,290,000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4,545,000,000**							**5,029,290,000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3,700,232,000**							**4,070,255,200**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100**	**3,700,232,000**	-	-	-	-	-	-	**4,070,255,200**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	3,700,232,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	4,070,255,200	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3,700,232,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,070,255,200	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**841,167,000**							**955,073,700**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**				**100**	**841,167,000**							**955,073,700**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	220,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				640 Keluarga	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	840,867,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	954,743,700	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				988 Orang	23,449,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25,793,900	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				988 Orang	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				912 Orang	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3641 Orang	36,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		39,600,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6000 Orang	47,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		52,250,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35336 Orang	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7670 Orang	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				120 Orang	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,200,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				120 Orang	5,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,720,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				230 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	274,354,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		301,789,400	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	6,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		7,260,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	6,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		7,040,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	23,010,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25,311,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				230 Orang	34,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		38,280,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				230 Orang	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	110,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		121,440,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		220,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				120 Orang	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	172,362,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		189,598,200	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	-	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		-	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	900,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		990,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	2,892,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		31,981,200	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		880,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	44,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		48,400,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	30,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,660,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	100,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	110,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**-**	**3,601,000**							**3,961,100**	
		Terwujudnya Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tengah Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				**80%**	**3,601,000**							**3,961,100**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3,601,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	3,961,100	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3,601,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3,961,100	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
		UPT PUSKESMAS LAWAWOI						**3,394,000,000**							**3,733,400,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3,394,000,000**							**3,733,400,000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,394,000,000**							**3,733,400,000**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**1,600,000,000**							**1,760,000,000**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100**	**1,600,000,000**	-	-	-	-	-	-	**1,760,000,000**	-
	2.14.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1,600,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	1,760,000,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	2.14.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,600,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,760,000,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**1,790,093,000**							**1,969,102,300**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**				**100**	**1,790,093,000**							**1,969,102,300**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	34,823,500			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	38,305,850	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				78 Keluarga	32,823,500	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		36,105,850	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,754,269,500			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	1,929,696,450	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				717 Orang	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,000,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				685 Orang	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3,300,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	450,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		495,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	40,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		44,000,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	8,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		8,800,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				730 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				120 Orang	48,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		52,800,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				750 Orang	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1160 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	257,917,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		283,708,700	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	21,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		23,760,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	6,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,820,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,400,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				320 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	13,837,500	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		15,221,250	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				314 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				100 Paket	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	127,165,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		139,881,500	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				315 Orang	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,400,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				25 Tatanan	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,400,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,400,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				12 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				12 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	1,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	1,100,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**-**	**3,907,000**							**4,297,700**	
		Terwujudnya Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tengah Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				**80%**	**3,907,000**							**4,297,700**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3,907,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	4,297,700	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	3,907,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,297,700	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
		UPT PUSKESMAS MANISA						**1,692,000,000**							**1,861,310,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1,692,000,000**							**1,861,310,000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,692,000,000**							**1,861,310,000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**1,000,000,000**							**1,100,000,000**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100**	**1,000,000,000**	-	-	-	-	-	-	**1,100,000,000**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1,000,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	1,100,000,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000,000	UPT PUSKESMAS MANISA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**682,000,000**							**750,310,000**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**				**100**	**682,000,000**							**750,310,000**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	15,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	16,500,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				100 Keluarga	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	657,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	722,810,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				220 Orang	6,435,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		7,078,500	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				220 Orang	2,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,640,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				220 Orang	2,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,640,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1346 Orang	11,797,500	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		12,977,250	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1962 Orang	40,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		44,440,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2011 Orang	1,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,980,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1983 Orang	7,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		7,920,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3730 Orang	1,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,980,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				794 Orang	1,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,980,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				31 Orang	7,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		7,920,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				232 Orang	7,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		7,920,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				166 Orang	1,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,980,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		220,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	164,256,500	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		180,792,150	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	52,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		58,080,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	20,460,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,506,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	1,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,980,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		660,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	44,880,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		49,368,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				31 Orang	36,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		39,600,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1983 Orang	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	24,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		26,400,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				1 Orang	1,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,980,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				7 Dokumen	148,919,100	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		163,811,010	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				31 Orang	2,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,640,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				6 Orang	1,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,980,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	1,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,980,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				3 Tatanan	600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		660,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	3,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3,960,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		660,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	20,751,900	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,827,090	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				5 Dokumen	32,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35,310,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	10,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	11,000,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS MANISA
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**-**	**10,000,000**							**11,000,000**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terwujudnya Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tengah Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				**80%**	**10,000,000**							**11,000,000**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	11,000,000	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS MANISA
		UPT PUSKESMAS BILOKKA						**2,662,000,000**							**2,928,200,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2,662,000,000**							**2,928,200,000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,662,000,000**							**2,928,200,000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**1,800,000,000**							**1,980,000,000**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100**	**1,800,000,000**	-	-	-	-	-	-	**1,980,000,000**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1,800,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	1,980,000,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,800,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,980,000,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**858,073,000**							**943,880,300**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**				**100**	**858,073,000**							**943,880,300**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	220,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	857,773,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	943,550,300	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				353 Orang	37,844,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		41,628,400	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				336 Orang	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				315 Orang	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				924 Orang	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				318 Orang	57,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		63,360,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3239 Orang	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				115 Orang	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19850 Orang	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19850 Orang	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				19850 Orang	21,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		23,760,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				19850 Orang	20,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,550,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				19850 Orang	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				100 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	298,095,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		327,904,500	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	17,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		18,810,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	23,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		26,180,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	16,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		17,820,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	33,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		36,960,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				19850 Orang	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	93,506,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		102,856,600	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		220,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				19850 Orang	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	177,228,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		194,950,800	UPT PUSKESMAS BILOKKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	-	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		-	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				19850 Orang	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				19850 Orang	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				19850 Orang	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	4,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,620,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,760,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	23,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25,410,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	29,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		32,120,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	100,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000	UPT PUSKESMAS BILOKKA
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**-**	**3,927,000**							**4,319,700**	
		Terwujudnya Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tengah Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				**80%**	**3,927,000**							**4,319,700**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3,927,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	4,319,700	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3,927,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,319,700	UPT PUSKESMAS BILOKKA
		UPT PUSKESMAS LANCIRANG						**1,740,000,000**							**1,914,000,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1,740,000,000**							**1,914,000,000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,740,000,000**							**1,914,000,000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**1,100,000,000**							**1,210,000,000**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100**	**#REF!**	-	-	-	-	-	-	**#REF!**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1,100,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	1,210,000,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,210,000,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**632,215,000**							**695,436,500**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**				**100**	**632,215,000**							**695,436,500**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9,400,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	10,340,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 tahun Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 tahun Keluarga	4,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,840,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	618,815,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	680,696,500	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 tahun Orang	21,450,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		23,595,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 tahun Orang	25,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		27,720,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 tahun Orang	13,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		14,520,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 tahun Orang	4,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,620,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 tahun Orang	28,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		31,350,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 tahun Orang	38,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		41,800,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 tahun Orang	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,200,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 tahun Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 tahun Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1 tahun Orang	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,200,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 tahun Orang	10,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,880,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 tahun Orang	3,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3,960,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 tahun Dokumen	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,400,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 tahun Dokumen	4,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,840,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 tahun Dokumen	79,042,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		86,946,200	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 tahun Dokumen	10,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,220,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 tahun Dokumen	12,015,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,216,500	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 tahun Dokumen	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,400,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 tahun Dokumen	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3,300,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 tahun Dokumen	11,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		12,320,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 tahun Orang	2,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,640,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 tahun Orang	10,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,440,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 tahun Dokumen	13,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		14,960,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				1 tahun Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 tahun Paket	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,400,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun Dokumen	139,508,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		153,458,800	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				0 Unit	-	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		-	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 tahun Laporan	26,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		29,260,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 tahun Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 tahun Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 tahun Orang	4,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,280,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 tahun Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 tahun Tatanan	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 tahun Dokumen	9,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,560,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 tahun Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 tahun Dokumen	4,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,620,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 tahun Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 tahun Dokumen	33,700,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		37,070,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 tahun Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 tahun Dokumen	10,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,220,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	4,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	4,400,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 tahun Dokumen	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,400,000	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**-**	**7,785,000**							**8,563,500**	
		Terwujudnya Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tengah Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				**80%**	**7,785,000**							**8,563,500**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	7,785,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	8,563,500	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 tahun Dokumen	7,785,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		8,563,500	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
		UPT PUSKESMAS BARANTI						**2,169,000,000**							**2,385,900,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2,169,000,000**							**2,385,900,000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,169,000,000**							**2,385,900,000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**1,299,000,000**							**1,428,900,000**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100**	**1,299,000,000**	-	-	-	-	-	-	**1,428,900,000**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1,299,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	1,428,900,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,299,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,428,900,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**850,000,000**							**935,000,000**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**				**100**	**850,000,000**							**935,000,000**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				100 Keluarga	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	820,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	902,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				368 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				364 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				345 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3033 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2939 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13415 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2659 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5843 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				287 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				48 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				508 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				477 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				48 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				2939 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	40,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		44,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				508 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				21641 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				12 Tatanan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				30 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	10,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	11,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**-**	**20,000,000**							**22,000,000**	
		Terwujudnya Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tengah Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				**80%**	**20,000,000**							**22,000,000**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARANTI
		UPT PUSKESMAS BARUKKU						**2,178,000,000**							**2,395,800,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2,178,000,000**							**2,395,800,000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,178,000,000**							**2,395,800,000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**1,228,000,000**							**1,350,800,000**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100**	**1,228,000,000**	-	-	-	-	-	-	**1,350,800,000**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1,228,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	1,350,800,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,228,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,350,800,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**937,900,000**							**1,031,690,000**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**				**100**	**937,900,000**							**1,031,690,000**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	35,400,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	38,940,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	20,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,440,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				500 Keluarga	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		16,500,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	867,500,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	954,250,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				332 Orang	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		27,500,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				328 Orang	28,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		30,800,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				310 Orang	11,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		12,650,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1218 Orang	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,000,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2650 Orang	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		49,500,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12412 Orang	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		38,500,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2479 Orang	18,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		20,460,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7092 Orang	30,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,550,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				349 Orang	18,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		20,240,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				45 Orang	11,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		12,100,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				502 Orang	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,000,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				425 Orang	24,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		26,400,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				5 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				5 Dokumen	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,400,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				150 Dokumen	150,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		165,000,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				20 Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		16,500,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				60 Dokumen	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		38,500,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				30 Dokumen	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,000,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				15 Dokumen	900,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		990,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				50 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				42 Orang	4,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,950,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,650,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				150 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				24 Dokumen	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,650,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				20 Orang	8,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		9,350,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				60 Dokumen	95,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		104,500,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	16,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		17,600,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				25 Orang	14,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		15,400,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				6 Orang	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		16,500,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				24 Tatanan	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		16,500,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	10,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,660,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				48 Dokumen	23,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25,300,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	42,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		46,200,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				2 Dokumen	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3,300,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				0 Dokumen	-	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		-	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	35,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	38,500,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		38,500,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**-**	**12,100,000**							**13,310,000**	
		Terwujudnya Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tengah Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				**80%**	**12,100,000**							**13,310,000**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	12,100,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	13,310,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				24 Dokumen	12,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,310,000	UPT PUSKESMAS BARUKKU
		UPT PUSKESMAS DONGI						**1,893,000,000**							**2,089,610,100**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1,893,000,000**							**2,089,610,100**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,893,000,000**							**2,089,610,100**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**1,292,742,000**							**1,430,000,000**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100**	**1,292,742,000**	-	-	-	-	-	-	**1,430,000,000**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1,292,742,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	1,430,000,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,292,742,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	PENDAPATAN DARI BLUD	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,430,000,000	UPT PUSKESMAS DONGI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**597,521,000**							**656,873,100**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**				**100**	**597,521,000**							**656,873,100**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,500,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	1,650,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				30 Unit	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				3217 Keluarga	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	596,021,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	655,223,100	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				205 Orang	39,585,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		43,543,500	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				220 Orang	2,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,750,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				221 Orang	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1187 Orang	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2344 Orang	48,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		53,130,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9736 Orang	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,650,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1998 Orang	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4258 Orang	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS DONGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				209 Orang	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				35 Orang	33,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		37,180,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				254 Orang	19,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		21,340,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				335 Orang	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				20 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				10 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				262 Dokumen	137,309,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		151,039,900	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	12,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,420,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				150 Dokumen	12,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,860,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				106 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				10 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				240 Dokumen	21,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		23,760,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				2344 Orang	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				35 Orang	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				520 Dokumen	43,441,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		47,785,100	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	PAJAK ROKOK	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,100,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				20 Orang	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				5 Paket	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				240 Dokumen	129,582,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		142,540,200	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				25 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				10 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				71 Orang	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4 Orang	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				32 Tatanan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	2,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,860,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				183 Dokumen	2,204,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,424,400	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				72 Dokumen	15,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		17,160,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				360 Dokumen	51,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		56,430,000	UPT PUSKESMAS DONGI
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**-**	**2,737,000**							**2,737,000**	
		Terwujudnya Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tengah Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				**80%**	**2,737,000**							**2,737,000**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2,737,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	2,737,000	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				25 Dokumen	2,737,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,737,000	UPT PUSKESMAS DONGI
		UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG						**3,330,000,000**							**3,663,000,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3,330,000,000**							**3,663,000,000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,330,000,000**							**3,663,000,000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2,500,000,000**							**2,750,000,000**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100**	**#REF!**	-	-	-	-	-	-	**#REF!**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2,500,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	2,750,000,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,500,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,750,000,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**805,000,000**							**885,500,000**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**				**100**	**805,000,000**							**885,500,000**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	17,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	18,700,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				20 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				500 Keluarga	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,200,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	773,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	850,300,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6255 Orang	52,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		57,750,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6255 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6255 Orang	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		27,500,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2620 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				57403 Orang	34,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		37,510,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				194892 Orang	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,400,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20907 Orang	24,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		26,400,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2500 Orang	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2700 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				630 Orang	40,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		44,000,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6131 Orang	14,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		16,280,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				750 Orang	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		16,500,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				12 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,200,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	13,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		14,520,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		7,700,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,200,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,000,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				750 Orang	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1500 Orang	10,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,440,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		55,000,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,200,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				2000 Orang	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	22,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		24,200,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5770 Orang	24,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		26,400,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2700 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				2500 Orang	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		7,700,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				12 Tatanan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		38,500,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,200,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		49,500,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				12 Dokumen	26,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		28,600,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				12 Dokumen	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		7,700,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	15,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	16,500,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		16,500,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**-**	**25,000,000**							**27,500,000**	
		Terwujudnya Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tengah Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				**80%**	**25,000,000**							**27,500,000**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	25,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	27,500,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		27,500,000	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
		UPT PUSKESMAS EMPAGAE						**2,262,000,000**							**2,484,600,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2,262,000,000**							**2,484,600,000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,262,000,000**							**2,484,600,000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**1,500,319,000**							**1,650,350,900**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100**	**1,500,319,000**	-	-	-	-	-	-	**1,650,350,900**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1,500,319,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	1,650,350,900	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,500,319,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,650,350,900	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**752,681,000**							**824,349,100**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10,800,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	11,880,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				6 Unit	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				640 Keluarga	4,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,280,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	729,881,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	799,269,100	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				361 Orang	20,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,330,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				358 Orang	9,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,560,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				339 Orang	4,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,280,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1986 Orang	1,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,980,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5433 Orang	33,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		36,300,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6245 Orang	9,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,560,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3811 Orang	4,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,280,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5888 Orang	4,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,280,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				289 Orang	4,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,280,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				48 Orang	8,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		8,800,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				497 Orang	4,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,280,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				494 Orang	9,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,560,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				12 Dokumen	4,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,280,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	112,081,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		123,289,100	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	9,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,560,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	9,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,560,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,860,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	4,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,280,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,860,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				8 Orang	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,400,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				4 Orang	9,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,560,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	103,900,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		114,290,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				1940 Orang	9,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,560,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	4,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,280,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	159,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		174,900,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	9,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,560,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	4,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,280,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				497 Orang	12,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,860,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4 Orang	9,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,560,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				2 Orang	9,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10,560,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				6 Tatanan	4,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,280,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	6,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,930,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	6,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,930,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		14,080,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	19,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		21,120,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		45,900,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				12 Dokumen	1,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,760,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				12 Dokumen	4,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,280,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	12,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	13,200,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,200,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**-**	**9,000,000**							**9,900,000**	
		Terwujudnya Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tengah Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				**80%**	**9,000,000**							**9,900,000**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	9,900,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	9,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		9,900,000	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
		UPT PUSKESMAS RAPPANG						**2,730,000,000**							**3,113,000,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2,730,000,000**							**3,113,000,000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,730,000,000**							**3,113,000,000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2,000,000,000**							**2,200,000,000**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100**	**2,000,000,000**	-	-	-	-	-	-	**2,200,000,000**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2,000,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	2,200,000,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				347 Unit Kerja	2,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**729,000,000**							**911,900,000**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**				**100**	**729,000,000**							**911,900,000**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	1,100,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				7 Unit	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				67 Keluarga	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	727,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	909,700,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				638 Orang	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,000,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				610 Orang	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				215 Orang	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				215 Orang	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				357 Orang	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		38,500,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				317 Orang	2,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,750,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				213 Orang	19,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		20,900,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				319 Orang	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,400,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				557 Orang	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,400,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				45 Orang	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				24 Orang	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				57 Orang	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		16,500,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				479 Dokumen	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		49,500,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				5 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2345 Dokumen	140,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		154,000,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				363 Dokumen	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		38,500,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				224 Dokumen	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		38,500,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				570 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				10 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				359 Dokumen	16,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		17,600,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				185 Orang	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		16,500,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				592 Orang	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				45 Dokumen	220,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		242,000,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				3 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				35 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				3 Paket	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				68 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				37 Laporan	1,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,210,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				35 Orang	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				35 Orang	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				21 Orang	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3,300,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				3 Tatanan	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,400,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				68 Dokumen	2,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,640,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				13 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				36 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				125 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				252 Dokumen	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,000,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				4 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				47 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	1,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	1,100,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				45 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**-**	**1,000,000**							**1,100,000**	
		Terwujudnya Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tengah Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				**80%**	**1,000,000**							**1,100,000**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	1,100,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				59 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS RAPPANG
		UPT PUSKESMAS AMPARITA						**2,920,000,000**							**3,206,500,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2,920,000,000**							**3,206,500,000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,920,000,000**							**3,206,500,000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2,000,000,000**							**2,200,000,000**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100**	**2,000,000,000**	-	-	-	-	-	-	**2,200,000,000**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2,000,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	2,200,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 tahun Unit Kerja	2,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**916,000,000**							**1,002,100,000**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**				**100**	**916,000,000**							**1,002,100,000**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	44,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 tahun Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 tahun Keluarga	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	866,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	952,600,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				457 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				453 Orang	37,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		40,700,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				430 Orang	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1678 Orang	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12504 Orang	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		66,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16623 Orang	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,200,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9760 Orang	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		16,500,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20000 Orang	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13534 Orang	8,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		8,800,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1455 Orang	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1455 Orang	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1230 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 tahun Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 tahun Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 tahun Dokumen	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 tahun Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 tahun Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 tahun Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		16,500,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 tahun Dokumen	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 tahun Dokumen	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		33,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1230 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1250 Orang	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,200,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 tahun Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				16620 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		16,500,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun Dokumen	190,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		209,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 tahun Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 tahun Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1233 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1220 Orang	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1223 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 tahun Tatanan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 tahun Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1233 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 tahun Dokumen	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3,300,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 tahun Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 tahun Dokumen	24,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		26,400,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 tahun Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 tahun Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	10,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	5,500,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 tahun Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**-**	**4,000,000**							**4,400,000**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	4,400,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 tahun Dokumen	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4,400,000	UPT PUSKESMAS AMPARITA
		UPT PUSKESMAS BELAWAE						**1,489,000,000**							**1,637,900,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1,489,000,000**							**1,637,900,000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,489,000,000**							**1,637,900,000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**814,500,000**							**895,950,000**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100**	**#REF!**	-	-	-	-	-	-	**#REF!**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	814,500,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	895,950,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	814,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae	PENDAPATAN DARI BLUD	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		895,950,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**671,500,000**							**738,650,000**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**				**100**	**671,500,000**							**738,650,000**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	11,000,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				20 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1085 Keluarga	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	659,500,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	725,450,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				72 Orang	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				71 Orang	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				67 Orang	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				330 Orang	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	21,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		23,100,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2625 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				367 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				260 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5,500,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				11 Orang	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				54 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		22,000,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				11 Orang	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				10 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1500 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110,000,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			0				10 0	10,000,000	-	-	-	-	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				27 Dokumen	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13,200,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				20 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				5 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				105 Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		16,500,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				15 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6,600,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				15 Orang	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,650,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				420 Dokumen	70,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		77,000,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				52 Dokumen	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae	PAJAK ROKOK	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		220,000,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				12 Orang	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae	-	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,650,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	105,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		115,500,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				14 Orang	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3,300,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				5 Tatanan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				105 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2,200,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1,100,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		11,000,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		27,500,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				12 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				12 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		550,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	2,000,000			-	-	-	-	2,200,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**-**	**3,000,000**							**3,300,000**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	3,300,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3,300,000	UPT PUSKESMAS BELAWAE
		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR						**14,524,476,000**							**15,896,453,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14,524,476,000**							**15,896,453,000**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**14,524,476,000**							**15,896,453,000**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**9,538,468,000**							**9,310,445,000**	
		[Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**9,538,468,000**	-	-	-	-	-	-	**9,310,445,000**	-
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	35,000,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	35,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	2 Dokumen	7,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Dokumen	4,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Dokumen	4,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Dokumen	4,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Dokumen	4,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Laporan	7,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Laporan	5,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8,243,968,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	8,415,945,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1176 Orang/bulan	8,233,968,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1176 Orang/bulan	8,405,945,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Laporan	5,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	18 Laporan	5,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	167,000,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	167,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Paket	2,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Paket	3,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Paket	2,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	160,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	75 Laporan	160,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	500,000,000			-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai s wasembad a pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	150,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	450,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai s wasembad a pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Unit	100,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Unit	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	292,500,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	292,500,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	12 Laporan	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Laporan	2,500,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	240,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	12 Laporan	240,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	300,000,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	250,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	197,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	20 Unit	147,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	3,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Unit	3,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai s wasembad a pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	20 Unit	100,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					**-**	**4,986,008,000**							**6,586,008,000**	
		[Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi]	**Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik**	**85**	**68.55**	**70**	**73**	**4,986,008,000**	-	-	-	-	-	75	**6,586,008,000**	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	750,000,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	1,350,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				30 Lembaga	250,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	30 Lembaga	250,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Km	250,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1 KM	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Km	250,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Km	250,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0129	Rehabilitasi Embung														
			Jumlah Embung yang Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	1 Unit	250,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4,236,008,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	5,236,008,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				2 KM	2,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	2 KM	2,000,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2 KM	1,564,886,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	2 KM	2,564,886,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				25 KM	671,122,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	25 KM	671,122,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT						**52,056,548,000**							**92,581,378,361**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**51,906,548,000**							**92,031,378,361**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**50,706,548,000**							**90,081,378,361**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**8,549,780,000**							**8,687,154,975**	
		[Terpenuhinya Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**8,549,780,000**	-	-	-	-	-	-	**8,687,154,975**	-
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	41,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	41,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	8,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Dokumen	8,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	5,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	5,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	5,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	5,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	8,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Laporan	8,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Laporan	5,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5,628,680,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	5,745,754,975	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				812 Orang/bulan	5,573,680,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	854 Orang/Bulan	5,685,754,975	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Laporan	10,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	18 Laporan	50,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	3,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	3,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	3,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	659,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	595,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				40 Paket	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	40 Paket	4,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Paket	36,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	50,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Dokumen	5,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	500,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	150 Lapora	500,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	929,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	827,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	800,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Unit	800,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	89,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	0 Unit	-	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	40,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	27,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	610,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	685,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1000 Laporan	10,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	250,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	275,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	350,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	400,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	679,100,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	790,400,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	292,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	23 Unit	342,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				13 Unit	262,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	13 Unit	318,400,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Unit	15,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	10 Unit	15,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	100,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					**-**	**2,535,768,000**							**2,000,000,000**	
		[Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum]	**Persentase Rumah yang mengakses Air Bersih**	**0**	**0**	**0**	**95.21**	**2,535,768,000**	-	-	-	-	-	95.7	**2,000,000,000**	-
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2,535,768,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	2,000,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	170,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	0	-	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				15 Liter/Detik	1,315,768,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	7.5 liter	1,650,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				2.5 Liter/Detik	525,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		-	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				150 SR	525,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		350,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					**-**	**5,902,000,000**							**5,732,000,000**	
		[Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah]	**Persentase Akses Sanitasi Layak**	**95.00**	**85.78**	**87.50**	**92.26**	**5,902,000,000**	-	-	-	-	-	92.88	**5,732,000,000**	-
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5,902,000,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	5,732,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				200 M³/Hari	750,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	200 M³/Hari	750,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan				95 M³/Hari	32,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	95 M³/Hari	32,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan				40 M³/Hari	600,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	40 M³/Hari	600,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				200 Rumah Tangga	4,050,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	200 Rumah Tangga	4,050,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	470,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	2 Dokumen	300,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
4.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**					**-**	**2,053,000,000**							**5,181,500,000**	
		[Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan]	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik**	**63.5**	**0**	**62.7**	**63**	**2,053,000,000**	-	-	-	-	-	63.5	**5,181,500,000**	-
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2,053,000,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	5,181,500,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				100 M	178,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	100 M	1,970,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				100 Meter	78,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	100 Meter	145,500,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				2 Dokumen	150,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	2 Dokumen	150,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan														
			Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya				2 Kawasan Genangan	300,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	2 Kawasan Genangan	300,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				150 Sistem Drainase Perkotaan	117,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		291,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				500 Sistem Drainase Perkotaan	1,040,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		2,120,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				2 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		100,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				300 Sistem Drainase Perkotaan	90,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		105,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
5.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**					**-**	**3,625,000,000**							**3,150,000,000**	
		[Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung]	**Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik**	**100**	**0**	**100**	**100**	**3,625,000,000**	-	-	-	-	-	-	**3,150,000,000**	-
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	3,625,000,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	3,150,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	3,500,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		3,000,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	125,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		150,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
6.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**					**-**	**1,800,000,000**							**4,000,000,000**	
		[Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata]	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**100**	**0**	**100**	**100**	**1,800,000,000**	-	-	-	-	-	-	**4,000,000,000**	-
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,800,000,000			-	Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	4,000,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				5 Kawasan	1,800,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		4,000,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
7.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					**-**	**24,950,000,000**							**59,839,723,386**	
		[Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman]	**Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota**	**46.81**	**60.81**	**40.78**	**41.94**	**24,950,000,000**	-	-	-	-	-	-	**59,839,723,386**	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	24,950,000,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	59,839,723,386	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				2 KM	350,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		350,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				20 KM	2,800,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		3,500,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				6 KM	10,500,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		30,165,378,635	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				6 KM	8,500,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		21,000,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24,950,000,000**	-	-	-	-	-	-	**59,839,723,386**	-
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				0 Meter	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		-	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan														
8.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**					**-**	**191,000,000**							**291,000,000**	
		[Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi]	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli**	**100**	**0**	**100**	**100**	**191,000,000**	-	-	-	-	-	-	**291,000,000**	-
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	110,000,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	210,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Instruktur/Asesor/Pen yelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				20 Orang	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		10,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**191,000,000**	-	-	-	-	-	-	**291,000,000**	-
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan				0 Dokumen	-	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		-	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		200,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	51,000,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	51,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				20 Perangkat Pendukung	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		20,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				2 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		10,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI														
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Orang	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		10,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	11,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		11,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	30,000,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	30,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				10 Paket Pekerjaan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		20,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				5 Bangunan Konstruksi	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		10,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
9.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**					**-**	**1,100,000,000**							**1,200,000,000**	
		[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang]	**Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi**	**100**	**0**	**100**	**100**	**1,100,000,000**	-	-	-	-	-	-	**1,200,000,000**	-
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,100,000,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	1,200,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	900,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		900,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		300,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**1,200,000,000**							**1,950,000,000**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					**-**	**300,000,000**							**300,000,000**	
		[Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah]	**Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300,000,000**	-	-	-	-	-	-	**300,000,000**	-
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	300,000,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	300,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana														
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		100,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		100,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				0 Dokumen	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		-	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		100,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**					**-**	**750,000,000**							**1,500,000,000**	
		[Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman]	**Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani**	**85.32**	**80.63**	**80.63**	**81.27**	**750,000,000**	-	-	-	-	-	-	**1,500,000,000**	-
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	750,000,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	1,500,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				15 Unit Rumah	750,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		1,500,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**					**-**	**150,000,000**							**150,000,000**	
		[Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman]	**Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)**	**78.5**	**0**	**76.5**	**77.8**	**150,000,000**	-	-	-	-	-	-	**150,000,000**	-
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	150,000,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	150,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				3 Lokasi	150,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		150,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**150,000,000**							**550,000,000**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**150,000,000**							**550,000,000**	
1.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**					**-**	**150,000,000**							**550,000,000**	
		[Meningkatnya Penyelesaian Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan]	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**150,000,000**	-	-	-	-	-	-	**550,000,000**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150,000,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	550,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	150,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		550,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK						**1,695,000,000**							**750,000,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1,695,000,000**							**750,000,000**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**1,695,000,000**							**750,000,000**	
1.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					**-**	**1,695,000,000**							**750,000,000**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,695,000,000**	-	-	-	-	-	-	**750,000,000**	-
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,695,000,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-	750,000,000	UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi				6 Unit	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		100,000,000	UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				450 Rumah Tangga	375,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		500,000,000	UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				10 M³/Hari	360,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		-	UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja														
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				1 Unit	860,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		150,000,000	UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						**11,488,516,000**							**11,488,516,000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11,488,516,000**							**11,488,516,000**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**11,488,516,000**							**11,488,516,000**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**5,227,444,625**							**5,227,444,625**	
		[Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5,227,444,625**	-	-	-	-	-	-	**5,227,444,625**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	17,916,675			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	17,916,675	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2,537,325	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,537,325	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,439,675	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,439,675	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		3,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,439,675	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,439,675	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	3,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4,724,028,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	4,724,028,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				91 Orang/bulan	4,720,028,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	106	4,720,028,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				91 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		1,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	3,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	3,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		1,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		1,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		1,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	109,322,900			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	109,322,900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		1,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	107,322,900	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		107,322,900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	168,989,050			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	168,989,050	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9,450,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		9,450,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,445,450	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,445,450	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,563,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,563,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	144,030,600	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		144,030,600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	34,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	34,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	119,600,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	119,600,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	48,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		48,600,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	65,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		65,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50,588,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	50,588,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	39,588,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		39,588,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**1,809,271,375**							**1,809,271,375**	
		[Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum]	**Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,809,271,375**	-	-	-	-	-	-	**1,809,271,375**	-
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,614,271,375			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,614,271,375	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	128,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		128,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	11,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		11,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas														
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				5 Orang	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	-		100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				4 laporan	1,223,771,375	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,223,771,375	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				12 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				4 Unit	37,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		37,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja														
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas				5 Orang	79,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		79,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	125,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	125,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				11 LAPORAN Laporan	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		25,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				4 Laporan	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-			-	70,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	70,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 orang Laporan	70,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		70,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**					**-**	**4,451,800,000**							**4,451,800,000**	
		[Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran]	**Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Ppenyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4,451,800,000**	-	-	-	-	-	-	**4,451,800,000**	-
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4,350,800,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	4,350,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				12 Dokumen	2,086,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,086,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				1 Orang	175,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		175,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)														
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				1 Dokumen Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		1,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1 Unit	1,737,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,737,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0026	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	350,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		350,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	76,000,000			-	-	-	-	76,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				440 Orang	75,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				106 Desa/Kelurahan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		1,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	25,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	25,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0006	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				4 Laporan	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		25,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**3,911,086,453**							**3,083,739,571**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3,911,086,453**							**3,083,739,571**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**3,911,086,453**							**3,083,739,571**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2,842,086,453**							**2,106,668,331**	
		[Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2,842,086,453**	-	-	-	-	-	-	**2,106,668,331**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-	5,025,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		3,015,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		2,010,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,177,454,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-	1,824,457,296	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22/12 Orang/bulan	2,162,454,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		1,820,437,296	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		4,020,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	162,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-	83,716,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		1,005,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		4,020,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	150,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		78,691,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-	30,150,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3	50,000,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		5,025,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	150,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		25,125,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	136,526,453			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-	105,048,630	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				18 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		3,015,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	26,526,453	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		26,658,630	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	90,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		75,375,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	151,106,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-	58,270,905	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			0				12 Unit 0	86,106,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		47,215,905	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		3,015,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		8,040,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					**-**	**1,069,000,000**							**977,071,240**	
		[Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Bencana Melalui Sistem Penanggulangan Bencana yang Terpadu, Responsif, dan Berkelanjutan]	**Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana** **Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** **Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**100**	**100**	**100**	**100** **100** **100**	**1,069,000,000**	-	-	-	-	-	-	**977,071,240**	-
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	30,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-	32,811,240	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				100 Orang	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		32,811,240	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	624,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-	458,535,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		5,025,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				3 Unit	107,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		5,025,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				150 Orang	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				10 Keluarga	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		5,025,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				2 Kawasan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		7,035,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				11 Orang	130,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		5,025,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	105,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		180,900,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen Dokumen	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				4 Kawasan	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		100,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	310,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-	210,600,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		100,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		5,025,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				5 Orang	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		5,025,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal				1 Dokumen Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				114 Orang	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		40,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				800 Orang	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		5,025,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		5,025,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	105,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-	275,125,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		5,025,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		5,025,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		5,025,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		5,025,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Dokumen Kegiatan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		250,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		5,025,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL						**4,271,000,000**							**2,927,201,575**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4,271,000,000**							**2,927,201,575**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**4,271,000,000**							**2,927,201,575**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3,449,000,000**							**2,580,201,575**	
		[Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3,449,000,000**	-	-	-	-	-	-	**2,580,201,575**	-
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	96,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	40,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		25,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	-		5,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,135,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	1,931,701,575	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				252 Orang/bulan	2,100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		1,916,701,575	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	18,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	-		8,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	17,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		7,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	25,000,000			-	Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	10,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	13,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	-		5,000,000	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	47,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	44,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				21 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		20,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				21 Dokumen	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		7,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		7,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	180,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	106,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		3,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		3,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	170,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		100,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	350,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	130,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	150,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		50,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	120,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		50,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	80,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		30,000,000	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	211,500,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	201,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		1,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		28,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		7,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	165,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		165,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	404,500,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	117,500,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	196,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		46,200,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	36,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		11,300,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	22,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		10,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		50,000,000	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**					**-**	**243,000,000**							**98,000,000**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan Sosial]	**Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial**	**100**	**83**	**100**	**100**	**243,000,000**	-	-	-	-	-	-	**98,000,000**	-
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	8,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	3,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				4 Dokumen	8,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		3,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	235,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	95,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Lembaga	75,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		25,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan														
			Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial				100 Orang	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		20,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				46 Orang	110,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	-		50,000,000	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**					**-**	**5,000,000**							**5,000,000**	
		[Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan]	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani**	**100**	**0**	**0**	**100**	**5,000,000**	-	-	-	-	-	-	**5,000,000**	-
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-			-	5,000,000			-	-	-	-	5,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal														
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				-	5,000,000	-	-	-	-	-		5,000,000	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					**-**	**200,000,000**							**65,000,000**	
		[Meningkatnya Rehabilitasi Sosial]	**Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti** **Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti** **Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti** **Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200,000,000**	-	-	-	-	-	-	**65,000,000**	-
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	177,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	57,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Orang	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		15,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Orang	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	-		5,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Orang	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Orang	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				19 Orang	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	-		5,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Orang	9,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		4,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Orang	14,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		4,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Orang	14,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4.Peningkat an ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		4,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-			-	23,000,000			-	Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	8,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	11,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		4,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	11,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		4,000,000	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					**-**	**80,000,000**							**80,000,000**	
		[Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial]	**Persentase Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial**	**100**	**100**	**100**	**100**	**80,000,000**	-	-	-	-	-	-	**80,000,000**	-
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	80,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	80,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				40 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		15,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Soial Kesejahteraan Keluarga				15 Pm	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		30,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				40 Usulan	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		30,000,000	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					**-**	**144,000,000**							**49,000,000**	
		[Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana]	**Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**100**	**100**	**100**	**100**	**144,000,000**	-	-	-	-	-	-	**49,000,000**	-
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	100,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	35,000,000	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				450 Orang	40,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		15,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				450 Orang	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				450 Orang	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4.Peningkat an ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	44,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	14,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Kampung	22,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		7,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				26 Orang	22,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		7,000,000	DINAS SOSIAL
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**					**-**	**150,000,000**							**50,000,000**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan]	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik**	**100**	**33**	**100**	**100**	**150,000,000**	-	-	-	-	-	-	**50,000,000**	-
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			-	150,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	50,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				14 Makam	150,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		50,000,000	DINAS SOSIAL
		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						**16,359,404,000**							**16,592,476,725**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16,234,404,000**							**16,467,476,725**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**12,440,000,000**							**12,685,000,000**	
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**					**-**	**50,000,000**							**50,000,000**	
		[Terwujudnya Rencana Tenaga Kerja yang Dijadikan Acuan Kegiatan]	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**	**25**	**0**	**0**	**13**	**50,000,000**	-	-	-	-	-	-	**50,000,000**	-
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-			-	50,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-	-	50,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		50,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**					**-**	**10,075,000,000**							**10,075,000,000**	
		[Terwujudnya Tenaga Kerja yang Bersetifikat Kompetensi]	**Persentase Tenaga Kerja Bersetifikat Kompetensi**	**36**	**30**	**31**	**32**	**10,075,000,000**	-	-	-	-	-	-	**10,075,000,000**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	10,075,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-	-	10,075,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				790 Orang	10,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		10,000,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				2 Unit	75,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		75,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**					**-**	**290,000,000**							**535,000,000**	
		[Terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja yang Maksimal]	**Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kab/Kota**	**60**	**16.32**	**16.5**	**18**	**290,000,000**	-	-	-	-	-	-	**535,000,000**	-
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	255,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-	-	500,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				20 Orang	255,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		500,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	5,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-	-	5,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				50 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		5,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-	-	30,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran														
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				10 Orang	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		30,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**					**-**	**2,025,000,000**							**2,025,000,000**	
		[Terwujudnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak]	**Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)**	**40**	**13.75**	**15**	**17**	**2,025,000,000**	-	-	-	-	-	-	**2,025,000,000**	-
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	25,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-	-	25,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				20 Laporan	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		25,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2,000,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-	-	2,000,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				10000 Orang	2,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		2,000,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**3,794,404,000**							**3,782,476,725**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3,444,404,000**							**3,502,476,725**	
		[Tercapainya Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3,444,404,000**	-	-	-	-	-	-	**3,502,476,725**	-
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	14,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	14,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,965,224,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	3,022,296,725	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				462 Orang/bulan	2,955,224,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,012,296,725	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				175 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				17 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	10,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				28 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				28 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	106,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	106,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,500,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				398 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	99,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		99,500,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	25,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	240,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	240,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	72,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		72,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	168,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		168,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84,180,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	85,180,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	69,180,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		69,180,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		11,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**					**-**	**50,000,000**							**50,000,000**	
		[Meningkatnya Koperasi yang Sehat]	**Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas**	**8.5**	**7**	**7.3**	**7.5**	**50,000,000**	-	-	-	-	-	-	**50,000,000**	-
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	50,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	50,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				30 Unit Usaha	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		50,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**					**-**	**50,000,000**							**50,000,000**	
		[Meningkatnya Koperasi Aktif]	**Persentase Koperasi Aktif**	**70.00**	**68.42**	**68.45**	**68.50**	**50,000,000**	-	-	-	-	-	-	**50,000,000**	-
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	50,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				20 Orang	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		50,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**					**-**	**25,000,000**							**25,000,000**	
		[Meningkatnya Koperasi Berkualitas]	**Persentase Koperasi Berkualitas**	**33**	**22.81**	**22.85**	**23.20**	**25,000,000**	-	-	-	-	-	-	**25,000,000**	-
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	25,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-	-	25,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi														
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				5 Kelompok Masyarakat	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		5,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				5 Unit Usaha	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		5,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota														
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit Usaha	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		15,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**					**-**	**175,000,000**							**105,000,000**	
		[Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha]	**Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha**	**28**	**16.53**	**17**	**20**	**175,000,000**	-	-	-	-	-	-	**105,000,000**	-
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	175,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	105,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				30 Unit Usaha	140,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		70,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				200 Unit Usaha	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		20,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				15 Orang	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		15,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**					**-**	**50,000,000**							**50,000,000**	
		[Meningkatnya Volume Usahanya Usaha Mikro]	**Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Volume Usahanya Setelah Difasitasi Pengembangan**	**5.5**	**2.5**	**3.0**	**3.5**	**50,000,000**	-	-	-	-	-	-	**50,000,000**	-
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-			-	50,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	50,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				1 Unit Usaha	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		50,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**125,000,000**							**125,000,000**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**125,000,000**							**125,000,000**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**					**-**	**100,000,000**							**100,000,000**	
		[Terwujudnya Perencanaan Kawasan Transmigrasi]	**Persentase Perencanaan Kawasan Transmigrasi**	**5**	**0**	**0**	**3**	**100,000,000**	-	-	-	-	-	-	**100,000,000**	-
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-			-	100,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-	-	100,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		100,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**					**-**	**5,000,000**							**5,000,000**	
		[Terwujudnya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi]	**Persentase Fasilitasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5,000,000**	-	-	-	-	-	-	**5,000,000**	-
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-	-	5,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				5 Kepala Keluarga	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		5,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**					**-**	**20,000,000**							**20,000,000**	
		[Terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan]	**Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**20,000,000**	-	-	-	-	-	-	**20,000,000**	-
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-			-	20,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-	-	20,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				10 Kepala Keluarga	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		10,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan Permukiman	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		10,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**3,252,720,000**							**3,933,099,350**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3,252,720,000**							**3,933,099,350**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**126,000,000**							**633,622,000**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**					**-**	**40,000,000**							**192,002,000**	
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Program Pembangunan Daera	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**	**-**	**-**	**-**	**100**	**40,000,000**	-	-	-	-	-	-	**192,002,000**	-
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	10,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	106,502,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		50,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				1 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		10,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan				0 Lembaga	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		25,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				0 Orang	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		20,402,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	15,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	65,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				0 Lembaga	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		50,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				100 orang	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		15,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	15,000,000			-	2.Peningkat an layanan keagamaan , pemajuan kebudayaa n, kearifan lokal, sosial kemasyara katan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan me mperhatika n pelibatan kelompok marjinal Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				2 Lembaga	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.Peningkat an layanan keagamaan , pemajuan kebudayaa n, kearifan lokal, sosial kemasyara katan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan me mperhatika n pelibatan kelompok marjinal Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**					**-**	**15,000,000**							**15,150,000**	
		[Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Melalui Layanan Perlindungan yang Komprehensif]	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**0.001**	**0**	**0**	**0.001**	**15,000,000**	-	-	-	-	-	-	**15,150,000**	-
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	5,050,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				1 laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,050,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	5,000,000			-	2.Peningkat an layanan keagamaan , pemajuan kebudayaa n, kearifan lokal, sosial kemasyara katan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan me mperhatika n pelibatan kelompok marjinal Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	5,050,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				5 orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.Peningkat an layanan keagamaan , pemajuan kebudayaa n, kearifan lokal, sosial kemasyara katan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan me mperhatika n pelibatan kelompok marjinal Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,050,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5,000,000			-	2.Peningkat an layanan keagamaan , pemajuan kebudayaa n, kearifan lokal, sosial kemasyara katan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan me mperhatika n pelibatan kelompok marjinal Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	5,050,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				5 orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.Peningkat an layanan keagamaan , pemajuan kebudayaa n, kearifan lokal, sosial kemasyara katan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan me mperhatika n pelibatan kelompok marjinal Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,050,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**					**-**	**26,000,000**							**76,760,000**	
		[Meningkatnya Ketahanan Keluarga Melalui Peningkatan Kapasitas dan Layanan Edukatif]	**Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga**	**100**	**100**	**100**	**100**	**26,000,000**	-	-	-	-	-	-	**76,760,000**	-
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	70,700,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		20,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.				0 Dokumen	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		50,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		[Meningkatnya Ketahanan Keluarga Melalui Peningkatan Kapasitas dan Layanan Edukatif]	**Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga**	**100**	**100**	**100**	**100**	**26,000,000**	-	-	-	-	-	-	**76,760,000**	-
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6,000,000			-	2.Peningkat an layanan keagamaan , pemajuan kebudayaa n, kearifan lokal, sosial kemasyara katan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan me mperhatika n pelibatan kelompok marjinal Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	6,060,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0004	Monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.Peningkat an layanan keagamaan , pemajuan kebudayaa n, kearifan lokal, sosial kemasyara katan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan me mperhatika n pelibatan kelompok marjinal Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		6,060,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**					**-**	**-**							**101,505,000**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**101,505,000**	-
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	101,505,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		101,505,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**					**-**	**30,000,000**							**172,205,000**	
		[Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak Secara Menyeluruh Melalui Layanan Berbasis Klaster]	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**	**62.50**	**62.45**	**62.45**	**62.45**	**30,000,000**	-	-	-	-	-	-	**172,205,000**	-
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	20,000,000			-	2.Peningkat an layanan keagamaan , pemajuan kebudayaa n, kearifan lokal, sosial kemasyara katan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan me mperhatika n pelibatan kelompok marjinal Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	71,205,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.Peningkat an layanan keagamaan , pemajuan kebudayaa n, kearifan lokal, sosial kemasyara katan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan me mperhatika n pelibatan kelompok marjinal Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		20,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Lembaga	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		51,005,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	10,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	101,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				0 Orang	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		50,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			0jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 0	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		10,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				0 Lembaga	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		40,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**					**-**	**15,000,000**							**76,000,000**	
		[Terpenuhinya Hak Perlindungan Khusus Bagi Anak Melalui Layanan yang Responsif dan Adil]	**Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**15,000,000**	-	-	-	-	-	-	**76,000,000**	-
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	40,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota														
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				5 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,050,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				29 Kegiatan	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		35,350,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	30,550,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				1 Orang	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		25,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				5 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.Peningkat an layanan keagamaan , pemajuan kebudayaa n, kearifan lokal, sosial kemasyara katan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan me mperhatika n pelibatan kelompok marjinal Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,050,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5,000,000			-	2.Peningkat an layanan keagamaan , pemajuan kebudayaa n, kearifan lokal, sosial kemasyara katan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan me mperhatika n pelibatan kelompok marjinal Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	5,050,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.Peningkat an layanan keagamaan , pemajuan kebudayaa n, kearifan lokal, sosial kemasyara katan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan me mperhatika n pelibatan kelompok marjinal Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,050,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**3,126,720,000**							**3,299,477,350**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2,962,699,000**							**3,033,231,350**	
		[Meningkatnya Dukungan Administrasi dan Layanan Penunjang yang Efektif dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2,962,699,000**	-	-	-	-	-	-	**3,033,231,350**	-
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12,564,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	12,595,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		3,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		1,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		1,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		1,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		1,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	3,064,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		3,095,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,568,720,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	2,617,322,350	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				300 Orang/bulan	2,563,720,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		2,611,322,350	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				20 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		6,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	22,220,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		22,220,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	80,665,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	73,050,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		1,050,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,365,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		1,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				145 Laporan	78,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		71,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	33,000,000			-	5.Peningkat an kemandi rian desa melalui pen gembangan ekonomi m asyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk peme rataan ekonomi, menekan angka peng angguran, dan pembe rantasan kemiskinan Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	31,600,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	16,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Peningkat an kemandi rian desa melalui pen gembangan ekonomi m asyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk peme rataan ekonomi, menekan angka peng angguran, dan pembe rantasan kemiskinan Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		1,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		15,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		10,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	191,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	193,369,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		1,530,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	42,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		42,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	149,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		149,839,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	76,750,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	83,075,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	65,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		65,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	1,750,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		1,750,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		6,325,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**					**-**	**40,000,000**							**40,000,000**	
		[Meningkatnya Desa yang Tertata Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Potensi Lokal]	**Persentase Fasilitasi Penataan Desa**	**100**	**0**	**0**	**100**	**40,000,000**	-	-	-	-	-	-	**40,000,000**	-
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			-	40,000,000			-	5.Peningkat an kemandi rian desa melalui pen gembangan ekonomi m asyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk peme rataan ekonomi, menekan angka peng angguran, dan pembe rantasan kemiskinan Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				1 Desa	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Peningkat an kemandi rian desa melalui pen gembangan ekonomi m asyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk peme rataan ekonomi, menekan angka peng angguran, dan pembe rantasan kemiskinan Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				1 Desa	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Peningkat an kemandi rian desa melalui pen gembangan ekonomi m asyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk peme rataan ekonomi, menekan angka peng angguran, dan pembe rantasan kemiskinan Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**					**-**	**6,770,000**							**6,838,000**	
		[Meningkatnya Kolaborasi Antar Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan]	**Persentase Fasilitasi Kerjasama antar Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6,770,000**	-	-	-	-	-	-	**6,838,000**	-
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-			-	6,770,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	6,838,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				4 Dokumen	6,770,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		6,838,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**					**-**	**55,628,000**							**158,084,000**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif]	**Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**55,628,000**	-	-	-	-	-	-	**158,084,000**	-
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	55,628,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	158,084,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				0 Dokumen	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		50,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				0 Dokumen	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		40,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				68 Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		15,150,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				68 Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		15,150,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				38 Laporan	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Peningkat an kemandi rian desa melalui pen gembangan ekonomi m asyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk peme rataan ekonomi, menekan angka peng angguran, dan pembe rantasan kemiskinan Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		11,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				68 Dokumen	6,586,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		6,652,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				68 Dokumen	12,531,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		12,656,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				15 Desa	6,511,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		6,576,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**					**-**	**61,623,000**							**61,324,000**	
		[Meningkatnya Peran dan Kemandirian Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Sosial dan Budaya Desa]	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dalam Pemberdayaan Masyarakat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**61,623,000**	-	-	-	-	-	-	**61,324,000**	-
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	61,623,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	61,324,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				17 Dokumen	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		3,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				81 Lembaga	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		15,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				20 Unit	13,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		13,130,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				20 Laporan	7,123,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		7,194,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				13 Dokumen	2,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		2,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				106 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN						**16,203,021,367**							**22,279,348,450**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**674,237,400**							**1,023,034,700**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**674,237,400**							**1,023,034,700**	
1.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**					**-**	**1,000,000**							**1,000,000**	
		[Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan]	**Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan**	**100**	**0**	**0**	**100**	**1,000,000**	-	-	-	-	-	-	**1,000,000**	-
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	1,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1 unit	-		1 unit	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		1,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**					**-**	**546,816,500**							**898,037,300**	
		[Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat]	**Skor Pola Pangan Harapan**	**92.00**	**88.41**	**89.00**	**89.5**	**546,816,500**	-	-	-	-	-	-	**898,037,300**	-
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	340,726,300			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	551,713,100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	15 Keluarga	-		15 Keluarga	158,597,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		358,597,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2 laporan	4 laporan		5 laporan	123,286,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		111,357,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan														
			Informasi Stok Pangan	11 Dokumen	-		11 Dokumen	29,002,300	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		29,249,900	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	-		2 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		1,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	11 Laporan	-		11 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		1,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	11 Dokumen	-		11 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		1,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota														
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	-		11 Dokumen	26,841,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	-		49,509,200	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	150,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	-	-	290,213,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Ton	4 Ton		5 Ton	150,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	-		290,213,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	56,090,200			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	56,111,200	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	35,095,600	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		35,116,600	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	-		1 Laporan	20,994,600	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**					**-**	**81,909,400**								
		[Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan]	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**100**	**0**	**100**	**100**	**81,909,400**	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-			-	45,690,400			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	-		1 Dokumen	45,690,400	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	36,219,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-		1 Dokumen	16,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	-		1 Laporan	12,719,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-		1 Dokumen	7,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		7,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**					**-**	**44,511,500**							**34,759,000**	
		[Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan]	**Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan**	**100**	**0**	**100**	**100**	**44,511,500**	-	-	-	-	-	-	**34,759,000**	-
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	44,511,500			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	34,759,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-		1 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		2,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	-		1 Dokumen	36,761,500	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		27,009,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	-		1 Laporan	5,750,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		5,750,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**15,528,783,967**							**21,256,313,750**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**15,528,783,967**							**21,256,313,750**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**11,845,688,467**							**13,127,150,575**	
		[Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan dalam Mendukung Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**99.59**	**100**	**100**	**11,845,688,467**	-	-	-	-	-	-	**13,127,150,575**	-
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	54,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	72,900,500	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen		2 Dokumen	9,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		11,400,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-		1 Dokumen	2,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		2,700,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	2,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			2 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	-		2,400,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	18,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		21,600,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	2,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		2,800,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data	-		12 Data	9,700,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		11,600,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9,765,271,500			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	9,890,181,675	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1288 Orang/bulan	1484 Orang/bulan		1288 Orang/bulan	9,733,449,500	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		9,855,371,375	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			1 Dokumen	1,988,200	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		2,524,500	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	19,815,200	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		20,389,200	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	1,953,400	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		2,053,400	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			2 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen			1 Dokumen	1,545,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan			18 Laporan	3,136,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	-			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	1,384,200	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6,009,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	3,656,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	2,353,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		2,353,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	305,750,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	260,750,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		1 Paket	5,750,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		5,750,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	300,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		255,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	199,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	503,800,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	40,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		40,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	2 Unit		1 Unit	59,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		261,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		6 Unit	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		202,800,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1,143,588,967			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	1,666,710,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	3,750,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		3,750,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	66,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		66,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1,073,838,967	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		1,596,960,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	372,069,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	726,969,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	49 Unit		49 Unit	285,069,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		636,069,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	20 Unit		20 Unit	31,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		34,900,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		1 Unit	56,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		56,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					**-**	**886,796,500**							**1,438,669,500**	
		[Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian]	**Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun**	**6.40**	**5.36**	**5.52**	**5.69**	**886,796,500**	-	-	-	-	-	-	**1,438,669,500**	-
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	886,796,500			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	1,438,669,500	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	1 Laporan		2 Laporan	305,250,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		318,352,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	4 Laporan		3 Laporan	569,546,500	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		1,108,317,500	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	0,1 Ton			0,1 Ton	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	-		2,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan														
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	1 Laporan			1 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		2,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura														
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	2 Laporan			2 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan														
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	25 Laporan			5 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		2,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan														
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	2 Laporan			2 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		2,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura														
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	10 Laporan			2 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		2,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					**-**	**2,455,299,000**							**4,871,709,675**	
		[Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian]	**Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian**	**100**	**95.24**	**100**	**100**	**2,455,299,000**	-	-	-	-	-	-	**4,871,709,675**	-
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	1,044,948,000			-	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	2,313,857,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	12 Laporan		2 Laporan	52,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		392,225,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	51505 Ha			51105,3 Ha	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan														
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	4 Unit	1 Unit		1 Unit	15,474,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		17,765,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan														
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	63 Unit			65 Unit	202,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		433,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura														
			Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit			2 Unit	52,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	-		157,800,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan														
			Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	1 Unit			1 Unit	202,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		424,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura														
			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit			2 Unit	202,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	-		670,302,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan														
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5 Unit			3 Unit	15,474,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	-		17,765,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan														
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5 Unit			5 Unit	102,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		150,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian														
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				1 Dokumen	152,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	1,410,351,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	2,557,852,675	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian														
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit			1 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		75,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	16 Unit		1 Unit	1,228,851,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		2,146,352,675	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit														
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit		1 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		75,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit			1 Unit	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		1,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	3 Unit		1 Unit	20,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		20,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	40 Unit		1 Unit	150,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		240,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**					**-**	**310,000,000**							**1,787,784,000**	
		[Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian]	**Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**310,000,000**	-	-	-	-	-	-	**1,787,784,000**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	310,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	1,787,784,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3125 Ha	1840 Ha		2313 Ha	305,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		1,782,784,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	5 Ha			5 Ha	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		5,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					**-**	**31,000,000**							**31,000,000**	
		[Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian]	**Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani**	**6.04**	**2.89**	**2.97**	**3.35**	**31,000,000**	-	-	-	-	-	-	**31,000,000**	-
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	31,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	31,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Unit	11 Unit		11 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		5,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Unit			50 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	11 Unit	5 Unit		11 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2 Unit	4 Unit		2 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	32 Orang			32 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		5,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit	1 Unit		1 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		5,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen		2 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		1,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**17,458,637,425**							**12,785,513,400**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17,458,637,425**							**12,785,513,400**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**17,458,637,425**							**12,785,513,400**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**5,000,685,425**							**4,874,813,400**	
		[Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan dalam Mendukung Pembangunan Lingkungan Hidup]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5,000,685,425**	-	-	-	-	-	-	**4,874,813,400**	-
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	2	2	2	2	35,200,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	35,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4	2	2 Dokumen	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		12,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,700,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,700,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		4,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4 Laporan		2 Laporan	11,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		11,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	0 Laporan		2 Laporan	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3,964,975,425			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	3,888,313,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		560 Orang/bulan		560 Orang/bulan	3,941,775,425	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,865,113,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0		12 Dokumen	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0		1 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		1 Laporan	7,700,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0		1 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		12 Laporan		12 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	4,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	4,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0		1 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0		1 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	203,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	203,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		60 Paket		70 Paket	3,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		180 Laporan		185 Laporan	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	45,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	45,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-		1 Unit	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		4,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		-		1 Unit	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-		10 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit		4 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	454,040,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	454,830,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,050,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan	74,040,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		74,780,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan	375,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		375,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	293,970,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	243,970,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		40,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		74 Unit		75 Unit	133,970,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		133,970,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara		-		30 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		75 Unit		76 Unit	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**					**-**	**178,758,000**							**78,758,000**	
		-	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**	**-**	**100**	**-**	**100**	**178,758,000**	-	-	-	-	-	-	**78,758,000**	-
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	168,758,000			-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-	68,758,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan		2 Dokumen		1 Dokumen	168,758,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		68,758,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		[Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Hidup untuk Memitigasi Dampak KRP]	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**	**100**	**100**	**100**	**100**	**178,758,000**	-	-	-	-	-	-	**78,758,000**	-
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	10,000,000			-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-	10,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		2 Dokumen		1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun		-		2 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**					**-**	**100,000,000**							**100,000,000**	
		[Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup]	**Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100,000,000**	-	-	-	-	-	-	**100,000,000**	-
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	75,000,000			-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-	75,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		2 Dokumen		2 Dokumen	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)		-		2 Lokasi	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan														
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan		-		2 Paket	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		2 Dokumen		2 Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	25,000,000			-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		11 Laporan		12 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		10,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		17 Titik		12 Titik	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**					**-**	**1,780,000,000**							**1,755,000,000**	
		[Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati]	**Persentase Luas RTH Publik dari Wilayah Kota/Perkotaan**	**29.86**	**23.52**	**23.94**	**24.46**	**1,780,000,000**	-	-	-	-	-	-	**1,755,000,000**	-
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	1,780,000,000			-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-	1,755,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		47 Ha		50 Ha	1,750,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		1,750,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya														
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		-		1 Unit	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**					**-**	**43,000,000**							**38,000,000**	
		[Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)]	**Persentase Pengurangan Limbah B3**	**100**	**0**	**100**	**100**	**43,000,000**	-	-	-	-	-	-	**38,000,000**	-
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-			-	20,000,000			-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3														
			Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan		6 Usaha		6 Usaha	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	23,000,000			-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		6 Dokumen		6 Dokumen	23,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**					**-**	**37,000,000**								
		[Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan]	**Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**100**	**100**	**100**	**100**	**37,000,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	37,000,000			-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		7 Dokumen		7 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		35 Badan Usaha		35 Badan Usaha	27,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**					**-**	**10,000,000**								
		[Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH]	**Presentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH**	**100**	**100**	**100**	**100**	**10,000,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-			-	10,000,000			-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		1 Dokumen		1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					**-**	**37,000,000**								
		[Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup]	**Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup**	**100**	**100**	**100**	**100**	**37,000,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	37,000,000			-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		5 Entitas		8 Entitas	37,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**					**-**	**15,000,000**								
		[Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup]	**Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti**	**100**	**100**	**100**	**100**	**15,000,000**	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	15,000,000			-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola		10 Pengaduan		10 Pengaduan	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**					**-**	**10,257,194,000**							**5,839,942,000**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Persampahan]	**Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota**	**92.90**	**74.93**	**77.90**	**81**	**10,257,194,000**	-	-	-	-	-	-	**5,839,942,000**	-
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	10,257,194,000			-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-	-	5,839,942,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	-		2 Kelompok	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	3 Unit		2 Unit	4,442,252,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	-		2 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	28.370,39 Ton	22.000 Ton		27.021,25 Ton	3,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		3,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah	99 Persentase	-		88 Persentase	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		10,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	9267, 27 Ton	10,000 Ton		9260, 03 Ton	1,779,942,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		1,779,942,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah														
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	7 Laporan	-		7 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		10,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	43.500 Ton	-		38.500 Ton	975,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana	-		900,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						**3,904,855,000**							**3,905,355,000**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3,904,855,000**							**3,905,355,000**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**3,904,855,000**							**3,905,355,000**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3,258,855,000**							**3,259,355,000**	
		[Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3,258,855,000**	-	-	-	-	-	-	**3,259,355,000**	-
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	25,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	25,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen		9 Dokumen	22,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		22,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,258,855,000**	-	-	-	-	-	-	**3,259,355,000**	-
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			4 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		[Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3,258,855,000**	-	-	-	-	-	-	**3,259,355,000**	-
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan			6 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan			6 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,243,091,000			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,243,091,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang/bulan	255 Orang/bulan		288 Orang/bulan	2,242,091,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,242,091,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	26,129,500			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	26,129,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket			24 Paket	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen			24 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang			24 Orang	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang			25 Orang	22,129,500	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		22,129,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang			15 Orang	2,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	152,318,500			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	152,318,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3 Paket		4 Paket	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	6,634,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6,634,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	205 Laporan		65 Laporan	139,184,500	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		139,184,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	177,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	177,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	2 Unit		10 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	8 Unit		7 Unit	155,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		155,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	29 Unit			29 Unit	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	440,372,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	440,372,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	70,980,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		70,980,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	13,052,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		13,052,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	355,840,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		355,840,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	194,944,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	194,944,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
	Batas Disini		*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	12 Unit	13 Unit		12 Unit	84,944,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		84,944,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit			12 Unit	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	25 Unit		23 Unit	24,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		24,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	85,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		85,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit			25 Unit	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**					**-**	**377,700,000**							**377,700,000**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftran Penduduk]	**Persentase Kepemilikan KTP Elektronik**	**99.80**	**99.48**	**99.50**	**99.60**	**377,700,000**	-	-	-	-	-	-	**377,700,000**	-
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	374,200,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	374,200,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	24 Dokumen	24 Dokumen		24 Dokumen	59,797,710	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		59,797,710	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36 Laporan	36 Laporan		36 Laporan	269,718,260	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		269,718,260	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	24 Laporan	24 Laporan		24 Laporan	44,684,030	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		44,684,030	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6 Dokumen			6 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	2,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan			4 Laporan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan			12 Laporan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Buae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	4 Dokumen			4 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan			1 Laporan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	1,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 Laporan			12 Laporan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan			1 Laporan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**					**-**	**125,450,000**							**125,450,000**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil]	**Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil**	**87.64**	**95.46**	**83.50**	**84.39**	**125,450,000**	-	-	-	-	-	-	**125,450,000**	-
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	95,450,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	95,450,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2100 Dokumen	2164 Dokumen		2100 Dokumen	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		60,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	6 Layanan		6 Layanan	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		35,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan														
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	4 Paket			4 Paket	450,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		450,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	28,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	28,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	3 Laporan			3 Laporan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	3 Laporan			3 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		25,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan			12 Laporan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	11 Laporan			11 Laporan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	2,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	3 Laporan			3 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan			1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**					**-**	**122,850,000**							**122,850,000**	
		[Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan]	**Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan**	**60**	**46**	**60**	**60**	**122,850,000**	-	-	-	-	-	-	**122,850,000**	-
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			-	22,000,000			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	22,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	21,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		21,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen			3 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	99,850,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	99,850,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan			1 Laporan	350,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		350,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen	4 Dokumen		3 Dokumen	69,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		69,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan			1 Laporan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		30,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	1,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan			1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**					**-**	**20,000,000**							**20,000,000**	
		[Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan]	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**90**	**0**	**0**	**90**	**20,000,000**	-	-	-	-	-	-	**20,000,000**	-
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	20,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	20,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	150 Dokumen			150 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**7,871,995,500**							**7,870,015,625**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7,871,995,500**							**7,870,015,625**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**7,871,995,500**							**7,870,015,625**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3,087,194,500**							**3,424,825,425**	
		[Meningkatnya Dukungan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3,087,194,500**	-	-	-	-	-	-	**3,424,825,425**	-
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	38,300,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen											
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	3 Dokumen		-	-	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		38,300,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3 Dokumen											
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		3 Dokumen											
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen											
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Dokumen											
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Dokumen											
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,316,157,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,364,060,925	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan		30 Orang/bulan	2,316,157,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,364,060,925	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	230,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	325,922,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		12 Paket	180,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		180,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		145,922,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,087,194,500**	-	-	-	-	-	-	**3,424,825,425**	-
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	41,330,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	-	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		41,330,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya Dukungan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3,087,194,500**	-	-	-	-	-	-	**3,424,825,425**	-
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	366,037,500			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	366,037,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	78,037,500	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		78,037,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	288,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		288,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	175,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	289,175,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit		4 Unit	105,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		105,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit		4 Unit	840,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,015,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		1 Unit	69,160,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		69,160,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,087,194,500**	-	-	-	-	-	-	**3,424,825,425**	-
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	-	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		100,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**					**-**	**359,222,000**							**337,177,000**	
		[Meningkatnya Kesadaran Penduduk Terhadap Usia Ideal Perkawinan]	**Median Usia Kawin Pertama perempuan (MUKP) pada Kelompok Umur 25-49 Tahun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**359,222,000**	-	-	-	-	-	-	**337,177,000**	-
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	61,576,100			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	40,640,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan														
			Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Kegiatan			1 Kegiatan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan			1 Kegiatan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	30,525,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		28,525,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal														
			Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	11 Satuan Pendidikan			11 Satuan Pendidikan	19,051,100	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		12,115,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0028	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Laporan			1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0029	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Kabupaten/ Kota			1 Kabupaten/ Kota	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0030	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Laporan			1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0031	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0032	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)														
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen			1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0033	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah														
			Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	1 Perangkat Daerah			1 Perangkat Daerah	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	297,645,900			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	296,536,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan			1 Laporan	62,022,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		62,022,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen			1 Dokumen	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	6,385,700	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	11 Laporan	1 Laporan		11 Laporan	65,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		65,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	11 Dokumen	1 Dokumen		11 Dokumen	132,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		132,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota														
			Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	1 Laporan			1 Laporan	5,870,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		16,782,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	11 Laporan			11 Laporan	14,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		19,362,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0022	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan														
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga														
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga	1 Dokumen			1 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0024	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 Dokumen			1 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0025	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB														
			Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dokumen			1 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	106 Unit			106 Unit	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,170,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen			1 Dokumen	965,200	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	7,103,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**					**-**	**2,211,159,000**							**2,197,233,000**	
		[Meningkatnya Pemanfaatan Alat dan Metode Kontrasepsi Modern]	**Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2,211,159,000**	-	-	-	-	-	-	**2,197,233,000**	-
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	900,725,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	889,850,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan			1 Laporan	625,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana														
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Unit			1 Unit	625,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Laporan	1 Laporan		11 Laporan	537,900,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		537,900,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	11 Laporan			11 Laporan	132,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		132,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	129,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		120,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen			1 Dokumen	625,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	11 Organisasi	1 Organisasi		11 Organisasi	99,950,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		99,950,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	267,250,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	265,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB														
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	1 Unit			1 Unit	625,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	106 Orang	106 Orang		106 Orang	265,375,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		265,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi			1 Organisasi	625,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan			1 Laporan	625,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	550,934,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	550,758,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	1 Laporan		12 Laporan	17,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		17,100,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1329 Orang	45 Orang		1329 Orang	505,534,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		511,608,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP														
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan			1 Laporan	625,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen			1 Dokumen	625,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	1 Unit		1 Unit	625,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	1 Orang			1 Orang	625,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6 Laporan	1 Laporan		6 Laporan	22,050,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		22,050,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1 Orang			1 Orang	625,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan			1 Laporan	625,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria														
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	1 Orang			1 Orang	625,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Orang			1 Orang	625,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan														
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	1 Orang			1 Orang	625,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan														
			Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1 Kegiatan			1 Kegiatan	625,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	492,250,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	491,625,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah DASHAT di Kampung KB	63 Unit	50 Unit		63 Unit	346,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		346,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	25 Kampung	50 Kampung		25 Kampung	145,125,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		145,125,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	625,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**					**-**	**2,214,420,000**							**1,910,780,200**	
		[Menurunnya Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15–19 Tahun]	**Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2,214,420,000**	-	-	-	-	-	-	**1,910,780,200**	-
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	581,720,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	238,604,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	11 Keluarga			11 Keluarga	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL														
			Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	11 Kegiatan			6 Kegiatan	2,162,500	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)														
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	11 Laporan / Dokumen			11 Laporan / Dokumen	86,220,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		86,220,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	530 Laporan			400 Laporan	318,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		31,048,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	20 Unit		10 Unit	130,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		110,336,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	30 Orang			10 Orang	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	530 Orang			400 Orang	3,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5 Laporan			5 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	11 Dokumen			11 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	11 Orang			6 Orang	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	11 Laporan			11 Laporan	30,837,500	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		11,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	373 Kelompok			373 Kelompok	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	11 Dokumen			11 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)														
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	530 Kelompok			400 Kelompok	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0029	Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)														
			Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	1 Laporan			1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	1,632,700,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,672,176,200	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	741 laporan	11 laporan		741 laporan	741,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		741,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	741 laporan	11 laporan		741 laporan	889,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		889,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga														
			Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan			1 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		30,672,300	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan			1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		11,303,900	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN						**14,931,557,000**							**17,092,108,800**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14,931,557,000**							**17,092,108,800**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**14,931,557,000**							**17,092,108,800**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**4,777,277,000**							**4,777,277,000**	
		[Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4,777,277,000**	-	-	-	-	-	-	**4,777,277,000**	-
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	16,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	16,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen	11,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		11,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	5,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,385,927,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,385,927,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	24 Orang/bulan		28 Orang/bulan	2,385,927,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,385,927,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	5,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket			15 Paket	5,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	94,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	94,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket			7 Paket	3,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	-	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		4 Paket	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	50 Laporan		55 Laporan	85,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		85,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1,559,500,000			-	-	-	-	1,559,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		-	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1,511,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1,511,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		2 Unit	7,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	12 Unit		4 Unit	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			2 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	585,350,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	585,350,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	150 Laporan		155 Laporan	1,550,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,550,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	37,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		37,800,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	546,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		546,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	130,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	130,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		1 Unit	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	15 Unit		16 Unit	85,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		85,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					**-**	**10,154,280,000**							**12,314,831,800**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat]	**Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal**	**90**	**20**	**25**	**35**	**10,154,280,000**	-	-	-	-	-	-	**12,314,831,800**	-
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	9,559,209,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	11,381,760,800	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1800 Unit	530 Unit		1312 Unit	9,300,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,700,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 Unit	5 Unit		27 Unit	259,209,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		681,760,800	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-			-	6,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	6,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit		1 Unit	6,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	100,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	1 Unit		2 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	2 Orang		2 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen	2000 Dokumen		2000 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit			9 Unit	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	290,321,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	628,321,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	19 Laporan	10 Laporan		15 Laporan	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8 Laporan	2 Laporan		4 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	168 Dokumen			168 Dokumen	153,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		491,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	59 Laporan	45 Laporan		55 Laporan	76,321,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		76,321,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	31,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	31,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin														
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1 Orang	1 Orang		1 Orang	31,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		31,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-			-	14,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	14,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang			2 Orang	13,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		13,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,154,280,000**	-	-	-	-	-	-	**12,314,831,800**	-
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5 Laporan			5 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat]	**Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal**	**90**	**20**	**25**	**35**	**10,154,280,000**	-	-	-	-	-	-	**12,314,831,800**	-
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	138,250,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	138,250,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	138,250,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		138,250,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	15,000,000			-	-	-	-	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**6,510,455,000**							**6,006,980,000**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6,510,455,000**							**6,006,980,000**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**6,287,104,000**							**5,899,380,000**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3,178,358,000**							**2,875,634,000**	
		[Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3,178,358,000**	-	-	-	-	-	-	**2,875,634,000**	-
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20,732,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	20,732,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	5,732,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,732,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	25 Data			10 Data	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,323,112,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,323,112,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	385 Orang/bulan	317 Orang/bulan		360 Orang/bulan	2,315,112,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,315,112,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	5 Laporan			5 Laporan	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,178,358,000**	-	-	-	-	-	-	**2,875,634,000**	-
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5,500,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	5,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3,178,358,000**	-	-	-	-	-	-	**2,875,634,000**	-
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23 Dokumen			23 Dokumen	2,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	260,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	160,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		4 Paket	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		4 Paket	7,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	250,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	32,000,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	25,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2 Unit		3 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	358,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	203,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	8,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	78,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		78,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	270,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		120,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	178,514,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	137,790,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	10 Unit		15 Unit	114,790,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		114,790,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	9 Unit		10 Unit	24,724,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	32,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			3 Unit	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		4,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					**-**	**1,471,368,000**							**1,471,368,000**	
		[Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,471,368,000**	-	-	-	-	-	-	**1,471,368,000**	-
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,471,368,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,471,368,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3 Laporan	3 Laporan		3 Laporan	1,100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas			2 Komunitas	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	24 Permohonan		2 Permohonan	70,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		70,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	30 Persentase			15 Persentase	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	29 Rekomen dasi			25 Rekomen dasi	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi														
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	25 Persentase			15 Persentase	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/fuknis	70 Media			50 Media	27,368,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		27,368,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik														
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Konten Informasi Publik	840 Konten	610 Konten		600 Konten	229,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		229,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	4 Orang			4 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**					**-**	**1,637,378,000**							**1,552,378,000**	
		[Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika]	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,637,378,000**	-	-	-	-	-	-	**1,552,378,000**	-
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	17,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	17,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	10 Dokumen			10 Dokumen	17,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		17,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,620,378,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,535,378,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional														
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	3 Aplikasi												
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2 Dokumen			2 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	60 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah		60 Perangkat Daerah	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan			1 Layanan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	5 Aplikasi	1 Aplikasi		5 Aplikasi	280,172,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		185,172,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2 Laporan	5 Aplikasi		2 Laporan	138,888,500	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		148,889,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet														
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	60 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah		60 Perangkat Daerah	1,148,414,500	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,148,414,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen			1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi														
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	12,903,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		12,903,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**96,349,000**							**18,349,000**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**					**-**	**96,349,000**							**18,349,000**	
		[Tercapainya, Kolaborasi, Integrasi dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)]	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**96,349,000**	-	-	-	-	-	-	**18,349,000**	-
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	96,349,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	18,349,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	30 %			30 %	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	68 %			30 %	63,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		13,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				60 %	22,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	1 Orang			1 Orang	8,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral														
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	3 Laporan			2 Laporan	1,349,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,349,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**127,002,000**							**89,251,000**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**					**-**	**127,002,000**							**89,251,000**	
		[Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah]	**Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**69**	**55.97**	**64**	**65**	**127,002,000**	-	-	-	-	-	-	**89,251,000**	-
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	32,502,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	27,251,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	4 Laporan		1 Laporan	8,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		8,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	2 Laporan		1 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	42 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah		29 Perangkat Daerah	10,502,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,251,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	94,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	62,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	12 Kegiatan	29 Kegiatan		12 Kegiatan	94,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		62,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**3,370,585,000**							**3,205,957,975**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3,370,585,000**							**3,205,957,975**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**3,370,585,000**							**3,205,957,975**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2,825,753,000**							**2,852,023,975**	
		[Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2,825,753,000**	-	-	-	-	-	-	**2,852,023,975**	-
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	28,880,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	26,701,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		5 Dokumen	7,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen		2 Dokumen	8,297,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen		2 Dokumen	7,670,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	5,413,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,009,012,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,046,892,975	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	18 Orang/bulan		20 Orang/bulan	2,003,002,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,040,912,975	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	6,010,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,980,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	154,672,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	163,698,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		4 Paket	4,366,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		4,506,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	8,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		8,700,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	10 Laporan		11 Laporan	141,506,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		150,492,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	248,140,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	223,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	21,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		22,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit			3 Unit	72,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		80,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit			7 Unit	154,840,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		121,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	236,391,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	248,310,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140 Laporan	91 Laporan		132 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	64,075,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		69,075,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	170,816,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		177,735,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	148,658,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	143,422,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	9 Unit		11 Unit	64,268,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		64,268,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit			10 Unit	13,530,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		14,066,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		1 Unit	70,860,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		65,088,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**					**-**	**190,954,000**							**35,954,000**	
		[Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi]	**Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti**	**100**	**100**	**100**	**100**	**190,954,000**	-	-	-	-	-	-	**35,954,000**	-
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	18,885,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen			1 Dokumen	18,885,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-	172,069,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	172,069,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**					**-**	**57,354,000**								
		[Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal]	**Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**57,354,000**	-	-	-	-	-	-	**21,456,000**	-
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	57,354,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	21,456,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	57,354,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		21,456,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**					**-**	**232,849,000**							**231,849,000**	
		[Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko]	**Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP**	**100**	**100**	**100**	**100**	**232,849,000**	-	-	-	-	-	-	**231,849,000**	-
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	232,849,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	231,849,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	17,195,500	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,432,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4800 Pelaku Usaha	4755 Pelaku Usaha		4765 Pelaku Usaha	187,552,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		186,315,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15 Pelaku Usaha	32 Pelaku Usaha		15 Pelaku Usaha	8,532,500	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		9,532,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	160 Kegiatan Usaha	481 Kegiatan Usaha		160 Kegiatan Usaha	19,569,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,569,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					**-**	**40,895,000**								
		[Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal]	**Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal**	**100**	**100**	**100**	**100**	**40,895,000**	-	-	-	-	-	-		-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40,895,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	52 Kegiatan Usaha.			52 Kegiatan Usaha.	10,408,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	170 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	14,726,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha	92 Kegiatan Usaha		30 Kegiatan Usaha	15,761,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,615,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**					**-**	**22,780,000**							**22,780,000**	
		[Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal]	**Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses**	**100**	**100**	**100**	**100**	**22,780,000**	-	-	-	-	-	-	**22,780,000**	-
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	22,780,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	22,780,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	22,780,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		22,780,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN						**18,468,817,000**							**18,509,337,326**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16,581,300,000**							**16,621,820,326**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**16,581,300,000**							**16,621,820,326**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2,981,300,000**							**2,801,466,526**	
		[Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2,981,300,000**	-	-	-	-	-	-	**2,801,466,526**	-
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10,104,400			-	-	-	-	10,104,400	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	10,104,400	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10,104,400	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,495,365,350			-	-	-	-	2,370,531,876	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan			280 Orang/bulan	2,475,735,350	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2,350,901,876	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen			4 Dokumen	19,630,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19,630,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	264,125,000			-	-	-	-	214,125,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	20,871,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20,871,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	18,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan			4 Laporan	25,254,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25,254,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			4 Laporan	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	36,590,250			-	-	-	-	36,590,250	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	590,250	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		590,250	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	48,000,000			-	-	-	-	48,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			4 Laporan	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	18,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	120 Laporan			120 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	127,115,000			-	-	-	-	122,115,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit			3 Unit	62,565,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62,565,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit			3 Unit	14,550,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9,550,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**					**-**	**6,500,000,000**							**6,500,000,000**	
		[Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan]	**Rasio Wirausaha Pemuda**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6,500,000,000**	-	-	-	-	-	-	**6,500,000,000**	-
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	5,500,000,000			-	-	-	-	5,500,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	110 Orang			110 Orang	5,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,000,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	4 Orang			4 Orang	500,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,000,000,000			-	-	-	-	1,000,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	5 Organisasi			5 Organisasi	1,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1,000,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**					**-**	**7,000,000,000**							**7,045,353,800**	
		[Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga]	**Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7,000,000,000**	-	-	-	-	-	-	**7,045,353,800**	-
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4,850,000,000			-	-	-	-	4,895,353,800	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	5 Unit			5 Unit	4,850,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4,895,353,800	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	650,000,000			-	-	-	-	650,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan			3 Kegiatan	150,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	100 Orang			100 Orang	500,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	50,000,000			-	-	-	-	50,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	1 Orang			1 Orang	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	1,000,000,000			-	-	-	-	1,000,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen			3 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1,000,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	450,000,000			-	-	-	-	450,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan														
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan			1 Laporan	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2 Dokumen			2 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Lembaga			2 Lembaga	250,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**					**-**	**100,000,000**							**275,000,000**	
		[Meningkatnya Kualitas Kepramukaan]	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,000,000**	-	-	-	-	-	-	**275,000,000**	-
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	100,000,000			-	-	-	-	275,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit			1 Unit	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan														
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	2 Organisasi			2 Organisasi	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1,887,517,000**							**1,887,517,000**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**1,887,517,000**							**1,887,517,000**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**					**-**	**1,000,000,000**							**1,000,000,000**	
		[Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata]	**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,000,000,000**	-	-	-	-	-	-	**1,000,000,000**	-
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	1,000,000,000			-	-	-	-	1,000,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi			2 Lokasi	500,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit			1 Unit	500,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**					**-**	**587,517,000**							**587,517,000**	
		[Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata]	**Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata**	**100**	**100**	**100**	**100**	**587,517,000**	-	-	-	-	-	-	**587,517,000**	-
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	587,517,000			-	-	-	-	587,517,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan			2 Kegiatan	500,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi			3 Promosi	87,517,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		87,517,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**					**-**	**300,000,000**							**300,000,000**	
		[Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat]	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300,000,000**	-	-	-	-	-	-	**300,000,000**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	300,000,000			-	-	-	-	300,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200 Orang			200 Orang	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	20 Orang			20 Orang	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**4,951,584,000**							**8,058,000,000**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4,951,584,000**							**8,058,000,000**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**4,651,584,000**							**7,553,000,000**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3,051,584,000**							**3,113,000,000**	
		[Meningkatnya Layanan Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3,051,584,000**	-	-	-	-	-	-	**3,113,000,000**	-
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	8,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	23,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		4,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		4,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,340,664,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,164,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	2,337,664,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,156,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		4,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	2,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	9,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	12,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	120,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	219,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket		6 Paket	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5 Paket		6 Paket	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket		5 Paket	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	72,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		120,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	8,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		60,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	30,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	-	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	3 Unit		2 Unit	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	336,000,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	354,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		4,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	195,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	138,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	205,920,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	235,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit		9 Unit	70,920,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		70,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit		9 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		40,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit		10 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit		10 Unit	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit		2 Unit	75,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		85,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**					**-**	**1,500,000,000**							**4,340,000,000**	
		[Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan]	**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**	**74.48**	**68.48**	**69.48**	**70.48**	**1,500,000,000**	-	-	-	-	-	-	**4,340,000,000**	-
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,070,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,960,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustak aan	10 Perpustak aan		25 Perpustak aan	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	22 Perpustak aan	10 Perpustak aan		22 Perpustak aan	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	1 Layanan	1 Layanan		1 Layanan	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	19 Perpustak aan	10 Perpustak aan		19 Perpustak aan	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat														
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				500 Eksemplar	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi														
			Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		60,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102 Orang			102 Orang	40,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1000 Eksemplar	700,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		600,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1000 Eksemplar			1000 Eksemplar	150,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustaka an	1 Perpustaka an		1 Perpustaka an	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	430,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,380,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	11 Orang			11 Orang	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	20 Perpustak aan	4 Perpustak aan		20 Perpustak aan	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		80,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustaka an			1 Perpustaka an	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		300,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	11 Orang			11 Orang	140,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		650,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	11 Lokus	11 Lokus		11 Lokus	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**					**-**	**100,000,000**							**100,000,000**	
		[Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno]	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,000,000**	-	-	-	-	-	-	**100,000,000**	-
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	8 Orang	4 Orang		6 Orang	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
		Batas disini	*Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan*	35 Eksemplar	26 Eksemplar		26 Eksemplar	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	20 Eksemplar			0 Eksemplar	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	20 Eksemplar			0 Eksemplar	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**300,000,000**							**505,000,000**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**					**-**	**225,000,000**							**340,000,000**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis]	**Tingkat Ketersediaan Arsip**	**80**	**72.32**	**80**	**80**	**225,000,000**	-	-	-	-	-	-	**340,000,000**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150,000,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	210,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	10 Berkas			10 Berkas	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	100 Berkas			100 Berkas	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan			1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**225,000,000**	-	-	-	-	-	-	**340,000,000**	-
	2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis														
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis				2 Unit	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		120,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		[Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis]	**Tingkat Ketersediaan Arsip**	**80**	**72.32**	**80**	**80**	**225,000,000**	-	-	-	-	-	-	**340,000,000**	-
	2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	1 Lembaga			1 Lembaga	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0006	Penyusunan Database Arsiparis														
			Jumlah arsiparis	1 Dokumen			1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	4 Laporan			4 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20,000,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI														
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	10 Arsip			10 Arsip	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip														
			Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	1 Naskah			1 Naskah	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	250 Arsip			50 Arsip	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0005	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan														
			Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	1 Dokumen			1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	55,000,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	90,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 Pengguna			10 Pengguna	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		80,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**					**-**	**50,000,000**							**125,000,000**	
		[Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK]	**Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**50**	**40.80**	**50**	**50**	**50,000,000**	-	-	-	-	-	-	**125,000,000**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-			-	20,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun														
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	10 Berkas			10 Berkas	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10 Arsip			10 Arsip	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-	-			-	5,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana														
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	10 Arsip			10 Arsip	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	-			-	5,000,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Daftar			1 Daftar	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-			-	10,000,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	10 Arsip			10 Arsip	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 Arsip			10 Arsip	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	-	-			-	10,000,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang														
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	10 Arsip			10 Arsip	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	10 Arsip			10 Arsip	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**					**-**	**25,000,000**								
		[Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup]	**Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup**	**70**	**0**	**0**	**30**	**25,000,000**	-	-	-	-	-	-		-
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-	-			-	25,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	40,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP			0 SOP	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	10 Arsip			10 Arsip	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		40,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN						**11,742,071,970**							**-**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**11,742,071,970**							**-**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**940,000,000**							**-**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**					**-**	**320,000,000**							**-**	
		[Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap]	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**2,628.46**	**2,334.00**	**2,380.68**	**2,428.29**	**320,000,000**	-	-	-	-	-	-	**-**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	280,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	15 Unit			15 Unit	280,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40,000,000			-	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang	90 Orang		10 Orang	40,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**					**-**	**600,000,000**							**-**	
		[Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya]	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**1,397.32**	**1,240.78**	**1,265.59**	**1,290.91**	**600,000,000**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	600,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit			2 Unit	300,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit			12 Unit	300,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**-**	**20,000,000**							**-**	
		[Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati]	**Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan**	**83**	**71**	**73**	**75**	**20,000,000**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-			-	20,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	415 Pelaku Usaha			415 Pelaku Usaha	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**10,802,071,970**							**-**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**9,447,744,000**							**-**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,447,744,000**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	16,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen		6 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan		5 Laporan	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9,029,979,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1555 Orang/bulan	1264 Orang/bulan		1582 Orang/bulan	9,024,979,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	69,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	37 Paket		50 Paket	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	200 Laporan		150 Laporan	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	47,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit			3 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit			5 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			3 Unit	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	213,265,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	35 Laporan		12 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	53,265,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	155,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72,500,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	6 Unit		3 Unit	52,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit			10 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		1 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	2 Unit		7 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					**-**	**920,000,000**							**-**	
		[Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian]	**Jumlah Produksi Daging** **Jumlah Produksi Telur**	**2894879** **56560490**	**2541476** **45031501**	**3229313** **48935418**	**3347561** **50673257**	**920,000,000**	-	-	-	-	-	-	**-**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	40,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen			12 Dokumen	40,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	15,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			-	865,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1 Unit												
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	2000 Ekor			2000 Ekor	480,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	4500 Dosis			4500 Dosis	385,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					**-**	**10,000,000**							**-**	
		[Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian]	**Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian**	**100**	**95.24**	**0**	**100**	**10,000,000**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	10,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan														
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**					**-**	**352,327,970**							**-**	
		[Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner]	**Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular**	**21**	**21**	**21**	**21**	**352,327,970**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	242,327,970			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis														
			Jumlah kader zoonosis	22 Orang			22 Orang	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	11 Wilayah			11 Wilayah	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	200,327,970	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan			12 laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2000 Laporan			2000 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	90,000,000			-	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan			12 Laporan	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	24 Dokumen			24 Dokumen	8,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan														
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	40 Orang			40 Orang	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan														
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	5 Unit Usaha			5 Unit Usaha	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**					**-**	**37,000,000**							**-**	
		Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian														
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**					**-**	**37,000,000**							**-**	
		[Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian]	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**37,000,000**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	17,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan			1 Laporan	17,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-			-	20,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan														
			Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	150 Dokumen	150 Dokumen		150 Dokumen	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					**-**	**35,000,000**							**-**	
		[Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian]	**Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak**	**1:21**	**1:18**	**1:20**	**1:19**	**35,000,000**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	35,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Unit	11 Unit		11 Unit	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1341 Unit			1341 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		-	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						**5,280,906,500**							**4,337,422,050**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5,280,906,500**							**4,337,422,050**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**4,655,906,500**							**4,077,422,050**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**4,055,906,500**							**3,694,451,050**	
		[Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4,055,906,500**	-	-	-	-	-	-	**3,694,451,050**	-
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,980,613,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	3,032,394,050	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	348 Orang/bulan	348 Orang/bulan		348 Orang/bulan	2,978,613,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,031,394,050	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	283,678,500			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	237,857,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket			20 Paket	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket			20 Paket	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan		50 Laporan	233,678,500	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		217,357,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	124,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	88,672,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	54,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		32,643,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit			20 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		46,029,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	542,615,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	241,500,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	900,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	94,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		60,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	447,715,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		181,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	110,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	85,028,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		1 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit		18 Unit	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		45,028,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit			10 Unit	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			5 Unit	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**					**-**	**300,000,000**							**150,000,000**	
		[Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi]	**Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya**	**18.75**	**0**	**62.5**	**18.75**	**300,000,000**	-	-	-	-	-	-	**150,000,000**	-
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	300,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	150,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	1 Unit		3 Unit	300,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		150,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**					**-**	**200,000,000**							**200,000,000**	
		[Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting]	**Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200,000,000**	-	-	-	-	-	-	**200,000,000**	-
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	40,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan			1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan			12 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	90,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan			1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan			1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	11 Laporan			11 Laporan	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	70,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan														
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Dokumen			1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan			1 Laporan	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan			1 Laporan	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**					**-**	**100,000,000**								
		[Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk]	**Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)**	**100**	**154.72**	**85**	**88**	**100,000,000**	-	-	-	-	-	-		-
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	100,000,000			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-	-		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1952 Unit	2129 Unit		1742 Unit	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan Infrastruktu r Dasar dan Ekonomi	-		17,971,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	25 Orang	50 Orang		25 Orang	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		15,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**625,000,000**							**260,000,000**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**					**-**	**550,000,000**							**240,000,000**	
		[Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri.]	**Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan**	**5**	**5**	**5**	**5**	**550,000,000**	-	-	-	-	-	-	**240,000,000**	-
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	550,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	240,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	150,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggnae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		20,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen			1 Dokumen	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Lainungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		20,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		200,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**					**-**	**75,000,000**							**20,000,000**	
		[Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri]	**Pertumbuhan IKM**	**1**	**0**	**1**	**1**	**75,000,000**	-	-	-	-	-	-	**20,000,000**	-
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	75,000,000			-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-	-	20,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen			1 Dokumen	75,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengemba ngan Perek onomian Daerah	-		20,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						**197,950,000**							**197,979,500**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**197,950,000**							**197,979,500**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**197,950,000**							**197,979,500**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**-**	**197,950,000**							**197,979,500**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**197,950,000**	-	-	-	-	-	-	**197,979,500**	-
	4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	-	-			-	197,950,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	197,979,500	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	52,950,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		52,979,500	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	83,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		83,000,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	62,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		62,000,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						**11,161,452,800**							**11,735,692,800**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**11,161,452,800**							**11,735,692,800**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**11,161,452,800**							**11,735,692,800**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**-**	**11,161,452,800**							**11,735,692,800**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	11,161,452,800			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	11,735,692,800	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	45 Dokumen	82 Dokumen		45 Dokumen	11,094,092,800	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		11,666,332,800	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11 Dokumen	11 Dokumen		11 Dokumen	29,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		30,600,000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	33 Dokumen	33 Dokumen		33 Dokumen	37,760,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		38,760,000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN						**12,034,087,000**							**11,035,784,000**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**12,034,087,000**							**11,035,784,000**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**12,034,087,000**							**11,035,784,000**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100		**100**	**12,034,087,000**							**11,035,784,000**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	21,620,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	21,620,000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	5,570,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,570,000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	2,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,600,000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	2,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	2,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	2,550,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	4,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	1,900,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,900,000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11,114,967,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	10,115,614,000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1498 Orang/bulan	1498 Orang/bulan		1498 Orang/bulan	11,054,087,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,054,734,000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen	311 Dokumen		360 Dokumen	16,780,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		16,780,000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen		14 Dokumen	40,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		40,000,000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,800,000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	2,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,300,000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	2,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	3,550,000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,000,000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,550,000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	895,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	895,000,000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan		28 Orang/Bulan	180,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		180,000,000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	48 Paket	34 Paket		48 Paket	85,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		85,000,000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	6 Orang		6 Orang	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		30,000,000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan		24 Orang/Bulan	600,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		600,000,000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						**296,950,000**							**296,969,500**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**296,950,000**							**296,969,500**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**296,950,000**							**296,969,500**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**-**	**296,950,000**							**296,969,500**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	170,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	170,000,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	125,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		125,000,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		30,000,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	126,950,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	126,969,500	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	16 Dokumen	16 Dokumen		16 Dokumen	111,950,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		111,969,500	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen			1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN						**288,400,000**							**288,652,000**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**288,400,000**							**288,652,000**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**288,400,000**							**288,652,000**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**-**	**288,400,000**							**288,652,000**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	288,400,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	288,652,000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		60,000,000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	85,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		85,000,000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	118,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		118,652,000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Perangkat Daerah			1 Perangkat Daerah	10,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0005	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Perangkat Daerah			1 Perangkat Daerah	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		BAGIAN KERJASAMA						**196,950,000**							**196,969,500**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**196,950,000**							**196,969,500**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**196,950,000**							**196,969,500**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**-**	**196,950,000**							**196,969,500**	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	196,950,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	196,969,500	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	18 Dokumen		20 Dokumen	76,950,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		76,969,500	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	15 Dokumen	14 Dokumen		15 Dokumen	65,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		65,000,000	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	35 Laporan	32 Laporan		35 Laporan	55,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		55,000,000	BAGIAN KERJASAMA
		BAGIAN ORGANISASI						**220,000,000**							**220,000,000**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**220,000,000**							**220,000,000**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**220,000,000**							**220,000,000**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**220,000,000**							**220,000,000**	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	220,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	220,000,000	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen			4 Dokumen	85,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		85,000,000	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan			1 Laporan	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		30,000,000	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen			1 Dokumen	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		30,000,000	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	40,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		40,000,000	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		35,000,000	BAGIAN ORGANISASI
	Batas disni	**BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA**						**309,000,000**							**310,195,000**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**309,000,000**							**310,195,000**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**309,000,000**							**310,195,000**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**-**	**309,000,000**							**310,195,000**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	309,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	310,195,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		60,000,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	204,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		205,195,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	300 Orang		300 Orang	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		45,000,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL						**10,938,585,000**							**10,630,825,000**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10,938,585,000**							**10,630,825,000**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**10,938,585,000**							**10,630,825,000**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**10,938,585,000**							**10,630,825,000**	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	25,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	25,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket			50 Paket	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen			12 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3,600,857,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	3,923,197,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		12 Paket	127,971,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		127,971,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		12 Paket	510,392,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		510,392,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		12 Paket	1,080,154,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,080,154,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		12 Paket	352,340,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		352,340,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	25 Laporan		25 Laporan	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		352,340,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270 Laporan	270 Laporan		270 Laporan	1,485,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,485,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	165,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	165,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			-				-	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		50,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		50,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit			5 Unit	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10 Unit		10 Unit	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		25,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	20 Unit	1 Unit		20 Unit	125,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		125,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3,863,365,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	3,863,365,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	13,995,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		13,995,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	1,130,070,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,130,070,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	270,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		270,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	2,449,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,449,300,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1,079,263,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,079,263,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	37 Unit		37 Unit	450,391,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		450,391,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit		18 Unit	302,272,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		302,272,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	52 Unit		55 Unit	126,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		126,600,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit		7 Unit	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		200,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	1,440,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,440,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		12 Paket	840,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		840,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		12 Paket	480,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		480,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		12 Paket	120,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		120,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	765,100,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	135,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	6 Laporan			6 Laporan	15,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	72 Laporan	85 Laporan		85 Laporan	750,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		120,000,000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
		BAGIAN HUKUM						**232,300,000**							**232,323,000**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**232,300,000**							**232,323,000**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**232,300,000**							**232,323,000**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**-**	**232,300,000**							**232,323,000**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	232,300,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	232,323,000	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	730 Dokumen	540 Dokumen		730 Dokumen	97,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		97,323,000	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	18 Kasus	3 Kasus		18 Kasus	85,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		85,000,000	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	730 Dokumen	540 Dokumen		730 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		50,000,000	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						**31,500,140,000**							**35,316,933,500**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**31,500,140,000**							**35,316,933,500**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**31,500,140,000**							**35,316,933,500**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**23,864,374,000**							**24,626,630,000**	
		[Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**23,864,374,000**	-	-	-	-	-	-	**24,626,630,000**	-
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	21,621,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	22,163,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	2,827,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	2,734,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-			SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	2,268,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	2,192,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,734,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,418,963,240			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,508,391,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	300 Orang/bulan		360 Orang/bulan	2,406,425,240	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,495,853,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	6,462,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6,462,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	2,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,500,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	3,576,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,576,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	80,000,000			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	80,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	25 Orang		20 Orang	80,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		80,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	529,766,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	519,766,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		12 Paket	61,434,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		12 Paket	72,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket		5 Paket	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		12 Paket	51,332,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		51,332,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	230,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		250,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan			36 Laporan	90,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		90,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	90,000,000			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	390,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		1 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2 Unit		2 Unit	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		350,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1,343,210,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,344,130,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	36,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		36,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan		36 Laporan	481,320,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		481,320,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	75,890,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		75,890,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	750,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		750,920,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	709,676,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	709,676,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	26 Unit		26 Unit	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		35,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit		26 Unit	274,676,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		274,676,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit			1 Unit	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		25,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit			50 Unit	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		25,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,864,374,000**	-	-	-	-	-	-	**24,626,630,000**	-
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	350,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		350,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		[Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**23,864,374,000**	-	-	-	-	-	-	**24,626,630,000**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	17,654,887,760			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	18,036,254,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	420 Orang/Bulan	420 Orang/Bulan		420 Orang/Bulan	17,017,887,760	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		17,399,254,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	10 Paket		4 Paket	427,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		427,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	35 Orang		35 Orang	210,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		210,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	1,016,250,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,016,250,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	86,250,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		86,250,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 Paket	36 Paket		36 Paket	930,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		930,000,000	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**					**-**	**7,635,766,000**							**10,690,303,500**	
		[Terlaksananya Program Kerja DPRD Tepat Waktu]	**Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Tepat Waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7,635,766,000**	-	-	-	-	-	-	**10,690,303,500**	-
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	374,875,500			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	374,875,500	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		100,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen		10 Dokumen	74,875,500	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		74,875,500	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		200,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	149,451,500			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	149,451,500	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	19,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		19,500,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	19,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		19,500,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	32,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		32,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	37,927,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		37,927,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	35,524,500	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		35,524,500	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	160,314,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	141,334,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		60,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	8,700,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		8,700,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	17,262,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		17,262,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	7,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7,500,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	13,936,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		13,936,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	32,916,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		13,936,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	999,563,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,002,980,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen	700,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		800,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang		7 Orang	168,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		168,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	17,490,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		17,490,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	114,073,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		17,490,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	130,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	3,300,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		100,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,200,000,000	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	5,821,562,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	5,721,662,500	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	5,821,562,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,721,662,500	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH						**8,672,839,000**							**-**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**8,672,839,000**							**-**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**2,380,306,434**							**-**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**12,000,000**							**-**	
		[Meningkatnya Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**12,000,000**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	12,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit			4 Unit	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**					**-**	**1,122,927,074**							**-**	
		[Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah]	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,122,927,074**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	992,927,074			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	150,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen		8 Dokumen	95,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara		2 Berita Acara	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara		2 Berita Acara	55,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara		2 Berita Acara	125,890,474	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1841 Usulan	1841 Usulan		1841 Usulan	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	100 Dokumen	8 Dokumen		100 Dokumen	417,036,600	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	65,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen			1 Dokumen	65,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	65,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan			1 Laporan	65,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					**-**	**1,245,379,360**							**-**	
		[Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPJMD-Renstra, RKPD-Renja) Perangkat Daerah]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** **Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Bidang Perekonomian dan SDA** **Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,245,379,360**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	480,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48 Dokumen			48 Dokumen	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	48 Laporan			48 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	48 Laporan			48 Laporan	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	48 Laporan	48 Laporan		48 Laporan	100,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen	16 Dokumen		16 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan			4 Laporan	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	392,554,400			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen	16 Dokumen		16 Dokumen	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12 Laporan			12 Laporan	25,716,800	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	12 Laporan			12 Laporan	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12 Laporan			12 Laporan	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	6,837,600	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	12 Laporan			12 Laporan	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	372,824,960			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	20 Dokumen			20 Dokumen	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20 Laporan			20 Laporan	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20 Laporan	20 Laporan		20 Laporan	75,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	20 Laporan			20 Laporan	44,391,960	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	44 Dokumen			44 Dokumen	55,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	44 Laporan			44 Laporan	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	44 Laporan	44 Laporan		44 Laporan	48,997,200	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	44 Laporan	44 Laporan		44 Laporan	49,435,800	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**5,615,533,846**							**-**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**5,615,533,846**							**-**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,615,533,846**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20,612,566			-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	13,610,420	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	3,585,121	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3,417,025	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4,468,671,280			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46/14 Orang/bulan	4,405,539,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	43,132,280	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	9,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	9,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	310,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180 Laporan	300,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	214,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	14,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	430,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				110 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	70,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	350,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	162,250,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	70,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	77,250,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**676,998,720**							**-**	
1.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**					**-**	**676,998,720**							**-**	
		[Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah]	**Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pemanfaatan Pembangunan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**676,998,720**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	-			-	196,998,720			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan														
			Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				1 Laporan	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset														
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset				1 Naskah	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				1 Laporan	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan														
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				1 Laporan	21,998,720	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan														
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				1 Pelatihan	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah														
			Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		[Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan]	**Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**676,998,720**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	-	-			-	480,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan			1 Laporan	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan			1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan			1 Laporan	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan			1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**676,998,720**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	5.05.03.2.02.0005	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		[Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan]	**Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**676,998,720**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan			1 Laporan	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	1 Laporan			1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**676,998,720**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	5.05.03.2.02.0008	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		[Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan]	**Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**676,998,720**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	5.05.03.2.02.0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah														
			Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	1 Kegiatan			1 Kegiatan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**676,998,720**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	5.05.03.2.02.0010	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		[Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan]	**Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**676,998,720**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan			1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah														
			Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Sistem Informasi			1 Sistem Informasi	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**676,998,720**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	5.05.03.2.02.0017	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0018	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi														
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi				1 Pelatihan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi														
			Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi				1 Naskah	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0020	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0021	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi														
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0022	Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		[Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan]	**Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**676,998,720**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	5.05.03.2.02.0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	1 Laporan			1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**676,998,720**	-	-	-	-	-	-	**-**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.03.2.02.0024	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		[Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan]	**Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**676,998,720**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	5.05.03.2.02.0026	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	1 Laporan			1 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**170,532,597,713**							**170,733,957,981**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**170,532,597,713**							**170,733,957,981**	
	5.02	**KEUANGAN**						**170,532,597,713**							**170,733,957,981**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**23,990,185,713**							**24,191,545,981**	
		[Tercapainya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,990,185,713**	-	-	-	-	-	-	**24,191,545,981**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	95,660,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	95,660,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen	16,160,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		16,160,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	15,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	11,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	15,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	11,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	20 Laporan		20 Laporan	15,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,500,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	11,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		11,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	17,967,242,713			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	18,168,602,981	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	173 Orang/bulan	173 Orang/bulan		173 Orang/bulan	17,901,742,713	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		18,103,102,981	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	10,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	10,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan		17 Laporan	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	10,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang		1 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang		1 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	677,582,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	677,582,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		12 Paket	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		12 Paket	395,355,500	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		395,355,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		12 Paket	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen	12,371,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		12,371,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket	25 Paket		25 Paket	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan		200 Laporan	236,855,500	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		236,855,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	4,115,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	4,115,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit		2 Unit	4,100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		4,100,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		1 Unit	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	546,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	546,500,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	1000 Laporan		1000 Laporan	7,557,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7,557,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	253,443,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		253,443,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	130 Laporan	130 Laporan		130 Laporan	50,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		50,500,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	235,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		235,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	578,201,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	578,201,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	46 Unit	46 Unit		46 Unit	313,201,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		313,201,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit		15 Unit	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		25,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit		30 Unit	124,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		124,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		1 Unit	116,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		116,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**					**-**	**146,082,252,000**							**146,082,252,000**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Anggaran]	**Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik** **Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD**	**100**	**94**	**100**	**100**	**146,082,252,000**	-	-	-	-	-	-	**146,082,252,000**	-
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	600,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	600,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	100,637,400	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		100,637,400	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	69,672,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	36,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	32,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	27,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		27,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	102,360,600	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		102,360,600	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	78,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		78,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	21,989,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	18,536,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	21,317,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	21,988,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang		2 Orang	25,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		25,500,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	195,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	195,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		50,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		25,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36 Laporan	36 Laporan		36 Laporan	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	6 Dokumen	6 Dokumen		6 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang		2 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	214,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	214,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	480 Dokumen	480 Dokumen		480 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	18 Laporan		18 Laporan	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen		25 Dokumen	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang		2 Orang	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		12,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	2 Lembaga	2 Lembaga		2 Lembaga	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	145,058,252,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	145,058,252,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	2,850,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,850,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	68 Laporan	68 Laporan		68 Laporan	128,278,118,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		128,278,118,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	5,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				12 Laporan	8,930,134,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		8,930,134,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-			-	15,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	15,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang		12 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**					**-**	**460,160,000**							**460,160,000**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah]	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**	**100**	**90**	**100**	**100**	**460,160,000**	-	-	-	-	-	-	**460,160,000**	-
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	460,160,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	460,160,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		25,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		25,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	37,588,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		37,588,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	5 Laporan		5 Laporan	250,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		250,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	30 Laporan	30 Laporan		30 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	75,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		75,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	7,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7,500,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	7,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7,500,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	7,572,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7,572,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**16,065,314,500**							**17,652,570,000**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**16,065,314,500**							**17,652,570,000**	
	5.02	**KEUANGAN**						**16,065,314,500**							**17,652,570,000**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**11,843,314,500**							**13,116,120,000**	
		[Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**11,843,314,500**	-	-	-	-	-	-	**13,116,120,000**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12,488,500			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	14,520,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen		4 Dokumen	4,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2 Laporan		3 Laporan	2,581,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,900,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			4 Laporan	5,407,500	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6,120,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10,595,938,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	11,596,300,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1068 Orang/bulan	840 Orang/bulan		840 Orang/bulan	10,581,547,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		11,580,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	12 Dokumen		24 Dokumen	9,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	2,581,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,100,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan			4 Laporan	2,310,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,700,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	214,568,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	245,900,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	41 Paket		2 Paket	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	45 Paket		2 Paket	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8450 Paket		1 Paket	61,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		63,700,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan			5 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		11,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	20 Laporan		40 Laporan	141,568,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		161,200,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	38,750,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	52,100,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	2 Unit		10 Unit	10,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		11,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1 Unit		4 Unit	28,250,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		30,100,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			0 Unit	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		0 Unit	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	828,800,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,036,200,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	1,050,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,200,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	175,750,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		185,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	652,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		850,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	152,770,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	171,100,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	10 Unit		18 Unit	91,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		100,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit			10 Unit	2,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,100,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	1 Unit		30 Unit	28,670,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		30,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		1 Unit	30,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		35,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**-**	**4,222,000,000**							**4,536,450,000**	
		[Meningkatnya Upaya Eksensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan]	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan** **Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah** **Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital**	**100** **20.24**	**0** **100**	**100** **16.88**	**100** **17.94**	**4,222,000,000**	-	-	-	-	-	-	**4,536,450,000**	-
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	4,222,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	4,536,450,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen		1 Dokumen	32,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		35,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	17 Dokumen		3 Dokumen	56,285,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		60,250,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	1 Laporan		2 Laporan	48,340,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		52,250,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	1 Unit		2 Unit	96,892,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		100,250,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	5,075,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6,300,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	291,013,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		345,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	5000 Obyek Pajak	500 Obyek Pajak		5000 Obyek Pajak	2,967,680,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,150,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	10000 Dokumen	10000 Dokumen		10000 Dokumen	5,953,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7,200,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan			12 Layanan	2,310,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,700,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	887 Dokumen			605 Dokumen	2,310,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	30000 Dokumen	300 Dokumen		30000 Dokumen	563,211,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		600,150,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10 Dokumen			10 Dokumen	7,310,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	47,316,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	44,954,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	11 Laporan		12 Laporan	51,351,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		62,350,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**6,389,617,000**							**6,465,046,150**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**6,389,617,000**							**6,465,046,150**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**6,223,617,000**							**5,708,596,150**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**4,209,134,650**							**4,277,202,125**	
		[Mengukur Jangkauan dan Cakupan Dukungan Program Urusan Pemerintahan]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**68.50**	**66.25**	**67.00**	**67.25**	**4,209,134,650**	-	-	-	-	-	-	**4,277,202,125**	-
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	25,800,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	27,325,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	5,100,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,375,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	5,100,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	6,500,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	4,400,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			12 Laporan	4,700,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3,517,217,000			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	3,587,621,150	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan			40 Orang/bulan	3,508,617,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,578,946,150	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	3,300,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	13 Laporan			13 Laporan	5,300,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		5,375,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	218,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	232,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan			30 Laporan	218,000,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		232,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	73,429,650			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-	-	74,680,975	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	23,429,650	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-		23,930,975	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			5 Unit	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		50,750,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	220,928,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	221,315,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	6,000,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	80,000,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		80,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	134,928,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		135,315,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				153,760,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	133,760,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit			15 Unit	92,000,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		92,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit			23 Unit	31,760,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		11,760,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	30,000,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		30,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**					**-**	**2,014,482,350**							**1,431,394,025**	
		[Peningkatan Mutu dan Performa ASN Secara Menyeluruh di Semua OPD]	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD** **Rata-Rata SKP ASN Bernilai BAIK**	**80** **95**	**62,7** **88,4**	**65** **90**	**70** **91**	**2,014,482,350**	-	-	-	-	-	-	**1,431,394,025**	-
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	502,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	441,033,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen			1 Dokumen	7,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7,325,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen			1 Dokumen	23,500,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		24,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen			7 Dokumen	400,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		336,250,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan			1 Laporan	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6,112,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen			1 Dokumen	1,600,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,764,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	200 Dokumen			200 Dokumen	26,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		26,875,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen			1 Dokumen	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga			1 Lembaga	3,600,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,969,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen			1 Dokumen	3,000,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,150,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen			1 Dokumen	23,500,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		23,587,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen			1 Dokumen	4,600,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan			1 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		1,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	101,740,350			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	157,046,025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 Dokumen			500 Dokumen	37,901,250	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		90,750,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen			500 Dokumen	44,628,600	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		46,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200 Dokumen			200 Dokumen	19,210,500	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		19,796,025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	1,225,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	643,075,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	196 Orang			340 Orang	850,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		250,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen			2 Dokumen	250,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		255,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	135 Orang			135 Orang	4,000,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,014,482,350**	-	-	-	-	-	-	**1,431,394,025**	-
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				3 Dokumen	25,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		25,625,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				5 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,125,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				3 Laporan	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,125,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				3 Orang	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		5,125,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		25,625,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				5 Orang	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,050,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0011	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional														
			Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional				3 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2,050,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,050,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Peningkatan Mutu dan Performa ASN Secara Menyeluruh di Semua OPD]	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD Rata-Rata SKP ASN Bernilai BAIK**	**80 95**	**62,7 88,4**	**65 90**	**70 91**	**2,014,482,350**	-	-	-	-	-	-	**1,431,394,025**	-
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	8 Orang			8 Orang	50,000,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		60,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	185,242,000			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	190,240,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen			1 Dokumen	23,200,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		24,028,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen			12 Dokumen	38,400,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		40,357,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Laporan			12 Laporan	4,600,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		4,725,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang			100 Orang	4,900,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		4,900,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400 Orang			400 Orang	17,121,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		17,675,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	15 Orang			15 Orang	3,171,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,330,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15 Laporan			15 Laporan	76,300,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		77,425,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen			15 Dokumen	9,750,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		9,875,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	15 Laporan			15 Laporan	7,800,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7,925,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**166,000,000**							**756,450,000**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					**-**	**166,000,000**							**756,450,000**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**166,000,000**	-	-	-	-	-	-	**756,450,000**	-
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	102,000,000			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	109,475,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,050,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		15,375,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya Rasio PNS yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Sesuai Jabatan Fungsionalnya]	**Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**50**	**31.88**	**31.97**	**32**	**166,000,000**	-	-	-	-	-	-	**756,450,000**	-
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	52 Orang			51 Orang	83,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		90,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	-	-	-	-	-	**166,000,000**	-	-	-	-	-	-	**756,450,000**	-
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,050,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	64,000,000			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	646,975,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,050,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik				1 Lembaga	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,050,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				50 Orang	40,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		41,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar														
			-				-	2,000,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,050,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya Rasio PNS yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Sesuai Jabatan Fungsionalnya]	**Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**50**	**31.88**	**31.97**	**32**	**166,000,000**	-	-	-	-	-	-	**756,450,000**	-
	5.04.02.2.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	8,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		8,125,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	30 Laporan			0 Laporan	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		581,700,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	4 Dokumen			4 Dokumen	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		10,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT						**16,965,093,000**							**-**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**16,965,093,000**							**-**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**16,965,093,000**							**-**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**9,514,340,500**							**-**	
		[Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**80**	**100**	**100**	**9,514,340,500**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6,347,308,000			-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	660 Orang/bulan	636 Orang/bulan		660 Orang/bulan	6,347,308,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		-	INSP EKT ORA
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1,598,117,500			-	-	-	-	-	INSP
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang			70 Orang	1,598,117,500	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		-	INSP EKT ORA
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	614,265,500			-	-	-	-	-	INSP
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	65,084,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		-	INSP EKT ORA
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2 Paket		3 Paket	8,030,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		-	INSP EKT ORA
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	5 Laporan		6 Laporan	91,948,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		-	INSP EKT ORA
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	449,203,500	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		-	INSP EKT ORA
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	578,671,000			-	-	-	-	-	INSP EKT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	141,955,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		-	INSP EKT ORA
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit			23 Unit	158,716,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		-	INSP EKT ORA
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			0 Unit	278,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	INSP EKT ORA T
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	195,366,500			-	-	-	-	-	INSP EKT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan			3 Laporan	1,650,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		-	INSP EKT ORA
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	86,704,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		-	INSP EKT ORA
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	107,012,500	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		-	INSP EKT ORA
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	180,612,000			-	-	-	-	-	INSP EKT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit			21 Unit	115,912,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		-	INSP EKT ORA
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit			30 Unit	14,700,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		-	INSP EKT ORA
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		-	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**					**-**	**5,157,182,500**							**-**	
		[Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Menurunnya Temuan BPK]	**Jumlah Temuan BPK** **Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Tindaklanjuti**	**22** **56.5**	**22** **29.7**	**22** **37.5**	**22** **42.6**	**5,157,182,500**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	3,649,182,500			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan	14 Laporan		14 Laporan	733,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Laporan			20 Laporan	638,480,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan			6 Laporan	494,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	INSP EKT ORA T
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	16 Laporan			16 Laporan	816,680,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	INSP EKT ORA T
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	10 Laporan			8 Laporan	255,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	INSP EKT ORA T
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	392,282,500	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	INSP EKT ORA T
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	9 Dokumen			9 Dokumen	318,740,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	1,508,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	35 Laporan			35 Laporan	1,508,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**					**-**	**2,293,570,000**							**-**	
		[Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Internal di Perangkat Daerah]	**Capaian Pemenuhan Indikator MCP KPK-RI Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3**	**100**	**85 90**	**100 92**	**100 94**	**2,293,570,000**	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	994,806,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	INSP EKT ORA T
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	0 Rekomend asi			0 Rekomend asi	994,806,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	INSP EKT ORA T
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	1,298,764,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	INSP EKT ORA T
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah	40 perangkat daerah		38 perangkat daerah	860,864,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	INSP EKT ORA T
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah	40 perangkat daerah		38 perangkat daerah	85,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	2 Kegiatan		2 Kegiatan	42,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah	38 perangkat daerah		38 perangkat daerah	310,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	INSPEKTORAT
		KECAMATAN PANCA LAUTANG						**2,979,901,500**							**2,366,691,371**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2,979,901,500**							**2,366,697,371**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2,979,901,500**							**2,366,697,371**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100**	**2,922,424,500**							**2,000,000**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**80**	**100**	**100**	**2,922,424,500**	-	-	-	-	-	**100**	**2,000,000**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			100	2,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	100	2,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Dokumen	1,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Dokumen	1,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,278,016,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,300,796,160	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	2,278,016,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	14 Bulan	2,278,016,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	166,177,500			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	505,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5,585,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	67,195,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	10,132,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	10,132,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15000 Paket	10,208,500	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	15000 Paket	10,208,500	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	73,057,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	100 Laporan	-	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	62,084,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	62,084,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	30 Unit	62,084,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	138,889,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	150,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	150,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	20,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	-				50	118,739,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	50	118,739,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	275,258,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	21,072,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	21,072,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	20 Unit	4,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	250,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	-	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**-**	**3,222,000**							**2,266,561**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3,222,000**	-	-	-	-	-	**100**	**2,266,561**	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	3,222,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,266,561	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	2,212,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	2,212,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10 Laporan	1,010,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	10 Laporan	1,010,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**2,612,000**							**3,090,600**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2,612,000**	-	-	-	-	-	**100**	**3,090,600**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	1,100,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,030,200	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	1,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	1,030,200	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1,512,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,060,400	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga K emasyarakat an	987,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	8 Lembaga K emasyarakat an	1,030,200	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	525,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,030,200	KECAMATAN PANCA LAUTANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**979,000**						**-**	**979,000**	
		[Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah]	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**979,000**	-	-	-	-	-	100	**979,000**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	979,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	479,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	479,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	479,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
		Terselenggaranya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		505,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**50,000,000**							**51,515,050**	
		[Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat]	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50,000,000**	-	-	-	-	-	**100**	**51,515,050**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	50,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	51,515,050	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Dokumen	51,515,050	KECAMATAN PANCA LAUTANG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**-**	**1,350,000**							**1,500,000**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan]	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,350,000**	-	-	-	-	-	**100**	**1,500,000**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	1,350,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,500,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	450,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	500,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	450,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	500,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	450,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	500,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
		KELURAHAN BILOKKA						**262,000,500**							**131,384,610**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,500**							**131,384,610**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,500**							**131,384,610**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**120,780,500**							**9,964,155**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**-**	**-**	**-**	**100**	**120,780,500**	-	-	-	-	-	**100**	**9,964,155**	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	57,109,500			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	3,328,455	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	9,320,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Bilokka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	-	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	18,531,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Bilokka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	-	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12,868,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Bilokka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	-	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10000 Paket	3,000,500	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Bilokka	-	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	10000 Paket	3,030,505	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	13,095,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Bilokka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	20 Laporan	-	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	57,287,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	18,786,000	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	186,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		18,786,000	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Bilokka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan		KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	50,287,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Bilokka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan		KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6,384,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	6,447,840	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Bilokka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	4,040,000	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					2,384,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Bilokka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,407,840	KELURAHAN BILOKKA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**100**	**141,220,000**						100	**121,420,455**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	141,220,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	121,420,455	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	141,220,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Bilokka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	13 Unit	121,420,455	KELURAHAN BILOKKA
		KELURAHAN WETTE						**262,000,000**							**158,510,920**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**158,510,920**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**158,510,920**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**100**	**130,044,000**						100	**26,554,920**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	58,256,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	24,534,920	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3,580,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Wetee	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	-	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	26,929,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Wetee	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	-	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4,092,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Wetee	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	-	KELURAHAN WETTE
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4,002,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Wetee	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	4,002,000	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	290,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	0 Laporan	2,929,000	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Wetee	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	30 Laporan	20,200,000	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					-	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	61,764,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	750,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Wetee	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	-	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Wetee	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	-	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	54,014,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Wetee	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	-	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10,024,000			-	-	-	-	2,020,000	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	8,024,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Wetee	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Unit	2,020,000	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	2,000,000	-	-	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	KELURAHAN WETTE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**100**	**131,956,000**						**100**	**198,843,140**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	131,956,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	198,843,140	KELURAHAN WETTE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	131,956,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Wetee	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	13 Unit	131,956,000	KELURAHAN WETTE
		KELURAHAN LAJONGA						**262,000,000**							**154,262,250**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**154,262,250**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**154,262,250**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**129,074,000**							**21,336,250**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	41,642,000			-	-	-	-	16,488,250	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1,603,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Lajonga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		-	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	21,038,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Lajonga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		-	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	1,426,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Lajonga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10000 Paket	1,250,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Lajonga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		-	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	325,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Lajonga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		328,250	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	16,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Lajonga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		16,160,000	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	82,632,000			-	-	-	-	-	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	750,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Lajonga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		-	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Lajonga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				50	74,882,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Lajonga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4,800,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	4,848,000	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Lajonga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		4,040,000	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Lajonga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		808,000	KELURAHAN LAJONGA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**-**	**132,926,000**							**132,926,000**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	132,926,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	132,926,000	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	132,926,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Lajonga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	13 Unit	132,926,000	KELURAHAN LAJONGA
		KECAMATAN TELLU LIMPOE						**3,700,879,000**							**3,802,000,525**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3,700,879,000**							**3,802,000,525**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3,700,879,000**							**3,802,000,525**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3,620,857,000**							**3,718,474,525**	
		[Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Dukungan Administrasi Pemerintahan Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**97.45**	**100**	**100**	**3,620,857,000**	-	-	-	-	-	-	**3,718,474,525**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13,186,000			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	13,531,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	9,801,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Dokumen	10,001,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	3,385,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,530,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3,241,098,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	3,313,779,525	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				980 Orang/bulan	3,240,098,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1036 Orang/bulan	3,312,779,525	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	1,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	4,242,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	3,330,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	842,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Dokumen	930,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegaw	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	3,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Dokumen	2,400,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	126,066,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	72,937,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				67 Paket	6,411,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	28 Paket	8,179,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2196 Paket	75,556,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2,343	17,818,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14956 Paket	9,422,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	14956 Paket	9,704,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				28	4,040,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	28	4,300,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				144	30,637,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	163	32,936,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	160,644,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	232,321,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	34,222,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	18 Unit	41,162,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	65,843,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	26 Unit	40,389,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	60,579,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	150,770,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	43,725,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	43,800,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				65 Laporan	975,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	199	1,050,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18,750,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	18,750,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	24,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	24,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	31,896,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	38,776,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dan siap mendukung pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	20,076,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	20,076,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	700,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-			KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11,120,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	6 unit	18,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**-**	**7,882,000**							**8,192,000**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Responsif, Inovatif, dan Berbasis Teknologi Digital Untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Prima]	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7,882,000**	-	-	-	-	-	100	**8,192,000**	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	7,882,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	8,192,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	3,820,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	4,042,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	4,062,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	4,150,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**14,280,000**							**16,034,000**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa/Kelurahan]	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**81.02**	**100**	**100**	**14,280,000**	-	-	-	-	-	100	**16,034,000**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	2,518,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	3,050,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	2,518,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	3,050,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	11,762,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	12,984,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga K emasyarakat an	7,542,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	6 Lembaga K emasyarakat an	7,542,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	4,220,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	5,442,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**4,040,000**							**4,640,000**	
		[Terciptanya Kondisi Wilayah Kecamatan yang Aman, Tertib, dan Kondusif Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Aktif Masyaraka]	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4,040,000**	-	-	-	-	-	**100**	**4,640,000**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	4,040,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	4,640,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Guna Menciptakan Situasi Wilayah yang Aman, Tertib dan Kondusif	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	3,220,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	3,220,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	820,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	1,420,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**50,000,000**							**50,000,000**	
		[Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Mendukung Stabilitas Wilayah dan Pelayanan Masyarakat Secara Terkoordinasi, Partisipatif, dan Berkelanjutan]	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50,000,000**	-	-	-	-	-	**100**	**50,000,000**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	50,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	50,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Dokumen	50,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**-**	**3,820,000**							**4,660,000**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Akuntabel, dan Sesuai Regulasi Melalui Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif dan Berkelanjutan]	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**45.83**	**100**	**100**	**3,820,000**	-	-	-	-	-	**100**	**4,660,000**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	3,820,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	4,660,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Des	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	3,820,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Dokumen	4,660,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
		KELURAHAN MASSEPE						**262,000,000**							**262,050,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**262,050,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**262,050,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**145,118,000**							**152,148,000**	
		-	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**145,118,000**	-	-	-	-	-	-	**152,148,000**	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	22,959,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	22,352,000	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10,376,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	10,376,000	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15788 Paket	7,894,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	15788 Paket	7,287,000	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				18 Laporan	1,124,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	18 Laporan	1,124,000	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	3,565,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	17 Laporan	3,565,000	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	50,600,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	64,277,000	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	23,126,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	8 Unit	34,815,000	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	27,474,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	29,462,000	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	55,285,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	55,285,000	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				19 Laporan	285,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		285,000	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	7,000,000	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	48,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	48,000,000	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	16,274,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	10,234,000	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	6,274,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	6,274,000	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	-	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	3,960,000	KELURAHAN MASSEPE
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**-**	**116,882,000**							**109,902,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	116,882,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	109,902,000	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Terselenggaranya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga K emasyarakat an	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Lembaga K emasyarakat an	2,050,000	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	92,970,000	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	14,882,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Pokmas / Ormas	14,882,000	KELURAHAN MASSEPE
		KELURAHAN AMPARITA						**262,000,000**							**269,350,400**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**269,350,400**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**269,350,400**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**-**	**130,268,000**							**123,493,400**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	18,465,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	17,972,000	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	9,897,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Paket	10,000,000	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7986 Paket	3,993,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	7986 Paket	2,508,000	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tam	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10	1,910,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	10	2,799,000	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2,665,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	2,665,000	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	32,319,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	22,457,000	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	13,747,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	14 Unit	13,747,000	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	18,572,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	8,710,000	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	67,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	67,514,400	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	7,514,400	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	60,000,000	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	12,484,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	13,500,000	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	6,484,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	6,500,000	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	7,000,000	KELURAHAN AMPARITA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**-**	**131,732,000**							**145,857,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	131,732,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	145,857,000	KELURAHAN AMPARITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga K emasyarakat an	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Lembaga K emasyarakat an	2,025,000	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	91,332,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	15 Unit	137,832,000	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	38,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Pokmas / Ormas	6,000,000	KELURAHAN AMPARITA
		KELURAHAN PAJALELE						**262,000,000**							**267,807,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**267,807,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**267,807,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**-**	**132,000,000**							**135,707,000**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	22,512,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	22,913,000	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				381 Paket	11,273,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	381 Paket	11,373,000	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8268 Paket	4,134,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	8268 Paket	4,235,000	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4,040,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Laporan	4,140,000	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	3,065,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	3,165,000	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	30,044,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	30,244,000	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	8,618,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		8,718,000	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	21,426,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	21,526,000	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	67,450,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	69,550,000	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	450,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		550,000	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	8,000,000	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	61,000,000	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	11,994,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	13,000,000	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	7,994,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Unit	8,000,000	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	5,000,000	KELURAHAN PAJALELE
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dal				**-**	**130,000,000**							**132,100,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	130,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	132,100,000	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Terselenggaranya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga K emasyarakat an	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Lembaga K emasyarakat an	2,100,000	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	108,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	109,000,000	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	19,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Pokmas / Ormas	21,000,000	KELURAHAN PAJALELE
		KELURAHAN TODDANG PULU						**262,000,000**							**264,497,170**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**264,497,170**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**264,497,170**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**-**	**150,957,000**							**152,426,000**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	31,117,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	31,404,000	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	14,397,500	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Toddang Pulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Paket	14,542,000	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12,788 Paket	6,423,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Toddang Pulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12,788 Paket	6,457,000	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	5,699,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Toddang Pulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Laporan	5,755,000	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	4,597,500	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Toddang Pulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	18 Laporan	4,650,000	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	47,160,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	47,632,000	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	18,496,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Toddang Pulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Unit	18,681,000	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	28,664,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Toddang Pulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	28,951,000	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	60,106,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	60,706,000	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Toddang Pulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	20 Laporan	350,000	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9,806,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Toddang Pulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	9,856,000	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Toddang Pulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	50,500,000	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	12,574,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	12,684,000	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	6,574,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Toddang Pulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	6,624,000	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Toddang Pulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	6,060,000	KELURAHAN TODDANG PULU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**-**	**111,043,000**							**112,071,170**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	111,043,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	112,071,170	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Terselenggaranya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga K emasyarakat an	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Toddang Pulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Lembaga K emasyarakat an	2,050,000	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	92,817,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Toddang Pulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	93,745,170	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	16,226,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Toddang Pulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Pokmas / Ormas	16,276,000	KELURAHAN TODDANG PULU
		KELURAHAN BAULA						**262,000,000**							**266,911,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**266,911,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**266,911,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**-**	**136,162,000**							**139,837,000**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	21,798,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	22,123,000	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	12,850,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		12,950,000	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7.783 Paket	3,827,500	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	7.783 Paket	3,950,000	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	1,523,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Laporan	1,623,000	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	3,597,500	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	8 Laporan	3,600,000	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	30,610,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	31,710,000	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	3,618,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	10 Unit	3,718,000	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	26,992,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	27,992,000	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	67,300,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	68,450,000	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	20 Laporan	350,000	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	7,100,000	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	61,000,000	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	16,454,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	17,554,000	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	6,454,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	6,554,000	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	11,000,000	KELURAHAN BAULA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**-**	**125,838,000**							**127,074,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	125,838,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	127,074,000	KELURAHAN BAULA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga K emasyarakat an	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Lembaga K emasyarakat an	2,050,000	KELURAHAN BAULA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	97,024,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	98,024,000	KELURAHAN BAULA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	26,814,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Pokmas / Ormas	27,000,000	KELURAHAN BAULA
		KELURAHAN ARATENG						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**-**	**137,395,400**							**160,330,000**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	31,741,400			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	27,555,000	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				22 Paket	5,527,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				385 Paket	11,305,400	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	385 Paket	11,275,500	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10.723 Paket	5,771,500	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	10.723 Paket	6,109,500	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				67 Laporan	4,040,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	67 Laporan	4,040,000	KELURAHAN ARATENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23 Laporan	5,097,500	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		6,130,000	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	26,578,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	53,699,000	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27 Unit	11,360,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	27 Unit	19,618,000	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	15,218,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	10 Unit	34,081,000	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	61,450,000			-	1.Peningkat an akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	61,450,000	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30 Laporan	450,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.Peningkat an akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	30 Laporan	450,000	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	7,000,000	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	54,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	54,000,000	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	17,626,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	17,626,000	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	9,276,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	9,276,000	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	350,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	350,000	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	8,000,000	KELURAHAN ARATENG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**-**	**124,604,600**							**101,670,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	124,604,600			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	101,670,000	KELURAHAN ARATENG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Terselenggaranya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga K emasyarakat an	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Lembaga K emasyarakat an	2,000,000	KELURAHAN ARATENG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	60,795,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		87,670,000	KELURAHAN ARATENG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	61,809,600	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		12,000,000	KELURAHAN ARATENG
		KECAMATAN WATANG PULU						**3,997,142,700**							**3,997,142,700**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3,997,142,700**							**3,997,142,700**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3,997,142,700**							**3,997,142,700**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3,933,142,700**							**3,933,142,700**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3,933,142,700**	-	-	-	-	-		**3,933,142,700**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-			-	3,650,070,700			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	3,650,070,700	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41/12 Orang/bulan	3,650,070,700	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	41/12 Orang/bulan	3,650,070,700	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	103,187,500			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	103,187,500	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Paket	5,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	18 Paket	45,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Paket	3,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220 Laporan	50,187,500	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	220 Laporan	50,187,500	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	104,812,500			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	104,812,500	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4,990,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	4,990,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	11,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	88,822,500	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	88,822,500	KECAMATAN WATANG PULU
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,933,142,700**	-	-	-	-	-	-	**3,933,142,700**	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	75,072,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	75,072,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	20,072,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		20,072,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5,000,000	5,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	50,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**-**	**4,000,000**							**4,000,000**	
		[Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik]	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4,000,000**	-	-	-	-	-	-	**4,000,000**	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	4,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	4,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				10 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	10 Laporan	2,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	2,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**4,000,000**							**4,000,000**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan]	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4,000,000**	-	-	-	-	-	-	**4,000,000**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	2,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Laporan	2,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Laporan	2,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**2,000,000**							**2,000,000**	
		[Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah]	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2,000,000**	-	-	-	-	-	**100**	**2,000,000**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	2,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	2,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	-	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	KECAMATAN WATANG PULU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**50,000,000**							**50,000,000**	
		[Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat]	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50,000,000**	-	-	-	-	-	**100**	**50,000,000**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	50,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	50,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Dokumen	50,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**-**	**4,000,000**							**4,000,000**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan]	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4,000,000**	-	-	-	-	-	-	**4,000,000**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	4,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	4,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				5 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0 Dokumen	-	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	KECAMATAN WATANG PULU
		KELURAHAN LAWAWOI						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**-**	**151,804,000**							**151,804,000**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**151,804,000**	-	-	-	-	-	-	**151,804,000**	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	74,152,700			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	74,152,700	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	63,700,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Lawawoi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Paket	63,700,000	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1,485,408	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Lawawoi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Paket	1,485,408	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2,319,792	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Lawawoi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Paket	2,319,792	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	6,647,500	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Lawawoi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	55 Laporan	6,647,500	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	70,471,300			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	70,471,300	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Lawawoi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	1,200,000	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Lawawoi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	12,400,000	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	56,871,300	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Lawawoi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	56,871,300	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7,180,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	7,180,000	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	3,180,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Lawawoi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	3,180,000	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Lawawoi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	4,000,000	KELURAHAN LAWAWOI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**100**	**110,196,000**						100	**110,196,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	110,196,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	110,196,000	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	86,196,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Lawawoi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	86,196,000	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	24,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Lawawoi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Pokmas / Ormas	24,000,000	KELURAHAN LAWAWOI
		KELURAHAN ARAWA						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**100**	**141,000,000**						100	**121,000,000**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	38,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	28,000,000	KELURAHAN ARAWA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Arawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Paket	20,000,000	KELURAHAN ARAWA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Arawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Paket	1,000,000	KELURAHAN ARAWA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Arawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	7,000,000	KELURAHAN ARAWA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	75,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	75,000,000	KELURAHAN ARAWA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Arawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	1,200,000	KELURAHAN ARAWA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Arawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	9,400,000	KELURAHAN ARAWA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	64,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Arawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	64,400,000	KELURAHAN ARAWA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	28,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	18,000,000	KELURAHAN ARAWA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Arawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	7,000,000	KELURAHAN ARAWA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Arawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	1,000,000	KELURAHAN ARAWA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Arawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	10,000,000	KELURAHAN ARAWA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**-**	**121,000,000**							**141,000,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	121,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	141,000,000	KELURAHAN ARAWA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Arawa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	120,000,000	KELURAHAN ARAWA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	21,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Arawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Pokmas / Ormas	21,000,000	KELURAHAN ARAWA
		KELURAHAN ULU ALE						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**-**	**241,000,000**							**241,000,000**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	84,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	84,000,000	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Uluale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	10 Paket	5,000,000	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Uluale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	6 Paket	60,000,000	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Uluale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	10 Paket	3,000,000	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Uluale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Paket	4,000,000	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Uluale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	36 Laporan	12,000,000	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	77,200,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	77,200,000	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Uluale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	2,000,000	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Uluale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	10,200,000	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	65,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Uluale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	65,000,000	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	79,800,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	79,800,000	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Uluale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	3,000,000	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Uluale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	1,500,000	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Uluale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	75,300,000	KELURAHAN ULU ALE
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan					**21,000,000**							**21,000,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	21,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	21,000,000	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	-	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Uluale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	21,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Uluale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Pokmas / Ormas	21,000,000	KELURAHAN ULU ALE
		KELURAHAN BANGKAI						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**-**	**162,040,000**							**162,040,000**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	78,393,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	78,393,000	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	46,205,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Bangkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Paket	46,205,000	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4,824,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Bangkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Paket	4,824,000	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1,714,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Bangkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Paket	1,714,000	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	25,650,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Bangkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	18 Laporan	25,650,000	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	58,083,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	58,083,000	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Bangkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,500,000	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14,712,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Bangkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	14,712,000	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	41,871,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Bangkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	41,871,000	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	25,564,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	25,564,000	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Bangkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	2,000,000	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	2,686,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Bangkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	2,686,000	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,878,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Bangkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	20,878,000	KELURAHAN BANGKAI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**100**	**99,960,000**						100	**99,960,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	99,960,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	99,960,000	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	75,960,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Bangkai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	75,960,000	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	24,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Bangkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Pokmas / Ormas	24,000,000	KELURAHAN BANGKAI
		KELURAHAN BATU LAPPA						**262,000,000**							**253,800,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**253,800,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**253,800,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**-**	**171,000,000**							**162,800,000**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	38,800,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	30,600,000	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Paket	5,000,000	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Paket	20,000,000	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Paket	2,000,000	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Paket	1,800,000	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	8 Laporan	1,800,000	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	56,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	56,500,000	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Buae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	1,500,000	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	10,000,000	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	45,000,000	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	75,700,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	75,700,000	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	2,000,000	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	4,090,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	4,090,000	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	69,610,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	69,610,000	KELURAHAN BATU LAPPA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**-**	**91,000,000**							**91,000,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	91,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	91,000,000	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	70,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	70,000,000	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	21,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Pokmas / Ormas	21,000,000	KELURAHAN BATU LAPPA
		KECAMATAN MARITENGNGAE						**5,509,470,040**							**5,338,973,090**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5,509,470,040**							**5,338,973,090**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	**KECAMATAN**						**5,509,470,040**							**5,338,973,090**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**-**	**5,444,470,040**							**5,273,973,090**	
		[Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan]	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5,444,470,040**	-	-	-	-	-	-	**5,273,973,090**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5,090,470,040			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	4,979,973,090	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				896 Orang/bulan	5,090,470,040	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	896 Orang/bulan	4,979,973,090	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	83,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	83,500,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	500,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pertbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	1,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	7,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	15,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	60,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	60,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	65,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	65,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	10,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	55,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	55,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	131,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	71,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,500,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	18,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	18,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	111,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	51,500,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	74,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	74,500,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	23,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	23,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	1,500,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	50,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				**-**	**2,000,000**							**2,000,000**	
		[Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik]	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2,000,000**	-	-	-	-	-	-	**2,000,000**	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	2,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**9,000,000**							**9,000,000**	
		Terselenggaranya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**9,000,000**	-	-	-	-	-	-	**9,000,000**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	1,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	8,000,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	8,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Terselenggaranya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga K emasyarakat an	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	0 Lembaga K emasyarakat an	7,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	7 Laporan	1,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**1,000,000**							**1,000,000**	
		[Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah]	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,000,000**	-	-	-	-	-	-	**1,000,000**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	1,000,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**50,000,000**							**50,000,000**	
		[Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat]	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50,000,000**	-	-	-	-	-	-	**50,000,000**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	50,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	50,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Dokumen	50,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**-**	**3,000,000**							**3,000,000**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan]	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3,000,000**	-	-	-	-	-	-	**3,000,000**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	3,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	3,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	1,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	1,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	1,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
		KELURAHAN PANGKAJENE						**287,000,000**							**287,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**287,000,000**							**287,000,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**287,000,000**							**287,000,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**122,500,000**							**122,500,000**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**122,500,000**	-	-	-	-	-	-	**122,500,000**	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	13,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	13,500,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	500,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	1,000,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	4,000,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,000,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	7,000,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	17,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	17,000,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	2,000,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	15,000,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	75,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	75,500,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,500,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	7,000,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	67,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	67,000,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	16,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	16,500,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	5,000,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	1,500,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	10,000,000	KELURAHAN PANGKAJENE
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**164,500,000**							**164,500,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	164,500,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	164,500,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga K emasyarakat an	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Lembaga K emasyarakat an	3,000,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	125,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	125,500,000	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	36,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Pokmas / Ormas	36,000,000	KELURAHAN PANGKAJENE
		KELURAHAN LAUTANG BENTENG						**262,000,000**							**5,257,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**5,257,000,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**5,257,000,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**-**	**122,500,000**							**5,117,500,000**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	13,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	13,500,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	500,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	1,000,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	4,000,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,000,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	7,000,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	17,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	17,000,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	2,000,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	15,000,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	75,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	75,500,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,500,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	7,000,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	67,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	67,000,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	16,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	5,011,500,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	5,000,000,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	1,500,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	10,000,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**139,500,000**							**139,500,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	139,500,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	139,500,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Tersediaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga K emasyarakat an	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Lembaga K emasyarakat an	3,000,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	100,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	100,500,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	36,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Pokmas / Ormas	36,000,000	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
		KELURAHAN MAJJELING						**262,000,000**							**5,257,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**5,257,000,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**5,257,000,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**-**	**122,500,000**							**5,117,500,000**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	13,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	13,500,000	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	500,000	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	1,000,000	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	4,000,000	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,000,000	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	7,000,000	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	17,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	17,000,000	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	2,000,000	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	15,000,000	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	75,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	75,500,000	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,500,000	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	7,000,000	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	67,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	67,000,000	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	16,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	5,011,500,000	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	5,000,000,000	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	1,500,000	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	10,000,000	KELURAHAN MAJJELING
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**139,500,000**							**139,500,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	139,500,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	139,500,000	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakat an	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Lembaga Kemasyarakat an	3,000,000	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	100,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	100,500,000	KELURAHAN MAJJELING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	36,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Pokmas / Ormas	36,000,000	KELURAHAN MAJJELING
		KELURAHAN WALA						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**-**	**122,500,000**							**122,500,000**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	13,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	13,500,000	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	1,000,000	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	4,000,000	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,000,000	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	7,000,000	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	17,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	17,000,000	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	2,000,000	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	15,000,000	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	75,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	75,500,000	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,500,000	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7,000,000	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	67,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	67,000,000	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	16,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	16,500,000	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	5,000,000	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		erlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	1,500,000	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	10,000,000	KELURAHAN WALA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**-**	**139,500,000**							**139,500,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	139,500,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	139,500,000	KELURAHAN WALA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakat an	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Lembaga Kemasyarakat an	3,000,000	KELURAHAN WALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	100,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	100,500,000	KELURAHAN WALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	36,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Pokmas / Ormas	36,000,000	KELURAHAN WALA
		KELURAHAN RIJANG PITTU						**272,000,000**							**272,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**272,000,000**							**272,000,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**272,000,000**							**272,000,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**100**	**122,500,000**						100	**122,500,000**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	13,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	13,500,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	500,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	1,000,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	4,000,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,000,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	7,000,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	17,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	17,000,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	2,000,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	15,000,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	75,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	75,500,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,500,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	7,000,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	67,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	67,000,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	16,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	16,500,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	5,000,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	1,500,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	10,000,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**-**	**149,500,000**							**149,500,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	149,500,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	149,500,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakat an	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Lembaga Kemasyarakat an	3,000,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	110,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	110,500,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	36,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Pokmas / Ormas	36,000,000	KELURAHAN RIJANG PITTU
		KELURAHAN MAJJELING WATTANG						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**100**	**122,500,000**						100	**122,500,000**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	13,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	13,500,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling Watang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	500,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling Watang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	1,000,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling Watang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	4,000,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling Watang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,000,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling Watang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	7,000,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	17,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	17,000,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling Watang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	2,000,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling Watang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	15,000,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	75,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	75,500,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling Watang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,500,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling Watang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	7,000,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	67,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling Watang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	67,000,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	16,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	16,500,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling Watang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	5,000,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling Watang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,500,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling Watang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	10,000,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**-**	**139,500,000**							**139,500,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	139,500,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	139,500,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga K emasyarakat an	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling Watang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Lembaga K emasyarakat an	3,000,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	100,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling Watang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	100,500,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	36,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Majjelling Watang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Pokmas / Ormas	36,000,000	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
		KELURAHAN LAKESSI						**267,000,000**							**267,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**267,000,000**							**267,000,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**267,000,000**							**267,000,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**-**	**122,500,000**							**122,500,000**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	13,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	13,500,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	500,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	1,000,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	4,000,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,000,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	7,000,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	17,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	17,000,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	2,000,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	15,000,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	75,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	75,500,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,500,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	7,000,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	67,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	67,000,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	16,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	16,500,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	5,000,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	1,500,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	10,000,000	KELURAHAN LAKESSI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**-**	**144,500,000**							**144,500,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	144,500,000			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	144,500,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakat an	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Lembaga Kemasyarakat an	3,000,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	105,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	105,500,000	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	36,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Pokmas / Ormas	36,000,000	KELURAHAN LAKESSI
		KECAMATAN WATTANG SIDENRENG						**2,914,307,870**							**3,124,148,573**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2,914,307,870**							**3,124,148,573**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2,914,307,870**							**3,124,148,573**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2,857,807,870**							**3,067,648,573**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2,857,807,870**	-	-	-	-	-	-	**3,067,648,573**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,566,907,870			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-	-	2,776,748,573	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				350 Orang/bulan	2,566,907,870	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Peningkata n dan Pem erataan Pe ndapatan Masyarakat	-	350 Orang/bulan	2,776,748,573	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	122,822,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	122,656,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5,120,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	5,120,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	17,275,500	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	17,275,500	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	5,794,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	5,794,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12,628,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	12,662,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	21,450,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	21,450,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	60,554,500	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	60,354,500	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	32,909,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	48,575,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	-	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	19,430,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	32,909,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Unit	29,145,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	73,125,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	73,125,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,125,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	1,125,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	15,000,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	57,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	57,000,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	62,044,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	46,544,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	25,158,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	25,158,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5,952,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Unit	5,952,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	30,934,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	15,434,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**-**	**500,000**							**500,000**	
		[Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik]	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**500,000**	-	-	-	-	-	**100**	**500,000**	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	500,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		500,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**5,000,000**							**5,000,000**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5,000,000**	-	-	-	-	-	100	**5,000,000**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	500,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	500,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	4,500,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakat an	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Lembaga Kemasyarakat an	4,000,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	500,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**50,000,000**							**50,000,000**	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50,000,000**	-	-	-	-	-	**100**	**50,000,000**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	50,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	50,000,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Dokumen	50,000,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**-**	**1,000,000**							**1,000,000**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,000,000**	-	-	-	-	-	**100**	**1,000,000**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	1,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,000,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Dokumen	500,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				5 Dokumen	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Dokumen	500,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
		KELURAHAN SIDENRENG						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**123,666,000**							**127,854,000**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**-**	**-**	**-**	**100**	**123,666,000**	-	-	-	-	-	100	**127,854,000**	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	31,878,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	31,878,000	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2,550,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Watang Sidenreng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	2,550,000	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	2,318,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Watang Sidenreng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	2,318,000	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3,149,500	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Watang Sidenreng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		3,149,500	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7,003,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Watang Sidenreng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		7,003,000	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	16,857,500	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Watang Sidenreng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	16,857,500	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	17,407,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	21,595,000	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	4,811,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Watang Sidenreng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	16,095,000	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	12,596,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Watang Sidenreng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	5,500,000	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	59,677,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	59,677,000	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Watang Sidenreng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	600,000	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Watang Sidenreng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	12,400,000	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	46,677,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Watang Sidenreng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		46,677,000	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	14,704,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	14,704,000	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	7,158,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Watang Sidenreng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Unit	7,158,000	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3,842,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Watang Sidenreng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Unit	3,842,000	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,704,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Watang Sidenreng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	3,704,000	KELURAHAN SIDENRENG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**100**	**138,334,000**						100	**134,146,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	138,334,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	134,146,000	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakat an	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Watang Sidenreng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Lembaga Kemasyarakat an	1,000,000	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	131,334,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Watang Sidenreng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	127,146,000	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Watang Sidenreng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Pokmas / Ormas	6,000,000	KELURAHAN SIDENRENG
		KELURAHAN KANYUARA						**262,000,000**							**259,069,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**259,069,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**259,069,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**100**	**135,000,000**						100	**132,069,000**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	31,878,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	31,878,000	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2,550,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Kanyuara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	2,550,000	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	2,318,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Kanyuara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	2,318,000	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3,149,500	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Kanyuara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	3,149,500	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7,003,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Kanyuara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	7,003,000	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	16,857,500	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Kanyuara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	16,857,500	KELURAHAN KANYUARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	29,741,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	26,310,000	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	29,741,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Kanyuara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	26,310,000	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	60,177,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	60,177,000	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Kanyuara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	600,000	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,900,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Kanyuara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	12,900,000	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	46,677,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Kanyuara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	46,677,000	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13,204,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	13,704,000	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	7,158,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Kanyuara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Unit	7,158,000	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2,342,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Kanyuara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Unit	2,842,000	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,704,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Kanyuara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	3,704,000	KELURAHAN KANYUARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**100**	**127,000,000**						100	**127,000,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	127,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	127,000,000	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakat an	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Kanyuara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Lembaga Kemasyarakat an	1,000,000	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	120,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Kanyuara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	120,000,000	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Kanyuara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Pokmas / Ormas	6,000,000	KELURAHAN KANYUARA
		KELURAHAN EMPAGAE						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**100**	**133,270,000**						100	**133,270,000**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	31,878,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	31,878,000	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2,550,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Empagae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	2,550,000	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	2,318,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Empagae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	2,318,000	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3,149,500	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Empagae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	3,149,500	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7,003,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Empagae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	7,003,000	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	16,857,500	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Empagae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	16,857,500	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	28,511,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	27,011,000	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	2,381,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Empagae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	4,836,000	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	26,130,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Empagae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	22,175,000	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	59,677,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	59,677,000	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Empagae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	600,000	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Empagae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	12,400,000	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	46,677,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Empagae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	46,677,000	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13,204,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	14,704,000	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	7,158,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Empagae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Unit	7,158,000	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2,342,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Empagae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	5 Unit	3,842,000	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,704,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Empagae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	3,704,000	KELURAHAN EMPAGAE
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**100**	**128,730,000**						100	**128,730,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	128,730,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	128,730,000	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakat an	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Empagae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Lembaga Kemasyarakat an	1,000,000	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	121,730,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Empagae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	121,730,000	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Empagae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Pokmas / Ormas	6,000,000	KELURAHAN EMPAGAE
		KECAMATAN DUA PITUE						**2,931,994,000**							**3,073,885,635**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2,931,994,000**							**3,073,885,635**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2,931,994,000**							**3,073,885,635**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2,871,394,000**							**3,012,182,135**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2,871,394,000**	-	-	-	-	-	100	**3,012,182,135**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3,435,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	3,469,350	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3,435,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	3,469,350	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,173,569,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,218,227,540	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				406 Orang/bulan	2,173,569,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	406 Orang/bulan	2,218,227,540	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	139,166,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	159,454,700	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	13 Paket	1,515,000	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	45,366,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	4 Paket	55,430,000	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	12,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	7 Paket	6,050,000	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				800 Paket	1,700,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	800 Paket	1,717,000	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	27,542,700	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	53,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	120 Laporan	67,200,000	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	214,050,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	233,740,128	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	18,125,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	3 Unit	35,712,628	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	195,925,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	198,027,500	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	120,002,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	156,210,450	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				75 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	75 Laporan	1,560,450	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	40,428,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	63,848,000	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	78,074,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	90,802,000	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	221,172,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	241,079,967	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	25,072,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Unit	31,765,000	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	6,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Unit	6,130,000	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	190,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	203,184,967	KECAMATAN DUA PITUE
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**4,500,000**							**5,050,000**	
		[Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik]	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4,500,000**	-	-	-	-	-	100	**5,050,000**	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	4,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	5,050,000	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Dokumen	1,515,000	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				3 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Laporan	2,020,000	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Laporan	1,515,000	KECAMATAN DUA PITUE
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**3,250,000**							**3,275,000**	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3,250,000**	-	-	-	-	-	**100**	**3,275,000**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	1,500,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,510,000	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakat an	750,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Lembaga Kemasyarakat an	755,000	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	750,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Laporan	755,000	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1,750,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,765,000	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	1,750,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Laporan	1,765,000	KECAMATAN DUA PITUE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**750,000**							**757,500**	
		[Terciptanya Kondisi Wilayah Kecamatan yang Aman, Tertib, dan Kondusif Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Aktif Masyarakat]	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**750,000**	-	-	-	-	-	**100**	**757,500**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	750,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	757,500	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	750,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Laporan	757,500	KECAMATAN DUA PITUE
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**50,000,000**							**50,500,000**	
		[Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat]	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50,000,000**	-	-	-	-	-	**100**	**50,500,000**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	50,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	50,500,000	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Dokumen	50,500,000	KECAMATAN DUA PITUE
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**-**	**2,100,000**							**2,121,000**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan]	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2,100,000**	-	-	-	-	-	**100**	**2,121,000**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	2,100,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,121,000	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	750,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Dokumen	757,500	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				3 Dokumen	750,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Dokumen	757,500	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3 Dokumen	600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Dokumen	606,000	KECAMATAN DUA PITUE
		KELURAHAN SALOMALLORI						**381,804,000**							**368,268,040**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**381,804,000**							**368,268,040**	
	7.01	**KECAMATAN**						**381,804,000**							**368,268,040**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**132,844,000**							**119,293,040**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100**	**132,844,000**	-	-	-	-	-	100	**119,293,040**	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	56,263,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	55,410,000	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	28,728,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Paket	32,250,000	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	1,982,500	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	25 Paket	1,010,000	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25,552,500	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	25 Laporan	22,150,000	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	69,161,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	60,853,040	KELURAHAN SALOMALLORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				75 Laporan	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	75 Laporan	1,515,000	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9,804,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	11,898,040	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	57,857,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	47,440,000	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7,420,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	3,030,000	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	7,420,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	3,030,000	KELURAHAN SALOMALLORI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**248,960,000**							**248,975,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	248,960,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	248,975,000	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarak atan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	10 Lembaga Kemasyarak atan	505,000	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	243,460,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	243,420,000	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Pokmas / Ormas	5,050,000	KELURAHAN SALOMALLORI
		KELURAHAN TANRU TEDONG						**364,960,000**							**361,921,475**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**364,960,000**							**361,921,475**	
	7.01	**KECAMATAN**						**364,960,000**							**361,921,475**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**100**	**128,960,000**						100	**112,946,475**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	46,110,500			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	43,135,080	KELURAHAN TANRU TEDONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	27,558,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	25 Paket	27,833,580	KELURAHAN TANRU TEDONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	18,552,500	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	25 Laporan	15,301,500	KELURAHAN TANRU TEDONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	74,449,500			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	65,266,395	KELURAHAN TANRU TEDONG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	2,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	100 Laporan	1,515,000	KELURAHAN TANRU TEDONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9,960,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	10,838,000	KELURAHAN TANRU TEDONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	62,389,500	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	52,913,395	KELURAHAN TANRU TEDONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8,400,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	4,545,000	KELURAHAN TANRU TEDONG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	8,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	3,030,000	KELURAHAN TANRU TEDONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	-	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	1,515,000	KELURAHAN TANRU TEDONG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**100**	**236,000,000**						100	**248,975,000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	236,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	248,975,000	KELURAHAN TANRU TEDONG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarak atan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	10 Lembaga Kemasyarak atan	505,000	KELURAHAN TANRU TEDONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	230,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	243,420,000	KELURAHAN TANRU TEDONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				25 Pokmas / Ormas	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	25 Pokmas / Ormas	5,050,000	KELURAHAN TANRU TEDONG
		KECAMATAN PITU RIAWA						**2,690,237,000**							**2,756,547,876**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**58,000,000**							**65,587,876**	
	7.01	**KECAMATAN**						**58,000,000**							**65,587,876**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**-**	**2,000,000**							**2,736,536**	
		[Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik]	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2,000,000**	-	-	-	-	-	**100**	**2,736,536**	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	2,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	2,736,536	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	1,368,268	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	1,368,268	KECAMATAN PITU RIAWA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**2,000,000**							**2,736,536**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan]	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2,000,000**	-	-	-	-	-	**100**	**2,736,536**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	1,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,368,268	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Laporan	1,368,268	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,368,268	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Laporan	1,368,268	KECAMATAN PITU RIAWA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**1,000,000**							**1,010,000**	
		[Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah]	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,000,000**	-	-	-	-	-	**100**	**1,010,000**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	1,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,010,000	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	1,010,000	KECAMATAN PITU RIAWA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**50,000,000**							**55,000,000**	
		[Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat]	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50,000,000**	-	-	-	-	-	**100**	**55,000,000**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	50,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	55,000,000	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Dokumen	55,000,000	KECAMATAN PITU RIAWA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**-**	**3,000,000**							**4,104,804**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan]	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3,000,000**	-	-	-	-	-	**100**	**4,104,804**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	3,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	4,104,804	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	10 Dokumen	1,368,268	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				10 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	10 Dokumen	1,368,268	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10 Dokumen	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	10 Dokumen	1,368,268	KECAMATAN PITU RIAWA
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**100**	**2,632,237,000**						100	**2,690,960,000**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,355,165,000			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		2,434,220,000	KECAMATAN PITU RIAWA
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				336 Orang/bulan	2,355,165,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	336 Orang/bulan	2,434,220,000	KECAMATAN PITU RIAWA
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	162,659,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	147,950,000	KECAMATAN PITU RIAWA
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	98,134,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	71,500,000	KECAMATAN PITU RIAWA
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1000 Paket	3,175,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1000 Paket	4,400,000	KECAMATAN PITU RIAWA
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6,375,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	6,050,000	KECAMATAN PITU RIAWA
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	54,975,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	60 Laporan	66,000,000	KECAMATAN PITU RIAWA
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	85,364,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	77,440,000	KECAMATAN PITU RIAWA
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	3,300,000	KECAMATAN PITU RIAWA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	20,900,000	KECAMATAN PITU RIAWA
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	63,864,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	53,240,000	KECAMATAN PITU RIAWA
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	29,049,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	31,350,000	KECAMATAN PITU RIAWA
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	20,980,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Unit	22,550,000	KECAMATAN PITU RIAWA
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	8,069,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	8,800,000	KECAMATAN PITU RIAWA
		KELURAHAN PONRANGAE						**262,000,000**							**306,826,300**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**131,000,000**							**112,557,500**	
	7.01	**KECAMATAN**						**131,000,000**							**112,557,500**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				**100**	**131,000,000**						100	**112,557,500**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	131,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	112,557,500	KELURAHAN PONRANGAE
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25 Lembaga Kemasyarak atan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	25 Lembaga Kemasyarak atan	2,750,000	KELURAHAN PONRANGAE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	130,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	109,807,500	KELURAHAN PONRANGAE
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**100**	**131,000,000**						100	**194,268,800**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	46,110,500			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	105,160,000	KELURAHAN PONRANGAE
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	27,558,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Paket	71,500,000	KELURAHAN PONRANGAE
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	18,552,500	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		33,660,000	KELURAHAN PONRANGAE
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	71,489,500			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	69,855,500	KELURAHAN PONRANGAE
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				210 Laporan	2,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	210 Laporan	1,320,000	KELURAHAN PONRANGAE
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	15,295,500	KELURAHAN PONRANGAE
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	62,389,500	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	53,240,000	KELURAHAN PONRANGAE
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13,400,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	19,253,300	KELURAHAN PONRANGAE
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	8,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	14,432,000	KELURAHAN PONRANGAE
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	4,821,300	KELURAHAN PONRANGAE
		KELURAHAN LANCIRANG						**262,000,000**							**298,600,800**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**298,600,800**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**298,600,800**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**100**	**131,000,000**						100	**186,043,300**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	46,110,500			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	105,160,000	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	27,558,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Paket	71,500,000	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	18,552,500	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	30 Laporan	33,660,000	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	71,489,500			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	61,630,000	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				210 Laporan	2,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	210 Laporan	1,320,000	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	7,070,000	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	62,389,500	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	53,240,000	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13,400,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	19,253,300	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	8,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	14,432,000	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	4,821,300	KELURAHAN LANCIRANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**131,000,000**							**112,557,500**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	131,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	112,557,500	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25 Lembaga Kemasyarak atan	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	25 Lembaga Kemasyarak atan	2,750,000	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	130,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	109,807,500	KELURAHAN LANCIRANG
		KECAMATAN PITU RIASE						**1,918,732,000**							**2,348,000,000**	
	7.00	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1,918,732,000**							**2,348,000,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1,918,732,000**							**2,348,000,000**	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.832.732.000,00						-	2.210.000.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
		[Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan]	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100		100	1.832.732.000,00							2.210.000.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							-	1,566,160,000			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	1,814,000,000	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				238 Orang/bulan	1,558,660,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1,798,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	7.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		16.000.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
							-	89,000,000			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	123,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		15,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		5,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	79.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
		Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera					-	56,000,000						-	80,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	8,000,000						3 Unit	10,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	33,000,000						7 Unit	35,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				14 Unit	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		35.000.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	41,072,000						-	55,500,000	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	300,000							1,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	28,000,000							36,500,000	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	52.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
							-	41,072,000						-	55,500,000	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	20,072,000							26,500,000	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5 Unit	6,000,000							9,000,000	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		20.000.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	16.500.000,00						-	36.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik	-	-			-	5.500.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	12.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	5,500,000							12,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.02.2.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan					-	11,000,000						-	24,000,000	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	5.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.000.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	5,500,000							12,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-												
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan]					-	3.000.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-												
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan					-	3.000.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	7.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	50.000.000,00						-	59.000.000,00	
		[Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat]	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	50.000.000,00							59.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah														
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan					-	50,000,000						-	59,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	50,000,000							59,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	16.500.000,00						-	36.000.000,00	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan]														
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	16.500.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	36.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					5.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.000.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				3 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.000.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
		Terlaksanaya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3 Dokumen	5,500,000							12,000,000	
		KELURAHAN BATU						**262,000,000**							**310,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**310,000,000**	
	7.01	**KECAMATAN**														
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-												
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan					100	233,520,000						100	280,000,000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	22,633,000			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	29,000,000	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.070.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN BATU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	768,000						12 Paket	1,000,000	KELURAHAN BATU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				86 Laporan	19,795,000							25,000,000	KELURAHAN BATU
	7.01.01.2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
		Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	112,163,000						-	136,000,000	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Laporan	520,000							1,000,000	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7,000,000							10,000,000	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	104,643,000							125,000,000	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.864.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	15.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	8,864,000						-	15,000,000	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.000.000,00	KELURAHAN BATU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.558.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.000.000,00	KELURAHAN BATU
	7.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	-			-	28.480.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					-	28.480.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				72 Pokmas / Ormas	28,480,000						72 Pokmas / Ormas	30,000,000	
		KECAMATAN BARANTI						**3,822,529,000**							**5,204,422,975**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3,822,529,000**							**5,204,422,975**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3,822,529,000**							**5,204,422,975**	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.755.429.000,00						-	4.758.464.475,00	
		[Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan]	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	3.755.429.000,00							4.758.464.475,00	
	7.01.012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	7.01.012.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.000.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.497.729.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.569.622.975,00	
	7.01.012.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				448 Orang/bulan	3.497.729.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.569.622.975,00	KECAMATAN BARANTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daera						33,755,000							211,040,500	
	7.01.012.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	4,000,000						6 Paket	13,063,000	KECAMATAN BARANTI
	7.01.012.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	17,680,000						6 Paket	98,586,000	KECAMATAN BARANTI
	7.01.012.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	3,070,000						6 Paket	61,070,000	KECAMATAN BARANTI
	7.01.012.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	3,605,000						6 Paket	18,641,500	KECAMATAN BARANTI
	7.01.012.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	5,400,000						4 Laporan	19,680,000	KECAMATAN BARANTI
	7.01.012.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	26.068.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		78.798.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	71,377,000						-	237,483,000	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	27,000,000							67,483,000	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	44.377.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		170.000.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	95,000,000						-	485,134,000	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	7,000,000						4 Laporan	13,000,000	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	19,000,000							63,209,000	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	69.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		408.925.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	30,500,000						-	175,386,000	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	20,000,000							30,632,000	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	1,000,000						2 Unit	1,000,000	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	1,500,000							19,554,000	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	8.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		124.200.000,00	KECAMATAN BARANTI
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	3.600.000,00						-	3.600.000,00	
		[Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik]														
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat														
		Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama	-	-			-	3.600.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	3.600.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	1.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.800.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	1.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.800.000,00	KECAMATAN BARANTI
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan]	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	100		100	6.300.000,00							385.158.500,00	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	1.800.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.800.000,00	
	7.01.03.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	1.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		1.800.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahaan					-	4,500,000						-	383,358,500	KECAMATAN BARANTI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	1,000,000							294,858,500	KECAMATAN BARANTI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		86.000.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	2,500,000						12 Laporan	2,500,000	KECAMATAN BARANTI
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	3.600.000,00						-	3.600.000,00	
		[Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah]	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100		100	3.600.000,00							3.600.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-												
		Terlaksananya Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum					-	3.600.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	3.600.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	3.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.600.000,00	KECAMATAN BARANTI
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-												
		[Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat]	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100		-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	KECAMATAN BARANTI
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-												
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan]					100	3.600.000,00					100.00		3.600.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						3.600.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	3.600.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	4 Dokumen	1.800.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.062.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				4 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	4 Dokumen	1.800.000,00	KECAMATAN BARANTI
		KELURAHAN BARANTI						**262,000,000**							**312,980,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**312,980,000**	
7	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan]	-	-	-	-	-	181.141.500,00							215.921.500,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	34,015,500						-	52,890,000	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1,063,000						3 Paket	1,063,000	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	7,906,000						3 Paket	31,642,000	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	7.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Baranti	-	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	3 Paket	2.139.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3.036.500,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Baranti	-	-	-	-	4 Paket	3.036.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	2.280.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Baranti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	4 Laporan	2.280.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	12,730,000						4 Laporan	12,730,000	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-												
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	55.106.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	60.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	5.106.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Baranti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	69.134.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	69.525.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Baranti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	4 Laporan	2.200.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12.209.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Baranti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Bulan	11.400.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	55.925.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Baranti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	4 Laporan	55.925.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	22,886,000						-	33,506,500	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2.632.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Baranti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	2.632.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	1,000,000						3 Unit	1,000,000	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	19.554.000,00	5	19.554.000,00	5.00	19.554.000,00	5.00	19.554.000,00	5.00	19.554.000,00	4,734,000	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.200.000,00	1 Unit						25.140.500,00	KELURAHAN BARANTI
8	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				100	80.858.500,00						100	97.058.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahaan						80.858.500,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	97.058.500,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	65.858.500,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Baranti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		82.058.500,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Baranti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	KELURAHAN BARANTI
		KELURAHAN PANRENG														
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**312,980,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**312,980,000**	
9	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-												
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	197.000.000,00						-	197.500.000,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	40,000,000						-	41,000,000	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2,000,000						3 Paket	2,000,000	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	20,000,000							20,000,000	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng Utama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.000.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng Utama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.500.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	3.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	-		3.500.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	10,000,000						4 Laporan	10,000,000	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-												
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	45.000.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	50.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng Utama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	35.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng Utama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	40.000.000,00	KELURAHAN PANRENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	81.500.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	81.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng Utama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.000.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		8.000.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka				4 Laporan	71.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		70.000.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.20.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	30.500.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	25.500.000,00	
	7.01.01.20.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2,000,000						2 Unit	2,000,000	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.20.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3,500,000						3 Unit	3,500,000	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.20.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	1 Unit						20.000.000,00	KELURAHAN PANRENG
10	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				100	65.000.000,00						100	65.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa						65.000.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	65.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng Utama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng Utama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	KELURAHAN PANRENG
		KELURAHAN DUAMPANUA						**262,000,000**							**261,500,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**261,500,000**	
11	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	197.000.000,00						-	196.500.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	40,000,000						-	40,000,000	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2,000,000						3 Paket	2,000,000	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	20,000,000						4 Paket	20,000,000	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Duampanua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	2 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Duampanua	-	-	-	-	4 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Duampanua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.000.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	10,000,000						4 Laporan	10,000,000	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	45.000.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	50.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Duampanua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	5 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	35.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	40.000.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	81.500.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	81.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Duampanua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	4 Laporan	3.000.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Duampanua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	4 Laporan	8.000.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	71.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Duampanua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		70.000.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	30.500.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	25.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	2,000,000						3 Unit	2,000,000	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3,500,000						4 Unit	3,500,000	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	1 Unit						20.000.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
12	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						65.000.000,00						-	65.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						65.000.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	65.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Duampanua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	50.000.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Duampanua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	2 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
		KELURAHAN MANISA														
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**312,980,000**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	**KECAMATAN**														
13	7.01.01.2.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-												
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	197.000.000,00						100	191.500.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	40,000,000						-	40,000,000	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	40,000,000						-	40,000,000	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2,000,000						2 Paket	2,000,000	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	20,000,000						2 Paket	20,000,000	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Mamminasae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Mamminasae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	4 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Mamminasae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	4 Laporan	3.000.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	10,000,000						4 Laporan	10,000,000	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-												
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	45.000.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	45.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Mamminasae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	35.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Mamminasae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	35.000.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	81.500.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	81.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	81.500.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	81.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Mamminasae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	4 Laporan	3.000.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Mamminasae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	4 Laporan	8.000.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	71.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		70.000.000,00	KELURAHAN MANISA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-												
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	30.500.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	25.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2,000,000						2 Unit	2,000,000	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3,500,000						3 Unit	3,500,000	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25,000,000	1 Unit						20.000.000,00	KELURAHAN MANISA
14	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
		Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100	65.000.000,00						100	65.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahaan						65.000.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	65.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Mamminasae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	50.000.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Mamminasae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	KELURAHAN MANISA
		KELURAHAN BENTENG						**262,000,000**							**267,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**262,000,000**							**267,000,000**	
	7.01	**KECAMATAN**														
15	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-												
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	182.000.000,00						-	187.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							25,000,000	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2,000,000						2 Paket	2,000,000	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	3,000,000						-	3,000,000	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	3 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17	6		6	18.641.500,00	6.00	18.641.500,00	6.00	18.641.500,00	6.00	6	2.000.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.06.0008	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	3,000,000						4 Laporan	3,000,000	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP				4 Laporan	12,000,000						4 Laporan	12,000,000	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-												
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	35.000.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		20.000.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-												
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	91.000.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	91.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	4 Laporan	3.000.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	11.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	4 Laporan	11.000.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	77.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	4 Laporan	77.000.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	31.000.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	36.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2,000,000						2 Unit	2,000,000	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	4,000,000						3 Unit	4,000,000	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	25,000,000							30,000,000	KELURAHAN BENTENG
16	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-												
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				100	80.000.000,00						100	80.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	80.000.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	80.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahaan					-	80.000.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	80.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangu				3 Unit	65.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	65.000.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	15,000,000	). Sidenreng Rappang, Baranti, Bent	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	ng berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digitalPerba	-	2 Pokmas / Ormas	15,000,000	KELURAHAN BENTENG
		KECAMATAN PANCA RIJANG						**3,777,546,000**							**3,849,309,500**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3,777,546,000**							**3,849,309,500**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3,777,546,000**							**3,849,309,500**	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.716.926.000,00						-	3.788.689.500,00	
		[Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan]	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100		100	3.716.926.000,00						100	3.788.689.500,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
		Terselenggaranya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-	3,450,350,000						-	3,522,113,500	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38/14 Orang/bulan	3.450.350.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	38/14 Orang/bulan	3.522.113.500,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	68,014,500						-	69,014,500	KECAMATAN PANCA RIJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah														
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4,219,000						12 Paket	4,219,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu														
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	61.267.500,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		62.267.500,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
		Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah					-	51,400,000						-	50,400,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	9,400,000						12 Unit	9,400,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	42.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	4 Unit	41.000.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,190,000						12 Laporan	1,190,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	46,150,000						12 Laporan	46,150,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	68.741.500,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	68.741.500,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
		Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah					-	31,080,000						-	31,080,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	19,610,000						2 Unit	19,610,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	2,930,000						3 Unit	2,930,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8.540.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		8.540.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	2.400.000,00						-	2.400.000,00	
		[Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik]	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik													
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-												
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					-	2.400.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	2.400.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	2.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.400.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan]	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	100	100	100	2.400.000,00							2.400.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-												
		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan					-	2.400.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	2.400.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Terselenggaranya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	2.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.400.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
		[Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah sasaran : RENSTRA]	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	1500000,00							1.500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	1.500.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	1.500.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
		[Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat]	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100		100	50,000,000						100	50,000,000	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					-	50,000,000			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	50,000,000	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	50,000,000						12 Dokumen	50,000,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			100	4320.000,00						100	4.320.000,00	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan]	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			100	4.320.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	4.320.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	1.440.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Dokumen	1.440.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.06.2.01..0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				12 Dokumen	1.440.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Dokumen	1.440.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	1,440,000						12 Dokumen	1,440,000	
		KELURAHAN RAPPANG						**262,000,000**							**261,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**261,000,000**	
7	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-												
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	165.000.000,00						100	211.000.000,00	KELURAHAN RAPPANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-												
		Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	28.981.500,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	28.981.500,00	KELURAHAN RAPPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3,701,500						12 Paket	3,701,500	KELURAHAN RAPPANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	11,860,000						12 Laporan	11,860,000	KELURAHAN RAPPANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-			-	56.502.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	95.502.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	56.502.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	4 Unit	95.502.000,00	KELURAHAN RAPPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-			-	76.042.500,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	83.042.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	950.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	950.000,00	KELURAHAN RAPPANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11.860.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	11.860.000,00	KELURAHAN RAPPANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	63.232.500,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	70.232.500,00	KELURAHAN RAPPANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					-	3,474,000						-	3,474,000	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 unit	1.474.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang					1 unit	1.474.000,00	KELURAHAN RAPPANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	2.000.000,00	KELURAHAN RAPPANG
8	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-												
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan				-	97.000.000,00						-	50.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-												
		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan					-	97.000.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	50.000.000,00	KELURAHAN RAPPANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	97.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	KELURAHAN RAPPANG
		KELURAHAN LALE BATA						**262,000,000**							**303,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**303,000,000**	
9	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	14,910,000						100	14,910,000	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-												
		Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	14.910.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	14.910.000,00	KELURAHAN LALE BATA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1.410.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Lelebata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	1.410.000,00	KELURAHAN LALE BATA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	13,500,000						12 Laporan	13,500,000	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-												
		Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah					-	56.000.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	56.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				24 Unit	24.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	24 Unit	24.000.000,00	KELURAHAN LALE BATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	32,000,000						4 Unit	32,000,000	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-												
		Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	70.710.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	70.710.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6.450.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Lelebata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		6.450.000,00	KELURAHAN LALE BATA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	64.260.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Lelebata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		64.260.000,00	KELURAHAN LALE BATA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
		Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						6.232.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Lelebata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		6.232.000,00	KELURAHAN LALE BATA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
0		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6.232.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Lelebata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		6.232.000,00	KELURAHAN LALE BATA
10	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-												
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				-	114.148.000,00						-	155.148.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-												
		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan					-	114.148.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	155.148.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	114.148.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		155.148.000,00	KELURAHAN LALE BATA
		KELURAHAN MACCORAWALIE						**262,000,000**							**262,000,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**262,000,000**	
11	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	125,400,000						-	94,900,000	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-												
		Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	15.289.500,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	16.289.500,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan					12 Paket	2,562,000						12 Paket	2,362,000	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12,727,500	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Maccorawalie	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		13,927,500	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-												
		Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daera					-	20.000.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Maccorawalie	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	KELURAHAN MACCORAWALIE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-												
		Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	75.636.500,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	75.636.500,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Maccorawalie	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		900.000,00	KELURAHAN MACCORAWALIE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Maccorawalie	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.500.000,00	KELURAHAN MACCORAWALIE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	62.236.500,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Maccorawalie	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		62.236.500,00	KELURAHAN MACCORAWALIE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-												
		Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah					-	14.474.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	2.974.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1,474,000						1 Unit	1,474,000	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3,000,000						5 Unit	1,500,000	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Maccorawalie					1 Unit	0,00	KELURAHAN MACCORAWALIE
12	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaa				100	136.600.000,00						100	167.100.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan					-	136,600,000			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	167,100,000	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	130,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Maccorawalie	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		160,500,000	KELURAHAN MACCORAWALIE
	7.01.03.2.02..0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	6,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Maccorawalie	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	4 Pokmas / Ormas	6,600,000	KELURAHAN MACCORAWALIE
		KELURAHAN KADIDI						**262,000,000**							**284,684,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
	7.01	**KECAMATAN**						**262,000,000**							**284,684,000**	
13	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	84,316,000						100	107,000,000	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	12.378.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	12.250.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	2,378,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Kadidi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Paket	2,250,000	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Kadidi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	10,000,000	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-												
		Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah					-	6.365.000,00			-	-	-	-	28.380.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.365.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Kadidi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Unit	28.380.000,00	KELURAHAN KADIDI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-												
		Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	62.919.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	61.716.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	840.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	840.000,00	KELURAHAN KADIDI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Kadidi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	9.000.000,00	KELURAHAN KADIDI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	53.079.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Kadidi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	51.876.000,00	KELURAHAN KADIDI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
		Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah					-	2,654,000			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	4,654,000	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabataN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	1,474,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Kadidi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	1,474,000	KELURAHAN KADIDI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	1.180.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Kadidi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Unit	3.180.000,00	KELURAHAN KADIDI
14	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-												
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				-	177.684.000,00						-	177.684.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-												
		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan					-	177.684.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	177.684.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	177.684.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Kadidi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	177.684.000,00	KELURAHAN KADIDI
		KECAMATAN KULO						**1,690,046,000**							**1,434,033,225**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1,690,046,000**								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	**KECAMATAN**						**1,690,046,000**							**1,434,033,225**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**														
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,627,608,000**	-	-	-	-	-	-	**1,371,491,225**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-												KECAMATAN KULO
		Tersedianya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	1,170,846,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,080,729,225	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				204 Orang/bulan	1,170,846,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	204 Orang/bulan	1,080,729,225	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	-	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	0 Dokumen	-	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	102,809,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	97,652,775	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				40 Paket	3,050,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	40 Paket	3,050,000	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	23,736,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	5 Paket	18,579,775	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					-	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		-	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				16544 Paket	8,273,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	16544 Paket	8,273,000	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				56091 Laporan	28,046,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	56091 Laporan	28,046,000	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				397 Laporan	39,704,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	397 Laporan	39,704,000	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	22,110,000			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	22,110,000	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	22,110,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	30 Unit	22,110,000	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	116,966,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	115,966,000	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				120 Laporan	1,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	120 Laporan	1,200,000	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	32,520,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	32,520,000	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	83,246,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	82,246,000	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	214,877,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	55,033,225	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	21,026,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	21,026,000	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	5,124,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	24 Unit	5,124,000	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	188,727,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	28,883,225	KECAMATAN KULO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					-	1,596,000						-	1,700,000	
		[Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik]	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100		100	1,596,000	-	-	-	-	-	100	1,700,000	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	1,596,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,700,000	KECAMATAN KULO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	456,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	560,000	KECAMATAN KULO
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1,140,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1,140,000	KECAMATAN KULO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					100	6,118,000						100	6,118,000	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan]	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	100	100	100	6,118,000	-	-	-	-	-	100	6,118,000	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	6,118,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	6,118,000	KECAMATAN KULO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	6,118,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	2 Laporan	6,118,000	KECAMATAN KULO
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-	1,000,000						-	1,000,000	
		[Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah]	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	1,000,000	-	-	-	-	-	100	1,000,000	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	1,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	1,000,000	KECAMATAN KULO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	1,000,000	KECAMATAN KULO
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					-	50,000,000						-	50,000,000	
		[Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat]	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	50,000,000	-	-	-	-	-	100	50,000,000	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	50,000,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	50,000,000	KECAMATAN KULO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	4 Dokumen	50,000,000	KECAMATAN KULO
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					-	3,724,000						-	3,724,000	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan]	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	3,724,000	-	-	-	-	-	100	3,724,000	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	3,724,000			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	-	3,724,000	KECAMATAN KULO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1,064,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	1,064,000	KECAMATAN KULO
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1,520,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	1,520,000	KECAMATAN KULO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1,140,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Perbaikan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	-		1,140,000	KECAMATAN KULO
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						4,911,729,000							4,954,812,450	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						4,911,729,000							4,954,812,450	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						4,911,729,000							4,954,812,450	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	2,088,029,000							2,126,112,450	
		[Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien]	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	2,088,029,000	-	-	-	-	-	-	2,126,112,450	-
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15,500,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	19,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	4 Dokumen	3,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	1 Dokumen	3,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	2 Dokumen	4,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Dokumen	3,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	2 Dokumen	4,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	2,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	-	4 Laporan	2,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,613,979,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	1,643,062,450	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				252 Orang/bulan	1,606,979,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	252 Orang/bulan	1,636,062,450	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	1 Laporan	1,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	-	4 Laporan	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	91,586,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	91,586,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	4,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	25 Paket	4,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				127 Laporan	87,086,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	127 Laporan	87,086,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	40,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	40,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	5 Unit	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	8 Unit	30,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	206,500,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	211,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	3,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	60 Laporan	3,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	12 Laporan	35,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	173,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	12 Laporan	173,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	120,464,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	120,464,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	73,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	11 Unit	73,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	7,264,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	11 Unit	7,264,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	19 Unit	20,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	1 Unit	20,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					-	674,000,000						-	674,000,000	
		[Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan]	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100	50	0	80	674,000,000	-	-	-	-	-	80	674,000,000	-
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	674,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	674,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	1 Dokumen	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	1 Dokumen	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				70 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	70 Orang	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				70 Orang	56,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	70 Orang	56,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Laporan	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	1 Laporan	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				1 Keluarga	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	1 Keluarga	5,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
		Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	1 Dokumen	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka				55 Orang	565,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	55 Orang	565,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila														
		Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasil	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	1 Dokumen	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila														
		Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	1 Dokumen	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														
		Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				55 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	55 Orang	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					-	1,018,700,000						-	1,023,700,000	
		[Meningkatnya Etika dan Budaya Politik]	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik	100	90	0	100	1,018,700,000	-	-	-	-	-	100	1,023,700,000	-
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	1,018,700,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	1,023,700,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				4 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	4 Dokumen	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				4 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	4 Dokumen	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	988,700,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	-	100 Orang	993,700,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				30 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	30 Orang	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				4 Laporan	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	4 Laporan	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka														
		Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka				1 Kegiatan	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	1 Kegiatan	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					-	30,000,000						-	30,000,000	
		[Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan]	Persentase Organisasi Masyarakat dan Masyarakat yang Diberdayakan	80	0	0	80	30,000,000	-	-	-	-	-	80	30,000,000	-
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	30,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	30,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				4 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	4 Dokumen	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				4 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	4 Dokumen	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	100 Orang	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				25 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	25 Orang	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				5 Laporan	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	5 Laporan	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					-	318,000,000						-	318,000,000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat]	Persentase Pembinaan dan Pengembangan KetahananEkonomi, Sosial, dan Budaya	100	90	0	85	318,000,000	-	-	-	-	-	85	318,000,000	-
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	318,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	318,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusu				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	1 Dokumen	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	2 Dokumen	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				150 Orang	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	150 Orang	100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan UmatBeragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				150 Orang	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	150 Orang	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				6 Laporan	200,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	6 Laporan	200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					-	783,000,000						-	783,000,000	
		[Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan]	Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah	100	100	100	100	783,000,000	-	-	-	-	-	100	783,000,000	-
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	783,000,000			-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	-	783,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	4,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	1 Dokumen	4,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	4,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	1 Dokumen	4,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	4,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	50 Orang	4,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				240 Orang	90,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	240 Orang	90,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	4,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Kesejah teraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkata n Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-	12 Laporan	4,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan ForumKoordinasi Pimpinan DaerahKabupaten/Kota				12 Dokumen	675,000,000	Kab. Sidenreng	PENDAPATAN	-	4. Peningka	-	12 Dokumen	675,000,000	BADAN KESATUAN
	J U M L A H							**1,331,563,071,500**							**1,370,768,189,766**	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan cerminan dari kemampuan dan efektivitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang diukur melalui berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup berbagai aspek fundamental yang terukur melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan. Efektivitas pelayanan publik menjadi indikator utama yang menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mampu memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat.

Penetapan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 kemudian pada proses pengukurannya diterjemahkan ke dalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah ke dalam kinerja tahunan daerah. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pemerintahan jangka menengah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 menjadi tolok ukur pencapaian prioritas pembangunan daerah karena merupakan indicator dari tujuan dan sasaran yang langsung diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. Sedangkan IKD adalah indikator daerah yang mengukur kinerja pelaksanaan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat.

6.1. Indikator Makro Pembangunan

Indikator Makro Pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang dilaksanakan pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan dan bidang pemeintahan.

Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta arahan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya daerah dan mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun

2025-2029. Penetapan target ini dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, kemampuan kelembagaan, dan daya dukung sumber daya manusia yang tersedia di kabupaten. Tujuh indikator kinerja makro tersebut sebagaimana dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Penetapan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target	
				2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	4.05	4.25	4.95
2	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	59.31	61.83	64.89
3	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	5.02	4.6-4.01	4.45-3.55
4	Rasio Gini (Indeks)	Indeks	0.319	0.313	0.306
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	3.02	2.93	2.84
6	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	Indeks	74.81	75.10	75.44
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Persen	3.04	11.94	13.27
8	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	Persen	2.74	2.77	2.80
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	Indeks	67,96	73.92	77.14

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah. 2025

Tujuh indikator makro pembangunan merepresentasikan capaian fundamental pembangunan daerah yang dihasilkan dari sinergi berbagai program pemerintah dan stakeholder. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 4,95% pada tahun 2026, menunjukkan optimisme pemulihan ekonomi daerah. PDRB per kapita yang ditargetkan Rp 64,89 juta mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat. Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas dengan target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 3,55-4,45% dan perbaikan distribusi pendapatan melalui penurunan rasio Gini menjadi 0,306. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pembangunan sumber daya manusia difokuskan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 75,44 dan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,84%, mencerminkan upaya peningkatan kualitas hidup dan penciptaan lapangan kerja. Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan tercermin dalam target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menjadi 13,27%, menunjukkan integrasi aspek lingkungan dalam setiap program pembangunan daerah.

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang paling fundamental dalam mengukur pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. IKU ditetapkan sebagai indikator yang secara langsung menggambarkan dampak dan outcome dari

seluruh program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam periode perencanaan tertentu. Penetapan IKU didasarkan pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan menjadi fokus utama dalam pencapaian target kinerja pemerintahan daerah.

Proses penetapan IKU melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi eksisting daerah, identifikasi isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan, dan penyesuaian dengan arahan kebijakan nasional dan regional. IKU harus mampu menggambarkan perubahan kondisi yang diharapkan terjadi sebagai hasil dari implementasi kebijakan dan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan IKU tidak hanya mempertimbangkan aspek kuantitatif semata, tetapi juga kualitas dan dampak jangka panjang terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks akuntabilitas kinerja pembangunan daerah, IKU berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi yang memberikan gambaran objektif tentang tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan-tujuan strategisnya. Melalui IKU, stakeholder dan masyarakat dapat menilai sejauh mana komitmen dan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan janji-janji pembangunan yang telah ditetapkan. Transparansi dalam pelaporan pencapaian IKU menjadi wujud nyata dari prinsip good governance yang mengutamakan akuntabilitas publik. Penetapan indikator kinerja utama dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 telah menetapkan 26 indikator tujuan dan sasaran yang mencerminkan arah pembangunan daerah sesuai visi “Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) dipilih secara strategis untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah dalam mewujudkan janji politik dan program unggulan, sekaligus memastikan keselarasan dengan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, seperti pengentasan kemiskinan, swasembada pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan pembangunan berkelanjutan. Pemilihan 12 IKU ini, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, bertujuan untuk memfokuskan evaluasi pada indikator yang bersifat SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), strategis, dan mampu mencerminkan dampak pembangunan yang signifikan bagi masyarakat Sidenreng Rappang. Selanjutnya disajikan pada table berikut ini:

Tabel 6.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target	
				2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.05	4.25	4.95
2	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	87.92	88.27	88.62

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target	
				2025	2026
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	5.02	4.6-4.01	4.45-3.55
4	Rasio Gini	Rasio	0.319	0.313	0.306
5	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	59.31	61.83	64.89
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.02	2.93	2.84
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74.81	75.10	75.44
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67.96	73.92	74.14
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	3.04	11.94	13.27
10	Angka Kriminalitas	Kasus	834	820	766
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68.51	70.29	72.07
12	Indeks Infrastruktur	Indeks	75.79	77.29	79.34

Sumber: Tim Penyusun RKPD 2026, diolah

6.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah meliputi beberapa kategori yang komprehensif. Pertama, Indikator Makro Pembangunan yang mengukur capaian pembangunan daerah secara keseluruhan. Kedua, Indikator Pokok Visi RPJPD. Ketiga, Indikator Utama Pembangunan RPJPD (IUP). Keempat, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator spesifik untuk mengukur keberhasilan program strategis yang terdiri dari Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengukur aspek tata kelola pemerintahan serta Indikator Permendagri 18 Tahun 2020 tentang LLPD. Kelima, Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memastikan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Keenam, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang mengintegrasikan agenda global dalam pembangunan daerah.

6.3.1. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen pengukuran yang lebih spesifik dan operasional dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama, yang dirancang untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis dalam setiap urusan pemerintahan daerah. IKK berfungsi sebagai alat ukur yang menerjemahkan tujuan-tujuan strategis ke dalam parameter yang lebih konkret dan dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan IKK didasarkan pada analisis mendalam terhadap faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan menjadi fokus perhatian dalam implementasi program-program prioritas. Karakteristik mendasar dari Indikator Kinerja Kunci adalah sifatnya yang actionable, relevant, dan time-bound, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih detail dan berkelanjutan. IKK biasanya mencakup indikator-

indikator yang berkaitan dengan output program, efisiensi pelaksanaan kegiatan, kualitas pelayanan publik, dan dampak langsung dari implementasi kebijakan daerah. Setiap IKK harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan Indikator Kinerja Utama dan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian visi dan misi daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah secara keseluruhan selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
1	*Ketahanan Energi, Air dan Pangan*					
	a) Ketahanan Energi					
	b1. Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh	174,61	265,5	279,81	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
	b) Ketahanan Pangan					
	b1. Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	87,92	88,27	88,62	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	b2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	4,58	4,49	4,4	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	b3. Skor Pola Pangan Harapan	%	88,41	89	89,5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	c) Ketahanan air					
	c1. Kapasitas Air Baku	m3/detik	2.979,16	18.921,60	19.315,80	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan & Perumahan Rakyat

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
	c2 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	20,96	34,45	40,84	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan & Perumahan Rakyat
2	*Kualitas Lingkungan Hidup*					
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	Indeks	67,98	65,98	67,21	Dinas Lingkungan Hidup
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	3,7	5,79	6,72	Dinas Lingkungan Hidup
	c) Pengelolaan Sampah					
	c1 Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen		20,03	27,52	Dinas Lingkungan Hidup
	c2 Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%		80	85	Dinas Lingkungan Hidup
3	*Penurunan Intensitas Emisi GRK*	%	3,04	11,94	13,27	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
	a) Kumulatif (%)	%		0,23	0,35	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
	b) Tahunan (%)	%		1,05	1,53	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
4	Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	119,2	118,9	118,4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,19	1	0,82	Dinas Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
6	Rasio Penduduk	%		98,15	98,16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil
7	Kepadatan Penduduk	Orang/ Km^2	175,34	176,59	177,84	Dinas Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil
8	*Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati*					
	a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	%	1,23	1,25	1,43	Dinas Lingkungan Hidup
9	Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati					
	b) Indeks pertanaman (IP) padi	indeks	2	3	3	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	c) Proporsi sawah irigasi	%	70	71	72	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	d) Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	1.240,78	1.265,59	1.290,91	Dinas Peternakan dan Perikanan
	e) Angka Konsumsi Ikan/Pengeluaran Konsumsi Ikan	Rp	16,492	17000	18000	Dinas Peternakan dan Perikanan
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,05	4,25	4,95	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,02	4.6 - 4.01	4.45 - 3.55	
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	59,31	61,83	64,89	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,02	2,93	2,84	
5	Indeks Gini	Indeks	0,319	0,313	0,306	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,81	75,1	75,44	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
7	Indeks Kesehatan	Indeks	83,77	84	84,4	Dinas Kesehatan
8	Angka Kriminalitas	Kasus	834	820	766	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
9	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan	%	18,71	18,99	19,34	Sekretariat Daerah
10	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	55,26	55,36	55,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,45	74,62	74,79	Dinas Kesehatan
12	*Kesehatan Ibu dan Anak*					
	a) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (%)	%	95	95	96,25	Dinas Kesehatan
	b) Jumlah kematian Ibu (kasus)	Kasus	8	8	7	Dinas Kesehatan
	c) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	23,3	23,3	22,05	Dinas Kesehatan
	d) Jumlah Kematian anak/balita (kasus)	Kasus	0	0	0	Dinas Kesehatan
13	*Penanganan Tuberkulosis:*					
	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	52,53	65	68	Dinas Kesehatan
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	86,4	87,264	88,14	Dinas Kesehatan
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	75	80	84	Dinas Kesehatan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
15	Indeks Pendidikan	%	74,81	75,1	75,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	*Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota untuk:*					
	a) Kemampuan Literasi SD	%	58,07	60,57	63,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b) Kemampuan Numerasi SD	%	52,96	55,86	58,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	c) Kemampuan Literasi SMP	%	66,43	67,53	68,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	d) Kemampuan Numerasi SMP	%	59,46	60,96	62,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	8,21	8,22	8,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,03	13,04	13,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	*Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi*					
	a) Angka partisipasi kasar SMA(%)	%	85,31	85,31	85,87	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
	b) Angka partisipasi kasar perguruan tinggi(%)	%	26,41	26,41	26,98	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
20	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan (%)	%	8,66	8,66	9,98	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
21	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	12,35	54	59	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%`	9,8	10	11,48	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	%	61,19	62,91	64,63	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
24	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	40,86	42,86	51,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/ fasilitasi oleh pemerintah daerah	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
26	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	66	66	66,66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
27	Indeks perlindungan anak (IPA)	%	62,45	62,45	62,45	
28	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	63	63	64,25	
29	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,32	93,51	93,7	
30	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Indeks	N/A	67,25	69,87	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	Skor	84,23	94,34	104,45	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
2	Kontribusi PDRB Pengolahan (%)	%	15,09	15,54	16,32	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
3	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,29	3,41	3,53	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
4	*Pengembangan Pariwisata*					
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	0,81	0,85	0,875	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (orang)/ Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara (%)	%	0,81	0,85	0,875	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kabupaten/kota (unit)	Unit	125	140	155	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
6	*Produktifitas UMKM, Koperasi, BUMD*					
	a) Jumlah industri kecil dan menengah pada level kab/kota (unit)	Unit	140	150	168	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	b) Persentase koperasi sehat di kab/kota (%)	%	61,11	63	65	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	c) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	0,0605	0,0605	0,06655	Sekretariat Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
	d) Produktifitas padi (ton/Ha)	%	447.856	453.779,00	494.317,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	e) Jumlah produksi perikanan (ton)	Ton	2.334,00	2380,68	2428,29	Dinas Peternakan dan Perikanan
7	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	-0,78	3	5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
8	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	96,98	97	97,5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	*Tingkat Penguasaan IPTEK*					
	a) Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	2,69	2,88	3,07	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
10	*Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau*					
	a) Indeks Ekonomi Hijau (indeks)	Indeks	64,93	64,93	70,43	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	39,14	39,14	39,27	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
12	Net Ekspor Barang dan Jasa	%	0,1	0,1	0,15	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
13	*Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan*					

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
	a) Kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi	%	2,74	2,77	2,8	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (jumlah RT)	%	82,08	82,08	84,93	Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
	c) Indeks Infrastruktur	Indeks	81,24	76,91	77,38	
	d) Persentase Desa Mandiri	%	0,4853	51,47	54,41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,97	0,98	0,995	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
15	Tingkat Inflasi	%	1,03	1,03	1,025	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
16	Pertumbuhan Investasi Daerah (%)	%	5,75	5,77	5,8	Dinas Penanam Modal
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	33,81	35,53	37,25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	%	89	90	91	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (%)	%	11,62	10	10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
20	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks		80,41	81,85	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
21	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,89	3,96	4	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	64.13 (2023)	70,13	72,93	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	58,81	59	61,3	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,51	70,29	72,07	Sekretariat Daerah
3	Nilai SAKIP	Nilai	65,08	67,15	69,22	Sekretariat Daerah
4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	47,72	50,58	53,62	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	75.46	76.59	77.74	
6	Indeks SPBE	Indeks	3,04	3,22	3,42	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	1,73	2,03	2,33	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
8	a) Indeks Survey Penilaian Integritas (indeks)	Indeks	67,21	70,12	75,07	Inspektorat
	b) Nilai MCP KPK (nilai)	nilai	85	85,4	86,92	Inspektorat
	c) Indeks Maturitas SPIP (indeks)	Indeks	3	3	3	Inspektorat
9	Persentase Penegakan Hukum PERDA	%	83	90	90	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
10	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur	Indeks	3,28	3,29	3,3	Bapperida

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
11	Persentase tindak kriminal yang ditangani	%	89	89,5	89,6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	a) Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	%	15	15	16	DPRD
	b) Perda yang merupakan inisiatif DPRD	Jumlah	3	3	3	DPRD
	c) Persentase perempuan pengurus partai politik	%	15	15	16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12	Jumlah Kerja Sama Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (*Sister Province*/ Sister City) (jumlah)	Jumlah	8	8	9	Sekretariat Daerah
	INDIKATOR KINERJA KUNCI					
A	Pendidikan					
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD	%	81,6	84,56	87,53	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	%	99,79	99,82	99,85	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	87,03	88,88	90,73	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	%	16,88	17,64	18,4	Dinas Pendidikan dan kebudayaan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
B	Kesehatan					
1	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	%	0,15	0,16	0,16	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota Yang Terakreditasi	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
3	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	96,09	100	100	Dinas Kesehatan
4	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	%	98,1	100	100	Dinas Kesehatan
5	Persentase Bayi Baru Lahirmendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	97,4	100	100	Dinas Kesehatan
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	99,45	100	100	Dinas Kesehatan
7	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	96,59	100	100	Dinas Kesehatan
8	Persentase Orang Usia 15-29 Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	97,56	100	100	Dinas Kesehatan
9	Persentase Orang Usia 60 Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	83,22	100	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	41,19	100	100	Dinas Kesehatan
11	Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	95,95	100	100	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	%	97,78	100	100	Dinas Kesehatan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
13	Persentase Orang Terduga TBC Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar	%	86,85	100	100	Dinas Kesehatan
14	Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Yang Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	%	82,09	100	100	Dinas Kesehatan
C	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
1	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota	%				Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
2	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota	%	73	75	78	Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
3	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	%	79,95	82	85	Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
4	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kab/Kota	%	93,98	94,59	95,21	Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
5	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	%	20,78	21	22	Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
6	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota	%	60,91	40,78	40,791	Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
7	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	100	100	100	Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
8	Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	%	100	100%	100%	Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
D	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman					
1	Penyedian Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	%	100%	100%	100%	Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota	%	100%	100%	100%	
3	Persentase Kawasan Pemukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kab/Kota Yang Ditangani	%	19%	25%	35%	Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
4	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	11%	22%	39,80%	Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
5	Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum)	Unit	7	9	15	Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
E	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
1	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	%	89	90	90	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	80	80	80	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Menit	7,8	8	8,2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Orang	937	35	35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang	1,087	35	35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1,369	960	960	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
F	Sosial					
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan. Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%		100	100	Dinas Sosial

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
2	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	Dinas Sosial
G	Tenaga Kerja					
1	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	%	0	0	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	30	32	34	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	%	6,61	7,5	8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Persentase Perusahaan Yang Menyerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKN,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan)	13,75	15	17	20	
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kab.	%	16,32	16,5	18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
H	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
1	Persentase Anggaran Responsif Gender Pada Belanja Langsung APBD	%	89,78	90	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
2	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	%	100%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	per 100 rb	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
I	Pangan					
1	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)	%	3,33	20	15,42	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
J	Pertanahan					
1	Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan	%	100%	100%	100%	Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100%	100%	100%	Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%				
4	Tersedianya Tanah Obyek Landrefor (TOL) Yang Siap Didistribusikan Yang Berasal Dari Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	%				Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
5	Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	%				

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
6	Penangan Sengketa Tanah Yang Dilakukan Melalui Mediasi	%	54,76	60	65	Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
K	Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab	Nilai	67,96	73,92	77,14	Dinas Lingkungan Hidup
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	%	74,14	75	76	Dinas Lingkungan Hidup
3	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab	%	97,14	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
L	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					
1	Perekaman KTP Elektronik	%	99,48	99,5	99,6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase Anak 01 - 17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memilki KIA	%	64,62	65	65,25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	95,46	95	96,05	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	OPD	7	3	3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
M	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa					
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	1,47	1,47	1,47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	48,53	51,47	54,41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
N	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana					
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	nilai	2,07	2,08	2,09	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr)	%	68,61	55,9	57,4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Persentase Kebutuhan Ber KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	7,9	12,5	11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
O	Perhubungan					
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	%	0,5	0,5	0,5	Dinas Perhubungan
2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Angka	0,29	0,2	0,21	Dinas Perhubungan
P	Komunikasi Dan Informatika					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Iternet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatiak
2	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatiak
3	Persentase Masyarakaat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Priorotas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	%	75,43	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatiak

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
Q	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah					
1	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	%	7	7,3	7,5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	%	16,53	17	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
R	Penanaman Modal					
1	Persentase Peningkatan Investasi Di Kab/Kota	%		0,63	0,63	Dinas Penanam Modal dan PTSP
S	Kepemudaan dan Olahraga					
1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,11	0,15	0,15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	1,39	1,5	1,5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	8	10	12	
T	Statistik					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
U	Persandian					
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	55,97	67	68	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
V	Kebudayaan					
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	89,01	90	92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
W	Perpustakaan					
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	68,48	69,48	70,48	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	93,86	93,96	94,06	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Y	Kearsipan					
1	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional Pasal 40 Dan Pasal 59 UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	%	72,31	75	75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	%	40,8	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	Kelautan dan Perikanan					
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap Dan Budidaya) Kabupaten/Kota	ton	3.822,00	3.898,52	3.976,49	Dinas Peternakan dan Perikanan
Z	Pariwisata					
1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	%	0	50	50	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota	%	0,15	30	30	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
3	Tingkat Hunian Akomodasi	%	30,97	1	1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	%	0,81	0,82	0,82	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	1,12	1,15	1,15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
AA	Pertanian					
1	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	%	536,43	5,52	5,69	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
AB	Perdagangan					
1	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan Dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	60,12	100	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	68,24	71,79	81,82	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapaannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	%	154,72	85	88	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
AC	Perindustrian					
1	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN Yang Ditetapkan Dalam RPIP	%	24,34	24,34	24,34	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
2	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	61	65	65	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	0	0	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	Persentase Jumlah Hasi; Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Yang Lokasinya Didaerah Kab	%	0	0	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Tekini	Ada/ Tidak	ada	ada	ada	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
AD	Transmigrasi					
1	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi	%	0	0	13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	%	0	0	100	
3	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	%	0	0	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
AD	Sekretariat Daerah					
1	Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi Yang Dibawa Ketahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama	%	0	0	0	Sekretariat Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
2	Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	87,59	90	90	Sekretariat Daerah
3	Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan	%	18,59	20	20	Sekretariat Daerah
AF	Sekretariat DPRD					
1	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	%	100	100	100	Sekretariat DPRD
AG	Perencanaan					
1	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra	%	100	100	100	
3	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
4	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
5	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
6	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
AH	Keuangan					
1	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	0	16,88	17,94	Badan Pendapatan Daerah
2	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
3	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah
4	Persentase Kesesuaian APBD Dengan KUA PPAS	%	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6	Persentase Realisasi Keuangan APBD	%	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	Persentase Aset Daerah yang Dikelola Dengan Baik	%	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
AE	Kepegawaian					
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan Menegah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	%	79,99	80,04	81,24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru Tenaga Kesehatan)	%	22,27	24,45	26,88	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
AJ	Pendidikan dan Pelatihan					
1	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%)(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	31,88	32	35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
AK	Penelitian dan Pengembangan					
1	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	%	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam pemanfaatan pembangunan daerah	%	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
AL	Inspektorat Daerah					
1	Jumlah Temuan BPK	Temuan	22	22	22	Inspektorat

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Tindakjanjuti	%	29,7	37,5	42,6	Inspektorat
3	Capaian Pemenuhan Indikator MCP KPK-RI	%	85			Inspektorat
4	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 3	%	90	92	94	Inspektorat
AM	Kecamatan					
1	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	Kecamatan
2	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	Kecamatan
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	100	100	100	Kecamatan
4	Cakupan ketentraman dan ketertiban umum	%	0	0	100	Kecamatan
5	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pememrintahan Umum	%	100	100	100	Kecamatan
6	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	Kecamatan
AN	Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Persentase Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	%	50		80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Persentase Masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik	%			100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Persentase Organisasi Masyarakat dan masyarakat Yang Diberdayakan	%			80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Penanggung Jawab
				2025	2026	
4	Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%			85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	%	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Data Diolah Tim Penyusun RKPD 2025

6.4. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan sebagai instrumen penting dalam menjamin hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat diakses secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tanpa memandang lokasi geografis, status ekonomi, maupun kondisi sosial masyarakat. Urusan SPM terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Tabel 6.2
Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kondisi Awal 2024	Target	
				2025	2026
I	PENDIDIKAN				
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	86	100	100
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	-	meningkat	meningkat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kondisi Awal 2024	Target	
				2025	2026
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	91.28	100	100
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	-	meningkat	meningkat
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	73.5	100	100
II	KESEHATAN				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	96	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi BaruLahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99	100	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	82	100	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	73	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	76	100	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	27	100	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	94	100	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	96	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kondisi Awal 2024	Target	
				2025	2026
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human immunodeficiency Virus*)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	97	100	100
III	PEKERJAAN UMUM				
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minumsehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	91.57	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahanair limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85.74	100	100
IV	PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100
V	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertibanUmum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakanhukum Perda dan perkada	100	100	100
2	Pelayananinformasi rawan bencana	Jumlah Warga Negarayang memperoleh layanan informasi rawan bencana	96	100	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	96	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kondisi Awal 2024	Target	
				2025	2026
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korbanbencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	100	100
VI	SOSIAL				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yangmemperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasartuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	100	100	100

Sumber: Data Diolah Tim Penyusun RKPD 2025

Apabila indicator penerapan SPM dipetakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, maka disajikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 6.3
Kebutuhan Barang dan Jasa Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026

Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2026
[Bidang Urusan] 1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			42,139,109,915
[Program] 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam	100 % 100 % 100 %	33,908,109,915

Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2026
	Pendidikan SMP Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SD Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100 %	
[Kegiatan] 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD Angka Putus Sekolah SD Persentase Bangunan SD/MI Kondisi Baik	100 % 0,10 % 75.00 %	15,264,212,563
1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10000 Peserta Didik	17,281,100
1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	20,200,000
1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	50,500,000
1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5600 Paket	3,315,127,723
1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	3,234,525,000
1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	8,626,578,740
[Kegiatan] 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP Angka Putus Sekolah SMP Persentase Bangunan SMP/MTs Kondisi Baik	100 % 0.30 % 80.00 %	10,070,897,352
1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	7,758,371,410
1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3500 Peserta Didik	15,325,942
1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidikan	272,000,000

Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2026
1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	49 Orang	50,500,000
1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	20,200,000
1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	50,500,000
1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	404,000,000
1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3700 Paket	1,500,000,000
[Kegiatan] 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang Dikelola Persentase PAUD Terakreditasi	235.00 Unit 62.97 %	342,000,000
1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	4 Paket	202,000,000
1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	20,000,000
1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	120,000,000
[Program] 1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	97 %	8,231,000,000
[KEGIATAN] 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah PTK yang Didistribusikan ke Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4750 Orang	8,231,000,000
1.01.04.2.01.0001 Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/	1 Dokumen	51,000,000

Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2026
Kesetaraan	Kesetaraan		
1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50 Laporan	8,180,000,000
[Bidang Urusan] 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			3,499,040,000
[Program] 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Pemeriksaan/Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar Persentase Orang Usia 15-29 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Persentase Orang Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0.14 Rasio	3,499,040,000

Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2026
	Kesehatan Sesuai Standar Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk		
[KEGIATAN] 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,499,040,000
1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.008 Orang	480,938,000
1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.720 Orang	200,000,000
1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.551 Orang	265,886,000
1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25.050 Orang	200,000,000
1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54.784 Orang	200,000,000
1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	194.991 Orang	400,000,000
1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21.102 Orang	293,248,000
1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.860 Orang	246,148,000
1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.799 Orang	200,000,000

Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2026
1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	545 Orang	200,000,000
1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.877 Orang	354,413,000
1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7.600 Orang	458,407,000
[Bidang Urusan] 1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			1,177,000,000
[Program] 1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari (%)	98.00 %	1,176,000,000
[KEGIATAN] 1.03.03.2.01 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang Layak	98 %	1,176,000,000
1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik	1,075,000,000
1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1 Liter/Detik	100,000,000
1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	50 SR	1,000,000
[Program] 1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	96.00 %	1,000,000
[KEGIATAN] 1.03.05.2.01 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	96 %	1,000,000

Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2026
1.03.05.2.01.0025 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Spald) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	212 M³/Hari	1,000,000
[Bidang Urusan] 1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			4,399,000,000
[Program] 1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	96.00 %	4,399,000,000
[KEGIATAN] 1.03.05.2.01 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	96 %	4,399,000,000
1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Unit	300,000,000
1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (Spald) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	505 Rumah Tangga	4,099,000,000
[Bidang Urusan] 1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			3,000,000
[Program] 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	100 %	3,000,000
[KEGIATAN] 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	100 %	3,000,000
1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1,000,000
1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,000,000
1.04.02.2.01.0010 Pendataan Dan Verifikasi Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1,000,000

Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2026
[Bidang Urusan] 1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			3,489,289,500
[Program] 1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda	100 %	34,289,500
[KEGIATAN] 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	34,289,500
1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	35 Orang	25,250,000
1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	9,039,500
[Program] 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana; Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 % 100 % 100 %	555,000,000
[Kegiatan] 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	57933 Orang	65,000,000
1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	65,000,000

Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2026
[KEGIATAN] 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	57933 Orang	210,000,000
1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	45,000,000
1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	360 Orang	10,000,000
1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	25 Unit	35,000,000
1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	240 Kawasan	100,000,000
1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	20,000,000
[KEGIATAN] 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	280,000,000
1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	200,000,000

Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2026
1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	20,000,000
1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	7 Orang	15,000,000
1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	35,000,000
1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	10,000,000
[Program] 1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Ppenyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	2,900,000,000
[KEGIATAN] 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penangangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,900,000,000
1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penangangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,900,000,000
[Bidang Urusan] 1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			800,000,000
[Program] 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Anak Telantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti; Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti; Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar	100 % 100 % 100 % 100 %	500,000,000

Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif 2026
	yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti; Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti		
[KEGIATAN] 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi	100 %	500,000,000
1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 Orang	350,000,000
1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2170 Orang	150,000,000
[Program] 1.06.06 Program Penanganan Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	100 %	300,000,000
[KEGIATAN] 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial	100 %	300,000,000
1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300,000,000

Sumber: Data diolah, 2025

6.5. Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Develompment Goals (TPG/SDGs)

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada

pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan.

Tabel 6.4
Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Suistainable Development Goals (TGG/SDGs)*

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target		OPD Penanggungjawab
						2025	2026	
TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN								
	Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DI MANAPUN							
	Target 1.2 : Pada Tahun 2030, Mengurangi Setidaknya Setengah Proporsi Laki-Laki, Perempuan Dan Anak-Anak Dari Semua Usia, Yang Hidup Dalam Kemiskinan Di Semua Dimensi, Sesuai Dengan Definisi Nasional.							
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	5,02	4.6 - 4.01	4.45 - 3.55	Dinas Sosial
	Target 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.							
2	1.3.1.[a]	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	57,62	80	84	Dinas Kesehatan
3	1.3.1.[b]	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	16,95	20	25	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
4	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	/100rb	0,01	0,02	0,02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	33.507.000	32.000.000	27.600.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target		OPD Penanggungjawab
						2025	2026	
6	1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dok	0	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 02 TANPA KELAPARAN								
	Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN							
	Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
7	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	%	4.58%	4,49%	4,40%	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
8	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	%	2.82%	0,00%	0,00%	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
	Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
9	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	%	5,9	5,9	5,8	Dinas Kesehatan
10	2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	%	2,7	3,6	3,5	Dinas Kesehatan

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target		OPD Penanggungjawab
						2025	2026	
11	2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	Dinas Kesehatan	%	10,2	11	10,5	Dinas Kesehatan
TUJUAN 03 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA								
	Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA							
	Target 3.1 : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
12	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINAS KESEHATAN	Kasus	8	7	7	Dinas Kesehatan
13	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Target 3.2 : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
14	3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angkat Kematian Bagi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	per 1000	0	1	1	Dinas Kesehatan
15	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	per 1000	17	15	14	Dinas Kesehatan
16	3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Dinas Kesehatan	%	0,549	95	95	Dinas Kesehatan
17	3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	per 100 ribu	236	441	375	Dinas Kesehatan
18	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	per 1000	0,07	85	90	Dinas Kesehatan
19	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Dinas Kesehatan	orang	12	>1/10000	>1/10000	Dinas Kesehatan

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target		OPD Penanggungjawab
						2025	2026	
	Target 3.4 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
20	3.4.1.[b]	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	%	28,8	90	90	Dinas Kesehatan
21	3.4.1.[c]	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan	%	30	21,8	21,8	Dinas Kesehatan
	Target 3.7 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
22	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	%	1,6	1,7	01.08	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
23	3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun, umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	%	37	30,3	26,38	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
24	3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	%	2,07	2,06	1,992	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
	Target 3.8 : Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
25	3.8.1.[a]	*Unmet Need* Pelayanan Kesehatan.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	%	7,88	8,1	8,48	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
	Target 3.a : Memperkuat pelaksanaan *the Framework Convention on Tobacco Control WHO* di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.							
26	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan	%	25,05	24	22,2	Dinas Kesehatan
TUJUAN 04 PENDIDIKAN BERKUALITAS								
	Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA							

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target		OPD Penanggungjawab
						2025	2026	
	Target 4.6 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							
27	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	%	92,84	93,09	93,34	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Target 4.c : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
28	4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	%	62,41	62,5	62,75	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	TUJUAN 05 KESETARAAN GENDER							
	Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN							
	Target 5.2 : Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							
29	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Kasus	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
30	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Kasus	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Target 5.3 : Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target		OPD Penanggungjawab
						2025	2026	
31	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Orang	623	601	491	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Target 5.5 : Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
32	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Kursi	4	4	4	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
33	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Orang	2	4	4	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
TUJUAN 06 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK								
	Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA							
	Target 6.1 : Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
34	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Dinas Biciptapera	%	93,98	93,99	94,194	Dinas Biciptapera
	Target 6.2 : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
35	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Dinas Biciptapera	%	90,88	91,22	91,98	Dinas Biciptapera
TUJUAN 08 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI								
	Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA							

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target		OPD Penanggungjawab
						2025	2026	
	Target 8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
36	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Bapperida	%	6,83	4,25	4,95	BAPPERIDA /Bagian Ekonomi
37	8.1.1.[a]	PDB per kapita.	Bapperida	Juta Rupiah	59,31	61,83	64,89	BAPPERIDA /Bagian Ekonomi
	Target 8.2 : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
38	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%	6,61	7	9	DinkopUKM Nakertrans
	Target 8.3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
39	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin.	BPS	%	35,09	36	37	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
40	8.3.1.[a]	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal.	Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	%	1,89	5	10	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Target 8.5 : Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
41	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Rp	18140	19000	20000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
42	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka.	BPS	%	3,02	2,93	2,84	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
43	8.5.2.[a]	Persentase setengah pengangguran.	BPS	%	14,12	12	10	

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target		OPD Penanggungjawab
						2025	2026	
	Target 8.9 : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
44	8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	%	0,81	0,82	0,82	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
45	8.9.1.[a]	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.		Orang	8	20	20	
46	8.9.1.[b]	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Orang	139848	182000	182000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
	Target 8.10 : Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.							
47	8.10.1.(b)	Rasio Kredit UMKM terhadap total kredit perbankan.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	72	73	74	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TUJUAN 09 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR								
	Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI							
	Target 9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
48	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat	%	-	62,1	62,78	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat
	Target 9.2 : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							
49	9.2.1*	Rasio PDB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	%	15,09	15,15	15,17	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target		OPD Penanggungjawab
						2025	2026	
50	9.2.1.[a]	Pertumbuhan PDB industri pengolahan.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	%	4,71	5,99	6,04	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
51	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan.	Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	%	28,18	30	32	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN								
	Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA							
	Target 10.1 : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
52	10.1.1.(a)	Rasio Gini.	Dinas Sosial	Poin	0,319	0,313	0,306	DINAS SOSIAL
53	10.1.1.(c)	Jumlah daerah tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Desa	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
54	10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri.		Desa	33	35	37	
55	10.1.1.(e)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Desa	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN								
	Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN							
	Target 11.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.							
56	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat	%	79,71	82,08	84,93	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target		OPD Penanggungjawab
						2025	2026	
	Target 11.5 : Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang- orang dalam situasi rentan.							
57	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	/100rb	0,01	0,02	0,02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 12 KOMSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB								
	Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN							
	Target 12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
58	12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	%	9428,5	20,03	27,52	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM								
	Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA							
	Target 13.1 : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.							
59	13.01.01	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	/100rb	0,01	0,02	0,02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUT								
	Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
	Target 14.6 : Pada tahun 2020, melarang bentuk- bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO).							
60	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan.	Dinas Peternakan	%	100	73	75	Dinas Peternakan
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARAT								
	Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI							

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target		OPD Penanggungjawab
						2025	2026	
	Target 15.9 : Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.							
61	15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis.	Dinas Lingkungan Hidup	Dok	-	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH								
	Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN							
	Target 16.1 : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.							
62	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polres	Kasus	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
63	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Polres	Orang	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
64	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Polres	Kasus	69	49	42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Target 16.2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.							
65	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	%	0,004	0.004	0.004	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
66	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.		%	4	4	4	
	Target 16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target		OPD Penanggungjawab
						2025	2026	
67	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	%	95,55	96,072	96,718	Badan Keuangan dan Aset Daerah
68	16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	%	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah
69	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B.	Inspektorat	Nilai	65.08 (Nilai Hasil Evaluasi)	67,15	69,22	Bagian Organisasi
	Target 16.7 : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
70	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	%	8,57	8,57	8,57	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
71	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		%	4,87	4,87	4,87	
	Target 16.9 : Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
72	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	Dinas Kependudukan Dan Capil	%	95,46	95	96	Dinas Kependudukan Dan Capil
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN								
	Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
	Target 17.1 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
73	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pendapatan Daerah	%	0,063	4.75%	4.02%	Badan Pendapatan Daerah

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target		OPD Penanggungjawab
						2025	2026	
74	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Bapenda	%	0,003	0.31%	0.27%	Bapenda
75	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Pendapatan Daerah	%	0,041	0,051	0,1028	Badan Pendapatan Daerah
	Target 17.19 : Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
76	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).	Dinas Kependudukan Dan Capil	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan Dan Capil

Sumber: Data diolah Tim RKPD 2025

BAB VII
PENUTUP

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka proses penyusunan RKPD berlandaskan pada prioritas pembangunan yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 dan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Keterkaitan antara dokumen-dokumen ini sangat erat dimana kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada, dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2026 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 diimplementasikan dengan:

1. Tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kabupaten dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026;
3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan APBN, NGO, CSR, dan hibah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka pemulihan ekonomi dan mencapai target sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan/sub kegiatan. Rencana program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2026 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten.

Dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan

Legislatif, dimana nota kesepakatan KUA dan PPAS ini sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD yang mana untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan daerah. Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel, dan benar-benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut di atas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran, dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif, dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparasi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing PD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing PD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan PD pada posisi strategis, dimana PD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian PD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting. Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing PD agar menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026;
2. PD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2026 dengan sebaik baiknya;
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap PD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil- hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Pada akhir tahun anggaran 2026, setiap PD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

7.2. Kesimpulan

1. RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya;
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2026;
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan penahapan kebijakan pembangunan yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tahun 2026 yaitu **"Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan melalui Penguatan Agrobisnis untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"** sehingga program kegiatan di masing-masing PD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian;

4. RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara *sharing* pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya;
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAHARUDDIN ALRIF

Lampiran I: Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	5	Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	80	Desa Bila Riase Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	12	Desa Bila Riase Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	3	Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	1	Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	3	Tersebar Di Tiga Kecamatan (Wt.Pulu, Panca Lautang, Tellu Limpoe), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	3	Panca Lautang,Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	3	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
9	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	3	Watang Sidenreng Dan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	1	Kelurahan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
11	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	600	Kelurahan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
12	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	100	Pekuburan Manisa Kecamatan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
13	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	5	Tersebar Didapil Iv (Kec. Dua Pitu, Pitu Riase, Dan Pitu Riawa), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
14	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	500	Tersebar Didapil Iv (Kec. Dua Pitu, Pitu Riase, Dan Pitu Riawa), Kab. Sidrap	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
15	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	3	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
16	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	3	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
17	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	500	Kelurahan Rijang Pittu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
18	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	2	Kecamatan Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
19	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	1	Kecamatan Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
20	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	10	Tersebar Di Dua Kecamatan (Maritengngae Dan Watang Sidenreng), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
21	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	50	Wanio Timoreng Kecematan Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
22	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	30	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidrap	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
23	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	30	Watang Sidenreng Dan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
24	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	30	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
25	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	10	Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
26	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	30	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
27	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	10	Tersebar Di Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe Dan Watang Pulu, Kab. Sidrap	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
28	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	10	Tersebar Di Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe Dan Watang Pulu, Kab. Sidrap	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
29	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	10	Kecamatan Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
30	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	30	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
31	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	30	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
32	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	100	Pitu Riawa, Pitu Riase, Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
33	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	200	Desa Allakkuang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
34	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	100	Maritengngae Dan Watang Sidenreng,	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
		Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				Kab. Sidenreng Rappang		
35	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1	Tersebar Di Dua Kecamatan (Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidrap	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
36	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3	Watang Pulu, Panca Lautang, Dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
37	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	100	Kel. Lakessi Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
38	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	100	Kel. Lakessi Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
39	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	30	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
40	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3	Watang Sidenreng Dan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
41	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2	Kelurahan Pangkajene , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
42	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	15	Tersebar Di Tiga Kecamatan (Panca Rijang,Baranti,Dan Kulo), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
43	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
44	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
45	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
		dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						
46	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	30	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
47	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3	Maritengngae Dan Watang Sidenreng , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
48	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	30	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
49	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	30	Maritengngae Dan Watang Sidenreng , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
50	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
51	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	30	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
52	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	30	Watang Sidenreng Dan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
53	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
54	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan	30	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
		Fungsi Bangunan Gedung		Strategis Daerah Kabupaten/Kota				
55	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	30	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
56	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Kel. Lakessi Kec. Maritenggae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
57	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	800	Jl. Prof Abd. Rahman Lainding Kel. Manisa Kec, Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
58	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	10	Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
59	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	10	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
60	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	10	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
61	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1	Tersebar Di Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
		Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		penataan bangunan dan lingkungan				
62	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	500	Tersebar Di Kecamatan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
63	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	100	Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
64	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	150	Desa Buae Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
65	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	150	Kel. Pajalele Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
66	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	200	Kel. Wala Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
67	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	50	Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
68	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	100	Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
69	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	100	Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
70	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	75	Desa Bila Riase Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
71	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	50	Desa Bila Riase Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
72	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	3	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
73	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	5	Tersebar Di Tiga Kecamatan (Wt.Pulu,Panca Lautang,Tellu Limpoe), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
74	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	3	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu,	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
		Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		penataan bangunan dan lingkungan		Kab. Sidenreng Rappang		
75	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1200	Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
76	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	100	Kecamatan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
77	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	300	Kelurahan Tanru Tedong, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
78	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	15	Tersebar Di Tiga Kecamatan (Baranti,Kulo, Dan Panca Rijang), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
79	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	3	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
80	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2	Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
81	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	4	Kecamatan Pitu Riawa Dan Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
82	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2	Kecamatan Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
83	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2	Tersebar Di Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe Dan Watang Pulu, Kab. Sidrap	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
84	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	900	Kecamatan Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
85	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	600	Kecanatan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera	
86	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50	Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Kesehatan	
87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Kel. Wala Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Kesehatan	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
88	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Kesehatan	
89	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Kesehatan	
90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	30	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Kesehatan	
91	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	30	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Kesehatan	
92	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh	30	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Kesehatan	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
				Fasilitas Kesehatan Lainnya				
93	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	2	Desa Lise Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
94	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	10	Kec. Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
95	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2	Kel. Bangkai Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
96	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
97	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1	Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
98	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1	Kecamatan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
99	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
100	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
101	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
102	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
103	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
104	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
105	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	200	Tersebar Di Dua Kecamatan (Maritengngae Dan Watang Sidenreng), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
106	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100	Tersebar Di Dua Kecamatan (Maritengngae Dan Watang Sidenreng), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
107	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	8	Kec. Watang Pulu, Panca Lautang, Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
108	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5	Kel. Pajalele Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
109	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50	Kel. Massepe Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
110	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100	Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
111	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5	Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
112	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	6	Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
113	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	3	Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
114	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2	Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
115	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	4	Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
116	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	6	Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
117	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Desa Abbokongan Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
118	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2	Desa Sipodeceng Kec. Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
119	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Desa Salobukkang Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
120	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10	Kec. Watang Pulu , Kec. Tellu Limpoe, Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
121	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
122	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10	Tersebar Di Tiga Kecamatan (Wt.Pulu,Panca Lautang,Tellu Limpoe), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
123	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50	Tersebar Di Tiga Kecamatan (Wt.Pulu,Panca Lautang,Dan Tellu Limpoe), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
124	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
125	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
126	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Pangkajene, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
127	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Kelurahan Rijang Pittu , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
128	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Desa Sereang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
129	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Desa Takkalasi, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
130	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Kelurahan Wala, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
131	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	500	Kelurahan Pangkajene, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
132	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	500	Kelurahan Rijang Pittu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
133	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Kelurahan Majjelling Wattang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
134	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Kelurahan Pangkajene, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
135	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Kelurahan Wala, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
136	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Kelurahan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
137	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Kelurahan Benteng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
138	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Kelurahan Manisa, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
139	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Kelurahan Manisa, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
140	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Desa Kalosi, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
141	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Kecamatan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
142	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100	Tersebar Di Tiga Kecamatan (Baranti,Panca Rijang, Dan Kulo), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
143	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100	Tersebar Di Tiga Kecamatan (Baranti,Kulo, Dan Panca Rijang), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
144	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100	Tersebar Di Tiga Kecamatan (Dua Pitue,Pitu Riawa Dan Pitu Riase), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
145	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	20	Tersebar Didapil Iv (Kec. Dua Pitu, Pitu Riase, Dan Pitu Riawa), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
146	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10	Tersebar Didapil Iv (Kec. Dua Pitu, Pitu Riase, Dan Pitu Riawa), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
147	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10	Tersebar Didapil Iv (Kec. Dua Pitu, Pitu Riase, Dan Pitu Riawa), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
148	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
149	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5	Kec. Tellu Limpoe Dan Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
150	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
151	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
152	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Kelurahan Rijang Pittu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
153	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	20	Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
154	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	20	Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
155	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10	Kec. Panca Rijang, Kulo Dan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
156	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
157	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
158	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5	Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
159	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10	Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
160	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	7	Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
161	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	4	Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
162	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	3	Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
163	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2	Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
164	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	20	Kecamatan Pitu Riawa Dan Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
165	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10	Kecamatan Pitu Riawa Dan Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
166	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5	Kecamatan Watang Pulu, Tellu Limpoe Dan Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
167	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	7	Kecamatan Watang Pulu, Tellu Limpoe Dan Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
168	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	25	Tersebar Di Tiga Kecamatan Kulo, Panca Rijang Dan Kecamatan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
169	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	45	Tersebar Di Tiga Kecamatan Kulo, Panca Rijang Dsn Kecamatan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
170	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2	Kec. Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
171	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10	Kecamatan Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
172	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	8	Kecamatan Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
173	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5	Kecamatan Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
174	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5	Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
175	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2	Kecamatan Maritengngae , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
176	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2	Kecamatan Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
177	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2	Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
178	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	6	Kecamatan Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
179	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	20	Tersebar Di Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Dan Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
180	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	20	Tersebar Di Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Dan Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
181	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, SErta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	6	Kec. Panca Rijang, Kulo Dan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
182	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		Tersebar Di Dua Kecamatan (Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Lingkungan Hidup	
183	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Lingkungan Hidup	
184	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		Kecamatan Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Lingkungan Hidup	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
185	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
186	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	20	Tersebar Di Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe Dan Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
187	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
188	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	30	Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
189	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	30	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
190	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
191	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	30	Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
192	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	50	Bulo Wattang , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
193	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
194	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
195	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
196	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100	Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
197	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	50	Desa Bila Riase Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
198	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	70	Desa Bila Riase Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
199	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	77	Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
200	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	50	Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
201	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	950	Kec. Pitu Riase, Pitu Riawa, Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
202	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30	Desa Mojong Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
203	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100	Desa Passeno, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
204	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100	Sd 1 Timoreng Panua, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
205	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100	Sd 3 Passeno, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
206	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	400	Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
207	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	50	Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
208	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	300	Sd 10 Dan 4 Rappang Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
209	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
210	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	Kecamatan Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
211	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Desa Bila Riase Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
212	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Tersebar Didapil Iv (Kec. Dua Pitu, Pitu Riase, Dan Pitu Riawa), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
213	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	955	Kec. Pitu Riase, Pitu Riawa, Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
214	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100	Desa Bulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
215	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	110	Kel. Wala Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
216	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	1	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
217	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	1	Tersebar Didapil Iv (Kec. Dua Pitu, Pitu Riase, Dan Pitu Riawa), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
218	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	1	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
219	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	1	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
220	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	1	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
221	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	1	Di Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Dan Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
222	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
223	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	80	Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
224	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
225	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
226	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Tersebar Didapil Iv (Kec. Dua Pitu, Pitu Riase, Dan Pitu Riawa), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
227	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
228	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
229	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
230	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Pitu Riawa, Pitu Riase, Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
231	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
232	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1	Bilokka Kecamatan Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
233	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
234	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
235	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
236	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1	Pitu Riawa, Pitu Riase, Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
237	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	
238	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	30	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	
239	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	30	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	
240	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	
241	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	30	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	
242	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	30	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
243	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	
244	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5	Tersebar Dikecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Dan Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	
245	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	300	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perhubungan	
246	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	300	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perhubungan	
247	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	300	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perhubungan	
248	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20	Kelurahan Rijang Pittu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perhubungan	
249	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20	Kelurahan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perhubungan	
250	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50	Kec. Tellu Limpoe Dan Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perhubungan	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
251	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perhubungan	
252	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	Kecamatan Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perhubungan	
253	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
254	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
255	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
256	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Watang Sidenreng Dan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
257	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	Tersebar Di Tiga Kecamatan (Dua Pitue,Pitu Riawa Dan Pitu Riase), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
258	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	Tersebar Didapil Iv (Kec. Dua Pitu, Pitu Riase, Dan Pitu Riawa), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
259	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
260	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
261	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	Kec. Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
262	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Dan Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
263	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1	Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
264	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	40	Kec. Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
265	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1000	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
266	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1000	Kec. Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
267	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1000	Desa Corawali Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
268	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1000	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
269	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1000	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
270	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1000	Watang Sidenreng Dan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
271	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1000	Tersebar Didapil Iv (Kec. Dua Pitu, Pitu Riase, Dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
272	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1000	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
273	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1000	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
274	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1000	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						
275	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1000	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
276	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1000	Kec. Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
277	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1000	Kecamatan Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
278	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1000	Kecamatan Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
279	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
280	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Tersebar Di Dua Kecamatan (Maritengngae Dan Watang Sidenreng), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	
281	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	
282	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	
283	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Tersebar Didapil Iv (Kec. Dua Pitu, Pitu Riase, Dan Pitu Riawa), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	
284	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Kec. Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	
285	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan	17	Kec. Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
				Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				
286	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	
287	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	
288	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Kec. Panca Rijang, Kulo Dan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	
289	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	
290	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Dan Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
291	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
292	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Tersebar Di Dua Kecamatan (Maritengngae Dan Watang Sidenreng), Kab. Sidrap	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
293	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10	Tersebar Di Dua Kecamatan (Maritengngae Dan Watang Sidenreng), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
294	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
295	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
296	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	Watang Sidenreng Dan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
297	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
298	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	Kecamatan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
			Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					
299	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	500	Desa Salobukkang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
300	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5	Tersebar Dapil Iv (Kec. Dua Pitu Riawa, Dan Pitu Riase), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
301	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
302	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
303	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
304	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Kecamatan Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
305	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1	Tersebar Di Dua Kecamatan (Maritengngae Dan Watang Sidenreng), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
306	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2	Tersebar Di Dua Kecamatan (Maritengngae Dan Watang Sidenreng), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
307	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	30	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
308	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	10	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
309	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	30	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
310	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	30	Watang Sidenreng Dan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
311	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	10	Tersebar Didapil Iv (Kec. Dua Pitu, Pitu Riase, Dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
312	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	30	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
313	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	30	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
314	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	30	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
315	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2	Tersebar Di Dua Kecamatan (Maritengngae Dan Watang Sidenreng), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
316	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5	Watang Pulu, Panca Lautang, Dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
317	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	30	Watang Pulu, Panca Lautang, Dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
318	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2	Desa Lise Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
319	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5	Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
320	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	30	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
321	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	30	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
322	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	30	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
323	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
324	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100	Watang Sidenreng Dan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
325	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3	Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
326	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100	Tersebar Di Tiga Kecamatan (Baranti,Kulo Dan Panca Rijang), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
327	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10	Tersebar Di Tiga Kecamatan (Baranti,Kulo, Dan Panca Rijang), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
328	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5	Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
329	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	7	Kec. Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
330	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
331	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
332	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6	Kecamatan Pitu Riawa Dan Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
333	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10	Kecamatan Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
334	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5	Kecamatan Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
335	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100	Tersebar Di Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Dan Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
336	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	9	Kec. Panca Rijang, Kulo Dan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
337	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
338	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
339	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan KP	
340	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	Sekretariat Daerah	
341	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	30	Watang Pulu, Panca Lautang, Dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	Sekretariat Daerah	
342	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Sekretariat Daerah	
343	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	30	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	Sekretariat Daerah	
344	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	30	Watang Sidenreng Dan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Sekretariat Daerah	
345	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	Desa Takkalasi, Kab. Sidenreng Rappang	Sekretariat Daerah	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
346	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	30	Maritengngae Dan Watang Sidenreng, Kab. Sidrap	Sekretariat Daerah	
347	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	30	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Sekretariat Daerah	
348	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	30	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Sekretariat Daerah	
349	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	30	Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Sekretariat Daerah	
350	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	Kec. Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Sekretariat Daerah	
351	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	30	Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Sekretariat Daerah	
352	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6	Kecamatan Pitu Riawa Dan Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang	Sekretariat Daerah	
353	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	Kec. Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kab. Sidrap	Sekretariat Daerah	
354	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2	Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Sekretariat Daerah	
355	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	Sekretariat Daerah	

Lampiran II: Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2026

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Dusun VI Kampung Baru, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Kesehatan	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Jl. Pendidikan Lingunga 2 Salopalakka, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Kesehatan	
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Dusun Bulo Tengnga, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Kesehatan	
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10	Pustu Desa Bulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Kesehatan	
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Pustu Desa Bulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Kesehatan	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Pustu Desa Bulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Kesehatan	
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Dusun I Kadidi Sidenreng, Desa Kanie, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Kesehatan	
8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Dusun 1 Cipotakari Seblah Utara Lapangan Sepak Bola Cipotakari, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Kesehatan	
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Jl. Angkatan 66 Kelurahan Kadidi, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Kesehatan	
10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	Jl. Lanto Daeng Pasewang (PUSKESDES PANGKAJENE), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Kesehatan	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Dusun Bendoro, Dusun Lasilottong, dan Dusun Baramming, , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Kesehatan	
12	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	2	Dusun VI Kampung Baru, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
13	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Kelurahan Batu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
14	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Kelurahan Batu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
15	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1	Kelurahan Batu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
16	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	4	DESA KANIE, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
17	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	4	DESA KANIE, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
18	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5	Dusun Bendoro, Dusun Baramming, Dusun Lasilottong, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
19	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	4	Lingkungan I dan Lingkungan II, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
20	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1	Lingkugan 1 Barukku, Lingkungan 2 Salopalakka, Lingkungan 4 Bolabulu, dan Lingkungan 5 Labobo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Lingkungan Hidup	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
21	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1	Kelurahan Batu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Lingkungan Hidup	
22	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1	Jl. Kemakmuran (SMA 9 SIDRAP) Lingkungan 1 barukku, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Lingkungan Hidup	
23	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1	Desa Dengeng-Dengeng, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Lingkungan Hidup	
24	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1	DUSUN I DAN DUSUN II KANIE, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Lingkungan Hidup	
25	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100	SDN 03 SEREANG, DESA KANIE , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
26	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	SMPN. 4 Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
27	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1	Dusun 2 Cipo, , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
28	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	SMP NEGERI 1 PANGSID (JL. ANDI HASENG), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
29	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100	SD NEGERI 1 PANGSID (JL. ANDI HASENG), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
30	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1600	Dusun 1 Penanong JL. SD 4 Timoreng Panua, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
31	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1600	Dusun Penanong, Jl. SD 5 Timoreng Panua, Kab. Sidrap	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
32	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100	Dusun II Desa Kampale, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
33	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1	Jl. Wele Dusun 1 Kampale, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
34	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	100	Lingkungan II Sudatu Amparita, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
35	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1	Desa Bola Bulu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
36	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	1	Dusun I dan IV, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
37	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1	Dusun I dan IV, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
38	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Dusun Penanong Jl. Cekdam, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
39	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20	Lingkungann 2 Salopalakka, Lingungan 4 Bolabulu, Lingkungan 5 Labobo, Lingkungan 6 Lampiring dan Lingkungan 7 Botto libu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perhubungan	
40	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20	Kelurahan Batu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perhubungan	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
41	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10	Dusun IV dan dusun V , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perhubungan	
42	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20	DESA TANETE, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perhubungan	
43	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10	LINGK I PALLA BESSIE, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perhubungan	
44	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20	Dusun I Kamapale dan Dusun II Kampale, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perhubungan	
45	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10	Desa Kulo Kecamatan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perhubungan	
46	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Kelurahan Batu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	
47	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Desa Dengeng-Dengeng , Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
48	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	Dusun I,II,III,IVdan dusun V, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	
49	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	Kelurahan Macorawalie, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	
50	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	Dusun Bendoro, Dusun Lasilottong dan Dusun Baramming,, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	
51	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	Dusun 1 Kampale dan Dusun 2 Kampale, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	
52	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	Lingkungan I dan Lingkungan II, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	
53	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1	Dusun I dan Dusun II Sukeppe, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Sosial	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
				Kewenangan Kabupaten/ Kota				
54	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	Lingkungan 6 Lampiring, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
55	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	Lingkungan 1 barukku, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
56	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	Lingkungan 6 Lampiring, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
57	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	Lingkungan 7 Botto Libu, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
58	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	Lingkungan 6 Lampiring, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
59	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	Lingkungan 3 Wala, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
60	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Dusun 1 Desa Tanete, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
61	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1	Desa Bulo Wattang, Kab. Sidenreng Rappang		

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Alamat Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
62	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	200	Dusun I dan III, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
63	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	11	Dusun 1,Dusun 2 dan Dusun 3, Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
64	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Dusun I Sudatu (Kelompok Tani Makkawarue 2), Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	

Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah
Tahun 2025

BAPPEDA SIDRAP OFFICIAL

BAPPELITBANGDASIDRAP.ID

BAPPELITBANGDA.SIDRAPKAB.GO.ID